LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan dinamika Kementerian Perhubungan sepanjang Tahun 2018, pelaksanaan kegiatan dan program, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan perhubungan dapat tercapai pada akhir tahun 2018, sebagaimana ditetapkan dalam Reviu Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 maupun RPJMN Tahun 2015-2019. Selain itu, Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, di samping juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2018.

Atas dukungan dan kerja keras seluruh jajaran Kementerian Perhubungan terdapat beberapa indikator kinerja yang telah berhasil dicapai bahkan melampaui target pembangunan sektor perhubungan, namun masih terdapat kendala sehingga indikator kinerja lainnya belum dapat mencapai target.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 masih dijumpai adanya kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi dorongan pencapaian target Tahun 2019 nanti, sekaligus umpan balik bagi jajaran Kementerian Perhubungan dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, saya selaku Menteri Perhubungan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Kementerian Perhubungan yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 ini.

Jakarta, Februari 2019
MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Perhubungan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2019

Inspektur Jenderal
Kementerian Perhubungan

Dr. WAHJU S. UTOMO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 195909061985031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan yaitu terminal bus antar kota antar Provinsi, dermaga penyeberangan, jalur kereta api beserta stasiun, pelabuhan laut, bandar udara, gedung kampus diklat, serta fasilitas sarana, berupa bus, kapal penyeberangan, alat keselamatan pada kereta api, kapal laut, kapal kenavigasian, kapal patroli, pesawat latih maupun fasilitas keselamatan kendaraan darat, laut, dan udara. Dari output pembangunan sarana dan prasarana transportasi diharapkan dapat tercapai *outcome* yang berkesinambungan dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan, konektivitas wilayah di pedalaman untuk kemudahan aksesibilitas.

Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 merupakan tahap keempat pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Kementerian Perhubungan untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Pada Tahun 2018 Kementerian Perhubungan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp48.203.109.426.000,00 (Empat Puluh Delapan Triliun Dua Ratus Tiga Miliar Seratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). Sejalan dengan pelaksanaan anggaran dimaksud, terdapat penyesuaian karena adanya penambahan yang disebabkan oleh luncuran Pinjaman Hibah Luar Negeri/Surat Berharga Syariah Negara dan penggunaan saldo awal Badan Layanan Umum/Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta adanya anggaran belanja tambahan, sehingga anggaran direvisi menjadi sebesar Rp53.421.412.068.000,00 (Lima Puluh Tiga Triliun Empat Ratus Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sedangkan dana optimal yang dimanfaatkan guna mendukung konektivitas nasional sebagai upaya mewujudkan Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah sebanyak Rp45.153.495.831.960,00 (Empat Puluh Lima Triliun Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu

Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 84,52 %. Meskipun tidak keseluruhan dana yang digunakan, namun kinerjanya sangat memuaskan karena melebihi target yang ada.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan yang telah ditetapkan melalui Permenhub Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebanyak 24 (dua puluh empat) IKU. Pencapaian IKU Kementerian Perhubungan Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Uraian IKU yang capaiannya di atas target yang telah ditetapkan sebanyak 13 (tiga belas) IKU, yaitu:
   a. Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional, dengan realisasi capaian kinerja 111,150%;
   b. Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi, dengan realisasi capaian kinerja 103,77%;
   c. Prosentase capaian *On Time Performance* (*OTP*) sektor transportasi, dengan capaian kinerja 109,29%;
   d. Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek, dengan capaian 108,25%;
   e. Tingkat penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan, dengan capaian kinerja 107,05%;
   f. Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi, dengan capaian kinerja 128,09%;
   g. Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi, dengan capaian kinerja sebesar 107,80%;
   h. *Modal share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek, dengan capaian kinerja 103,10%;
   i. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi, dengan realisasi capaian 112,58%;
   j. Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan, dengan realisasi capaian 101,46%;
   k. Keterbukaan Informasi Publik, dengan capaian kinerja 133,33%;
   l. Persentase Kehandalan Sistem Informasi, dengan realisasi capaian 101,54%;
   m. Tingkat Maturasi SPIP, dengan realisasi 159,50%
2. Uraian IKU yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan (100%) sebanyak 4 (empat) IKU, yaitu:
   a. Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan, yaitu mencapai target sebesar 80,00%;

b. Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, yaitu mencapai target rasio 1,52;
c. Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan target sebesar 80,00%;
d. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan, yaitu mencapai target WTP;

3. Uraian IKU yang capaiannya belum sesuai target yang telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) IKU, yaitu:
   a. Rasio Konektivitas antar wilayah, dengan capaian kinerja 95,556%;
   b. Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional, dengan capaian kinerja 97,91%;
   c. Tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan, dengan capaian kinerja 98,46%;
   d. Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat, dengan capaian kinerja 88,98%;
   e. Persentase Indeks Reformasi Birokrasi, dengan capaian kinerja 99,75%;
   f. Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan, dengan capaian kinerja 93,91%
4. IKU yang capaiannya belum diperoleh sebanyak 1 (satu) IKU, yaitu Nilai AKIP Kementerian Perhubungan, karena masih menunggu hasil resmi penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2018 terdapat berbagai penghargaan yang diterima Kementerian Perhubungan yaitu:

1. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun 2018 dengan capaian standar tertinggi, yang keenam kali berturut-turut;
2. Penghargaan *Bronze* sebagai *The Best Technology Innovation* pada *Contact Center Indonesia Award;*
3. Menyelenggarakan Lomba *Transhub Challenge*;
4. Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2018 dengan kategori menuju informatif;
5. Penghargaan *Stand* Terbaik pada Pameran Sinergi Aksi Informasi Dan Komunikasi Publik (SAIK) Tahun 2018;
6. Penghargaan *Stand* Terbaik I Kategori Pelayanan Prima pada Acara Sumatera Selatan *Expo* 2018;
7. Penghargaan *Stand* Favorit pada acara *Budget Execution Expo* Tahun 2018;
8. Indonesia terpilih kembali menjadi Anggota Dewan *International Maritime Organization (IMO*) Kategori C Periode Tahun 2018-2019;

9. Penghargaan dalam bidang penerbangan, yaitu *Federal Aviation Administration* (FAA*) Category I*, *Effective Implementation International Civil Aviation Organization-Universal Safety Oversight Audit Programme (*ICAO-USOAP*)*, dan juga pencabutan pelarangan terbang dari Uni Eropa;
10. Penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) atas keberhasilan menutup 313 cikal bakal perlintasan sebidang Kereta Api dalam waktu 2 (dua) bulan pada awal Tahun 2018;
11. Penganugerahan Aparatur Sipil Negara Inspiratif oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Menerima Apresiasi Pelayanan Publik Arus Mudik Tahun 2018; dan
13. Peningkatan partisipasi masyarakat pada Mudik Gratis Sepeda motor dengan Kapal Laut Tahun 2018 dengan peningkatan sebesar 57% dibanding Tahun 2017.

Permasalahan yang mempengaruhi tercapainya target IKU Kementerian Perhubungan akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya, yaitu masih terdapat *backlog* antara target dan capaian kinerja untuk beberapa indikator kinerja dikarenakan adanya perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh pada rencana strategis, kegiatan dan program Kementerian Perhubungan, misalnya perubahan prioritas pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran per kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan perwujudan visi Presiden pada sektor transportasi maupun dukungan menajemen tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Untuk meminimalisir permasalahan di masa mendatang, Kementerian Perhubungan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memastikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, dan memenuhi target yang telah ditetapkan;
2. Menyusun dokumen perencanaan yang selaras antara unit kerja kepada unit kerja di atasnya dengan jangka waktu minimal 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan;
3. Melaksanakan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran, misalnya: melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, meningkatkan efektifitas pelaksanaan anggaran, mendorong efisiensi pelaksanaan anggaran, dan meningkatkan ketertiban penyampaian data *supplier* dan data kontrak;
4. Melakukan evaluasi secara berkala atas pencapaian Indikator Kinerja Utama, melalui pelaporan pancapaian melalui aplikasi *e-Performance* secara benar, lengkap dan tepat waktu;
5. Melakukan penyempurnaan IKU yang bersifat *outcome* sampai dengan level Eselon I, dan selaras antara unit kerja dengan unit kerja di bawahnya;

6. Meningkatkan komitmen Pimpinan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam penerapan manajemen berbasis kinerja khususnya dalam hal perencanaan kinerja, maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
7. Setiap unit Eselon I dan II aktif dalam melakukan bimbingan teknis terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maupun kelengkapan data, baik yang bersifat manual maupun *online* sehingga unit kerja di bawahnya memiliki persepsi dan pemahaman yang sama;
8. Secara berkesinambungan terus diupayakan penciptaan inovasi guna mendukung perbaikan kinerja di masa mendatang;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja melalui aplikasi *e-performance* secara berkesinambungan yang dilakukan setiap Triwulan guna meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, termasuk melakukan penyempurnaan atas sistem aplikasi *e-performance* dan perangkat monitoring yang relevan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ii

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR LAMPIRAN xxiv

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Tugas Dan Fungsi Kementerian Perhubungan 2

I.2.1 Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan 3

I.2.2 Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 18

I.2.3 Tujuan Kementerian Perhubungan 22

I.2.4 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 22

I.3 Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan 26

I.4 Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan 28

I.4.1 Potensi 29

I.4.2 Isu Strategis 29

I.4.3 Permasalahan 31

I.5 Sistematika Laporan 35

BAB II PERENCANAAN KINERJA 37

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis 37

II.2 Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 45

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 56

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja 57

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja 59

III.2.1 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Pertama 59
III.2.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Kedua 79
III.2.3 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Ketiga 98
III.2.4 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Keempat 127
III.2.5 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Kelima 155
III.2.6 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Keenam 163
III.2.7 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Ketujuh 167
III.2.8 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Kedelapan 169
III.2.9 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Kesembilan 176
III.2.10 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Kesepuluh 181
III.2.11 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Kesebelas 184
III.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya 205
III.4 Capaian Lainnya Kementerian Perhubungan Tahun 2018 211
III.5 Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018 217
III.5.1 Alokasi Total Anggaran Tahun 2018 217
III.5.2 Analisis Dana Yang Tidak Terserap 225
BAB IV PENUTUP 232
IV.1 Kesimpulan 232
IV.2 Saran Tindak Lanjut 243
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Komposisi Pegawai Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Berdasarkan Gender 26

Tabel I.2 Komposisi Pegawai Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....27

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 43

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018.....46

Tabel II.3 Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 49

Tabel II.4 Anggaran Dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018.....54

Tabel II.5 Anggaran Dalam Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 55

Tabel III.1 Lintas Penyeberangan Perintis yang Belum Terealisasi Tahun 2018 63

Tabel III.2 Pembangunan Bandar Udara Baru Tahun 2015-2019 67

Tabel III.3 Target PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional Tahun 2018.....71

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2015-2018....75

Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Darat Tahun 2015-2018 75

Tabel III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Laut Tahun 2015-2018 75

Tabel III.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Udara Tahun 2015-2018 76

Tabel III.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Perkeretaapian Tahun 2015-2018 76

Tabel III.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Jabodetabek Tahun 2015-2018.....77

Tabel III.10 Jumlah Kejadian Kecelakaan Dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2018 80

Tabel III.11 Kejadian Kecelakaan Pesawat Udara AOC 121 dan 135 Tahun 2018 82

Tabel III.12 Jumlah Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018 85
Tabel III.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional Tahun 2015-2018 86
Tabel III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut Tahun 2015-2018 87
Tabel III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara Tahun 2015-2018 87
Tabel III.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2015-2018 87
Tabel III.17 Gangguan Kemananan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018 94
Tabel III.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Tahun 2015-2018 95
Tabel III.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut Tahun 2015-2018 96
Tabel III.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Udara Tahun 2015-2018 96
Tabel III.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Perkeretaapian Tahun 2015-2018 97
Tabel III.22 Pengembangan BRT (Bus Rapid Transit) Tahun 2018 99
Tabel III.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Tahun 2015-2018.....103
Tabel III.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Transportasi Darat Tahun 2015-2018.....103
Tabel III.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2015-2018.....104
Tabel III.26 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Nasional Tahun 2018.....106
Tabel III.27 Rencana Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi Darat Tahun 2018 107
Tabel III.28 Rencana Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi Laut Tahun 2018 108
Tabel III.29 Rencana Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi Udara Tahun 2018 108
Tabel III.30 Rencana Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018 108
Tabel III.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Nasional Tahun 2015-2018 109
Tabel III.32 Pencapaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat Tahun 2018.....111

Tabel III.33 Pergerakan Pesawat Pada 5 Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) Niaga Berjadwal Tahun 2018 115
Tabel III.34 Pembatalan Pergerakkan Pesawat Tahun 2018 115
Tabel III.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Tahun 2015-2018 118
Tabel III.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat Tahun 2015-2018 118
Tabel III.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Laut Tahun 2015-2018 119
Tabel III.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Udara Tahun 2015-2018 119
Tabel III.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Perkeretaapian Tahun 2015-2018 119
Tabel III.40 Kecepatan Rata-Rata Jabodetabek Tahun 2018 121
Tabel III.41 Kecepatan Rata-Rata Akibat Kebijakan Ganjil Genap Tahun 2018 122
Tabel III.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Angkutan Umum Pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek Tahun 2015-2018 123
Tabel III.43 Penerapan Standar Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Tahun 2018 125
Tabel III.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Penerapan Standar Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi yang Dilaksanakan Tahun 2015-2018 126
Tabel III.45 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Tahun 2015-2018 134
Tabel III.46 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat Tahun 2015-2018 135
Tabel III.47 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Tahun 2015-2018 135
Tabel III.48 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Udara Tahun 2015-2018 135
Tabel III.49 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Perkeretaapian Tahun 2015-2018 136
Tabel III.50 Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Tahun 2018 141
Tabel III.51 Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Yang Tidak Dilaksanakan Tahun 2018 144

Tabel III.52 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Tahun 2015-2018.....149
Tabel III.53 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat Tahun 2015-2018 149
Tabel III.54 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut Tahun 2015-2018 149
Tabel III.55 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Udara Tahun 2015-2018 150
Tabel III.56 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Perkeretaapian Tahun 2015-2018 150
Tabel III.57 Jumlah Penumpang Trans Jakarta Tahun 2018.....153
Tabel III.58 Perbandingan Realisasi Kinerja *Modal Share* (Pangsa Pasar) Angkutan Umum Perkotaan Di Wilayah Jabodetabek Tahun 2015-2018 154
Tabel III.59 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Tahun 2015-2018 161
Tabel III.60 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Transportasi Darat Tahun 2015-2018 161
Tabel III.61 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Transportasi Laut Tahun 2015-2018 161
Tabel III.62 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Transportasi Udara Tahun 2015-2018 162
Tabel III.63 Rincian Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2015-2018 165
Tabel III.64 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2018 166
Tabel III.65 Penyerapan SDM Lulusan Diklat Transportasi Tahun 2018 167
Tabel III.66 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Tahun 2015-2018 169
Tabel III.67 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pemanfaatan Penelitian Sebagai Rekomendasi Kebijakan Tahun 2015-2018..... 175
Tabel III.68 Key Process Area Pada Model Penghitungan IACM.....177
Tabel III.69 Pernyataan Pada Level 3 IACM 177
Tabel III.70 Hasil Penilaian IACM Kementerian Perhubungan Tahun 2018.....178

Tabel III.71 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan Tahun 2015-2018 180
Tabel III.72 Rincian Jabatan Fungsional Tahun 2018 182
Tabel III.73 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Dan Teknisi Penerbangan Yang Bersertifikat Tahun 2015-2018 183
Tabel III.74 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2018 186
Tabel III.75 Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2018 188
Tabel III.76 Penilaian AKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2017 189
Tabel III.77 Perbandingan Realisasi Kinerja NIlai AKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2018 192
Tabel III.78 Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2018.....195
Tabel III.79 Perbandingan Realisasi Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015-2018 197
Tabel III.80 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kehandalan Sistem Informasi Tahun 2015-2018 198
Tabel III.81 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2015-2018 201
Tabel III.82 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2018 204
Tabel III.83 Pencapaian Target Dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 205
Tabel III.84 Penyerapan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2018.....208
Tabel III.85 Efisiensi Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018 210
Tabel III.86 Rincian Jenis Belanja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 per Eselon I.....219
Tabel III.87 Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018.....220
Tabel III.88 Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan Per Triwulan Tahun 2018.....221
Tabel III.89 Daya Serap Sisa Dana (Total) Kementerian Perhubungan Tahun 2018 225
Tabel IV.1 Resume Hasil Realisasi Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 234
Tabel IV.2 Resume Realisasi Kinerja Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018.....240

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Peninjauan Pembangunan Landas Pacu Ketiga Bandar Udara Soetta 2

Gambar I.2 Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 16

Gambar I.3 Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ)..... 17

Gambar I.4 Konektivitas Antar Wilayah di Seluruh Nusantara 18

Gambar I.5 Peresmian Operasional Terminal Tipe A Pondok Cabe 20

Gambar I.6 Kampus BP2IP Padang Pariaman, Sumatera Barat..... 21

Gambar I.7 Bandar Udara Soa Bajawa, NTT 23

Gambar I.8 Peta Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 25

Gambar I.9 Diagram Komposisi Pegawai Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Berdasarkan Gender 27

Gambar I.10 Diagram Komposisi Pegawai Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 28

Gambar I.11 LRT Palembang, Sumatera Selatan 30

Gambar I.12 Masyarakat Menerobos Palang Pintu Perlintasan Kereta Api 31

Gambar I.13 Wisuda Terpadu BPSDM Perhubungan 32

Gambar I.14 Penjajakan Kerja Sama ITS dengan Korea Selatan 34

Gambar I.15 Kemacetan Akibat Dominasi Moda Jalan 34

Gambar II.1 Peresmian Kereta Bandara Soekarno Hatta 38

Gambar II.2 Peninjauan KA Perkotaan Yogyakarta 39

Gambar II.3 Bandara Award 2018 40

Gambar II.4 Bus JR Connexion..... 40

Gambar II.5 Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Sumatera Utara 40
Gambar II.6 Kuliah Umum di PIP Makassar oleh Kepala BPSDM Perhubungan 41
Gambar II.7 Temu Karya Peneliti 41
Gambar II.8 Pembukaan Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat oleh STIP, Serang 42
Gambar II.9 Penerapan Inapornet Pada Pelabuhan 42
Gambar III.1 Grafik Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2018 60
Gambar III.2 Pelabuhan Penyeberangan Raha, Sulawesi Tenggara 62
Gambar III.3 Grafik Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Darat Tahun 2018 ... 64
Gambar III.4 Grafik Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Laut Tahun 2018 65
Gambar III.5 Grafik Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Udara Tahun 2018 .. 66
Gambar III.6 Lokasi Pembangunan Bandar Udara Tahun 2018 Dalam Peta Luasan Cakupan Pelayanan Bandar Udara di Indonesia 66
Gambar III.7 Peresmian Kereta Api Bandar Udara Minangkabau, Sumatera Barat 69
Gambar III.8 Grafik Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018 71
Gambar III.9 Grafik Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Jabodetabek Tahun 2018 74
Gambar III.10 Diagram Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 77
Gambar III.11 Diagram Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Darat Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 77
Gambar III.12 Diagram Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Laut Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 78
Gambar III.13 Diagram Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Udara Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 78
Gambar III.14 Diagram Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 78
Gambar III.15 Diagram Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Jabodetabek Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 78
Gambar III.16 Grafik Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional Tahun 2018 79
Gambar III.17 Grafik Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut Tahun 2018 80
Gambar III.18 Grafik Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara Tahun 2018 81
Gambar III.19 *Rampcheck* Kelaikan Terbang Pesawat udara oleh Dirjen Perhubungan Udara 81

Gambar III.20 Grafik Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018 84
Gambar III.21 Diagram Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 88
Gambar III.22 Diagram Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 88
Gambar III.23 Diagram Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 88
Gambar III.24 Diagram Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 89
Gambar III.25 Grafik Capaian Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Tahun 2018 89
Gambar III.26 Grafik Capaian Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut Tahun 2018 90
Gambar III.27 Grafik Capaian Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Udara Tahun 2018 92
Gambar III.28 Pemeriksaan X-Ray di Bandar Udara 93
Gambar III.29 Grafik Capaian Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018 94
Gambar III.30 Diagram Capaian Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Tahun 2018 97
Gambar III.31 Diagram Capaian Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut Tahun 2018 97
Gambar III.32 Diagram Capaian Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Udara Tahun 2018 98
Gambar III.33 Diagram Capaian Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018 98
Gambar III.34 Grafik Capaian Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Tahun 2018 98
Gambar III.35 Grafik Capaian Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Transportasi Darat Tahun 2018 100
Gambar III.36 Grafik Capaian Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018 101

Gambar III.37 Diagram Capaian Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Tahun 2018 104
Gambar III.38 Diagram Capaian Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Transportasi Darat Tahun 2018 104
Gambar III.39 Diagram Capaian Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Transportasi Perkeretaapian Tahun..... 105
Gambar III.40 Grafik Capaian Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Nasional Tahun 2018 105
Gambar III.41 Diagram Capaian Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Nasional Tahun 2018 109
Gambar III.42 Grafik Capaian Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Tahun 2018 110
Gambar III.43 Grafik Capaian Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat Tahun 2018 111
Gambar III.44 Grafik Capaian Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Laut Tahun 2018 114
Gambar III.45 Grafik Capaian Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Udara Tahun 2018 114
Gambar III.46 Grafik Capaian Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportas Perkeretaapian Tahun 2018 117
Gambar III.47 Diagram Capaian Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Tahun 2018..... 120
Gambar III.48 Diagram Capaian Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat Tahun 2018..... 120
Gambar III.49 Diagram Capaian Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Laut Tahun 2018..... 120
Gambar III.50 Diagram Capaian Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Udara Tahun 2018..... 121
Gambar III.51 Diagram Capaian Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi PerkeretaapianTahun 2018..... 121
Gambar III.52 Grafik Capaian Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Angkutan Umum pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek Tahun 2018 122

Gambar III.53 Diagram Capaian Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Angkutan Umum pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek Tahun 2018 123
Gambar III.54 Grafik Capaian Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan pada Tahun 2018 123
Gambar III.55 Diagram Capaian Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 127
Gambar III.56 Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Tahun 2018 127
Gambar III.57 Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat Tahun 2018 129
Gambar III.59 Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Tahun 2018 130
Gambar III.60 Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Udara Tahun 2018 131
Gambar III.61 Pesawat Perintis Tipe Twin Otter 132
Gambar III.62 Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018 133
Gambar III.63 Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 136
Gambar III.64 Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 136
Gambar III.65 Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 137
Gambar III.66 Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Udara Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 137
Gambar III.67 Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 ... 137
Gambar III.68 Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Tahun 2018 138
Gambar III.69 Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat Tahun 2018 139

Gambar III.70 Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut Tahun 2018 141
Gambar III.71 Pembangunan Pelabuhan Laut Batu Tuas, NTT (2018) 143
Gambar III.72 Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana a Transportasi Udara Tahun 2018 146
Gambar III.73 Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018 147
Gambar III.74 Pembangunan KA Lintas Solo-Kedungbanteng sepanjang 47,87 km 147
Gambar III.75 Kegiatan Pemasangan wesel pada jalur kereta api 148
Gambar III.76 Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 150
Gambar III.77 Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 151
Gambar III.78 Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 151
Gambar III.79 Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Udara Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 151
Gambar III.80 Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 ... 152
Gambar III.81 Grafik Capaian *Modal Share* (Pangsa Pasar) Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek Tahun 2018 152
Gambar III.82 Bus JR Conection 153
Gambar III.83 Diagram Capaian *Modal Share* (Pangsa Pasar) Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek Tahun 2018 154
Gambar III.84 Grafik Capaian Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Tahun 2018 155
Gambar III.85 Grafik Capaian Rasio Layanan Transportasi Darat pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Tahun 2018 156
Gambar III.86 Grafik Capaian Rasio Layanan Transportasi Laut pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Tahun 2018 157
Gambar III.87 Pembangunan Kapal Laut Perintis 158
Gambar III.87 Grafik Capaian Rasio Layanan Transportasi Udara pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Tahun 2018 159

Gambar III.88 Gambar Lokasi Bandar Udara Rawan Bencana dan Perbatasan 2015 – 2019 159
Gambar III.89 Gambar Lokasi Bandar Udara Perpanjangan Runway Untuk Didarati ATR 42 dan 72 160
Gambar III.90 Diagram Capaian Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 162
Gambar III.91 Diagram Capaian Rasio Layanan Transportasi Darat pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019.....162
Gambar III.92 Diagram Capaian Rasio Layanan Transportasi Laut pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019.....163
Gambar III.93 Diagram Capaian Rasio Layanan Transportasi Udara pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019.....163
Gambar III.94 Grafik Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan 164
Gambar III.95 Diagram Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 166
Gambar III.96 Grafik Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi.....167
Gambar III.97 Kampus Terpadu ATKP Makassar, Sulawesi Selatan 168
Gambar III.98 Diagram Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 169
Gambar III.99 Grafik Persentase Pemanfaatan Penelitian yang Dijadikan Bahan Rekomendasi Kebijakan 171
Gambar III.100 Diagram Persentase Pemanfaatan Penelitian yang Dijadikan Bahan Rekomendasi Kebijakan Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 175
Gambar III.101 Grafik Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan.....178
Gambar III.102 Diagram Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019.....181
Gambar III.103 Grafik Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat 181

Gambar III.104 Pelantikan Terpadu Perwira Transportasi Indonesia Tahun 2018 (21 September 2018).....183
Gambar III.105 Diagram Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 184
Gambar III.106 Grafik Persentase Indeks Reformasi Birokrasi.....184
Gambar III.107 Diagram Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 186
Gambar III.108 Grafik Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan 186
Gambar III.109 Diagram Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 188
Gambar III.110 Grafik Keterbukaan Informasi Publik.....192
Gambar III.111 Diagram Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019.....197
Gambar III.112 Grafik Persentase Kehandalan Sistem Informasi 197
Gambar III.113 Diagram Persentase Kehandalan Sistem Informasi Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019.....199
Gambar III.114 Grafik Tingkat Maturasi SPIP.....199
Gambar III.115 Penyerahan Nilai Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2018 200
Gambar III.116 Diagram Tingkat Maturasi SPIP Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 202
Gambar III.117 Grafik Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018.....202
Gambar III.118 Diagram Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 204
Gambar III.119 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2018.211
Gambar III.120 Penghargaan *Bronze* sebagai *The Best Tecnology Innovation* pada *Contact Center* Indonesia Award 211
Gambar III.121 Penyelenggaraan *Transhub Challenge*.....212
Gambar III.122 Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Publik.....212
Gambar III.124 Penghargaan Stand Terbaik pada Pameran Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) Tahun 2018 212
Gambar III.123 Penghargaan Stand Terbaik I Kategori Pelayanan Prima Acara Sumatera Selatan Expo 2018.....213

Gambar III.125 Penghargaan Stand Favorit pada acara Budget Execution Expo Tahun 2018 213
Gambar III.126 Penghargaan Dalam Bidang Penerbangan Tahun 2018.....214
Gambar III.127 Penyerahan Penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) 214
Gambar III.128 Penganugerahan Aparatur Sipil Negara Inspiratif Tahun 2018 214
Gambar III.129 Pembangunan Sarana Transportasi Darat Tahun 2018 215
Gambar III.130 Pembangunan Sarana Transportasi PerkretaapianTahun 2018 215
Gambar III.131 Pembangunan Sarana Transportasi Laut Tahun 2018 216
Gambar III.132 Pembangunan Sarana Transportasi Udara Tahun 2018 216
Gambar III.133 Pembangunan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2018 216
Gambar III.134 Penyerahan DIPA Kementerian Perhubungan oleh Presiden RI.....217

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Lampiran 3 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Lampiran 4 Revisi I Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Lampiran 5 Rencana Aksi Atas Revisi I Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Lampiran 6 Revisi II Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Lampiran 7 Rencana Aksi Atas Revisi II Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Lampiran 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Lampiran 9 Pedoman Penghitungan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Manual IKU) Tahun 2018

Lampiran 10 Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2018 Kementerian Perhubungan

Lampiran 11 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Terhadap Target Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018

Lampiran 12 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Kemenhub Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Kemenhub Tahun 2015-2018

Lampiran 13 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019

Lampiran 14 Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2018

Lampiran 15 Trayek Pelayanan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Tahun 2015 -2018

Lampiran 16 Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun 2018

Lampiran 17 Lintas Penyeberangan Komersil yang Beroperasi Tahun 2018

Lampiran 18 Daftar Pelabuhan Yang Melayani Angkutan Laut (Lampiran Kepmenhub Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhanan Nasional)

Lampiran 19 Bandar Udara Dalam Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Lampiran Permenhub Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional)

Lampiran 20 Daftar Perkotaan Pengembangan Bus BRT Tahun 2018

Lampiran 21 Daftar Standar Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Tahun 2018

Lampiran 22 Daftar Alokasi Bantuan dan Status Aset Bus Ukuran Sedang Bus Rapid Transit Tahun Anggaran 2018 (Lampiran Kepmenhub Nomor KP 1814 Tahun 2018)

Lampiran 23 Daftar Alokasi Bantuan dan Status Aset Bus Sekolah Ukuran Sedang Tahun Anggaran 2018 (Lampiran Kepmenhub Nmor KP 1815 Tahun Tahun 2018)

Lampiran 24 Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil

Lampiran 25 Bandar Udara Kategori Daerah Terisolir, Rawan Bencana Dan Perintis (Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional)

Lampiran 26 Deregulasi Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 2018

Lampiran 27 Daftar Penelitian Yang Dilaksanakan Tahun 2018

Lampiran 28 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Lampiran 29 Rekapitulasi Persentase Kehandalan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Lampiran 30 Hasil Penilaian Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2018

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu prasyarat terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya, dibutuhkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi dari program dan kegiatan dari unit kerja yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Menteri Perhubungan atas penggunaan seluruh sumber daya yang melibatkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018.

LKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2018 menyajikan gambaran secara transparan atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2018 sebagai upaya strategis yang optimal dijalankan oleh Kementerian Perhubungan guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden. Dengan melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 881 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dimana dalam target capaian periode 5 (lima) tahunan ditetapkan sejumlah sasaran yang tertuang dalam RKA Kementerian Perhubungan.

Guna mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan Sasaran Strategis, dilakukan pengukuran kinerja, dimana capaian kinerja Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan DIPA Tahun 2018 beserta revisinya, sebagai

tolok ukur keberhasilan Kementerian Perhubungan, sehingga dapat ditemukenali sejumlah celah kinerja (*performance gap*) guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

I.2. Tugas Dan Fungsi Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, bahwa Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara, serta menyelenggarakan fungsi :



Gambar I.1.
Peninjauan Pembangunan Landas Pacu Ketiga Bandar Udara Soetta (21 Juni 2018)

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi, aksesabilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di daerah;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; dan
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

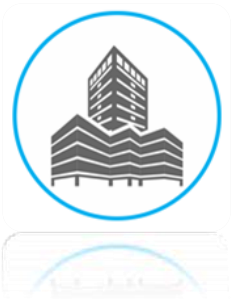
I.2.1. Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan

Struktur organisasi Kementerian Perhubungan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Namun pada akhir tahun 2018, struktur organisasi Kementerian Perhubungan diubah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yang efektif diberlakukan pada Januari 2019.

Struktur organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek juga mengalami perubahan, melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, yang mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Struktur organisasi Kementerian Perhubungan terdiri dari 9 (sembilan) unit Eselon I.A, 4 (empat) Staf Ahli Menteri dan 3 (tiga) Pusat, dengan susunan, sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal



Tugas: Melaksanakan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Fungsi :

a. Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perhubungan;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perhubungan;
d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sekretariat Jenderal terdiri atas 7 (tujuh) biro dan 3 (tiga) Pusat, yaitu:

a. Biro Perencanaan;
b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
c. Biro Keuangan;
d. Biro Hukum;
e. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN;
f. Biro Umum; dan
g. Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Struktur organisasi Kementerian Perhubungan juga memiliki 3 (tiga) Pusat di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan, yaitu:

a. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan;
b. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan; dan
c. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dimana KNKT merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, KNKT dibantu Sekretariat KNKT yang secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal. Tata kelola organisasi Sekretariat KNKT telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Selain itu, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, disebutkan bahwa untuk pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran, yang merupakan lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Mahkamah Pelayaran diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran, dimana dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Mahkamah Pelayaran yang secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Fungsi:



a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yaitu:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
b. Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat;
c. Direktorat Sarana Perhubungan Darat;
d. Direktorat Prasarana Perhubungan Darat;
e. Direktorat Angkutan dan Multimoda; dan
f. Direktorat Pembinaan Keselamatan.

Namun, pada Desember 2018, terjadi restrukturisasi Ditjen Perhubungan Darat, yang dilegalkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sehingga perubahan nomenklatur unit kerja pada Ditjen Perhubungan Darat yang efektif diberlakukan pada Januari 2019, yaitu:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
b. Direktorat Lalu Lintas Jalan;
c. Direktorat Angkutan Jalan;
d. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
e. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;
f. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

3. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi laut.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu:

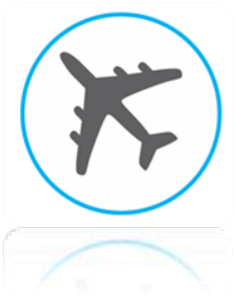
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
c. Direktorat Kepelabuhanan;
d. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
e. Direktorat Kenavigasian; dan
f. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

4. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan.

Fungsi :



a. Perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
b. Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengoperasian pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengoperasian pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yaitu:

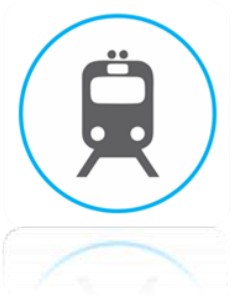
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b. Direktorat Angkutan Udara;
c. Direktorat Bandar Udara;
d. Direktorat Keamanan Penerbangan;
e. Direktorat Navigasi Penerbangan; dan
f. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

5. Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian.

Fungsi :



a. Perumusan kebijakan di bidang penyelengggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelengggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelengggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelengggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelengggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Direktorat dengan nomenklatur yaitu:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
c. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
d. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
e. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

6. Inspektorat Jenderal

Tugas: Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas :

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
b. Inspektorat I;
c. Inspektorat II;
d. Inspektorat III;
e. Inspektorat IV; dan
f. Inspektorat V.

Inspektorat Jenderal juga mengalami restrukturisasi organisasi melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sehingga perubahan nomenklatur unit kerja pada Inspektorat Jenderal yang efektif diberlakukan pada Januari 2019, yaitu:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
b. Inspektorat I;
c. Inspektorat II;
d. Inspektorat III;
e. Inspektorat IV; dan
f. Inspektorat Investigasi.

7. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Tugas: Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.

Fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan, dukungan teknis penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi;
d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan terdiri atas:

a. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda;
c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara.

8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Tugas: Menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

Fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
b. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Pusat Pengembangan, yaitu:

a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; dan
e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Kementerian Perhubungan telah menetapkan susunan struktur organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), yang merupakan unit organisasi khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Susunan struktur organisasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (BPTJ), yang disempurnakan pada akhir tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (BPTJ).

Pembentukan BPTJ merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 yang telah ditetapkan pada 18 September 2015, dengan tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegritasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
c. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan

rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

d. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
e. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
f. Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan Pelaksanaan Program Kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
g. Penyiapan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
h. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;
i. Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas Provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*);
j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
k. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya; dan
l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Dengan moto "*Seamless Transportation Through Integration*", Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berkomitmen untuk memberikan jasa pelayanan sistem transportasi yang baik bagi masyarakat lewat program kerja serta koordinasi integrasi dengan pihak pihak terkait di wilayah Jabodetabek.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek juga mengalami restrukturisasi organisasi yang efektif diberlakukan pada Januari 2019 melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (BPTJ), sehingga perubahan nomenklatur unit kerja menjadi:

a. Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
b. Direktorat Prasarana;
c. Direktorat Lalu Lintas; dan
d. Direktorat Angkutan.

10. Staf Ahli Menteri

Merupakan unsur pembantu Menteri Perhubungan di bidang tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Staf Ahli Menteri memiliki tugas untuk memberikan telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

a. Staf Ahli Menteri terdiri atas 4 (empat) jabatan, yaitu:
b. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan;
c. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
d. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan; dan
e. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan.

Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Setjen.

11. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan adalah unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan, pengembangan sistem, serta pengelolaan data dan layanan operasional sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan rencana strategis, pengelolaan program, perumusan dan pembinaan pelaksanaan standar kebijakan dan tata kelola, serta;
b. manajemen resiko sistem teknologi informasi dan komunikasi
c. Penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur;
d. Penyiapan pengelolaan data dan layanan operasional sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
e. Penyusunan rencana, program, anggaran, urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan administrasi barang milik negara serta

evaluasi dan pelaporan

12. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan merupakan unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, peningkatan sistem dan inovasi pelayanan transportasi berkelanjutan.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 pasal 894, dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor transportasi;
b. Penyiapan pembinaan dan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan; dan
c. Pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja, anggaran dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara (BMN), pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan ketatausahaan.

13. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi kemitraan/investasi, kerja sama luar negeri, serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional menyeleggarakan fungsi:

a. Penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi kemitraan/investasi di bidang transportasi;
b. Penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri;
c. Penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi; dan
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

14. Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas:

a. Melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi;
b. Memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi pihak terkait; dan
c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.

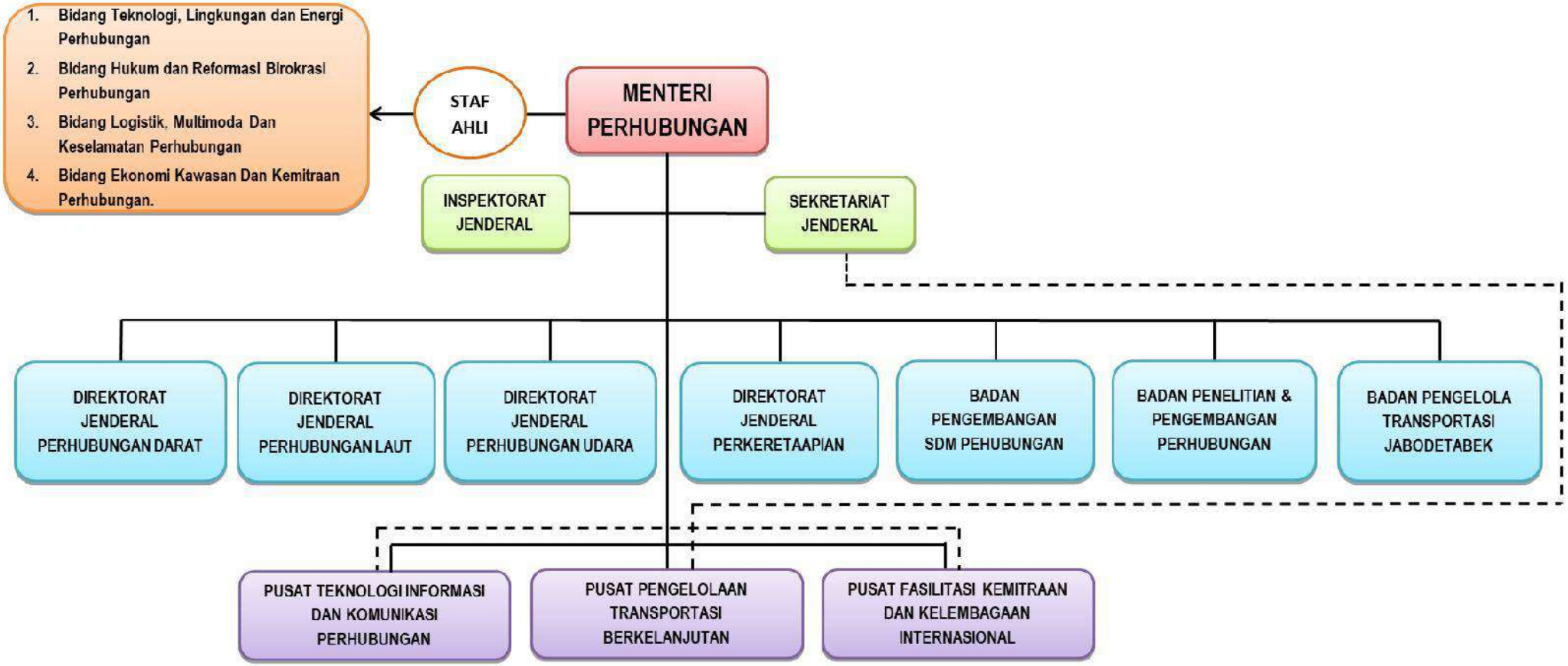
15. Mahkamah Pelayaran

Mahkamah Pelayaran bertugas untuk melaksanakan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal terhadap kecelakaan yang disebabkan oleh ada/tidaknya kelalaian atau kesalahan nahkoda atau perwira kapal lainnya dalam menerapkan standar profesi kepelautan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1999 Pasal 1 dinyatakan bahwa Mahkamah Pelayaran adalah lembaga Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan.

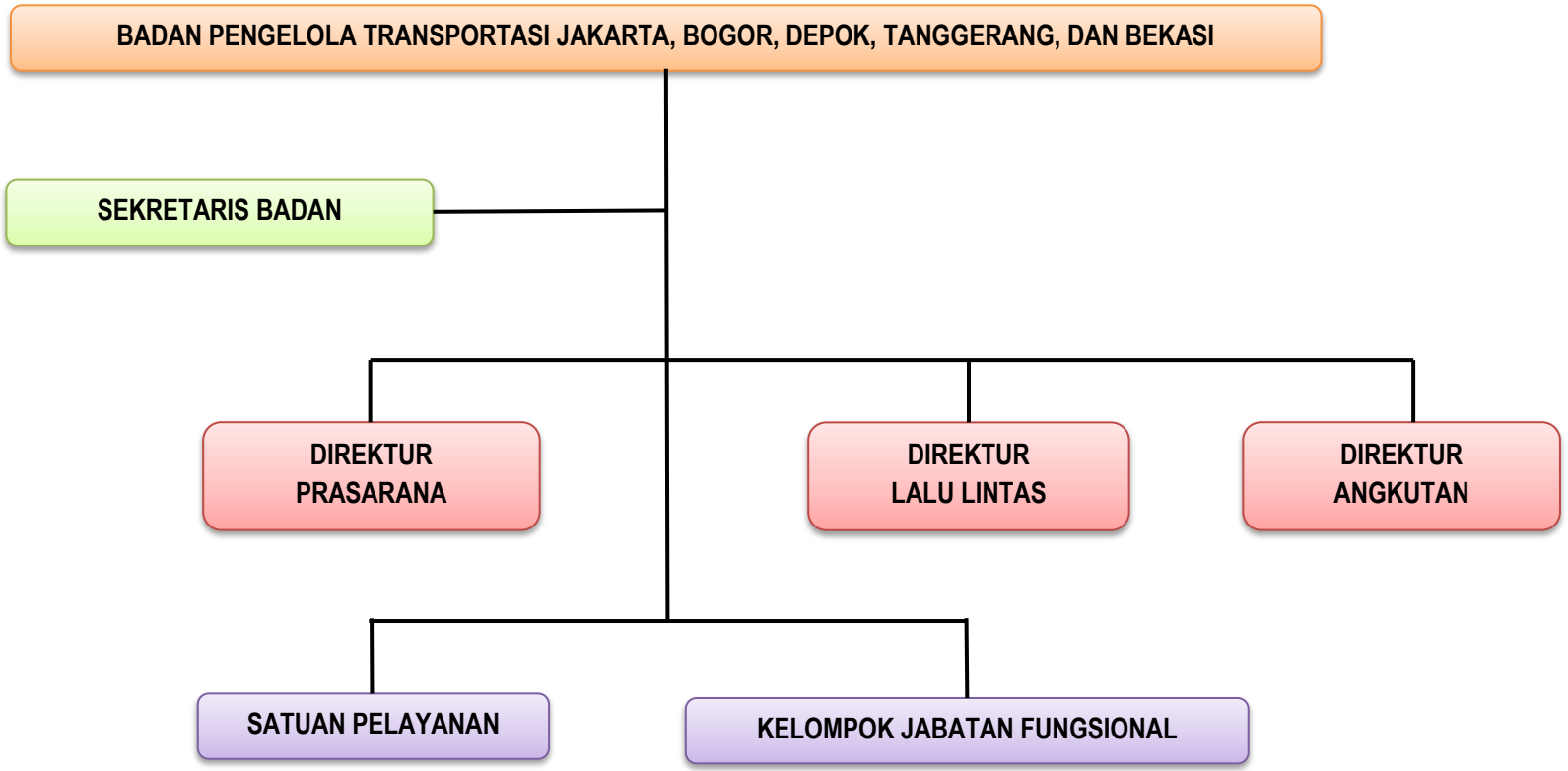
Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1999 Pasal 3, Mahkamah Pelayaran bertugas:

a. Penelitian sebab-sebab kecelakaan kapal dan peraturan ada atau tidak adanya kesalahan dan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nahkoda atau pemimpin kapal dan atau Perwira Kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
b. Penjatuhan sanksi administratif kepada Nahkoda atau pemimpin kapal dan atau Perwira Kapal yang memiliki sertifikasi keahlian pelaut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan.

Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada **Gambar I.2** berikut:



Gambar I.2.
Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan



Gambar I.3.
Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ)

I.2.2. Visi Dan Misi Kementerian Perhubungan

Dengan memperhatikan berbagai tantangan pembangunan nasional dan capaian pembangunan selama ini dan visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yaitu: “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” .

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dilakukan melalui misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

I.2.2.1. Visi Kementerian Perhubungan

Perwujudan visi pembangunan nasional dalam sektor transportasi yaitu dengan “Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”. Hal tersebut merupakan cita-cita Kementerian Perhubungan dimana konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Konektivitas Nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.



Gambar I.4.
Konektivitas Antar Wilayah di Seluruh Nusantara

Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.

Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif.

Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*) serta dapat berperan dalam pengembangan wilayah.

I.2.2.2. Misi Kementerian Perhubungan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka ditetapkan misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi
5. Meningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi;
6. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten; dan
7. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi, penjabaran dari masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi

   Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi *zero to accident*. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi,

pembenahan regulasi di bidang keselamatan/keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan;

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah

   Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah;



Gambar I.5.
Peresmian Operasional
Terminal Tipe A Pondok Cabe

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi

   Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas ketidakpastian situasi keuangan dunia tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi;

4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi

   Misi meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi terus diarahkan untuk pemenuhan akan peningkatan permintaan pelayanan transportasi, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan transportasi tetap mencukupi;

5. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi

   Di tengah keterbatasan anggaran belanja pemerintah di dalam penyediaan infrastruktur perlunya mendorong peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sehingga nantinya anggaran belanja pemerintah diarahkan

untuk membangun infrastruktur yang bersifat pelayanan publik dan dinilai tidak layak secara finansial;

6. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan dan kelembagaan sebagai upaya peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi

   Sesuai dengan prinsip *good governance* melalui penerbitan Undang-Undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi antara peran Pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (*regulatory reform*) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi;

7. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten



Gambar I.6.
Kampus BP2IP Padang Pariaman, Sumatera Barat

   Pelaksanaan restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi;

8. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim

   Sebagai upaya untuk pengembangan jasa transportasi di masa depan, Kementerian Perhubungan secara terus menerus meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang transportasi serta peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi

yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (*global warming*) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

I.2.3. Tujuan Kementerian Perhubungan

Menjabarkan visi Kementerian Perhubungan, maka tujuan pembangunan transportasi oleh Kementerian Perhubungan adalah:

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan;
3. Meningkatkan pelayanan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
5. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

I.2.4. Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Dalam peta strategis Kementerian Perhubungan memiliki 11 sasaran strategis yang disusun dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card (BSC)* dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. *Stakeholders Perspective*

   Sasaran Strategis 1 adalah Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan.

   Dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu Rasio konektivitas antar wilayah.

2. *Customer Perspective*

   a. Sasaran Strategis 2 adalah Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

      Dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu:

      1) Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional;

2) Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi;

b. Sasaran Strategis 3 adalah Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1) Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
2) Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional;
3) Persentase capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi;
4) Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek;
5) Tingkat penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan.

c. Sasaran Strategis 4 adalah Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1) Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi;
2) Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi;
3) *Modal share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek.

d. Sasaran Strategis 5 adalah Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

Dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.



Gambar I.7.
Bandar Udara Soa Bajawa, NTT

3. *Internal Process Perspective*

a. Sasaran Strategis 6 adalah Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi.

Dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Sasaran Strategis 7 adalah Terlaksananya pengembangan sumber daya manusia transportasi.

Dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase penyerapan lulusan diklat transportasi.

c. Sasaran Strategis 8 adalah Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan.

Dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan.

d. Sasaran Strategis 9 adalah Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

   Dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan.

4. *Learn and Growth Perspective*

   a. Sasaran Strategis 10 adalah Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan Profesional.

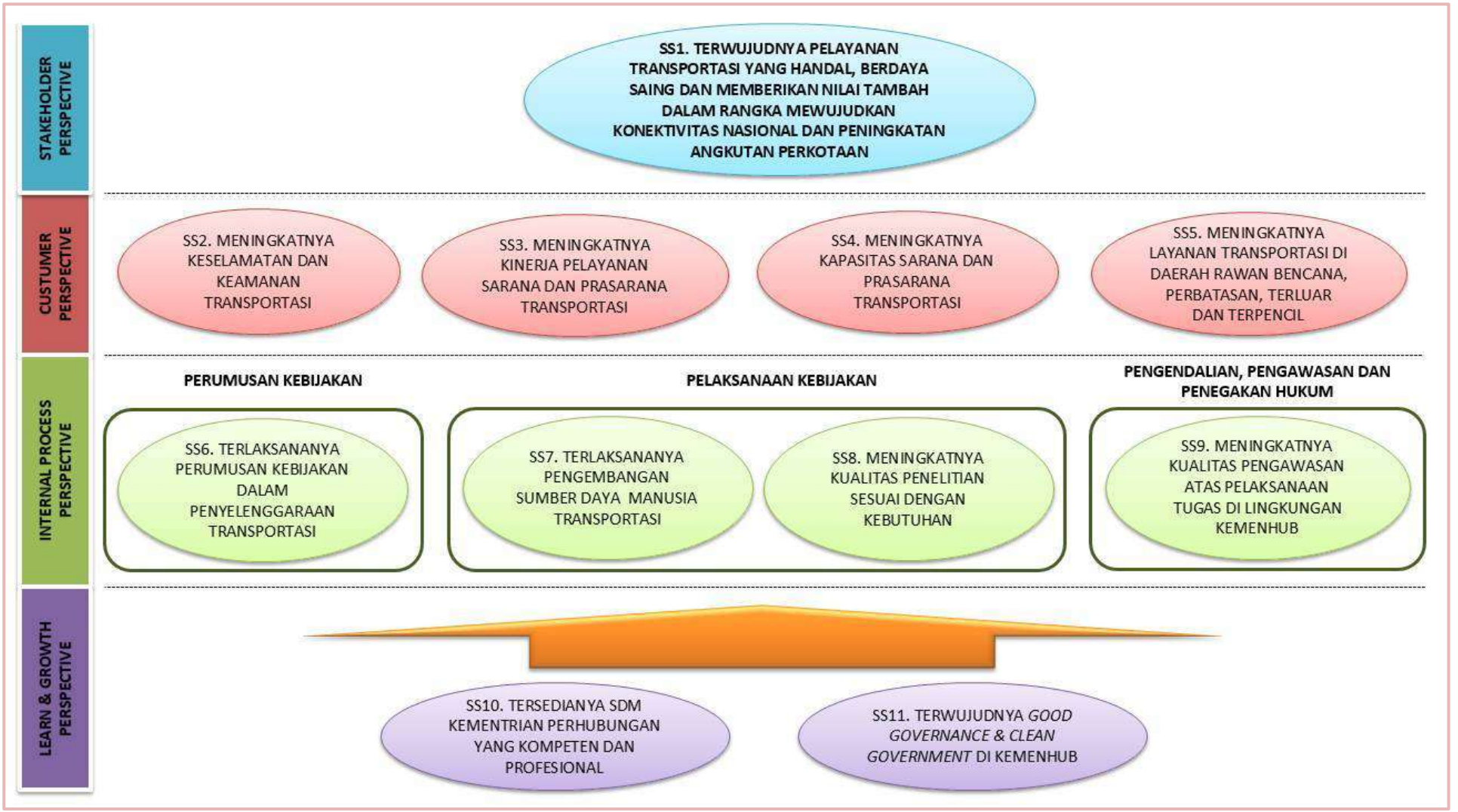
      Dengan Indikator Kinerja Utama yaitu persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat.

   b. Sasaran Strategis 11 adalah Terwujudnya *good governance and clean government* di Kementerian Perhubungan.

      Dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu:

      1) Persentase indeks reformasi birokrasi;
      2) Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan;
      3) Nilai AKIP Kementerian Perhubungan;
      4) Keterbukaan informasi publik;
      5) Persentase kehandalan sistem informasi;
      6) Tingkat maturasi SPIP;
      7) Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan.

Peta strategis Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada **Gambar I.8** berikut



Gambar I.8.
Peta Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019
Sumber : Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

I.3. Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan

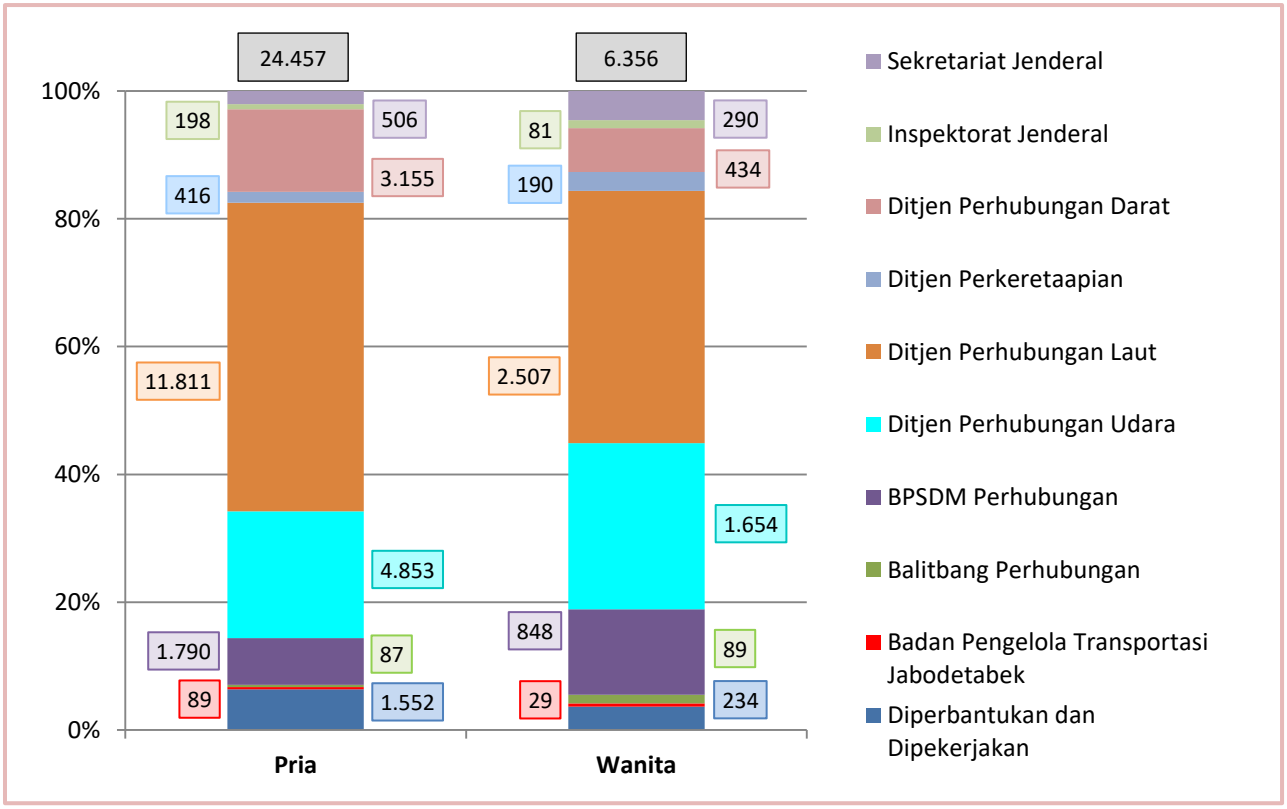
Sampai dengan akhir tahun 2018 Kementerian Perhubungan memiliki jumlah pegawai sebanyak 30.813 (tiga puluh ribu delapan ratus tiga belas) orang pegawai yang tersebar di 9 (sembilan) unit kerja Eselon I, yang terdiri dari 24.457 (dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh) pegawai pria dan sebanyak 6.356 (enam ribu tiga ratus lima puluh enam) pegawai wanita, dengan perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan wanita yaitu pada Tabel I.1 berikut:

Tabel I.1
Komposisi Pegawai Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Berdasarkan Gender

No	Unit Eselon I	Pria		Wanita		Total	
1	Sekretariat Jenderal	506	1,64%	290	0,94%	796	2,58%
2	Inspektorat Jenderal	198	0,64%	81	0,26%	279	0,91%
3	Ditjen Perhubungan Darat	3.155	10,24%	434	1,41%	3.589	11,65%
4	Ditjen Perkeretaapian	416	1,35%	190	0,62%	606	1,97%
5	Ditjen Perhubungan Laut	11.811	38,33%	2.507	8,14%	14.318	46,47%
6	Ditjen Perhubungan Udara	4.853	15,75%	1.654	5,37%	6.507	21,12%
7	BPSDM Perhubungan	1.790	5,81%	848	2,75%	2.638	8,56%
8	Balitbang Perhubungan	87	0,28%	89	0,29%	176	0,57%
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	89	0,29%	29	0,09%	118	0,38%
10	Diperbantukan dan Dipekerjakan	1.552	5,04%	234	0,76%	1.786	5,80%
Jumlah		**24.457**	**79,37%**	**6.356**	**20,63%**	**30.813**	**100,00%**

Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi (Posisi 31 Desember 2018)

Komposisi berdasarkan gender dapat digambarkan pada diagram berikut:



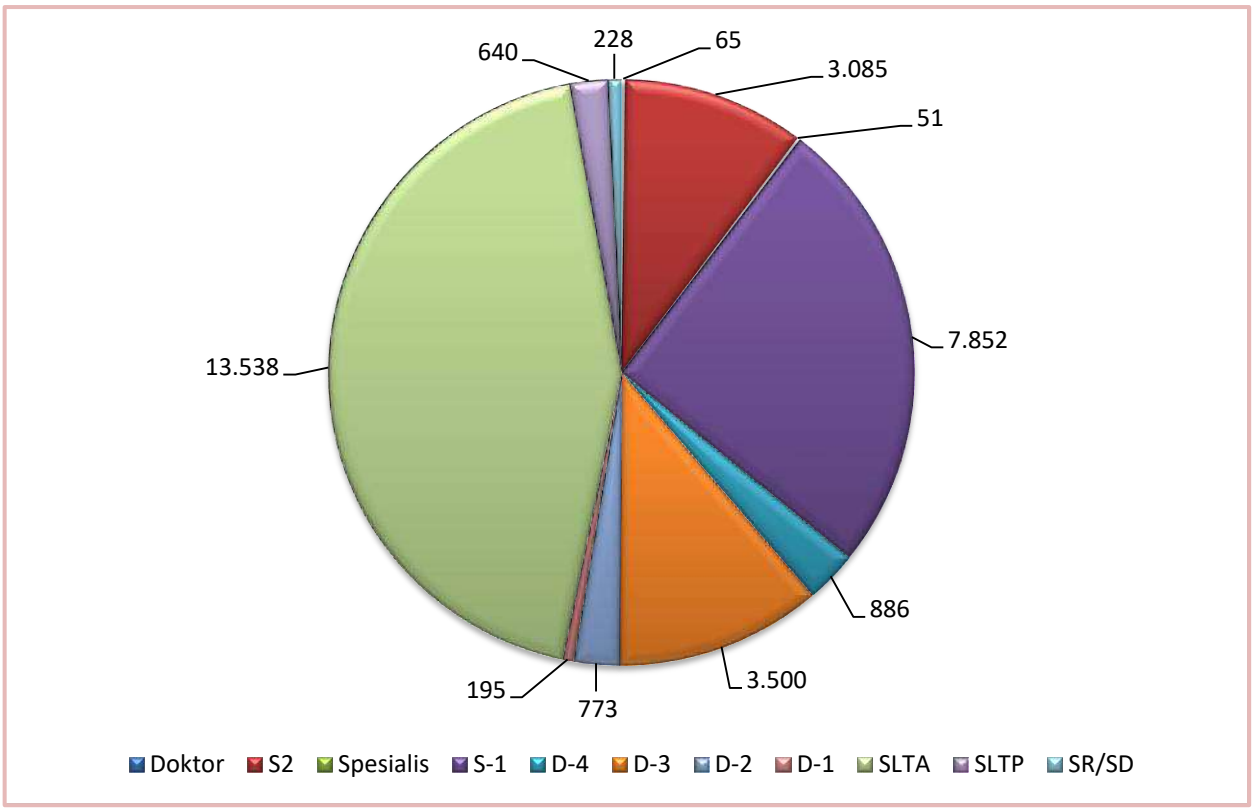
Gambar I.9.
Diagram Komposisi Pegawai Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Berdasarkan Gender

Dalam menjalankan tugasnya, pada tahun 2018 Kementerian Perhubungan didukung oleh pegawai dari berbagai macam latar pendidikan, dengan komposisi pegawai Kementerian Perhubungan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel I.2 berikut:

Tabel I.2
Komposisi Pegawai Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan											Jumlah
		Doktor	S2	Spesialis	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA	SLTP	SR/SD	
1	Sekretariat Jenderal	10	186	1	288	13	96	3	2	188	5	4	**796**
2	Inspektorat Jenderal	2	70	1	136	10	37	-	-	22	1	-	**279**
3	Ditjen Perhubungan Darat	3	284	2	1.050	106	301	41	6	1.582	130	84	**3.589**
4	Ditjen Perkeretaapian	2	140	-	287	21	74	-	2	75	4	1	**606**
5	Ditjen Perhubungan Laut	3	881	3	3.487	193	1.368	27	78	7.760	415	103	**14.318**
6	Ditjen Perhubungan Udara	1	479	14	1.591	227	751	239	55	3.088	43	19	**6.507**
7	BPSDM Perhubungan	33	911	22	674	224	233	87	8	414	21	11	**2.638**
8	Balitbang Perhubungan	9	85	1	45	6	14	-	-	16	-	-	**176**
9	BPTJ	2	33	-	41	8	13	-	-	17	3	1	**118**
10	Diperbantukan Dan Diperkerjakan	-	16	7	253	78	613	376	44	376	18	5	**1.786**
JUMLAH		**65**	**3.085**	**51**	**7.852**	**886**	**3.500**	**773**	**195**	**13.538**	**640**	**228**	**30.813**

Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi (Posisi 31 Desember 2018)



Gambar I.10.
Diagram Komposisi Pegawai Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

I.4. Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan

Kementerian Perhubungan memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur transportasi. Dalam mencapai sasaran strategis Kementerian Perhubungan tersebut tentunya tidaklah mudah, karena potensi yang ada, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan infrastruktur transportasi. Ruang lingkup penulisan Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan ini adalah pencapaian target Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2018, dimana sepanjang tahun 2018 berbagai upaya yang telah dilakukan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai target pembangunan sektor transportasi yang dilaporkan hasilnya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kementerian Perhubungan Tahun 2018 ini.

I.4.1. Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dimana luas perairannya lebih luas dari luas daratan, dimana sesuai geo politik posisi Indonesia sangat strategis berada diantara benua Asia dan Australia serta diapit antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yang menempatkan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam kualitas perdagangan global yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan Australia, melewati wilayah perairan kontinental yang dibagi dalam 3 (tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, yakni Alur Laut Kepulauan I untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Ke Samudera Hindia atau sebaliknya, Alur Laut Kepulauan II untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok ke Samudera Hindia atau sebaliknya, Alur Laut Kepulauan III untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram,Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu sebelah Barat Pulau Sawu ke Samudera Hindia dan sebaliknya, Selat Leti ke Laut Timor atau sebaliknya, Laut Banda ke Laut Arafura atau sebaliknya, Laut Sawu sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudera Hindia atau sebaliknya.

Selain itu penetapan posisi pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan internasional cukup tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan efisiensi tata kelola pelabuhan sehingga upaya mendorong peningkatan daya saing produk Indonesia. Mengingat posisi Indonesia yang terdiri dari perairan dan kepulauan tentunya memiliki kendala atau pun tantangan yaitu terjadinya disparitas harga, diantara wilayah Barat dan Timur Indonesia hal ini diakibatkan tingginya biaya logistik, oleh karena itu pemerintah sejak tahun 2015 telah menyediakan program Tol Laut dan penyediaan kapal ternak sebagai upaya penurunan harga daging terutama menjelang hari raya keagamaan. Khusus untuk program tol laut Kementerian Perhubungan telah menyediakan subsidi bagi pengangkutan khusus barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.

I.4.2. Isu Strategis

Pembangunan sistem transportasi yang merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, di samping berperan dalam

mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia menghadapi tantangan berat untuk terus berbenah menuju kualitas infrastruktur yang handal. Berdasarkan *Global Competitiveness Index 2018* yang dirilis oleh *World Bank* pada Oktober 2018, secara umum infrastruktur Indonesia berada di peringkat 71 dari 140 negara dengan nilai 66,8. Dari penilaian tersebut, efisiensi pelayanan transportasi perkeretaapian berada pada peringkat 19 dengan nilai 4,7. Efisiensi pelayanan transportasi udara peringkat 49 dengan nilai 5,0 sedangkan efisiensi pelayanan transportasi laut peringkat 61 dengan nilai 4,2.

Isu strategis yang berkembang pada proses pembangunan transportasi tahun 2018 ada 2 (dua), yaitu:

1. Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

   Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antar wilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

2. Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan



Gambar I.11.
LRT Palembang, Sumatera Selatan

   Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Walaupun demikian, pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota menengah dan kecil.

I.4.3. Permasalahan

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Kementerian Perhubungan senantiasa berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Permasalahan transportasi yang masih dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya. Kendati demikian, Kementerian Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi yang ada, yaitu:

1. Belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi.

   Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan transportasi yang meliputi angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, angkutan penyeberangan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Jumlah kejadian dan fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan merupakan yang paling tinggi bila dibandingkan moda lainnya. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan ini akibat kurangnya disiplin pengguna jalan dan rendahnya tingkat kelaikan armada.



Gambar I.12.
Masyarakat Menerobos
Palang Pintu Perlintasan Kereta Api

2. Belum optimalnya penanganan perlintasan tidak sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Menyangkut penanganan perlintasan tidak sebidang antara jalan KA dengan jalan, dalam UU nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian diamanahkan tidak diizinkan perlintasan tidak sebidang antara jalan KA dengan jalan. Pelaksanaan mengalami kendala khususnya terkait masalah wewenang antara jalan nasional, provinsi, dimana terkait dengan kemampuan anggaran dalam pembuatan *flyover/underpass*, hal ini sangat penting dalam rangka pencegahan tingginya kecelakaan.

3. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

   Saat ini tingkat kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi masih belum optimal, dimana masih terdapat daerah rawan kecelakaan yang belum dipasang pagar pengaman jalan, palang perlintasan sebidang jalur kereta api, masih belum optimalnya tingkat kecukupan dan keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, serta masih terdapatnya kinerja yang kurang pada peralatan navigasi udara. Hal ini menjadi permasalahan yang harus ditangani untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi yang ditujukan dalam rangka meningkatkan rasa aman dan kenyamanan pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan dalam menuju target *zero accident*.

4. Ketimpangan muatan angkutan dari Kawasan Barat ke Timur

   Salah satu kendala muatan angkutan laut, adalah adanya ketimpangan muatan yang terjadi, dimana arah muatan dari kawasan Barat telah mendominasi jalan distribusi ke kawasan Timur, sebaliknya angkutan pelayaran mengalami kesulitan dalam mencari muatan balik dari kawasan Timur ke wilayah Barat, sehingga hal itu perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk mengembangkan sumber daya alam di wilayahnya.

5. Kurang optimalnya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi.

   Perlindungan lingkungan terkait dengan penyelenggaraan transportasi saat ini dapat dikatakan belum optimal, mengingat peningkatan emisi gas buang dari kendaraan tidak diiringi dengan usaha mereduksi pengaruh emisi gas buang, misalnya mekanisme *punishment* untuk kendaraan yang tidak lolos uji emisi.

6. Terbatasnya kualitas dan kuantitas kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi.

   Meningkatnya pembangunan infrastruktur transportasi menimbulkan konsekuensi akan pemenuhan sumber daya manusia transportasi yang berdaya saing. Pemenuhan akan sumber



Gambar I.13.
Wisuda Terpadu BPSDM Perhubungan

daya manusia transportasi (regulator dan operator) yang berdaya saing menemui beberapa hambatan antara lain adalah terbatasnya ketersediaan kesempatan sekolah dan diklat transportasi, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga pendidik transportasi. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat dalam penyelenggaraan transportasi menyebabkan sumber daya manusia transportasi perlu ditingkatkan agar tetap memiliki daya saing.

7. Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga auditor internal serta penggunaan aspek pengaruh teknologi informasi secara optimal.

   Terkait dengan belum optimalnya tindak lanjut hasil audit lebih banyak disebabkan karena permasalahan sumberdaya manusia auditi, dan kurangnya kesadaran objek audit untuk menindaklanjuti hasil audit, serta kompleksitas kasus yang terjadi. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum sesuai kebutuhan, kompetensi tenaga auditor yang belum merata, *Standar Operating Procedure* (*SOP*) kegiatan internal belum tersusun dengan baik, Sistem Informasi Pengawasan (SIP) yang belum dimanfaatkan secara maksimal, menjadi beberapa permasalahan terkait dengan sumber daya manusia (tenaga auditor internal). Berkaitan dengan hal tersebut tindaklanjut rekomendasi hasil audit perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan reformasi birokrasi.

8. Peneliti adalah modal utama yang cukup menentukan kualitas dan produktivitas hasil penelitian dan pengembangan transportasi. Tingkat penguasaan seorang peneliti terhadap bidang keilmuan akan sangat mempengaruhi performa penelitian, dan sampai dengan saat ini peneliti dengan penguasaan bidang teknis transportasi masih sangat terbatas, terlebih lagi untuk bidang keilmuan perekayasaan teknologi transportasi.

   Adanya tuntutan peran yang lebih besar untuk melaksanakan kegiatan penelitian terapan yang berorientasi ke arah pengembangan teknologi juga memberikan implikasi terhadap kebutuhan sarana prasarana pendukung. Salah satunya adalah melalui rencana pengadaan unit pelaksana teknis (balai penelitian/laboratorium) guna mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian terapan di samping penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan teknis. Namun demikian adanya moratorium pegawai dan penundaan pembangunan balai dikarenakan kebijakan penghematan anggaran menjadikan rencana tersebut tidak dapat terealisasi.

9. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan.



Gambar I.14.
Penjajakan Kerja Sama *ITS* dengan Korea Selatan
(13 April 2018)

Teknologi bidang transportasi pada prinsipnya memberikan dampak signifikan terhadap penataan dan pengaturan sistem transportasi di Indonesia. Beberapa konsep pengembangan teknologi melalui *Intelligent Transport System* (*ITS*) akan memberikan kemudahan dalam manajemen transportasi, misalnya *Bus Rapid Transit* (*BRT*), *Advanced Traffic Signal Control Systems* (*ATSCS*), yaitu suatu sistem yang mengontrol sinyal kepadatan lalu lintas secara *real time*, dan *Integrated Traffic Management Center* (*ITMC*) yaitu menyediakan informasi lalu lintas secara *real time* dengan pusat kendali di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Namun kendala pemanfaatannya, misalnya pengoperasian dan perawatan BRT yang belum optimal oleh Pemda penerima BRT dari Kementerian Perhubungan.

10. Masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi.

    Masih rendahnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi dipengaruhi oleh faktor komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas resiko dan permasalahan lahan termasuk masalah perizinan yang berlaku di Indonesia;

11. Belum optimalnya peralihan transportasi barang yang didominasi moda jalan.



Gambar I.15.
Kemacetan Akibat Dominasi
Moda Jalan

Pemilihan moda transportasi darat banyak dipilih oleh perusahaan jasa pengiriman ekspedisi dikarenakan beberapa kelebihannya, salah satunya adalah tidak terikat oleh waktu dimana pengiriman dapat dilakukan kapan saja apabila kuota pengiriman telah tercapai. Namun tingginya beban jalan pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan jalan, kemacetan, serta dampak lain seperti meningkatnya polusi udara, inefisiensi penggunaan BBM dan meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Masih minimnya peralihan moda transportasi barang yang didominasi moda jalan menjadikan peran transportasi lainnya kurang optimal, khususnya transportasi laut dan udara. Transportasi laut dan udara lebih banyak mendominasi pengangkutan komoditas/barang pada wilayah lain di luar Pulau Jawa atau wilayah terpencil. Namun optimalisasi pola pengangkutan dalam mewujudkan konektivitas nasional belum terwujud dengan baik, sehingga optimalisasi

pengembangan angkutan non darat sangat dibutuhkan ke depan khususnya dalam sistem distribusi barang dan komoditas.

12. Tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil dalam transportasi.

    Penggunaan BBM untuk pengoperasian kendaraan/angkutan saat ini menjadi beban berat bagi pemerintah. Dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi dan meningkatnya harga BBM di pasar dunia, penggunaan energi alternatif/bahan bakar non BBM yang ramah lingkungan untuk pengoperasian kendaraan/angkutan saat ini merupakan suatu keharusan. Selain mempunyai keuntungan ekonomis penggunaan energi alternatif non BBM juga dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

13. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi.

    Tidak bisa dipungkiri bahwa ongkos transportasi publik maupun biaya logistik di Indonesia masih tinggi, yang disebabkan oleh belum terwujudnya integrasi antar moda transportasi secara menyeluruh yang dapat mengefisienkan waktu, biaya, dan tenaga.

I.5. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinejra organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisais kinerja tahun ini dnegan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan data peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB V LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tantangan dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Melalui pendekatan Renstra yang transparan dan sinergi, instansi pemerintah dapat memaduserasikan visi, misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Perencanaan kinerja Kementerian Perhubungan disusun melalui 2 (dua) tahapan perencanaan, yaitu tahapan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 ditetapkan berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Perhubungan. Rencana Kerja tersebut merupakan penjabaran dari Reviu Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan tujuan dan sasarannya. Selanjutnya kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 tersebut menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan mulai unit kerja Eselon I sampai unit kerja Eselon II sesuai dengan fungsinya. Rencana kerja setiap unit kerja Eselon I dan Eselon II tersebut akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana kinerja tahunan masing-masing unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II yang selanjutnya menjadi perjanjian kinerja atau kontrak kinerja dengan Pimpinan Kementerian Perhubungan Tahun 2018.

Sejalan dengan visi pembangunan nasional “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama, yang salah satu sasaran pembangunan sektor unggulan adalah aspek maritim dan kelautan yang memuat upaya membangun konektivitas nasional.

Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali kedalam agenda pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan.



Gambar II.1.
Peresmian Kereta Bandara Soekarno Hatta
(2 Januari 2018)

Sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional dan dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang terjadi, maka telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 yang semula telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 430 Tahun 2015 dan telah direviu melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 873 Tahun 2017, dan terakhir direviu melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 881 Tahun 2018. Penyempurnaan dimaksud berkenaan antara lain dengan adanya kebijakan di tingkat nasional berupa ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional termasuk perubahan terakhirnya melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Upaya Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong dalam sektor transportasi, yaitu dengan "Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah". Hal tersebut merupakan cita-cita Kementerian Perhubungan dimana konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Untuk mewujudkannya, Kementerian Perhubungan telah menetapkan sasaran dan strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan, melalui strategi antara lain:
   a. Peningkatan konektivitas antar wilayah;
   b. Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda;
   c. Penyiapan konsep dan implementasi angkutan laut dari barat ke timur Indonesia;

2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi, melalui strategi antara lain:
   a. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi;
   b. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi;
   c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini;
   d. Peningkatan/pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar keselamatan;
   e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
   f. Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan;
   g. Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;
   h. Peningkatan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya;
   i. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah;



Gambar II.2.
Peninjauan KA Perkotaan Yogyakarta

   j. Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan;
   k. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi;
   l. Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan keamanan transportasi;
   m. Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam keamanan penumpang;
   n. Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi (pencurian, vandalisme, perompakan, pembajakan, teroris, dll);



Gambar II.3.
Bandara *Award* 2018

3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi, melalui strategi antara lain:
   a. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute;
   b. Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
   c. Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi, termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender;
   d. Konsistensi penerapan *reward and punishment* terhadap ketepatan pelayanan;
   e. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara *real time*, penerapan *ATCS* dan *Virtual Mobility*;
   f. Penerapan sistem tiket elektonik yang terintegrasi;
4. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi, melalui strategi antara lain:
   a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
   b. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan *outcomes;*
   c. Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta;
   d. Penyiapan konsep angkutan umum massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif;
   e. Pengembangan *Bus Rapid Transit (BRT);*
   f. Pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel;
   g. Penyediaan dana subsidi/*Public Service Obligation (PSO)* yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan;



Gambar II.4.
Bus JR Connexion

5. Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil, melalui strategi antara lain:



Gambar II.5.
Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Sumatera Utara

   a. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar;
   b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan rawan bencana;
   c. Penyediaan sarana angkutan keperintisan;

6. Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi, melalui strategi antara lain:
   a. Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan transportasi;
   b. Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya terkait penyelesaian peraturan perundang-undangan;
   c. Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai amanah undang-undang bidang transportasi;
   d. Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di bidang transportasi;
   e. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan yang menghambat percepatan pembangunan transportasi;
7. Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi, melalui strategi antara lain:
   a. Menyusun *Man Power Planning* SDM Transportasi Bekerjasama dengan Badan Litbang Perhubungan;
   b. Menyusun *Training Needs Analysis* (TNA) SDM Transportasi Bekerjasama dengan Badan Litbang Perhubungan;
   c. Mengembangkan Kualitas dan Kapasitas Diklat SDM Transportasi;



Gambar II.6.
Kuliah Umum di PIP Makassar
oleh Kepala BPSDM Perhubungan (8 Oktober 2018)

   d. Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi;
   e. Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan;
   f. Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi;
8. Meningkatnya Kualitas Penelitian sesuai dengan Kebutuhan, melalui strategi antara lain:
   a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga fungsional pendukung;
   b. Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri untuk merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi;
   c. Pembangunan balai penelitian dan pengembangan database penelitian serta perpustakaan dan aplikasi program penelitian;



Gambar II.7.
Temu Karya Peneliti (25 Juli 2018)

d. Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian;
e. Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan.

9. Tersedianya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub, melalui strategi antara lain:
   a. Peningkatan kualitas hasil pengawasan;
   b. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan;
10. Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional, melalui strategi antara lain:
   a. Memberikan pelatihan kompetensi secara rutin dan berkelanjutan kepada seluruh SDM Kementerian Perhubungan;
   b. Menerapkan sistem penilaian kinerja yang terukur;
   c. Melakukan sistem *assessment* dan lelang terbuka untuk promosi dan peningkatan karir;



Gambar II.8.
Pembukaan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat oleh STIP, Serang (10 Oktober 2018)

   d. Memberlakukan sistem *reward and punishment* dalam menilai kinerja dan prestasi SDM;
11. Terwujudnya *Good Governance and Clean Government* di Kementerian Perhubungan, melalui strategi antara lain:



Gambar II.9.
Penerapan Inapornet pada Pelabuhan

   a. Penuntasan agenda reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan (organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia);
   b. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan Kementerian Perhubungan secara terintegrasi, terpercaya dan dapat diakses publik;
   c. Penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik secara mudah;
   d. Penyederhanaan perijinan sektor transportasi;
   e. Penerapan *e-government* di lingkungan Kementerian Perhubungan;
   f. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan;
   g. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *consultant* dan *quality assurance*.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator *output,* yang dijabarkan dari sasaran strategis menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective, costumer perspective, internal process perspective* dan *learn and growth perspective.* IKU Kementerian Perhubungan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang memuat 11 (sebelas) sasaran strategis dan 24 (dua puluh empat) IKU, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.1
Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (*OUTCOME*)		SATUAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
SS1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	IK1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio
CUSTOMER PERSPECTIVE				
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	IK2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional	Rasio
		IK3	Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi	Rasio
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	IK4	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan	%
		IK5	Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Nasional	%
		IK6	Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi	%
		IK7	Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Angkutan Umum pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek	Km/Jam
		IK8	Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan	%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (*OUTCOME*)		SATUAN
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	IK9	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi	%
		IK10	Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi	%
		IK11	*Modal Share* (Pangsa Pasar) angkutan umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	%
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IK12	Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Rasio
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi	IK13	Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	IK14	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi	%
SS8	Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan	IK15	Persentase Pemanfaatan Penelitian yang dijadikan Bahan Rekomendasi Kebijakan	%
SS9	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan	IK16	Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan	%
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
SS10	Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional	IK17	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi Penerbangan yang Bersertifikat	%
SS11	Terwujudnya *Good Governance & Clean Government* di Kementerian Perhubungan	IK18	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi	%
		IK19	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Opini BPK
		IK20	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai
		IK21	Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat
		IK22	Persentase Kehandalan Sistem Informasi	%
		IK23	Tingkat Maturasi SPIP	Level
		IK24	Persentase Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan	%

Sumber: Permenhub Nomor PM 70 Tahun 2017
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan

II.2. Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan 2018

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.

Sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2018 telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 dengan penetapan anggaran sebagaimana dalam DIPA Kementerian Perhubungan Tahun 2018 yang dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 yang semula telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 873 Tahun 2017 (pada September 2017) dan telah direviu terakhir melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 881 Tahun 2018 (pada Oktober 2018) diikuti pula dengan penyesuaian Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018.

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 881 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, bahwa Renstra memuat 11 (sebelas) Sasaran dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama, dan telah dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagaimana **Tabel. II.2.**

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (*Outcome*)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019	Target PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
SS1	**Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan**	**IK1**	**Rasio Konektivitas antar wilayah**	**Rasio**	**0,725**	**0,725**
			Transportasi Darat		0,675	0,675
			Transportasi Laut		1,00	1,000
			Transportasi Udara		0,72	0,72
			Transportasi Perkeretaapian		0,31	0,31
			Transportasi Jabodetabek		0,63	0,63
SS2	**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi**	**IK2**	**Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional**	**Rasio**	**1,640**	**1,640**
			Transportasi Laut		1,429	1,429
			Transportasi Udara		2,94	2,94
			Transportasi Perkeretaapian		0,55	0,55
		IK3	**Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi**	**Rasio**	**3,64**	**3,12**
			Transportasi Laut		2,04	0,50
			Transportasi Udara		0,17	0,17
			Transportasi Perkeretaapian		8,70	8,70
SS3	**Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi**	**IK4**	**Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan**	**%**	**71,35**	**71,35**
			Transportasi Darat		82,69	82,69
			Transportasi Perkeretaapian		60,00	60,00
		IK5	**Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional**	**%**	**60,00**	**60,00**
		IK6	**Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi**	**%**	**79,31**	**79,31**
			Transportasi Darat		83,24	83,24
			Transportasi Laut		80,00	80,00
			Transportasi Udara		87,00	87,00
			Transportasi Perkeretaapian		67,00	67,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (*Outcome*)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019	Target PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		IK7	**Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek**	**Km/Jam**	**16,00**	**16,00**
		IK8	**Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan**	**%**	**60,00**	**60,00**
SS4	**Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi**	**IK9**	**Persentase Peningkatan kapasitas sarana transportasi**	**%**	**35,76**	**25,56**
			Transportasi Darat		19,96	20,63
			Transportasi Laut		22,00	18,76
			Transportasi Udara		45,27	45,27
			Transportasi Perkeretaapian		55,80	17,57
		IK10	**Persentase Peningkatan kapasitas prasarana transportasi**	**%**	**55,92**	**55,49**
			Transportasi Darat		38,75	37,66
			Transportasi Laut		90,00	90,00
			Transportasi Udara		80,00	80,00
			Transportasi Perkeretaapian		14,91	14,30
		IK11	**Modal Share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek**	**%**	**29,00**	**29,00**
SS5	**Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil**	**IK12**	**Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil**	**Rasio**	**16,90**	**1,21**
			Transportasi Darat		0,49	0,49
			Transportasi Laut		46,83	0,68
			Transportasi Udara		3,38	2,84
SS6	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi**	**IK13**	**Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan**	**%**	**80,00**	**80,00**
SS7	**Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi**	**IK14**	**Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi**	**%**	**82,50**	**82,50**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (*Outcome*)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019	Target PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
SS8	**Meningkatnya Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan**	**IK15**	**Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan**	**%**	**80,00**	**80,00**
SS9	**Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub**	**IK16**	**Tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan**	**%**	**95,00 (IACM Level 3)**	**95,00 (IACM Level 3)**
SS10	**Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional**	**IK17**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat**	**%**	**5,00**	**90,00**
SS11	**Terwujudnya good governance & clean government di Kemenhub**	**IK18**	**Persentase Indeks Reformasi Birokrasi**	**%**	**87,00**	**85,00**
		IK19	**Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan**	**Opini BPK**	**WTP**	**WTP**
		IK20	**Nilai AKIP Kementerian Perhubungan**	**Nilai**	**72,00**	**72,00**
		IK21	**Keterbukaan Informasi Publik**	**Peringkat**	**3,00**	**3,00**
		IK22	**Persentase Kehandalan Sistem Informasi**	**%**	**97,00**	**97,00**
		IK23	**Tingkat Maturasi SPIP**	**Level**	**2,00**	**2,00**
		IK24	**Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan**	**%**	**90,00**	**90,00**

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Adapun berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 881 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 bahwa Reviu Renstra memuat perubahan target kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018, dan telah dijabarkan dalam Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 sebagaimana **Tabel II.3**

Tabel II.3
Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (I)	Target PK Tahun 2018	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (II)	Target Revisi PK Tahun 2018	Target Revisi II PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS1	**Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan**	**IK1**	**Rasio Konektivitas antar wilayah**	**Rasio**	**0,725**	**0,725**	**0,725**	**0,725**	**0,725**
			Transportasi Darat		0,675	0,675	0,675	0,675	0,675
			Transportasi Laut		1,00	1,000	1,000	1,000	1,000
			Transportasi Udara		0,72	0,72	0,72	0,720	0,720
			Transportasi Perkeretaapian		0,31	0,31	0,31	0,310	0,310
			Transportasi Jabodetabek		0,63	0,63	0,63	0,630	0,630
SS2	**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi**	**IK2**	**Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional**	**Rasio**	**1,640**	**1,640**	**1,543**	**1,543**	**1,537**
			Transportasi Laut		1,429	1,429	1,429	1,429	1,410
			Transportasi Udara		2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
			Transportasi Perkeretaapian		0,55	0,55	0,26	0,26	0,26
		IK3	**Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi**	**Rasio**	**3,64**	**3,12**	**2,90**	**2,39**	**2,39**
			Transportasi Laut		2,04	0,50	2,04	0,50	0,50
			Transportasi Udara		0,17	0,17	0,17	0,16	0,16
			Transportasi Perkeretaapian		8,70	8,70	6,50	6,50	6,50

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (I)	Target PK Tahun 2018	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (II)	Target Revisi PK Tahun 2018	Target Revisi II PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS3	**Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi**	**IK4**	**Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan**	**%**	**71,35**	**71,35**	**71,35**	**80,00**	**80,00**
			Transportasi Darat		82,69	82,69	82,69	100,00	100,00
			Transportasi Perkeretaapian		60,00	60,0	60,00	60,00	60,00
		IK5	**Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional**	**%**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**
		IK6	**Prosentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi**	**%**	**79,31**	**79,31**	**79,31**	**79,31**	**76,49**
			Transportasi Darat		83,24	83,24	83,24	83,24	83,24
			Transportasi Laut		80,00	80,00	80,00	80,00	68,70
			Transportasi Udara		87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
			Transportasi Perkeretaapian		67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
		IK7	**Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek**	**Km/Jam**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**
		IK8	**Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan**	**%**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (I)	Target PK Tahun 2018	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (II)	Target Revisi PK Tahun 2018	Target Revisi II PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS4	**Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi**	**IK9**	**Persentase Peningkatan kapasitas sarana transportasi**	**%**	**35,76**	**25,56**	**35,24**	**24,86**	**24,86**
			Transportasi Darat		19,96	20,63	17,88	17,85	17,85
			Transportasi Laut		22,00	18,76	22,00	18,76	18,76
			Transportasi Udara		45,27	45,27	45,27	45,27	45,27
			Transportasi Perkeretaapian		55,80	17,57	55,80	17,57	17,57
		IK10	**Persentase Peningkatan kapasitas prasarana transportasi**	**%**	**55,92**	**55,49**	**55,39**	**55,24**	**55,24**
			Transportasi Darat		38,75	37,66	37,54	36,85	36,85
			Transportasi Laut		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
			Transportasi Udara		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
			Transportasi Perkeretaapian		14,91	14,30	14,01	14,10	14,10
		IK11	**Modal Share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek**	**%**	**29,00**	**29,00**	**29,00**	**29,00**	**29,00**
SS5	**Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil**	**IK12**	**Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil**	**Rasio**	**16,90**	**1,21**	**16,90**	**1,52**	**1,52**
			Transportasi Darat		0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
			Transportasi Laut		46,83	0,68	46,83	0,68	0,68
			Transportasi Udara		3,38	2,84	3,38	3,38	3,38

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (I)	Target PK Tahun 2018	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (II)	Target Revisi PK Tahun 2018	Target Revisi II PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS6	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi**	**IK13**	**Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan**	**%**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
SS7	**Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi**	**IK14**	**Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi**	**%**	**82,50**	**82,50**	**82,50**		**82,50**
SS8	**Meningkatnya Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan**	**IK15**	**Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan**	**%**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
SS9	**Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub**	**IK16**	**Tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan**	**%**	**95,00 (IACM Level 3)**	**95,00 (IACM Level 3)**	**95,00 (IACM Level 3)**	**95,00 (IACM Level 3)**	**95,00 (IACM Level 3)**
SS10	**Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional**	**IK17**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat**	**%**	**5,00**	**90,00**	**5,00**	**80,00**	**80,00**
SS11	**Terwujudnya *good governance & clean government* di Kemenhub**	**IK18**	**Persentase Indeks Reformasi Birokrasi**	**%**	**87,00**	**85,00**	**87,00**	**85,00**	**85,00**
		IK19	**Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan**	**Opini BPK**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (I)	Target PK Tahun 2018	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (II)	Target Revisi PK Tahun 2018	Target Revisi II PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		IK20	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	72,00	72,00	72,00	71,00	71,00
		IK21	Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		IK22	Persentase Kehandalan Sistem Informasi	%	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
		IK23	Tingkat Maturasi SPIP	Level	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		IK24	Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Sumber: Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2019

Untuk mencapai sasaran strategis sesuai Indikator Kinerja Utama dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 didukung dengan anggaran yang semula sebesar Rp48.203.109.426.000,00 (Empat Puluh Delapan Triliun Dua Ratus Tiga Miliar Seratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-863/MK.02/2017 Tanggal 26 Oktober 2017, dan telah dilakukan penyesuaian karena adanya luncuran PHLN/SBSN dan penggunaan saldo awal BLU/PNBP sehingga anggaran direvisi menjadi sebesar Rp53.087.884.052.000,00 (Lima Puluh Tiga Triliun Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), dan penyesuaian terakhir yang diakibatkan oleh anggaran belanja tambahan berupa insentif atas kinerja Kementerian Perhubungan, serta luncuran PHLN/SBSN dan penggunaan saldo awal BLU/PNBP sehingga pagu anggaran menjadi Rp53.421.412.068.000,00 (Lima Puluh Tiga Triliun Empat Ratus Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.4** dan **Tabel II.5** berikut.

Tabel II.4
Anggaran Dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	PROGRAM	PAGU TAHUN 2018 (RENSTRA KEMENHUB TAHUN 2015-2019)	ALOKASI ANGGARAN KEMENHUB TAHUN 2018
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	887.031.193	580.135.964
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	106.110.821	106.110.822
3	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	13.814.457.000	4.582.007.686
4	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	16.714.246.000	11.600.486.955
5	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	12.000.528.961	9.162.040.051
6	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	33.436.255.772	17.296.256.780
7	Program Pengembangan SDM Perhubungan	235.786.825	143.830.906
8	Program Penelitian dan Pengembangan	5.528.975.051	4.527.496.007
9	Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	507.942.011	204.744.255
TOTAL		**83.231.333.634**	**48.203.109.426**

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Tabel II.5
Anggaran Dalam Revisi I dan II Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Program	Pagu Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Tahun 2015-2019 (I)	Alokasi Anggaran Tahun 2018	Pagu Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Tahun 2015-2019 (II)	Revisi Anggaran Tahun 2018 (Revisi I)	Revisi II Anggaran Tahun 2018 (Revisi II)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	887.031.193	580.135.964	887.031.000	580.135.964	580.135.964
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	106.110.821	106.110.822	106.111.000	106.110.822	106.110.822
3	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	13.814.457.000	4.582.007.686	13.106.707.000	4.660.807.881	4.955.730.267
4	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	16.714.246.000	11.600.486.955	16.714.246.000	14.410.773.422	14.417.626.963
5	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	12.000.528.961	9.162.040.051	12.000.529.000	9.176.656.523	9.177.698.362
6	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	33.436.255.772	17.296.256.780	32.810.329.000	19.173.625.497	19.188.457.243
7	Program Penelitian dan Pengembangan	235.786.825	143.830.906	235.787.000	143.830.906	143.830.906
8	Program Pengembangan SDM Perhubungan	5.528.975.051	4.527.496.007	5.528.975.000	4.631.198.782	4.647.077.286
9	Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	507.942.011	204.744.255	536.898.000	204.744.255	204.744.255
Total		**83.231.333.634**	**48.203.109.426**	**81.926.613.000**	**53.087.884.052**	**53.421.412.068**

Sumber: Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan ditunjang dengan upaya secara berkesinambungan untuk melaksanakan manajemen kinerja yang dimulai dari pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja dan penilaian kinerja secara berkala melalui monitoring triwulan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 beserta revisinya dan melibatkan sistem aplikasi *e-Performance* dan aplikasi *e-Monev* sehingga memudahkan Pimpinan Kementerian Perhubungan untuk melihat posisi perhitungan capaian kinerja secara berkala dari unit kerja yang dipimpinnya maupun unit kerja dibawahnya. Penggunaan terhadap sistem aplikasi, dilakukan dalam rangka memudahkan unit kerja terkait tahapan penyajian capaian kinerja Kementerian Perhubungan, yaitu :

1. Identifikasi 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada 11 (sebelas) sasaran;
2. Pengukuran capaian kinerja dari setiap IKU (dalam %) melalui pembandingan realisasi dengan targetnya; dan
3. Penilaian capaian kinerja setiap IKU dihitung berdasarkan capaian kinerja setiap kelompok kegiatan yang telah dilakukan guna mencapai sasaran dimaksud.

Tingkat capaian kinerja setiap sasaran memiliki nilai rata-rata capaian dari kelompok IKU yang menunjukkan kinerja sasaran dimaksud, sama halnya dengan nilai tingkat capaian kinerja suatu IKU merupakan nilai rata-rata capaian dari kelompok kegiatan yang mendukung IKU dimaksud. Dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2018 menyajikan capaian kinerja tahun 2018 dan capaian kinerja tahun 2015-2018 sesuai indikator kinerja dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, serta Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas *Inputing, updating* dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan alamat http://www.eperformance.dephub.go.id, sehingga dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan *reward* atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, sehingga hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB), di mana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Kementerian Perhubungan di masa mendatang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan rumus pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

1. Makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus A, yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus B, yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Terkait dengan rumus B, yaitu makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan menjadi:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penyempurnaan ini dilakukan dikarenakan penghitungan capaian kinerja seharusnya merupakan persentase ketercapaian target. Penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud akan dilaksanakan setelah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas terkait pedoman penyusunan Rencana Strategis K/L yang baru disahkan. Namun agar memberikan hasil perhitungan yang lebih akurat, maka penyempurnaan penghitungan capaian kinerja telah diakomodir dalam Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 ini.

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018;
2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2015-2018 terhadap target kinerja Tahun 2015-2018;
3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 terhadap target kinerja pada tahun 2018 dalam Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2018.

Dalam menghitung capaian Indikator Kinerja Utama pada tiap sektor transportasi diperlukan tata cara penghitungan yang berbeda, karena perbedaan karakteristik pada masing-masing sektor transportasi. Untuk itu, telah ditetapkan manual tata cara penghitungan untuk masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan sejak Tahun 2017, sebagaimana pada **Lampiran 9.**

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Perhubungan.

Pada awal tahun 2018 telah ditetapkan target yang harus dicapai oleh Kementerian Perhubungan, namun pada Triwulan III dilakukan Reviu Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 yang memuat penyempurnaan target Kementerian Perhubungan Tahun 2018-2019, dan anggaran yang berkembang sepanjang tahun 2018. Pada pelaksanaannya, ada yang tidak mencapai target, mencapai target, bahkan melebihi target. Secara umum perbandingan dapat dilihat pada Tabel Pengukuran Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 (**Lampiran 10**). Laporan Kinerja ini juga memuat Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (**Lampiran 11**), Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Kemenhub Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Kemenhub Tahun 2015-2018 (**Lampiran 12**), dan Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 (**Lampiran 13**).

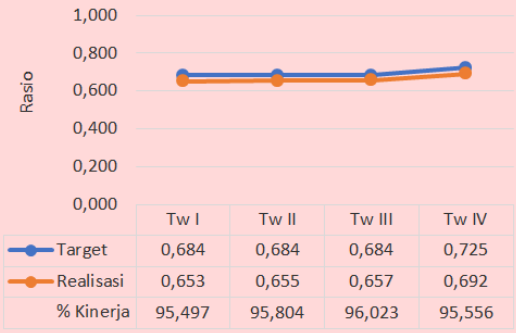
III.2.1.Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Pertama

Sasaran Kementerian Perhubungan yang pertama adalah Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan. Sasaran ini merupakan *stakeholder perspective*, yang merupakan sasaran utama Kementerian Perhubungan, yang diukur dengan IKU 1 yaitu Rasio Konektivitas antar wilayah, pada 5 sub sektor transportasi, yaitu transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan transportasi Jabodetabek.

1. **Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Kesatu**

Rasio Konektivitas antar wilayah memiliki target 0,725 dan realisasi 0,692 atau mencapai 95,556%.

Pada Tahun 2018, hanya transportasi laut yang mencapai target 100,000%, sedangkan transportasi darat mencapai 97,630%, transportasi perkeretaapian mencapai 93,548%, transportasi udara mencapai 86,111% dan transportasi Jabodetabek mencapai 86,032%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.1.**



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	0,684	0,684	0,684	0,725
Realisasi	0,653	0,655	0,657	0,692
% Kinerja	95,497	95,804	96,023	95,556

Gambar III.1
Grafik Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2018

a. Transportasi Darat

Rasio Konektivitas Perhubungan Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi Kementerian PAN-RB. Salah satu rekomendasi Kementerian PAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis *outcome* (hasil) pada Tahun 2017, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2017 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni Tahun 2015 dan 2016.

Capaian kinerja Rasio Konektivitas Perhubungan Darat dihitung berdasarkan jumlah pelayanan angkutan darat baik angkutan jalan maupun angkutan penyeberangan yang terlayani dibandingkan dengan target pelayanan angkutan darat (kebutuhan nasional).

Untuk menghitung Rasio Konektivitas Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Darat} = \frac{\text{IK 1 (Angkutan Jalan)} + \text{IK 2 (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan)}}{2}$$

$$\text{IK 1 (Angkutan Jalan)} = \frac{\text{Jumlah Trayek yang dilayani}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek}}$$

$$\text{IK 2 (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan)} = \frac{\text{Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi}}{\text{Jumlah Kebutuhan Lintas Penyeberangan}}$$

Dimana:

IK 1 (Angkutan Jalan)

Yang dimaksud dengan IK 1 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah dengan trayek AKAP;
2) Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis ditambah dengan jumlah kebutuhan trayek AKAP. Dimana:
   a) Jumlah kebutuhan trayek perintis adalah Jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu (kurun waktu 1 tahun).
   b) Jumlah kebutuhan trayek AKAP adalah jumlah kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tententu (waktu berlaku SK 5 tahun).

IK2 (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan)

Yang dimaksud dengan IK 2 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil;
2) Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah pelayanan pada angkutan darat terdiri dari:

1) Angkutan Jalan, terdiri dari:
   a) Angkutan Jalan Perintis

      Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.6529/AJ.204/DRJD/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2018, untuk Tahun 2018 ditargetkan melayani 296 (dua ratus sembilan puluh enam) trayek angkutan jalan perintis. Hingga akhir Tahun 2018, telah terealisasi sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) trayek angkutan jalan perintis, sebagaimana pada **Lampiran 14.**

   b) Angkutan Antar Kota Antar Provinsi

      Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6298/AJ.205/DJRD/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia, target trayek pelayanan AKAP selama 5 tahun (2015 sampai dengan 2019) adalah sebesar 2.473 trayek, dan yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebanyak 720 trayek, sebagaimana **Lampiran 15**. Dalam rangka pemantauan realisasi pelayanan AKAP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah membuat Sistem

Perizinian *Online* Angkutan untuk dapat mempermudah dalam pelayanan perizinan baik jalan maupun penyeberangan yang dinamakan SPIONAM (Sistem Penerbitan Izin *Online* Angkutan dan Multimoda) yang mulai dilaksanakan pada Tahun 2018. Selain itu, dilakukannya kegiatan Evaluasi, Pelatihan dan Pemeliharaan, Mutu Pelayanan Perizinan Angkutan Jalan (ISO) untuk pemberian pelayanan yang lebih baik dalam perizinan.

Dengan demikian, pelayanan angkutan jalan adalah sebagai berikut:

$$\text{IK 1 (Angkutan Jalan)} = \frac{(720 + 296)\ \text{trayek}}{(2.473 + 296)\ \text{trayek}} = 0{,}366$$

2) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Kebutuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Perhubungan KM Nomor 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010 – 2030 yaitu sebesar 297 lintas, baik untuk angkutan SDP Perintis maupun komersil.



Gambar III.2
Pelabuhan Penyeberangan Raha, Sulawesi Tenggara

a) Angkutan SDP Perintis

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.650/AP.204/DRJD/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun 2018, ditargetkan sebesar 237 lintas penyeberangan perintis yang beroperasi. (Angka 237 lintas merupakan perencanaan lintas sebelum ada penetapan SK.650/AP.204/DRJD/2018 tetapi target Rasio Konektifitas Perhubungan Darat pada Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan tidak ikut terevisi). Namun hingga akhir Tahun 2018, terealisasi 222 lintas penyeberangan karena selama tahun berjalan adanya perubahan rencana, semula 237 lintas penyeberangan menjadi 222 lintas penyeberangan.

Perubahan rencana tersebut karena masih terdapat 15 (lima belas) lintas penyeberangan perintis yang terdapat pada 9 (sembilan) Provinsi yang belum beroperasi. Dimana, 14 (empat belas) Lintas Penyeberangan belum dapat diakomodir di tahun 2018 karena keterbatasan anggaran. 14 (empat belas) Lintasan Penyeberangan tersebut akan di alokasikan di Tahun 2019. Sedangkan, 1 (satu) lintas lainnya belum dapat beroperasi karena Pelabuhan Pulau Laut-Sebuku belum siap. Adapun 15 (lima

belas) Lintas Penyeberangan perintis yang belum beroperasi atau belum teralisasi tahun 2018 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel III.I Lintas Penyeberangan Perintis yang Belum Terealisasi Tahun 2018. Sedangkan, Lintas penyeberangan perintis yang terealisasi/tidak ditetapkan di dalam SK.650/AP.204/DRJD/2018 tahun 2018 adalah seperti **Lampiran 15**. Yang belum terealisasi adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Lintas Penyeberangan Perintis yang Belum Terealisasi/
Tidak Ditetapkan di dalam SK.650/AP.204/DRJD/2018 Tahun 2018

No	Provinsi	Lintas	Jarak (Mil)
1	Sumatera Barat	1. Tuapejat - Sioban	25
2	Riau	2. Kampung Balak – Pecah Buyung	30
		3. Pecah Buyung – Alai Insit	1,5
3	Kalimantan Barat	4. Sei Asam - Sunyat	0,6
4	Kalimantan Selatan	5. Pulau Laut Timur - Sebuku	10
5	Nusa Tenggara Timur	6. Ende – Pulau Ende	6.5
		7. Naikliu – T. Gurita	82
6	Sulawesi Utara	8. Kawaluso - Marore	60
		9. Bitung - Minanga	60
7	Maluku	10. Dobo - Lamerang	0,8
8	Papua Barat	11. Fakfak - Kaimana	165
9	Papua	12. Agats - Akats	33
		13. Sawaerma - Mumugu	63
		14. Babang - Madapolo	59
		15. Kisar - Moa	96

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2018

b) Angkutan SDP Komersil

Jumlah lintas penyeberangan komersil yang beroperasi pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 55 (lima puluh lima) lintas perintis berdasarkan jumlah eksisting lintas penyeberangan komersil yang dikelola oleh swasta, sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2018 sebanyak 61 (enam puluh satu) lintas. Adapun terdapat penambahan 6 (enam) lintas penyeberangan komersil karena terdapat 4 (empat) lintas penyeberangan perintis yang berubah menjadi komersil karena secara bisnis sudah menguntungkan, oleh karena itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mencabut subsidi pada lintas tersebut. Pembukaan 4 lintas komersil tersebut oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Perubahan 4 (empat) lintas penyerangan perintis menjadi komersil pada 4 (empat) Provinsi, yaitu:

1. Provinsi Sumatera Barat, yaitu lintas Padang – Sikakap
2. Provinsi Bangka Belitung, yaitu lintas Sadai – Tanjung Ru

3. Provinsi Sulawesi Utara, yaitu lintas Bitung – Malonguane
4. Provinsi Maluku Utara, yaitu lintas Sanana – Mangole

Sedangkan, 2 (dua) pembukaan lintas penyeberangan komersil baru karena ada usulan dari Gubernur Jambi dan didukung oleh sarana kapal dari PT. Jembatan Nusantara sebagai alternatif dalam rangka memperpendek waktu tempuh lintas penyeberangan eksisting yakni: pertama, Tanjung Pinang – Karimun – Mengkapan menjadi Tanjung Pinang – Mengkapan dan kedua, Telaga Punggur (Batam) – Dabo – Kuala Tangkal menjadi Batam – Kuala Tungkal. Pembukaan 2 (dua) lintas komersil baru, yaitu lintas Batam (Kepri) – Kuala Tungkal (Jambi) dan lintas Tanjung Pinang (Kepri) – Mangkapan (Jamb).

Dengan demikian,

$$\text{IK 2 (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Perintis} = \frac{222 + 61 \text{ Lintas}}{297 \text{ lintas}} = 0{,}952$$

Lintas penyeberangan komersil tahun 2018 adalah seperti **Lampiran 17.**

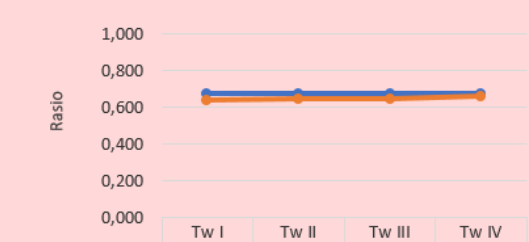
Maka realisasi rasio konektivitas transportasi darat adalah:

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Darat} = \frac{0{,}366 + 0{,}952}{2} = 0{,}659$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Darat Tahun 2018 sebesar 97,630%, yaitu:

$$\text{\% Capaian} = \frac{0{,}659}{0{,}675} \times 100\% = 97{,}630,\%$$

Angka 0,675 pada penyebut di dalam perhitungan presentase capaian merupakan hasil perhitungan rasio konektivitas transportasi darat yang menjadi target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 dan Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018. Target Rasio Konektivitas Transportasi Darat tidak mengalami perubahan dari Perjanjian Kinerja



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	0,675	0,675	0,675	0,675
Realisasi	0,639	0,646	0,646	0,659
% Kinerja	94,667	95,704	95,704	97,630

Gambar III.3
Grafik Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Darat Tahun 2018

(PK) Tahun 2018 sampai Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Pencapaiannya adalah sebagaimana **Gambar III.3.**

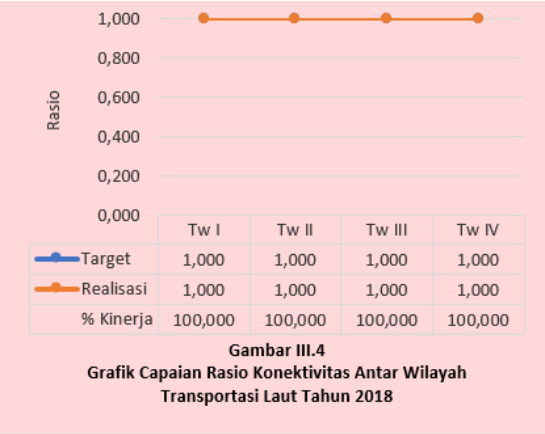
Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang, Kementerian Perhubungan akan mendorong pelayanan angkutan penyeberangan perintis agar berkembang yang dapat berubah manjadi komersil. Sehingga anggaran subsidi dapat dialihkan untuk daerah lain yang membutuhkan.

b. Transportasi Laut

Rasio konektivitas Antar Wilayah Transportasi Laut diukur melalui jumlah pelabuhan laut yang disinggahi oleh trayek liner untuk memastikan adanya layanan transportasi ke wilayah *hinterland* pelabuhan tersebut. Trayek linier merupakan Pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan terjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, trayek tersebut antara lain sebagai berikut : trayek Angkutan Barang di Laut (Tol), Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, angkutan laut perintis, dan angkutan ternak.

$$\text{Rasio konektivitas antar wilayah} = \frac{\sum \text{pelabuhan yang dilayani angkutan laut (pemerintah)}}{\sum \text{total pelabuhan laut yang beroperasi}}$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, terdapat sebanyak 636 (enam ratus tiga puluh enam) lokasi pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut (Lampiran A1), sehingga rasio konektivitas antar wilayah dengan transportasi laut telah mencapai 1 atau persentase capaian sebesar 100,000%, sebagaimana **Gambar III.4**.



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	1,000	1,000	1,000	1,000
Realisasi	1,000	1,000	1,000	1,000
% Kinerja	100,000	100,000	100,000	100,000

Gambar III.4
Grafik Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Laut Tahun 2018

$$\text{Rasio konektivitas antar wilayah Transportasi Laut} = \frac{636 \text{ pelabuhan}}{636 \text{ pelabuhan}} = 1{,}000$$

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{1{,}000}{1{,}000} \times 100\% = 100{,}000\%$$

Daftar pelabuhan adalah sebagaimana **Lampiran 18.**

Tercapainya target rasio konektivitas antar wilayah pada transportasi laut disebabkan oleh seluruh pelabuhan yang direncanakan telah dilayani oleh angkutan laut.

Adapun anggaran terkait Rasio Konektivitas Antar Wilayah Pada Transportasi Laut sebesar Rp2.439.719.456.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.285.391.067.722,00, atau sebesar 93,67%.

c. Transportasi Udara

Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Udara dihitung melalui cara sebagai berikut:

$$\text{Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Udara} = \frac{\text{Luas Cakupan Area Pelayanan Bandara}}{\text{Luas Wilayah Daratan Indonesia}}$$

Luas cakupan area pelayanan bandar udara sebesar 1.191.993 Km^2 dihitung berdasarkan luas area pelayanan bandar udara yang sudah beroperasi dikurangi luas area pelayanan bandar udara yang tidak beroperasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandar Udaraan Nasional yang berjumlah 299 bandar udara (**Lampiran 19**), dibagi dengan total luas wilayah luas wilayah daratan indonesia sebesar 1.922.570 Km^2, sehingga didapatkan hasil rasio sebesar 0,620.

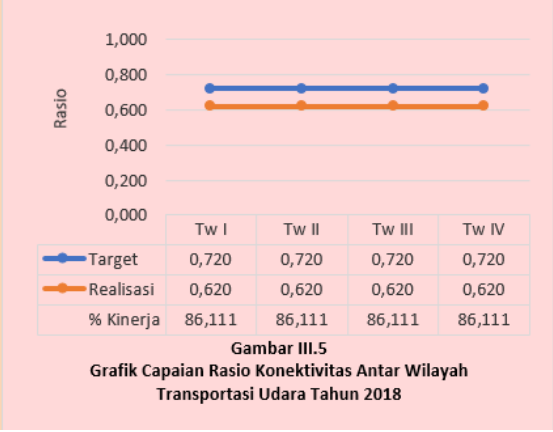
Realisasi Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Udara tahun 2018:

$$\text{Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Udara} = \frac{1.191.993\ km^2}{1.922.570\ km^2} = 0,620$$

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{0,620}{0,720} \times 100\% = 86,111\%$$

Pencapaian kinerja ini sebagaimana pada **Gambar III.5.**

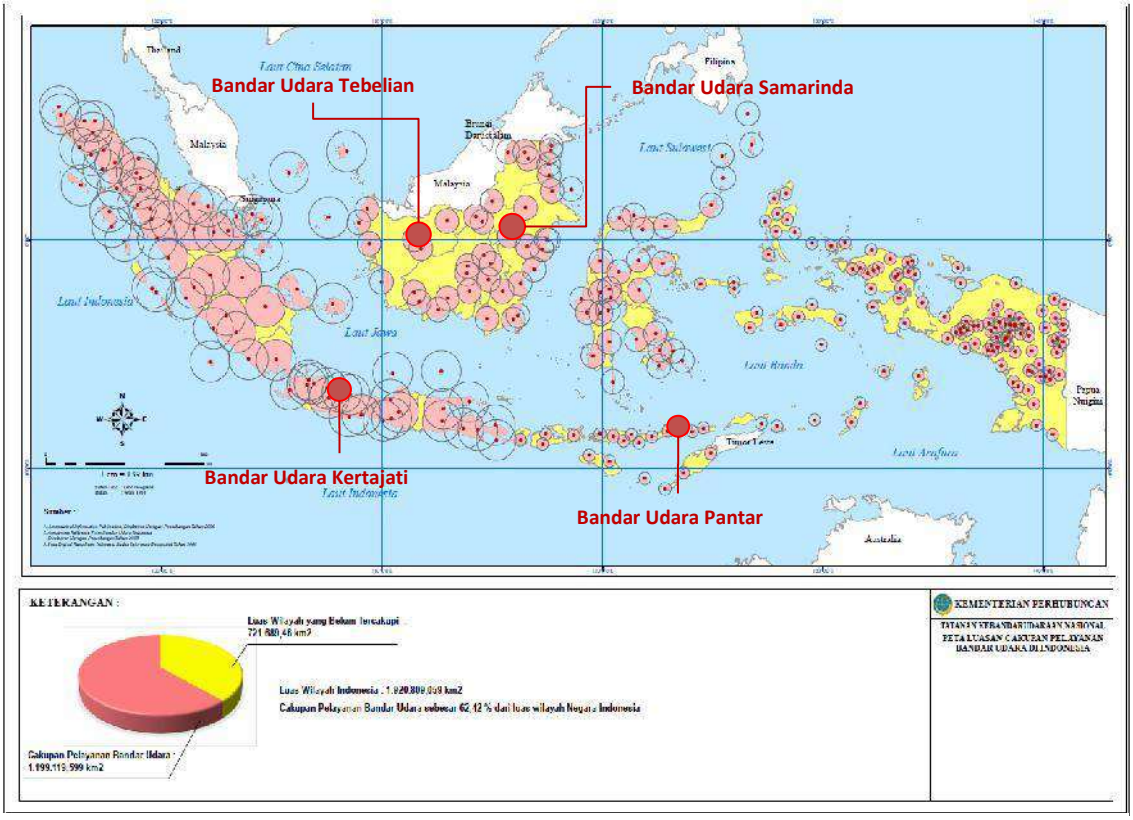
Tidak tercapainya target rasio konektivitas antar wilayah pada transportasi udara disebabkan oleh mekanisme perhitungan masih menggunakan luas wilayah total Negara Kesatuan Republik Indonesia sementara area pelayanan Bandar Udara ditempatkan pada lokasi lokasi yang berpenduduk sehingga dengan kata lain nilai rasio 0,62 sebenarnya sudah mengcover seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	0,720	0,720	0,720	0,720
Realisasi	0,620	0,620	0,620	0,620
% Kinerja	86,111	86,111	86,111	86,111

Gambar III.5
Grafik Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Udara Tahun 2018

sementara deviasi sebesar 0,38 adalah wilayah NKRI yang tidak ditempati penduduk dan sebagian besar merupakan perairan Nasional.



Gambar III.6 Lokasi Pembangunan Bandar Udara Tahun 2018
Dalam Peta Luasan Cakupan Pelayanan Bandar Udara di Indonesia
Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, 2018

Selama periode Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, sampai dengan Tahun 2018 terdapat 10 bandar udara baru yang telah selesai dibangun yaitu sebagaimana pada **Tabel III.2** berikut:

Tabel III.2
Pembangunan Bandar Udara Baru Tahun 2015-2019

No	Nama Bandar Udara	Target Selesai	Tahun Pembangunan	Rute Operasi	Keterangan
1.	a. Bandar Udara Anambas	Tahun 2015	2014 - 2015	sudah beroperasi, melayani rute Batam-Letung 7x seminggu, Wings Air Pesawat ATR-72	Selesai dibangun dan telah dioperasionalkan
	b. Bandar Udara Namniwel	Tahun 2015	2014 - 2015	sudah beroperasi , melayani rute Ambon – Namlea PP 5x seminggu, Pesawat ATR 42	Selesai dibangun dan telah dioperasionalkan
2.	a. Bandar Udara Miangas	Tahun 2016	2014 - 2016	Sudah beroperasi, melayani rute Manado-Melonguane-Miangas 1x seminggu, maskapai Wings Air pesawat ATR	Selesai dibangun dan telah dioperasionalkan

No	Nama Bandar Udara	Target Selesai	Tahun Pembangunan	Rute Operasi	Keterangan
	b. Bandar Udara Morowali	Tahun 2016	2014 - 2016	sudah beroperasi, melayani Rute penerbangan Palu – Morowali, 3x seminggu, wings air pesawat ATR 42-500	Selesai dibangun dan telah dioperasionalkan
3	a. Bandar Udara Werur	Tahun 2017	2014 - 2017	Sudah beroperasi , melayani penerbangan perintis rute Werur – Sorong 1x seminggu	Selesai dibangun dan telah dioperasionalkan
	b. Bandar Udara Maratua	Tahun 2017	2014 - 2017	Sudah beroperasi , melayani penerbangan perintis Tarakan – Maratua – Berau 1x seminggu, Garuda Ind (ATR 72)	Selesai dibangun dan telah dioperasionalkan
	c. Bandar Udara Koroway Batu	Tahun 2017	2014 -2017	Sudah beroperasi, melayani penerbangan perintis rute Tanah Merah – Koroway Batu 1x seminggu	Selesai dibangun dan telah dioperasionalkan
4.	a. Bandar Udara Kertajati	Tahun 2018	2013 - 2018	Sudah beroperasi, melayani rute surabaya – Kertajati setiap hari, CityLink pesawat B737 Dan sudah ada rute ke jedah dan madinah	Selesai dibangun dan telah dioperasionalkan
	b. Bandar Udara Samarinda Baru	Tahun 2018	2011 - 2017	Sudah Beroperasi, melayani rute Samarinda-Surabaya, Samarinda-Ujung Pandang, Samarinda-Berau, Wings Air	Selesai dibangun dan telah dioperasionalkan
	c. Bandar Udara Tebelian	Tahun 2018	2014 - 2016	Sudah beroperasi, melayani rute penerbangan Sintang – pontianak PP, Wings Air Pesawat jenis ATR 72 - 600	Selesai dibangun dan telah dioperasionalkan
5.	a. Bandar Udara Siau	Tahun 2019	2014 – 2019	Belum Beroperasi	Dalam Proses Pembangunan Bandar Udara
	b. Bandar Udara Tambelan	Tahun 2019	2014 -2019	Belum Beroperasi	Dalam Proses Pembangunan Bandar Udara
	c. Bandar Udara Muara Teweh	Tahun 2019	2014 -2019	Belum Beroperasi	Dalam Proses Pembangunan Bandar Udara
	d. Bandar Udara Pantar	Tahun 2019	2014 -2018	Belum Beroperasi	Selesai Dibangun namun belum operasional
	e. Bandar Udara Buntukunik	Tahun 2019	2014 - 2019	Belum Beroperasi	Dalam Proses Pembangunan Bandar Udara

Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat di diketahui bahwa bandar udara yang mempengaruhi terhadap penambahan area pelayanan di tahun 2018 adalah Bandar Udara Kertajati, Samarinda Baru, dan Tebelian. Di tahun 2018 ini hanya 3 bandara yang mempengaruhi area pelayanan sehingga rasio konektifitas antar wilayah tidak banyak berubah, selain itu pembagi untuk perhitungan rasio masih menggunakan luas total wilayah Nasional yang termasuk didalamnya adalah perairan nasional dan daratan tak berpenghuni sementara lokasi Bandar udara lebih banyak dibangun pada daerah yang berpenduduk.

Sampai sejauh ini direncanakan selama periode Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 akan dibangun 15 (lima belas) bandara baru yang akan diselesaikan secara keseluruhan di tahun 2019 untuk itu dalam upaya percepatan pembangunan Bandara dan meningkatkan rasio area pelayanan Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan hal hal sebagai berikut:

1) Mengeluarkan kebijakan dalam Rencana Strategis Bandar Udara, dimana Pembangunan 15 Bandar Udara baru merupakan salah satu dari 3 (tiga) target RPJMN 2015-2019 yang dipantau oleh Presiden, selain target 162 juta penumpang yang diangkut di tahun 2019, dan *on time performance*;
2) Pengalokasian Anggaran yang dioptimalkan pada pembangunan bandar udara baru;
3) Pengalokasian anggaran terkait subsidi BBM dan rute keperintisan yang mendorong dibukanya rute keperintisan baru yang pada Tahun 2018 sebanyak 211 (dua ratus sebelas) rute perintis dengan 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) kota/daerah yang terhubungi;



Gambar III.7
Peresmian Kereta Api Bandar Udara Minangkabau, Sumatera Barat (21 Mei 2018)

Untuk selanjutnya terkait mekanisme perhitungan di tahun 2018 akan dilakukan perubahan terhadap luas area Nasional menjadi luas area wilayah nasional yang berpenduduk (perairan nasional dan daratan tak berpenghuni akan dikeluarkan dari perhitungan).

Selain itu terdapat beberapa kendala yang masih ditemukan di lapangan dalam upaya peningkatan konektifitas antar wilayah sebagai berikut:

1) Adanya keterbatasan infrastruktur bandar udara terutama dalam menyediakan *slot time* yang mengakibatkan sulitnya melakukan penambahan kapasitas angkutan udara;

2) Dalam upaya penambahan kapasitas bandar udara seringkali terbentur masalah terkait kepemilikan lahan yang kerap kali menghambat pembangunan bandar udara;
3) Sebagian bandar udara mengalami *over capacity* sementara upaya pembangunan bandar udara tidak mungkin dapat terselesaikan dalam satu tahun anggaran.

Untuk mengatasi kendala-kendala teknis dan non teknis seperti tersebut diatas, Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan tindakan strategis sebagi berikut:

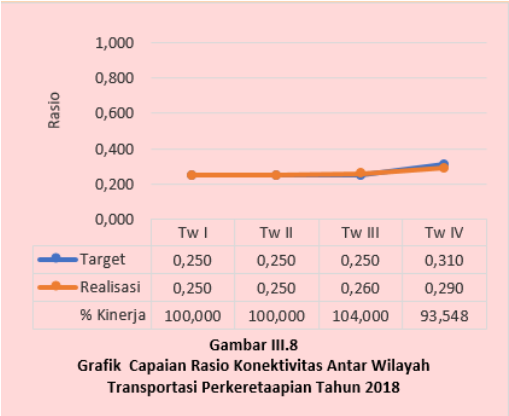
1) Melakukan pembangunan bandar udara baru dalam upaya membagi kapasitas bandar udara yang mengalami *over capacity dan* menambah area pelayanan.
2) Melakukan pengembangan bandar udara melalui akuisisi bandar udara yang dikelola oleh Pemda (serah terima) dan TNI (melalui MoU), sehingga alokasi pendanaan melalui APBN dapat dilaksanakan dalam upaya percepatan pengembangan bandar udara. Contoh: Bandar Udara Notohadinegoro - Jember dan Bandar udara Wiriadinata – Tasikmalaya;
3) Melakukan pengembangan Bandar Udara melalui mekanisme BLU dan privatisasi sehingga alokasi APBN dapat dioptimalkan untuk pembangunan bandar udara baru dan pengembangan kapasitas Bandar udara.
4) Melakukan pembangunan dan rehabilitasi bandar udara secara progresif setiap tahun dan mencanangkan mekanisme kontrak sederhana sehingga proses pelelangan dapat dilakukan secara cepat;
5) Terkait kendala lahan bandar udara yang kerap kali menyulitkan dalam proses pengembangan Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara telah secara intens berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah yang senantiasa memantau progres pelaksanaannya, serta menyerahkan kepada pimpinan tertinggi setingkat Presiden dalam hal permasalahan lahan yang sulit diselesaikan.

d. Transportasi Perkeretaapian

Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transprtasi Perkeretaapian diperoleh dari perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubungan oleh jalur kereta api dengan rencana PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang akan terhubung sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas).

$$\text{Rasio Konektivitas antar wilayah} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/KSN terhubung jaringan KA pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah rencana PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/KSN terhubung jaringan KA Sesuai RIPNas}}$$

Mengacu pada rumus tersebut diatas, rasio konektivitas pada tahun berjalan (Tahun 2018) diperoleh dari akumulasi jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi /KSN yang terhubung jaringan KA dari Tahun 2015 - 2018 dibanding dengan Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi /KSN yang akan terhubung dengan jaringan KA pada tahun 2030. Sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional) terdapat 113 (seratus tiga belas) PKN/PKW/Simpul Transportasi/KSN.



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	0,250	0,250	0,250	0,310
Realisasi	0,250	0,250	0,260	0,290
% Kinerja	100,000	100,000	104,000	93,548

Gambar III.8
Grafik Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018

Target Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Perkeretaapian s.d tahun 2018 sebesar 0,310 rasio atau sebanyak 35 (tiga puluh lima) PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional sedangkan realisasi sampai dengan Tahun 2018 sebesar 0,290 rasio atau sebanyak 33 (tiga puluh tiga) PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional. Pencapaiannya adalah sebagaimana **Gambar III.8.**

Rincian target dan realisasi pada tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{Target Rasio Konektivitas antar wilayah Transportasi Perkeretaapian} = \frac{35 \text{ wilayah}}{113 \text{ wilayah}} = 0{,}310$$

$$\text{Rasio Konektivitas antar wilayah Transportasi Perkeretaapian} = \frac{33 \text{ wilayah}}{113 \text{ wilayah}} = 0{,}290$$

$$\text{\% Capaian} = \frac{0{,}290}{0{,}310} \times 100\% = 93{,}548\%$$

Rincian target dan realisasi PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jalur KA sampai dengan Tahun 2018, sebagaimana pada Tabel III.3 berikut:

Tabel III.3
Target PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional Tahun 2018

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2018	
		Target	Realisasi
Pusat Kegiatan Nasional / Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional			
1	Jabotabek	√	√
2	Bandung	√	√
3	Semarang	√	√
4	Surabaya	√	√
5	Yogyakarta	√	√
6	Medan	√	√
7	Padang	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2018	
		Target	Realisasi
8	Palembang	√	√
9	Lampung	√	√
10	Cirebon	√	√
11	Solo	√	√
12	Madiun	√	√
13	Purwokerto	√	√
14	Malang	√	√
15	Tegal	√	√
16	Sukabumi	√	√
17	Rangkasbitung	√	√
18	Makassar	√	√
19	Parepare	√	√
20	Lhokseumawe	√	√
21	Binjai	√	√
22	Besitang	√	√
23	Simpang	√	√
24	Baturaja	√	√
25	Prabumulih	√	√
Simpul Transportasi Bandar Udara			
26	Bandar Udara Kualanamu	√	√
27	Bandar Udara Internasional Minangkabau	√	√
28	Bandar Udara Soekarno Hatta	√	√
29	Bandar Udara Mahmud Badaruddin	√	√
30	Bandar Udara Adi Soemarmo	√	-
Simpul Transportasi Pelabuhan			
31	Pelabuhan Tj. Priok	√	√
32	Pelabuhan Kuala Tanjung	√	√
33	Pelabuhan Tj. Mas	√	-
34	Pelabuhan Merak	√	√
35	Pelabuhan Sungai Kertapati	√	√
TOTAL		**35**	**33**

Sumber: Ditjen Perkeretaapian, 2018

Pusat Kegiatan Nasional/Pusat Kegiatan Wilayah/Kawasan Strategis Nasional dan simpul transportasi yang belum terhubung antara lain:

1) Pelabuhan Tanjung Emas, yang diakibatkan oleh adanya kendala dalam pelaksanaan pembangunan yaitu penertiban lahan oleh PT. KAI (Persero);
2) Bandar Udara Adi Sumarmo, yang mengalami kendala dalam pelaksanaan pembangunan sehingga progress konstruksi menjadi terlambat (perpanjangan *multiyear* 2017-2019), yaitu akibat pengadaan lahan masyarakat dan pemanfaatan lahan milik TNI AU;

Upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Perkeretaapian yaitu perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pembangunan sehingga jalur kereta api dapat terhubung ke Pusat Kegiatan Nasional /Pusat Kegiatan Wilayah/Kawasan Strategis Nasional dan Simpul Transportasi Pelabuhan tepat waktu sesuai dengan rencana pembangunan. Rencana pembangunan sebagai berikut:

1) Pelabuhan Tanjung Mas, sepanjang ± 2,1 Km'sp dimana ± 1,6 Km'sp telah selesai pembangunan konstruksi jalan rel di tahun 2017 dan sisanya sepanjang ± 0,5 Km'sp pelaksanaan konstruksi menunggu penertiban lahan oleh PT. KAI (Persero) sedangkan *track* di wilayah pelabuhan dilaksanakan oleh PT. Pelindo III;
2) Bandar Udara Adi Sumarmo, upaya perbaikan antara lain :
   a) Koordinasi dengan instansi terkait termasuk sosialisasi kepada masyarakat;
   b) Koordinasi dengan TNI AU dan instansi terkait (BPKP, LMAN, Bappenas dan Kemenkeu serta Jamintel) terkait penggantian atau alih status lahan yang terkena dampak pembangunan jalur KA Adi Soemarmo dan untuk saat ini pekerjaan konstruksi sudah dapat dilaksanakan.

e. Transportasi Jabodetabek

Rasio Konektivitas Antar Wilayah pada Jabodetabek merupakan rasio jaringan jalan yang dilayani angkutan umum terhadap total panjang jalan di wilayah Jabodetabek, meliputi : Kereta Rel Listrik, Bus Jalur Khusus (Busway), Bus *Reguler Mixed Traffic* (JR *Connexion*; Bus PATAS, Bus Sedang, Angkutan Kota) di wilayah Jabodetabek. Dengan bobot 5% dari keseluruhan moda, penghitungan rasio konektivitas antar wilayah di Jabodetabek dilakukan dengan cara membandingkan cakupan wilayah pelayanan angkutan umum (simpul transportasi) dengan total luas wilayah di Jabodetabek, atau secara matematis digunakan rumus:

$$\text{rasio konektivitas antar wilayah Jabodetabek} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(koridor)\ i}{(\text{jalan})\ j}$$

Adapun parameter perhitungan yang digunakan antara lain:

1) Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum terdiri dari tempat pemberhentian bus (terminal) dengan radius sejauh 400 m (0,25 mil) dan stasiun *commuter line* dengan radius sejauh 2 km;

2) Luas wilayah yang digunakan dalam perhitungan adalah luas wilayah yang memiliki kepadatan penduduk diatas 120.000 penduduk/km.

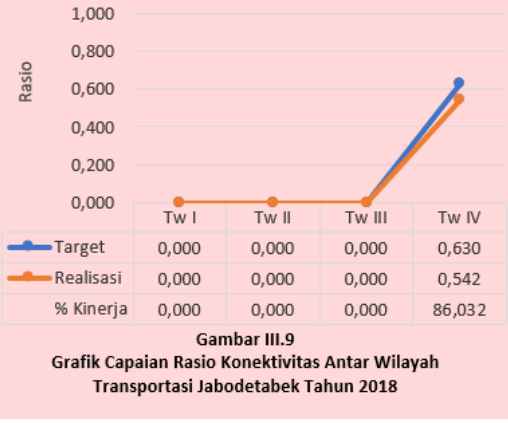
Hasil total perhitungan cakupan wilayah pelayanan angkutan umum sebesar 1.707,4 km^2 dan total perhitungan luas wilayah yang memiliki kepadatan penduduk diatas 120.000 penduduk/km sebesar 3.144,8 km^2. Sehingga nilai akhir perhitungan Rasio konektivitas wilayah Jabodetabek adalah sebesar 0,542.

$$\text{Rasio konektivitas wilayah Jabodetabek} = \frac{1.707{,}4\ km^2}{3.144{,}8\ km^2} = 0{,}542$$

Dengan target rasio konektivitas antar wilayah pada Jabodetabek 0,63 rasio maka capaian kinerjanya adalah 86,03%.

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{0{,}542}{0{,}630} \times 100\% = 86{,}03\%$$

Pencapaiannya adalah sebagaimana **Gambar III.9.**



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	0,000	0,000	0,000	0,630
Realisasi	0,000	0,000	0,000	0,542
% Kinerja	0,000	0,000	0,000	86,032

Gambar III.9
Grafik Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Jabodetabek Tahun 2018

Beberapa wilayah pinggiran di wilayah Jabodetabek memiliki kepadatan yang cukup rendah, sehingga kurang menarik pengusaha otobus untuk mengembangkan trayek baru pada daerah tersebut. Hal ini dikarenakan potensi pendapatan/*demand* penumpang angkutan umum yang dinilai kecil. Hal ini memberikan kontribusi cakupan pelayanan konektivitas (*coverage area*) angkutan umum yang belum maksimal.

Peningkatan capaian konektivitas angkutan umum di masa mendatang dapat dicapai dengan melakukan pengawasan di lapangan, serta membuka trayek dan menambah armada angkutan umum yang sesuai dengan Rencana Umum Jaringan Trayek Jabodetabek.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Utama Pertama

IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada Tahun 2015 dan 2016 tidak terisi (hal ini termasuk berlaku pada sub sektor transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian). Pencapaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah yang ditetapkan pada tahun 2017 dan 2018 sebagaimana **Tabel III.4** berikut:

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	Rasio Konektivitas antar wilayah	Rasio	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	0,706	0,678	96,031
			2018	0,725	0,692	95,556

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Untuk masing-masing sub sektor, perbandingan capaian kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

a. Transportasi Darat

Capaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah transportasi darat Tahun 2018 kurang optimal, meskipun realisasi kinerja mengalami peningkatan, sebagaimana **Tabel III.5** berikut:

Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Darat Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	Rasio Konektivitas antar wilayah Transportasi Darat	Rasio	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	0,650	0,640	98,462
			2018	0,675	0,659	97,630

Sumber: Hasil Analisis, 2019

b. Transportasi Laut

Capaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah transportasi laut Tahun 2017 dan 2018 telah mencapai target 100,00%, sebagaimana **Tabel III.6** berikut:

Tabel III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Laut Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	Rasio Konektivitas antar wilayah Transportasi Laut	Rasio	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	1,000	1,000	100,000
			2018	1,000	1,000	100,000

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Transportasi Udara

Capaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah transportasi udara Tahun 2018 kurang optimal, meskipun realisasi kinerja tidak mengalami penurunan, sebagaimana **Tabel III.7** berikut:

Tabel III.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Udara Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	Rasio Konektivitas antar wilayah Transportasi Udara	Rasio	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	0,700	0,620	88,571
			2018	0,720	0,620	86,111

Sumber: Hasil Analisis, 2019

d. Transportasi Perkeretaapian

Capaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah transportasi perkeretaapian Tahun 2018 mengalami peningkatan, dan realisasi kinerja juga mengalami peningkatan, sebagaimana **Tabel III.8** berikut:

Tabel III.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Perkeretaapian Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	Rasio Konektivitas antar wilayah Transportasi Perkeretaapian	Rasio	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	0,280	0,250	89,286
			2018	0,310	0,290	93,548

Sumber: Hasil Analisis, 2019

e. Transportasi Jabodetabek

Capaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah Jabodetabek Tahun 2018 mengalami peningkatan, termasuk realisasi kinerja juga mengalami peningkatan, sebagaimana **Tabel III.9** berikut:

Tabel III.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Jabodetabek Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	Rasio Konektivitas antar wilayah Transportasi Jabodetabek	Rasio	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	0,570	0,480	84,211
			2018	0,630	0,542	86,032

Sumber: Hasil Analisis, 2019

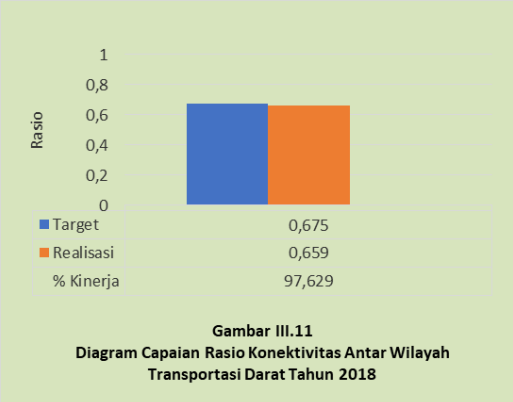
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Pertama



Gambar III.10
Diagram Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019, Rasio Konektivitas Antar Wilayah pada Tahun 2018 memiliki target rasio 0,725 dan realisasi 0,692 atau mencapai 95,556%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.10**.

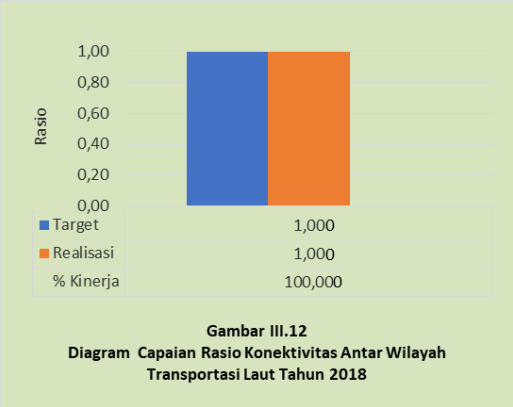
Rincian pencapaian IKU rasio konektivitas antar wilayah meliputi seluruh subsektor transportasi, bila dibandingkan dengan masing-masing target Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:



Gambar III.11
Diagram Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Darat Tahun 2018

a. Transportasi Darat

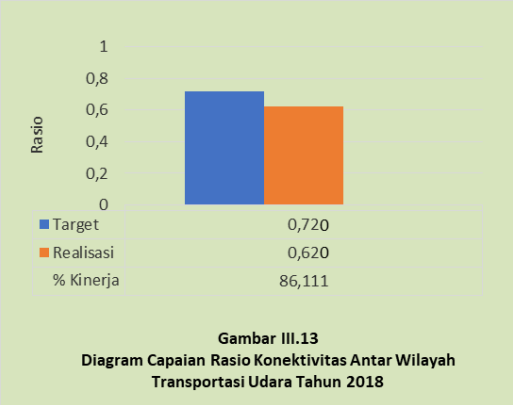
Capaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah transportasi darat Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 masih belum maksimal, yaitu mencapai 97,630% dari target 0,675 rasio.



Gambar III.12
Diagram Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Laut Tahun 2018

b. Transportasi Laut

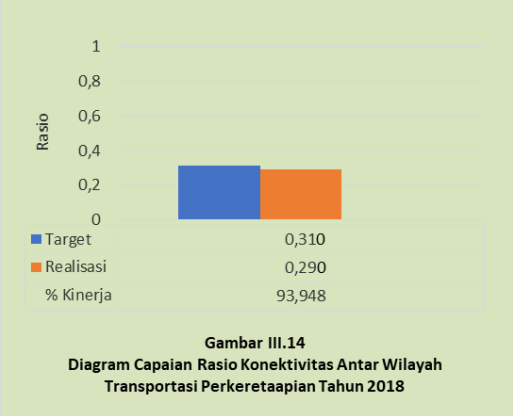
Capaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah transportasi laut Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah mencapai target 100%, yaitu rasio sebesar 1,000.



Gambar III.13
Diagram Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Udara Tahun 2018

c. Transportasi Udara

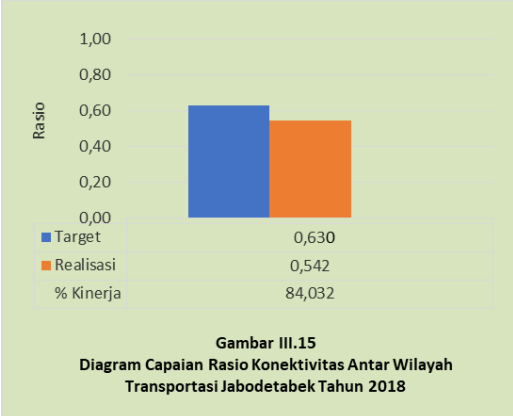
Capaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah transportasi udara Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 masih belum maksimal, yaitu mencapai 86,111% dari target 0,720 rasio.



Gambar III.14
Diagram Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018

d. Transportasi Perkeretaapian

Capaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah transportasi perkeretaapian Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 masih belum maksimal, yaitu mencapai 93,548% dari target 0,310 rasio.



Gambar III.15
Diagram Capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Jabodetabek Tahun 2018

e. Transportasi Jabodetabek

Capaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah transportasi Jabodetabek Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 masih belum maksimal, yaitu mencapai 86,032% dari target 0,630 rasio.

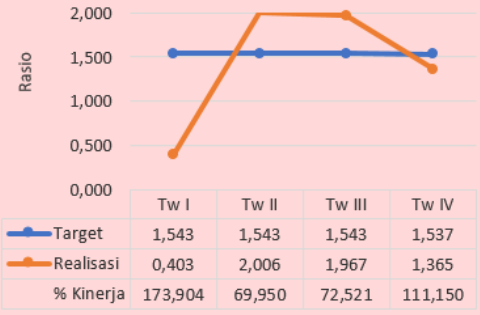
III.2.2.Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Kedua

Sasaran Kementerian Perhubungan yang kedua adalah Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Pada tahun 2018, sasaran ini diukur dengan 2 IKU, yaitu: rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional dan rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi.

1. IKU 2 yaitu Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Kedua

Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional memiliki target 1,537 dan realisasi 1,365 sehingga capaian 111,150%. Masih terjadinya kejadian kecelakaan transportasi baik laut, udara maupun perkeretaapian mengakibatkan performa transportasi nasional menjadi tidak optimal, meskipun transportasi laut sudah mencapai 124,397%, transportasi perkeretaapian mencapai 107,692%, sedangkan transportasi udara berkontribusi 105,102%, sebagaimana **Gambar III. 16.**



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	1,543	1,543	1,543	1,537
Realisasi	0,403	2,006	1,967	1,365
% Kinerja	173,904	69,950	72,521	111,150

Gambar III.16
Grafik Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional Tahun 2018

1) Transportasi Laut

Realisasi capaian rasio kejadian kecelakaan transportasi laut ini dihitung berdasarkan perhitungan formula sebagai berikut:

$$\text{Ratio Kejadian Kecelakaan Laut} = \left(\frac{\sum \text{kejadian kecelakaan}}{\sum \text{SPB yang diterbitkan}}\right) x\ 10.000\ SPB$$

Rumus ini digunakan untuk menghitung kecelakaan kapal dengan dengan jumlah Surat Perintah berlayar (SPB) yang diterbitkan (pelayaran) selama setahun setiap 10.000 pelayaran, dimana diasumsikan terdapat satu kecelakaan setiap 10.000 pelayaran.

Selama tahun 2018, kejadian kecelakaan transportasi laut yang terjadi adalah sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) kejadian, yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan kesalahan teknis, sebagaimana dalam **Tabel III.10** berikut:

Tabel III.10
Jumlah Kejadian Kecelakaan Dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2018

No	Bulan	Faktor Penyebab				SPB Diterbitkan	
		Alam	Manusia	Teknis	Jumlah Triwulan	Jumlah Bulanan	Jumlah Triwulan
1	Januari	13	2	3	34	118.000	334.000
2	Februari	3	1	1		133.000	
3	Maret	5	3	3		83.000	
4	April	-	-	3	34	91.000	210.000
5	Mei	4	3	7		67.000	
6	Juni	7	6	4		52.000	
7	Juli	8	3	4	35	130.000	321.000
8	Agustus	8	2	5		100.000	
9	September	1	1	3		91.000	
10	Oktober	-	1	2	18	91.000	270.000
11	November	1	1	3		93.000	
12	Desember	4	1	5		86.000	
TOTAL		**54**	**24**	**43**	**121**	**1.135.000**	**1.135.000**

Sumber: Ditjen Perhubungan Laut, 2018

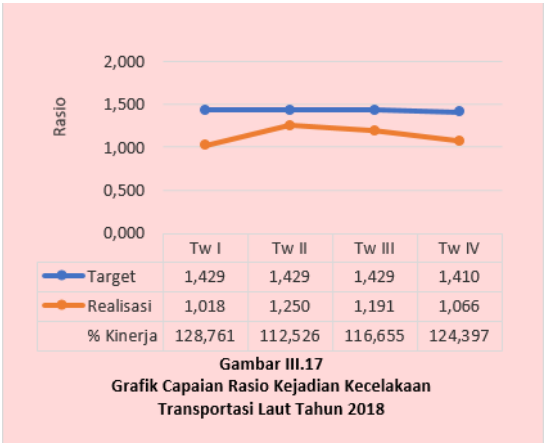
Dengan jumlah Surat Perintah Berlayar yang diterbitkan selama tahun 2018, yaitu sebanyak 1.135.000 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu) SPB, maka capaian indikator Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut Tahun 2018 sebesar 1,066 atau mencapai 124,40% dari target, sebagaimana **Gambar III.17.**

$$\text{Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut} = \frac{121 \text{ kejadian}}{1.135.000 \text{ SPB}} \times 10.000 \text{ SPB} = 1,066$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times 1,410) - 1,066}{1,410} = 124,397\%$$

Dalam rangka mengurangi rasio kejadian kecelakaan transportasi laut, Kementerian Perhubungan telah melakukan beberapa program/kegiatan antara lain sebagai berikut:

a) Penerbitan telegram peringatan pencegahan kecelakaan kapal;
b) Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala;
c) Evaluasi monitoring perwira jaga dalam penerbitan SPB;



Gambar III.17
Grafik Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut Tahun 2018

d) Pelaksanaan kewajiban uji petik berkala pemeriksaan kapal (*ramp check*);

e) Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Perhubungan Laut;

f) Pelaksanaan kegiatan uji petik pemeriksaan kapal menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru;

g) Peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan meningkatkan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di wilayah unit pelaksana teknis.

Adapun anggaran terkait Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut sebesar Rp2.037.955.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.001.427.200,00 atau mencapai 98,21%.

2) Transportasi Udara

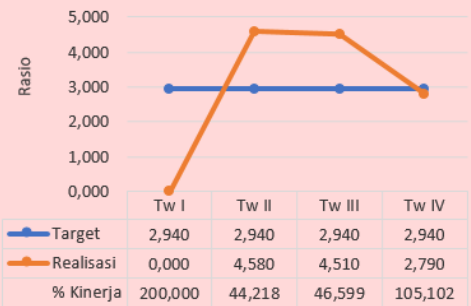
Capaian kinerja pada indikator ini dihitung melalui cara sebagai berikut

$$\text{Ratio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara} = \frac{\text{Jumlah } Accident \text{ (AOC 121 dan AOC 135)}}{Aircraft\ Departure \text{ (AOC 121 dan AOC 135)}}\ x\ 1.000.000$$

Dimana:

- ✓ AOC 121 (Pesawat dengan kapasitas penumpang di atas 30 penumpang)
- ✓ AOC 135 (Pesawat dengan kapasitas penumpang kurang dari 30 penumpang)
- ✓ Jumlah *Accident*, yaitu jumlah kecelakaan yang menyebabkan terjadinya korban jiwa dan pesawat rusak berat (Kejadian kecelakaan rusak berat namun tidak menyebabkan terjadinya korban jiwa tidak dihitung sebagai *Accident* namun sebagai *Incident)*
- ✓ *Aircraft Departure* (Merupakan jumlah pergerakan pesawat pada jenis pesawat AOC 121 dan 135)

Sehingga didapatkan bahwa perhitungan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara adalah jumlah kejadian kecelakaan dengan korban jiwa dan rusak berat sebesar dibagi dengan jumlah pergerakan pesawat AOC 121 dan 135 dikalikan 1.000.000 (rasio dihitung per 1 juta pergerakan pesawat Udara). Pada tahun 2018 terdapat 4 (empat) kecelakaan pesawat udara yang



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	2,940	2,940	2,940	2,940
Realisasi	0,000	4,580	4,510	2,790
% Kinerja	200,000	44,218	46,599	105,102

Gambar III.18
Grafik Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara Tahun 2018

menyebabkan terjadinya korban jiwa, dibagi dengan jumlah pergerakan pesawat udara AOC 121 dan 135 sebesar 1.433.532 pergerakan pesawat sehingga diperolehkan rasio jumlah kecelakaan pesawat sebesar 2,790 atau dengan capaian kinerja sebesar 105,102%, nilai ini didapat menggunakan rumus 2 dengan pengertian bahwa semakin sedikit kejadian akan mengakumulasi capaian kinerja semakin besar sementara sebaliknya semakin banyak kejadian kecelakaan akan mengakumulasi capaian kinerja semakin kecil.

$$\text{Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara} = \frac{4 \text{ kejadian}}{1.433.532 \text{ pergerakan}} \times 1.000.000 = 2,79$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times 2,94) - 2,79}{2,94} = 105,102\%$$

Untuk target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara sebesar 2,94 merupakan nilai yang didapat dari jumlah kejadian maksimal yang boleh terjadi dalam 1 juta pergerakan, yaitu sebanyak 2 kejadian, dibagi dengan prediksi jumlah pergerakan pesawat pada jenis pesawat AOC 121 dan 135 sebesar 680.000 pergerakan yang mengacu pada pergerakan pesawat di tahun sebelumnya.

Kejadian kecelakaan pesawat udara yang menyebabkan korban jiwa pada tahun 2018 adalah:

Tabel III.11
Kejadian Kecelakaan Pesawat Udara AOC 121 dan 135 Tahun 2018

No	Operator	Waktu Kejadian	Lokasi	Tipe Pesawat	Registrasi	Jumlah Awak	Jumlah Penumpang	Meninggal/ Luka-Luka/ Hilang
1	Whitesky Aviation - 135	20/04/2018	Helipad Morowali, Sulawesi Tengah	Bell Helicopter B 429	PK-WSX	2	6	0/8/0
2	Elang Nusantara Air - 135	02/05/2018	Cendrawasih Airstrip, Papua	Thrush S2R-T34	PK-ELO	1	-	0/1/0
3	Marta Buana Abadi - 135	11/08/2018	Daerah Pegunungan Oksibil, Papua	PAC 750XL	PK-HVQ	2	7	08/1/0
4	Lion Mentari Airlines - 121	29/10/2018	Laut Jawa	B737-8 MAX	PK-LQP	8	181	189/0/0

Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, 2018

Tingkat kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 mengalami penurunan yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a) Peningkatan Keselamatan Melalui *Surveillance* dan *Rampcheck*;
b) Audit Organisasi Terhadap Operator (AOC 121 dan 135)
c) Peremajaan Pesawat Udara
d) Kurangnya sosialisasi keselamataan penerbang

Upaya yang dilakukan untuk mendukung peningkatan keselamatan jasa transportasi udara selain melakukan investigasi pencegahan kecelakaan pesawat udara adalah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya:

a) Meningkatkan pengawasan operasional penerbangan di wilayah Papua;
b) Meningkatkan frekuensi pemeriksaan terhadap *Station Facility* dan *Ramp Area* terkait keselamatan penerbangan setiap tahunnya secara progresif;
c) Meningkatkan frekuensi pemeriksaan terhadap *cockpit and cabin station en route* khususnya terkait pengoperasian pesawat udara;
d) Melakukan audit (*Annual Audit* dan/atau *Special Audit*) terhadap operator penerbangan;
e) Melakukan harmonisasi terhadap peraturan keselamatan penerbangan (CASR) agar sesuai dengan perkembangan terbaru aturan penerbangan internasional yang ditetapkan oleh ICAO;
f) Melakukan program pengawasan (*Surveillance*) dan bimbingan teknis kepada operator penerbangan;



Gambar III.19
***Rampcheck* Kelaikan Terbang Pesawat udara oleh Dirjen Perhubungan Udara**

g) Mengimplementasikan *Safety Management System* dalam suatu sistem proses *Management Safety* dari suatu organisasi operator penerbangan;
h) Melaksanakan Sosialisasi peraturan dibidang penerbangan seperti sosialisasi *Civil Aviation Safety Regulation*(*CASR), Staf Instruction dan Advisory Circural (SI/AC)*;
i) Meningkatkan kualitas kompetensi SDM melalui pelatihan, baik di dalam negeri maupun luar negeri;

j) Meningkatkan jumlah inspektor penerbangan baik itu Inspektur operasi dan perawatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi khususnya pada rating pesawat yang beroperasi di indonesia;

k) Mengimpelementasikan sistem pelatihan Inspektur atau ITS (*Inspector Training system*) dengan menjalankannya sesuai 5 *core training* yang dipersyaratkan oleh ICAO.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di dalam setiap kejadian kecelakaan pesawat udara selalu melakukan investigasi pencegahan kecelakaan pesawat udara.

3) Transportasi Perkeretaapian

Perhitungan *Rate of Accident* (RoA) yang merupakan salah satu bentuk untuk mengkaji kondisi perkeretaapian di Indonesia dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian yang mengacu pada jumlah kecelakaan dan dinormalisasi dengan perjutaan km tempuh (*km traveled*) pada tahun tersebut. Formulasi yang digunakan yaitu:

$$\text{Ratio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan}}{\text{Km tempuh}} \times 1.000.000$$

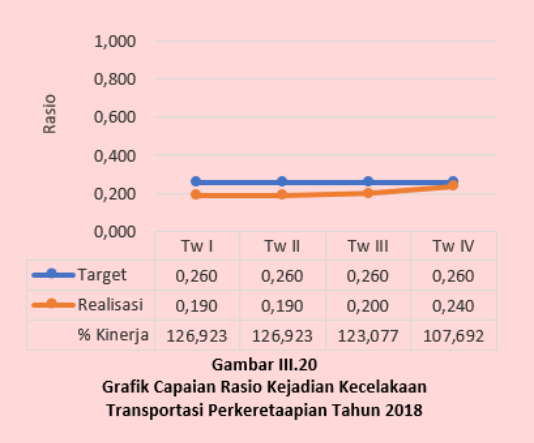
Pada Tahun 2018 telah terjadi 16 (enam belas) kali kejadian kecelakaan perkeretaapian, dengan km tempuh sepanjang 66.489.586 km.

$$\text{Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian} = \frac{16 \text{ kejadian}}{66.489.586 \text{ km}} \times 1.000.000 = 0,240$$

Capaian Indikator Kinerja Rasio kejadian kecelakaan transportasi perkeretaapian Tahun 2018 sebesar 107,692% , yaitu terealisasi 0,240 dari target 0,260.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times 0,260) - 0,240}{0,260} = 107,692\%$$

Kecelakaan transportasi perkeretaapian yang terjadi sepanjang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	0,260	0,260	0,260	0,260
Realisasi	0,190	0,190	0,200	0,240
% Kinerja	126,923	126,923	123,077	107,692

Gambar III.20
Grafik Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018

Tabel III.12
Jumlah Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018

No	Jenis Kecelakaan	Jumlah Kejadian
1	Tabrakan KA Dengan KA	0
2	Anjlokan	15
3	Terguling	0
4	Banjir / Longsor	0
5	Kebakaran	1
	TOTAL	**16**

Sumber: Ditjen Perkeretaapian, 2018

Pencapaian keberhasilan tersebut didukung juga adanya pelaksanaan kegiatan yang dapat menunjang keselamatan transportasi perkeretaapian antara lain:

a) *Workshop* preventif kecelakaan di bidang perkeretaapian;
b) Sosialisasi dan promosi keselamatan terhadap masyarakat dan instansi terkait;
c) Bimbingan teknis bidang audit dan inspeksi keselamatan perkeretaapian;
d) Inspeksi dan penilaian keselamatan perkeretaapian;
e) Identifikasi daerah rawan kecelakaan kereta api dan bencana alam;
f) Audit keselamatan perkeretaapian;
g) Pengawasan keselamatan lalu lintas perkeretaapian;
h) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia keselamatan bidang fasilitas pengoperasian kereta api;
i) Pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan kereta api;
j) Evaluasi kinerja PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil);
k) Pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan kereta api;
l) Evaluasi keselamatan bidang Perkeretaapian;
m) Pembinaan teknis pemeriksaan kecelakaan kereta api;
n) Pembinaan teknis analisis kecelakaan kereta api;
o) *FGD* penanganan kecelakaan kereta api dengan peralatan khusus;
p) Pemeriksaan dan evaluasi kompetensi SDM, sertifikat kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian;
q) Bimbingan teknis dan peningkatan kualitas PPNS Perkeretaapian;
r) Pembinaan keselamatan SDM kontraktor dan konsultan di bidang perkeretaapian.

Alokasi anggaran untuk Rasio kejadian kecelakaan transportasi Perkeretaapian adalah sebesar Rp17.916.633.000,00 yang merupakan akumulasi alokasi kegiatan sebagai regulator berupa kegiatan sosialisasi, bimtek, audit serta evaluasi dan pemantauan bidang keselamatan perkeretaapian. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp14.946.441.803,00 atau persentase penyerapan anggaran sebesar 83,42%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Kedua

IKU ini telah ada sejak Tahun 2015 untuk sub sektor transportasi laut, udara dan perkeretaapian. Namun tidak diukur secara nasional, karena memiliki satuan yang berbeda. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional yang ditetapkan pada tahun 2017, terdapat penurunan persentase capaian target kinerja, namun demikian hal itu menujukkan kinerja Kementerian Perhubungan semakin baik karena rasio kejadian kecelakaan transportasi dapat diturunkan sebagaimana **Tabel III.13** berikut:

Tabel III.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional
Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional	Rasio	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	1,871	0,65	165,00
			2018	1,537	1,37	111,15

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Capaian rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional untuk masing-masing sub sektor transportasi Tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

a. Transportasi Laut

Capaian kinerja rasio kejadian kecelakaan transportasi laut Tahun 2015-2017 mengalami peningkatan, namun demikian realisasi Tahun 2018 mengalami penurunan, dan realisasi kinerja mengalami peningkatan. Penurunan capaian kinerja ini menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan semakin baik, karena rasio kejadian kecelakaan transportasi laut menurun. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.14** berikut:

Tabel III.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	Rasio	2015	0,972	1,382	57,818
			2016	0,875	0,814	106,971
			2017	1,633	0,484	170,343
			2018	1,410	1,066	124,397

Sumber: Hasil Analisis, 2019

b. Transportasi Udara

Capaian kinerja rasio kejadian kecelakaan transportasi udara Tahun 2015-2017 mengalami peningkatan, namun demikian realisasi Tahun 2018 mengalami penurunan, dan realisasi kinerja mengalami peningkatan. Penurunan capaian kinerja ini menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan semakin baik, karena rasio kejadian kecelakaan transportasi udara menurun. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.15** berikut:

Tabel III.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi udara	Rasio	2015	4,410	16,700	-
			2016	3,920	1,480	162,245
			2017	3,430	1,220	164,431
			2018	2,940	2,790	105,102

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Transportasi Perkeretaapian

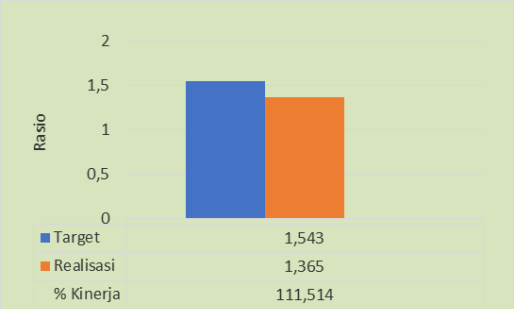
Capaian kinerja rasio kejadian kecelakaan transportasi perkeretaapian Tahun 2015-2016 mengalami peningkatan, namun demikian Tahun 2017-2018 mengalami penurunan, dan realisasi kinerja mengalami penurunan. Penurunan capaian kinerja ini menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan semakin baik, karena rasio kejadian kecelakaan transportasi perkeretaapian menurun. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.16** berikut:

Tabel III.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi Perkeretaapian	Rasio	2015	0,550	1,150	-
			2016	0,550	0,240	156,364
			2017	0,550	0,260	152,727
			2018	0,260	0,240	107,692

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Kedua



Gambar III.21
Diagram Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019, rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional pada Tahun 2018 memiliki target 1,543 dan realisasi 1,365 atau mencapai 111,514%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.21.**

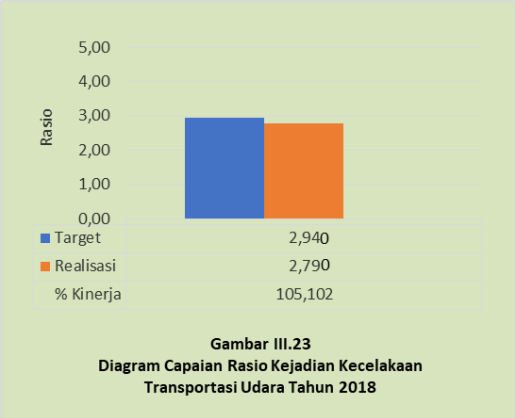
Sedangkan capaian rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional pada Tahun 2018 tiap sektor transportasi bila dibandingkan dengan masing-masing target Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:



Gambar III.22
Diagram Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut Tahun 2018

a. Transportasi Laut

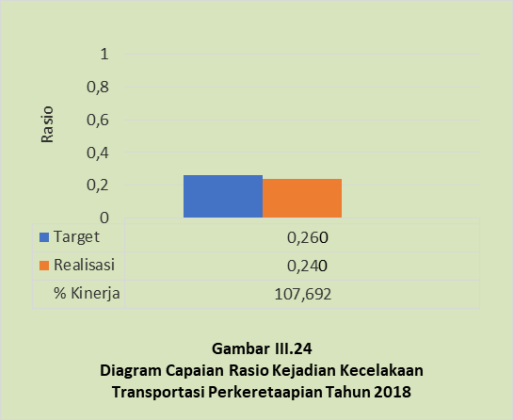
Capaian kinerja rasio kejadian kecelakaan transportasi laut Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah melebihi target, yaitu mencapai 125,402% dari target 1,429 rasio. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.22**.



Gambar III.23
Diagram Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara Tahun 2018

b. Transportasi Udara

Capaian kinerja rasio kejadian kecelakaan transportasi udara Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah melebihi target, yaitu mencapai 105,102% dari target 2,940 rasio. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.23**.



Gambar III.24
Diagram Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018

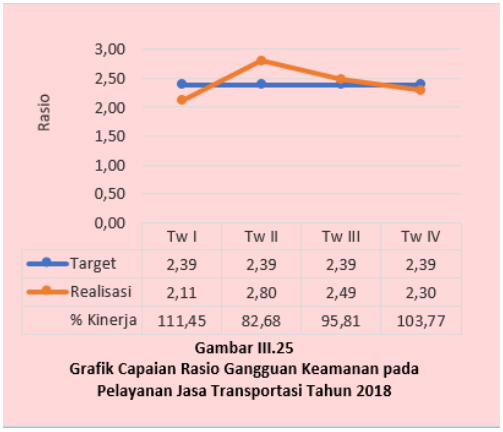
c. Transportasi Perkeretaapian

Capaian kinerja rasio kejadian kecelakaan transportasi perkeretaapian Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah melebihi target, yaitu mencapai 107,692% dari target 0,260 rasio. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.24**.

2. IKU 3 yaitu Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Ketiga

Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi memiliki target 2,39 dan realisasi 2,30 atau mencapai 103,77%, dengan kontribusi dari transportasi laut dan udara sebesar 200% atau tidak ada kejadian gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut dan udara. Namun pada transportasi perkeretaapian terjadi gangguan keamanan yang menyebabkan capaian rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi menjadi tidak optimal. Pencapaian target IKU ini diharapkan semakin rendah, karena mengindikasikan semakin sedikit jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi yang terjadi, demikian pula sebaliknya semakin tinggi pencapaian menunjukkan performa keamanan transportasi nasional semakin buruk.



Gambar III.25
Grafik Capaian Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Tahun 2018

1) Transportasi Laut

Rasio jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut di perairan Indonesia setiap 100.000 SPB yang diterbitkan, yang dihitung dengan rumus :

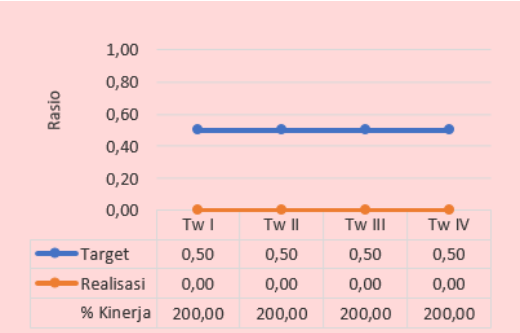
$$\text{Ratio Gangguan Keamanan Transportasi Laut} = \frac{\text{jumlah kejadian gangguan keamanan}}{\text{jumlah SPB yang diterbitkan}} \times 100.000 \text{ SPB}$$

Sampai dengan akhir Tahun 2018, belum terjadi gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut. Sedangkan Surat Perintah Berlayar yang diterbitkan adalah berjumlah 1.135.000 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu) SPB, sehingga realisasi mencapai 200%.

$$\text{Rasio Gangguan Keamanan Transportasi Laut} = \frac{0 \text{ kejadian}}{1.135.000 \text{ SPB}} \text{ X } 100.000 \text{ SPB} = 0$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times 0{,}5) - 0}{0{,}5} = 200\%$$

Hal ini terjadi karena tidak ada ganggungan keamanan yang dilaporkan ke Direktorat KPLP Ditjen Perhubungan Laut.



Gambar III.26
Grafik Capaian Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut Tahun 2018

Untuk tetap mempertahankan kinerja ini, Kementerian Perhubungan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Mengoptimalkan manajemen keamanan kapal dan kemananan pelabuhan;
b) Memuat surat edaran tentang peningkatan pengawasan keamanan di kapal dan pelabuhan;
c) Melaksanakan kerjasama dengan negara lain yang berkaitan dengan pengembangan personil terkait bidang *maritime security*;
d) Menerbitkan Telegram Nomor: 7X-30/XI/DN-18 tanggal 6 November 2018 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kapal yang Akan Berlayar Menuju Perairan Philipina.

Dengan langkah – langkah tersebut diatas sehingga pada IKU rasio jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut tidak diperlukan anggaran khusus.

2) Transportasi Udara

Sasaran meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi dari sektor transportasi udara ini dicapai dengan indikator kinerja Rasio terjadinya tindakan melawan hukum yang mengaktifkan program penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan (*contingency plan*) pada kondisi darurat merah pada bandar udara dengan jumlah penumpang minimal 500.000 penumpang per tahun yang diimplementasikan melalui program utama pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan. Indikator Kinerja ini dihitung menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Gangguan Keamanan Transportasi Udara} = \frac{\text{Jumlah Pengaktifan } \textit{Contingency Plan} \text{ Kondisi Darurat Merah}}{\text{Jumlah Bandara Yang Melayani } \geq 500.000 \text{ Penumpang Pertahun}}$$

Jumlah pengaktifan *Contingency Plan* darurat merah dihitung berdasarkan jumlah kejadian yang menyebabkan diaktifkannya mekanisme pengamanan darurat di lingkungan bandar udara oleh Kepala Bandar Udara sampai pada tingkat turunnya aparat TNI dan Kepolisian, sementara Jumlah bandar udara yang melayani minimal 500.000 penumpang di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara terhitung sebanyak 31 (tiga puluh satu) bandar udara, yaitu:

1. Bandar Udara Soekarno Hatta
2. Bandar Udara Juanda – Surabaya
3. Bandar Udara Sultan Hasanuddin - Makassar
4. Bandar Udara Ngurah Rai – Denpasar
5. Bandar Udara Kualanamu – Medan
6. Bandar Udara SAMS Sepinggan – Balikpapan
7. Bandar Udara Adi Sutcipto – Yogyakarta
8. Bandar Udara Hang Nadim – Batam
9. Bandar Udara Halim Perdana Kusuma – Jakarta
10. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II – Palembang
11. Bandar Udara Ahmad Yani – Semarang
12. Bandar Udara Syamsoediin Noor – Banjarmasin
13. Bandar Udara Minangkabau – Padang
14. Bandar Udara Sultan Syarif Kasim – Pekan baru
15. Bandar Udara Internasional Lombok
16. Bandar Udara Husein Sastranegara – Bandung
17. Bandar Udara Sam Ratulangi – Manado
18. Bandar Udara Supadio – Pontianak
19. Bandar Udara Sentani – Jayapura
20. Bandar Udara Adi Sumarmo – Solo
21. Bandar Udara Depati Amir – Pangkal Pinang
22. Bandar Udara Radin Inten II – Lampung
23. Bandar Udara Eltari – Kupang
24. Bandar Udara Sultan Thaha – Jambi
25. Bandar Udara Pattimura - Ambon
26. Bandar Udara Sys Aljufri – Palu
27. Bandar Udara Haluoleo – Kendari

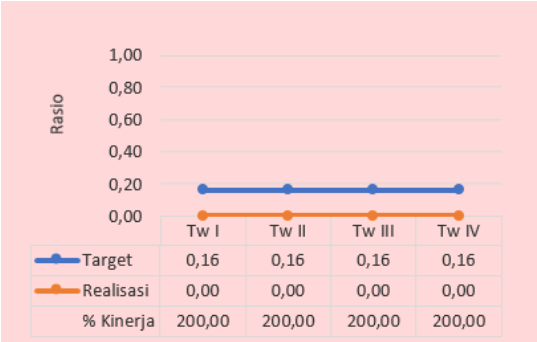
28. Bandar Udara Domine Eduard Osok – Sorong
29. Bandar Udara Juwata – Tarakan
30. Bandar Udara Fatmawati – Bengkulu
31. Bandar Udara Djalaluddin - Gorontalo

Sampai pada akhir Tahun 2018 ini tidak terjadi kejadian yang menyebabkan diaktifkannya darurat merah di lingkungan bandar udara yang melayani minimal 500.000 penumpang, sehingga didapatkan hasil rasio gangguan Keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara adalah sebesar 0 dari yang ditargetkan sebesar 0,16 atau setara dengan capaian kinerja sebesar 200%.

$$\text{Rasio Gangguan Keamanan Transportasi Udara} = \frac{0 \text{ kejadian}}{31 \text{ bandar udara}} = 0$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times 0{,}16) - 0}{0{,}16} \times 100\% = 200\%$$

Target rasio gangguan keamanan transportasi udara sebesar 0,16 diperoleh dari jumlah kejadian maksimal yang boleh terjadi sebanyak 5 kejadian pada 31 bandar udara dengan jumlah penumpang minimal 500.000 per tahun.



Gambar III.27
Grafik Capaian Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Udara Tahun 2018

Langkah – langkah yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan sehingga capaian kinerja terhadap indikator di atas mencapai target antara lain sebagai berikut:

a) Menyusun Dokumen *Airport Emergency Plan (AEP)* sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dimana bahwa setiap Bandar udara wajib memiliki dokumen *AEP* sebagai *SOP* saat terjadi keadaan darurat;
b) Melakukan kegiatan bimbingan teknis (bimtek), sosialisasi *SARPs* di bidang keamanan penerbangan termasuk yang dilakukan bersama dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X;
c) Melaksanakan pengawasan (audit, inspeksi, test) di bidang keamanan penerbangan terhadap Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) dan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) secara berkelanjutan;

d) Melakukan upaya-upaya peningkatan kualifikasi SDM, prosedur dan fasilitas keamanan penerbangan, diantaranya:

1. Peningkatan kualifikasi SDM dilakukan melalui sosialisasi terkait peraturan dan regulasi bidang keamanan penerbangan juga dilakukan pelatihan/diklat terkait penanggulangan kondisi keadaan darurat akibat gangguan keamanan (situasi hijau, kuning dan merah);



Gambar III.28
Pemeriksaan X-Ray di Bandar Udara

2. Peningkatan terkait prosedur diarahkan pada penyusunan *ASP (Airport Security Programme)* yang harus dimiliki oleh setiap bandar udara yang beroperasi;
3. Peningkatan kualitas fasilitas keamanan dilakukan melalui pemenuhan standar minimal fasilitas keamanan di Bandar udara di seluruh Indonesia (pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengadaan alat) ;

e) Dilakukan program latihan progresif terdiri dari :

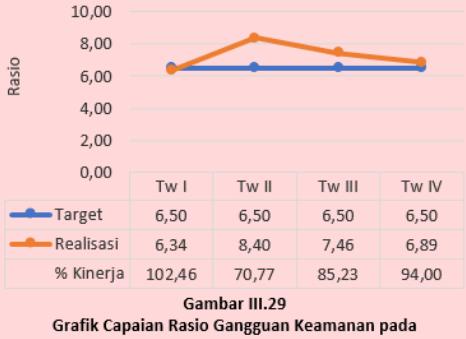
1. Latihan *Tabletop (tabletop exercise)* yaitu jenis latihan simulasi strategi yang dilakukan didalam ruangan dengan sarana meja bergambar yang berisi miniatur bandar udara, model pesawat udara dan mobil pemadam kebakaran yang digunakan untuk menguji kemampuan personel dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kegiatan pertolongan dan pemadaman kebakaran yang mungkin dilakukan sebelum mencoba latihan dilapangan. Latihan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun.
2. Latihan Keterampilan Khusus (*partial exercise*) adalah suatu bentuk latihan/uji coba dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat yang melibatkan anggota komite yang berada di bandar udara, dan dilaksanakan dalam rangka menguji seluruh fasilitas, prosedur dan kompetensi personel terkait untuk menghadapi keadaan darurat/siaga yang sebenarnya. Latihan ini dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun;
3. Latihan Skala Penuh (*full-scale exercises*) adalah suatu bentuk latihan/uji coba dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat yang melibatkan semua anggota komite, dan dilaksanakan dalam rangka menguji seluruh fasilitas, prosedur dan kompetensi personel terkait untuk menghadapi keadaan darurat/siaga yang sebenarnya. Latihan ini dilakukan 1 (satu) kali dalam dua tahun.

3) Transportasi Perkeretaapian

Rasio gangguan keamanan diperoleh dari hasil menganalisis keselamatan perkeretaapian yang mengacu pada jumlah gangguan keamanan perkeretaapian dan dinormalisasi dengan perjutaan Km tempuh (*Km traveled*) pada tahun tersebut.

$$\text{Rasio Gangguan Keamanan Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Gangguan Keamanan}}{\text{Km tempuh}} \times 1.000.000$$

Realisasi Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api sampai dengan akhir Tahun 2018 sebesar 6,89 Rasio gangguan keamanan/1 juta km atau capaian sebesar 94% dari target yang ditetapkan tahun 2018 yaitu sebesar 6,50 Rasio gangguan keamanan/1 juta km.



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	6,50	6,50	6,50	6,50
Realisasi	6,34	8,40	7,46	6,89
% Kinerja	102,46	70,77	85,23	94,00

Gambar III.29
Grafik Capaian Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018

Jumlah kejadian gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api pada tahun 2018 sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) kejadian gangguan, dengan kilometer tempuh 66.489.586 km sehingga dengan formulasi di atas diperoleh rasio gangguan keamanan sebesar 6,89.

$$\text{Rasio Gangguan Keamanan Transp. Perkeretaapian} = \frac{458 \text{ kejadian}}{66.489.586 \text{ km}} \text{ x } 1.000.000 = 6,89$$

$$\text{\% Capaian} = \frac{(2 \text{ x } 6,50) - 6,89}{6,50} \text{ x } 100\% = 94,00\%$$

Gangguan keamanan transportasi perkeretaapian adalah berupa usaha sabotase, pelemparan batu, dan pencurian aset, dengan kejadian sebagai berikut:

Tabel III.17 Gangguan Keamanan Transportasi Perkretaapian Tahun 2018

Jenis Gangguan Keamanan	Jumlah Kejadian
a) Usaha Sabotase/mencelakakan KA	12
b) Pelemparan	261
c) Pencurian Aset	185
Total	**458**

Sumber: Ditjen Perkeretaapian, 2018

Kurang optimalnya pencapaian indikator Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (kejadian vandalisme) dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain:

a) Jalur kereta api yang masih belum steril sehingga masih banyak masyarakat yang keluar masuk jalur kereta api tanpa izin;
b) Masih adanya masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran rendah dalam menjaga fasilitas publik sehingga menyebabkan terjadinya tindakan pengerusakan dan pencurian komponen sarana dan prasarana perkeretaapian.

Untuk menurunkan angka gangguan keamanan pada transportasi perkeretaapian, Kementerian Perhubungan melakukan tindakan preventif, diantaranya:

a) Pemagaran sepanjang jalur kereta api sehingga tidak ada lagi yang keluar masuk jalur kereta api tanpa izin;
b) Sosialisasi terkait perlunya peningkatan keamanan pada fasilitas publik khususnya perkeretaapian kepada masyarakat di sekitar jalur kereta api maupun di lingkungan sekolah, sehingga memberikan pengetahuan atas dampak gangguan keamanan prasarana dan sarana perkeretaapian dalam menunjang keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan transportasi secara umum.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Ketiga

IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada Tahun 2015 dan 2016 tidak terisi (hal ini termasuk berlaku pada sub sektor transportasi laut, udara dan perkeretaapian). Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi tahun sebelumnya, terdapat penurunan persentase capaian target, namun demikian hal itu menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan semakin baik karena rasio gangguan keamanan transportasi dapat diturunkan, sebagaimana **Tabel III.18** berikut:

Tabel III.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi	Rasio	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	4,44	2,31	148,05
			2018	2,39	2,35	101,54

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Capaian rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi untuk masing-masing sub sektor transportasi Tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

a. Transportasi Laut

Capaian kinerja rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut Tahun 2017-2018 mengalami peningkatan, dan realisasi kinerja mengalami penurunan. Penurunan capaian kinerja ini menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan semakin baik, karena rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut menurun. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.19** berikut:

Tabel III.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut	Rasio	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	2,45	0,30	187,76
			2018	0,50	0	200,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

b. Transportasi Udara

Capaian kinerja rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara Tahun 2017-2018 mengalami peningkatan, dan realisasi kinerja mengalami penurunan. Penurunan capaian kinerja ini menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan semakin baik, karena rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara menurun. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.20** berikut:

Tabel III.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Udara Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara	Rasio	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	0,17	0,03	182,35
			2018	0,16	0	200,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Transportasi Perkeretaapian

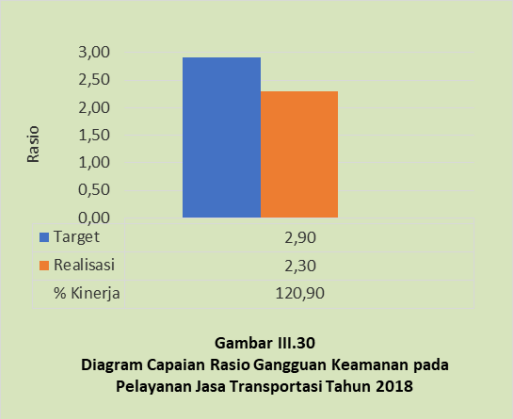
Capaian kinerja rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi perkeretaapian Tahun 2017-2018 kurang optimal, karena rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi perkeretaapian meningkat. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.21** berikut:

Tabel III.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Perkeretaapian Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi perkeretaapian	Rasio	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	10,70	6,59	138,41
			2018	6,50	6,89	94,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

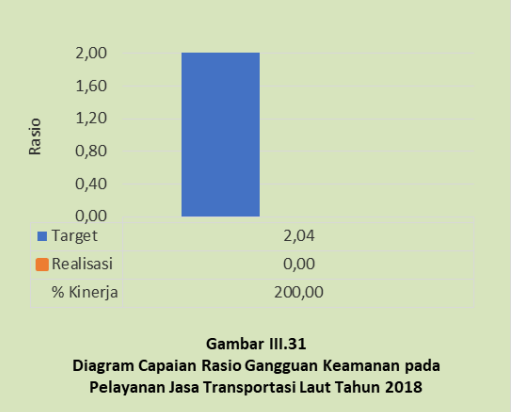
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Ketiga



Gambar III.30
Diagram Capaian Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019, rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi pada Tahun 2018 memiliki target 2,90 dan realisasi 2,30 atau mencapai 120,90%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.30.**

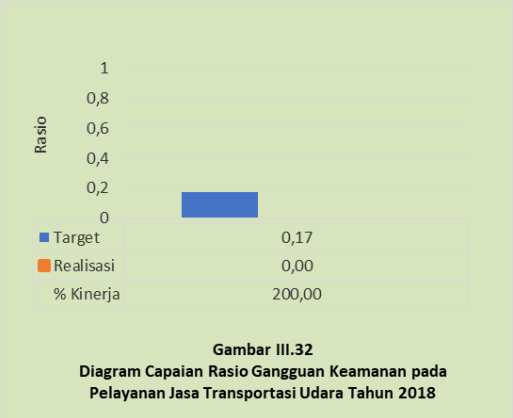
Sedangkan capaian rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi pada Tahun 2018 tiap sektor transportasi bila dibandingkan dengan masing-masing target Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:



Gambar III.31
Diagram Capaian Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut Tahun 2018

a. Transportasi Laut

Capaian kinerja rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah mencapai target, yaitu mencapai 200,00% dari target 2,04 rasio.



Gambar III.32
Diagram Capaian Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Udara Tahun 2018

b. Transportasi Udara

Capaian kinerja rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah mencapai target, yaitu mencapai 200,00% dari target 0,17 rasio.



Gambar III.33
Diagram Capaian Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Perkeretaapian Tahun...

c. Transportasi Perkeretaapian

Capaian kinerja rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi perkeretaapian Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 masih belum optimal, yaitu mencapai 94,00% dari target 6,50 rasio.

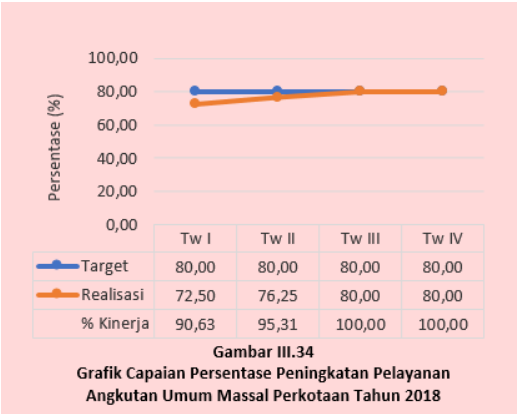
III.2.3.Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Ketiga

Sasaran Kementerian Perhubungan yang ketiga adalah meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang diukur dengan 5 IKU dengan rincian pencapaian sasaran ini yaitu:

1. IKU 4 yaitu persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan

a. **Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keempat**

Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan memiliki target 80,00% dan realisasinya mencapai 100,00%, baik untuk transportasi darat maupun transportasi perkeretaapian, sebagaimana **Gambar III.34.**



Gambar III.34
Grafik Capaian Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Tahun 2018

1) Transportasi Darat

Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan di sektor Perhubungan Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi Kementerian PAN-RB. Salah satu rekomendasi Kementerian PAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis *output* menjadi IKU berbasis *outcome* (hasil) pada Tahun 2017, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2017 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni Tahun 2015 dan 2016.

Untuk menghitung persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan Transportasi Darat yaitu melalui *BRT* (*Bus Rapid Transit*), digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Transportasi Darat} = \frac{\text{Jumlah Kota yang telah menerapkan } \textit{BRT(Bus Rapid Transit)}}{\text{Jumlah Target Kota yang menerapkan } \textit{BRT(Bus Rapid Transit)}} \times 100\%$$

Catatan:

a) Jumlah Kota yang telah menerapkan BRT *(Bus Rapid Transit)* adalah jumlah kota dengan pengadaan BRT *(Bus Rapid Transit)* melalui sumber dana APBN dan APBD;

b) Jumlah Target Kota yang menerapkan BRT *(Bus Rapid Transit)* adalah Jumlah Rencana kota yang akan menerapkan BRT *(Bus Rapid Transit)* sesuai dengan *Draft* RITD (Rencana Induk Transportasi Darat).

Capaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan transportasi darat tahun 2018 sebesar 100%, yaitu kota yang telah menerapkan BRT *(Bus Rapid Transit)* sesuai target sebesar 51 kota (telah menerima BRT *(Bus Rapid Transit)* sejak Tahun 2005), meskipun untuk operasionalnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing. Daftar Kota Perkotaan Pengembangan Bus BRT *(Bus Rapid Transit)* sebagaimana **Lampiran 19.** Sedangkan kota yang menerima BRT *(Bus Rapid Transit)* pada tahun 2018 adalah sebanyak 13 (tiga belas) kota, yaitu:

Tabel III.22 Pengembangan *BRT* (*Bus Rapid Transit*) Tahun 2018

PROVINSI	KOTA/KAB
1. Sumatera Selatan	1. Kab. Ogan Komering Ulu
2. Jawa Barat	2. Kota Bekasi
	3. Kab. Sukabumi
3. Jawa Tengah	4. Provinsi Jawa Tengah
4 Bali	5. Kab. Gianyar
5. Nusa Tenggara Timur	6. Kota Kupang

PROVINSI	KOTA/KAB
6. Kalimantan Barat	7. Provinsi Kalimantan Barat
7. Kalimantan Tengah	8. Kota Palangkaraya
8. Kalimantan Selatan	9. Provinsi Kalimantan Selatan
9. Kalimantan Utara	10. Provinsi Kalimantan Utara
10. Gorontalo	11. Prov. Gorontalo
11. Sulawesi Tenggara	12. Kota Kendari
	13. Kota Bau-Bau

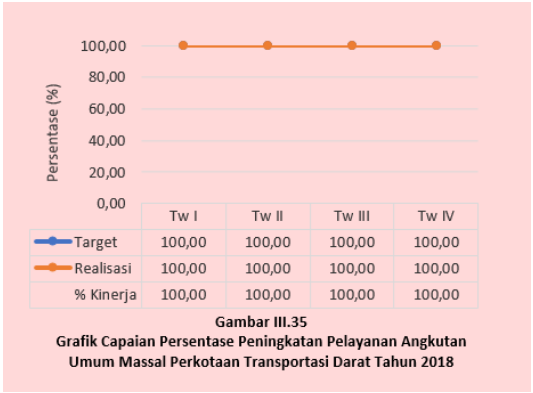
Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2018

$$\% \text{ Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Transp. Darat} = \frac{51 \text{ kota}}{51 \text{ kota}} \times 100\% = 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Angka 100% pada penyebut di dalam perhitungan presentase capaian merupakan hasil perhitungan Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan transportasi darat yang menjadi target pada Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018. Daftar Kota Perkotaan Pengembangan Bus *BRT* sebagaimana **Lampiran 20.**

Pencapaian persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan, sebagaimana **Gambar III.35.**



Gambar III.35
Grafik Capaian Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Transportasi Darat Tahun 2018

Untuk meningkatkan pelayanan angkutan *BRT*, Kementerian Perhubungan akan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan memberikan bantuan teknis bus *BRT* berupa fasilitas pendukung *BRT*. Selain itu, akan dilakukan penyusunan peraturan terkait bantuan teknis operasional *BRT.*

2) Transportasi Perkeretaapian

Persentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan diukur melalui persentase peningkatan antara jumlah kota yang terlayani angkutan kereta api perkotaan pada tahun berjalan dibanding dengan jumlah kota yang terlayani angkutan kereta api, yaitu:

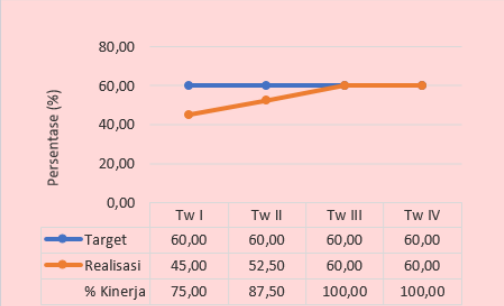
$$\text{Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Transp. Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah kota yang dilayani KA Perkotaan pada tahun berjalan}}{\text{Target Jumlah Kota yang dilayani KA Perkotaan pada 2019}} \times 100\%$$

Realisasi persentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan akhir Tahun 2018 sebesar 60%, yaitu sebanyak 8 (delapan) kota, atau capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 60%, yaitu sebanyak 8 (delapan) kota.

$$\%\ \text{wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan KA perkotaan} = \frac{8\ \text{kota}}{8\ \text{kota}} \times 100\% = 100\%$$

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{60\%}{60\%} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi dapat dilihat pada **Gambar III.36**.



Gambar III.36
Grafik Capaian Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018

Keberhasilan terhadap capaian persentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan sebesar 100% yaitu adanya 8 (delapan) wilayah perkotaan yang telah tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan antara lain:

a) Jakarta

Pada daerah Jabodetabek (Jakarta Bogor Tangerang Bekasi) terdapat KRL (Kereta Rel Listrik) yang memiliki beberapa lintas pelayanan, misalnya: Jakarta Kota–Bekasi–Cikarang, Jakarta Kota–Bogor, Tanah Abang–Maja–Rangkasbitung dan Tanah Abang–Tangerang;

b) Bandung

Pada wilayah perkotaan Bandung terdapat KA Perkotaan yang melayani lintas Kiaracondong – Cicalengka, yaitu Ekonomi Lokal Bandung Raya. KA Perkotaan di Bandung beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 434 Tahun 2016 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

c) Semarang

Pada wilayah perkotaan Semarang terdapat KA Perkotaan yang melayani lintas Semarang Poncol–Tegal dan Solo, yaitu Ekonomi Kaligung dan Kalijaga.

d) Yogyakarta

Pada lintas Yogya–Solo realisasi perjalanan KA Perkotaan di tahun 2017 terdapat 2 (dua) kereta, yaitu: Sidomukti dan Prambanan Ekspres (Prameks). KA Perkotaan di Yogyakarta beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 434 Tahun 2016 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

e) Surabaya

Pada wilayah perkotaan Surabaya realisasi perjalanan KA Perkotaan di tahun 2018 terdapat 3 (tiga) kereta, yaitu: KA Penataran yang melayani lintas Surabaya–Blitar, KA Tumapel yang melayani lintas Surabaya–Malang, dan KA Jenggala yang melayani lintas Surabaya–Mojokerto. KA Perkotaan di Surabaya beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 434 Tahun 2016 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

f) Medan

Pada wilayah perkotaan Medan terdapat KA Perkotaan yang melayani lintas Binjai–Medan yaitu Sri Lelawangsa. KA Perkotaan di Medan beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 434 Tahun 2016 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

g) Palembang

Pada wilayah perkotaan Palembang terdapat KA perkotaan *LRT* dengan jalur kereta api *elevated* sepanjang 23 km yang melayani lintas Bandara Sultan Mahmud II – Stadion Jakabaring-Ogan Permata Indah (OPI) yang telah beroperasi sejak 1 Agustus 2018.

h) Padang

Pada wilayah perkotaan Padang terdapat KA Bandara Minangkabau yang melayani KA perkotaan serta akses menuju bandara dengan lintas Pelayanan Padang-Bandara Internasional Minangkabau yang telah beroperasi sejak 21 Mei 2018.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Keempat

IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada Tahun 2015 dan 2016 tidak terisi (hal ini termasuk berlaku pada sub sektor transportasi darat dan perkeretaapian). Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan yang ditetapkan pada tahun 2017, terdapat target tercapai 100,00%, yaitu:

Tabel III.23
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	36,93	36,93	100,00
			2018	80,00	80,00	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan untuk transportasi darat dan perkeretaapian tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

a. Transportasi Darat

Capaian kinerja persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan untuk transportasi darat Tahun 2017-2018 telah memenuhi target sebesar 100,00%, dimana capaian kinerja ini menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan cukup baik. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.24** berikut:

Tabel III.24
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Transportasi Darat Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan Transportasi Darat	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	53,85	53,85	100,00
			2018	100,00	100,00	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

b. Transportasi Perkeretaapian

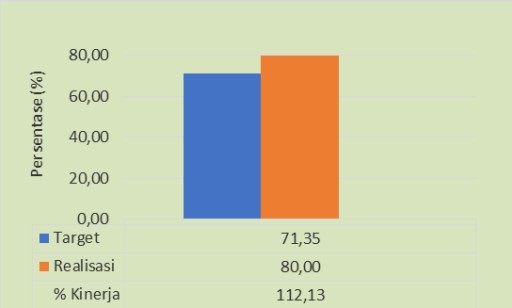
Capaian kinerja persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan untuk transportasi perkeretaapian Tahun 2017-2018 telah memenuhi target sebesar 100,00%, dimana capaian kinerja ini menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan cukup baik. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.25** berikut:

Tabel III.25
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan Transportasi Perkeretaapian	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	20,00	20,00	100,00
			2018	60,00	60,00	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

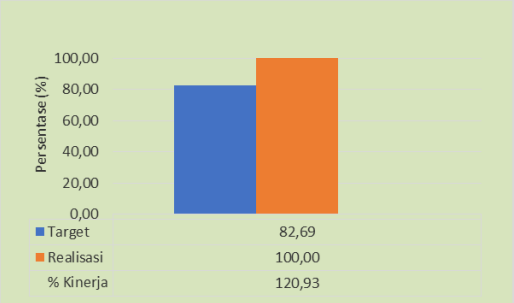
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Keempat



Gambar III.37
Diagram Capaian Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019, persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan pada Tahun 2018 memiliki target 71,35% dan realisasi 80,00% atau mencapai 112,13%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.37.**

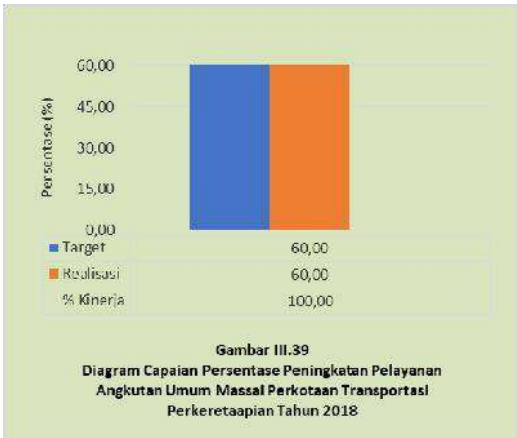
Rincian pencapaian IKU persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan dari sektor transportasi darat dan perkeretaapian, yaitu:



Gambar III.38
Diagram Capaian Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Transportasi Darat...

a. Transportasi Darat

Capaian kinerja persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan transportasi darat Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah melebihi target, yaitu mencapai 120,93% dari target 82,69%.



Gambar III.39
Diagram Capaian Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018

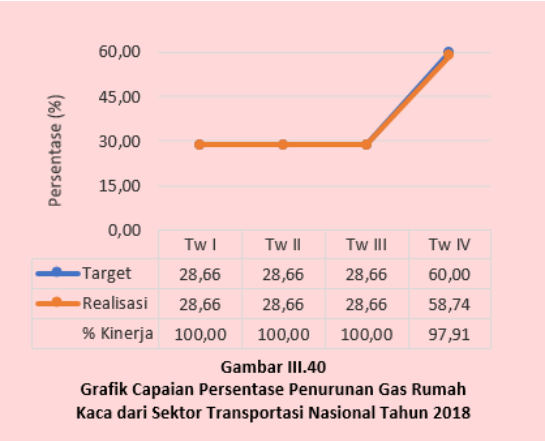
b. Transportasi Perkeretaapian

Capaian kinerja persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan transportasi perkeretaapian Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah mencapai target 100,00% yaitu realisasi sebesar 60,00%.

2. IKU 5 yaitu Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional

a. **Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Kelima**

Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional Tahun 2018 memiliki target 60% dan realisasi mencapai 58,74% sehingga capaiannya adalah 97,91%.



Gambar III.40
Grafik Capaian Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Nasional Tahun 2018

Persentase capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) setiap tahunnya dihitung berdasarkan baseline target penurunan emisi setiap tahun sampai dengan 2020 sebesar 20,054 juta ton CO2e (pada 2019 sebesar 18,962 juta ton CO_2e), mengacu Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan merupakan *leading sektor* bagi tercapainya target IKU 5 yaitu Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Nasional, yang bertugas untuk melakukan pendampingan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan aksi mitigasi dalam upaya penurunan emisi GRK sektor transportasi dilaksanakan oleh masing-masing sub sektor.

Secara umum metodologi perhitungan penurunan emisi GRK sektor transportasi merupakan selisih dari jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas transportasi eksisting dikurangi jumlah emisi yang dihasilkan dari aktifitas mitigasi.

$$Emisi\ GRK = Konsumsi\ Energi\ x\ Faktor\ Emisi$$

$$Penurunan\ Emisi\ (\Delta\ emisi) = emisi\ baseline - emisi\ aksi\ mitigasi$$

$$Prosentase\ Penurunan\ emisi\ (\%) = \frac{\Delta\ emisi\ tahun\ x}{target\ \Delta\ emisi\ tahun\ x}\ x\ 100\%$$

Pada tahun 2018 target persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional sebesar 60% dari 11.777.000 ton CO_2e yakni 7.066.200 ton CO_2e . Dari target tersebut realisasi target perjanjian kinerja 60% tercapai 6.918.255 ton CO_2e.

% Penurunan emisi = $\frac{6.918.255 \text{ ton } CO_2e}{11.777.000 \text{ ton } CO_2e}$ x 100% = 58,74%

% Capaian = $\frac{58,74\%}{60\%}$ x 100% = 97,91%

Dengan rincian realisasi mitigasi dari masing-masing sub sektor sebagai berikut:

Tabel III.26
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Nasional Tahun 2018

Mitigasi Sub Sektor	Target 2018	Target PK (60%)	Realisasi
1. Transportasi Darat	1.180.000	708.000	2.253.356
2. Transportasi Laut	504.000	302.400	733.952
3. Transportasi Udara	9.183.000	5.509.800	1.527.407
4. Transportasi Perkeretaapian	910.000	546.000	2.403.540
Total	**11.777.000**	**7.066.200**	**6.918.255**

Sumber: PPTB, 2018

Belum otimalnya pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1) Dasar perhitungan penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi adalah penurunan emisi gas rumah kaca melalui implementasi berbagai aksi mitigasi yang tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 201 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perhubungan dan Inventarisasi GRK Sektor Perhubungan Tahun 2010-2020 sehingga perhitungan sangat erat kaitannya dengan implementasi aksi mitigasi yang terdapat pada masing-masing sub sektor;

2) Sampai dengan tahun 2018, masih terdapat beberapa aksi mitigasi yang belum terbangun ataupun belum beroperasi sehingga belum dapat dihitung penurunannya;
3) Terdapat aksi mitigasi yang diimplementasikan dibawah kewenangan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sehingga menjadi klaim Rencana Aksi Kementerian lain dan Rencana Aksi Daerah;
4) Potensi penurunan emisi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dikarenakan terdapat perbaikan (*upgrade*) metode perhitungan (*ICAO Carbon Calculator*), sehingga berpengaruh terhadap target capaian;
5) Adanya kebijakan-kebijakan di sub sektor selaku pelaksana aksi mitigasi yang berdampak terhadap tidak terlaksananya kegiatan yang mampu mengurangi emisi GRK seperti moratorium pengadaan *BRT* dan tidak dianggarkannya kegiatan *Smart Driving (tahun 2018 dan 2019).*
6) Kebijakan penghematan anggaran terkait program kegiatan pendampingan pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan RAN dan RAD GRK sektor transportasi yang berpengaruh terhadap keoptimalan pendampingan dalam mendorong aksi mitigasi serta intensifikasi perhitungan emisi GRK sektor transportasi.

Rincian aksi mitigasi yang dilakukan masing-masing sub sektor untuk mencapai target pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional pada tahun 2018 yang telah di identifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel III.27
Rincian Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi Darat Tahun 2018

Aksi Mitigasi Transportasi Darat	Penurunan Emisi CO_2e
a) Mendorong Pembinaan dan Pengembangan sistem transit – *Bus Rapid Transit (BRT)/semi BRT*	1.275.474
b) Pemanfaatan teknologi lalu lintas untuk kelancaran lalu lintas di jalan nasional (*Area Traffic Control System/ATCS*)	541.171
c) Pembangunan Budaya Berkendara Yang Lebih Baik (*Smart Driving*)	499
d) Penggunaan *Solar Cell* pada Penerangan Jalan Umum (PJU)	624
e) Penerapan Kebijakan Ganjil Genap pada acara ASEAN Games dan PARA Games	325.588
f) Low Cost Green Car	110.000
Total	**2.253.356**

Sumber: PPTB, 2018

Tabel III.28
Rincian Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi Laut Tahun 2018

Aksi Mitigasi Transportasi Laut	Penurunan Emisi CO_2e
a) Efisiensi manajemen operasional pelabuhan (pembangunan teknologi *solar cell* pada Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/SBNP)	349.082
b) Modernisasi kapal (peremajaan kapal dan teknologi kapal) untuk kapal perintis	12.743
c) Penutuhan Kapal (*Scrapping* Kapal)	372.127
Total	**733.952**

Sumber: PPTB, 2018

Tabel III.29
Rincian Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi Udara Tahun 2018

Aksi Mitigasi Transportasi Udara	Penurunan Emisi CO_2e
a) Peremajaan armada angkutan udara	477.500
b) Penyempurnaan sistem dan prosedur pengoperasian serta perawatan pesawat udara (Efisiensi Operasional Penerbangan)	579.890
c) *Performance Base Navigation* (PBN)	438.621
d) Penghijauan lingkungan bandar udara	27.976
e) Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	3.420
Total	**1.527.407**

Sumber: PPTB, 2018

Tabel III.30
Rincian Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018

Aksi Mitigasi Transportasi Perkeretaapian	Penurunan Emisi CO_2e
Pembangunan jalur ganda lintas utara Jawa	868.000
Pembangunan KA perkotaan Jabodetabek	1.192.000
Terbangunnya jalur KA Trans Sumatera	343.000
Pengoperasian KA Bandara Soekarno Hatta	350
KA Bandara Kuala Namu	190
Total	**2.403.540**

Sumber: PPTB, 2018

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional yakni melakukan koordinasi dan pendampingan perhitungan aksi mitigasi penurunan emisi GRK dengan subsektor terkait termasuk bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Koordinasi dilakukan melalui forum rapat, FGD, maupun surat.

Untuk mengoptimalkan proses perhitungan emisi GRK PPTB telah bersurat kepada *stakeholder* terkait guna menginventarisasi data aktivitas aksi mitigasi.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Utama Kelima

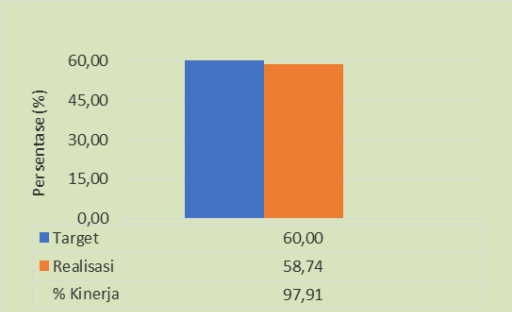
IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada Tahun 2015 dan 2016 tidak terisi.Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional yang ditetapkan pada tahun 2017, terdapat penurunan persentase capaian kinerja, meskipun realisasi meningkat. Pencapaian tersebut sebagaimana **Tabel III.31** berikut:

Tabel III.31
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Nasional Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	40,00	40,00	100,00
			2018	60,00	58,74	97,91

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Kelima



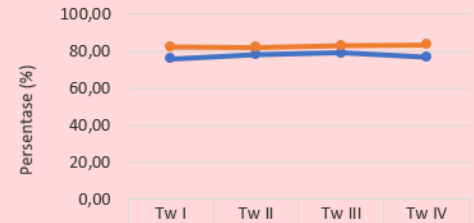
Gambar III.41
Diagram Capaian Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Nasional Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional pada Tahun 2018 memiliki target 60% dan realisasi 58,74% atau mencapai 97,91%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.41** berikut:

3. IKU 6 yaitu Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi

a. **Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keenam**

Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi pada tahun 2018 memiliki target 76,49% dan realisasinya sebesar 83,59% atau mencapai 109,29% dari target Tahun 2018. Pencapaian IKU ini merupakan kontribusi dari sub sektor transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian, namun pencapaian target ini kurang optimal dikarenakan transportasi udara belum mencapai target yang ditetapkan.



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	75,92	78,10	78,92	76,49
Realisasi	82,25	82,04	82,67	83,59
% Kinerja	108,34	105,05	104,75	109,29

Gambar III.42
Grafik Capaian Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi Tahun 2018

Rinciannya adalah sebagai berikut:

1) Transportasi Darat

Persentase capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi Kementerian PAN-RB. Salah satu rekomendasi Kementerian PAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis *outcome* (hasil) pada Tahun 2017, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2017 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni Tahun 2015 dan 2016.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung indikator kinerja persentase capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi Darat} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Waktu On Time Keberangkatan Kapal Penyeberangan dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Realisasi Trip dalam 1 tahun}} \text{ x } 100\%$$

Catatan:

a) Jumlah kejadian waktu *on time* keberangkatan kapal penyeberangan adalah jumlah trip kejadian waktu *on time* keberangkatan kapal penyeberangan di 7 (tujuh) lintasan utama (komersil) dalam satu tahun;

b) Jumlah realisasi trip adalah jumlah trip keberangkatan di 7 (tujuh) lintas komersil dalam 1 tahun;

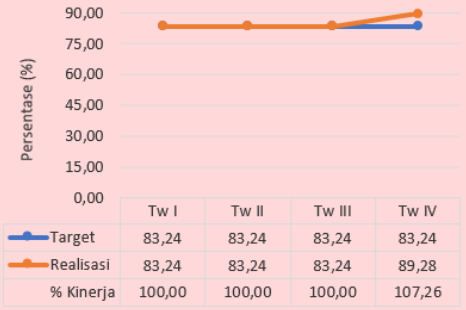
Capaian Indikator Kinerja Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 107,26%. Dengan target Indikator Kinerja Persentase *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 83,24% sedangkan

realisasi Indikator Kinerja Persentase *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 89,28%, yaitu:

$$\% \text{ Capaian } OTP \text{ Sektor Transportasi Darat } = \frac{625 \text{ kejadian}}{7 \text{ lintas}} \times 100\% = 89{,}28\%$$

$$\% \text{ Capaian } = \frac{89{,}28\%}{83{,}24\%} \times 100\% = 107{,}26\%$$

Angka 83,24% pada penyebut di dalam perhitungan presentase capaian merupakan hasil perhitungan rasio konektivitas transportasi darat yang menjadi target pada Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.



Gambar III.43
Grafik Capaian Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi Darat Tahun 2018

Pencapaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat tahun 2018 pada angkutan penyeberangan pada 7 (tujuh) lintas adalah sebagai berikut:

Tabel III.32
Pencapaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat Tahun 2018

No.	Lintas	Target OTP (%)	Realisasi
1	Merak – Bakauheni	84,70	90,00
2	Padangbai – Lembar	83,00	90,00
3	Bajoe – Kolaka	84,00	84,00
4	Ketapang – Gilimanuk	85,00	96,00
5	Kariangau – Penajam	83,00	83,00
6	Tanjung Api-api – Tanjung Kelian	80,00	90,00
7	Kayangan Potatono	83,00	92,00
Jumlah		**582,70**	**625**
Rata-rata OTP		**83,24**	**89,28**

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2018

Pencapaian ini didukung oleh program pemeriksaan kapal yang rutin dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Darat. Selain itu, Ditjen Perhubungan Darat juga melakukan penerbitan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan dan pemeriksaan kapal angkutan penyeberangan setelah *docking* yang mana dalam kegiatan tersebut dilakukan juga pemeriksaan terhadap kecepatan kapal. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan yaitu minimal 10 knot, sesuai dengan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.4608/AP.005/DRJD/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.

Untuk tetap mempertahankan kinerja *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat, Kementerian Perhubungan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;

b) Melakukan rapat evaluasi;

c) Melakukan *punishment* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Transportasi Laut

Persentase Capaian *On Time Performance* (*OTP*) merupakan persentase dari pencapaian kinerja di pelabuhan. Pencapaian kinerja di pelabuhan terdiri dari pencapaian kinerja pelayanan kapal (yang terdiri dari pencapaian *Waiting Time* (*WT*) dan pencapaian *Approach Time (AT*)) dan pencapaian kinerja di terminal (pencapaian *Effective Time : Berthing Time* (*ET:BT*)).

a) Pencapaian *Waiting Time (WT)*

Waiting Time (WT) merupakan selisih waktu antara waktu penetapan kapal masuk di area lego jangkar dengan waktu saat pandu naik ke atas kapal (*Pilot on Board*/POB) pada pelayanan kapal masuk ke pelabuhan. *Waiting Time* (WT) dihitung dalam satuan jam.

$$\text{Pencapaian } WT \text{ Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian WT pada terminal pelabuhan}}{\text{Standar WT pada terminal pelabuhan}} \text{ x } 100\%$$

b) Pencapaian *Approach Time (AT)*

Approach Time (AT) merupakan waktu perjalanan untuk kapal masuk dan/atau kapal keluar dari dan/atau ke pelabuhan. Untuk kapal masuk ke pelabuhan dihitung saat kapal mulai bergerak dari lokasi lego jangkar sampai saat ikat tali di tambatan (*first line*), sedangkan untuk kapal keluar dari pelabuhan dihitung mulai lepas tali (*last line*) sampai kapal mencapai area ambang luar (keluar dari area lego jangkar). *Approach Time* (AT) dihitung dalam satuan jam.

$$\text{Pencapaian } AT \text{ Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian AT pada terminal pelabuhan}}{\text{Standar AT pada terminal pelabuhan}} \text{ x } 100\%$$

c) Pencapaian *Effective Time* : *Berthing Time* (ET:BT)

Effective Time : Berthing Time (ET:BT) atau rasio waktu kerja kapal di tambatan merupakan perbandingan waktu kapal berkerja efektif di dermaga (terminal) dengan

waktu kapal selama di tambatan dermaga (terminal). *Effective Time* : *Berthing Time* (ET:BT) dihitung dalam satuan persentase (%).

$$\text{Pencapaian } (ET:BT) = \frac{\text{Capaian (ET:BT) pada terminal pelabuhan}}{\text{Standar (ET: BT) pada terminal pelabuhan}} \text{ x } 100\%$$

Rumus Perhitungan Pencapaian *On Time Performance (OTP)* Transportasi Laut merupakan rata–rata Capaian atas *Waiting Time* (*WT*) + *Approach Time* (*AT*) + *Effective Time : Berthing Time* (*ET:BT*) yaitu:

$$\text{OTP Transportasi Laut} = \frac{\text{Pencapaian } WT + \text{Pencapaian } AT + \text{Pencapaian } (EB:ET)}{3} \text{ x } 100\%$$

Target pencapaian *On Time Performance* pada tahun 2018 sebesar 68,70% yang berarti bahwa *On Time Performance* tahun 2018 diharapkan dapat mencapai 68,70% dari standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang telah ditetapkan.

Nilai *WT* dan *AT* diperoleh dari realisasi pelayanan pemanduan di pelabuhan. Ketersediaan tenaga pandu dan kondisi geografis alur pelayaran mempengaruhi tingkat pelayanan pandu. Permintaan pemanduan secara bersamaan namun tidak didukung oleh ketersedian tenaga pandu akan menghambat capaian *WT*, sedangkan kondisi alur pelayanan yang berkelok serta arus pasang surut juga dapat menghambat capaian AT. Nilai ET : BT merupakan perbandingan waktu kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal (ET) dengan waktu kapal tambat di dermaga (BT). Pencapaian ET : BT sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan tenaga kerja di pelabuhan. Saat terjadi hujan, maka aktifitas kegiatan bongkar muat akan dihentikan sementara. Penggunaan tenaga kerja di pelabuhan masih dominan, sehingga aktifitas bongkar muat di pelabuhanakan terhambat dengan menurunnya produktifitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan.

Realisasi *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Laut terdiri dari:

$$\text{Pencapaian } AT \text{ Pelabuhan} = \frac{87\%}{100\%} \text{ x } 100\% = 87\%$$

$$\text{Pencapaian } WT \text{ Pelabuhan} = \frac{92\%}{100\%} \text{ x } 100\% = 92\%$$

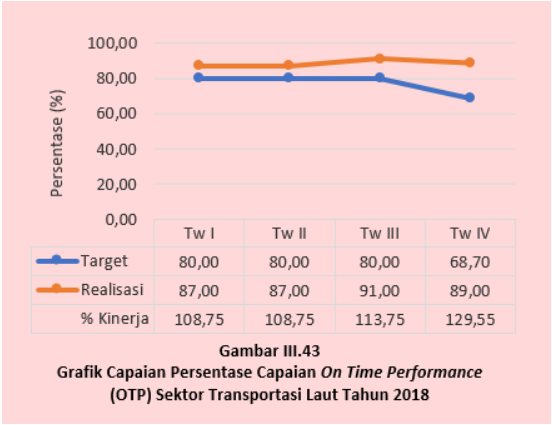
$$\text{Pencapaian } (ET:BT) \text{ Pelabuhan} = \frac{88\%}{100\%} \text{ x } 100\% = 88\%$$

Sehingga diperoleh:

$$OTP \text{ Transportasi Laut} = \frac{87\% + 92\% + 88\%}{3} \times 100\% = 89\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{89\%}{68{,}7\%} \times 100\% = 129{,}55\%$$

Pencapaian OTP Transportasi Laut melebih target yang telah ditetapkan disebabkan oleh adanya koordinasi yang baik antara Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dalam mengatur kegiatan operasional di pelabuhan, serta ditunjang dengan sarana dan prasarana dan peralatan bongkar muat yang handal. Namun pencapaian *On Time Performance* belum bisa mencapai nilai standar kinerja pelayanan operasioanal pelabuhan sebesar 11%, hal ini disebabkan oleh faktor ekternal yaitu kondisi alur, cuaca, masalah tenaga kerja bogkar muat pelabuhan, serta distribusi logistik di wilayah setempat yang akan memperlambat pencapaian *On Time Performance* sektor transportasi laut.



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	80,00	80,00	80,00	68,70
Realisasi	87,00	87,00	91,00	89,00
% Kinerja	108,75	108,75	113,75	129,55

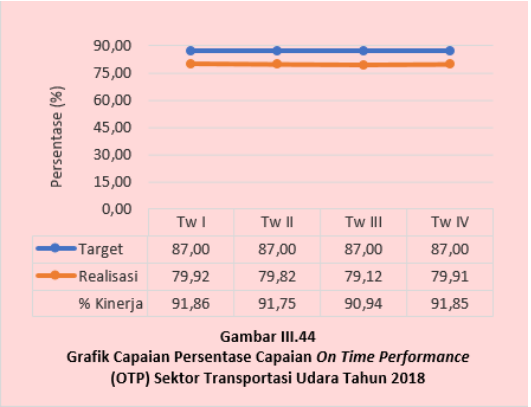
Gambar III.43
Grafik Capaian Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi Laut Tahun 2018

3) Transportasi Udara

Indikator kinerja OTP transportasi udara ini dihitung dalam satuan persentase (%) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ Kejadian\ Waktu\ On\ Time\ Keberangkatan\ Dalam\ 1\ Tahun}{Jumlah\ Izin\ Rute\ Keberangkatan\ Dalam\ 1\ Tahun}\ x\ 100$$

Jumlah kejadian Waktu *On Time* Keberangkatan dalam 1 Tahun dihitung berdasarkan Jumlah Kejadian Pesawat Udara yang berangkat tepat waktu pada seluruh armada pesawat Udara nasional yang beroperasi pada tahun berjalan (Tahun 2018) yaitu 430.685 kejadian, sementara jumlah izin rute keberangkatan dalam 1 tahun adalah jumlah Izin Rute Keberangkatan yang dalam periode tahun



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	87,00	87,00	87,00	87,00
Realisasi	79,92	79,82	79,12	79,91
% Kinerja	91,86	91,75	90,94	91,85

Gambar III.44
Grafik Capaian Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi Udara Tahun 2018

berjalan (Tahun 2018) atau dapat diartikan sebagai Jumlah pergerakan Pesawat udara saat berangkat selama periode waktu 2018, yaitu 538.960 penerbangan.

Sehingga didapatkan hasil nilai *On Time Performance* Transportasi Udara Nasional adalah sebesar 79,91% yang setara dengan capaian kinerja sebesar 91,85% dari target OTP yang ditetapkan tahun 2018 sebesar 87%.

$$\textit{OTP}\ \text{Transportasi Udara} = \frac{430.685\ \text{penerbangan}}{538.960\ \text{penerbangan}} \times 100\% = 79{,}91\%$$

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{79{,}91\%}{87\%} \times 100\% = 91{,}85\%$$

Rincian pergerakan pesawat sepanjang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel III.33
Pergerakan Pesawat Pada 5 Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) Niaga Berjadwal Tahun 2018

No	Maskapai	∑ Pnb	Tepat waktu		Keterlambatan		Pembatalan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PT. Garuda Indonesia, TBK	175.619	155.855	88,75	19.764	11,25	0	0
2	PT. Lion Mentari Airlines	197.449	132.572	67,14	64.806	32,82	71	0,04
3	PT. Sriwijaya Air	64.627	55.561	85,97	9.028	13,97	38	0,06
4	PT. Indonesia Air Asia	9.298	7.627	82,03	1.590	17,10	81	0,87
5	PT. Citilink Indonesia	91.967	79.070	85,98	12.897	14,02	0	0
TOTAL		**538.960**	**430.685**	**79,91**	**108.085**	**20,05**	**190**	**0,04**

Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, 2018

Pembatalan pergerakan pesawat sepanjang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel III.34
Pembatalan Pergerakan Pesawat Tahun 2018

No	Maskapai	∑ Pnb	Teknis Operasional		Non Teknis Operasional		Cuaca		Lainnya		Total	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PT. Garuda Indonesia, TBK	175.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PT. Lion Mentari Airlines	197.449	0	0	60	0,03	11	0	0	0	71	0,04
3	PT. Sriwijaya Air	64.627	0	0	38	0,06	0	0	0	0	38	0,06
4	PT. Indonesia Air Asia	9.298	0	0	26	0,28	0	0	55	0,59	81	0,87
5	PT. Citilink Indonesia	91.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**538.960**	**0**	**0**	**124**	**0,02**	**11**	**0**	**55**	**0**	**190**	**0,04**

Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, 2018

Komponen Pembatalan sebagaimana tabel diatas diatas terdiri dari:

a) Faktor Teknis Operational (TO) sebesar 0%, dengan jumlah penerbangan sebanyak 0 (nol) penerbangan;
b) Faktor Non Teknis Operational (NTO) sebesar 0,02%, dengan jumlah penerbangan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) penerbangan;
c) Faktor Cuaca (CUA) sebesar 0%, dengan jumlah penerbangan sebanyak 11 (sebelas) penerbangan;
d) Faktor Lain sebesar 0 %, dengan jumlah penerbangan sebanyak 55 (lima puluh lima) penerbangan.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan tidak tercapainya target *OTP* Transportasi Udara, yaitu:

a) Adanya erupsi lahar Gunung Krakatau di Banten;
b) Terdapat BUAU yang mengalami kendala operasional dalam penerbangan kemudian BUAU tersebut tidak beroperasi;
c) Terdapat adanya perubahan sistem penjadwalan operasional baik kru maupun pesawat pada salah satu BUAU;



Gambar III.45
Kunjungan Posko Utama Nasional Lebaran

Terkait penyebab keterlambatan di atas, berikut adalah beberapa hal tindakan preventif dalam upaya meningkatkan *OTP* transportasi udara, diantaranya:

a) Memberlakukan adanya kompensasi terhadap maskapai yang melakukan pelanggaran waktu pelayanan (terlambat) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara; dan
b) Melakukan pengendalian dan pengawasan kepada maskapai Nasional melalui *random check* oleh Inspektur Angkutan Udara.

4) Transportasi Perkeretaapian

On time performance (OTP) atau ketepatan waktu pelayanan transportasi kereta api yang diukur dalam hal ini adalah ketepatan waktu kedatangan untuk seluruh perjalanan kereta api penumpang.

Persentase *Capaian on Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api diperoleh dengan cara membandingkan Persentase capaian (OTP) angkutan penumpang kereta api pada tahun berjalan dengan target OTP.

$$\text{Persentase } \textit{Capaian on Time Performance} \text{ (OTP) Transportasi Kereta Api} = \frac{\text{Realisasi OTP tahun berjalan}}{\text{Target OTP tahun berjalan}} \text{ x } 100\%$$

Realisasi Prosentase capaian *on time performance* (OTP) transportasi kereta tahun 2018 sebesar 76, 18% atau capaian kinerja sebesar 113,70% dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 67%.

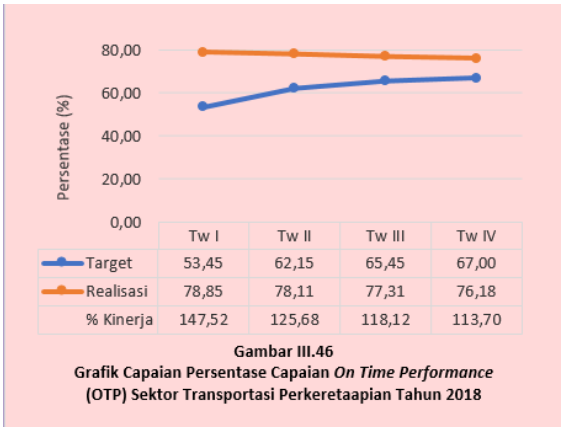
Realisasi persentase capaian *on Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api tahun 2018 sebesar 76,90% diperoleh dari perbandingan antara jumlah realisasi keberangkatan KA sebanyak 549.873 keberangkatan dibandingkan dengan kedatangan KA tepat waktu sebanyak 418.915 kedatangan.

$$\textit{OTP} \text{ Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{418.915 kedatangan}}{\text{549.873 keberangkatan}} \text{ x } 100\% = 76{,}18\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{76{,}18\%}{67\%} \text{ x } 100\% = 113{,}70\%$$

Pencapaian keberhasilan tersebut didukung dengan adanya pelaksanaan kegiatan yang dapat menunjang peningkatan *OTP* angkutan penumpang kereta api antara lain:

a) Perencanaan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) untuk perjalanan tahun 2018 tersusun dengan baik;
b) Efisiensi waktu yang dilakukan oleh Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) yang dapat menangani keterlambatan KA dengan adanya susulan atau percepatan perjalanan kereta api di lintas;



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	53,45	62,15	65,45	67,00
Realisasi	78,85	78,11	77,31	76,18
% Kinerja	147,52	125,68	118,12	113,70

Gambar III.46
Grafik Capaian Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018

c) Pengoperasian kereta api angkutan barang di luar jam sibuk di wilayah Jabodetabek dinilai sangat efektif.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keenam

IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada Tahun 2015 dan 2016 tidak terisi (hal ini termasuk berlaku pada sub sektor transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian). Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi yang ditetapkan pada tahun 2017, terdapat kenaikan capaian kinerja, sebagaimana **Tabel III.35** berikut:

Tabel III.35
Perbandingan Realisasi Kinerja Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)*
Sektor Transportasi Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	78,15	79,20	101,34
			2018	76,49	83,59	109,29

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi untuk masing-masing sub sektor transporatsi Tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

a. Transportasi Darat

Capaian kinerja prosentase capaian *on time performance (OTP)* sektor transportasi darat Tahun 2017-2018 mengalami peningkatan, dimana capaian kinerja ini menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan semakin baik. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.36** berikut:

Tabel III.36
Perbandingan Realisasi Kinerja Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)*
Sektor Transportasi Darat Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	82,61	82,61	100,00
			2018	83,24	89,28	107,26

Sumber: Hasil Analisis, 2019

b. Transportasi Laut

Capaian kinerja prosentase capaian *on time performance (OTP)* sektor transportasi laut Tahun 2017-2018 mengalami peningkatan, dimana capaian kinerja ini menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan semakin baik. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.37** berikut:

Tabel III.37
Perbandingan Realisasi Kinerja Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)*
Sektor Transportasi Laut Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Laut	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	80,00	88,00	110,00
			2018	68,70	89,00	129,55

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Transportasi Udara

Capaian kinerja prosentase capaian *on time performance (OTP)* sektor transportasi udara Tahun 2017-2018 mengalami penurunan menjadi 91,85%. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.38** berikut:

Tabel III.38
Perbandingan Realisasi Kinerja Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)*
Sektor Transportasi Udara Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Udara	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	85,00	80,14	94,28
			2018	87,00	79,91	91,85

Sumber: Hasil Analisis, 2019

d. Transportasi Perkeretaapian

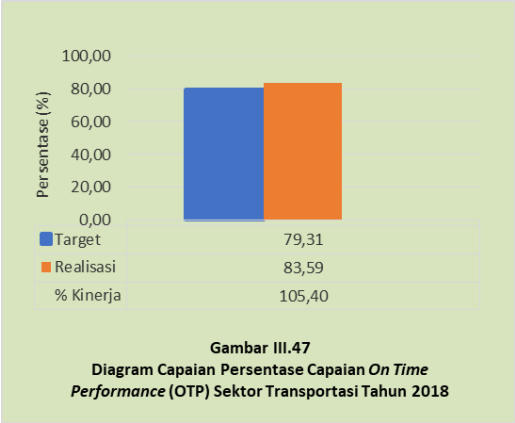
Capaian kinerja prosentase capaian *on time performance (OTP)* sektor transportasi perkeretaapian Tahun 2017-2018 mengalami peningkatan, dimana capaian kinerja ini menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan semakin baik. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.39** berikut:

Tabel III.39
Perbandingan Realisasi Kinerja Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)*
Sektor Transportasi Perkeretaapian Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Perkeretaapian	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	65,00	66,05	101,62
			2018	67,00	76,18	113,70

Sumber: Hasil Analisis, 2019

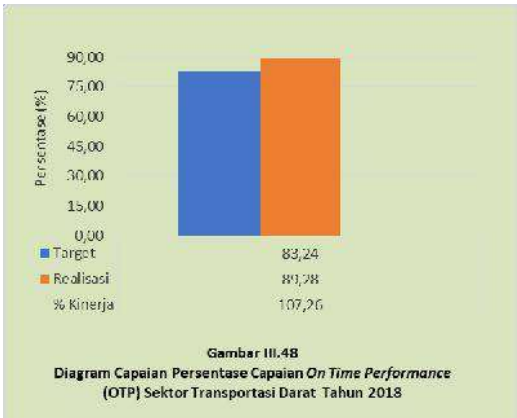
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Keenam



Gambar III.47
Diagram Capaian Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Prosentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi pada Tahun 2018 memiliki target 79,31% dan realisasi 83,59% atau mencapai 105,40%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.47** berikut:

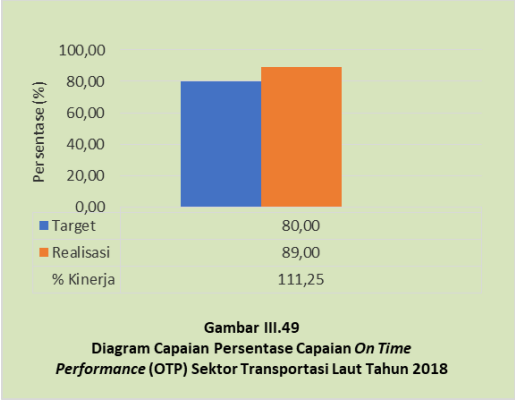
Sedangkan Prosentase capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi pada Tahun 2018 tiap sektor transportasi bila dibandingkan dengan masing-masing target Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:



Gambar III.48
Diagram Capaian Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi Darat Tahun 2018

a. Transportasi Darat

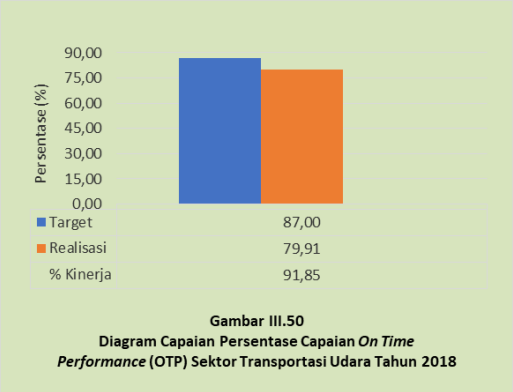
Kinerja Prosentase capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah mencapai target 107,26% yaitu realisasi sebesar 89,28%.



Gambar III.49
Diagram Capaian Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi Laut Tahun 2018

b. Transportasi Laut

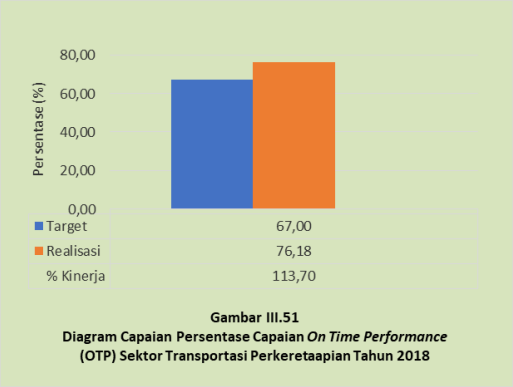
Kinerja Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Laut Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah mencapai target 111,25% yaitu realisasi sebesar 89,00%.



Gambar III.50
Diagram Capaian Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi Udara Tahun 2018

c. Transportasi Udara

Kinerja Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Udara Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah mencapai target 91,85% yaitu realisasi sebesar 79,91%.



Gambar III.51
Diagram Capaian Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018

d. Transportasi Perkeretaapian

Kinerja Prosentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah mencapai target 113,70% yaitu realisasi sebesar 76,18%.

4. IKU 7 yaitu Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Ketujuh

Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek merupakan kecepatan rata-rata angkutan umum pada jam puncak dari terminal keberangkatan ke terminal akhir, yang diukur dengan rumus:

$$\text{Kecepatan rata-rata} = \frac{\text{Jumlah kecepatan rata-rata pada setiap rute}}{\text{jumlah rute}}$$

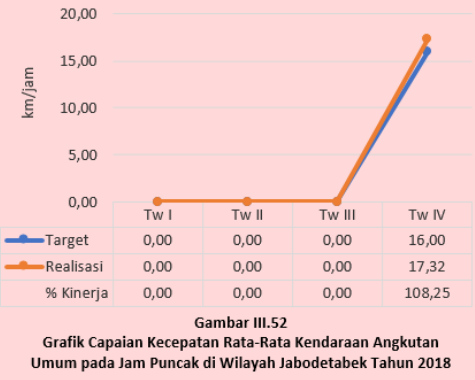
Untuk tahun 2018 memiliki target 16 km/jam dan realisasi pada Tahun 2018 adalah 17,32 km/jam sehingga capaiannya adalah 108,25%.

Tabel III.40 Kecepatan Rata-Rata Jabodetabek Tahun 2018

Perjalanan	Kecepatan (Km/Jam)	Jarak (Km)
Eksternal-Internal	19,13	29,59
Internal-Internal	15,90	12,98
Rata-rata kecepatan	**17,32**	**17,51**

Sumber: BPTJ, 2018

Angka kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum sebesar 17,32 Km/Jam diperoleh melalui survey pada 92 (sembilan puluh dua) trayek angkutan umum jam puncak pada Bulan Oktober s.d November 2018. Survei dilakukan dengan membagi dua rute angkutan umum yaitu perjalanan eksternal-internal (dari Bodetabek ke Jakarta) dan perjalanan internal-internal (di dalam Jakarta), dengan hasil sebagai berikut:



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	0,00	0,00	0,00	16,00
Realisasi	0,00	0,00	0,00	17,32
% Kinerja	0,00	0,00	0,00	108,25

Gambar III.52
Grafik Capaian Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Angkutan Umum pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek Tahun 2018

$$\% \text{ Capaian} = \frac{17{,}32 \text{ km/jam}}{16 \text{ kmjam}} \times 100\% = 108{,}25\%$$

Kecepatan rata-rata 17,32 km/jam dapat tercapai melalui penerapan kebijakan ganjil genap. Survei dilaksanakan setelah *Asian Games* berakhir, yaitu pada masa kebijakan ganjil-genap di jalan arteri memiliki sistem periode waktu parsial (pukul 06.00 – 10.00 WIB dan 16.00 – 20.00 WIB).

Berdasarkan data yang didapat, melalui penerapan kebijakan penanganan kemacetan di 3 (tiga) ruas jalan tol terjadi peningkatan kinerja lalu lintas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.41
Kecepatan Rata-Rata Akibat Kebijakan Ganjil Genap Tahun 2018

Ruas Jalan	Kecepatan (km/jam)	
	Sebelum	Sesudah
Jakarta-Cikampek	23,13	31,33
Jagorawi	31,65	42,07
Jakarta-Tangerang	22,09	34,25

Sumber: BPTJ, 2018

Capaian kecepatan rata-rata pada wilayah Jabodetabek dapat lebih ditingkatkan dengan:

1) Optimalisasi penerapan kebijakan ganjil genap di 3 (tiga) ruas jalan tol di Wilayah Jabodetabek (Jakarta-Cikampek, Jagorawi dan Jakarta-Tangerang). Hal ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan ganjil-genap pada Tahun 2018, masih banyak terjadi pelanggaran pengguna kendaraan pribadi.
2) Mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tetap memberlakukan skema Ganjil-Genap di beberapa ruas jalan di DKI Jakarta sebagaimana telah diterapkan saat ini di ruas Jalan MT.Haryono, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan M.H Thamrin, Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan D.I Panjaitan, Jalan Ahmad Yani dan Jalan H.R Rasuna Said.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Ketujuh

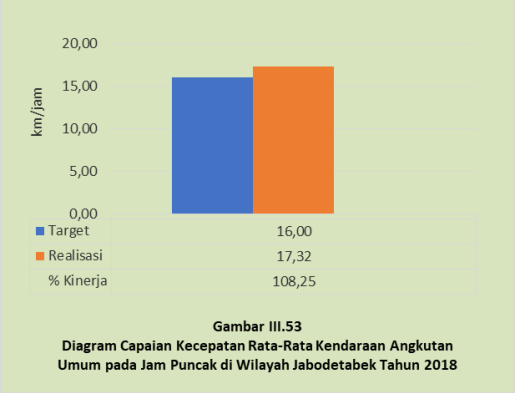
IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada Tahun 2015 dan 2016 tidak terisi. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek yang ditetapkan pada tahun 2017, terdapat kenaikan capaian kinerja, sebagaimana **Tabel III.42** berikut:

Tabel III.42
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Angkutan Umum Pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	Km/jam	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	15,00	15,78	105,21
			2018	16,00	17,32	108,25

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Ketujuh



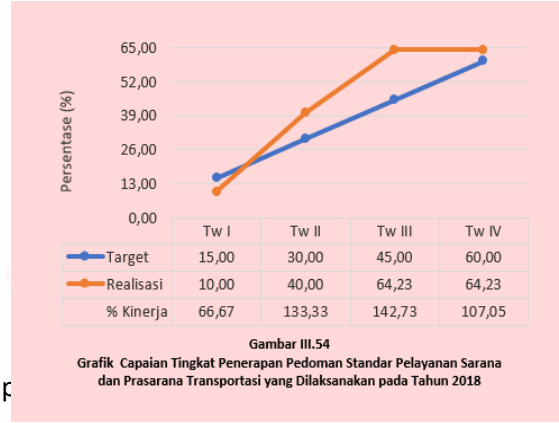
Gambar III.53
Diagram Capaian Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Angkutan Umum pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019, kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek pada Tahun 2018 memiliki target 16 km/jam dan realisasi 17,32 km/jam atau mencapai 108,25%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.53.**

5. IKU 8 yaitu Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi

a. **Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Kedelapan**

Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan pada Tahun 2018 memiliki target 60% dengan realisasi sebesar 64,23% sehingga capaian mencapai 107,05% dari target.



Gambar III.54
Grafik Capaian Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Dilaksanakan pada Tahun 2018

Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi merupakan gambaran persentase jumlah Unit Pelayanan

Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah menerapkan standar pelayanan terhadap seluruh jenis layanan yang diberikan kepada pengguna jasa yang mengacu Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bahwa seluruh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan berdasarkan jenis layanan dengan memperhatikan spesifikasi pelayanan yang dilaksanakan.

Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebanyak 548 UPP dengan rincian sebagai berikut:

a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat : 26 unit
b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut : 323 unit
c. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara : 165 unit
d. Direktorat Jenderal Perkeretaapian : 4 unit
e. BPSDM Perhubungan : 30 unit

Sampai pada akhir tahun 2018 target tingkat penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan sebesar 60% dari 548 (lima ratus empat puluh delapan) yakni 328 (tiga ratus dua puluh delapan) UPP. Dari target tersebut tingkat penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan adalah sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) UPP.

Tingkat penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi dihitung dengan rumus:

$$\text{Tingkat Penerapan} = \frac{\sum \text{UPT yang menerapkan standar pelayanan}}{\text{N total UPT Kemenhub yang memberikan pelayanan kepada masyarakat}} \; x\; 100\%$$

Maka realisasi dari penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi, yaitu:

$$\text{Tingkat Penerapan SP} = \frac{352 \text{ UPP}}{548 \text{ UPP}} \text{ x } 100\% = 64{,}23\%$$

$$\%\text{ Capaian} = \frac{64{,}23\%}{60\%} \text{ x } 100\% = 107{,}05\%$$

Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan Tahun 2018 melampaui target dikarenakan peran aktif dari unit kerja eselon I yang menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis penyusunan Standar Pelayanan untuk UPT di lingkungan kerja masing-masing sebagaimana **Lampiran 21** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.43
Penerapan Standar Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Tahun 2018

No	Sub Sektor	Jumlah UPP	Standar Pelayanan		Persentase
			Sudah	Belum	
1	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	26	0	26	0
2	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	323	309	14	95,67
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	165	18	147	10,91
4	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	4	0	4	0
5	BPSDM	30	25	5	83,33
Total		**548**	**352**	**196**	**64,23**

Sumber: PPTB, 2018

Terhadap UPP pada masing-masing sub sektor yang capaiannya belum maksimal pada tahun 2018 pada prinsipnya sedang dalam proses asistensi dan penyusunan namun belum selesai untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan. Hal tesebut tidak terlepas bahwa target indikator kinerja utama dimaksud merupakan target baru sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2017 dan pedomannya penyusunannya telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Bimbingan teknis dan pendampingan akan terus dilaksanakan dengan dukungan masing-masing unit Eselon I terkait. Pada tahun 2019 ditargetkan seluruh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan sudah menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan berdasarkan jenis layanan dengan memperhatikan spesifikasi pelayanan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tingkat penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan yakni melakukan koordinasi dan pendampingan penyusunan dokumen standar pelayanan dengan subsektor terkait. Koordinasi dilakukan melalui forum rapat, *FGD*, maupun surat.

Kegiatan lainnya terkait dengan aksi pemenuhan dokumen standar pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan/dihadiri oleh PPTB antara lain:

a. Sosialisasi dan koordinasi dengan unit kerja lainnya terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta pendampingan penyusunan pedoman standar pelayanan;
b. Melakukan *benchmark* Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus di Jepang dan Australia;
c. Telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2018 Tata Cara Penilaian Pelayanan Kinerja Pada Unit Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
d. Pemenuhan Dokumen Standar Pelayanan Badan Usaha Sektor Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk lebih meningkatkan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan pada seluruh UPP, Kementerian Perhubungan akan melakukan peningkatan koordinasi dengan seluruh unit kerja terkait dan melakukan bimbingan teknis penyusunan pedoman standar pelayanan, serta melakukan monitoring pelaksanaan pedoman standar pelayanan yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Utama Kedelapan

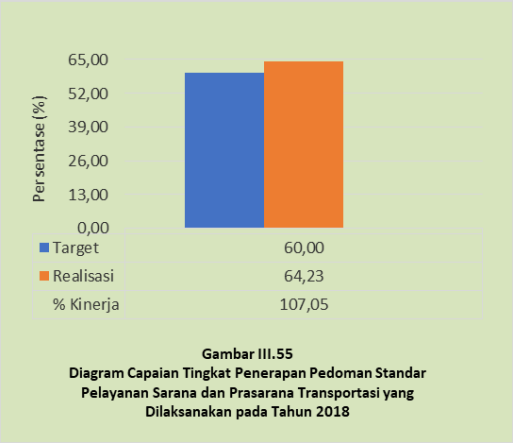
IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada tahun 2015 dan 2016 tidak terisi. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja tingkat penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan yang ditetapkan pada tahun 2017, terdapat kenaikan capaian kinerja, sebagaimana **Tabel III.44** berikut:

Tabel III.44
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	40,00	14,25	35,63
			2018	60,00	64,23	107,05

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Kedelapan



Gambar III.55
Diagram Capaian Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Dilaksanakan pada Tahun 2018

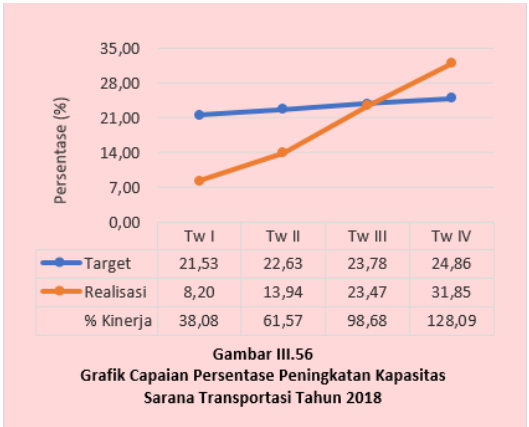
Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan pada Tahun 2018 memiliki target 60% dan realisasi 64,23 % atau mencapai 107,05%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.55** berikut:

III.2.4.Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Keempat

Sasaran Kementerian Perhubungan yang keempat adalah Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi, yang diukur dengan 3 IKU, yaitu:

1. IKU 9 yaitu Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Kesembilan



Gambar III.56
Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Tahun 2018

Persentase Peningkatan kapasitas sarana transportasi memiliki target 24,86% dengan realisasi 31,85% sehingga persentase capaian adalah 128,09% dari target. Pencapaian ini merupakan kontribusi sub sektor transportasi darat sebesar 100,11% dan laut sebesar 100%, namun transportasi transportasi udara telah mencapai 132,69%, dan transportasi perkeretaapian mencapai 174,67%. Masing-masing pencapaian adalah sebagai berikut

1) Transportasi Darat

Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi merupakan IKU baru atas rekomendasi Kementerian PAN-RB. Salah satu rekomendasi Kementerian PAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis *utcome* (hasil) pada Tahun 2017, sehingga IKU

tersebut baru ditetapkan di tahun 2017 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni Tahun 2015 dan 2016.

Persentase peningkatan kapasitas transportasi darat dihitung dengan rumus yang digunakan untuk menghitung indikator kinerja tersebut adalah:

$$\text{Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi} = \frac{Jumlah\ Pengadaan\ Sarana\ Transportasi\ Darat}{Target\ Kebutuhan\ Pengadaan\ Sarana\ Transportasi\ Darat} x\ 100\%$$

$$\text{(bus)} = \frac{\sum \text{ pengadaan bus}}{\sum \text{target Kebutuhan pengadaan bus}} x\ 100\%$$

$$\text{(kapal)} = \frac{\sum \text{pengadaan kapal penyeberangan}}{\sum \text{target kebutuhan pengadaan kapal penyeberangan}} x\ 100\%$$

Catatan:

a) Pengadaan Bus adalah pengadaan *BRT* pada tahun berjalan, dimana target kebutuhan pengadaan bus adalah rencana pengadaan *BRT* pada periode Renstra;
b) Target pengadaan bus adalah rencana pengadaan BRT pada periode Renstra;
c) Pengadaan kapal penyeberangan adalah pengadaan kapal penyeberangan pada tahun berjalan;
d) Target pengadaan kapal penyeberangan adalah rencana pengadaan kapal penyeberangan pada periode Renstra

$$\text{Peningkatan kapasitas bus} = \frac{420\ \text{unit}}{2.390\ \text{unit}} \times 100\% = 17{,}57\%$$

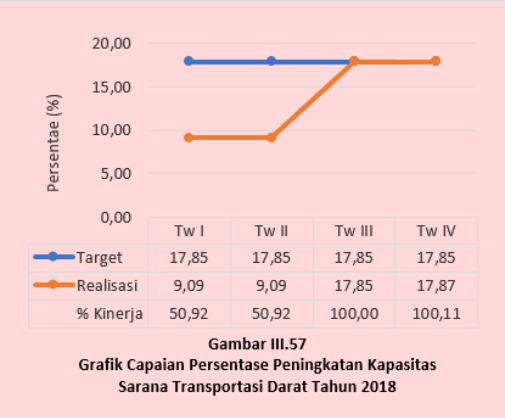
$$\text{Peningkatan kapasitas kapal} = \frac{4\ \text{unit}}{22\ \text{unit}} \times 100\% = 18{,}18\%$$

$$\%\ \text{Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat} = \frac{17{,}57\% + 18{,}18\%}{2} \times 100\% = 17{,}87\%$$

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{17{,}87\%}{17{,}85\%} \times 100\% = 100{,}11\%$$

Angka 17,85% pada penyebut di dalam perhitungan presentase capaian merupakan hasil perhitungan Presentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat yang menjadi target pada Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.

Pada tahun 2018 hasil capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat dihitung Pengadaan bus *BRT* dan pengadaan kapal penyeberangan



Gambar III.57
Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat Tahun 2018

perintis adalah sebesar 100,11% dikarenakan pengadaan bus BRT dan kapal penyeberangan telah melebihi target yaitu 17,87%, tapi saat ini pembangunan kapal penyeberangan perintis masih dalam proses pengerjaan dan direncanakan selesai pada tahun 2019.

Jumlah pembangunan *BRT* Tahun 2018 adalah sebesar 420 (empat ratus dua puluh) unit. Jumlah pembangunan kapal Tahap I Tahun 2018 adalah sebesar 4 (empat) unit, dimana 3 (tiga) unit dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Perhubungan Darat, yaitu : untuk wilayah Sulawesi Tengah (lintas Parigi Moutong - Wakai – Marisa Tahap I), Kep. Maluku, lintas Riau – Kalimantan Barat (Tg. Pinang - Tembelan – Sintete Tahap I), dan 1 (satu) unit dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Sumatera Utara.



Gambar III.58
Pemberian Bantuan Bus Sekolah

Pengadaan *BRT* Tahun 2018 tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1814 Tahun 2018 tentang Alokasi Bantuan dan Status Aset Bus Ukuran Sedang Bus Rapid Transit Tahun Anggaran 2018 dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1815 Tahun 2018 tentang Alokasi Bantuan dan Status Aset Bus Sekolah Ukuran Sedang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana **Lampiran 22 dan 23.**

Untuk meningkatkan kapasitas sarana transportasi darat di masa mendatang, Kementerian Perhubungan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Memberikan bantuan bus *BRT* kepada daerah- daerah yang membutuhkan agar pelayanan transportasi bagi masyarakat meningkat;
b) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan bus yang telah diberikan bagi daerah;
c) Melakukan analisa kebutuhan kapal;
d) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan kapal di daerah daerah;
e) Optimalisasi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penambahan frekuensi/trip pada lintas penyeberangan yang *loadfactor*-nya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun;
2. Pengaturan jadual dan peningkatan waktu berlayar;
3. Peningkatan performa/kinerja kapal;
4. Peningkatan standar kelaik lautan kapal dan pelayanan minimum.

2) Transportasi Laut

Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi laut merupakan peningkatan jumlah muatan angkutan laut penumpang dan barang dibandingkan dengan target muatan angkutan laut penumpang dan barang. Secara matematis dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi laut} = \frac{\text{Jumlah muatan angkutan laut penumpang + barang}}{\text{Target muatan angkutan laut penumpang + barang}} \times 100\%$$

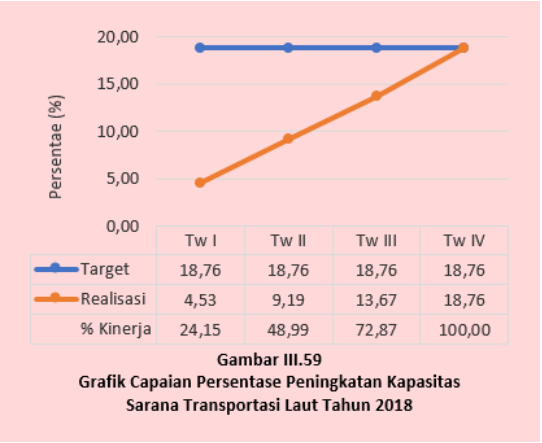
Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut tahun 2018 sebesar 100% dari target, dimana jumlah muatan angkutan laut (penumpang dan barang) adalah sebesar 1.346.420.910, sedangkan target muatan angkuatan angkutan laut (penumpang dan barang) adalah sebesar 7.178.923.022, sehingga :

$$\% \text{ Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut} = \frac{1.346.420.910}{7.178.923.022} \times 100\% = 18{,}76\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{18{,}76\%}{18{,}76\%} \times 100\% = 100\%$$

Capaian dapat dilihat sebagaimana **Gambar III.59** berikut:

Tercapainya target peningkatan kapasitas sarana transportasi laut dipengaruhi oleh kenaikan jumlah penumpang dan barang di luar pelabuhan utama yang mencerminkan minat masyarakat menggunakan angkutan laut masih tinggi, terutama di daerah kepulauan. Terlebih lagi dengan selesainya pembangunan kapal perintis mampu menambah kapasitas sarana transportasi laut untuk penumpang dan barang.



Gambar III.59
Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Tahun 2018

Adapun anggaran terkait Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut sebesar Rp343.843.495.000,00 dengan realisasi sebesar Rp290.890.277.317,00 atau sebesar 84,60%.

3) Transportasi Udara

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$= \frac{Jumlah\ Pesawat\ Yang\ Memilki\ Sertifikat\ Kelaikudaraan\ Pada\ Tahun\ Tertentu}{Estimasi\ Total\ Pertumbuhan\ Pesawat}\ x\ 100$$

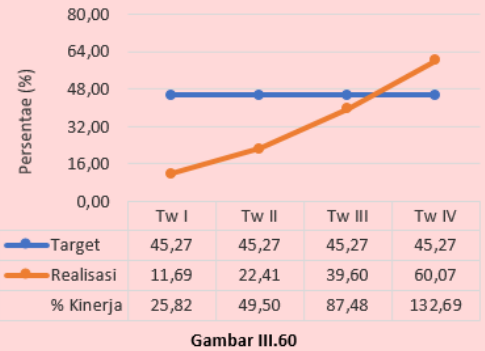
Jumlah pesawat yang memiliki sertifikat pesawat udara dihitung berdasarkan jumlah armada pesawat udara yang telah mendapat sertifikasi kelaikudaraan dengan jumlah pesawat udara sebanyak 1.104 pesawat udara.

Angka ini merupakan jumlah sertifikasi pesawat udara pada kategori pesawat udara yang masuk dalam Air Operator (AOC) 121, AOC 135, AOC 137, OC 91, PSC 141, FASI.

Selama 5 tahun perencanaan, yaitu tahun 2015-2019, target kumulatif yang harus dicapai Direktorat Jenderal Perhubungan udara di tahun 2019 adalah 1.838 (prediksi pertumbuhan) armada pesawat yang disertifikasi atau minimal harus memenuhi jumlah pesawat yang disertifikasi sebanyak sebanyak 368 pesawat setiap tahunnya.

% Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Udara = $\frac{1.104\ unit}{1.838\ unit}$ x 100% = 60,07%

% Capaian = $\frac{60,07\%}{45,27\%}$ x 100% = 132,69%



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	45,27	45,27	45,27	45,27
Realisasi	11,69	22,41	39,60	60,07
% Kinerja	25,82	49,50	87,48	132,69

Gambar III.60
Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Udara Tahun 2018

Sertifikasi Kelaikan Udara ini wajib bagi Setiap pesawat udara yang dioperasikan di wilayah penerbangan Indonesia Yang disebut sertifikat CofA (*Certificate Of Airworthiness*), dengan adanya sertifikasi tersebut berarti bahwa pesawat udara sudah memenuhi standar kelaikudaraan.

Peningkatan capaian kinerja ini salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan permohonan sertifikasi pesawat udara yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah pengadaan pesawat udara yang didasarkan pada permintaan (*demand*) terhadap transportasi udara dan dalam upaya pemenuhan target penumpang di tahun 2019 sebesar 162 juta penumpang. Salah satu syarat pendaftaran pesawat udara adalah terpenuhinya persyaratan pengadaan pesawat udara (pasal 26 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan). Peraturan tentang pengadaan pesawat udara tertuang dalam *Civil Avition Safety Regulations*

(CASR) 47 tentang Pendaftaran Pesawat Udara dan *Staff Instruction (SI 47-03)* tentang Prosedur Pengadaan pesawat udara. Persetujuan pengadaan pesawat udara merupakan surat persetujuan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada operator penerbangan sebagai salah satu syarat permohonan pendaftaran pesawat udara. Persetujuan pengadaan pesawat udara diterbitkan setelah dilakukan evaluasi teknis dan operasional kesiapan pemohon dalam mengoperasikan pesawat udara.

Pada Tahun 2018 telah diterbitkan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pesawat udara dengan rincian:

a) Sebanyak 55 surat izin persetujuan pengadaan pesawat udara;
b) Sebanyak 12 surat izin perpanjangan persetujuan pengadaan pesawat udara.

Jumlah pesawat yang disetujui dalam 67 izin persetujuan pengadaan yang telah diterbitkan sebanyak 119 pesawat udara, dengan rincian:

a) Sebanyak 59 pesawat udara telah didaftarkan ke Indonesia;
b) Sebanyak 57 pesawat udara belum didaftarkan; dan
c) Sebanyak 3 pesawat udara batal didaftar.

Permasalahan yang sering muncul dalam proses pengadaan pesawat udara antara lain:

a) Operator tidak melengkapi data dukung sesuai prosedur yang berlaku pada surat pengajuan pengadaan pesawat udara; dan
b) Operator seringkali mengajukan perubahan tipe dan serial number pesawat udara.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bidang Produk Aeronautika, di tahun 2019 diprogramkan untuk:

a) Melanjutkan program yang sudah berjalan;
b) Mengupdate *database* izin pengadaan pesawat udara;
c) Melengkapi dokumen pengadaan;
d) *Mapping* pengadaan pesawat udara tahun 2019 di awal tahun;
e) Mengembangkan konsep perizinan online untuk pengadaan pesawat udara;
f) Penerapan aturan/prosedur pengadaan pesawat yang baru sesuai Permenhub Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulations Part* 47) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*).



Gambar III.61
Pesawat Perintis Tipe *Twin Otter*

4) Transportasi Perkeretaapian

Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi perkeretaapian adalah berupa persentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis diukur melalui persentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis pada tahun berjalan dibanding dengan *baseline* pada tahun 2014 sebanyak 294.839.165 penumpang.

Dalam hal ini yang menjadi objek perhitungan kapasitas sarana perkeretaapian adalah kereta api yang diberikan subsidi oleh Pemerintah melalui PSO dan Kereta Api untuk angkutan Perintis:

$$\text{Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi perkeretaapian} = \frac{\text{Peningkatan jumlah ketersediaan tempat duduk KA PSO \& perintis tahun berjalan}}{\text{Baseline ketersediaan tempat duduk KA (PSO \& perintis)}} \times 100\%$$

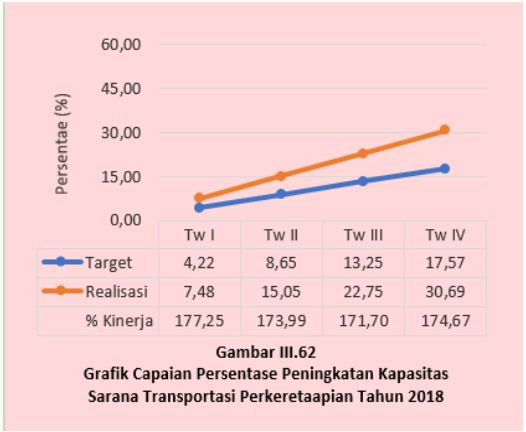
Realisasi persentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis sampai dengan Tahun 2018 mencapai 30,69% atau capaian kinerja sebesar 174,67% dari target yang ditetapkan Tahun 2018 sebesar 17,57%. Hal tersebut dikarenakan peningkatan jumlah ketersediaan tempat duduk KA PSO dan perintis pada Tahun 2018 adalah sebanyak 385.328.412 penumpang, yang terdiri dari KA PSO sebanyak 382.759.372 penumpang dan KA Perintis sebanyak 2.569.040 penumpang. Sedangkan target yang ditetapkan pada Tahun 2018 sebanyak 346.631.179 penumpang, yang terdiri dari KA PSO sebanyak 343.698.909 penumpang dan KA Perintis sebanyak 2.932.270 penumpang.

$$\% \text{ Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi KA} = \frac{(385.328.412 - 294.839.165)\ pnp}{294.839.165\ pnp} \times 100\% = 30,69\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{30,69\%}{17,57\%} \times 100\% = 174,67\%$$

Faktor yang menyebabkan tercapainya capaian kinerja antara lain:

1) Adanya peningkatan minat masyarakat pengguna moda kereta api terutama pada KRL Jabodetabek sepanjang tahun 2018;
2) Adanya penambahan rangkaian kereta api dalam rangka pelaksanaan angkutan Lebaran Tahun 2018, Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun baru 2019;



Gambar III.62
Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018

3) Adanya penambahan 2 (dua) lintas kereta api perintis yaitu: *LRT* Sumatera Selatan dan Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah dan sebagai pendorong peningkatan konektifitas antar wilayah serta integrasi antarmoda transportasi.

Alokasi anggaran persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi perkeretaapian sebesar Rp2.568.149.166.000,00 diperoleh dari alokasi kegiatan Subsidi Angkutan *Public Service Obligation* (*PSO*) dan alokasi kegiatan subsidi perintis. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.321.550.371.727,00 atau persentase penyerapan anggaran sebesar 90,40%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Kesembilan

IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada Tahun 2015 dan 2016 tidak terisi (hal ini termasuk berlaku pada sub sektor transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian). Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi yang ditetapkan pada tahun 2017, terdapat peningkatan capaian kinerja, sebagaimana **Tabel III.45** berikut:

Tabel III.45
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	20,23	21,77	107,60
			2018	24,86	31,85	128,09

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Capaian persentase peningkatan kapasitas sarana untuk masing-masing sektor transportasi adalah sebagai berikut:

a. Transportasi Darat

Capaian kinerja persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi darat Tahun 2017-2018 mengalami peningkatan, dimana capaian kinerja ini menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan semakin baik. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.46** berikut:

Tabel III.46
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat
Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	2,08	2,08	100,00
			2018	17,85	17,87	100,11

Sumber: Hasil Analisis, 2019

b. Transportasi Laut

Capaian kinerja persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi laut Tahun 2017-2018 mengalami peningkatan, dimana capaian kinerja ini menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan semakin baik. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.47** berikut:

Tabel III.47
Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut
Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	20,00	16,99	84,95
			2018	18,76	18,76	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Transportasi Udara

Capaian kinerja persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi udara Tahun 2017-2018 mengalami peningkatan, dimana capaian kinerja ini menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan semakin baik. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.48** berikut:

Tabel III.48
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Udara
Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Udara	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	43,31	49,95	115,33
			2018	45,27	60,07	132,69

Sumber: Hasil Analisis, 2019

d. Transportasi Perkeretaapian

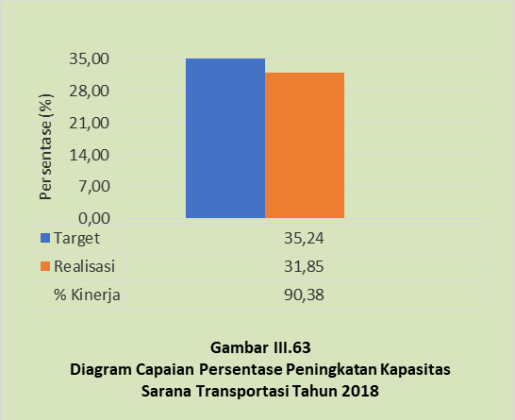
Capaian kinerja persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi perkeretaapian Tahun 2017-2018 mengalami peningkatan, dimana capaian kinerja ini menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan semakin baik. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.49** berikut:

Tabel III.49
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Perkeretaapian Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Perkeretaapian	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	15,53	18,05	116,23
			2018	17,57	30,69	174,67

Sumber: Hasil Analisis, 2019

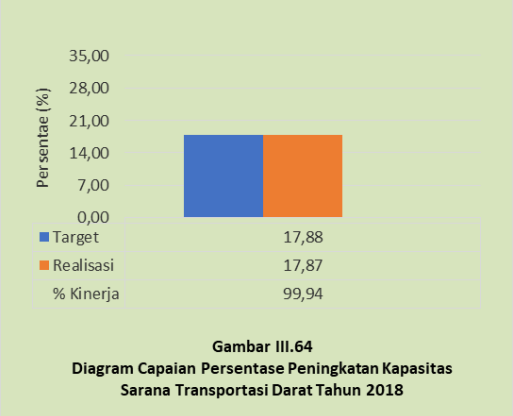
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Kesembilan



Gambar III.63
Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi pada Tahun 2018 memiliki target 35,24% dan realisasi 31,85% atau mencapai 90,38%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.63** berikut:

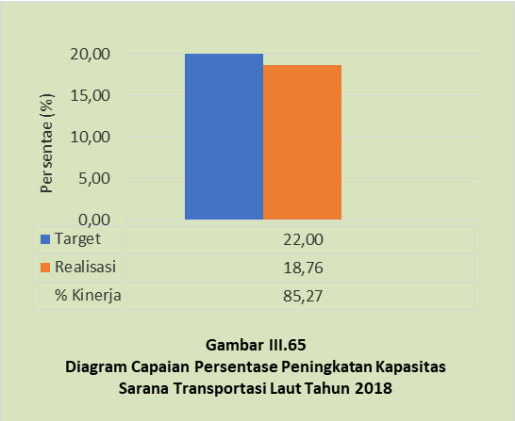
Sedangkan capaian persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi pada Tahun 2018 tiap sektor transportasi bila dibandingkan dengan masing-masing target Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:



Gambar III.64
Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat Tahun 2018

a. Transportasi Darat

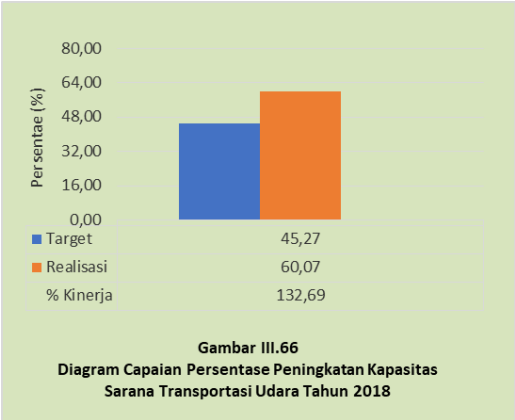
Capaian kinerja persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi darat Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 masih belum optimal, yaitu mencapai 17,87% dari target 17,88%.



Gambar III.65
Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Tahun 2018

b. Transportasi Laut

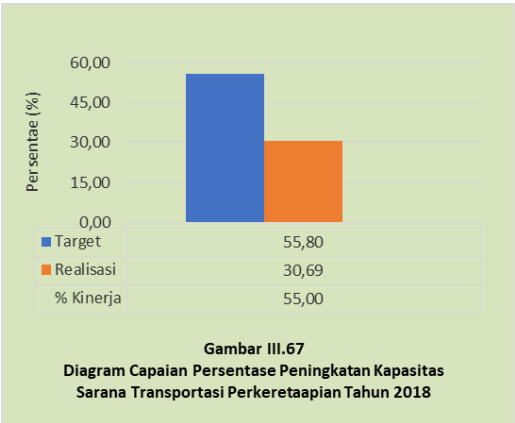
Capaian kinerja persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi laut Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 masih belum optimal, yaitu mencapai 18,76% dari target 22,00%.



Gambar III.66
Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Udara Tahun 2018

c. Transportasi Udara

Capaian kinerja persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi udara Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu mencapai 60,07% dari target 45,27%.



Gambar III.67
Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018

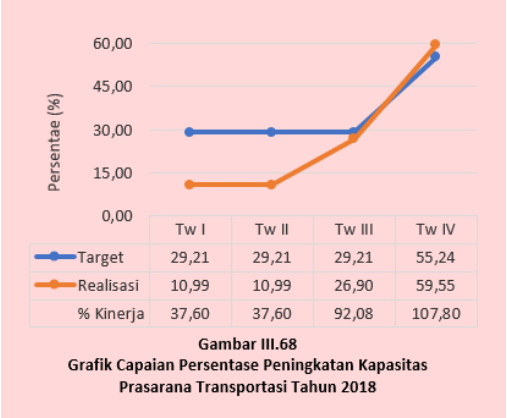
d. Transportasi Perkeretaapian

Capaian kinerja persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi perkeretaapian Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 masih belum optimal, yaitu mencapai 30,69% dari target 55,80%.

2. IKU 10 yaitu Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Kesepuluh

Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi memiliki target 55,24% dan realisasi mencapai 59,55% dari target, sehingga capaiannya adalah sebesar 107,80%, dengan capaian sub sektor transportasi darat sebesar 103,28%, transportasi laut sebesar 98,89%, transportasi udara sebesar 121,60% dan transportasi perkeretaapian sebesar 98,23%, sebagaimana **Gambar III.68**.



Gambar III.68
Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Tahun 2018

1) Transportasi Darat

Presentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi darat merupakan IKU baru atas rekomendasi Kementerian PAN-RB untuk merubah IKU dari IKU berbasis output menjadi IKU berbasis *outcome* (hasil) pada Tahun 2017, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2017 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni Tahun 2015 dan 2016.

Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi darat merupakan persentase tingkat penambahan jumlah prasarana transportasi darat (terminal dan pelabuhan) diperbandingkan dengan rencana Nasional total pembangunan prasarana transportasi darat (terminal dan pelabuhan), yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Terminal} = \frac{\text{Jumlah Pembangunan Terminal Tipe A}}{\text{Jumlah Target Pembangunan Terminal Tipe A}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Pelabuhan} = \frac{\text{Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan}}{\text{Jumlah Target Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan}} x\ 100\%$$

Catatan:

1) Terminal
   a) Jumlah Pembangunan Terminal Tipe A adalah Jumlah Bangunan Terminal Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat;
   b) Jumlah target Pembangunan Terminal Tipe A adalah target dan rencana pembangunan Terminal Tipe A pada kurun waktu tertentu (Target Nasional);
2) Pelabuhan
   a) Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan adalah Jumlah pembangunan pelabuhan penyeberangan sampai dengan waktu berjalan;

b) Jumlah target pembangunan pelabuhan penyeberangan adalah target dan rencana pembangunan pelabuhan penyeberangan pada kurun waktu tertentu (target Nasional).

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 100%, karena jumlah pembangunan terminal tipe A dan pelabuhan penyeberangan mencapai target nasional, yaitu sebanyak 36,85 %, sebagaimana perhitungan berikut:

1) Terminal

Dengan kebutuhan dalam Rencana Induk Jaringan LLAJ sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) terminal, dan jumlah terminal eksisting sampai tahun 2017 adalah sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) terminal, dan realisasi pembangunan terminal tahun 2018 adalah sebanyak 5 (lima) terminal, maka:

$$\text{Pembangunan Terminal} = \frac{98 \text{ unit}}{426 \text{ unit}} \times 100\% = 23{,}00\%$$

2) Pelabuhan

Dengan target pembangunan pelabuhan penyeberangan sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) pelabuhan berdasarkan KP 432 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), sebagaimana **Lampiran 18.** Sedangkan jumlah pelabuhan penyeberangan eksisting sampai tahun 2017 adalah 228 (dua ratus dua puluh delapan) pelabuhan, dan realisasi pembangunan pelabuhan penyeberangan tahun 2018 adalah sebanyak 9 (sembilan) pelabuhan, maka:

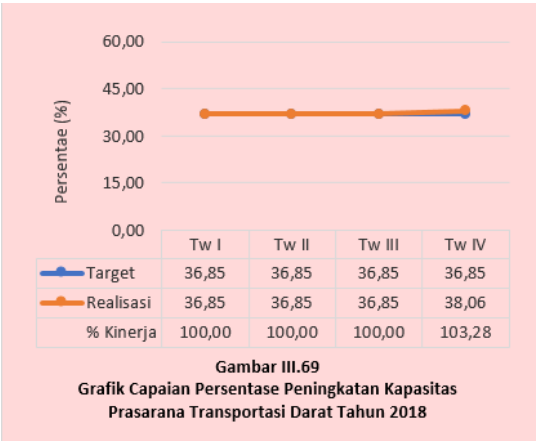
$$\text{Pembangunan Pelabuhan} = \frac{237 \text{ unit}}{446 \text{ unit}} \times 100\% = 53{,}13\%$$

Maka:

$$\text{\% Peningkatan Prasarana Transportasi Darat} = \frac{23{,}00\% + 53{,}13\%}{2} \times 100\% = 38{,}06\%$$

$$\text{\% Capaian} = \frac{38{,}06\%}{36{,}85\%} \times 100\% = 103{,}28\%$$

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat tahun 2018 sebagaimana **Gambar III.69** berikut:



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	36,85	36,85	36,85	36,85
Realisasi	36,85	36,85	36,85	38,06
% Kinerja	100,00	100,00	100,00	103,28

Gambar III.69
Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat Tahun 2018

Angka 36,85% pada penyebut di dalam perhitungan presentase capaian merupakan hasil perhitungan Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat yang menjadi target pada Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.

Adapun pembangunan Prasarana Transportasi Darat yang terlaksana adalah sebagai berikut:

1) Terminal:
   a) Terminal Penumpang Entrop (Papua);
   b) Terminal Penumpang Boolang Mongondow (Sulut);
   c) Terminal Penumpang Kupang (NTT);
   d) Terminal Penumpang Demak (Jateng);
   e) Terminal Penumpang Anak Air (Sumbar);
2) Pelabuhan Penyeberangan:
   a) Pelabuhan Penyeberangan Sagu Sagu Lukit (Pulau Padang-Riau);
   b) Pelabuhan Penyeberangan Sedanau (Kepri);
   c) Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Nyato ((Bangka Belitung);
   d) Pelabuhan Penyeberangan Bakalang (NTT);
   e) Pelabuhan Penyeberangan Boniton (Sulteng);
   f) Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa (Sultra);
   g) Pelabuhan Penyeberangan Moa (Maluku);
   h) Pelabuhan Penyeberangan Elat (Maluku);
   i) Pelabuhan Penyeberangan Naikliu (NTT);

Untuk meningkatkan kinerja pembangunan prasarana transportasi darat di masa yang akan datang, Kementerian Perhubungan akan meningkatkan kualitas pelayanan pada prasarana yang kapasitasnya sudah meningkat.

2) Transportasi Laut

Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi laut merupakan peningkatan pelabuhan non-komersial yang selesai dibangun/dikembangkan diperbandingkan dengan total target pelabuhan non komersil yang harus dibangun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Renstra, yang dihitung dengan rumus:

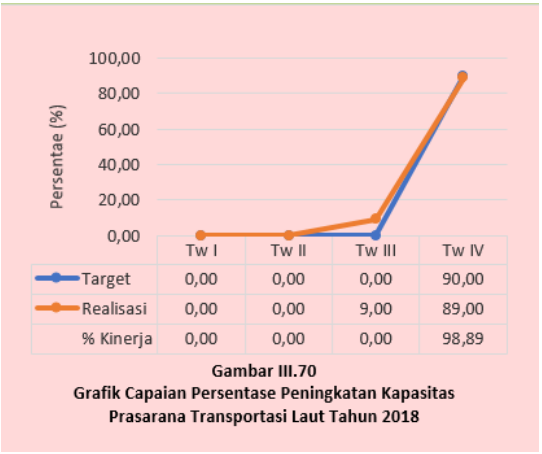
$$\text{Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi laut} = \frac{\sum \text{pelabuhan non komersial yang selesai dibangun}}{\sum \text{total target pelabuhan non komersial}} \times 100\%$$

Pada tahun 2018, realisasi persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi laut adalah 89% dari target sebesar 90%, sehingga capaian adalah sebesar 98,89%

$$\% \text{ Peningkatan Prasarana Transportasi Laut} = \frac{89 \text{ unit}}{100 \text{ unit}} \times 100\% = 89\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{89\%}{90\%} \times 100\% = 98{,}89\%$$

Pada Tahun 2018, ditargetkan pembangunan pelabuhan sebanyak 100 (seratus) pelabuhan, namun hanya 89 (delapan puluh) pelabuhan yang dibangun/dikembangkan, yang terdiri dari 9 (sembilan) pembangunan pelabuhan lanjutan, 22 (dua puluh dua) penyelesaian pelabuhan, dan 58 (lima puluh delapan) pengembangan dan rehhabilitasi pelabuhan. Nama pelabuhan tersebut adalah sebagaimana **Tabel III.50** berikut:



Gambar III.70
Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut Tahun 2018

Tabel III. 50
Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Tahun 2018

No.	Nama Pelabuhan	Lokasi	Penyelesaian
Pembangunan Pelabuhan Lanjutan			
1.	Subi	Kepulauan Riau	Desember
2.	Pangandaran	Jawa Barat	Desember
3.	Pelabuhan Ratu	Jawa Barat	Desember
4.	Reo	NTT	Desember
5.	Padang Tikar	Kalimantan Barat	Desember
6.	Sebuku	Kalimantan Utara	Desember
7.	Pelaihari	Kalimantan Selatan	Desember
8.	Maloy	Kalimantan Timur	Desember
9.	Depapre	Papua	Desember
Penyelesaian Pelabuhan			
1.	Pulau Tello	Sumatera Utara	Oktober
2.	Moa	Maluku	Oktober
3.	Parlimbungan Ketek	Sumatera Utara	November
4.	Batu Panjang	Riau	November
5.	Bajoe	Sulawesi Selatan	November
6.	Kaibus	Papua Barat	November
7.	Bagan Siapi-api	Riau	Desember
8.	Nipah Panjang	Jambi	Desember
9.	Linau Bintuhan	Bengkulu	Desember
10.	Sebalang	Lampung	Desember
11.	Labuhan Bajo	NTT	Desember
12.	Ippi	NTT	Desember

No.	Nama Pelabuhan	Lokasi	Penyelesaian
13.	Pulau Laut	Kalimantan Selatan	Desember
14.	Tuhaha	Maluku	Desember
15.	Saumlaki	Maluku	Desember
16.	Babang	Maluku Utara	Desember
17.	Bade	Papua	Desember
18.	Serui	Papua	Desember
19.	Agats	Papua	Desember
20.	Kaimana	Papua Barat	Desember
21.	Korido	Papua	Desember
22.	Wersar Teminabuan	Papua Barat	Desember
Pengembangan dan Rehabilitasi Pelabuhan			
1.	Malahayati	Aceh	Agustus
2.	Ampana	Sulawesi Tengah	Agustus
3.	Gita	Maluku Utara	Agustus
4.	Kuala Langsa	Aceh	September
5.	Pulau Baai	Bengkulu	September
6.	Kendal	Jawa Tengah	September
7.	Gorontalo	Gorontalo	September
8.	Toli-toli	Sulawesi Tenggara	September
9.	Kwandang	Sulawesi Utara	September
10.	Baranusa	NTT	Oktober
11.	Tapaktuan	Aceh	November
12.	leidong	Sumatera Utara	November
13.	Jepara	Jawa Tengah	November
14.	Rembang	Jawa Tengah	November
15.	Juwana	Jawa Tengah	November
16.	Ende	NTT	November
17.	Marapokot	NTT	November
18.	Sungai Nyamuk	Kalimantan Utara	November
19.	Karatung	Sulawesi Utara	November
20.	Leok	Sulawesi Tengah	November
21.	Bungku	Sulawesi Tengah	November
22.	Namlea	Maluku	November
23.	Manipa	Maluku	November
24.	Piru	Maluku	November
25.	Bemo	Maluku	November
26.	Tehoru	Maluku	November
27.	Dobo	Maluku	November
28.	Laiwui	Maluku Utara	November
29.	Gebe	Maluku Utara	November
30.	Goto	Maluku Utara	November
31.	Oransbari	Papua Barat	November
32.	Anyer	Banten	Desember
33.	Calabahi,	NTT	Desember
34.	Atapupu,	NTT	Desember
35.	Moru	NTT	Desember

No.	Nama Pelabuhan	Lokasi	Penyelesaian
36.	Waikelo,	NTT	Desember
37.	Biu	NTT	Desember
38.	Wonreli	NTT	Desember
39.	Ndao	NTT	Desember
40.	Batutua	NTT	Desember
41.	Kendawangan	Kalimantan Barat	Desember
42.	Labuhan Uki	Sulawesi Utara	Desember
43.	Poso	Sulawesi Tengah	Desember
44.	Tangkiang	Sulawesi Tengah	Desember
45.	Luwuk	Sulawesi Tengah	Desember
46.	Bau-Bau	Sulawesi Tenggara	Desember
47.	Wanci	Sulawesi Selatan	Desember
48.	Palopo	Sulawesi Selatan	Desember
49.	Kayuadi	Sulawesi Selatan	Desember
50.	Pamatata	Sulawesi Selatan	Desember
51.	Garongkong	Sulawesi Selatan	Desember
52.	Kwandang	Gorontalo	Desember
53.	Tobelo	Maluku Utara	Desember
54.	Merauke	Papua	Desember
55.	Sarmi	Papua	Desember
56.	Paam	Papua	Desember
57.	Waisai	Papua	Desember
58.	Nabire	Papua	Desember

Sumber: Ditjen Perhubungan Laut, 2018



Gambar III.71
Pembangunan Pelabuhan Laut Batu Tua, NTT (2018)

Tidak tercapainya target pelabuhan non-komersial yang selesai dibangun/ dikembangkan pada tahun 2018 disebabkan oleh tidak terlaksananya 11 (sebelas) kegiatan pembangunan/pengembangan pelabuhan, karena masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan sehingga sebagian besar pekerjaan pelabuhan baru mulai kontrak pertengahan tahun dan akhir kontrak di akhir tahun (November dan Desember). Kontrak baru mulai pertengahan tahun dikarenakan proses Unit Manajemen Proyek (UMP) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dilaksanakan di kntor pusat sering memakan waktu lebih.

Pembangunan/pengembangan pelabuhan yang tidak dilaksanakan Tahun 2018, yaitu:

Tabel III.51
Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Yang Tidak Dilaksanakan Tahun 2018

No.	Nama Pelabuhan	Penyebab
1.	Malarko	Pihak UPT tidak mengusulkan buka blokir, dikarenakan belum ada hibah tanah
2.	Ujung Jabung	Anggaran diblokir, yang diakibatkan belum adanya serah terima lahan dari Pemda dan belum ada akses jalan. Sudah terdapat surat Dari KUPP Kelas II Nipah Panjang perihal Usulan Realokasi Anggaran Nomor KU.005/2/11/KUPP.Npg-2018 Tanggal 23 Juli 2018
3.	Tanah Ampo	Berdasarkan surat Irjen nomor: UM.007/39/13/ITJEN-2018 Tgl 13 Agustus 2018 Perihal Kegiatan Belanja Modal yang Tidak Dapat Dilaksanakan
4.	Moor	Anggaran diblokir, kegiatan tidak diusulkan dilaksanakan dikarenakan belum ada dokumen perencanaan
5.	Telaga Biru	Adanya rekomendasi tim unit manajemen proyek tidak dapat ditindaklanjuti. Diusulkan realokasi
6.	Nunbaunsabu	Berdasarkan hasil kunker Irjen di NTT menyatakan bahwa tidak ada dasar kuat untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan, terutama apabila didasarkan pada kemanfaatan pelabuhan (berpotensi akan terjadi inefisiensi aset nasional/mubazir), anggaran sebesar 16 M yang telah dialokasikan agar direalokasikan ke kegiatan lain yang lebih jelas manfaatnya
7.	Mantaririp	Belum adanya akses jalan masuk menuju pelabuhan. Topografi rencana jalan akses pelabuhan melewati beberapa anak sungai. Kegiatan diiusulkan untuk realokasi
8.	Waingapu	Kegiatan tidak dilaksanakan karena belum jelas DED Kubus Beton Perkuatan Causway Pelabuhan Salura Kubus
9.	Teluk Segintung	Anggaran diblokir
10.	Sangatta	Berdasarkan surat Kepala UPP Sangatta nomor: UM.001/7/5/ UPP.SGA-18 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan Pembangunan Faspel Di Sangatta Diusulkan Untuk Direalokasi
11.	Donggala	Dikarenakan terjadi bencana alam, kemungkinan pekerjaan faspel akan tidak selesai pada tahun anggaran 2018

Sumber: Ditjen Perhubungan Laut, 2018

Untuk itu, di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan pelabuhan non-komersial yang selesai dibangun/dikembangkan sesuai target, Kementerian Perhubungan akan melakukan proses pelaksanaan pekerjaan secara tepat waktu, misalnya proses kontrak pekerjaan tidak terlalu lama (Triwulan I).

Adapun anggaran terkait Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut sebesar Rp1.262.522.911.000,00 dengan realisasi sebesar Rp727.968.352.000,00 atau sebesar 57,66%.

3) Transportasi Udara

Indikator kinerja ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi udara =

$$\frac{(\sum Bdr\ UPBU\ \ Satpel\ BU\ Dgn\ Klasifikasi\ Bdr\ Sesuai\ TKN\ Pada\ Tahun\ Tertentu)}{(\sum Target\ Jumlah\ Bdr\ UPBU\ \ Satpel\ BU\ Dgn\ Klasifikasi\ Bdr\ Sesuai\ TKN\ Pada\ Tahun\ Tertentu)}\ x\ 100$$

Pembilang sebagaimana formula di atas dihitung berdasarkan jumlah bandar udara yang mendapatkan pendanaan APBN/PNBP sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) UPBU dan telah menyelesaikan kegiatan atas anggaran dimaksud yang terkait dengan pekerjaan:

a) Pelapisan, peningkatan daya dukung, perpanjangan, pemenuhan standar, *leveling,* galian tanah *Runway, Apron* dan *Taxiway* serta pekerjaan lainnya yang sejenis (terkait pekerjaan *Runway, Apron* dan *Taxiway*)
b) Rehabilitasi, pembangunan, perluasan dan penataan gedung terminal termasuk kegiatan lainnya yang terkait dengan pekerjaan terminal seperti galian tanah persiapan gedung terminal, pelataran parkir terminal, dll
c) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan fasilitas bangunan selain bangunan gedung terminal.

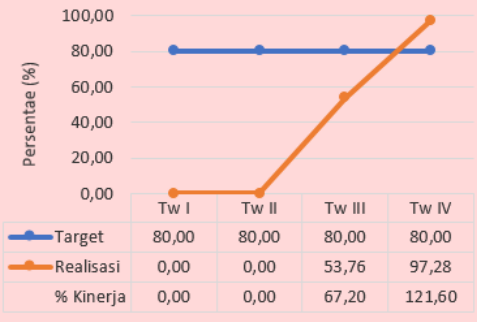
Sementara penyebut dari formula di atas dihitung berdasarkan jumlah bandar udara sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, yang direncanakan akan ditingkatkan kapasitasnya. Dalam hal ini adalah nilai yang ditargetkan dalam Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2015-2019 yaitu sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) bandar udara, yang ditegaskan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 881 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015–2019. Sehingga didapatkan persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi udara pada Tahun 2018 sebesar 97,28% atau dengan capaian kinerja sebesar 121,60% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Capaian tersebut sebagaimana **Gambar III.72** berikut:

$$\%\ \text{Peningkatan Prasarana Transportasi Udara} = \frac{143\ \text{UPBU}}{147\ \text{UPBU}}\ \text{x } 100\% = 97{,}28\%$$

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{97{,}28\%}{80\%}\ \text{x } 100\% = 121{,}60\%$$

Kurang optimalnya pencapaian target peningkatan kapasitas prasarana transportasi udara tahun 2018 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

a) Masih adanya kendala terkait pemenuhan dokumen perencanaan bandar udara;
b) Masih berlangsungnya kegiatan dalam rangka pengembangan bandar udara;
c) Belum terpenuhinya aspek angkutan udara;
d) Adanya perubahan prioritas dalam rangka pengembangan di bandar udara.



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	80,00	80,00	80,00	80,00
Realisasi	0,00	0,00	53,76	97,28
% Kinerja	0,00	0,00	67,20	121,60

Gambar III.72
Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Udara Tahun 2018

Untuk itu, di masa mendatang Kementerian Perhubungan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Aktif dalam rangka melengkapi dokumen perencanaan bandar udara;
b) Peningkatan peran Pemerintah Daerah pada sektor pariwisata dan sumber daya alam.
c) Percepatan pengembangan bandar udara.

4) Transportasi Perkeretaapian

Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi perkeretaapian adalah berupa persentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun diukur melalui persentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun sampai dengan tahun berjalan dibanding dengan *baseline* pada tahun 2014 sepanjang 5.196 Km'sp.

$$\text{Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi perkeretaapian} = \frac{\text{peningkatan panjang jalur KA yang terbangun pada tahun berjalan}}{\text{baseline panjang jalur KA yang beroperasi}} \times 100\%$$

Realisasi persentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun Tahun 2018 sepanjang 351,25 km'sp atau sebesar 13,85%, sehingga capaian sebesar 98,23% dari target yang ditetapkan sebesar 14,10%.

Realisasi panjang jalur kereta api yang terbangun pada tahun 2018 sepanjang 351,25 km'sp, sehingga total panjang jalur kereta api termasuk yang terbangun pada tahun 2018 adalah sepanjang 5.915,84 km'sp, yang diperoleh dari baseline Tahun 2014 sepanjang 5.196 km'sp, realisasi pembangunan pada Tahun 2015 sepanjang 101,02 km'sp, Tahun 2016 sepanjang 42,69 km'sp, Tahun 2017 sepanjang 224,88 km'sp dan Tahun 2018 sepanjang 351,25 km'sp.

Sehingga diperoleh persentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun Tahun 2018 sebesar 13,85%. Capaian kinerja sebesar 98,23% dari target yang ditetapkan sebesar 14,10% atau sepanjang 5.931,19 km'sp.

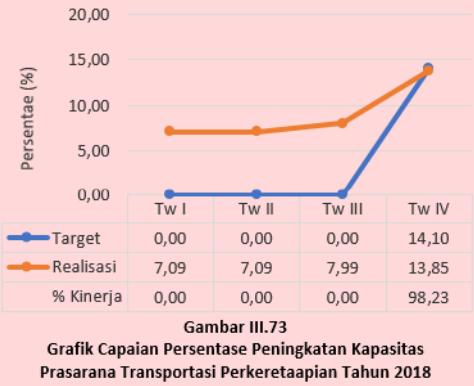
Pembangunan jalur kereta api tahun 2015-2017 telah mencapai 368,55 km'sp, maka:

$$\% \text{ Peningkatan Prasarana Transportasi KA} = \frac{(368{,}55 + 351{,}25)\ \text{km'sp}}{5.196\ \text{km'sp}} \times 100\% = 13{,}85\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{13{,}85\%}{14{,}10\%} \times 100\% = 98{,}23\%$$

Realisasi pembangunan jalur KA pada tahun 2018 sepanjang 351,25 km dengan rincian sebagai berikut :

1) Wilayah Sumatera sepanjang 101,45 km, dengan rincian:
   a) Pembangunan jalur KA Kreung Mane-Kuta Blang sepanjang 10,60 km;
   b) Pembangunan jalur KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung sepanjang 21,50 km;
   c) Pembangunan jalur KA Binjai-Besitang sepanjang 6,50 km;
   d) Pembangunan LRT Sumatera Selatan sepanjag 46,80 km;
   e) Pembangunan jalur KA Pariaman-Naras sepanjang 7,05 km;
   f) Pembangunan jalur KA Cempaka-Rejosari sepanjabg 9 km.



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	0,00	0,00	0,00	14,10
Realisasi	7,09	7,09	7,99	13,85
% Kinerja	0,00	0,00	0,00	98,23

Gambar III.73
Grafik Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018

2) Wilayah Jawa sepanjang 220,35 km, dengan rincian:
   a) Pembangunan LRT DKI Jakarta sepanjang 11,60 km;
   b) Pembangunan jalur ganda KA Solo-Kedungbanteng sepanjang 47,87 km;
   c) Pembangunan jalur ganda KA Madiun-Jombang sepanjang 97,40 km;
   d) Pembangunan jalur ganda Purwokerto-Kroya sepanjang 39,58 km;
   e) Pembangunan *Double-Double Track* Jatinegara-Bekasi sepanjang 23,90 km.



Gambar III.74
Pembangunan KA Lintas Solo-Kedungbanteng sepanjang 47,87 km

3) Wilayah Sulawesi, yaitu pembangunan jalur KA Makassar-Pare-Pare sepanjang 29,45 km.

Pembangunan jalur kereta api yang belum terselesaikan pada tahun 2018 dikarenakan antara lain:

1) Pembangunan jalur ganda kereta api antara Bogor-Sukabumi (Cigombong-Cicurug) karena terkendala pengadaan lahan;
2) Pembangunan jalur kereta api layang Medan-Bandar Khalipah karena terkendala keterlambatan penyediaan material rel dan wesel;
3) Pembangunan jalur ganda kereta api Kedung Banteng-Madiun karena terkendala keterlambatan penyediaan material wesel;
4) Pembangunan jalur kereta api menuju Bandara Adi Sumarmo karena terkendala pengadaan lahan dan perijinan penggunaan lahan milik TNI AU dan pemanfaatan ROW jalan Tol.

Upaya perbaikan kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja persentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun yaitu perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pembangunan secara umum sebagai berikut:

1) Kendala pengadaan lahan, upaya perbaikan antara lain:
   a) Koordinasi dengan instansi terkait termasuk sosialisasi kepada masyarakat;
   b) Koordinasi dengan TNI AU dan instansi terkait (BPKP, LMAN, Bappenas dan Kemenkeu serta Jamintel) terkait penggantian atau alih status lahan yang terkena dampak pembangunan jalur KA Adi Soemarmo dan untuk saat ini pekerjaan konstruksi sudah dapat dilaksanakan.
2) Keterlambatan material wesel, dilakukan perbaikan dengan perpanjangan kontrak *multiyears;*
3) Keterlambatan akibat kendala teknis (perubahan desain) diminimalisir dengan percepatan penyelesaian pekerjaan dengan penambahan tenaga kerja dan *shift* atau jam kerja termasuk penambahan peralatan kerja.



Gambar III.75
Kegiatan pemasangan wesel pada jalur kereta api

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Kesepuluh

IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada Tahun 2015 dan 2016 tidak terisi (hal ini termasuk berlaku pada sub sektor transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian). Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja persentase peningkatan kapasitas

prasarana transportasi yang ditetapkan pada tahun 2017, terdapat penurunan capaian kinerja, sebagaimana **Tabel III.52** berikut:

Tabel III.52
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	48,20	53,57	111,15
			2018	55,24	59,55	107,80

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Capaian persentase peningkatan kapasitas prasarana untuk masing-masing sektor transportasi tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

a. Transportasi Darat

Capaian kinerja persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi darat Tahun 2017-2018 mengalami peningkatan, dimana capaian kinerja ini menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan semakin baik. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.53** berikut:

Tabel III.53
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	35,32	35,02	99,15
			2018	36,85	38,06	103,28

Sumber: Hasil Analisis, 2019

b. Transportasi Laut

Capaian kinerja persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi laut Tahun 2017-2018 kurang optimal dengan capaian sebesar 98,89%. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.54** berikut:

Tabel III.54
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	80,00	99,00	123,75
			2018	90,00	89,00	98,89

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Transportasi Udara

Capaian kinerja persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi udara Tahun 2017-2018 mengalami peningkatan, dimana capaian kinerja ini menunjukkan kinerja Kementerian Perhubungan semakin baik. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.55** berikut:

Tabel III.55
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Udara Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Udara	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	70,00	72,73	103,90
			2018	80,00	97,28	121,60

Sumber: Hasil Analisis, 2019

d. Transportasi Perkeretaapian

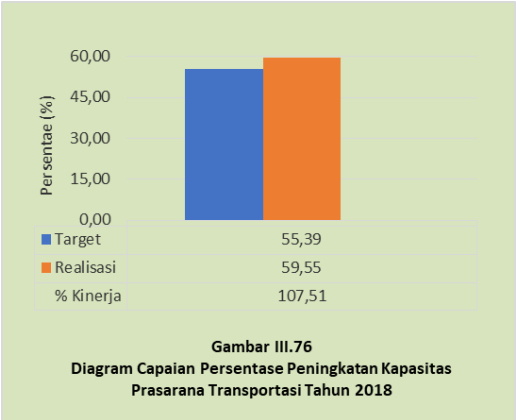
Capaian kinerja persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi perkeretaapian Tahun 2017-2018 kurang optimal dengan capaian sebesar 98,23%. Pencapaian ini sebagaimana **Tabel III.56** berikut:

Tabel III.56
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Perkeretaapian Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Perkeretaapian	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	7,47	7,53	100,80
			2018	14,10	13,85	98,23

Sumber: Hasil Analisis, 2019

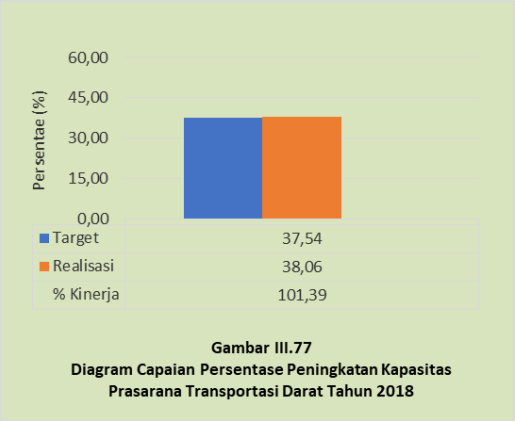
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Kesepuluh



Gambar III.76
Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 peningkatan kapasitas prasarana transportasi pada Tahun 2018 memiliki target 55,39% dan realisasi 59,55%atau mencapai 107,51%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.76.**

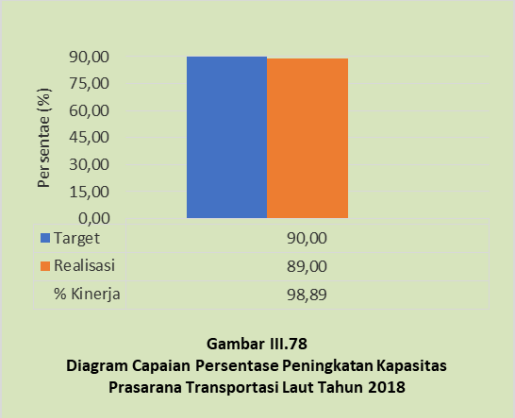
Sedangkan capaian persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi pada Tahun 2018 tiap sektor transportasi bila dibandingkan dengan masing-masing target Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:



Gambar III.77
Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat Tahun 2018

a. Transportasi Darat

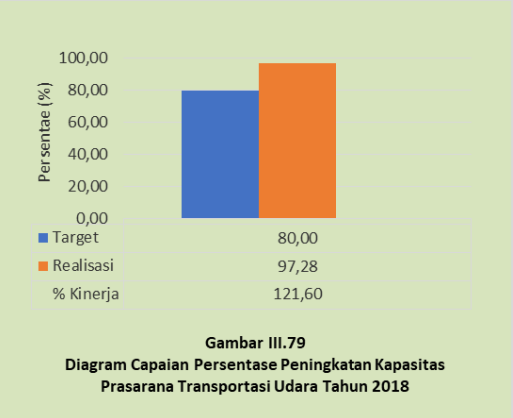
Capaian kinerja persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi darat Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah melebihi target, yaitu mencapai 38,06% dari target sebesar 37,54%.



Gambar III.78
Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut Tahun 2018

b. Transportasi Laut

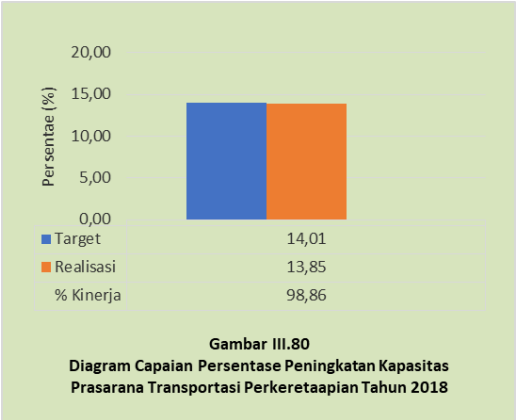
Capaian kinerja persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi laut Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 masih belum optimal, yaitu mencapai 89,00% dari target sebesar 90,00%.



Gambar III.79
Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Udara Tahun 2018

c. Transportasi Udara

Capaian kinerja persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi udara Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah melebihi target, yaitu mencapai 97,28% dari target sebesar 80,00%.



Gambar III.80
Diagram Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Perkeretaapian Tahun 2018

d. Transportasi Perkeretaapian

Capaian kinerja persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi perkeretaapian Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 masih belum optimal, yaitu mencapai 13,85% dari target sebesar 14,01%.

3. IKU 11 yaitu *Modal Share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek

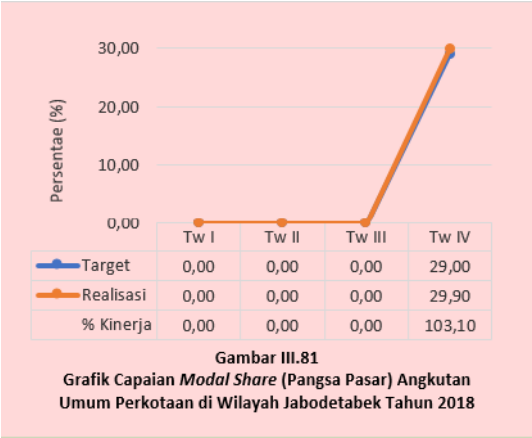
a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikaor Kinerja Utama Kesebelas

Modal Share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek merupakan Persentase total transaksi perjalanan angkutan umum harian (*BRT* dan KRL) dalam satu tahun dibandingkan terhadap total perjalanan harian dalam satu tahun, yaitu:

$$Modalshare = \frac{\text{total transaksi perjalanan angkutan umum harian}}{\text{total perjalanan harian}} \; x \; 100\%$$

Modal Share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek pada tahun 2018 memiliki target 29%, dan realisasinya adalah 29,90%.

Capaian ini diperoleh berdasarkan hasil survei dan data sekunder, diperoleh hasil analisis untuk modal share yang hasilnya merupakan rincian total perjalanan angkutan umum berupa bus reguler, BRT Transjakarta, dan KRL, yang menghasilkan dari total transaksi perjalanan angkutan umum harian sebanyak 4.612.156 trip sedangkan total perjalanan harian adalah sebanyak 15.423.102 trip.



Gambar III.81
Grafik Capaian *Modal Share* (Pangsa Pasar) Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek Tahun 2018

$$\text{Modalshare} = \frac{4.612.156 \text{ trip}}{15.423.102 \text{ trip}} \text{ x } 100\% = 29,90\%$$

$$\text{\% Capaian} = \frac{29,90\%}{29\%} \text{ x } 100\% = 103,10\%$$



Gambar III.82
Bus JR Connection

Salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya *modal share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek adalah dengan menerapkan strategi *push and pull* oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. *Push* merupakan strategi untuk mendorong pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum, dengan program: kebijakan ganjil genap diberlakukan di 3 (tiga) ruas jalan tol yakni ruas Tol Jakarta-Cikampek, Tol Jakarta-Tangerang dan Tol Jagorawi. Melalui kebijakan tersebut, pergerakan menggunakan kendaraan pribadi dapat dibatasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan tersebut terbukti mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi khususnya pada ruas jalan tol dan meningkatkan penggunaan angkutan umum. Sebagai contoh peningkatan penumpang angkutan umum pada layanan Transjakarta periode Januari sampai dengan Desember 2018, yaitu:

Tabel III.57
Jumlah Penumpang Trans Jakarta Tahun 2018

Bulan	Jumlah Penumpang/bulan
Jan-18	13.557.204
Feb-18	12.288.104
Mar-18	14.452.662
Apr-18	14.752.557
Mei-18	14.601.319
Jun-18	11.942.791
Jul-18	16.318.254
Agu-18	18.134.857
Sep-18	18.120.682
Okt-18	19.023.506
Nov-18	18.156.844
Des-18	18.420.288

Sumber: PT. Trans Jakarta, 2018

Pull merupakan strategi untuk menarik pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum, dengan program pembukaan trayek-trayek yang belum dilayani oleh layanan angkutan umum yang menghubungkan antara wilayah Jakarta dengan Bodetabek, yakni:

1) Pembukaan trayek yang diprioritaskan untuk pelayanan menuju Bandar udara Soekarno Hatta dalam bentuk layanan angkutan perkotaan layanan bandara (*JA Connexion*);

2) Pembukaan layanan kepada perumahan atau permukiman di wilayah Bodetabek menuju pusat kota dengan layanan premium dalam bentuk layanan angkutan permukiman Jabodetabek (*JR Connexion*).

Upaya lebih meningkatkan capaian *modal share* ditahun depan yakni dengan mengembangkan rute-rute baru pada layanan JAC dan JRC.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikaor Kinerja Utama Kesebelas

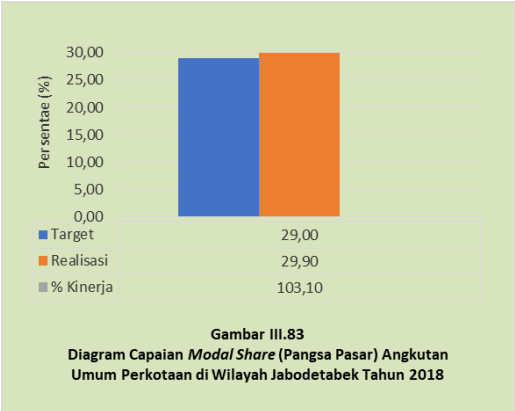
IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada Tahun 2015 dan 2016 tidak terisi. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja *modal share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek yang ditetapkan pada tahun 2017. Terdapat kenaikan capaian kinerja dan telah mencapai target, sebagaimana **Tabel III.58** berikut:

Tabel III.58
Perbandingan Realisasi Kinerja *Modal Share* (Pangsa Pasar) Angkutan Umum Perkotaan Di Wilayah Jabodetabek Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	*Modal share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	26,00	26,00	100,00
			2018	29,00	29,90	103,10

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikaor Kinerja Utama Kesebelas



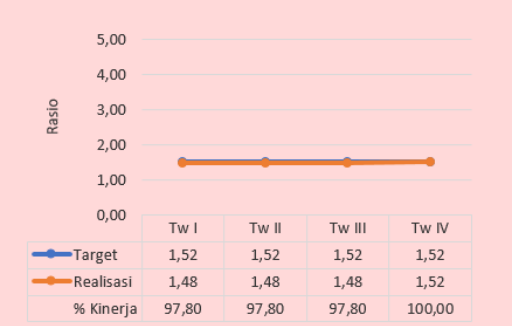
Gambar III.83
Diagram Capaian *Modal Share* (Pangsa Pasar) Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 *Modal share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek pada Tahun 2018 memiliki target 29% dan realisasi 29,90% atau mencapai 103,10%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.83**

III.2.5.Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Kelima

1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keduabelas

Sasaran Kementerian Perhubungan yang kelima adalah Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil, yang diukur dengan IKU 12 yaitu Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil memiliki target 1,52 dan realisasi total mencapai 100% dari target yaitu 1,52. Pencapaian ini merupakan kontribusi dari sub sektor transportasi darat, laut dan transportasi udara yang masing-masing memenuhi target.



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	1,52	1,52	1,52	1,52
Realisasi	1,48	1,48	1,48	1,52
% Kinerja	97,80	97,80	97,80	100,00

Gambar III.84
Grafik Capaian Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil Tahun 2018

Rincian pencapaian masing-masing subsektor adalah sebagai berikut:

a. Transportasi Darat

Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil untuk transportasi darat merupakan IKU baru atas rekomendasi Kementerian PAN-RB. Salah satu rekomendasi Kementerian PAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis *outcome* (hasil) pada Tahun 2017, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2017 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni Tahun 2015 dan 2016.

Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil untuk transportasi darat adalah perbandingan antara jumlah daerah yang dilalui trayek perintis di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil dibagi dengan jumlah daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, yaitu:

$$\text{Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil} = \frac{\textit{Jumlah daerah yang dilalui trayek dan lintas perintis pada daerah rawan bencana,perbatasan,terluar dan terpencil}}{\textit{Jumlah daerah} \text{ rawan bencana,perbatasan ,terluar dan terpencil}}$$

Catatan:

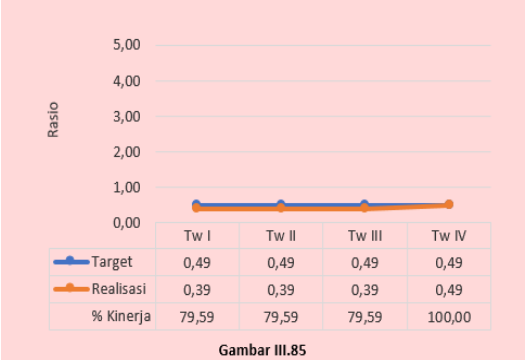
Jumlah Daerah yang dilayani trayek perintis adalah realisasi keperintisan angkutan darat (jalan dan penyeberangan) yang melalui daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertingggal Tahun 2015-2019.

Capaian Indikator Kinerja Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil untuk transportasi darat tahun 2018 sebesar 100%. Target tahun 2018 sebesar 75 (tujuh puluh lima) wilayah disesuaikan dengan target pada Revisi II PK Kemenhub adalah rasio sebesar 0,49. Adapun75 (tujuh puluh lima) wilayah Daerah yang dilayani trayek perintis yang merupakan realisasi keperintisan angkutan darat (jalan dan penyeberangan) yang melalui daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil terlampir dalam **Lampiran 23.** Sedangkan, yang menjadi penyebut dalam Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil untuk transportasi darat, yaitu sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) wilayah (kabupaten/kota) yang diperoleh berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau kecil terluar dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

$$\text{Rasio Transportasi Darat} = \frac{75 \text{ wilayah}}{154 \text{ wilayah}} = 0{,}49$$

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{0{,}49}{0{,}49} \times 100\% = 100\%$$

Angka 0,49 pada penyebut di dalam perhitungan presentase capaian merupakan hasil perhintungan Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil untuk transportasi darat yang menjadi target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 dan Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018. Target Rasio Konektivitas Transportasi Darat tidak mengalami perubahan dari Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 sampai Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2018.



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	0,49	0,49	0,49	0,49
Realisasi	0,39	0,39	0,39	0,49
% Kinerja	79,59	79,59	79,59	100,00

Gambar III.85
Grafik Capaian Rasio Layanan Transportasi Darat pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil Tahun 2018

Capaian ini didukung pula dengan program subsidi operasional angkutan penyeberangan dan jalan untuk pelayanan lintas perintis yang termasuk kedalam daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

Untuk meningkatkan rasio layanan angkutan darat (jalan dan penyeberangan) yang melalui daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, di masa yang mendatang Kementerian Perhubungan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Mengakomodir usulan daerah (pembukaan trayek angkutan jalan maupun lintas penyeberangan) untuk pelayanan di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil;
2) Mengalokasikan anggaran subsidi (baik angkutan jalan maupun angkutan penyeberangan perintis) untuk menjamin ketersediaan pelayanan di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil;
3) Melakukan monitoring pelayanan perintis secara berkala.

b. Transportasi Laut

Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil untuk transportasi laut merupakan Rasio Peningkatan Layanan Transportasi Laut pada Daerah Rawan Bencana, perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar oleh Trayek Angkutan Laut Perintis dan Tol Laut, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah trayek angkutan laut perintis dan tol laut pada daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil}}{\text{Total daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil}}$$

Capaian Indikator Kinerja Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil untuk transportasi laut tahun 2018 sebesar 100%, yaitu terealisasi rasio 0,68 dari target rasio 0,68, yaitu:

$$\text{Rasio Transportasi Laut} = \frac{83 \text{ trayek}}{122 \text{ wilayah}} = 0{,}68$$

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{0{,}68}{0{,}68} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil untuk transportasi laut adalah sebagaiman **Gambar III.86.**



Gambar III.86
Grafik Capaian Rasio Layanan Transportasi Laut pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil Tahun 2018

Pencapaian ini berasal dari jumlah trayek angkutan laut perintis pada wilayah dimaksud sejumlah 83 (delapan puluh tiga) wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan total daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil adalah 122 (seratus dua puluh dua) Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Presiden Nomor

131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Capaian Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil transportasi laut sesuai target yang telah ditetapkan karena dalam seluruh Kabupaten terdapat pelabuhan yang disinggahi.



Gambar III.87
Pembangunan Kapal Laut Perintis 2000GT

Adapun anggaran terkait Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Untuk Transportasi Laut sebesar Rp1.142.759.785.641,00 dengan realisasi sebesar Rp801.502.112.211,00 atau sebesar 70,14%.

c. Transportasi Udara

Indikator kinerja ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ Rute\ Yang\ Melayani\ Bandar\ Udara\ Di\\ Daerah\ \ Rawan\ Bencana, Dan\ Perbatasan, Terluar\ dan\ Terpencil\end{array}}{\begin{array}{c}Jumlah\ Bandar\ Udara\ Di\ Daerah\ Terisolir,\\ Rawan\ Bencana, Dan\ Perbatasan, Terluar\ dan\ Terpencil\end{array}}\ x\ 100$$

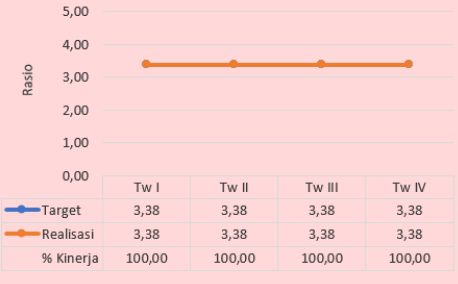
Jumlah rute yang melayani bandar udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil dihitung berdasarkan jumlah rute angkutan udara komersil maupun perintis yang melayani wilayah Negara Kesatuan RI dengan kategori daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil di tahun 2018, dimana ketentuan kategori rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, sehingga diperoleh nilai sebesar 456 (empat ratus lima puluh enam) Rute Komersil dan Perintis yang melayani daerah terisolir, rawan bencana dan perbatasan.

Sementara jumlah bandar udara di Negara Kesatuan RI yang masuk dalam kategori daerah terisolir, rawan bencana dan perintis sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional dengan jumlah Bandar Udara sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) bandar udara **(Lampiran 25)** sehingga diperoleh rasio layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil adalah sebesar 3,38 atau setara dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target rasio yang ditetapkan sebesar 3,38 (450 rute).

$$\text{Rasio Transportasi Udara} = \frac{450 \text{ rute}}{133 \text{ bandar udara}} = 3{,}38$$

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{3{,}38}{3{,}38} \times 100\% = 100\%$$

Melihat nilai rasio dan persentase capaian kinerja indikator ini dapat disimpulkan bahwa seluruh wilayah nasional terkait rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil sudah terpenuhi dengan total rute pelayanan dan juga menunjukkan bahwa 1 wilayah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil sudah dapat dilayani oleh 3 sampai 4 rute penerbangan komersil dan perintis.



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	3,38	3,38	3,38	3,38
Realisasi	3,38	3,38	3,38	3,38
% Kinerja	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar III.87
Grafik Capaian Rasio Layanan Transportasi Udara pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil Tahun 2018

Pencapaian Kinerja tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan Nawacita Presiden Ke 3 (tiga) yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Adapun usaha usaha strategis dalam mewujudkan capaian kinerja yang baik ini adalah salah satunya melalui program strategis:

1) Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar Indonesia melalui afirmasi positif terhadap pengalokasian anggaran di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil;



Gambar III.88
Lokasi Bandar Udara Rawan Bencana dan Perbatasan 2015 – 2019
Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, 2018

2) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan rawan bencana melalui pembangunanterminal dan perpanjangan runway agar dapat didarati oleh minimum Pesawat ATR 72;



Gambar III.89
Lokasi Bandar Udara Perpanjangan Runway Untuk Didarati ATR 42 dan 72
Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2018

3) Penyediaan sarana angkutan keperintisan dan subsidi BBM Perintis;
4) Adanya Kebijakan terkait Pengembangan "Jembatan Udara" sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan. Jembatan Udara merupakan upaya Pemerintah dalam menurunkan tingkat disparitas harga melalui pelaksanaan angkutan udara kargo dari bandar udara ke bandar udara lainnya dan/atau dari bandar udara ke bandar udara di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keduabelas

IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada tahun 2015 dan 2016 tidak terisi (hal ini termasuk berlaku pada sub sektor transportasi darat, laut, dan udara). Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil untuk transportasi udara yang ditetapkan pada tahun 2017,

terdapat penurunan capaian kinerja, namun masih tetap memenuhi target yang telah ditetapkan, sebagaimana **Tabel III.59** berikut:

Tabel III.59
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil	Rasio	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	16,88	23,94	141,79
			2018	1,52	1,52	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Capaian rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil untuk masing-masing sektor transportasi adalah sebagai berikut:

Tabel III.60
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Transportasi Darat Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil Transportasi Darat	Rasio	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	0,47	0,47	100,00
			2018	0,49	0,49	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Tabel III.61
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Transportasi Laut Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil Transportasi Laut	Rasio	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	46,83	68,00	145,21
			2018	0,68	0,68	100,00

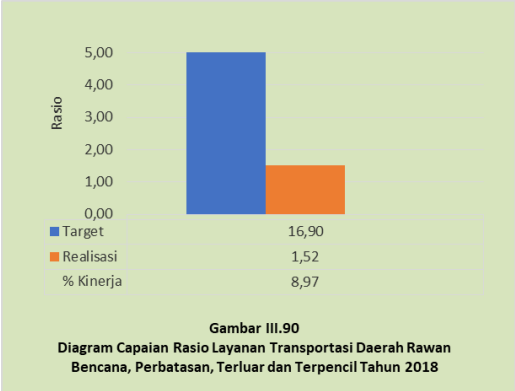
Sumber: Hasil Analisis, 2019

Tabel III.62
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Transportasi Udara Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil Transportasi Udara	Rasio	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	3,35	3,35	99,88
			2018	3,38	3,38	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

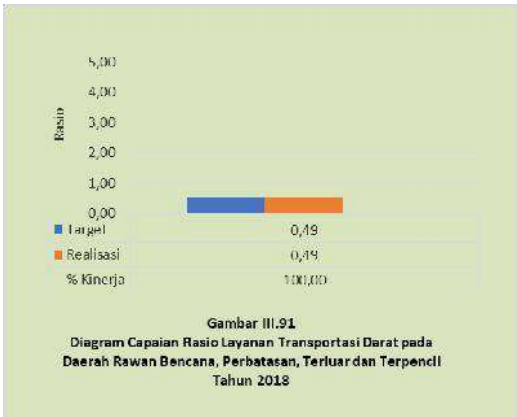
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Keduabelas



Gambar III.90
Diagram Capaian Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil pada Tahun 2018 memiliki target 16,90 dan realisasi 1,52 atau mencapai 8,97%. Perbedaan capaian yang signifikan ini disebabkan oleh adanya penyempurnaan cara menghitung rasio layanan transportasi laut pada daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.90.**

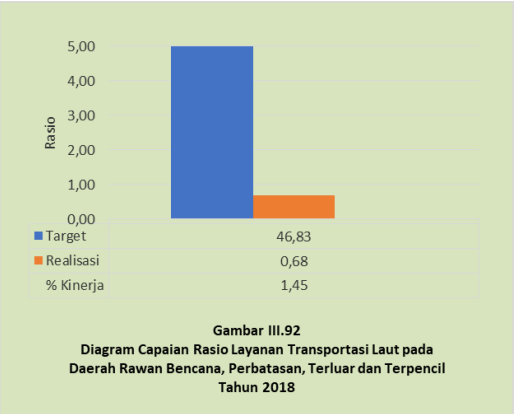
Sedangkan capaian rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil pada Tahun 2018 tiap sektor transportasi bila dibandingkan dengan masing-masing target Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:



Gambar III.91
Diagram Capaian Rasio Layanan Transportasi Darat pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil Tahun 2018

a. Transportasi Darat

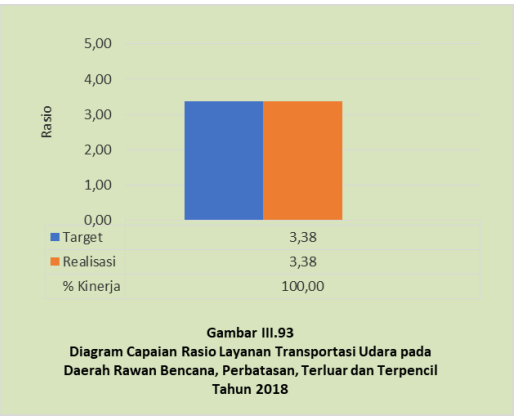
Capaian rasio layanan transportasi darat daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah mencapai target 100%, yaitu mencapai 0,49 rasio.



Gambar III.92
Diagram Capaian Rasio Layanan Transportasi Laut pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil Tahun 2018

b. Transportasi Laut

Capaian rasio layanan transportasi laut daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 belum optimal, yaitu mencapai persentase kinerja sebesar 1,45%.



Gambar III.93
Diagram Capaian Rasio Layanan Transportasi Udara pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil Tahun 2018

c. Transportasi Udara

Capaian rasio layanan transportasi udara daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil Tahun 2018 terhadap target Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 telah mencapai target 100%, yaitu mencapai 3,38 rasio.

III.2.6.Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Keenam

1. **Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Ketigabelas**

Sasaran Kementerian Perhubungan yang keenam adalah terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi, yang diukur dengan IKU 13 yaitu persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan target sebesar 80,00% dihitung dengan formulasi:

> Formulasi target IKU deregulasi peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan = 20 % x 75 Peraturan = 15 peraturan / tahun

Pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi jilid I yang diumumkan oleh Presiden pada penghujung tahun 2015, salah satunya memfokuskan pada pembenahan regulasi atau dikenal dengan istilah deregulasi, yaitu perombakan dan penyederhanaan peraturan dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam

perekonomian global. Deregulasi diwujudkan dengan merasionalisasi peraturan yaitu penghilangan peraturan yang tumpang tindih, keselarasan antar peraturan, serta penyederhanaan peraturan terutama yang terkait dengan perizinan dalam rangka membangun kemudahan iklim berinvestasi. Kementerian Perhubungan mengemban amanat untuk melakukan deregulasi khususnya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	77,50	80,00	80,00	80,00
Realisasi	77,50	80,00	80,00	80,00
% Kinerja	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar III.94
Grafik Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Dalam periode Tahun 2015 - 2018 Kementerian Perhubungan telah melakukan deregulasi sejumlah 60 (enam puluh) peraturan baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri Perhubungan. Adapun substansi deregulasi tersebut secara garis besar meliputi:

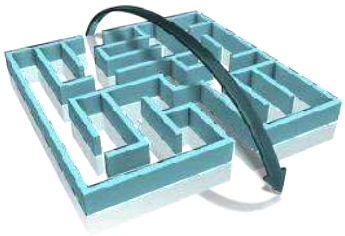
a. Penyederhanaan persyaratan kepemilikan modal usaha dalam berbagai bidang penyelenggaraan dan pengusahaan transportasi, keagenan, bongkar muat, dan lain sebagainya;
b. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang perhubungan dengan tujuan untuk memangkas birokrasi dan mempermudah proses pengurusan perizinan usaha;
c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan *online* untuk memudahkan dan efisiensi proses perizinan;
d. Pemangkasan tahapan dan waktu proses pengurusan perizinan;
e. Pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha dari Menteri Perhubungan kepada pejabat di bawahnya atau kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
f. Menstimulasi percepatan proses logistik/penurunan angka *dwelling time*;
g. Menstimulasi minat investor untuk berinvestasi dengan membuka kemungkinan penunjukan langsung/penugasan Konsesi kepada BUP dengan syarat tertentu.

Dalam kurun waktu 2015-2018 Kementerian Perhubungan telah melaksanakan program deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan sebanyak 60 (enam puluh) peraturan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.63
Rincian Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2015-2018

No.	Jenis Peraturan	Tahun				Jumlah Deregulasi
		2015	2016	2017	2018	
1	Peraturan Pemerintah	1	1	-	-	2
2	Peraturan Presiden	-	2	-	-	2
3	Peraturan Menteri Perhubungan	20	17	15	4	56
Jumlah		**21**	**20**	**15**	**4**	**60**

Sumber: Biro Hukum, 2018



Pelaksanaan deregulasi peraturan terkait pengaturan investasi merupakan arahan dari Presiden dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan karena Kementerian Perhubungan selaku instansi pemerintah yang secara teknis mengatur pelaksanaan transportasi di Indonesia, yaitu:

a. Permenhub Nomor PM 22 Tahun 2018 tentang Komponen Penghasilan Dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Laut ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2018;
b. Permenhub Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara *Online* Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2018;
c. Permenhub Nomor PM 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 Tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2018; dan
d. Permenhub Nomor PM 51 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2014 Tentang Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2018.

Rincian deregulasi peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2018 adalah sebagaimana pada **Lampiran 26.**

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Utama Ketigabelas

IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada Tahun 2015 dan 2016 tidak terisi. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada tahun 2017, terdapat

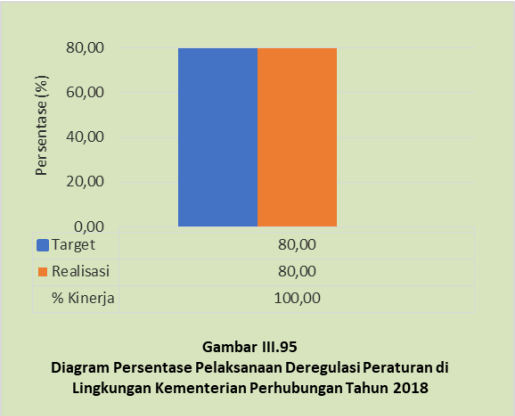
penurunan capaian kinerja. Meskipun demikian tetap mencapai target yang telah ditetapkan, sebagaimana **Tabel III.64** berikut:

Tabel III.64
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi	Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	60,00	75,00	125,00
			2018	80,00	80,00	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Ketigabelas



Gambar III.95
Diagram Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2018 memiliki target 80,00% dan realisasi 80,00% atau mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.95.**

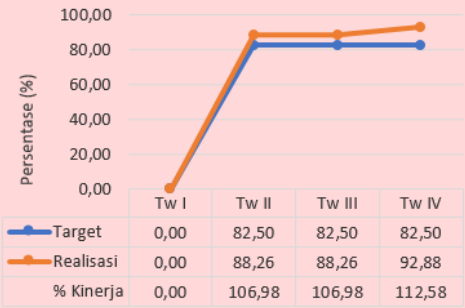
III.2.7.Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Ketujuh

1. **Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keempatbelas**

Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi merupakan persentase jumlah lulusan Diklat Pembentukan Tahun 2017 yang telah mendapat pekerjaan pada Tahun 2018 dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dari keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan yang lulus pada Tahun 2017, yang secara matematis dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi} = \frac{\text{Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun n yang telah mendapat pekerjaan pada tahun n+1} \leq \text{1 tahun}}{\text{Jumlah keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan pada tahun n}} \; x \; 100\%$$

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi pada tahun 2018 ini telah mencapai target yang ditetapkan. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi sebesar 92,88% dari target pada dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebesar 82,50% atau sebesar 112,58% tingkat pencapaiannya.



Gambar III.96
Grafik Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi

$$\% \text{ Penyerapan Lulusan Diklat Transortasi} = \frac{3.587 \text{ orang}}{3.862 \text{ orang}} \text{ x } 100\% = 92{,}88\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{92{,}88\%}{82{,}50\%} \text{ x } 100\% = 112{,}58\%$$

Pencapaian saat ini sangat bagus, dan harus dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. Berikut tabel rincian realisasi IKU Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi pada:

Tabel III.65
Penyerapan SDM Lulusan Diklat Transportasi Tahun 2018

NO	MATRA	JUMLAH LULUSAN (orang)	JUMLAH DAYA SERAP LULUSAN (orang)	%
1	SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian	598	596	99,67%
2	SDM Transportasi Laut	2.546	2.469	96,98%
3	SDM Transportasi Udara	718	522	72,70%
TOTAL		**3.862**	**3.587**	**92,88%**

Sumber: BPSDM Perhubungan, 2018



Gambar III.97
Kampus Terpadu ATKP Makassar, Sulawesi Selatan

Persentase capaian kinerja berdasarkan IKU tersebut di atas berasal dari capaian peserta yang selesai belajar Tahun 2017 dan memperoleh pekerjaan di Tahun 2018. Hasil capaian mengindikasikan terserapnya lulusan diatas target yang telah ditentukan. Hal ini diinisiasi oleh BPSDM Perhubungan yang telah melakukan beberapa langkah guna meningkatkan penyerapan lulusan Diklat Transportasi. Peningkatan penyerapan lulusan diklat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan *database* lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan dalam bentuk fitur searching alumni melalui aplikasi di tiap-tiap satker dan Monev BPSDM, selain itu peningkatan komitmen bersama dan kerjasama dengan *stakeholder*, baik dalam skala Nasional maupun Internasional sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi, seperti BUMN maupun lembaga pemerintahan melalui pola pembibitan maupun antar negara.

Selain upaya perluasan penyerapan lulusan diatas, BPSDM juga melakukan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan SDM transportasi. Dalam penyelenggaraan pengembangan SDM transportasi masih terdapat kendala keterbatasan baik secara kualitas dan kuantitas SDM juga dari segi finansial, karena itu diperlukan solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, *Non Governmental Organization* (NGO) dan lain-lain. Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu mengingat tidak semua aktivitas pengembangan SDM mampu dikerjakan sendiri terutama dalam hal ketersediaan kuantitas, *skill* SDM dan finansial.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keempatbelas

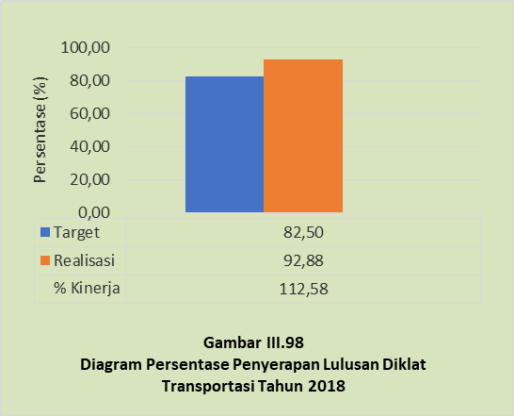
IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada tahun 2015 dan 2016 tidak terisi. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi yang ditetapkan pada tahun 2017, terdapat kenaikan capaian kinerja, sebagaimana **Tabel III.66** berikut:

Tabel III.66
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	80,00	79,86	99,83
			2018	82,50	92,88	112,58

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Keempatbelas



Gambar III.98
Diagram Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi pada Tahun 2018 memiliki target 82,50% dan realisasi 92,88% atau mencapai 112,58%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.98**

III.2.8.Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Kedelapan

1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Kelimabelas

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang Perhubungan disusun sebagai salah satu capaian *outcome* Kementerian Perhubungan. Dalam rangka menjabarkan visi dan misi Kementerian Perhubungan, serta menjawab segala isu strategis terkini, peran Badan Litbang Perhubungan sebagaimana dijabarkan dalam Peta Strategi Reviu Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 berada dalam kelompok Internal *Process Perspective* pada Sasaran Strategis ke-8, yaitu Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan dan Indikator Kinerja Utama ke-15, yaitu persentase pemanfaatan penelitian sebagai rekomendasi kebijakan. Penelitian yang dimanfaatkan adalah hasil-hasil penelitian yang telah disampaikan kepada seluruh *stakeholder* di bidang transportasi seperti pemerintah daerah dan sub sektor di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Penelitian merupakan permintaan dari stakeholder dan tindaklanjut dari kebijakan Kemenhub;

b. Penelitian dijadikan bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan, dokumen strategis dan atau perundang-undangan;
c. Penelitian dimuat dalam publikasi ilmiah yang terakreditasi baik nasional maupun internasional.

Pelaksanaan penelitian di lingkungan Badan Litbang Perhubungan diarahkan untuk memfasilitasi kebutuhan naskah akademis, menjawab permasalahan transportasi serta menanggapi isu-isu strategis dan aktual di bidang transportasi. Seluruh penelitian yang dilaksanakan sejak perencanaan hingga produk akhir diorientasikan pada kebutuhan *stakeholder/user*. Dalam pengertian, penelitian yang dikerjakan oleh Badan Litbang Perhubungan berangkat dari kebutuhan pengguna *(stakeholder)* dan berakhir dengan menyerahkan hasil penelitian tersebut (dalam bentuk rekomendasi kebijakan) kepada pengguna. Permintaan penelitian dalam hal ini berasal dari penugasan Menteri Perhubungan, permintaan direktorat/unit kerja di internal Kementerian Perhubungan dan berdasarkan permintaan pimpinan daerah atau instansi terkait. Selanjutnya perumusan hasil penelitian dalam bentuk rekomendasi kebijakan dilakukan bersama dengan para narasumber dan *stakeholders* yang berkompeten dibidangnya untuk menjaga kualitas hasil penelitian agar hasil penelitian berdaya guna dan memiliki pemanfaatan.

Pemanfaatan hasil penelitian dapat bersifat ke dalam (internal Kementerian Perhubungan) dan institusi di luar Kementerian Perhubungan atau masyarakat (eksternal). Sebagai institusi penunjang di lingkungan Kementerian Perhubungan, pelayanan kepada unit operasional menjadi prioritas kegiatan Badan Litbang Perhubungan. Para penerima manfaat hasil penelitian dan pengembangan Badan Litbang Perhubungan apabila dikelompokkan terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

a. Unit kerja operasional di lingkungan Kementerian Perhubungan seperti Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Badan, KNKT, dan seluruh satker di lingkungan Kementerian Perhubungan;
b. Masyarakat yang memanfaatkan hasil litbang, yaitu Pemerintah Daerah beserta jajarannya, kalangan akademisi, operator transportasi, institusi terkait, dll;
c. Peneliti itu sendiri untuk peningkatan kompetensi dirinya dan pengembangan penelitian transportasi.

Adapun bentuk pemanfaatan hasil penelitian dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi:

a. Sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan perhubungan, yaitu dalam bentuk naskah akademis/rumusan kebijakan sebagai dasar masukan untuk pengambilan keputusan tingkat

kementerian maupun unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan serta instansi lain terkait;

b. Sebagai konsep masukan dalam bentuk rekomendasi kebijakan hasil penelitian yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah atau Dinas Perhubungan terkait;
c. Dimuat dalam publikasi ilmiah untuk lingkup internal Kementerian Perhubungan, maupun publikasi eksternal yakni pada tingkat publikasi nasional dan internasional.

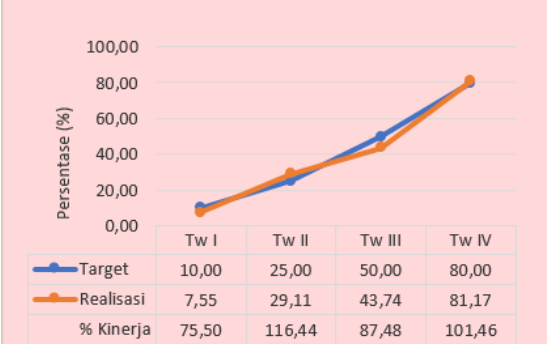
Persentase pemanfaatan penelitian sebagai rekomendasi kebijakan dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah penelitian yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah penelitian yang dikerjakan dalam satu tahun}} x\ 100\%$$

Pada tahun 2018, Badan Litbang Perhubungan telah menyelesaikan penelitian sebanyak 154 judul dengan realisasi anggaran sebesar Rp41.694.790.291,00 (Empat Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), dan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada para pengguna berdasarkan isu strategis dan aktual sebanyak 125 rekomendasi atau 81,17%. Realisasi tersebut melebihi dari target rencana semula, yaitu 80% atau 123 rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan kepada *stakeholder* sebagaimana target yang diperjanjikan dalam dokumen PK Revisi Tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan target semula, maka capaian kinerja pemanfaatan hasil penelitian dalam bentuk rekomendasi kebijakan transportasi tahun 2018 adalah sebesar 101,46%.

$$\%\ \text{Pemanfaatan Penelitian sebagai Rekomendasi Kebijakan} = \frac{125\ \text{penelitian}}{154\ \text{penelitian}} \times 100\% = 81{,}17\%$$

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{81{,}17\%}{80\%} \times 100\% = 101{,}46\%$$



	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target	10,00	25,00	50,00	80,00
Realisasi	7,55	29,11	43,74	81,17
% Kinerja	75,50	116,44	87,48	101,46

Gambar III.99
Grafik Persentase Pemanfaatan Penelitian yang Dijadikan Bahan Rekomendasi Kebijakan

Salah satu faktor utama keberhasilan kinerja pemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan, yaitu adanya penugasan Menteri Perhubungan dan permintaan dukungan penelitian di internal Kementerian Perhubungan serta pelaksanaan penelitian pendampingan atas permintaan pimpinan pemerintah daerah melalui fasilitasi klinik transportasi. Klinik transportasi merupakan layanan teknis yang disediakan oleh Badan Litbang Perhubungan sejak 2014 dalam bentuk pendampingan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah di sektor transportasi kepada pemerintah daerah dan

instansi terkait sesuai permintaan. Layanan teknis Klinik Transportasi Badan Litbang Perhubungan sangat diapresiasi oleh Pimpinan Pemerintah Daerah serta Dinas Perhubungan. Hal ini terlihat dari banyaknya surat permintaan pelaksanaan pendampingan penelitian dari pemerintah daerah yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Litbang Perhubungan.

Banyaknya permintaan tersebut, berimplikasi positif kepada kinerja para peneliti di lingkungan Badan Litbang Perhubungan untuk meningkatkan produktivitas hasil penelitian dan menghasilkan rekomendasi kebijakan dengan pemanfaatan yang jelas untuk penggunanya. Di samping mengasah kemampuan para peneliti untuk dapat menghasilkan penelitian yang baik dengan hasil implementatif berdasarkan permasalahan nyata di lapangan. Kondisi ini menjadikan Badan Litbang Perhubungan semakin terpercaya untuk mendukung pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan dan kepentingan eksternal.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penelitian dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penyusunan naskah rekomendasi sudah melalui proses pembahasan yang mendalam oleh para peneliti bersama tenaga ahli. Hal ini untuk memastikan rekomendasi kebijakan dapat terjaga kualitasnya.

Pelaksanaan penelitian kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian atau institusi terkait sangat membantu keberhasilan pelaksanaan penelitian Badan Litbang Perhubungan. Kerja sama penelitian dalam hal ini juga menjawab permasalahan atas keterbatasan sarana prasarana khususnya untuk pelaksanaan penelitian terapan. Di sisi lain pelaksanaan penelitian bersama meningkatkan kompetensi para peneliti Badan Litbang Perhubungan di samping menambah pengalaman dan memperluas pergaulan dengan sesama peneliti. Kegiatan kerja sama penelitian pada tahun 2018 meliputi kerja sama antara Badan Litbang Perhubungan dengan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), dan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, dan Badan Pembina Pensiunan Pegawai (BP-3).

Faktor keberhasilan lainnya adalah peningkatan kompetensi SDM untuk peneliti khususnya melalui pelaksanaan pelatihan teknis sehingga membantu mereka dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Beberapa penelitian teknis yang diselenggarakan pada tahun 2018 antara lain Diklat Fungsional Peneliti Lanjutan, Penulisan *Abstract Jurnal* Internasional, Teknik Presentasi: Infografis, Editor: Menyunting Naskah Karya Tulis Populer, Metodologi Penelitian: Kebijakan Analisis Publik, Penulisan Ilmiah: *Policy Brief*, *FIATA Diploma Freight Forwarding, Basic Freight Forwarding (UN-ESCAP Standard)* Angkatan 106, Kompilasi Data Seluler dan Pengolahan Data Survei Asal Tujuan

Transportasi Nasional, Metodologi Penelitian dengan Ilmu Statistik untuk Bidang Penelitian Transportasi Udara, Diklat Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), *Aerodrome*, Navigasi Penerbangan, *Airside Airport Safety, Ground Handling Management, Cargo Skills and Procedures,* Training Standar Sertifikasi Rancang Bangun Pesawat Udara, Pelatihan Asesor, Calon Asesor, dan Tenaga Ahli Skema Gas Rumah Kaca (GRK) untuk Mendukung Program *ICAO CORSIA, Training Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA*), Diklat Teknis Dasar Transportasi Darat Angkatan I, Bahasa Indonesia, *IT Environment Management System (EMS),* dan Diklat Operator *Hawkeye*. Selain melalui pelaksanaan pelatihan teknis, peningkatan kompetensi Badan Litbang dilakukan melalui kegiatan magang di PT. Industri Kereta Api (PT. INKA) Madiun dan Satker Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan (PLS) 2 Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah.

Meskipun realisasi penelitian yang dijadikan rekomendasi kebijkan melebihi target yang ditetapkan, namun ada beberapa kendala kinerja selama tahun anggaran 2018, yakni:

a. Perencanaan pelaksanaan kegiatan kelitbangan telah disusun sejak awal tahun, namun dalam perjalanannya seringkali pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan atau adanya permintaan pelaksanaan di luar dari perencanaan awal seperti adanya perubahan isu strategis sehingga membutuhkan penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan;
b. Peneliti adalah modal utama Badan Litbang Perhubungan yang cukup menentukan kualitas dan produktivitas hasil litbang. Sementara jumlah peneliti yang ada saat ini tidak ada penambahan dan cenderung akan semakin berkurang dan masih dibebani oleh tugas administrasi. Kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja penelitian ke depannya. Hal ini dikarenakan beban kerja yang terus bertambah sementara tenaga pelaksana berkurang dengan waktu yang terbatas;
c. Semakin tingginya tuntutan kebutuhan menjawab permasalahan transportasi membutuhkan pelaksanaan penelitian dengan kompetensi peneliti dengan keilmuan yang mendukung khususnya untuk bidang teknis. Peneliti Badan Litbang Perhubungan dengan penguasaan kompetensi teknis saat ini masih terbatas. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan umumnya masih bersifat kebijakan dan pekerjaan penelitian teknis yang dilakukan masih terbatas jumlahnya;
d. Badan Litbang Perhubungan terus berupaya melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana penelitian untuk mendukung pelaksanaan penelitian di bidang teknologi.

Berangkat dari beberapa kendala tersebut beberapa upaya atau solusi yang telah dilakukan antara lain:

a. Di setiap persiapan pelaksanaan kegiatan para penanggung jawab kegiatan telah melakukan perencanaan, penyusunan target kinerja kegiatan, dan anggaran yang lebih baik serta mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan kebijakan yang akan mempengaruhi capaian dan kualitas kinerja program. Penyusunan revisi POK dan revisi perjanjian kinerja dalam hal ini telah dilakukan sebagai upaya penyesuaian antara target kinerja dengan ketersediaan anggaran;
b. Untuk mengatasi terbatasnya jumlah sumber daya manusia, Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2018 telah menyampaikan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan;
c. Dalam rangka mensiasati keterbatasan kompetensi peneliti dan kebutuhan akan sarana prasarana penelitian teknologi, beberapa pelaksanaan penelitian di tahun 2018 dilakukan dengan menggandeng instansi penelitian terkait, perguruan tinggi, dan industri seperti, BPPT, ITS, STTD, dan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dan Badan Pembina Pensiunan Pegawai (BP-3), dan Kegiatan magang di PT. INKA Madiun dan PLS 2 Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah. Namun demikian kolaborasi penelitian sampai dengan saat ini masih belum optimal dan membutuhkan komitmen yang besar;
d. Upaya peningkatan kompetensi para peneliti Badan Litbang Perhubungan tahun 2018 melalui:
    1) Penyelenggaraan pelatihan teknis dengan menggandeng lembaga atau institusi terpercaya seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kemenristekdikti, *Sciencom*, Asosiasi Logistik dan *Forwarder* Indonesia (ALFI), Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia, PT. Dirgantara Indonesia, Pusat Bahasa, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), PT. Diametral Dharma Persada, *International Air Transport Association* (IATA), Komite Akreditasi Nasional (BSN), dan Perkeretaapian dengan PKTJ Tegal;
    2) Kegiatan magang di PT. INKA Madiun dan PLS 2 Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah;
    3) Mengikutsertakan para peneliti dalam kegiatan *workshop, short course* di tingkat internasional.

Beberapa catatan dari hasil pencapaian kinerja Badan Litbang Perhubungan tahun 2018 yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya, antara lain:

a. Peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di sektor perhubungan untuk mewujudkan program penelitian yang dilaksanakan sebelum penetapan alokasi pagu anggaran;
b. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis, yaitu dengan melakukan review Rencana Strategis dan IKU Badan litbang Perhubungan sejalan dengan review Rencana Strategis dan IKU Kementerian Perhubungan;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan selama tahun anggaran berjalan.

Penelitian yang dilakukan sepanjang Tahun 2018 dan dijadikan rekomendasi kebijakan adalah sebagaimana **Lampiran 27.**

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Utama Kelimabelas

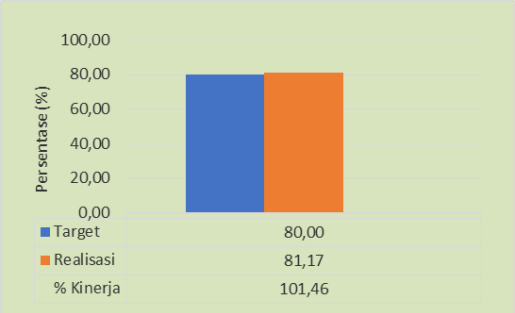
Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja persentase pemanfaatan penelitian sebagai rekomendasi kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2015, terdapat penurunan capaian kinerja, meskipun realisasi tahunan konstan meningkat, sebagaimana **Tabel III.67** berikut:

Tabel III.67
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pemanfaatan Penelitian Sebagai Rekomendasi Kebijakan Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	Persentase pemanfaatan penelitian sebagai rekomendasi kebijakan	%	2015	70,00	70,95	101,36
			2016	75,00	77,00	102,67
			2017	75,00	79,30	105,73
			2018	80,00	81,17	101,46

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Kelimabelas



Gambar III.100
Diagram Persentase Pemanfaatan Penelitian yang Dijadikan Bahan Rekomendasi Kebijakan Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Persentase pemanfaatan penelitian sebagai rekomendasi kebijakan pada Tahun 2018 memiliki target 80% dan 81,17% atau mencapai 101,46%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.100.**

III.2.9.Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Kesembilan

1. **Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keenambelas**

   Sasaran Kementerian Perhubungan yang kesembilan adalah meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang diukur dengan IKU 16 yaitu tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan memiliki target 95% (IACM Level 3) dan realisasi 93,54% atau mencapai 98,46%.

   Internal Audit Capability Model (IACM) atau juga yang disebut dengan model kapabilitas audit intern adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur efektivitas peran audit intern disetiap instansi pemerintah. IACM dikembangkan sejak tahun 2006 oleh Lembaga Riset Asosiasi Audit Intern di dunia yaitu *The Institute of Internal Auditors Research Foundation* (IARF) yang diselesaikan menjadi satu model pada tahun 2009.

   IACM memiliki 5 level tingkatan. Sesuai arahan Presiden dalam rapat koordinasi nasional APIP pada tanggal 13 Mei 2015 bahwa 85% APIP di Kementerian/Lembaga harus sudah berada pada level 3 atau dengan *initial integrated* yang sebelumnya pada tahun tersebut hanya 1% APIP yang berada pada level 3, serta peningkatan kapabilitas APIP level 3 dijadikan indikator kinerja dalam RPJMN Tahun 2015-2019 bidang Aparatur Negara dengan sasaran Pemerintah yang bersih dan akuntabel.

   IACM Level 3 merupakan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan karakteristik:

   a. Kebijakan, proses, dan prosedur audit intern telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;
   b. Manajemen serta praktik profesional unit audit intern telah mapan dan seragam ditetapkan di seluruh kegiatan audit intern;
   c. Unit audit intern mulai menyelaraskan dengan tata kelola dan resiko yang dihadapi organisasi;
   d. Unit audit intern berevolusi dari hanya melalukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen resiko;
   e. Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan audit intern, independensi serta objektivitas;
   f. Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan standar audit.

Model penghitungan IACM terdiri dari 6 elemen dengan 41 *Key Process Area* (KPA), dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel III. 68
***Key Process Area* pada Model penghitungan IACM**

6 Elemen Yang Dinilai	Jumlah KPA
1. Peran dan Layanan APIP	5
2. Pengelolaan SDM	10
3. Praktek Profesional	7
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	7
5. Budaya dan Hubungan Organisasi	5
6. Struktur Tata Kelola	7
Jumlah KPA	**41**

Sumber : Inspektorat Jenderal, 2018

Pada level 3, terdapat 14 KPA yang terdiri dari 93 pernyataan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.69
Pernyataan pada Level 3 IACM

Level 3		
Elemen	**KPA**	**Pernyataan**
Elemen I	2	10
Elemen II	3	20
Elemen III	2	17
Elemen IV	3	19
Elemen V	2	14
Elemen VI	2	13
Total	**14**	**93**

Sumber : Inspektorat Jenderal, 2018

Pencapaian indikator ini dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Total capaian yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah Total Pernyataan Level 3}} \text{ x } 100$$

Hasil penilaian IACM Kementerian Perhubungan Tahun 2018 sesuai surat Deputi Kepala BPKP nomor: SP-6/D1/03/2018 tanggal 23 Januari 2018 perihal Laporan *Quality Assurance* Pelaksanaan Evaluasi Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel III. 70
Hasil Penilaian IACM Kementerian Perhubungan Tahun 2018

ELEMEN	Hijau	Kuning	Merah	Jumlah
Elemen I (Peran dan Layanan)	5	5	0	10
Elemen II (Manajemen SDM)	20	0	0	20
Elemen III (Praktik Profesional)	16	1	0	17
Elemen IV (Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja)	19	0	0	19
Elemen V (Budaya dan Hubungan Organisasi)	14	0	0	14
Elemen VI (Struktur Tata Kelola)	13	0	0	13
Total	87	6	0	93

Sumber: Inspektorat Jenderal, 2018

Dimana :

	: Pernyataan yang memenuhi syarat
	: Pernyataan yang belum memenuhi syarat
	: Pernyataan yang tidak memenuhi syarat

Dengan demikian pencapaian indikator IACM adalah sebagai berikut :

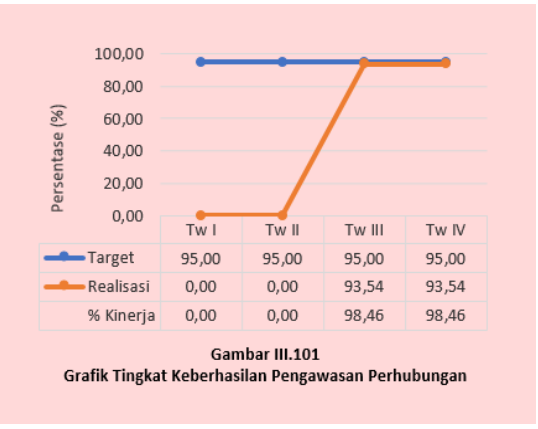
$$\frac{87\%}{93\%} \times 100\% = 93{,}54\%$$

Dari hasil nilai IACM Tahun 2018 tersebut, maka diperoleh capaian kinerja:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{93{,}54\%}{95\%} \times 100\% = 98{,}46\%$$

Dalam penilaian mandiri (*Self Assesment*) persentase IACM Level 3 *untuk Area Of Improvement* Elemen I dan III, sampai saat ini belum mencapai target dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1) Penyusunan Kendali Mutu Audit (KMA) untuk kegiatan pengawasan Audit Kinerja dan ADTT belum sesuai dengan Surat Keputusan



Gambar III.101
Grafik Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : SK.86/KP.801/ITJEN-2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pedoman Kendali Mutu ITJEN Kementerian Perhubungan;

2) Belum dilaksanakan pengendalian intern oleh Inspektur terkait dalam penyusunan KMA terhadap hasil Laporan Hasil Audit Kinerja dan ADTT;
3) Kegiatan *quality assurance and improvement* program seperti telaahan sejawat internal belum dilakukan secara kontinyu dan hasil rekomendasi dari Laporan *quality assurance and improvement Programme* tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti.

Untuk peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menuju **level 3 penuh** sesuai target RPJMN Tahun 2015-2019, maka *area of improvement* yang perlu ditindaklanjuti serta penyusunan *action plan* yang harus dilakukan pada Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan penerapan kendali mutu sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP terhadap Setiap Penugasan Pengawasan;
2. Setiap jenjang jabatan fungsional auditor (Ketua tim, Pengendali teknis dan Pengendali mutu) perlu melakukan supervisi atas setiap tahapan pekerjaan audit, ketua tim melakukan supervisi anggota timnya, pengendali teknis mengawasi tim audit yang dibawahinya dan pengendali mutu melakukan supervisi seluruh kerja audit yang dibawahinya. Hal tersebut harus didokumentasikan dalam kertas kerja audit;
3. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan *quality assurance and improvement* program, antara lain: laporan telaah sejawat internal (*peer review)* dan laporan hasil survei kepuasan *stakeholders* terhadap peran dan layanan yang diberikan APIP; dan
4. Membuat upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan efektifitas peran APIP dalam rangka mencegah terulang kembalinya kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) pejabat/pegawai Kementerian Perhubungan.

Sampai akhir Tahun 2018 ini Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP, namun pengisian KMA dengan menggunakan aplikasi berbasis internet belum terlaksana, seperti aplikasi e-pengawasan yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Inspektorat BMKG. Saat ini Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sedang dalam proses pembangunan aplikasi tersebut guna mendukung kinerja pengawasan.

Untuk meningkatkan keberhasilan pengawasan perhubungan di masa mendatang langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan aplikasi SIAU (Sistem Informasi Audit) yang di dalamnya terdapat fitur pengisian KMA oleh auditor secara *online* sehingga setiap jenjang jabatan fungsional auditor (Ketua tim, Pengendali teknis dan Pengendali mutu) melakukan supervisi secara berjenjang atas setiap tahapan pekerjaan audit;
b. Membentuk Inspektorat Investigasi yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern serta pengendalian di bidang pengadaan barang/jasa, pengaduan masyarakat dan benturan kepentingan di lingkungan kementerian Perhubungan serta monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit investigasi.

Indikator Kinerja Utama tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan pada tahun 2018 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp4.288.828.000,00 dengan realisasi sebanyak Rp3.872.897.183,00 atau penyerapan sebesar 90,30%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keenambelas

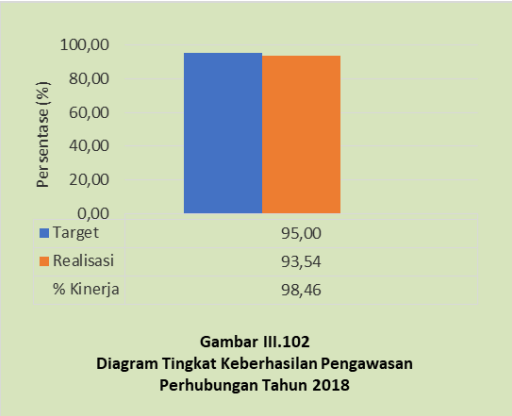
IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada tahun 2015 dan 2016 tidak terisi. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan yang ditetapkan pada tahun 2017, terdapat penurunan capaian kinerja, namun persentase realisasi mengalami peningkatan, sebagaimana **Tabel III.71** berikut:

Tabel III.71
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan
Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	90,00	90,67	100,74
			2018	95,00	93,54	98,46

Sumber: Hasil Analisis, 2018

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Keenambelas**



Gambar III.102
Diagram Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019, tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan pada Tahun 2018 memiliki target 95% dan realisasi 93,54% atau mencapai 98,46%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.102**.

III.2.10.Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Kesepuluh

1. **Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Ketujuhbelas**

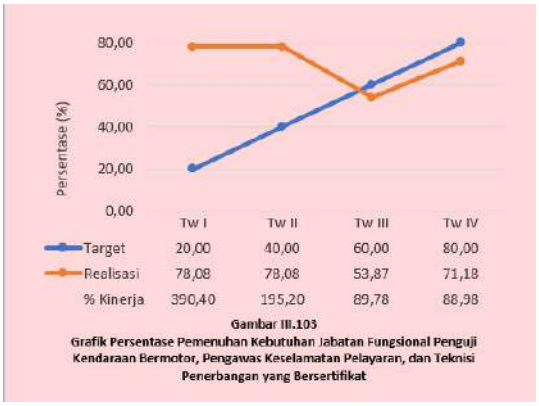
Sasaran Kementerian Perhubungan yang kesepuluh adalah Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional, yang diukur dengan IKU 17 yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat pada Tahun 2018 terealisasi sebesar 71,18% atau mencapai 88,98% dari target yaitu sebesar 80%. Pencapaian ini dihitung dengan rumus:

$$\frac{\Sigma \text{ Pejabat PKB, PKP, dan TP tersertifikat}}{\Sigma \text{ Kebutuhan pejabat PKB, PKP, dan TP}} \text{ x } 100\%$$

Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan dan Teknisi Penerbangan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sampai akhir tahun 2018 yaitu 80 % (4.000 orang) dan terealisasi pada sebesar 71,18% (2.847 orang)

$$\text{Realisasi} = \frac{2.847 \text{ orang}}{4.000 \text{ orang}} \text{ x } 100\% = 71,18\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{71,18\%}{80\%} \text{ x } 100\% = 88,98\%$$



Gambar III.103
Grafik Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi Penerbangan yang Bersertifikat

Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan dan Teknisi Penerbangan terealisasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.72
Rincian Jabatan Fungsional Tahun 2018

No.	Jabaran Fungsional	Jumlah (orang)			
		Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1	Penguji Kendaraan Bermotor (PKB)	27	27	9	13
2	Pengawas Keselamatan Pelayaran (PKP)	2.477	2.477	936	937
3	Teknisi Penerbangan (TP)	1.400	1.400	1.210	1.897
Jumlah		**3.904**	**3.904**	**2.155**	**2.847**

Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, 2018

Pada akhir tahun 2018, tidak tercapainya target yang telah ditetapkannya sebesar 80% adalah disebabkan perubahan jumlah pejabat fungsonal yang diakibatkan oleh:

a. Pejabat fungsional PKB yang berjumlah 13 (tiga belas) orang merupakan pegawai Kementerian Perhubungan. Semula berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang karena juga merupakan pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten;
b. Pejabat fungsional PKP yang pada awal tahun 2018 berjumlah 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) orang, namun sepanjang tahun 2018 terdapat pejabat PKP yang tidak mampu mengumpulkan angka kredit berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, dialihtugaskan berjumlah 15 (lima belas) orang, yang diangkat sebagai pejabat struktural berjumlah 1 (satu) orang, dan yang mengundurkan diri dari jabatan fungsional PKP berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, serta 6 (enam) orang yang diangkat kembali sehingga total pejabat PKP tahun 2018 berjumlah 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) orang;
c. Ada beberapa unit kerja yang membutuhkan jabatan fungsional PKB, PKP dan TP, namun jabatan fungsional tersebut tidak tercantum dalam peta jabatan sehingga banyak pegawai yang tidak dapat masuk/menduduki jabatan fungsional tersebut.

Namun demikian, untuk upaya pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional PKB, PKP dan TP dimasa yang akan datang antara lain:

a. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait (pengguna jabatan fungsional PKB, PKP dan TP) terkait perhitungan beban kerja dan analisa jabatan untuk menghitung formasi yang akan menjadi dasar pencantuman jabatan tersebut pada peta jabatan;
b. Bekerja sama dengan Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara untuk melakukan sosialisasi jabatan fungsional PKB, PKP dan TP;

c. Melakukan evaluasi kesesuaian dengan Peraturan Menteri PAN-RB terkait jabatan fungsional PKB, PKP dan TP, apakah masih relevan dengan tupoksi pemangku jabatan fungsional tersebut, dengan bekerja sama dengan Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara;



Gambar III.104
Pelantikan Terpadu Perwira Transportasi Indonersia Tahun 2018 (21 September 2018)

d. Perlu pembinaan pada jabatan fungsional tersebut lebih lanjut agar lebih sesuai dengan beban kerja yang sekarang;

e. Melakukan sertifikasi kompetensi.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Utama Ketujuhbelas

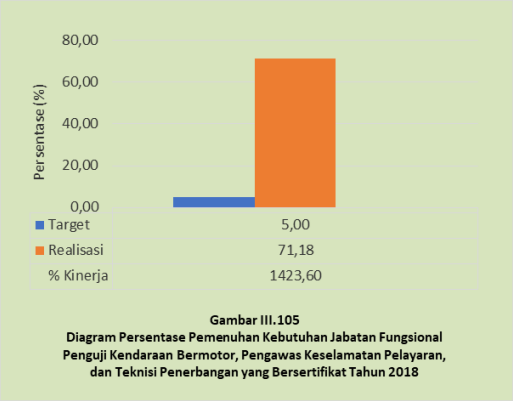
IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada tahun 2015 dan 2016 tidak terisi. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat yang ditetapkan pada tahun 2017, terdapat kenaikan capaian kinerja, sebagaimana **Tabel III.73** berikut:

Tabel III.73
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Dan Teknisi Penerbangan Yang Bersertifikat Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	90,00	78,00	86,67
			2018	80,00	71,18	88,98

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Ketujuhbelas**



Gambar III.105
Diagram Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi Penerbangan yang Bersertifikat Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat pada Tahun 2018 memiliki target 5% dan realisasi 88,98% atau mencapai 1.423,60%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.105**.

III.2.11.Realisasi Kinerja Tahun 2018 Pada Sasaran Kesebelas

Sasaran Kementerian Perhubungan yang kesebelas adalah Terwujudnya *good governance & clean government* di Kemenhub, yang diukur dengan 7 IKU, yaitu:

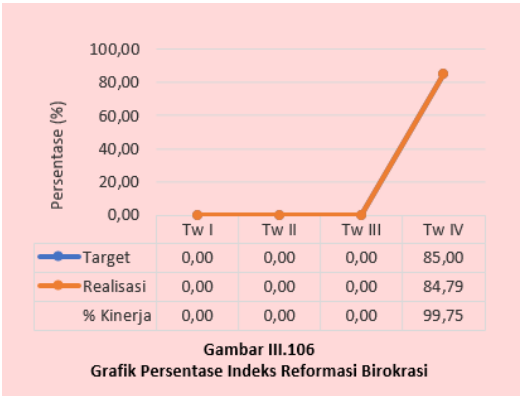
1. **IKU 18 yaitu Persentase Indeks Reformasi Birokrasi**

a. **Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Kedelapanbelas**

Persentase Indeks Reformasi Birokrasi memiliki target 85% dan realisasi sementara adalah 84,79% (hasil penilaian PMPRB *Online*), yang menunggu hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB terkait penilaian RB Kementerian Perhubungan Tahun 2018. Namun penilaian RB Kementerian Perhubungan Tahun 2017 mencapai 75,34 (kategori BB).

Beberapa kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan untuk mencapai indeks RB Kemenhub pada Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.



Gambar III.106
Grafik Persentase Indeks Reformasi Birokrasi

Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dibentuk dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 191 Tahun 2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 216 Tahun 2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, telah dilakukan penataan terhadap kelembagaan Kementerian Perhubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

b. Penetapan Peta Proses Bisnis

Telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan saat ini telah dilakukan review terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

c. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) *online*.

PMPRB Kemenhub telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Submit telah dilakukan secara *online* pada bulan April 2018 dengan hasil 84,79.

d. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu:

1) Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan memiliki bobot penilaian 60%;

   Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2018 telah dilaksanakan *Entry Meeting* Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 8 Oktober 2018 dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 9 Oktober 2018. Kunjungan Tim Evaluator RB ke unit kerja dilaksanakan pada tanggal 25-29 November 2018 di UPT Labuan Bajo (Transportasi Darat, Laut, Udara)

2) Survey Eksternal memiliki bobot 40%;

   Survey eksternal merupakan survey terhadap masyarakat pengguna layanan jasa utama yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Utama Kedelapanbelas

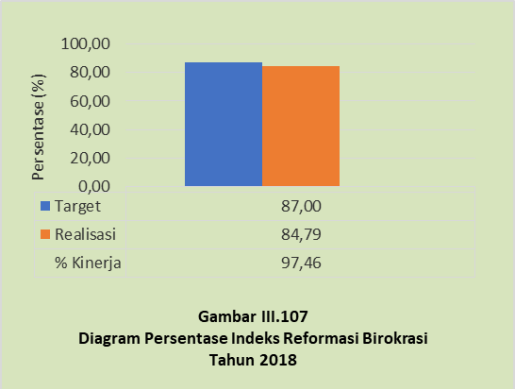
Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja Persentase Indeks Reformasi Birokrasi yang ditetapkan pada tahun 2015, terdapat kenaikan capaian kinerja, sebagaimana **Tabel III.74** berikut:

Tabel III.74
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya *good governance and clean government* di Kemenhub	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi	%	2015	71,80	70,34	97,97
			2016	74,00	92,26	124,68
			2017	85,00	75,34	88,64
			2018	85,00	84,79	99,75

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Kedelapanbelas



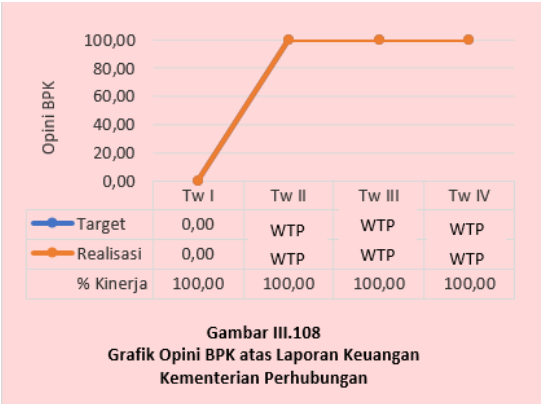
Gambar III.107
Diagram Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Persentase Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2018 memiliki target 87% dan realisasi sementara dengan menggunakan hasil PMPRB Online yaitu 84,79% atau mencapai 97,46%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.107**.

2. IKU 19 yaitu Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Kesembilanbelas

Sasaran terwujudnya *good governance and clean government* di Kemenhub salah satunya memiliki target WTP dalam opini BPK, dan mencapai 100%, yaitu nilai WTP.



Gambar III.108
Grafik Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan

Menunjuk surat Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 23b/BP/XIV/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2017, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan

Kementerian Perhubungan Tahun 2017. Perolehan predikat WTP ini merupakan perolehan 6 kali berturut-turut yang diperoleh Kementerian Perhubungan.

Tercapainya Opini WTP Pada Laporan Keuangan TA.2018 Kementerian Perhubungan karena terpenuhinya Kriteria-kriteria sebagai berikut:

1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), bahwa posisi Keuangan Kemenhub tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional serta Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2) Kecukupan Pengungkapan (*Full Disclosures),* bahwa angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemenhub TA. 2017 telah wajar dalam semua hal material;
3) Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan, bahwa BPK telah melakukan pengujian kepatuhan pada Kemenhub terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.
4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern telah memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan.

Dalam rangka mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Kementerian Perhubungan telah membuat upaya-upaya sebagai berikut:

1) Peningkatan Komitmen dan Integritas Pimpinan dan para Pengelola Keuangan;
2) Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3) Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangan;
4) Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran;
5) Penguatan Perencanaan dan Penganggaran;
6) Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Reviu Laporan Keuangan;
7) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK;
8) Pembenahan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
9) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan; dan
10) Peningkatan Kualitas Proses Pengadaan Barang/Jasa.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah sebagai berikut:

1) Menerbitkan Peraturan/Instruksi Menteri Perhubungan;

2) Menyelenggarakan pembekalan/bimbingan teknis/sosialisasi kepada pengelola anggaran;
3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksaan anggaran;
4) Pimpinan Unit Kerja (*Auditee*) harus peduli dan mendukung penuh proses pemeriksaan;
5) Menindaklanjuti temuan BPK tahun-tahun sebelumnya;
6) Memberikan dokumen dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK sesuai permintaan dan menjawab semua kuesioner;
7) Memberikan penjelasan kepada Tim BPK secara transparan dan terkoordinasi;
8) Menyelesaikan segera hasil temuan BPK pada saat masa audit;
9) Meningkatkan kapasitas SDM dengan mengikuti bimbingan teknis akuntansi berbasis akrual; dan
10) Meningkatkan pemahaman tentang Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan mampu menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Utama Kesembilanbelas

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015, Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan tetap WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana **Tabel III.75** berikut:

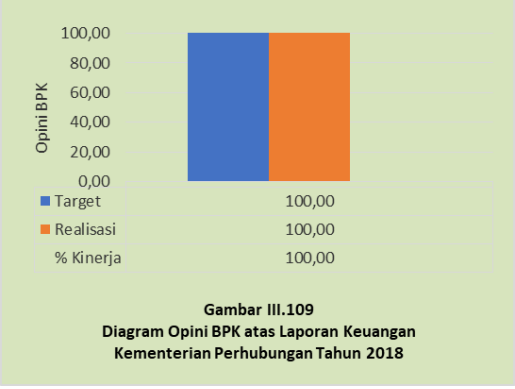
Tabel III.75
Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya *good governance and clean government* di Kemenhub	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	Opini BPK	2015	WTP	WTP	100,00
			2016	WTP	WTP	100,00
			2017	WTP	WTP	100,00
			2018	WTP	WTP	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Kesembilanbelas

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2018 memiliki target WTP dan realisasi WTP atau mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.109**.



Gambar III.109
Diagram Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2018

3. IKU 20 yaitu Nilai AKIP Kementerian Perhubungan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keduapuluh

Nilai AKIP Kementerian Perhubungan memiliki target nilai 71, namun sampai dengan akhir tahun 2018, Kementerian PAN dan RB belum memberikan hasil penilaian resmi atas AKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2018.

IKU Nilai AKIP Kementerian Perhubungan merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan yang dinilai dan dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk Reformasi Birokrasi, yaitu pada unsur penguatan akuntabilitas. Nilai AKIP Kementerian Perhubungan berdasarkan surat Menteri PAN-RB Nomor: B/640/M.AA.05/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 yang mencapai nilai 70,44 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel III.76
Penilaian AKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2017

Komponen Penilaian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Perencanaan Kinerja Kemenhub	Nilai	23	22,88	99,47%
Nilai Pengukuran Kinerja Kemenhub	Nilai	16	16,54	103,37%
Nilai Pelaporan Kinerja Kemenhub	Nilai	12	11,05	92,08%
Nilai Evaluasi Kinerja Kemenhub	Nilai	7	7,58	108,28%
Nilai Capaian Kinerja Kemenhub	Nilai	13	12,39	95,30%

Sumber: Biro Perencanaan, 2018

Peningkatan nilai AKIP Kementerian Perhubungan merupakan kerja keras seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan, di antaranya melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Melakukan Reviu Renstra Kementerian Perhubungan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 881 Tahun 2018 Tentang Reviu Rencana Strategis

Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dengan menggunakan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama berbasis *outcome* yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

2) Menyusun *cascading* sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan sampai pada level unit kerja mandiri, dan menggunggah dalam bentuk *strategy map* pada aplikasi *e-Performance*;
3) Menginstruksikan penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari level Eselon I sampai dengan level Pelaksana di Lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor: KP.108/1/11 PHB 2018 tanggal 30 April 2018 perihal Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 kepada seluruh Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal ini dilakukan agar terlihat secara nyata kontribusi kinerja yang terukur dari setiap jenjang jabatan terhadap pencapaian kinerja level di atasnya;
4) Melakukan sosialisasi aplikasi *e-SAKIP Reviu* milik Kementerian PAN-RB untuk mempermudah proses pengumpulan data dukung SAKIP K/L, pada tanggal 26 April 2018 di Jawa Barat;
5) Menginstruksikan penyusunan dan pengunggahan dokumen perencanaan unuk seluruh unit kerja Eselon I, II dan unit kerja mandiri pada aplikasi *e-SAKIP Reviu* milik Kementerian PAN-RB untuk mempermudah pelaporan/pengumpulan dokumen perencanaan melalui surat Sekretaris Jenderal nomor: UM.005/5/24 PHB 2018 tanggal 5 Juli 2018 perihal Pengumpulan Data Dukung Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian perhubungan Tahun 2018 kepada seluruh Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6) Melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi *e-performance*, yang saat ini telah dapat memonitor capaian kinerja sampai dengan unit kerja mandiri di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada aplikasi *e-performance* yang telah disempurnakan ini, Pimpinan unit kerja diwajibkan untuk melakukan validasi atas Perjanjian Kinerja;
7) Melakukan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pelaporan Kinerja Tahun 2018 dengan Aplikasi *e-Performance* untuk seluruh unit kerja Eselon I, II dan Unit Kerja Mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan 2 (dua) tahap untuk seluruh unit kerja, yaitu:
    a) Tahap I pada 29 Maret 2018 di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, dengan mengundang seluruh unit kerja mandiri dari Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara;

b) Tahap II pada 2 – 4 Mei 2018 di Hotel Salak Bogor, dengan mengundang seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan Kantor Pusat dan unit kerja mandiri di wilayah Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;

8) Melakukan pemantauan pengisian aplikasi *e-Performance* seluruh unit kerja setiap bulannya, dan melaporkan kepada Pimpinan unit kerja masing-masing;
9) Menginstruksikan dan memantau keterlibatan Pimpinan masing-masing unit kerja dalam menyusun dokumen perencanaan, dengan menyertakan bukti administrasi;
10) Melaksanakan koordinasi penguatan akuntabilitas Kementerian Perhubungan pada tanggal 1 Oktober 2018 di Jawa Barat;
11) Pemberian arahan dari Sekretaris Jenderal kepada Sesitjen/Sesditjen/Sesbadan terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2017 pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 di Ruang Rapat Kutai;

Namun demikian, akuntabilitas Kementerian Perhubungan perlu ditingkatkan pencapaiannya, diantaranya melalui:

1) Melakukan penyempurnaan sasaran strategis dan ukurran kinerja pada Renstra Kementerian Perhubungan, serta IKU yang berorientasi hasil (*outcome*) pada tingkat unit organisasi;
2) Memanfaatkan hasil *cascading* kinerja yang telah disempurnakan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja, serta digunakan sebagai dasar penyusunan dan pengukuran kinerja individu pegawai;
3) Mempertajam analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja dalam Laporan Kinerja, termasuk akuntabilitas keuangan untuk pencapaian setiap sasaran strategis;
4) Meningkatkan implementasi aplikasi *e-Performance* sampai ke unit kerja mandiri;
5) Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala (triwulan-an);
6) Melakukan pengembangan aplikasi yang mengintegrasikan aplikasi *e-Performance* dan AP2KP agar dapat diukur kinerja individu yang mendukung kinerja unit organisasi di atasnya.

Untuk mencapai target Nilai AKIP 71,00 pada Tahun 2018, Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.838.204.000,00 atau terserap 99,36%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2017 Pada Indikator Kinerja Utama Keduapuluh

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja Nilai AKIP Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada tahun 2015, terdapat kenaikan capaian kinerja, sebagaimana **Tabel III.77** berikut:

Tabel III.77
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2017

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya *good governance and clean government* di Kemenhub	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	2015	75,00	68,51	91,35
			2016	71,00	68,63	96,66
			2017	70,00	70,44	100,63

Sumber: Hasil Analisis, 2019

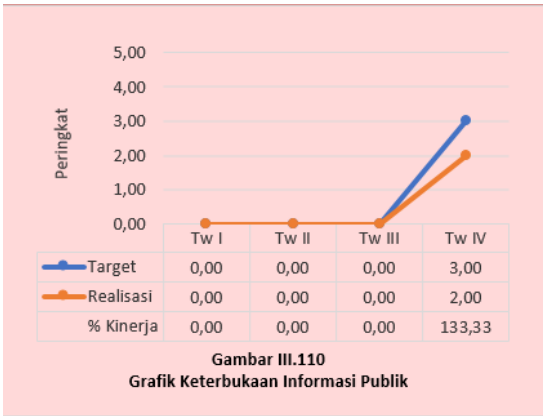
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Keduapuluh

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Nilai AKIP Kementerian Perhubungan pada Tahun 2018 memiliki target 72, namun masih menunggu hasil penilaian oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB.

4. IKU 21 yaitu Keterbukaan Informasi Publik

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keduapuluhsatu

Tahun 2018 Kementerian Perhubungan memperoleh peringkat kualifikasi ke II keterbukaan informasi publik, yaitu menuju informatif dalam penilaian Komisi Informasi Pusat, namun targetnya adalah peringkat III. Dengan demikian, capaian adalah 133,33%.



Gambar III.110
Grafik Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik (BP) termasuk Kementerian dan Lembaga (K/L) mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana BP mampu dan serius mengimplementasikan hasil tersebut. Setiap tahun Komisi Informasi Pusat melakukan kegiatan dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Selain kegiatan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Infomasi Pusat, bulan Agustus 2018 Kementerian Perhubungan menerima Penganugerahan Apresiasi Program Pemantauan Layanan Informasi Arus Mudik Tahun 2018. Kegiatan ini bertujuan menciptakan manajemen mudik berbasis informasi publik yang transparan dan akuntabel. Kementerian Perhubungan menerima dua penghargaan sebagai Badan Publik dengan kategori Informatif dan Responsif, penyerahan

penganugrahan dilakukan dalam acara Rapat Kerja Bakohumas dan Apresiasi Pelayanan Informasi Publik Arus Mudik Tahun 2018.

Untuk Kegiatan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan, Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 03/KEP/Ketua-KIP/III/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Infromasi Publik Badan Publik Tahun 2018. Dengan kategori penilaian akhir sebagai berikut:

1) Informatif dengan nilai 90-100;
2) Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9;
3) Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9;
4) Kurang Informatif dengan nilai 40-59,9; dan
5) Tidak Informatif dengan nilai 39,9.

Pada tahun 2018 kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tidak mengeluarkan peringkat, namun terdapat kualifikasi yang menentukan posisi Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut. Pada tahun ini, Kegiatan monev dimulai pada awal bulan Agustus, dan diikuti oleh seluruh Badan Publik sesuai dengan alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

Penyusunan peringkat ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan Badan Publik dalam menjalankan kewajiban, yang tertuang dalam Penilaian Kuesioner melalui 4 (empat) indikator yaitu:

1) Indikator pengembangan *Website*;
2) Indikator pengumuman informasi publik;
3) Indikator pelayanan informasi publik; dan
4) Indikator penyediaan infomasi publik.

Bobot penilaian poin a dan b memiliki presentase 30%, sedangkan bobot poin c dan d memiliki presentase 40%, selain penilaian secara mandiri melalui kuesioner, KIP melakukan penilaian presentasi dengan persentase 30% yang dilakukan oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dengan indikator:

1) Komitmen, dengan nilai antara 10 sampai dengan 30;
2) Koordinasi, dengan nilai antara nilai 10 sampai dengan 30; dan
3) Inovasi, dengan nilai antara 10 sampai dengan 40.

Adapun tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat yang telah dilaksanakan oleh PPID Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

1) Menghadiri sosialisasi pengisian kuesioner dari Komisi Informasi Pusat (1 Agustus 2018)

Sosialisasi tersebut menjelaskan cara pengisian kuesioner oleh Tim Monev KIP kepada Badan Publik

2) Distribusi kuesioner oleh Komisi Informasi Pusat kepada Badan Publik (1-2 Agustus 2018)

   Tim Monev KIP mengirimkan kuesioner melalui email ppid@dephub.go.id atau diunduh melalui situ www.komisiinformasi.go.id

3) Pengisian kuesioner dari Badan Publik kepada Komisi Informasi Pusat (2-31 Oktober 2018)
   a) Pengisi kuesioner/responden adalah Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang memiliki kewenangan di Bidang Informasi, Komunikasi dan/atau Kehumasan Badan Publik.
   b) Responden mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi melalui *whatsapp*/telpon.
   c) Memberikan tanda "X" (silang) pada kolom “Jawaban” yang tersedia dengan memperhatikan kolom “Ya/Tidak”.
   d) Jawaban pada indikator pengembangan website dan indikator pengumuman informasi publik harus menyebutkan alamat/*link* situs/portal resmi.
   e) Jawaban indikator pelayanan informasi publik dan indikator penyediaan informasi publik harus mencantumkan dan/atau melampirkan:
      1. Situs/portal yang tercantum dalam kolom “Keterangan Data Dukung” Kuesioner; dan
      2. Data dukung berupa dokumen *softfile* dalam format jpeg atau pdf (dokumen utuh) dengan mencantumkan keterangan pada *file* untuk setiap nomor jawaban yang dikirimkan bersamaan dengan kuesioner.
4) Pengembalian kuesioner dari Badan Publik kepada Komisi Informasi Pusat (31 Oktober 2018)

   PPID Kementerian Perhubungan mengembalikan kuesioner kepada Tim Monev KIP melalui email monev2018@komisiinformasi.go.id dan mengantarkan langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat

5) Verifikasi kuesioner Badan Publik oleh Tim Monitoring Evaluasi KIP (September 2018)
   a) Indikator pengembangan *Website*;
   b) Indikator pengumuman informasi publik;
   c) Indikator pelayanan informasi publik; dan
   d) Indikator penyediaan infomasi publik.
6) Presentasi Badan Publik (10 Oktober 2018)
   a) Tahap presentasi merupakan tahap akhir untuk mengukur komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, konsisten dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh Badan publik

b) Pada tahap ini, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik selaku Manajer Informasi dan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi selaku Manajer Sistem Informasi melaksanakan presentasi pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kementerian Perhubungan.

7) Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 (5 November 2018)
   a) Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik akan dikategorikan menjadi 7 (tujuh) yaitu: Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, Lembaga Struktural, Pemerintah Provinsi, Partai Politik, Perguruan Tinggi, dan Badan Usaha Milik Negara.
   b) Penghargaan diberikan kepada Badan Publik yang masuk dengan kualifikasi informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.

Dalam penganugerahan tersebut Kementerian Perhubungan memperoleh peingkat kualifikasi II yaitu menuju informatif dengan nilai 87,75, sebagaimana **Tabel III.78** berikut:

Tabel III.78
Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Nilai Indikator (Pengembangan *Website* dan Pengumuman Infromasi) 30 %	Nilai Indikator (Pelayanan Informasi dan Penyediaan Informasi) 40 %	Nilai Presentasi 30 %	Nilai Akhir	Kualifikasi
30	31,50	26,25	87,75	Menuju Informatif
I. Pengembangan Websit : 40 II. Pengumuman Informasi: 60	III. Pelayanan Informasi: 43,75 IV. Penyediaan Informasi: 35,00			

Sumber: BKIP, 2018

Terkait hasil yang diperoleh ini, PPID Kementerian Perhubungan telah meminta justifikasi hasil penilaian kepada Komisi Informasi Pusat, sebagaimana **Lampiran 28**. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1) Disediakannya Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah dimutakhirkan (pengesahan) tahun 2018;
2) Disediakannya SOP mengenai Pengelolaan Permohonan Informasi yang telah disahkan;
3) Disediakannya SOP mengenai Keberatan atas informasi yang telah disahkan;
4) Disediakannya SOP mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik yang telah disahkan;
5) Disediakannya SOP mengenai Penetapan dan Pemutakhiran DIP yang telah disahkan;
6) Disediakannya SOP mengenai Pengujian tentang Konsekuensi yang telah disahkan;
7) Disediakannya SOP mengenai Pendokumentasian Informasi Publik yang telah disahkan;

8) Disediakannya SOP mengenai Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan yang telah disahkan.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Keterbukaan Informasi Publik, pada bulan Mei 2018 Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Peraturan ini lebih komprehensif sehingga akan mempermudah pelayanan informasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hasil penilaian yang disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berisi SOP mengenai kegiatan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Keputusan Menteri ini dikeluarkan sesuai ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk pemenuhan daftar informasi publik, pada Tahun 2019 telah direncanakan kegiatan pengelolaan bahan informasi publik dengan output penyusunan buku informasi publik yang berisi daftar informasi public, termasuk konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.

Selain itu, guna meningkatkan pelayanan informasi publik Kementerian Perhubungan juga melakukan inovasi dengan mengembangkan aplikasi yang memudahkan masyarakat mengakses informasi publik melalui perangkat digital diantaranya sebagai berikut:

1) Membuat *mobile website* PPID Kemenhub yang dapat diunduh di *playstore* yaitu PPID Kemenhub;
2) Membuat akun media sosial khusus PPID Kementerian Perhubungan yaitu instagram (https://www.instagram.com/ppidkemenhub) dan twitter (https://twitter.com/151ppid).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keduapuluhsatu

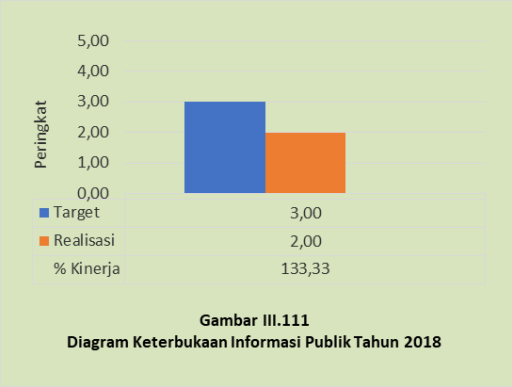
IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada tahun 2015 dan 2016 tidak terisi. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan pada tahun 2017, terdapat peningkatan capaian kinerja, sebagaimana **Tabel III.79** berikut:

Tabel III.79
Perbandingan Realisasi Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya *good governance and clean government* di Kemenhub	Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	3,00	3,00	100,00
			2018	3,00	2,00	133,33

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Keduapuluhsatu



Gambar III.111
Diagram Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018

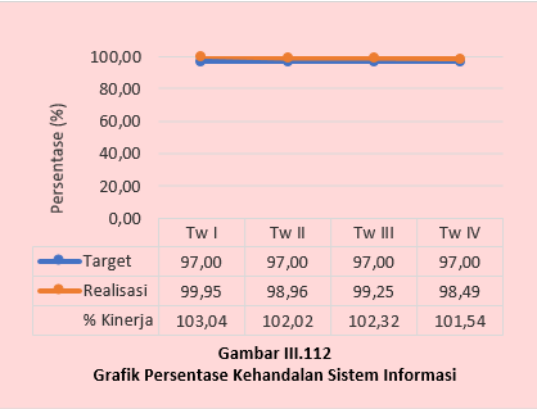
Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2018 memiliki target peringkat 3, namun realisasi peringkat 2 atau mencapai kinerja 133,33%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.111.**

5. IKU 22 yaitu Persentase Kehandalan Sistem Informasi

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keduapuluhdua

Persentase Kehandalan Sistem Informasi memiliki target 97% dengan realisasi 98,49% atau mencapai 101,54% dari target.

Kehandalan Sistem Informasi meliputi kehandalan Jaringan, kehandalan Infrastruktur (Server) dan kehandalan Aplikasi, dengan memperhitungkan jumlah jam kehandalan sistem informasi dalam setahun pada masing-masing komponen (jaringan, server dan aplikasi).



Gambar III.112
Grafik Persentase Kehandalan Sistem Informasi

Keberhasilan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama Persentase Kehandalan Sistem Informasi dalam pelaksanaannya didukung oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya yang handal.

Rekapitulasi persentase kehandalan sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 adalah sebagaimana **Lampiran 29,** baik infrastruktur (server), aplikasi, maupun aringan.

Pembiayaan *Cloud Services*, *Backup* Jaringan *Data Center* Kementerian Perhubungan, Pengadaan Infrastruktur *Security* dan Lisensi Aplikasi serta pengujian *Cyber Security* merupakan bagian dari Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi baik pada sistem aplikasi maupun infrastruktur yang sejalan dengan proses integrasi yang terus berkesinambungan terhadap seluruh sistem informasi yang beroperasional baik internal maupun eksternal kementerian dalam layanan terhadap masyarakat dan *stakeholder*.

Pencegahan dan Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan operasional layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu hal utama dalam menjaga kehandalan sistem yang berjalan. Penurunan persentase kehandalan sistem informasi terhadap tahun sebelumnya (capaian kinerja tahun 2017 sebesar 99,67%) dikarenakan pada tahun 2018 (capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 98,49%) dilakukan *mobilisasi server* aplikasi dari *Data Center* Jatinegara ke *Data Center* Kementerian Perhubungan, sehingga terdapat waktu *downtime* pada beberapa aplikasi.

Guna peningkatan capaian kinerja pada masa yang akan datang perlu penyempurnaan metode migrasi dalam mobilisasi *server* yang masih terdapat pada *Data Center* Jatinegara atau lokasi lain ke *Data Center* Kementerian Perhubungan. Kapasitas *server, storage, security* dan infrastruktur lainnya masih perlu ditingkatkan guna perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keduapuluhdua

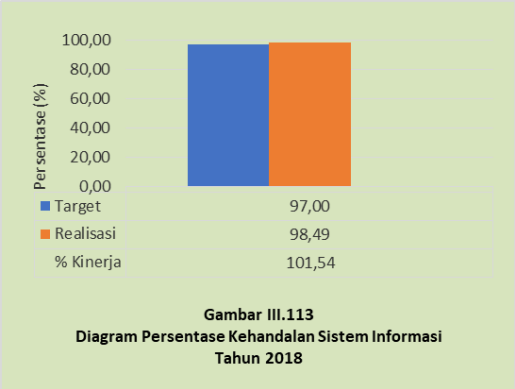
Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja Persentase Kehandalan Sistem Informasi yang ditetapkan pada tahun 2017, terdapat penurunan capaian kinerja. Namun demikian pencapaiannya tetap melebihi target, sebagaimana **Tabel III.80** berikut:

Tabel III.80
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kehandalan Sistem Informasi Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya *good governance and clean government* di Kemenhub	Persentase Kehandalan Sistem Informasi	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	96,00	99,67	103,82
			2018	97,00	98,49	101,54

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Keduapuluhdua



Gambar III.113
Diagram Persentase Kehandalan Sistem Informasi Tahun 2018

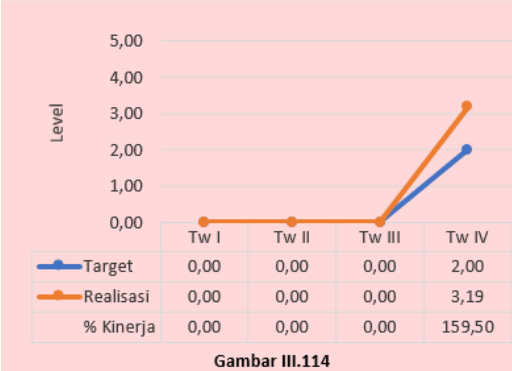
Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Persentase Kehandalan Sistem Informasi pada Tahun 2018 memiliki target 97% dan realisasi 98,49% atau mencapai 101,54%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.113**.

6. IKU 23 yaitu Tingkat Maturasi SPIP

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keduapuluhtiga

Tingkat Maturasi SPIP memiliki target level 2, dan realisasi pada tahun 2018 adalah 3,19 atau capaian kinerja 159,50%.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{3{,}19}{2} \times 100\% = 159{,}90\%$$



Gambar III.114
Grafik Tingkat Maturitas SPIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Pusat maupun Daerah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan suatu sistem pengendalian intern yang menyeluruh, integral dan terus-menerus yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Sistem ini diselenggarakan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Target Penyelenggaraan SPIP tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan KP 873 Tahun 2017 tentang Reviu Renstra Kemenhub 2015-2019 adalah level 2 yaitu berkembang yang berarti bahwa kita telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum

melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.



Gambar III.115
Penyerahan Nilai Maturitas SPIP
Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Tercapainya target nilai maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2018, yang disampaikan melalui surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan (BPKP) nomor: SP-2/D1/03/02/ 2019 tanggal 3 Januari 2019 perihal Penyampaian Hasil *Quality Assurance* Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2018 (**Lampiran 30),** didukung oleh beberapa hal yang telah dilakukan Kementerian Perhubungan untuk mencapai target nilai maturitas SPIP 2, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan untuk mencapai target SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang diharapkan dapat menjadi *guideline* bagi semua unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2) Penyusunan dan Penerbitan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 663 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Kementerian Perhubungan;
3) Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP 563 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
4) Sosialisasi Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018, tanggal 24 April 2018 di Hotel Aone.
5) Bimbingan Teknis Penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan di Surakarta pada tanggal 7-9 Mei 2018.

Dan selanjutnya dilakukan evaluasi internal terkait hasil penilaian maturitas di akhir tahun 2018 sebagai persiapan pelaksanaan SPIP Tahun 2019. Sebagai langkah penyiapan Dokumen SPIP tahun 2018, Sesjen telah menerbitkan surat kepada Pimpinan Tinggi Madya nomor: UM 007/46/16 PHB 2018 tanggal 18 Mei 2018 yang menghimbau sebagai berikut:

1) Pembentukan Satgas di masing-masing unit kerja Eselon I, II dan Unit Kerja Mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.633 Tahun 2018 tentang Satuan tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Kementerian Perhubungan;
2) Menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di unit kerja masing-masing.
3) Segera menyusun kelengkapan data dukung SPIP dan menyampaikan kepada Biro Perencanan sebagai persiapan Penilaian Maturitas.

Untuk meningkatkan tingkat maturitas SPIP Kementerian Perhubungan di masa mendatang, Kementerian Perhubungan akan membangun sistem SPIP secara elektronik (aplikasi *e-SPIP*), dan tetap melakukan penilaian resiko secara lebih cermat dan terdokumentasi dengan baik.

Untuk mencapai target Nilai Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2018 level 2, Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp346.884.700,00 atau terserap sebesar 99,11%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keduapuluhtiga

IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada tahun 2015 dan 2016 tidak terisi. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja Tingkat Maturasi SPIP yang ditetapkan pada tahun 2017, terdapat kenaikan capaian kinerja, dan tetap melebihi target yang ditetapkan, sebagaimana **Tabel III.81** berikut:

Tabel III.81
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Maturasi SPIP Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya *good governance and clean government* di Kemenhub	Tingkat Maturasi SPIP	Level	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	2,00	2,98	149,00
			2018	2,00	3,19	159,50

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Keduapuluhtiga

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Tingkat Maturasi SPIP pada Tahun 2018 memiliki target level 2 dan realisasi level 3,19 atau mencapai 159,50%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.116**.



Gambar III.116
Diagram Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2018

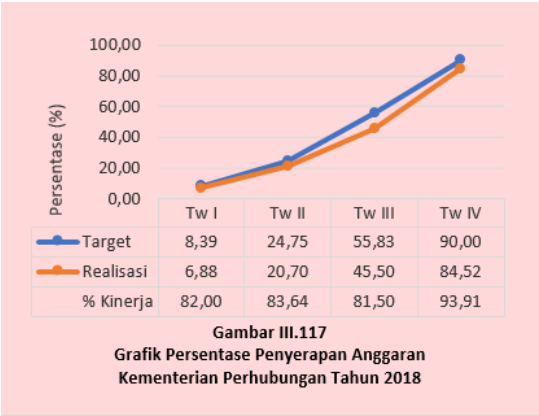
7. IKU 24 yaitu Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keduapuluhempat

Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan memiliki target tahun 2018 sebesar 90% dengan realisasi 84,52% atau mencapai 93,91% dari target.

$$\% \text{ Penyerapan Anggaran Kemenhub} = \frac{\text{Rp45.153.495.831.960}}{\text{Rp53.421.412.068.000}} \times 100\% = 84{,}52\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{84{,}52\%}{90\%} \times 100\% = 93{,}91\%$$



Gambar III.117
Grafik Persentase Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada Kementerian Perhubungan.

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Kurang optimalnya penyerapan anggaran Tahun 2018 di lingkungan Kementerian Perhubungan pada disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

1) Terdapat kegiatan-kegiatan yang anggarannya masih diblokir (catatan halaman IV DIPA);
2) Dalam DIPA Tahun 2018 terdapat terdapat dana yang termasuk dalam Catatan Dalam Halaman IVA DIPA (Blokir) sebesar Rp2.201.987.624.000,00 dengan total dana yang sudah

dicairkan sebesar Rp2.043.110.685.000,00 dan sisa blokir yang tidak dicairkan sampai posisi 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp158.876.939.000,00 atau sebesar 0,3% dari total pagu Kementerian Perhubungan;

3) Adanya kegiatan yang masih dalam proses revisi realokasi;
4) Kegiatan yang akan dilelangkan pada Ditjen Perhubungan Laut terlebih dahulu dilakukan reviu oleh *Unit Management Project* (UMP);
5) Penyedia Jasa tidak melakukan penagihan uang muka dan termin sesuai kontrak;
6) Pelaksanaan kegiatan terkendala pembebasan lahan sehingga baru dapat dilaksanakan atau belum dapat dilaksanakan;
7) Kegiatan yang dibiayai SBSN baru saja disetujui revisi luncurannya;
8) Adanya tambahan pagu PHLN yang belum terbayarkan karena masih dalam proses verifikasi BPKP untuk pencairannya dan/atau terkendala teknis serta membutuhkan koordinasi dengan pihak terkait;
9) Kegiatan PHLN yang masih membutuhkan koordinasi dengan pihak terkait;
10) Adanya tambahan pagu PHLN karena terkendala teknis belum dapat dilaksanakan kontrak;
11) Kegiatan yang pembayarannya belum dapat direalisasikan bulan Juni 2018 sesuai rencana karena membutuhkan verifikasi BPKP terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran;
12) Adanya pekerjaan Kontrak Tahun Jamak yang belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;
13) Adanya revisi pergeseran anggaran antar satker dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk kegiatan renovasi gedung karya sebesar Rp29,9 Miliar;
14) Adanya instruksi bahwa pelelangan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan baru per tanggal 21 Agustus 2018.

Beberapa hal dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Dari aspek organisasi telah dibentuk Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN yang telah disetujui melalui surat Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/599/M.KT.01/2017 tgl 20 November 2017 dan telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 189 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan;
2) Melakukan proses lelang, pencairan blokir atau tanda bintang serta melakukan revisi anggaran dalam pekerjaan yang tidak selesai 31 Desember 2018 dan akan diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dan mengusulkan revisi anggaran dalam rangka pembayaran

tunggakan untuk pekerjaan yang telah selesai 100% namun belum terbayar;

3) Melakukan optimalisasi anggaran (selisih antara pagu alokasi dengan nilai kontrak) untuk dialokasikan kepada kegiatan prioritas;
4) Mengevaluasi dan menginventarisir kegiatan dalam DIPA dan apabila memerlukan revisi agar dipastikan revisi yang dilakukan tetap menjamin bahwa sasaran program Eselon I dan Kementerian Perhubungan tetap tercapai;
5) Dilakukannya pembekalan secara berkesinambungan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen, serta rencana pembekalan bagi para Bendahara agar dapat bersertifikat yang akan ditargetkan selesai Tahun 2019;
6) Percepatan proses pelelangan barang dan jasa, percepatan revisi pencairan blokir dan realokasi terhadap kegiatan yang diprediksi tidak dapat dilaksanakan, pencairan dana kontrak tahun jamak yang bersumber dari dana SBSN;
7) Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Kota dan instansi terkait untuk percepatan proses pembebasan lahan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 Pada Indikator Kinerja Utama Keduapuluhempat

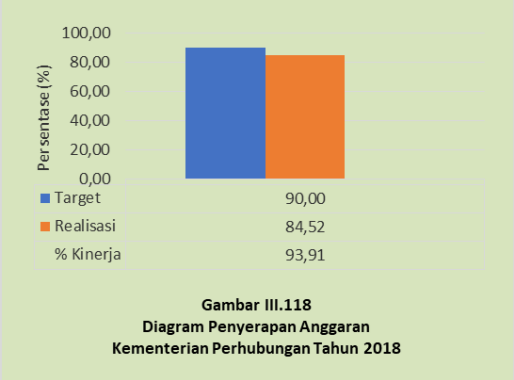
IKU ini baru ada pada Tahun 2017, sehingga target, realisasi, capaian pada tahun 2015 dan 2016 tidak terisi. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada tahun 2017, terdapat penurunan capaian kinerja dan belum mencapai target secara optimal, sebagaimana **Tabel III.82** berikut:

Tabel III.82
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2018

Sasaran	IKU	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya *good governance and clean government* di Kemenhub	Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan	%	2015	-	-	-
			2016	-	-	-
			2017	90,00	86,39	95,99
			2018	90,00	84,52	93,91

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Pada Indikator Kinerja Utama Keduapuluhempat



Gambar III.118
Diagram Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018

La ahun 2018

Dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan pada Tahun 2018 memiliki target 90% dan realisasi 84,52% atau mencapai 93,91%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.118**.

III.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pada tahap ini dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat efisiensi/penghematan penggunaan sumber daya (khususnya sumber daya keuangan yang dialokasikan dalam DIPA Kementerian Perhubungan TA.2018 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dinyatakan dalam ketercapaian/ketidaktercapaian pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2018, 11 sasaran dengan 24 Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan terealisasi dengan persentase penyerapan keuangan rata-rata sebesar 84,52% sebagaimana pada **Tabel III.83** berikut:

Tabel III.83
Pencapaian Target Dalam
Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	% Capaian
SS1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	IK1	Rasio Konektivitas antar wilayah	Rasio	95,556
			Transportasi Darat		97,630
			Transportasi Laut		100,000
			Transportasi Udara		86,111
			Transportasi Perkeretaapian		93,548
			Transportasi Jabodetabek		86,032
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	IK2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional	Rasio	111,150
			Transportasi Laut		124,397
			Transportasi Udara		105,102
			Transportasi Perkeretaapian		107,692
		IK3	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi	Rasio	103,77
			Transportasi Laut		200,00
			Transportasi Udara		200,00
			Transportasi Perkeretaapian		94,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	% Capaian
SS3	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	IK4	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan	%	100,00
			Transportasi Darat		100,00
			Transportasi Perkeretaapian		100,00
		IK5	Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional	%	97,91
		IK6	Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi	%	109,29
			Transportasi Darat		107,26
			Transportasi Laut		129,55
			Transportasi Udara		91,85
			Transportasi Perkeretaapian		113,70
		IK7	Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek	Km/Jam	108,25
		IK8	Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan	%	107,05
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	IK9	Persentase Peningkatan kapasitas sarana transportasi	%	128,09
			Transportasi Darat		100,11
			Transportasi Laut		100,00
			Transportasi Udara		132,69
			Transportasi Perkeretaapian		174,67
		IK10	Persentase Peningkatan kapasitas prasarana transportasi	%	107,80
			Transportasi Darat		103,28
			Transportasi Laut		98,89
			Transportasi Udara		121,60
			Transportasi Perkeretaapian		98,23
		IK11	*Modal Share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	%	103,10

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	% Capaian
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IK12	Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil	Rasio	100,00
			Transportasi Darat		100,00
			Transportasi Laut		100,00
			Transportasi Udara		100,00
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi	IK13	Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	100,00
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	IK14	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi	%	112,58
SS8	Meningkatnya Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	IK15	Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan	%	101,46
SS9	Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub	IK16	Tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan	%	98,46
SS10	Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional	IK17	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat	%	88,98
SS11	Terwujudnya *good governance & clean government* di Kemenhub	IK18	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi	%	99,75
		IK19	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	Opini BPK	100,00
		IK20	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	-
		IK21	Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat	133,33
		IK22	Persentase Kehandalan Sistem Informasi	%	101,54

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Satuan	% Capaian
		IK23	Tingkat Maturasi SPIP	Level	159,50
		IK24	Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan	%	93,91

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Tabel III.84
Penyerapan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2018

(Posisi 31 Desember 2018)

No.	Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Sekretariat Jenderal	580.135.964.000	528.954.770.481	91,18
2	Inspektorat Jenderal	106.110.822.000	102.739.362.790	96,82
3	Ditjen Perhubungan Darat	4.955.730.267.000	4.480.575.555.002	90,41
4	Ditjen Perhubungan Laut	14.417.626.963.000	11.577.344.370.000	80,30
5	Ditjen Perhubungan Udara	9.177.698.362.000	8.232.040.043.538	89,70
6	Ditjen Perhubungan Perkeretaapian	19.188.457.243.000	15.949.501.685.970	83,12
7	Badan Litbang Perhubungan	143.830.906.000	131.349.166.291	91,32
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	4.647.077.286.000	3.953.431.851.122	85,07
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	204.744.255.000	197.559.026.766	96,49
Jumlah		**53.421.412.068.000**	**45.153.495.831.960**	**84,52**

Sumber: Biro Keuangan, 2018

Realisasi tertinggi terdapat pada Inspektorat Jenderal sebesar 96,82% dengan pagu anggaran sebesar Rp106.110.822.000,00 (Seratus Enam Miliar Seratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp102.739.362.790, 00 (Seratus Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Sedangkan realisasi terendah terdapat pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar 80,30% dengan pagu anggaran sebesar Rp14.417.626.963.000,00 (Empat Belas Triliun Empat Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp11.577.344.370.000,00 (Sebelas Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Dari pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp53.421.412.068.000,00 (Lima Puluh Tiga Triliun Empat Ratus Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah),

Kementerian Perhubungan telah berhasil melakukan efisiensi kegiatan sebesar 6,43% yaitu senilai Rp3.436.065.155.350,00 (Tiga Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Enam Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). Adapun efisiensi didapat dari sisa kegiatan belanja barang dan belanja modal yang outputnya telah tercapai 100%. Selain itu efisiensi juga diperoleh dari sisa kegiatan kontraktual yang berasal dari selisih nilai pagu dan nilai kontrak. Rincian Efisiensi penyerapan anggaran tahun 2018 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel III.85
Efisiensi Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018

(Posisi 31 Desember 2018)

KETERANGAN		JENIS BELANJA			TOTAL	%
		PEGAWAI	BARANG	MODAL		
PAGU		4.157.281.985.000	16.598.344.369.000	32.665.785.714.000	**53.421.412.068.000**	**100,00%**
REALISASI		3.556.872.260.376	14.578.491.216.255	27.018.132.355.329	**45.153.495.831.960**	**84,52%**
EFISIENSI	SISA KONTRAK	-	449.265.172.735	791.490.055.877	**1.240.755.228.612**	**6,43%**
	SISA KEGIATAN	600.409.724.624	711.497.674.633	164.249.439.310	**1.476.156.838.567**	
	BLU	-	670.538.173.323	12.281.858.416	**682.820.031.739**	
	SISA KEGIATAN SBSN/PHLN	-	-	36.333.056.432	**36.333.056.432**	
NON EFISIENSI	BLOKIR	-	66.568.480.000	92.308.459.000	**158.876.939.000**	**9,04%**
	PUTUS KONTRAK	-	32.118.666.324	31.998.028.400	**64.116.694.724**	
	KEGIATAN TIDAK DILAKSANAKAN	-	81.850.792.000	378.056.023.000	**459.906.815.000**	
	TUNGGAKAN	-	8.014.193.730	10.337.630.628	**18.351.824.358**	
	SBSN / PHLN TIDAK SELESAI	-	-	4.130.598.807.608	**4.130.598.807.608**	
TOTAL DANA TIDAK TERSERAP		**600.409.724.624**	**2.019.853.152.745**	**5.647.653.358.671**	**8.267.916.236.040**	**15,48%**
%		**14,44%**	**12,17%**	**17,29%**	**15,48%**	

Sumber: Biro Keuangan, 2018

III.4. Capaian Lainnya Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Sepanjang 2018, Kementerian Perhubungan telah menerima beberapa penghargaan, baik penghargaan dalam bidang pelayanan dan keselamatan, penghargaan dalam bidang tata kelola dan manajemen, penghargaan dalam bidang penelitian, penghargaan dalam bidang komunikasi dan informasi publik, diantaranya:

1. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2018 dengan capaian standar tertinggi. Penghargaan yang diterima oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 6 Juni 2018 di Pusdiklat BPK RI Kalibata ini merupakan ke-enam kalinya secara berturut-turut;



Gambar III.119
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2018

2. Penghargaan *Bronze* sebagai *The Best Technology Innovation* pada *Contact Center Indonesia Award* yang diberikan di Jakarta pada 03 Agustus 2018;



Gambar III.120
Penghargaan *Bronze* sebagai *The Best Technology Innovation* Pada *Contact Center Indonesia Award*

3. Menyelenggarakan Lomba *Transhub Challenge*, yang menghasilkan inovasi mengenai pemanfaatan *big data* dan ide bisnis dari pelaku *startup;*



Gambar III.121
Penyelenggaraan *Transhub Challenge*

4. Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2018 dengan kategori menuju informatif pada 5 November 2018;



Gambar III.122
Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Publik

5. Penghargaan *Stand* Terbaik pada Pameran Sinergi Aksi Informasi Dan Komunikasi Publik (SAIK) Tahun 2018;



Gambar III.124
Penghargaan *Stand* Terbaik pada Pameran Sinergi Aksi Informasi Dan Komunikasi Publik (SAIK) Tahun 2018

6. Penghargaan *Stand* Terbaik I Kategori Pelayanan Prima pada Acara Sumatera Selatan *Expo* 2018 pada 25 Agustus 2018;



Gambar III.123
Penghargaan *Stand* Terbaik I Kategori Pelayanan Prima Acara Sumatera Selatan *Expo* 2018

7. Penghargaan *Stand* Favorit pada acara *Budget Execution Expo* Tahun 2018 yang diadakan oleh Kementerian Keuangan pada 21 September 2018;



Gambar III.125
Penghargaan Stand Favorit pada acara Budget Execution Expo Tahun 2018

8. Indonesia terpilih kembali menjadi Anggota Dewan *International Maritime Organization (IMO*) Kategori C Periode Tahun 2018-2019;

9. Penghargaan dalam bidang penerbangan, yaitu *Federal Aviation Administration* (FAA*) Category I*, *Effective Implementation International Civil Aviation Organization-Universal Safety Oversight Audit Programme (*ICAO-USOAP*)*, dan juga pencabutan pelarangan terbang dari Uni Eropa;



Gambar III.126
Penghargaan Dalam Bidang Penerbangan Tahun 2018

10. Penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) atas keberhasilan menutup 313 cikal bakal perlintasan sebidang Kereta Api dalam waktu 2 (dua) bulan pada awal Tahun 2018;



Gambar III.127
Penyerahan Penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia (MURI)

11. Penganugerahan Aparatur Sipil Negara Inspiratif Tahun 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada SLamet Riyadi (Penjaga Menara Suar di Cimiring, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah) yang telah bekerja selama 34 tahun pada 10 November 2018.



Gambar III.128
Penganugerahan Aparatur Sipil Negara Inspiratif Tahun 2018

12.Menerima Apresiasi Pelayanan Publik Arus Mudik Tahun 2018 di Istana Cipanas;

13.Peningkatan partisipasi masyarakat pada Mudik Gratis Sepeda motor dengan Kapal Laut Tahun 2018 sehingga membantu mengurangi angka kecelakaan sepeda motor di jalan raya, dimana jumlah masyarakat yang memanfaatkan program ini mengalami peningkatan sebesar 57% dibanding Tahun 2017.

Selain penghargaan atas kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 tersebut di atas, berbagai capaian pembangunan bidang sarana dan prasarana transportasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sepanjang Tahun 2015-2018 adalah:

1. Pembangunan Sarana Transportasi Darat:



Gambar III.129
Pembangunan Sarana Transportasi Darat Tahun 2018)

2. Pembangunan Sarana Transportasi Perkeretaapian:



Gambar III.130
Pembangunan Sarana Transportasi Perkretaapian
Tahun 2018

3. Pembangunan Sarana Transportasi Laut:



Gambar III.131
Pembangunan Sarana Transportasi Laut Tahun 2018

4. Pembangunan Sarana Transportasi Udara:



Gambar III.132
Pembangunan Sarana Transportasi Udara Tahun 2018

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan:



Gambar III.133
Pembangunan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2018

III.5. Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018

III.5.1.Alokasi Total Anggaran Tahun 2018

Sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018, dana DIPA yang semula diperoleh Kementerian Perhubungan senilai Rp48.203.109.426.000,00 (Empat Puluh Delapan Triliun Dua Ratus Tiga Miliar Seratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2018 Kementerian Perhubungan beberapa kali mengalami perubahan pagu sehingga dana yang diperoleh Kementerian Perhubungan menjadi Rp53.421.412.068.000,00 (Lima Puluh Tiga Triliun Empat Ratus Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah). Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar III.134
Penyerahan DIPA Kementerian Perhubungan oleh Presiden RI

1. Luncuran PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) senilai Rp4.694.508.725.000,00 (Empat Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. Penggunaan saldo awal BLU/PNBP senilai Rp214.039.785.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
3. Anggaran belanja tambahan berupa insentif atas kinerja Kementerian Perhubungan senilai Rp309.754.132.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Adapun total pagu Kementerian Perhubungan terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar 7,78% yaitu senilai Rp4.157.281.985.000,00 (Empat Triliun Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. Belanja Barang sebesar 31,07% yaitu senilai Rp16.600.381.748.000,00 (Enam Belas Triliun Enam Ratus Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah); dan

3. Belanja Modal sebesar 61,14% yaitu senilai Rp32.663.748.335.000,00 (Tiga Puluh Dua Triliun Enam Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Rincian Pagu Anggaran berdasarkan jenis belanja untuk tiap Eselon I sebagaimana pada **Tabel III.83**

Tabel III.86
Rincian Jenis Belanja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Per Eselon I

(Posisi 31 Desember 2018)

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH UPT	BELANJA PEGAWAI	(%)	BELANJA BARANG	(%)	BELANJA MODAL	(%)	ALOKASI DANA	(%)
1	SETJEN	19	121,918,151,000	21.02	363,207,101,000	62.61	95,010,712,000	16.38	580,135,964,000	1.09
2	ITJEN	1	36,636,607,000	34.53	61,356,917,000	57.82	8,117,298,000	7.65	106,110,822,000	0.20
3	DITJEN HUBDAT	32	749,675,632,000	15.13	2,374,796,524,000	47.92	1,831,258,111,000	36.95	4,955,730,267,000	9.28
4	DITJEN HUBLA	330	1,867,135,835,000	12.95	5,202,343,578,000	36.08	7,348,147,550,000	50.97	14,417,626,963,000	26.99
5	DITJEN HUBUD	172	844,194,218,000	9.20	2,911,301,827,000	31.72	5,422,202,317,000	59.08	9,177,698,362,000	17.18
6	DITJEN KA	14	105,368,200,000	0.55	2,259,009,486,000	11.77	16,824,079,557,000	87.68	19,188,457,243,000	35.92
7	BALITBANG	5	41,894,279,000	29.13	96,949,789,000	67.41	4,986,838,000	3.47	143,830,906,000	0.27
8	BPSDMP	32	371,900,583,000	8.00	3,254,724,180,000	70.04	1,020,452,523,000	21.96	4,647,077,286,000	8.70
9	BPTJ	1	18,558,480,000	9.06	76,692,346,000	37.46	109,493,429,000	53.48	204,744,255,000	0.38
JUMLAH RAYA		**606**	**4,157,281,985,000**	**7.78**	**16,600,381,748,000**	**31.07**	**32,663,748,335,000**	**61.14**	**53,421,412,068,000**	**100.00**

Sumber : Biro Keuangan, 2018

Dari total anggaran Rp53.421.412.068.000,00 (Lima Puluh Tiga Triliun Empat Ratus Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) realisasi anggaran posisi 31 Desember 2018 di lingkungan Kementerian Perhubungan telah terserap sebesar 84,52% yaitu senilai Rp45.153.495.831.960,00 (Empat Puluh Lima Triliun Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) sebagaimana **Tabel III.87** berikut:

Tabel III.87
Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018
(Posisi 31 Desember 2018)

No	Sub sektor	Total DIPA	Realisasi	%
1	Sekretariat Jenderal	580.135.964.000	528.954.770.481	91,18%
2	Inspektorat Jenderal	106.110.822.000	102.739.362.790	96,82%
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	4.955.730.267.000	4.480.575.555.002	90,41%
4	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	14.417.626.963.000	11.577.344.370.000	80,30%
5	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	9.177.698.362.000	8.232.040.043.538	89,70%
6	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	19.188.457.243.000	15.949.501.685.970	83,12%
7	Badan Litbang Perhubungan	143.830.906.000	131.349.166.291	91,32%
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	4.647.077.286.000	3.953.431.851.122	85,07%
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	204.744.255.000	197.559.026.766	96,49%
	Total	**53.421.412.068.000**	**45.153.495.831.960**	**84,52%**

Sumber: Biro Keuangan, 2018

Rincian realisasi anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018 tiap Triwulan adalah sebagaimana **Tabel III.88** berikut.

Tabel III.88
Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan Per Triwulan Tahun 2018
(Posisi 31 Desember 2018)

A. Triwulan I Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No	Unit Kerja	Pagu Pegawai	Realisasi Pegawai	Pagu Barang	Realisasi Barang	Pagu Modal	Realisasi Modal	Total Pagu	Total Realisasi	%
1	SETJEN	121.918.151.000	20.497.450.968	388.240.821.000	45.866.804.725	69.976.992.000	3.103.251.310	580.135.964.000	69.467.507.003	4,43
2	ITJEN	36.536.601.000	6.493.751.508	61.356.923.000	6.718.358.667	8.217.298.000	490.593.995	106.110.822.000	13.702.704.170	5,97
3	DITJEN HUBDAT	749.675.632.000	73.527.357.342	2.334.651.665.000	127.736.455.267	1.497.680.389.000	91.117.099.965	4.582.007.686.000	292.380.912.574	6,08
4	DITJEN HUBLA	1.680.613.996.000	333.698.700.288	5.279.917.763.000	517.946.810.528	7.450.241.663.000	128.595.604.127	14.410.773.422.000	980.241.114.943	1,73
5	DTJEN HUBUD	830.448.187.000	142.797.659.684	3.006.867.466.000	359.625.909.392	5.328.484.298.000	276.002.296.396	9.165.799.951.000	778.425.865.472	5,18
6	DITJEN KA	105.368.200.000	13.782.452.002	2.333.156.343.000	317.269.420.807	15.144.777.577.000	702.209.252.940	17.583.302.120.000	1.033.261.125.749	4,64
7	LITBANG	41.894.279.000	5.725.054.880	97.379.789.000	6.613.618.698	4.556.838.000	114.361.100	143.830.906.000	12.453.034.678	2,51
8	BPSDM	371.729.083.000	55.785.392.158	3.249.388.579.000	254.344.765.400	934.864.125.000	31.512.072.422	4.555.981.787.000	341.642.229.980	3,37
9	BPTJ	18.558.480.000	2.664.982.985	82.274.150.000	7.282.575.465	103.911.625.000	2.274.500.000	204.744.255.000	12.222.058.450	2,19
	TOTAL	**3.956.742.609.000**	**654.972.801.815**	**16.833.233.499.000**	**1.643.404.718.949**	**30.542.710.805.000**	**1.235.419.032.255**	**51.332.686.913.000**	**3.533.796.553.019**	**6,88**

Sumber: Biro Keuangan, 2018

B. Triwulan II Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No.	UNIT ORGANISASI	BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG		BELANJA MODAL		TOTAL		%
		Pagu Pegawai	Realisasi Pegawai	Pagu Barang	Realisasi Barang	Pagu Modal	Realisasi Modal	Pagu Total	Realisasi Total	
1	SETJEN	121.918.151.000	47.734.518.675	384.890.821.000	131.530.651.568	73.326.992.000	11.803.791.081	580.135.964.000	191.068.961.324	32,94
2	ITJEN	36.536.601.000	15.349.574.740	61.356.923.000	17.932.329.316	8.217.298.000	2.921.949.022	106.110.822.000	36.203.853.078	34,12
3	DITJEN HUBDAT	749.675.632.000	193.505.348.256	2.355.161.457.000	504.824.381.518	1.555.970.792.000	462.161.195.290	4.660.807.881.000	1.160.490.925.064	24,90
4	DITJEN HUBLA	1.680.806.675.000	783.305.172.097	5.279.390.067.000	1.216.153.379.991	7.450.576.680.000	772.108.914.988	14.410.773.422.000	2.771.567.467.076	19,23
5	DITJEN HUBUD	830.448.187.000	338.454.910.482	3.037.937.210.000	846.498.922.381	5.303.871.126.000	1.191.768.261.131	9.172.256.523.000	2.376.722.093.994	25,91
6	DITJEN KA	105.368.200.000	33.427.369.646	2.286.352.309.000	771.234.678.729	16.781.904.988.000	2.427.644.443.384	19.173.625.497.000	3.232.306.491.759	16,86
7	BADAN LITBANG	41.894.279.000	13.379.994.120	97.379.789.000	20.185.921.066	4.556.838.000	3.766.121.358	143.830.906.000	37.332.036.544	25,96
8	BPSDMP	371.729.083.000	133.859.061.424	3.244.475.092.000	796.726.898.014	977.501.767.000	207.801.693.525	4.593.705.942.000	1.138.387.652.963	24,78
9	BPTJ	18.558.480.000	6.281.589.459	76.692.346.000	20.752.886.500	109.493.429.000	11.578.336.882	204.744.255.000	38.612.812.841	18,86
	TOTAL	**3.956.935.288.000**	**1.565.297.538.899**	**16.823.636.014.000**	**4.325.840.049.083**	**32.265.419.910.000**	**5.091.554.706.661**	**53.045.991.212.000**	**10.982.692.294.643**	**20,70**

Sumber: Biro Keuangan, 2018

C. Triwulan III Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	SEKRETARIAT JENDERAL	121.918.151.000	75.567.255.707	61,98	363.207.101.000	212.120.436.682	58,40	95.010.712.000	35.858.084.099	37,74	580.135.964.000	323.545.776.488	55,77
2	INSPEKTORAT JENDERAL	36.636.607.000	24.820.762.124	67,75	61.356.917.000	33.570.802.255	54,71	8.117.298.000	5.650.738.585	69,61	106.110.822.000	64.042.302.964	60,35
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	749.675.632.000	304.877.117.620	40,67	2.374.796.524.000	1.109.827.084.555	46,73	1.831.258.111.000	941.582.415.460	51,42	4.955.730.267.000	2.356.286.617.635	47,55
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	1.868.062.686.000	1.227.190.239.275	65,69	5.201.699.117.000	2.095.368.185.968	40,28	7.347.865.160.000	1.559.897.913.695	21,23	14.417.626.963.000	4.882.456.338.938	33,86
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	844.263.418.000	530.250.644.353	62,81	2.911.232.627.000	1.419.389.490.992	48,76	5.422.202.317.000	2.446.340.549.625	45,12	9.177.698.362.000	4.395.980.684.970	47,90
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	105.368.200.000	53.025.817.943	50,32	2.259.009.486.000	1.083.967.252.172	47,98	16.824.079.557.000	8.890.774.871.048	52,85	19.188.457.243.000	10.027.767.941.163	52,26
7	BADAN LITBANG PERHUBUNGAN	41.894.279.000	20.893.169.235	49,87	96.949.789.000	49.491.700.647	51,05	4.986.838.000	4.143.698.708	83,09	143.830.906.000	74.528.568.590	51,82
8	BADAN PSDM PERHUBUNGAN	371.900.583.000	210.932.305.520	56,72	3.254.724.180.000	1.383.487.848.100	42,51	1.020.452.523.000	472.786.320.543	46,33	4.647.077.286.000	2.067.206.474.163	44,48
9	BADAN PTJ	18.558.480.000	9.978.300.053	53,77	76.692.346.000	37.644.951.173	49,09	109.493.429.000	64.839.478.426	59,22	204.744.255.000	112.462.729.652	54,93
JUMLAH RAYA		4.158.278.036.000,00	2.457.535.611.830,00	59,10	16.599.668.087.000,00	7.424.867.752.544,00	44,73	32.663.465.945.000,00	14.421.874.070.189,00	44,15	53.421.412.068.000,00	24.304.277.434.563,00	45,50

Sumber: Biro Keuangan, 2018

D. Triwulan IV Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

NO	UNIT KERJA	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	SEKRETARIAT JENDERAL	121,918,151,000	110,907,478,878	90.97	363,207,101,000	353,343,597,760	97.28	95,010,712,000	64,703,693,843	68.10	580,135,964,000	528,954,770,481	91.18
2	INSPEKTORAT JENDERAL	36,636,607,000	36,477,141,719	99.56	61,356,917,000	58,324,354,261	95.06	8,117,298,000	7,937,866,810	97.79	106,110,822,000	102,739,362,790	96.82
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	749,675,632,000	431,681,140,085	57.58	2,372,519,145,000	2,252,263,903,902	94.93	1,833,535,490,000	1,796,630,511,015	97.99	4,955,730,267,000	4,480,575,555,002	90.41
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	1,867,135,835,000	1,780,433,762,000	95.36	5,202,343,578,000	4,503,169,337,000	86.56	7,348,147,550,000	5,293,741,271,000	72.04	14,417,626,963,000	11,577,344,370,000	80.30
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	844,194,218,000	769,243,273,974	91.12	2,911,301,827,000	2,353,272,569,878	80.83	5,422,202,317,000	5,109,524,199,686	94.23	9,177,698,362,000	8,232,040,043,538	89.70
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	105,368,200,000	77,521,963,704	73.57	2,259,009,486,000	2,165,504,170,500	95.86	16,824,079,557,000	13,706,475,551,766	81.47	19,188,457,243,000	15,949,501,685,970	83.12
7	BADAN LITBANG PERHUBUNGAN	41,894,279,000	30,375,952,235	72.51	96,949,789,000	96,013,157,223	99.03	4,986,838,000	4,960,056,833	99.46	143,830,906,000	131,349,166,291	91.32
8	BADAN PSDM PERHUBUNGAN	371,900,583,000	306,219,868,196	82.34	3,254,724,180,000	2,721,748,505,607	83.62	1,020,452,523,000	925,463,477,319	90.69	4,647,077,286,000	3,953,431,851,122	85.07
9	BADAN PTJ	18,558,480,000	14,011,679,585	75.50	76,692,346,000	74,851,620,124	97.60	109,493,429,000	108,695,727,057	99.27	204,744,255,000	197,559,026,766	96.49
JUMLAH RAYA		**4,157,281,985,000**	**3,556,872,260,376**	**85.56**	**16,598,104,369,000**	**14,578,491,216,255**	**87.83**	**32,666,025,714,000**	**27,018,132,355,329**	**82.71**	**53,421,412,068,000**	**45,153,495,831,960**	**84.52**

Sumber : Biro Keuangan, 2018

III.5.2.Analisis Dana Yang Tidak Terserap

Dari total pagu anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp53.421.412.068.000,00 (Lima Puluh Tiga Triliun Empat Ratus Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp45.153.495.831.960,00 (Empat Puluh Lima Triliun Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 84,52% sehingga total dana yang tidak terserap adalah sebesar Rp8.267.916.236.040,00 (Delapan Triliun Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Puluh Rupiah) atau sebesar 15,48%. Rinciannya adalah sebagaimana **Tabel III.89** berikut:

Tabel III.89
Daya Serap Sisa Dana (Total) Kementerian Perhubungan Tahun 2018
(Posisi 31 Desember 2018)

No	Sub sektor	Total DIPA	Total Sisa Dana	%
1	Sekretariat Jenderal	580.135.964.000	51.181.193.519	8,82%
2	Inspektorat Jenderal	106.110.822.000	3.371.459.210	3,18%
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	4.955.730.267.000	475.154.711.998	9,59%
4	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	14.417.626.963.000	2.840.282.593.000	19,70%
5	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	9.177.698.362.000	945.658.318.462	10,30%
6	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	19.188.457.243.000	3.238.955.557.030	16,88%
7	Badan Litbang Perhubungan	143.830.906.000	12.481.739.709	8,68%
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	4.647.077.286.000	693.645.434.878	14,93%
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	204.744.255.000	7.185.228.234	3,51%
	Total	**53.421.412.068.000**	**8.267.916.236.040**	**15,48%**

Sumber: Biro Keuangan, 2018

Rincian dana tidak terserap untuk tiap Eselon I adalah sebagai berikut:

1. **Sekretariat Jenderal**

   Realisasi anggaran Tahun 2018 di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah sebesar Rp528.954.770.481,00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 91,18% sehingga terdapat dana yang tidak terserap sebesar Rp51.181.193.519,00 (Lima Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah) dengan rincian antara lain sebagai berikut:

a. Kegiatan tidak dilaksanakan sebesar Rp29.810.750.000,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
b. Sisa kontrak sebesar Rp1.071.509.430,00 (Satu Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah);
c. Sisa Belanja Pegawai serta sisa kegiatan belanja Barang dan Modal sebesar Rp20.298.934.089,00 (Dua Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

2. Inspektorat Jenderal

Realisasi anggaran Tahun 2018 di lingkungan Inspektorat Jenderal adalah sebesar Rp102.739.362.790,00 (Seratus Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau sebesar 96,82% sehingga terdapat dana yang tidak terserap sebesar Rp3.371.459.210,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dengan rincian antara lain sebagai berikut :

a. Sisa kontrak sebesar Rp179.431.190,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah) merupakan hasil efisiensi dari sisa-sisa kontrak Belanja Modal;
b. Sisa Belanja Pegawai dan kegiatan Belanja Barang sebesar Rp3.192.028.020,00 (Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Rupiah) terdiri dari sisa Belanja Pegawai sebesar Rp159.465.281,- yang merupakan hasil dari efisiensi kegiatan, sedangkan sisa Belanja Barang Perjalanan Dinas Rp2.287.253.521,- dan Non Perjalanan Dinas Rp745.309.218,- merupakan hasil efisiensi kegiatan dan adanya arah perubahan kebijakan pimpinan mengenai pelaksanaan audit serta amanah dalam pelaksanaan penerapan IACM Level 3 dimana Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya lebih menekankan kepada *watchdog*, *catalist*, *consultant*.

3. Ditjen Perhubungan Darat

Realisasi anggaran Tahun 2018 di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat adalah sebesar Rp4.480.575.555.002,00 (Empat Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Rupiah) atau sebesar 90,41% sehingga terdapat dana yang tidak terserap sebesar Rp475.154.711.998,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian antara lain sebagai berikut:

a. Kegiatan tidak dilaksanakan sebesar Rp12.464.169.000,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
b. Kegiatan blokir sebesar Rp4.015.741.000,00 (Empat Miliar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
c. Sisa kontrak belanja modal dan barang tersebar sebesar Rp34.692.512.491,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
d. Sisa Kegiatan PNBP sebesar Rp2.918.166.772,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
e. Sisa Belanja Pegawai serta sisa kegiatan Belanja Barang dan Modal sebesar Rp402.712.298.377,00 (Empat Ratus Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
f. Tunggakan tahun 2018 sebesar Rp18.351.824.358,00 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

4. Ditjen Perhubungan Laut

Realisasi anggaran Tahun 2018 di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut adalah sebesar Rp11.577.344.370.000,00 (Sebelas Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 80,30% sehingga terdapat dana yang tidak terserap sebesar Rp2.840.282.593.000,00 (Dua Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian antara lain sebagai berikut :

a. Kegiatan tidak dilaksanakan sebesar Rp159.117.033.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang disebabkan paket 3 Patimban tidak dilaksanakan, gagal lelang, kurangnya waktu penyelesaian;
b. Kegiatan blokir sebesar Rp1.296.500.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
c. Sisa kontrak belanja modal dan barang sebesar Rp696.012.758.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
d. Sisa kegiatan PHLN sebesar Rp1.510.476.033.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Sepuluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);
e. Sisa Belanja Pegawai serta sisa kegiatan Belanja Barang dan Modal sebesar Rp473.380.269.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

5. Ditjen Perhubungan Udara

Realisasi anggaran Tahun 2018 di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara adalah sebesar Rp8.232.040.043.538,00 (Delapan Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Puluh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 89,70% sehingga terdapat dana yang tidak terserap sebesar Rp945.658.318.462,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dengan rincian antara lain sebagai berikut:

a. Kegiatan tidak dilaksanakan sebesar Rp46.406.947.000,00 (Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
b. Kegiatan blokir sebesar Rp81.343.228.000,00 (Delapan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
c. Sisa kontrak belanja modal dan barang sebesar Rp242.860.603.292,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
d. Sisa kegiatan PNBP/BLU sebesar Rp245.755.542.897,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
e. Sisa Belanja Pegawai dan sisa kegiatan Belanja Barang sebesar Rp265.175.302.549,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
f. Kegiatan yang putus kontrak sebesar Rp64.116.694.724,00 (Enam Puluh Empat Miliar Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

6. Ditjen Perkeretaapian

Realisasi anggaran Tahun 2018 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian adalah sebesar Rp15.949.501.685.970,00 (Lima Belas Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau sebesar 83,12% sehingga terdapat dana yang tidak terserap sebesar Rp3.238.955.557.030,00 (Tiga Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Rupiah) dengan rincian antara lain sebagai berikut :

a. Kegiatan tidak dilaksanakan sebesar Rp211.031.308.000,00 (Dua Ratus Sebelas Miliar Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) yang secara umum disebabkan oleh: masih dalam tahap pengadaan lahan, waktu pelaksanaan tidak mencukupi, adanya perubahan

lingkup dan masih memerlukan persetujuan dari Negara Pendonor; dan adanya kegiatan yang mengalami pelelangan gagal;

b. Kegiatan blokir sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk kegiatan Perjalanan Dinas Biasa;

c. Sisa kegiatan kontraktual belanja modal dan barang sebesar Rp250.706.122.199,00 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) untuk kegiatan jasa konsultansi (supervisi dan penyusunan dokumen teknis pada Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Barat);

d. Sisa kegiatan PHLN/SBSN sebesar Rp2.656.455.831.040,00 (Dua Triliun Enam Ratus Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah), yang terdiri dari: Pembangunan Persinyalan Jalur Kereta Api Ganda Antara Stasiun Martapura - Stasiun Baturaja (MYC TA.2016-2018), *Engineering Services of* Surabaya *Regional Railway Line*, dan *Procurement of Track and Turnout Phase* II (1500 Kmsp and 500 Unit);

e. Sisa kegiatan Belanja Pegawai dan sisa kegiatan Belanja Barang serta sisa kegiatan belanja Modal sebesar Rp120.612.295.791,00 (Seratus Dua puluh Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang disebabkan karena adanya :

   1) Sisa kegiatan belanja barang sebesar Rp. 48.419.461.071 merupakan sisa pelaksanaan kegiatan belanja barang pendukung tugas dan fungsi dari Unit Eselon II dan Eselon III di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;

   2) Sisa kegiatan belanja pegawai sebesar Rp. 27.846.236.296 yang merupakan sisa belanja pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, dimana porsi terbesar sisa anggaran sebesar 73,293% atau senilai Rp. 20.409.305.698 merupakan belanja pegawai pada Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian. Sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya perbedaan antara estimasi dan realisasi yaitu semula diperkirakan adanya penambahan pegawai sebanyak 150 pegawai dan realisasi sebanyak 18 pegawai serta adanya perkiraan kenaikan tunjangan kinerja sebesar 100% dan realisasi kenaikan tunjangan kinerja sebesar 80%;

   3) Sisa kegiatan belanja modal sebesar Rp. 44.346.598.421 yang diperoleh dari sisa kegiatan belanja modal pendukung tugas dan fungsi (penyusunan Kajian, peralatan dan mesin, bangunan operasional) dan adanya sisa kegiatan pengadaan lahan. Dimana porsi terbesar sisa anggaran pengadaan/penertiban lahan sebesar 54,013% atau senilai

Rp. 23.953.093.143 pada Balai Teknik Wilayah Jawa Bagian Barat, dikarenakan proses pengadaan lahan menunggu ijin penetapan lokasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

7. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Realisasi anggaran Tahun 2018 di lingkungan Badan Litbang Perhubungan adalah sebesar Rp131.349.166.291,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 91,32% sehingga terdapat dana yang tidak terserap sebesar Rp12.481.739.709,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah) dengan rincian antara lain sebagai berikut :

a. Sisa kontrak belanja barang sebesar Rp4.200,00 (Empat Ribu Dua Ratus Rupiah);
b. Sisa Belanja Pegawai serta sisa kegiatan Belanja Barang dan Modal sebesar Rp12.481.735.509,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah).

8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Realisasi anggaran Tahun 2018 di lingkungan Badan PSDM Perhubungan adalah sebesar Rp3.953.431.851.122,00 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 85,07% sehingga terdapat dana yang tidak terserap sebesar Rp693.645.434.878,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) terdiri dari :

a. Kegiatan tidak dilaksanakan sebesar Rp1.076.608.000,00 (Satu Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah);
b. Kegiatan blokir sebesar Rp72.071.470.000,00 (Tujuh Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
c. Sisa kontrak belanja modal dan barang sebesar Rp14.434.585.867,00 (Empat Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);
d. Sisa kegiatan PNBP/BLU sebesar Rp434.146.322.070,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Rupiah);
e. Sisa Belanja Pegawai serta sisa kegiatan Belanja Barang dan Modal sebesar Rp171.916.448.941,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Realisasi anggaran Tahun 2018 di lingkungan Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek adalah sebesar Rp197.559.026.766,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 96,49% sehingga terdapat dana yang tidak terserap sebesar Rp7.185.228.234,00 (Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) terdiri dari :

a. Sisa kontrak belanja modal sebesar Rp797.701.943,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), karena penyedia jasa tidak melakukan penagihan uang muka dan termin sesuai kontrak;
b. Sisa Belanja Pegawai serta sisa kegiatan Belanja Barang sebesar Rp6.387.526.291,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Secara umum, pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan pada Tahun 2018 cukup baik, dikarenakan terdapat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat melampaui beberapa target dalam Revisi Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 maupun target dalam Reviu Renstra Kemehub Tahun 2015-2019, sehingga terlihat nilai manfaat dari pembangunan infrastruktur di bidang perhubungan dirasakan masyarakat. Namun demikian, ada beberapa sasaran dan strategis dan indikator kinerja utama yang belum sesuai target, ataupun belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu hasil resmi penilaian oleh Kementerian PAN-RB. Pencapaian IKU Kementerian Perhubungan Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Uraian IKU yang capaiannya di atas target yang telah ditetapkan sebanyak 13 (tiga belas) IKU, yaitu:
   a. Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional, dengan realisasi capaian kinerja 111,150%;
   b. Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi, dengan realisasi capaian kinerja 103,77%;
   c. Prosentase capaian *On Time Performance* (*OTP*) sektor transportasi, dengan capaian kinerja 109,29%;
   d. Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek, dengan capaian 108,25%;
   e. Tingkat penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan, dengan capaian kinerja 107,05%;
   f. Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi, dengan capaian kinerja 128,09%;
   g. Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi, dengan capaian kinerja sebesar 107,80%;

h. *Modal share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek, dengan capaian kinerja 103,10%;
i. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi, dengan realisasi capaian 112,58%;
j. Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan, dengan realisasi capaian 101,46%;
k. Keterbukaan Informasi Publik, dengan capaian kinerja 133,33%;
l. Persentase Kehandalan Sistem Informasi, dengan realisasi capaian 101,54%;
m. Tingkat Maturasi SPIP, dengan realisasi 159,50%

2. Uraian IKU yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan (100%) sebanyak 4 (empat) IKU, yaitu:
   a. Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan, yaitu mencapai target sebesar 80,00%;
   b. Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, yaitu mencapai target rasio 1,52;
   c. Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan target sebesar 80,00%;
   d. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan, yaitu mencapai target WTP;
3. Uraian IKU yang capaiannya belum sesuai target yang telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) IKU, yaitu:
   a. Rasio Konektivitas antar wilayah, dengan capaian kinerja 95,556%;
   b. Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional, dengan capaian kinerja 97,91%;
   c. Tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan, dengan capaian kinerja 98,46%;
   d. Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat, dengan capaian kinerja 88,98%;
   e. Persentase Indeks Reformasi Birokrasi, dengan capaian kinerja 99,75%;
   f. Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan, dengan capaian kinerja 93,91%
4. IKU yang capaiannya belum diperoleh sebanyak 1 (satu) IKU, yaitu Nilai AKIP Kementerian Perhubungan, karena masih menunggu hasil resmi penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rincian capaian terhadap target Kementerian Perhubungan Tahun 2018 secara ringkas sebagaimana pada **Tabel IV.1.**

Tabel IV.1 Resume Realisasi Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (I)	Target PK Tahun 2018	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (II)	Target Revisi PK Tahun 2018	Target Revisi II PK Tahun 2018	Realisasi Kinerja	Capaian Target Revisi II PK Tahun 2018	Capaian Target Reviu Renstra 2015-2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SS1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	IK1	Rasio Konektivitas antar wilayah	Rasio	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725	0,692	95,556	95,556
			Transportasi Darat		0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,659	97,630	97,630
			Transportasi Laut		1,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100,000	100,000
			Transportasi Udara		0,72	0,72	0,72	0,720	0,720	0,620	86,111	86,111
			Transportasi Perkeretaapian		0,31	0,31	0,31	0,310	0,310	0,290	93,548	93,548
			Transportasi Jabodetabek		0,63	0,63	0,63	0,630	0,630	0,542	86,032	86,032
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	IK2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional	Rasio	1,640	1,640	1,543	1,543	1,537	1,365	111,150	111,514
			Transportasi Laut		1,429	1,429	1,429	1,429	1,410	1,066	124,397	125,402
			Transportasi Udara		2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,790	105,102	105,102
			Transportasi Perkeretaapian		0,55	0,55	0,26	0,26	0,26	0,240	107,692	107,692
		IK3	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi	Rasio	3,64	3,12	2,90	2,39	2,39	2,30	103,77	120,90
			Transportasi Laut		2,04	0,50	2,04	0,50	0,50	0	200,00	200,00
			Transportasi Udara		0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0	200,00	200,00
			Transportasi Perkeretaapian		8,70	8,70	6,50	6,50	6,50	6,89	94,00	94,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (I)	Target PK Tahun 2018	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (II)	Target Revisi PK Tahun 2018	Target Revisi II PK Tahun 2018	Realisasi Kinerja	Capaian Target Revisi II PK Tahun 2018	Capaian Target Reviu Renstra 2015-2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SS3	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	IK4	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan	%	71,35	71,35	71,35	80,00	80,00	80,00	100,00	112,13
			Transportasi Darat		82,69	82,69	82,69	100,00	100,00	100,00	100,00	120,93
			Transportasi Perkeretaapian		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00
		IK5	Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	58,74	97,91	97,91
		IK6	Prosentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi	%	79,31	79,31	79,31	79,31	76,49	83,59	109,29	105,40
			Transportasi Darat		83,24	83,24	83,24	83,24	83,24	89,28	107,26	107,26
			Transportasi Laut		80,00	80,00	80,00	80,00	68,70	89,00	129,55	111,25
			Transportasi Udara		87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	79,91	91,85	91,85
			Transportasi Perkeretaapian		67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	76,18	113,70	113,70
		IK7	Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek	Km/Jam	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	17,32	108,25	108,25

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (I)	Target PK Tahun 2018	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (II)	Target Revisi PK Tahun 2018	Target Revisi II PK Tahun 2018	Realisasi Kinerja	Capaian Target Revisi II PK Tahun 2018	Capaian Target Reviu Renstra 2015-2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		IK8	Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	64,23	107,05	107,05
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	IK9	Persentase Peningkatan kapasitas sarana transportasi	%	35,76	25,56	35,24	24,86	24,86	31,85	128,09	90,38
			Transportasi Darat		19,96	20,63	17,88	17,85	17,85	17,87	100,11	99,94
			Transportasi Laut		22,00	18,76	22,00	18,76	18,76	18,76	100,00	85,27
			Transportasi Udara		45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	60,07	132,69	132,69
			Transportasi Perkeretaapian		55,80	17,57	55,80	17,57	17,57	30,69	174,67	55,00
		IK10	Persentase Peningkatan kapasitas prasarana transportasi	%	55,92	55,49	55,39	55,24	55,24	59,55	107,80	107,51
			Transportasi Darat		38,75	37,66	37,54	36,85	36,85	38,06	103,28	101,39
			Transportasi Laut		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	89,00	98,89	98,89
			Transportasi Udara		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	97,28	121,60	121,60
			Transportasi Perkeretaapian		14,91	14,30	14,01	14,10	14,10	13,85	98,23	98,86
		IK11	*Modal Share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	%	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,90	103,10	103,10

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (I)	Target PK Tahun 2018	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (II)	Target Revisi PK Tahun 2018	Target Revisi II PK Tahun 2018	Realisasi Kinerja	Capaian Target Revisi II PK Tahun 2018	Capaian Target Reviu Renstra 2015-2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IK12	Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil	Rasio	16,90	1,21	16,90	1,52	1,52	1,52	100,00	8,97
			Transportasi Darat		0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	100,00	100,00
			Transportasi Laut		46,83	0,68	46,83	0,68	0,68	0,68	100,00	1,45
			Transportasi Udara		3,38	2,84	3,38	3,38	3,38	3,38	100,00	100,00
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi	IK13	Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	IK14	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi	%	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	92,88	112,58	112,58
SS8	Meningkatnya Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	IK15	Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	81,17	101,46	101,46
SS9	Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub	IK16	Tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan	%	95,00 (IACM Level 3)	95,00 (IACM Level 3)	95,00 (IACM Level 3)	95,00 (IACM Level 3)	95,00 (IACM Level 3)	93,54 (IACM Level 3)	98,46 (IACM Level 3)	98,46 (IACM Level 3)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (I)	Target PK Tahun 2018	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (II)	Target Revisi PK Tahun 2018	Target Revisi II PK Tahun 2018	Realisasi Kinerja	Capaian Target Revisi II PK Tahun 2018	Capaian Target Reviu Renstra 2015-2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SS10	Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional	IK17	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat	%	5,00	90,00	5,00	80,00	80,00	71,18	88,98	1423,60
SS11	Terwujudnya good governance & clean government di Kemenhub	IK18	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi	%	87,00	85,00	87,00	85,00	85,00	84,79	99,75	97,46
		IK19	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00
		IK20	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	72,00	72,00	72,00	71,00	71,00	-	-	-
		IK21	Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	133,33	133,33
		IK22	Persentase Kehandalan Sistem Informasi	%	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	98,49	101,54	101,54
		IK23	Tingkat Maturasi SPIP	Level	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,19	159,50	159,50
		IK24	Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	84,52	93,91	93,91

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Anggaran Kementerian Perhubungan pada tahun 2018 yang semula sebesar Rp48.203.109.426.000,00 (Empat Puluh Delapan Triliun Dua Ratus Tiga Miliar Seratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), telah dilakukan penyesuaian karena adanya penambahan yang disebabkan oleh luncuran Pinjaman Hibah Luar Negeri/Surat Berharga Syariah Negara dan penggunaan saldo awal Badan Layanan Umum/Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta adanya anggaran belanja tambahan, sehingga anggaran direvisi menjadi sebesar Rp53.421.412.068.000,00 (Lima Puluh Tiga Triliun Empat Ratus Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), telah teralisasi sebesar 84,52% atau senilai Rp45.153.495.831.960,00 (Empat Puluh Lima Triliun Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah), sebagaimana pada **Tabel IV.2.**

Tabel IV.2 Resume Realisasi Kinerja Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018 (Posisi 31 Desember 2018)

No	Program	Pagu Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Tahun 2015-2019 (I)	Alokasi Anggaran Tahun 2018	Pagu Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Tahun 2015-2019 (II)	Revisi Anggaran Tahun 2018 (Revisi I)	Revisi II Anggaran Tahun 2018 (Revisi II)	Realisasi Anggaran Tahun 2018	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	887.031.193.000	580.135.964.000	887.031.000.000	580.135.964.000	580.135.964.000	528.954.770.481	91,18%
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	106.110.821.000	106.110.822.000	106.111.000.000	106.110.822.000	106.110.822.000	102.739.362.790	96,82%
3	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp.Darat	13.814.457.000.000	4.582.007.686.000	13.106.707.000.000	4.660.807.881.000	4.955.730.267.000	4.480.575.555.002	90,41%
4	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Laut	16.714.246.000.000	11.600.486.955.000	16.714.246.000.000	14.410.773.422.000	14.417.626.963.000	11.577.344.370.000	80,30%
5	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Udara	12.000.528.961.000	9.162.040.051.000	12.000.529.000.000	9.176.656.523.000	9.177.698.362.000	8.232.040.043.538	89,70%
6	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Perkeretaapian	33.436.255.772.000	17.296.256.780.000	32.810.329.000.000	19.173.625.497.000	19.188.457.243.000	15.949.501.685.970	83,12%
7	Program Penelitian dan Pengembangan	235.786.825.000	143.830.906.000	235.787.000.000	143.830.906.000	143.830.906.000	131.349.166.291	91,32%
8	Program Pengembangan SDM Perhubungan	5.528.975.051.000	4.527.496.007.000	5.528.975.000.000	4.631.198.782.000	4.647.077.286.000	3.953.431.851.122	85,07%
9	Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	507.942.011.000	204.744.255.000	536.898.000.000	204.744.255.000	197.559.026.766.000	197.559.026.766	96,49%
Total		**83.231.333.633.000**	**48.203.109.426.000**	**81.926.614.000.000**	**53.087.884.052.000**	**53.421.412.068.000**	**45.153.495.831.960**	**84,52%**

Sumber: Hasil Analisis,2019

Selain pencapaian sasaran strategis dan indikator Kinerja Utama, Kementerian Perhubungan juga menerima berbagai penghargaan sebagai wujud apresiasi atas tercapainya kinerja yang baik. Berikut adalah penghargaan yang dicapai Kementerian Perhubungan, antara lain:

1. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun 2018 dengan capaian standar tertinggi, yang keenam kali berturut-turut;
2. Penghargaan *Bronze* sebagai *The Best Technology Innovation* pada *Contact Center Indonesia Award;*
3. Menyelenggarakan Lomba *Transhub Challenge*;
4. Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2018 dengan kategori menuju informatif;
5. Penghargaan *Stand* Terbaik pada Pameran Sinergi Aksi Infofrmasi Dan Komunikasi Publik (SAIK) Tahun 2018;
6. Penghargaan *Stand* Terbaik I Kategori Pelayanan Prima pada Acara Sumatera Selatan *Expo* 2018;
7. Penghargaan *Stand* Favorit pada acara *Budget Execution Expo* Tahun 2018;
8. Indonesia terpilih kembali menjadi Anggota Dewan IMO (*International Maritime Organization*) Kategori C Periode Tahun 2018-2019;
9. Penghargaan dalam bidang penerbangan, yaitu *Federal Aviation Administration* (FAA*) Category I*, *Effective Implementation International Civil Aviation Organization-Universal Safety Oversight Audit Programme (*ICAO-USOAP*)*, dan juga pencabutan pelarangan terbang dari Uni Eropa;
10. Penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) atas keberhasilan menutup 313 cikal bakal perlintasan sebidang Kereta Api dalam waktu 2 (dua) bulan pada awal Tahun 2018;
11. Penganugerahan Aparatur Sipil Negara Inspiratif oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Menerima Apresiasi Pelayanan Publik Arus Mudik Tahun 2018; dan
13. Peningkatan partisipasi masyarakat pada Mudik Gratis Sepeda motor dengan Kapal Laut Tahun 2018 dengan peningkatan sebesar 57% dibanding Tahun 20177.

IV.2.Saran Tindak Lanjut

Dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi pada tahun 2018, Kementerian Perhubungan secara dinamis telah melakukan perbaikan dengan mengedepankan kerja sama yang baik antar seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan terus melakukan identifikasi langkah- langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan. Pemetaan resiko setiap unit kerja di Kementerian Perhubungan perlu dilakukan sebagai satu langkah awal untuk memperbaiki kondisi internal Kementerian Perhubungan. Hasil pemetaan tersebut dapat dijadikan panduan bagi Kementerian Perhubungan untuk meminimalisir risiko yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perhubungan, diantaranya:

1. Memastikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, dan memenuhi target yang telah ditetapkan;
2. Menyusun dokumen perencanaan yang selaras antara unit kerja kepada unit kerja di atasnya dengan jangka waktu minimal 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan;
3. Melaksanakan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran, misalnya: melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, meningkatkan efektifitas pelaksanaan anggaran, mendorong efisiensi pelaksanaan anggaran, dan meningkatkan ketertiban penyampaian data *supplier* dan data kontrak;
4. Melakukan evaluasi secara berkala atas pencapaian Indikator Kinerja Utama, melalui pelaporan pancapaian melalui aplikasi *e-Performance* secara benar, lengkap dan tepat waktu;
5. Melakukan penyempurnaan IKU yang bersifat *outcome* sampai dengan level Eselon I, dan selaras antara unit kerja dengan unit kerja di bawahnya;
6. Meningkatkan komitmen Pimpinan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam penerapan manajemen berbasis kinerja khususnya dalam hal perencanaan kinerja, maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
7. Setiap unit Eselon I dan II aktif dalam melakukan bimbingan teknis terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maupun kelengkapan data, baik yang bersifat manual maupun *online* sehingga unit kerja di bawahnya memiliki persepsi dan pemahaman yang sama;
8. Secara berkesinambungan terus diupayakan penciptaan inovasi guna mendukung perbaikan kinerja di masa mendatang;

9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja melalui aplikasi *e-performance* secara berkesinambungan yang dilakukan setiap Triwulan guna meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, termasuk melakukan penyempurnaan atas sistem aplikasi *e-performance* dan perangkat monitoring yang relevan.





LAMPIRAN 1

Rencana Kinerja Tahunan
Kementerian Perhubungan Tahun 2018

RENCANA KINERJA TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		SATUAN
(1)		(2)		(3)
SS1	**Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan**	**IK1**	**Rasio Konektivitas Antar Wilayah**	**Rasio**
			a. Transportasi Darat	
			b. Transportasi Perkeretaapian	
			c. Transportasi Laut	
			d. Transportasi Udara	
			e. Transportasi Jabodetabek	
SS2	**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi**	**IK2**	**Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional**	**Rasio**
			a. Transportasi Perkeretaapian	
			b. Transportasi Laut	
			c. Transportasi Udara	
		IK3	**Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi**	**Rasio**
			a. Transportasi Perkeretaapian	
			b. Transportasi Laut	
			c. Transportasi Udara	
SS3	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi**	**IK4**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan**	**%**
			a. Transportasi Darat	
			b. Transportasi Perkeretaapian	
		IK5	**Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Nasional**	**%**
		IK6	**Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi**	**%**
			a. Transportasi Darat	
			b. Transportasi Perkeretaapian	
			c. Transportasi Laut	
			d. Transportasi Udara	
		IK7	**Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Angkutan Umum pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek**	**Km/Jam**
		IK8	**Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan**	**%**
		IK9	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi**	**%**
			a. Transportasi Darat	
			b. Transportasi Perkeretaapian	
			c. Transportasi Laut	
			d. Transportasi Udara	
		IK10	**Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi**	**%**
			a. Transportasi Darat	
			b. Transportasi Perkeretaapian	
			c. Transportasi Laut	
			d. Transportasi Udara	
		IK11	**Modal Share (Pangsa Pasar) angkutan umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek**	**%**

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		SATUAN
(1)		(2)		(3)
		IK12	**Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil**	**Rasio**
			a. Transportasi Darat	
			b. Transportasi Laut	
			c. Transportasi Udara	
SS6	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi**	**IK13**	**Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan**	**%**
SS7	**Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi**	**IK14**	**Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi**	**%**
SS8	**Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan**	**IK15**	**Persentase Pemanfaatan Penelitian yang dijadikan Bahan Rekomendasi Kebijakan**	**%**
SS9	**Meningkatnya Kualitas Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan**	**IK16**	**Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan**	**%**
SS10	**Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional**	**IK17**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi Penerbangan yang Bersertifikat**	**%**
SS11	**Terwujudnya *Good Governance & Clean Government* di Kementerian Perhubungan**	**IK18**	**Persentase Indeks Reformasi Birokrasi**	**%**
		IK19	**Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan**	**Opini BPK**
		IK20	**Nilai AKIP Kementerian Perhubungan**	**Nilai**
		IK21	**Keterbukaan Informasi Publik**	**Peringkat**
		IK22	**Persentase Kehandalan Sistem Informasi**	**%**
		IK23	**Tingkat Maturasi SPIP**	**Level**
		IK24	**Persentase Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan**	**%**



LAMPIRAN 2

Perjanjian Kinerja
Kementerian Perhubungan Tahun 2018

PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2018



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**

Jabatan : **MENTERI PERHUBUNGAN**

Pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2018

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

MATRIKS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019	Target PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
SS1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	IK1	Rasio Konektivitas antar wilayah	Rasio	0,725	0,725
			Transportasi Darat		0,675	0,675
			Transportasi Laut		1,00	1,000
			Transportasi Udara		0,72	0,72
			Transportasi Perkeretaapian		0,31	0,31
			Transportasi Jabodetabek		0,63	0,63
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	IK2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional	Rasio	1,640	1,640
			Transportasi Laut		1,429	1,429
			Transportasi Udara		2,94	2,94
			Transportasi Perkeretaapian		0,55	0,55
		IK3	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi	Rasio	3,64	3,12
			Transportasi Laut		2,04	0,50
			Transportasi Udara		0,17	0,17
			Transportasi Perkeretaapian		8,70	8,70
SS3	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	IK4	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan	%	71,35	71,35
			Transportasi Darat		82,69	82,69
			Transportasi Perkeretaapian		60,00	60,00
		IK5	Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional	%	60,00	60,00
		IK6	Prosentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi	%	79,31	79,31
			Transportasi Darat		83,24	83,24
			Transportasi Laut		80,00	80,00
			Transportasi Udara		87,00	87,00
			Transportasi Perkeretaapian		67,00	67,00
		IK7	Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek	Km/Jam	16,00	16,00
		IK8	Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan	%	60,00	60,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019	Target PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	IK9	Persentase Peningkatan kapasitas sarana transportasi	%	35,76	25,56
			Transportasi Darat		19,96	20,63
			Transportasi Laut		22,00	18,76
			Transportasi Udara		45,27	45,27
			Transportasi Perkeretaapian		55,80	17,57
		IK10	Persentase Peningkatan kapasitas prasarana transportasi	%	55,92	55,49
			Transportasi Darat		38,75	37,66
			Transportasi Laut		90,00	90,00
			Transportasi Udara		80,00	80,00
			Transportasi Perkeretaapian		14,91	14,30
		IK11	Modal Share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	%	29,00	29,00
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IK12	Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil	Rasio	16,90	1,21
			Transportasi Darat		0,49	0,49
			Transportasi Laut		46,83	0,68
			Transportasi Udara		3,38	2,45
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi	IK13	Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	80,00	80,00
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	IK14	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi	%	82,50	82,50
SS8	Meningkatnya Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	IK15	Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan	%	80,00	80,00
SS9	Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub	IK16	Tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan	%	95,00 (IACM Level 3)	95,00 (IACM Level 3)
SS10	Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional	IK17	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat	%	5,00	90,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019	Target PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
SS11	**Terwujudnya good governance & clean government di Kemenhub**	IK18	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi	%	87,00	85,00
		IK19	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	Opini BPK	WTP	WTP
		IK20	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	72,00	72,00
		IK21	Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat	3,00	3,00
		IK22	Persentase Kehandalan Sistem Informasi	%	97,00	97,00
		IK23	Tingkat Maturasi SPIP	Level	2,00	2,00
		IK24	Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan	%	90,00	90,00

Jakarta, Januari 2018
MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

ANGGARAN DALAM MATRIKS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam Ribuan Rupiah

No.	Program	Pagu Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019	Alokasi Anggaran Kemenhub Tahun 2018
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	887.031.193	580.135.964
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	106.110.821	106.110.822
3	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	13.814.457.000	4.582.007.686
4	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	33.436.255.772	17.296.256.780
5	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	16.714.246.000	11.600.486.955
6	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	12.000.528.961	9.162.040.051
7	Program Pengembangan SDM Perhubungan	5.528.975.051	4.527.496.007
8	Program Penelitian dan Pengembangan	235.786.825	143.830.906
9	Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	507.942.011	204.744.255
Total		**83.231.333.633**	**48.203.109.426**

Jakarta, Januari 2018
MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI



LAMPIRAN 3

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018											
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
SS1	**Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan**	IK1	**Rasio Konektivitas Antar Wilayah**	**0,72**	**Rasio**						
			a. Transportasi Darat	0,68		Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat	v	v	v	v	DJPD
			b. Transportasi Perkeretaapian	0,31		- Peningkatan/rehabilitasi jalur KA	v	v	v	v	DJKA
						- Peningkatan/rehabilitasi jembatan KA	v	v	v	v	
						- Peningkatan/rehabilitasi persinyalan, dan telekomunikasi KA	v	v	v	v	
						- Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	v	v	v	v	
						- Pembinaan bidang keselamatan perkeretaapian	v	v	v	v	
						- Pengamanan perlintasan sebidang	v	v	v	v	
						- Pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan perkeretaapian	v	v	v	v	
			c. Transportasi Laut	1,00		Pengawasan, Pemenuhan dan Pemeliharaan Pada SBNP, GMDSS, VTS, Kapal Patroli, Kapal Kenavigasian serta Alur Pelayaran	v	v	v	v	DJPL
			d. Transportasi Udara	0,72		Pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan penerbangan	v	v	v	v	DJU
			e. Transportasi Jabodetabek	0,63		Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek	v	v	v	v	BPTJ
SS2	**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi**	IK2	**Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional**	**1,64**	**Rasio**						
			a. Transportasi Perkeretaapian	0,55		Audit Keselamatan Perkeretaapian dan Safety Assessment, Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian, Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api, Pemantauan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian	v	v	v	v	DJKA
			b. Transportasi Laut	1,43		Penerbitan telegram peringatan pencegahan kecelakaan kapal, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala, evaluasi monitoring perwira jaga dalam penerbitan SPB, Ramp Check, Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Hubla	v	v	v	v	DJPL
			c. Transportasi Udara	2,94		Meningkatkan frekuensi Ramp check keselamatan dan keamanan penerbangan, melakukan audit secara berkala terhadap operator penerbangan, melakukan program pengawasan (survaillance) dan bimbingan teknis kepada operator penerbangan, melaksanakan CASR	v	v	v	v	DJU

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018											
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
		IK3	**Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi**	**3,12**	**Rasio**						
			a. Transportasi Perkeretaapian	8,70		Melakukan penyidikan dan evaluasi tindak pidana perkeretaapian, penyuluhan regulasi pidana perkeretaapian dan sosialisasi tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang, identifikasi/pendataan dan peningkatan keselamatan di daerah rawan pengrusakan dan pencurian di jalur kereta api	v	v	v	v	DJKA
			b. Transportasi Laut	0,50		Melaksanakan instruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor UM.008/21/18/DJPL-16, peningkatan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan kapal-kapal tradisional di wilayah UPT Ditjen Perhubungan Laut, melakukan patroli bersama di Laut bersama Bakamla	v	v	v	v	DJPL
			c. Transportasi Udara	0,17		Melakukan bimtek, sosialisasi SARPs di bidang keamanan penerbangan termasuk dilakukan bersama dengan kantor OBU 1-10, melakukan pengawasan di bidang keamanan penerbangan terhadap UPBU dan BUBU secara berkelanjutan, melakukan upaya peningkatan kualifikasi SDM, prosedur dan fasilitas keamanan penerbangan	v	v	v	v	DJU
SS3	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi**	**IK4**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan**	**71,35**	**%**						
			a. Transportasi Darat	82,69		Menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan telah berhasil mengimplementasikan sistem tersebut melalui penetapan target jumlah kota melalui pendanaan APBN dan APBD	v	v	v	v	DJPD
			b. Transportasi Perkeretaapian	60,00		Menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api telah berhasil mengimplementasikan sistem tersebut melalui penetapan target jumlah kota melalui pendanaan APBN dan APBD	v	v	v	v	DJKA

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018										
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
						T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
	IK5	**Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Nasional**	**60,00**	**%**	- Penyusunan Measurement, Reporting & Verification (MRV) RAN-GRK di Sektor Transportasi	v	v	v	v	DJPD, DJKA, DJPL, DJU, PPTB
					- Bimbingan Teknis Audit Lingkungan Hidup Infrastuktur Transportasi	v	v	v	v	
					- Pendampingan dan Evaluasi Dokumen Lingkungan Di Sektor Transportasi;	v	v	v	v	
	IK6	**Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi**	**79,31**	**%**						
		a. Transportasi Darat	83,24		Monitoring dan evaluasi performance sektor transportasi darat	v	v	v	v	DJPD
		b. Transportasi Perkeretaapian	67,00		Monitoring dan evaluasi performance sektor transportasi perkeretaapian	v	v	v	v	DJKA
		c. Transportasi Laut	80,00		Monitoring dan evaluasi performance sektor transportasi laut	v	v	v	v	DJPL
		d. Transportasi Udara	87,00		Monitoring dan evaluasi performance sektor transportasi udara	v	v	v	v	DJU
	IK7	**Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Angkutan Umum pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek**	**16,00**	**Km/Jam**	Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	v	v	v	v	BPTJ
	IK8	**Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan**	**60,00**	**%**	- Penyiapan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan prasarana transportasi	v	v	v	v	PPTB
					- Penilaian/ Evaluasi Pelayanan Prima Sektor Transportasi	v	v	v	v	
					- penyiapan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana transportasi	v	v	v	v	
					- Workshop Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Sektor Transportas	v	v	v	v	
	IK9	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi**	**25,56**	**%**						
		a. Transportasi Darat	20,63		- Pelaksanaan pembangunan bus BRT	v	v	v	v	DJPD
					- Pelaksanaan pembangunan kapal penyeberangan	v	v	v	v	
					- Pelaksanaan pembangunan bus pemadu moda	v	v	v	v	
					- Pelaksanaan pembangunan bus perintis	v	v	v	v	

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018									
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)	TARGET PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
	b. Transportasi Perkeretaapian	17,57		- Pengadaan sarana KA termasuk kereta kerja (unit)	v	v	v	v	DJKA
				- Pengadaan sarana KA (unit) pada (KRL) sistem AC untuk lintas Yogyakarta - Solo	v	v	v	v	
				- Pengadaan fasilitas/peralatan sarana KA	v	v	v	v	
				- Perawatan/ pengoperasian sarana dan fasilitas sarana KA	v	v	v	v	
				- Penyusunan dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Sarana Perkeretaapian	v	v	v	v	
				- Pembinaan penyelenggaraan sarana Perkeretaapian	v	v	v	v	
	c. Transportasi Laut	18,76		- Pembangunan baru kapal negara angkutan laut perintis	v	v	v	v	DJPL
				- Pembangunan kapal negara angkutan laut perintis	v	v	v	v	
				- Pembangunan Kapal Rakyat	v	v	v	v	
				- Pembangunan/ pengadaan fasilitas pendukung Lalu lintas dan Angkutan Laut	v	v	v	v	
				- Pembangunan baru kapal negara Kenavigasian	v	v	v	v	
				- Pembangunan Reverse Osmosis (RO)	v	v	v	v	
				- Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	v	v	v	v	
				- Pembangunan / Pengembangan VTS	v	v	v	v	
				- Pembangunan Kapal Patroli	v	v	v	v	
				- Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pendukung Penjagaan Laut dan Pantai: (Perbaikan dan Perawatan Kapal/Pengadaan Helikopter/Pengadaan Senjata/Amunisi/Pengadaan Penanggulangan Pencemaran/Peralatan SAR/Giro Vertikal/RIB/ECDIS dan Sistem Mobile Surveillance Kapal Patroli/Mobil Patroli Lapangan/ Drone/ Pengembangan Pangkalan)	v	v	v	v	
	d. Transportasi Udara	45,27		- Pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara	v	v	v	v	DJU
				- Subsidi angkutan BBM	v	v	v	v	

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018										
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
						T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
	IK10	**Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi**	**55,49**	**%**						
		a. Transportasi Darat	37,66		- Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan marka jalan	v	v	v	v	DJPD
					- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan rambu lalu lintas	v	v	v	v	
					- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan APILL	v	v	v	v	
					- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan penerangan jalan umum	v	v	v	v	
					- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan alat pengawasan dan pengaman pengguna jalan (guard rail)	v	v	v	v	
					- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan SBNP	v	v	v	v	
					- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan rambu sungai	v	v	v	v	
		b. Transportasi Perkeretaapian	14,30		- Rehabilitasi dan peningkatan keandalan jalur KA	v	v	v	v	DJKA
					- Pembangunan jalur ganda KA dan reaktivasi	v	v	v	v	
					- Pembangunan jalur lingkar KA layang	v	v	v	v	
					- Rehabilitasi dan peningkatan keandalan jembatan/underpass/ flyover KA	v	v	v	v	
					- pengadaan material rel	v	v	v	v	
					- pengadaan material wesel	v	v	v	v	
					- Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan keandalan stasiun/bangunan operasional KA	v	v	v	v	
					- Pembangunan stasiun/bangunan operasional KA	v	v	v	v	
					- Rehabilitasi dan peningkatan persinyalan dan telekomunikasi KA	v	v	v	v	
					- Pembangunan persinyalan dan telekomunikasi KA	v	v	v	v	
					- Peningkatan/ pembangunan Bangunan Khusus	v	v	v	v	
					- Pemagaran prasarana dan fasilitas prasarana perkeretaapian	v	v	v	v	
					- Pengamanan perlintasan sebidang	v	v	v	v	
					- Pengadaan dan penertiban lahan	v	v	v	v	
					- Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana	v	v	v	v	
					- Pengadaan MTT (Multi Tie Tamper Machine), Profile Ballast regulator, Track Laying Machine, Flash Butt Welding	v	v	v	v	
					- Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/ IMO	v	v	v	v	

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018										
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
						T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
		c. Transportasi Laut	90,00		- Subsidi Angkutan Laut Perintis, Angkutan Ternak dan Angkutan Kapal Rede	v	v	v	v	DJPL
					- Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Non Komersial	v	v	v	v	
					- Pengerukan Alur Pelayaran	v	v	v	v	
					- Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pendukung Perkapalan dan Kepelautan (Pengadaan Enginee Room Simulator / Pengadaan Full Mission Bridge Simulator / Pengadaan Komputer Base Assessment)	v	v	v	v	
					- Pembangunan Sistem Telekomunikasi Pelayaran	v	v	v	v	
		d. Transportasi Udara	80,00		- Pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara	v	v	v	v	DJU
					- Subsidi angkutan BBM	v	v	v	v	
					- Rehabilitasi bandar udara (antara lain perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan, pekerjaan tanah, rehab gedung terminal, gedung operasional, dll)	v	v	v	v	
					- Pengembangan bandar udara	v	v	v	v	
					- Pembangunan bandar udara	v	v	v	v	
					- Peningkatan fasilitas pelayanan darurat	v	v	v	v	
					- Peningkatan fasilitas keamanan penerbangan	v	v	v	v	
	IK11	**Modal Share (Pangsa Pasar) angkutan umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek**	**29,00**	**%**	- Pengembangan Database Pergerakan Orang dan Barang di Jabodetabek	v	v	v	v	BPTJ
					- Perencanaan Teknis Skema Pembiayaan Pembangunan TOD di Jabodetabek	v	v	v	v	
					- Perencanaan Teknis Skema Pembiayaan Transjabodetabek	v	v	v	v	
					- Perencanaan Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Fasilitas Integrasi	v	v	v	v	
					- Pengadaan Software Simulasi Pergerakan Pernumpang	v	v	v	v	
					- Pengembangan Sistem Informasi Jaringan dan Angkutan Umum Jabodetabek	v	v	v	v	
					- Perencanaan Teknis Penyusunan Pedoman Perhitungan Subsidi untuk Angkutan Umum di Jabodetabek	v	v	v	v	
					- Perencanaan Teknis Penataan Jaringan dan Simpul Angkutan Barang di Jabodetabek	v	v	v	v	
					- Evaluasi Sasaran Pembangunan Transportasi Terintegrasi Jabodetabek	v	v	v	v	
					- Penyusunan Metode Pengukuran IKU Pengembangan Transportasi Jabodetabek	v	v	v	v	
					- Koordinasi Perencanaan Transportasi Jabodetabek	v	v	v	v	
					- Evaluasi Kinerja Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Jabodetabek	v	v	v	v	

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018												
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
						- Permodelan Sistem Pembayaran Angkutan Umum Terintegrasi	v	v	v	v	
						- Pengembangan Peta Interaktif Sistem Informasi Jaringan dan Angkutan Umum Jabodetabek	v	v	v	v	
		IK12	**Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil**	**1,21**	**Rasio**						
			a. Transportasi Darat	0,49		Pemberian lintas/rute angkutan perintis dimaksudkan dalam rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi darat	v	v	v	v	DJPD
			c. Transportasi Laut	0,68		Pemberian lintas/rute angkutan perintis dimaksudkan dalam rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi laut	v	v	v	v	DJPL
			d. Transportasi Udara	2,45		Pemberian lintas/rute angkutan perintis dimaksudkan dalam rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi udara	v	v	v	v	DJU
SS6	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi**	**IK13**	**Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan**	**80,00**	**%**	Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	v	v	v	v	BIRO HUKUM
SS7	**Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi**	**IK14**	**Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi**	**82,50**	**%**	- Pelaksanaan diklat transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	v	v	v	v	BPSDMP
						- Pelaksanaan diklat transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan.	v	v	v	v	
						- Penyelenggaraan diklat transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	v	v	v	v	
SS8	**Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan**	**IK15**	**Persentase Pemanfaatan Penelitian yang dijadikan Bahan Rekomendasi Kebijakan**	**80,00**	**%**	Persiapan pembentukan tim studi, penyusunan TOR, pembahasan pelaksanaan kegiatan TA. 2017, Penyusunan laporan dan pelaksanaan survey, Penyusunan laporan interim	v	v	v	v	BALITBANG

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018											
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
SS9	**Meningkatnya Kualitas Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan**	**IK16**	**Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan**	**95% (IACM Level 3)**	**%**	Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat I, II, III, IV dan V/Layanan Audit Internal	v	v	v	v	ITJEN
SS10	**Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional**	**IK17**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi Penerbangan yang Bersertifikat**	**90,00**	**%**	Melaksanakan Diklat Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi Penerbangan yang Bersertifikat	v	v	v	v	BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI
SS11	**Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Kementerian Perhubungan**	**IK18**	**Persentase Indeks Reformasi Birokrasi**	**85,00**	**%**	Melaksanakan Entery meeting Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Survey terhadap masyarakat pengguna layanan jasa utama	v	v	v	v	BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI
		IK19	**Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan**	**WTP**	**Opini BPK**	Penyusunan Jumlah laporan hasil penata usahaan, pembukuan, verifikasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	v	v	v	v	BIRO KEUANGAN & PERLENGKAPAN
		IK20	**Nilai AKIP Kementerian Perhubungan**	**72,00**	**Nilai**	- Bimbingan Teknis *e-Performance* - Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal	v v	v v	v v	v v	BIRO PERENCANAAN
		IK21	**Keterbukaan Informasi Publik**	**3,00**	**Peringkat**	- Penyelenggaraan komunikasi publik melalui pengelolaan opini publik berbasis pemberitaan dan pengelolaan media sosial - Penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi, publikasi serta edukasi publik tentang kebijakan dan kinerja - Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi yang baik	v v v	v v v	v v v	v v v	BKIP

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018											
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
		IK22	**Persentase Kehandalan Sistem Informasi**	**97,00**	**%**	- Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT-Governance) yang terencana dan akuntabel	v	v	v	v	PUSTIKOMHUB
						- Memberdayakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan dan Unit Kerja TIK di Kementerian Perhubungan dalam mengoperasikan sistem keamanan TIK dan mampu menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang (Cyber Security)	v	v	v	v	
						- Transformasi Kementerian Perhubungan menjadi organisasi yang mempunyai keunggulan TIK dalam penyediaan aksesibilitas data darimanapun dan kapanpun (Teknologi yang inovatif)	v	v	v	v	
						- Terlaksananya pelayanan TIK yang Unggul (Excelent IT Service Delivery)	v	v	v	v	
		IK23	**Tingkat Maturasi SPIP**	**2,00**	**Level**	Bimbingan Teknis SPIP	v	v	v	v	BIRO PERENCANAAN
		IK24	**Persentase Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan**	**90,00**	**%**	Pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran bersumber Rupiah Murni dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)	v	v	v	v	BIRO KEUANGAN & PERLENGKAPAN



LAMPIRAN 4

Perjanjian Kinerja Revisi I
Kementerian Perhubungan Tahun 2018

REVISI PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**

Jabatan : **MENTERI PERHUBUNGAN**

Pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Oktober 2018

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

MATRIKS TARGET REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (I)	Target PK Tahun 2018	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (II)	Target Revisi PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	IK1	Rasio Konektivitas antar wilayah	Rasio	0,725	0,725	0,725	0,725
			Transportasi Darat		0,675	0,675	0,675	0,675
			Transportasi Laut		1,00	1,000	1,000	1,000
			Transportasi Udara		0,72	0,72	0,72	0,72
			Transportasi Perkeretaapian		0,31	0,31	0,31	0,31
			Transportasi Jabodetabek		0,63	0,63	0,63	0,63
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	IK2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional	Rasio	1,640	1,640	1,543	1,543
			Transportasi Laut		1,429	1,429	1,429	1,429
			Transportasi Udara		2,94	2,94	2,94	2,94
			Transportasi Perkeretaapian		0,55	0,55	0,26	0,26
		IK3	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi	Rasio	3,64	3,12	2,90	2,39
			Transportasi Laut		2,04	0,50	2,04	0,50
			Transportasi Udara		0,17	0,17	0,17	0,16
			Transportasi Perkeretaapian		8,70	8,70	6,50	6,50
SS3	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	IK4	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan	%	71,35	71,35	71,35	80,00
			Transportasi Darat		82,69	82,69	82,69	100,00
			Transportasi Perkeretaapian		60,00	60,00	60,00	60,00
		IK5	Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional	%	60,00	60,00	60,00	60,00
		IK6	Prosentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi	%	79,31	79,31	79,31	79,31
			Transportasi Darat		83,24	83,24	83,24	83,24
			Transportasi Laut		80,00	80,00	80,00	80,00
			Transportasi Udara		87,00	87,00	87,00	87,00
			Transportasi Perkeretaapian		67,00	67,00	67,00	67,00
		IK7	Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek	Km/Jam	16,00	16,00	16,00	16,00
		IK8	Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan	%	60,00	60,00	60,00	60,00
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	IK9	Persentase Peningkatan kapasitas sarana transportasi	%	35,76	25,56	35,24	24,86
			Transportasi Darat		19,96	20,63	17,88	17,85
			Transportasi Laut		22,00	18,76	22,00	18,76
			Transportasi Udara		45,27	45,27	45,27	45,27
			Transportasi Perkeretaapian		55,80	17,57	55,80	17,57
		IK10	Persentase Peningkatan kapasitas prasarana transportasi	%	55,92	55,49	55,39	55,24
			Transportasi Darat		38,75	37,66	37,54	36,85
			Transportasi Laut		90,00	90,00	90,00	90,00
			Transportasi Udara		80,00	80,00	80,00	80,00
			Transportasi Perkeretaapian		14,91	14,30	14,01	14,10
		IK11	Modal Share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	%	29,00	29,00	29,00	29,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (I)	Target PK Tahun 2018	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019 (II)	Target Revisi PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IK12	Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil	Rasio	16,90	1,21	16,90	1,52
			Transportasi Darat		0,49	0,49	0,49	0,49
			Transportasi Laut		46,83	0,68	46,83	0,68
			Transportasi Udara		3,38	2,84	3,38	3,38
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi	IK13	Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	80,00	80,00	80,00	80,00
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	IK14	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi	%	82,50	82,50	82,50	82,50
SS8	Meningkatnya Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	IK15	Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan	%	80,00	80,00	80,00	80,00
SS9	Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub	IK16	Tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan	%	95,00 (IACM Level 3)	95,00 (IACM Level 3)	95,00 (IACM Level 3)	95,00 (IACM Level 3)
SS10	Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional	IK17	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat	%	5,00	90,00	5,00	80,00
SS11	Terwujudnya good governance & clean government di Kemenhub	IK18	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi	%	87,00	85,00	87,00	85,00
		IK19	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
		IK20	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	72,00	72,00	72,00	71,00
		IK21	Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat	3,00	3,00	3,00	3,00
		IK22	Persentase Kehandalan Sistem Informasi	%	97,00	97,00	97,00	97,00
		IK23	Tingkat Maturasi SPIP	Level	2,00	2,00	2,00	2,00
		IK24	Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan	%	90,00	90,00	90,00	90,00

Jakarta, Oktober 2018
MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

ANGGARAN DALAM MATRIKS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam Ribuan Rupiah

No.	Program	Pagu Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Tahun 2015-2019 (I)	Alokasi Anggaran Tahun 2018	Pagu Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra Tahun 2015-2019 (II)	Revisi Anggaran Tahun 2018
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	887.031.193	580.135.964	887.031.000	580.135.964
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	106.110.821	106.110.822	106.111.000	106.110.822
3	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	13.814.457.000	4.582.007.686	13.106.707.000	4.660.807.881
4	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	16.714.246.000	11.600.486.955	16.714.246.000	14.410.773.422
5	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	12.000.528.961	9.162.040.051	12.000.529.000	9.176.656.523
6	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	33.436.255.772	17.296.256.780	32.810.329.000	19.173.625.497
7	Program Penelitian dan Pengembangan	235.786.825	143.830.906	235.787.000	143.830.906
8	Program Pengembangan SDM Perhubungan	5.528.975.051	4.527.496.007	5.528.975.000	4.631.198.782
9	Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	507.942.011	204.744.255	536.898.000	204.744.255
Total		**83.231.333.633**	**48.203.109.426**	**81.926.614.000**	**53.087.884.052**

Jakarta, Oktober 2018
MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

Biro Perencanaan
Jakarta
2018





LAMPIRAN 5

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Revisi I Kementerian Perhubungan Tahun 2018

RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018

REVISI PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018											
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET REVISI PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
SS1	**Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan**	**IK1**	**Rasio Konektivitas Antar Wilayah**	**0,725**	**Rasio**						
			a. Transportasi Darat	0,675		Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat	v	v	v	v	DJPD
			b. Transportasi Perkeretaapian	0,310		- Peningkatan/rehabilitasi jalur KA	v	v	v	v	DJKA
						- Peningkatan/rehabilitasi jembatan KA	v	v	v	v	
						- Peningkatan/rehabilitasi persinyalan, dan telekomunikasi KA	v	v	v	v	
						- Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	v	v	v	v	
						- Pembinaan bidang keselamatan perkeretaapian	v	v	v	v	
						- Pengamanan perlintasan sebidang	v	v	v	v	
						- Pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan perkeretaapian	v	v	v	v	
			c. Transportasi Laut	1,000		Pengawasan, Pemenuhan dan Pemeliharaan Pada SBNP, GMDSS, VTS, Kapal Patroli, Kapal Kenavigasian serta Alur Pelayaran	v	v	v	v	DJPL
			d. Transportasi Udara	0,720		Pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan penerbangan	v	v	v	v	DJU
			e. Transportasi Jabodetabek	0,630		Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek	v	v	v	v	BPTJ
SS2	**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi**	**IK2**	**Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional**	**1,543**	**Rasio**						
			a. Transportasi Perkeretaapian	0,260		Audit Keselamatan Perkeretaapian dan Safety Assessment, Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian, Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api, Pemantauan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian	v	v	v	v	DJKA
			b. Transportasi Laut	1,429		Penerbitan telegram peringatan pencegahan kecelakaan kapal, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala, evaluasi monitoring perwira jaga dalam penerbitan SPB, Ramp Check, Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Hubla	v	v	v	v	DJPL
			c. Transportasi Udara	2,940		Meningkatkan frekuensi Ramp check keselamatan dan keamanan penerbangan, melakukan audit secara berkala terhadap operator penerbangan, melakukan program pengawasan (survaillance) dan bimbingan teknis kepada operator penerbangan, melaksanakan CASR	v	v	v	v	DJU

REVISI PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018											
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET REVISI PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
		IK3	**Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi**	**2,39**	**Rasio**						
			a. Transportasi Perkeretaapian	6,50		Melakukan penyidikan dan evaluasi tindak pidana perkeretaapian, penyuluhan regulasi pidana perkeretaapian dan sosialisasi tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang, identifikasi/pendataan dan peningkatan keselamatan di daerah rawan pengrusakan dan pencurian di jalur kereta api	v	v	v	v	DJKA
			b. Transportasi Laut	0,50		Melaksanakan instruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor UM.008/21/18/DJPL-16, peningkatan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan kapal-kapal tradisional di wilayah UPT Ditjen Perhubungan Laut, melakukan patroli bersama di Laut bersama Bakamla	v	v	v	v	DJPL
			c. Transportasi Udara	0,16		Melakukan bimtek, sosialisasi SARPs di bidang keamanan penerbangan termasuk dilakukan bersama dengan kantor OBU 1-10, melakukan pengawasan di bidang keamanan penerbangan terhadap UPBU dan BUBU secara berkelanjutan, melakukan upaya peningkatan kualifikasi SDM, prosedur dan fasilitas keamanan penerbangan	v	v	v	v	DJU
SS3	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi**	**IK4**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan**	**80,00**	**%**						
			a. Transportasi Darat	100,00		Menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan telah berhasil mengimplementasikan sistem tersebut melalui penetapan target jumlah kota melalui pendanaan APBN dan APBD	v	v	v	v	DJPD
			b. Transportasi Perkeretaapian	60,00		Menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api telah berhasil mengimplementasikan sistem tersebut melalui penetapan target jumlah kota melalui pendanaan APBN dan APBD	v	v	v	v	DJKA

REVISI PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018										
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET REVISI PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
						T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
	IK5	**Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Nasional**	**60,00**	**%**	- Penyusunan Measurement, Reporting & Verification (MRV) RAN-GRK di Sektor Transportasi	v	v	v	v	DJPD, DJKA, DJPL, DJU, PPTB
					- Bimbingan Teknis Audit Lingkungan Hidup Infrastuktur Transportasi	v	v	v	v	
					- Pendampingan dan Evaluasi Dokumen Lingkungan Di Sektor Transportasi;	v	v	v	v	
	IK6	**Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi**	**79,31**	**%**						
		a. Transportasi Darat	83,24		Monitoring dan evaluasi performance sektor transportasi darat	v	v	v	v	DJPD
		b. Transportasi Perkeretaapian	67,00		Monitoring dan evaluasi performance sektor transportasi perkeretaapian	v	v	v	v	DJKA
		c. Transportasi Laut	80,00		Monitoring dan evaluasi performance sektor transportasi laut	v	v	v	v	DJPL
		d. Transportasi Udara	87,00		Monitoring dan evaluasi performance sektor transportasi udara	v	v	v	v	DJU
	IK7	**Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Angkutan Umum pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek**	**16,00**	**Km/Jam**	Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	v	v	v	v	BPTJ
	IK8	**Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan**	**60,00**	**%**	- Penyiapan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan prasarana transportasi	v	v	v	v	PPTB
					- Penilaian/ Evaluasi Pelayanan Prima Sektor Transportasi	v	v	v	v	
					- penyiapan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana transportasi	v	v	v	v	
					- Workshop Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Sektor Transportas	v	v	v	v	
	IK9	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi**	**4,46**	**%**						
		a. Transportasi Darat	17,85		- Pelaksanaan pembangunan bus BRT	v	v	v	v	DJPD
					- Pelaksanaan pembangunan kapal penyeberangan	v	v	v	v	
					- Pelaksanaan pembangunan bus pemadu moda	v	v	v	v	
					- Pelaksanaan pembangunan bus perintis	v	v	v	v	

REVISI PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018									
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)	TARGET REVISI PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
	b. Transportasi Perkeretaapian	17,57		- Pengadaan sarana KA termasuk kereta kerja (unit)	v	v	v	v	DJKA
				- Pengadaan sarana KA (unit) pada (KRL) sistem AC untuk lintas Yogyakarta - Solo	v	v	v	v	
				- Pengadaan fasilitas/peralatan sarana KA	v	v	v	v	
				- Perawatan/ pengoperasian sarana dan fasilitas sarana KA	v	v	v	v	
				- Penyusunan dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Sarana Perkeretaapian	v	v	v	v	
				- Pembinaan penyelenggaraan sarana Perkeretaapian	v	v	v	v	
	c. Transportasi Laut	18,76		- Pembangunan baru kapal negara angkutan laut perintis	v	v	v	v	DJPL
				- Pembangunan kapal negara angkutan laut perintis	v	v	v	v	
				- Pembangunan Kapal Rakyat	v	v	v	v	
				- Pembangunan/ pengadaan fasilitas pendukung Lalu lintas dan Angkutan Laut	v	v	v	v	
				- Pembangunan baru kapal negara Kenavigasian	v	v	v	v	
				- Pembangunan Reverse Osmosis (RO)	v	v	v	v	
				- Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	v	v	v	v	
				- Pembangunan / Pengembangan VTS	v	v	v	v	
				- Pembangunan Kapal Patroli	v	v	v	v	
				- Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pendukung Penjagaan Laut dan Pantai: (Perbaikan dan Perawatan Kapal/Pengadaan Helikopter/Pengadaan Senjata/Amunisi/Pengadaan Penanggulangan Pencemaran/Peralatan SAR/Giro Vertikal/RIB/ECDIS dan Sistem Mobile Surveillance Kapal Patroli/Mobil Patroli Lapangan/ Drone/ Pengembangan Pangkalan)	v	v	v	v	
	d. Transportasi Udara	45,27		- Pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara	v	v	v	v	DJU
				- Subsidi angkutan BBM	v	v	v	v	

REVISI PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018										
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET REVISI PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
						T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
	IK10	**Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi**	**9,21**	**%**						
		a. Transportasi Darat	36,85		- Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan marka jalan	v	v	v	v	DJPD
					- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan rambu lalu lintas	v	v	v	v	
					- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan APILL	v	v	v	v	
					- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan penerangan jalan	v	v	v	v	
					- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan alat pengawasan dan pengaman pengguna jalan (guard rail)	v	v	v	v	
					- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan SBNP	v	v	v	v	
					- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan rambu sungai	v	v	v	v	
		b. Transportasi Perkeretaapian	14,10		- Rehabilitasi dan peningkatan keandalan jalur KA	v	v	v	v	DJKA
					- Pembangunan jalur ganda KA dan reaktivasi	v	v	v	v	
					- Pembangunan jalur lingkar KA layang	v	v	v	v	
					- Rehabilitasi dan peningkatan keandalan jembatan/underpass/ flyover KA	v	v	v	v	
					- pengadaan material rel	v	v	v	v	
					- pengadaan material wesel	v	v	v	v	
					- Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan keandalan stasiun/bangunan operasional KA	v	v	v	v	
					- Pembangunan stasiun/bangunan operasional KA	v	v	v	v	
					- Rehabilitasi dan peningkatan persinyalan dan telekomunikasi KA	v	v	v	v	
					- Pembangunan persinyalan dan telekomunikasi KA	v	v	v	v	
					- Peningkatan/ pembangunan Bangunan Khusus	v	v	v	v	
					- Pemagaran prasarana dan fasilitas prasarana perkeretaapian	v	v	v	v	
					- Pengamanan perlintasan sebidang	v	v	v	v	
					- Pengadaan dan penertiban lahan	v	v	v	v	
					- Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana	v	v	v	v	
					- Pengadaan MTT (Multi Tie Tamper Machine), Profile Ballast regulator, Track Laying Machine, Flash Butt Welding	v	v	v	v	
					- Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/ IMO	v	v	v	v	

REVISI PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018											
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET REVISI PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
			c. Transportasi Laut	90,00		- Subsidi Angkutan Laut Perintis, Angkutan Ternak dan Angkutan Kapal Rede	v	v	v	v	DJPL
						- Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Non Komersial	v	v	v	v	
						- Pengerukan Alur Pelayaran	v	v	v	v	
						- Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pendukung Perkapalan dan Kepelautan (Pengadaan Enginee Room Simulator / Pengadaan Full Mission Bridge Simulator / Pengadaan Komputer Base Assessment)	v	v	v	v	
						- Pembangunan Sistem Telekomunikasi Pelayaran	v	v	v	v	
			d. Transportasi Udara	80,00		- Pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara	v	v	v	v	DJU
						- Subsidi angkutan BBM	v	v	v	v	
						- Rehabilitasi bandar udara (antara lain perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan, pekerjaan tanah, rehab gedung terminal, gedung operasional, dll)	v	v	v	v	
						- Pengembangan bandar udara	v	v	v	v	
						- Pembangunan bandar udara	v	v	v	v	
						- Peningkatan fasilitas pelayanan darurat	v	v	v	v	
						- Peningkatan fasilitas keamanan penerbangan	v	v	v	v	
		IK11	**Modal Share (Pangsa Pasar) angkutan umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek**	**29,00**	**%**	- Pengembangan Database Pergerakan Orang dan Barang di Jabodetabek	v	v	v	v	BPTJ
						- Perencanaan Teknis Skema Pembiayaan Pembangunan TOD di Jabodetabek	v	v	v	v	
						- Perencanaan Teknis Skema Pembiayaan Transjabodetabek	v	v	v	v	
						- Perencanaan Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Fasilitas Integrasi	v	v	v	v	
						- Pengadaan Software Simulasi Pergerakan Pernumpang	v	v	v	v	
						- Pengembangan Sistem Informasi Jaringan dan Angkutan Umum Jabodetabek	v	v	v	v	
						- Perencanaan Teknis Penyusunan Pedoman Perhitungan Subsidi untuk Angkutan Umum di Jabodetabek	v	v	v	v	
						- Perencanaan Teknis Penataan Jaringan dan Simpul Angkutan Barang di Jabodetabek	v	v	v	v	
						- Evaluasi Sasaran Pembangunan Transportasi Terintegrasi Jabodetabek	v	v	v	v	
						- Penyusunan Metode Pengukuran IKU Pengembangan Transportasi Jabodetabek	v	v	v	v	
						- Koordinasi Perencanaan Transportasi Jabodetabek	v	v	v	v	
						- Evaluasi Kinerja Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Jabodetabek	v	v	v	v	
						- Permodelan Sistem Pembayaran Angkutan Umum Terintegrasi	v	v	v	v	

REVISI PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018											
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET REVISI PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
						- Pengembangan Peta Interaktif Sistem Informasi Jaringan dan Angkutan Umum Jabodetabek	v	v	v	v	
		IK12	**Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil**	**1,52**	**Rasio**						
			a. Transportasi Darat	0,49		Pemberian lintas/rute angkutan perintis dimaksudkan dalam rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi darat	v	v	v	v	DJPD
			c. Transportasi Laut	0,68		Pemberian lintas/rute angkutan perintis dimaksudkan dalam rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi laut	v	v	v	v	DJPL
			d. Transportasi Udara	3,38		Pemberian lintas/rute angkutan perintis dimaksudkan dalam rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi udara	v	v	v	v	DJU
SS6	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi**	**IK13**	**Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan**	**80,00**	**%**	Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	v	v	v	v	BIRO HUKUM
SS7	**Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi**	**IK14**	**Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi**	**82,50**	**%**	- Pelaksanaan diklat transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	v	v	v	v	BPSDMP
						- Pelaksanaan diklat transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan.	v	v	v	v	
						- Penyelenggaraan diklat transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	v	v	v	v	
SS8	**Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan**	**IK15**	**Persentase Pemanfaatan Penelitian yang dijadikan Bahan Rekomendasi Kebijakan**	**80,00**	**%**	Persiapan pembentukan tim studi, penyusunan TOR, pembahasan pelaksanaan kegiatan TA. 2017, Penyusunan laporan dan pelaksanaan survey, Penyusunan laporan interim	v	v	v	v	BALITBANG
SS9	**Meningkatnya Kualitas Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan**	**IK16**	**Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan**	**95% (IACM Level 3)**	**%**	Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat I, II, III, IV dan V/Layanan Audit Internal	v	v	v	v	ITJEN

REVISI PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018											
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET REVISI PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
SS10	**Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional**	**IK17**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi Penerbangan yang Bersertifikat**	**80,00**	**%**	Melaksanakan Diklat Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi Penerbangan yang Bersertifikat	v	v	v	v	BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI
SS11	**Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Kementerian Perhubungan**	**IK18**	**Persentase Indeks Reformasi Birokrasi**	**85,00**	**%**	Melaksanakan Entery meeting Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Survey terhadap masyarakat pengguna layanan jasa utama	v	v	v	v	BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI
		IK19	**Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan**	**WTP**	**Opini BPK**	Penyusunan Jumlah laporan hasil penata usahaan, pembukuan, verifikasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	v	v	v	v	BIRO KEUANGAN & PERLENGKAPAN
		IK20	**Nilai AKIP Kementerian Perhubungan**	**71,00**	**Nilai**	- Bimbingan Teknis *e-Performance* - Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal	v v	v v	v v	v v	BIRO PERENCANAAN
		IK21	**Keterbukaan Informasi Publik**	**3,00**	**Peringkat**	- Penyelenggaraan komunikasi publik melalui pengelolaan opini publik berbasis pemberitaan dan pengelolaan media sosial - Penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi, publikasi serta edukasi publik tentang kebijakan dan kinerja - Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi yang baik	v v v	v v v	v v v	v v v	BKIP

REVISI PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018											
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET REVISI PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
		IK22	**Persentase Kehandalan Sistem Informasi**	**97,00**	**%**	- Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT-Governance) yang terencana dan akuntabel	v	v	v	v	PUSTIKOMHUB
						- Memberdayakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan dan Unit Kerja TIK di Kementerian Perhubungan dalam mengoperasikan sistem keamanan TIK dan mampu menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang (Cyber Security)	v	v	v	v	
						- Transformasi Kementerian Perhubungan menjadi organisasi yang mempunyai keunggulan TIK dalam penyediaan aksesibilitas data darimanapun dan kapanpun (Teknologi yang inovatif)	v	v	v	v	
						- Terlaksananya pelayanan TIK yang Unggul (Excelent IT Service Delivery)	v	v	v	v	
		IK23	**Tingkat Maturasi SPIP**	**2,00**	**Level**	Bimbingan Teknis SPIP	v	v	v	v	BIRO PERENCANAAN
		IK24	**Persentase Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan**	**90,00**	**%**	Pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran bersumber Rupiah Murni dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)	v	v	v	v	BIRO KEUANGAN & PERLENGKAPAN



LAMPIRAN 6

Perjanjian Kinerja Revisi II
Kementerian Perhubungan Tahun 2018

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Karya Sumadi

Jabatan : Menteri Perhubungan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2018

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target PK Tahun 2018	Target Revisi PK Tahun 2018	Target Revisi II PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
SS1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	IK1	Rasio Konektivitas antar wilayah	Rasio	0,725	0,725	0,725
			Transportasi Darat		0,675	0,675	0,675
			Transportasi Laut		1,000	1,000	1,000
			Transportasi Udara		0,72	0,720	0,720
			Transportasi Perkeretaapian		0,31	0,310	0,310
			Transportasi Jabodetabek		0,63	0,630	0,630
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	IK2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional	Rasio	1,640	1,543	1,537
			Transportasi Laut		1,429	1,429	1,410
			Transportasi Udara		2,94	2,94	2,94
			Transportasi Perkeretaapian		0,55	0,26	0,26
		IK3	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi	Rasio	3,12	2,39	2,39
			Transportasi Laut		0,50	0,50	0,50
			Transportasi Udara		0,17	0,16	0,16
			Transportasi Perkeretaapian		8,70	6,50	6,50
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	IK4	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan	%	71,35	80,00	80,00
			Transportasi Darat		82,69	100,00	100,00
			Transportasi Perkeretaapian		60,00	60,00	60,00
		IK5	Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional	%	60,00	60,00	60,00
		IK6	Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi	%	79,31	79,31	76,49
			Transportasi Darat		83,24	83,24	83,24
			Transportasi Laut		80,00	80,00	68,70
			Transportasi Udara		87,00	87,00	87,00
			Transportasi Perkeretaapian		67,00	67,00	67,00
		IK7	Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek	Km/Jam	16,00	16,00	16,00
		IK8	Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan	%	60,00	60,00	60,00
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	IK9	Persentase Peningkatan kapasitas sarana transportasi	%	25,56	24,86	24,86
			Transportasi Darat		20,63	17,85	17,85
			Transportasi Laut		18,76	18,76	18,76
			Transportasi Udara		45,27	45,27	45,27
			Transportasi Perkeretaapian		17,57	17,57	17,57
		IK10	Persentase Peningkatan kapasitas prasarana transportasi	%	55,49	55,24	55,24
			Transportasi Darat		37,66	36,85	36,85
			Transportasi Laut		90,00	90,00	90,00
			Transportasi Udara		80,00	80,00	80,00
			Transportasi Perkeretaapian		14,30	14,10	14,10
		IK11	Modal Share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	%	29,00	29,00	29,00
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IK12	Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil	Rasio	1,21	1,52	1,52
			Transportasi Darat		0,49	0,49	0,49
			Transportasi Laut		0,68	0,68	0,68
			Transportasi Udara		2,84	3,38	3,38
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam	IK13	Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	80,00	80,00	80,00
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia	IK14	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi	%	82,50	82,50	82,50
SS8	Meningkatnya Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	IK15	Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan	%	80,00	80,00	80,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target PK Tahun 2018	Target Revisi PK Tahun 2018	Target Revisi II PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
SS9	Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub	IK16	Tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan	%	95,00 (IACM Level 3)	95,00 (IACM Level 3)	95,00 (IACM Level 3)
SS10	Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional	IK17	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat	%	90,00	80,00	80,00
SS11	Terwujudnya good governance & clean government di Kemenhub	IK18	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi	%	85,00	85,00	85,00
		IK19	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
		IK20	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	72,00	71,00	71,00
		IK21	Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat	3,00	3,00	3,00
		IK22	Persentase Kehandalan Sistem Informasi	%	97,00	97,00	97,00
		IK23	Tingkat Maturasi SPIP	Level	2,00	2,00	2,00
		IK24	Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan	%	90,00	90,00	90,00

Program		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp.	580.135.964
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp.	106.110.822
3. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Rp.	4.955.730.267
4. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Rp.	14.417.626.963
5. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Rp.	9.177.698.362
6. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Rp.	19.188.457.243
7. Program Penelitian dan Pengembangan	Rp.	143.830.906
8. Program Pengembangan SDM Perhubungan	Rp.	4.647.077.286
9. Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	Rp.	204.744.255

Jakarta, 2018
MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI



LAMPIRAN 7

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Revisi II Kementerian Perhubungan Tahun 2018

RENCANA AKSI ATAS REVISI II PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018

REVISI II PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018												
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET REVISI II PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
SS1	**Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan**	**IK1**	**Rasio Konektivitas Antar Wilayah**	**0,725**	**Rasio**						
			a. Transportasi Darat	0,675		Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat	v	v	v	v	DJPD
			b. Transportasi Perkeretaapian	0,310		- Peningkatan/rehabilitasi jalur KA	v	v	v	v	DJKA
						- Peningkatan/rehabilitasi jembatan KA	v	v	v	v	
						- Peningkatan/rehabilitasi persinyalan, dan telekomunikasi KA	v	v	v	v	
						- Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	v	v	v	v	
						- Pembinaan bidang keselamatan perkeretaapian	v	v	v	v	
						- Pengamanan perlintasan sebidang	v	v	v	v	
						- Pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan perkeretaapian	v	v	v	v	
			c. Transportasi Laut	1,000		Pengawasan, Pemenuhan dan Pemeliharaan Pada SBNP, GMDSS, VTS, Kapal Patroli, Kapal Kenavigasian serta Alur Pelayaran	v	v	v	v	DJPL
			d. Transportasi Udara	0,720		Pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan penerbangan	v	v	v	v	DJU
			e. Transportasi Jabodetabek	0,630		Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek	v	v	v	v	BPTJ
SS2	**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi**	**IK2**	**Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional**	**1,537**	**Rasio**						
			a. Transportasi Perkeretaapian	0,260		Audit Keselamatan Perkeretaapian dan Safety Assessment, Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian, Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api, Pemantauan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian	v	v	v	v	DJKA
			b. Transportasi Laut	1,410		Penerbitan telegram peringatan pencegahan kecelakaan kapal, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala, evaluasi monitoring perwira jaga dalam penerbitan SPB, Ramp Check, Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Hubla	v	v	v	v	DJPL
			c. Transportasi Udara	2,940		Meningkatkan frekuensi Ramp check keselamatan dan keamanan penerbangan, melakukan audit secara berkala terhadap operator penerbangan, melakukan program pengawasan (survaillance) dan bimbingan teknis kepada operator penerbangan, melaksanakan CASR	v	v	v	v	DJU

REVISI II PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018											
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET REVISI II PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
		IK3	**Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi**	**2,39**	**Rasio**						
			a. Transportasi Perkeretaapian	6,50		Melakukan penyidikan dan evaluasi tindak pidana perkeretaapian, penyuluhan regulasi pidana perkeretaapian dan sosialisasi tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang, identifikasi/pendataan dan peningkatan keselamatan di daerah rawan pengrusakan dan pencurian di jalur kereta api	v	v	v	v	DJKA
			b. Transportasi Laut	0,50		Melaksanakan instruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor UM.008/21/18/DJPL-16, peningkatan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan kapal-kapal tradisional di wilayah UPT Ditjen Perhubungan Laut, melakukan patroli bersama di Laut bersama Bakamla	v	v	v	v	DJPL
			c. Transportasi Udara	0,16		Melakukan bimtek, sosialisasi SARPs di bidang keamanan penerbangan termasuk dilakukan bersama dengan kantor OBU 1-10, melakukan pengawasan di bidang keamanan penerbangan terhadap UPBU dan BUBU secara berkelanjutan, melakukan upaya peningkatan kualifikasi SDM, prosedur dan fasilitas keamanan penerbangan	v	v	v	v	DJU
SS3	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi**	**IK4**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan**	**80,00**	**%**						
			a. Transportasi Darat	100,00		Menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan telah berhasil mengimplementasikan sistem tersebut melalui penetapan target jumlah kota melalui pendanaan APBN dan APBD	v	v	v	v	DJPD
			b. Transportasi Perkeretaapian	60,00		Menerapkan sistem angkutan massal berbasis kereta api telah berhasil mengimplementasikan sistem tersebut melalui penetapan target jumlah kota melalui pendanaan APBN dan APBD	v	v	v	v	DJKA

REVISI II PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018										
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET REVISI II PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
						T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
	IK5	**Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Nasional**	**60,00**	**%**	- Penyusunan Measurement, Reporting & Verification (MRV) RAN-GRK di Sektor Transportasi	v	v	v	v	DJPD, DJKA, DJPL, DJU, PPTB
					- Bimbingan Teknis Audit Lingkungan Hidup Infrastuktur Transportasi	v	v	v	v	
					- Pendampingan dan Evaluasi Dokumen Lingkungan Di Sektor Transportasi;	v	v	v	v	
	IK6	**Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi**	**76,49**	**%**						
		a. Transportasi Darat	83,24		Monitoring dan evaluasi performance sektor transportasi darat	v	v	v	v	DJPD
		b. Transportasi Perkeretaapian	67,00		Monitoring dan evaluasi performance sektor transportasi perkeretaapian	v	v	v	v	DJKA
		c. Transportasi Laut	68,70		Monitoring dan evaluasi performance sektor transportasi laut	v	v	v	v	DJPL
		d. Transportasi Udara	87,00		Monitoring dan evaluasi performance sektor transportasi udara	v	v	v	v	DJU
	IK7	**Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Angkutan Umum pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek**	**16,00**	**Km/Jam**	Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	v	v	v	v	BPTJ
	IK8	**Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan**	**60,00**	**%**	- Penyiapan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan prasarana transportasi	v	v	v	v	PPTB
					- Penilaian/ Evaluasi Pelayanan Prima Sektor Transportasi	v	v	v	v	
					- penyiapan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana transportasi	v	v	v	v	
					- Workshop Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Sektor Transportas	v	v	v	v	
	IK9	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi**	**4,46**	**%**						
		a. Transportasi Darat	17,85		- Pelaksanaan pembangunan bus BRT	v	v	v	v	DJPD
					- Pelaksanaan pembangunan kapal penyeberangan	v	v	v	v	
					- Pelaksanaan pembangunan bus pemadu moda	v	v	v	v	
					- Pelaksanaan pembangunan bus perintis	v	v	v	v	

REVISI II PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018									
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)	TARGET REVISI II PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
	b. Transportasi Perkeretaapian	17,57		- Pengadaan sarana KA termasuk kereta kerja (unit)	v	v	v	v	DJKA
				- Pengadaan sarana KA (unit) pada (KRL) sistem AC untuk lintas Yogyakarta - Solo	v	v	v	v	
				- Pengadaan fasilitas/peralatan sarana KA	v	v	v	v	
				- Perawatan/ pengoperasian sarana dan fasilitas sarana KA	v	v	v	v	
				- Penyusunan dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Sarana Perkeretaapian	v	v	v	v	
				- Pembinaan penyelenggaraan sarana Perkeretaapian	v	v	v	v	
	c. Transportasi Laut	18,76		- Pembangunan baru kapal negara angkutan laut perintis	v	v	v	v	DJPL
				- Pembangunan kapal negara angkutan laut perintis	v	v	v	v	
				- Pembangunan Kapal Rakyat	v	v	v	v	
				- Pembangunan/ pengadaan fasilitas pendukung Lalu lintas dan Angkutan Laut	v	v	v	v	
				- Pembangunan baru kapal negara Kenavigasian	v	v	v	v	
				- Pembangunan Reverse Osmosis (RO)	v	v	v	v	
				- Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	v	v	v	v	
				- Pembangunan / Pengembangan VTS	v	v	v	v	
				- Pembangunan Kapal Patroli	v	v	v	v	
				- Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pendukung Penjagaan Laut dan Pantai: (Perbaikan dan Perawatan Kapal/Pengadaan Helikopter/Pengadaan Senjata/Amunisi/Pengadaan Penanggulangan Pencemaran/Peralatan SAR/Giro Vertikal/RIB/ECDIS dan Sistem Mobile Surveillance Kapal Patroli/Mobil Patroli Lapangan/ Drone/ Pengembangan Pangkalan)	v	v	v	v	
	d. Transportasi Udara	45,27		- Pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara	v	v	v	v	DJU
				- Subsidi angkutan BBM	v	v	v	v	

REVISI II PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018									
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)	TARGET REVISI II PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
	IK10 Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi	**9,21**	**%**						
	a. Transportasi Darat	36,85		- Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan marka jalan	v	v	v	v	DJPD
				- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan rambu lalu lintas	v	v	v	v	
				- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan APILL	v	v	v	v	
				- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan penerangan jalan	v	v	v	v	
				- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan alat pengawasan dan pengaman pengguna jalan (guard rail)	v	v	v	v	
				- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan SBNP	v	v	v	v	
				- Pelaksanaan pengadaaan dan pemasangan rambu sungai	v	v	v	v	
	b. Transportasi Perkeretaapian	14,10		- Rehabilitasi dan peningkatan keandalan jalur KA	v	v	v	v	DJKA
				- Pembangunan jalur ganda KA dan reaktivasi	v	v	v	v	
				- Pembangunan jalur lingkar KA layang	v	v	v	v	
				- Rehabilitasi dan peningkatan keandalan jembatan/underpass/ flyover KA	v	v	v	v	
				- pengadaan material rel	v	v	v	v	
				- pengadaan material wesel	v	v	v	v	
				- Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan keandalan stasiun/bangunan operasional KA	v	v	v	v	
				- Pembangunan stasiun/bangunan operasional KA	v	v	v	v	
				- Rehabilitasi dan peningkatan persinyalan dan telekomunikasi KA	v	v	v	v	
				- Pembangunan persinyalan dan telekomunikasi KA	v	v	v	v	
				- Peningkatan/ pembangunan Bangunan Khusus	v	v	v	v	
				- Pemagaran prasarana dan fasilitas prasarana perkeretaapian	v	v	v	v	
				- Pengamanan perlintasan sebidang	v	v	v	v	
				- Pengadaan dan penertiban lahan	v	v	v	v	
				- Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana	v	v	v	v	
				- Pengadaan MTT (Multi Tie Tamper Machine), Profile Ballast regulator, Track Laying Machine, Flash Butt Welding	v	v	v	v	
				- Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/ IMO	v	v	v	v	

REVISI II PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018											
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET REVISI II PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
			c. Transportasi Laut	90,00		- Subsidi Angkutan Laut Perintis, Angkutan Ternak dan Angkutan Kapal Rede	v	v	v	v	DJPL
						- Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Non Komersial	v	v	v	v	
						- Pengerukan Alur Pelayaran	v	v	v	v	
						- Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pendukung Perkapalan dan Kepelautan (Pengadaan Enginee Room Simulator / Pengadaan Full Mission Bridge Simulator / Pengadaan Komputer Base Assessment)	v	v	v	v	
						- Pembangunan Sistem Telekomunikasi Pelayaran	v	v	v	v	
			d. Transportasi Udara	80,00		- Pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara	v	v	v	v	DJU
						- Subsidi angkutan BBM	v	v	v	v	
						- Rehabilitasi bandar udara (antara lain perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan, pekerjaan tanah, rehab gedung terminal, gedung operasional, dll)	v	v	v	v	
						- Pengembangan bandar udara	v	v	v	v	
						- Pembangunan bandar udara	v	v	v	v	
						- Peningkatan fasilitas pelayanan darurat	v	v	v	v	
						- Peningkatan fasilitas keamanan penerbangan	v	v	v	v	
		IK11	**Modal Share (Pangsa Pasar) angkutan umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek**	**29,00**	**%**	- Pengembangan Database Pergerakan Orang dan Barang di Jabodetabek	v	v	v	v	BPTJ
						- Perencanaan Teknis Skema Pembiayaan Pembangunan TOD di Jabodetabek	v	v	v	v	
						- Perencanaan Teknis Skema Pembiayaan Transjabodetabek	v	v	v	v	
						- Perencanaan Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Fasilitas Integrasi	v	v	v	v	
						- Pengadaan Software Simulasi Pergerakan Pernumpang	v	v	v	v	
						- Pengembangan Sistem Informasi Jaringan dan Angkutan Umum Jabodetabek	v	v	v	v	
						- Perencanaan Teknis Penyusunan Pedoman Perhitungan Subsidi untuk Angkutan Umum di Jabodetabek	v	v	v	v	
						- Perencanaan Teknis Penataan Jaringan dan Simpul Angkutan Barang di Jabodetabek	v	v	v	v	
						- Evaluasi Sasaran Pembangunan Transportasi Terintegrasi Jabodetabek	v	v	v	v	
						- Penyusunan Metode Pengukuran IKU Pengembangan Transportasi Jabodetabek	v	v	v	v	
						- Koordinasi Perencanaan Transportasi Jabodetabek	v	v	v	v	
						- Evaluasi Kinerja Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Jabodetabek	v	v	v	v	
						- Permodelan Sistem Pembayaran Angkutan Umum Terintegrasi	v	v	v	v	

REVISI II PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018											
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET REVISI II PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
						- Pengembangan Peta Interaktif Sistem Informasi Jaringan dan Angkutan Umum Jabodetabek	v	v	v	v	
		IK12	**Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil**	**1,52**	**Rasio**						
			a. Transportasi Darat	0,49		Pemberian lintas/rute angkutan perintis dimaksudkan dalam rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi darat	v	v	v	v	DJPD
			c. Transportasi Laut	0,68		Pemberian lintas/rute angkutan perintis dimaksudkan dalam rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi laut	v	v	v	v	DJPL
			d. Transportasi Udara	3,38		Pemberian lintas/rute angkutan perintis dimaksudkan dalam rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi udara	v	v	v	v	DJU
SS6	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi**	**IK13**	**Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan**	**80,00**	**%**	Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	v	v	v	v	BIRO HUKUM
SS7	**Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi**	**IK14**	**Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi**	**82,50**	**%**	- Pelaksanaan diklat transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	v	v	v	v	BPSDMP
						- Pelaksanaan diklat transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan.	v	v	v	v	
						- Penyelenggaraan diklat transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	v	v	v	v	
SS8	**Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan**	**IK15**	**Persentase Pemanfaatan Penelitian yang dijadikan Bahan Rekomendasi Kebijakan**	**80,00**	**%**	Persiapan pembentukan tim studi, penyusunan TOR, pembahasan pelaksanaan kegiatan TA. 2017, Penyusunan laporan dan pelaksanaan survey, Penyusunan laporan interim	v	v	v	v	BALITBANG
SS9	**Meningkatnya Kualitas Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan**	**IK16**	**Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan**	**95% (IACM Level 3)**	**%**	Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat I, II, III, IV dan V/Layanan Audit Internal	v	v	v	v	ITJEN

REVISI II PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018											
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET REVISI II PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
SS10	**Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional**	**IK17**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi Penerbangan yang Bersertifikat**	**80,00**	**%**	Melaksanakan Diklat Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi Penerbangan yang Bersertifikat	v	v	v	v	BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI
SS11	**Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Kementerian Perhubungan**	**IK18**	**Persentase Indeks Reformasi Birokrasi**	**85,00**	**%**	Melaksanakan Entery meeting Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Survey terhadap masyarakat pengguna layanan jasa utama	v	v	v	v	BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI
		IK19	**Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan**	**WTP**	**Opini BPK**	Penyusunan Jumlah laporan hasil penata usahaan, pembukuan, verifikasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	v	v	v	v	BIRO KEUANGAN & PERLENGKAPAN
		IK20	**Nilai AKIP Kementerian Perhubungan**	**71,00**	**Nilai**	- Bimbingan Teknis *e-Performance* - Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal	v v	v v	v v	v v	BIRO PERENCANAAN
		IK21	**Keterbukaan Informasi Publik**	**3,00**	**Peringkat**	- Penyelenggaraan komunikasi publik melalui pengelolaan opini publik berbasis pemberitaan dan pengelolaan media sosial - Penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi, publikasi serta edukasi publik tentang kebijakan dan kinerja - Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi yang baik	v v v	v v v	v v v	v v v	BKIP

REVISI II PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018											
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		TARGET REVISI II PK TAHUN 2018	SATUAN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				UNIT KERJA PELAKSANA
							T1	T2	T3	T4	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
		IK22	**Persentase Kehandalan Sistem Informasi**	**97,00**	**%**	- Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT-Governance) yang terencana dan akuntabel	v	v	v	v	PUSTIKOMHUB
						- Memberdayakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan dan Unit Kerja TIK di Kementerian Perhubungan dalam mengoperasikan sistem keamanan TIK dan mampu menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang (Cyber Security)	v	v	v	v	
						- Transformasi Kementerian Perhubungan menjadi organisasi yang mempunyai keunggulan TIK dalam penyediaan aksesibilitas data darimanapun dan kapanpun (Teknologi yang inovatif)	v	v	v	v	
						- Terlaksananya pelayanan TIK yang Unggul (Excelent IT Service Delivery)	v	v	v	v	
		IK23	**Tingkat Maturasi SPIP**	**2,00**	**Level**	Bimbingan Teknis SPIP	v	v	v	v	BIRO PERENCANAAN
		IK24	**Persentase Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan**	**90,00**	**%**	Pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran bersumber Rupiah Murni dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)	v	v	v	v	BIRO KEUANGAN & PERLENGKAPAN



LAMPIRAN 8

Permenhub Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kementerian Perhubungan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 70 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai perencanaan dan alat ukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Kementerian Perhubungan;

b. bahwa sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/612/M.AA.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, Indikator Kinerja Utama yang semula berbasis keluaran/*output* diubah menjadi berbasis manfaat/*outcome*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
2. Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga adalah dokumen Rencana Keuangan Tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
4. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
5. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
6. Laporan Kinerja adalah laporan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah serangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas manfaat atau *outcome* dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang dilaksanakan oleh satuan kerja.
9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran atau *output* dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
10. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

11. Unit Kerja adalah unit organisasi tingkat Eselon I, unit organisasi tingkat Eselon II, dan unit organisasi mandiri (Unit Pelaksana Teknis/UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 2

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing Unit Organisasi Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan, terdiri atas:

a. penyusunan rencana kinerja tahunan;
b. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
d. penyusunan laporan kinerja; dan
e. evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Setiap Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) di masing-masing unit kerjanya.
(2) Setiap Pimpinan Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan wajib menyusun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di masing-masing unit kerjanya.

Pasal 5

(1) Dalam Perjanjian Kinerja kepada setiap Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan harus menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahun.
(2) Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap Pimpinan Unit

Organisasi Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan harus melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja.

(3) Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 6

(1) Dalam rangka penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, setiap Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon II dan Unit Kerja Mandiri (Unit Pelaksana Teknis/UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan harus melakukan peyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja.

(2) Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon I.

Pasal 7

Untuk meningkatkan efektifitas Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka kepada:

a. Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan diberikan tugas dan wewenang sebagai berikut:

   1) melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja; dan

2) melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas Unit Organisasi Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Unit Organisasi Tingkat Eselon I, dan melaporkan hasilnya kepada Menteri.

Pasal 8

Penetapan Indikator Kinerja Utama pada masing-masing tingkat Eselon I sampai dengan unit kerja di bawahnya dilakukan melalui Keputusan Pejabat Eselon I.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1138

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 70 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (*OUTCOME*)		SATUAN
SS1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	IK1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	IK2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional	Rasio
		IK3	Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi	Rasio
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	IK4	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan	%
		IK5	Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Nasional	%
		IK6	Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi	%
		IK7	Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Angkutan Umum pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek	Km/Jam
		IK8	Tingkat Penerapan Pedoman	%

			Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan	
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	IK9	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi	%
		IK10	Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi	%
		IK11	*Modal Share* (Pangsa Pasar) angkutan umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	%
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IK12	Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Rasio
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi	IK13	Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	IK14	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi	%
SS8	Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan	IK15	Persentase Pemanfaatan Penelitian yang dijadikan Bahan Rekomendasi Kebijakan	%
SS9	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan	IK16	Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan	%
SS10	Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional	IK17	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi Penerbangan yang Bersertifikat	%

SS11	Terwujudnya *Good Governance&Clean Government di* Kementerian Perhubungan	IK18	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi	%
		IK19	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Opini BPK
		IK20	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai
		IK21	Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat
		IK22	Persentase Kehandalan Sistem Informasi	%
		IK23	Tingkat Maturasi SPIP	Level
		IK24	Persentase Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan	%

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

[illegible] LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001



LAMPIRAN 9

Manual IKU
Kementerian Perhubungan Tahun 2018

CARA PERHITUNGAN CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	IK 1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah

DEFINISI

Darat:
Rasio pencapaian tingkat konektivitas yang diukur dari jumlah pelayanan angkutan darat (jalan dan penyeberangan) yang terlayani terhadap target pelayanan angkutan darat (kebutuhan nasional)

Laut:
Rasio konektivitas laut diukur melalui jumlah pelabuhan laut yang disinggahi oleh trayek liner untuk memastikan adanya layanan transportasi ke wilayah *hinterland* pelabuhan tersebut.

Trayek liner : Pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan terjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, trayek tersebut antara lain sebagai berikut: Trayek tol laut, angkutan Pelni, angkutan laut subsidi perintis, dan angkutan ternak.

Udara:
Rasio konektivitas transportasi udara merupakan peningkatan pelayanan perpindahan orang dan kargo antar wilayah ditinjau dari cakupan pelayanan Bandar Udara di Indonesia pada periode renstra.

KA:
Rasio Konektivitas antar wilayah yang dimaksud dalam hal ini adalah perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubungan pada tahun berjalan dengan rencana PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang akan terhubung sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas)

BPTJ:
Rasio jaringan jalan yang dilayani Angkutan Umum terhadap total panjang jalan

SUMBER DATA

Darat:
1. SK Pelayanan Perintis Angkutan Jalan →Direktorat Angkutan dan Multimoda
2. SK Perintis Angkutan Penyeberangan →Direktorat Angkutan dan Multimoda
3. Rencana Strategis (Renstra) → Ditjen Perhubungan Darat

Laut:

1. Jumlah realisasi trayek angkutan barang dan penumpang laut diperoleh dari Direktorat LALA
2. Jumlah pelabuhan yang eksisting diperoleh dari :
   a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama
   b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
   c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 130 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit penyelenggara Pelabuhan
   d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Udara:

Direktorat Bandar Udara

KA:

Data terkait panjang jalur KA yang terbangun dapat diperoleh dari :

1. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
2. Seluruh Balai Teknik Perkeretaapian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
3. Data terkait Luas Wilayah yang terlayani oleh KA :BPS

BPTJ:

KRL, Bus Jalur Khusus (Busway), *Bus Reguler Mixed Traffic* (JR *Connexion*; Bus PATAS, Bus Sedang, Angkot) di wilayah Jabodetabek

CARA MENGHITUNG

Darat :

$$\text{rasio konektivitas antar wilayah angkutan jalan} = \frac{\sum \text{trayek yang dilayani}}{\sum \text{kebutuhan trayek}}$$

$$\text{rasio konektivitas antar wilayah angkutan penyeberangan} = \frac{\sum \text{lintas penyeberangan yang beroperasi}}{\sum \text{target kebutuhan lintas penyeberangan}}$$

Laut :

$$\text{rasio konektivitas antar wilayah} = \frac{\sum \text{pelabuhan yang dilayani angkutan laut (pemerintah)}}{\sum \text{total pelabuhan laut yang beroperasi}}$$

Udara :

$$\text{rasio konektivitas antar wilayah} = \frac{\text{luas cakupan area pelayanan bandara}}{\text{luas wilayah daratan Indonesia}}$$

KA :

$$\text{rasio konektivitas antar wilayah} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/KSN Terhubung jaringan KA pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah rencana PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/KSN terhubung jaringan KA sesuai RIPNas}}$$

BPTJ:

$$\text{rasio konektivitas antar wilayah} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(koridor)\ i}{(\text{jalan})\ \text{j}}$$

Rumus Gabungan:

$$\text{rasio konektivitas antar wilayah} = \begin{matrix}(\text{Rasio Darat x bobot}) + (\text{Rasio Laut x bobot}) + \\ (\text{Rasio Udara x bobot}) + (\text{Rasio KA x bobot}) + \\ (\text{Rasio BPTJ x bobot})\end{matrix}$$

dimana bobot :

- Darat : 30%
- Laut : 30%
- Udara : 20%
- KA : 15%
- BPTJ : 5%

SATUAN

Darat : Rasio
Laut : Rasio
Udara : Rasio
KA : Rasio konektifitas / 1.000 km2
BPTJ : Rasio

PENANGGUNG JAWAB DATA

Darat: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Laut:

- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut
- Direktorat Kepelabuhanan

Udara: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

KA: Direktorat Prasarana Perkeretaapian & Setditjen Perkeretaapian

BPTJ

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	IK 2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional

DEFINISI

Laut:
Kejadian kecelakaan pelayaran yang disebabkan oleh teknis maupun manusia pada setiap 10.000 Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan

Udara:
Mengukur *Accident* dengan kemungkinan besar menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan pada setiap 1 juta *flight* pada tahun tertentu

KA:
Rate of Accident (RoA) transportasi perkeretaapian merupakan salah satu alat ukur untuk menganalisis keselamatan perkeretaapian yang mangacu pada jumlah kecelakaan dan dinormalisasi dengan perjutaan Km tempuh (Km *traveled*) pada tahun tersebut.

SUMBER DATA

Laut:
1. Laporan kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan manusia
2. Jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan

Udara:
Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

KA:
1. Data terkait Jumlah Kecelakaan dapat diperoleh dari :
   Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
2. Data terkait Kilometer Tempuh :
   Direktorat Lalu LIntas dan Angkutan KA, PT. KAI (Persero),BPS

CARA MENGHITUNG

Laut:

$$\frac{\text{jumlah kejadian kecelakaan kapal}}{\text{jumlah SPB yang diterbitkan}} \times 10.000 \text{ SPB}$$

Udara:

$$\frac{\text{Jumlah } \textit{Accident} \text{ (AOC 121 dan AOC 135)}}{\textit{Aircraft Departure} \text{(AOC 121 dan AOC 135)}} x \ 1.000.000$$

KA:

$$\textit{rate of accident} = \frac{\text{jumlah kecelakaan}}{\text{Km tempuh}} \times 1.000.000$$

Rumus Gabungan:

$$\text{Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional} = (\text{Rasio Laut} \times \text{Bobot}) + (\text{Rasio Udara} \times \text{Bobot}) + \text{Rasio KA} \times \text{Bobot})$$

dimana bobot :

- Laut : 33,33%
- Udara : 33,33%
- KA : 33,33%

SATUAN

Laut : Ratio kejadian kecelakaan per 10.000 SPB
Udara : Rasio
KA : Rasio Kejadian Kecelakaan / 1.000.000 Km

PENANGGUNG JAWAB DATA

Laut:

- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- Direktorat KPLP

Udara: Ditjen Perhubungan Udara

KA: Direktorat Keselamatan Perkeretaapian & Setditjen Perkeretaapian

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	IK 3	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi

DEFINISI

Laut:
Rasio jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut di perairan Indonesia setiap 100.000 SPB yang diterbitkan

Udara:
Tingkat jumlah pengaktifan *contingency plan* kondisi merah pada Bandar udara yang melayani ≥ 500.000 penumpang per tahun

KA:
Rasio Gangguan Keamanan sektor transportasi kereta api yang dilakukan perhitungannya yaitu jumlah kejadian gangguan keamanan (*vandalisme*) dan dinormalisasi dengan perjutaan Km tempuh (Km *traveled*)

SUMBER DATA

Laut:
1. Laporan kejadian gangguan keamanan dari Direktorat KPLP
2. Laporan penanganan gangguan kemanan dari Direktorat KPLP

Udara: Direktorat Keamanan Penerbangan

KA:
1. Data terkait Jumlah Gangguan Keamanan (*Vandalisme*) dapat diperoleh dari : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
2. Data terkait Kilometer Tempuh : Direktorat Lalu LIntas dan Angkutan KA, PT. KAI (Persero), BPS

CARA MENGHITUNG

Laut:

$$\frac{\text{jumlah kejadian gangguan keamanan}}{\text{jumlah SPB yang diterbitkan}} \times 100.000 \text{ SPB}$$

Udara:

$$\frac{\text{jumlah pengaktifan } \textit{contigency plan} \text{ kondisi merah}}{\text{jumlah bandara yang melayani} \geq 500.000 \text{penumpang per tahun}}$$

KA:

$$\frac{\text{jumlah kejadian gangguan keamanan}}{\text{Km tempuh}} \times 1.000.000$$

Rumus Gabungan :

$$\sum \frac{\text{Rasio Laut} + \text{Rasio Udara} + \text{Rasio KA}}{3}$$

SATUAN
Laut : Persentase (%) **Udara :** Rasio **KA :** Rasio Gangguan Keamanan / 1.000.000 Km
PENANGGUNG JAWAB DATA
Laut: • Direktorat Jenderal Perhubungan Laut • Direktorat KPLP **Udara:** Ditjen Perhubungan Udara **KA:** Direktorat Keselamatan Perkeretaapian & Setditjen Perkeretaapian

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	IK 4	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan

DEFINISI

Darat

Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan adalah perbandingan antara jumlah kota yang telah menerapkan BRT dengan jumlah target kota yang menerapkan BRT

KA:

Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan diperoleh dari perbandingan antara jumlah kota yang terlayani angkutan KA perkotaan pada tahun berjalan dibandingkan dengan rencana kota yang terlayani angkutan KA perkotaan sampai dengan tahun 2019 (sebanyak 10 kota) dikali 100%

Baseline Tahun 2014 : jumlah angkutan massal perkotaan berbasis jalan rel sebanyak 5 kota

SUMBER DATA

Darat:

a. Rencana Induk Transportasi Darat (RITD) → Ditjen Perhubungan Darat
b. SK Penyerahan Bus BRT →Direktorat Angkutan dan Multimoda

KA:

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA & Setditjen Perkeretaapian

CARA MENGHITUNG

Darat:

$$\frac{\sum \text{kota yang telah menerapkan BRT}}{\sum \text{target kota yang menerapkan BRT}} \times 100\%$$

KA:

$$\frac{\text{Jumlah kota yang dilayani KA Perkotaan pada tahun berjalan}}{\text{Target Jumlah Kota yang dilayani KA Perkotaan pada 2019 (10 Kota)}} \times 100\%$$

Rumus Gabungan :

$$\frac{\%\ \text{darat} + \%\ \text{KA}}{2}$$

SATUAN

Darat : %
KA : Persen (%)

PENANGGUNG JAWAB DATA

Darat : Ditjen Perhubungan Darat
KA : Direktorat Lalu LIntas dan Angkutan KA & Setditjen Perkeretaapian

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	IK 5	Persentase Penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional

DEFINISI

Darat:
Tingkat/ besarnya penurunan jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktifitas transportasi darat

Laut:
Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) dari Sektor Transportasi Laut Nasional yang terdiri dari komponen penggunaan teknologi pada kapal dan penggunaan energi *solar cell* untuk pengoperasian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) diperbandingkan dengan kondisi *base-line.*

Udara:
Persentase capaian penurunan emisi GRK setiap tahunnya yang dihitung berdasarkan baseline target penurunan pada tahun 2019 (15.945 juta ton CO2), mengacu perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

KA:
Persentase peningkatan kontribusi sub sektor perkereretaapian dalam rangka Penurunan Gas Rumah Kaca merupakan perbandingan peningkatan jumlah penurunan gas rumah kaca pada tahun berjalan dibanding dengan baseline tahun 2014.

PPTB:
Persentase capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) setiap tahunnya dihitung berdasarkan baseline target penurunan emisi setiap tahun sampai dengan 2019 (18,962 juta ton CO2e), mengacu Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

SUMBER DATA

Darat:
1. Laporan kinerja ATCS, untuk aksi mitigasi pembangunan ITS *(Intelelligent Transport System)*/ ATCS *(Area Traffic Control System)* →Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat
2. Laporan Operasional Unit Bus BRT untuk Aksi Mitigasi Reformasi Sistem Transit-BRT *System*→ Direktorat Angkutan dan Multimoda
3. Laporan Kegiatan Pelatihan *Smart Driving* (*Eco Driving*) → Direktorat Pembinaan Keselamatan

Laut:
1. Perhitungan penggunaan teknologi pada kapal dari PPTB
2. Perhitungan penggunaan energi solar cell pengoperasian SBNP dari Direktorat Kenavigasian
3. Kondisi *baseline* GRK transportasi laut

Udara:
1. RPJMN
2. Direktorat Bandar Udara
3. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

KA:
1. Data terkait Realisasi Jumlah Penumpang dan Barang pada tahun berjalan : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA & PT. KAI
2. Data Terkait panjang lintas yang beroperasi :
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian

PPTB:
1. RPJMN
2. Renstra Kementerian Perhubungan
3. Laporan Realisasi dari Unit Kerja Terkait :
   a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
   b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
   c. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
   d. Direktorat Jenderal Perkeretaapian

CARA MENGHITUNG

Darat :
a. Penurunan Emisi (TCO_2e) = Emisi CO_2 Per Tahun Setelah Penerapan ATCS - Emisi CO_2 Per Tahun Sebelum Penerapan ATCS
b. Total Reduksi CO_2 dari sistem BRT = Penurunan emisi dari shifting – total CO2 dari operasional BRT
c. Pelatihan *Smart Driving* (*Eco Driving*)

$$\text{jumlah penurunan emisi } (TCO_2e) = \frac{\sum \text{penurunan emisi } CO_2 \text{ tahun berjalan}}{\sum \text{target penurunan emisi } CO_2 \text{tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\text{total reduksi } CO_2 \text{ dari sistem BRT} = \frac{\sum \text{penurunan emisi } CO_2 \text{ tahun berjalan}}{\sum \text{target penurunan emisi } CO_2 \text{tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\text{jumlah penurunan emisi Eco Driving } (TCO_2e) = \frac{\sum \text{penurunan emisi } CO_2 \text{ tahun berjalan}}{\sum \text{target penurunan emisi } CO_2 \text{tahun berjalan}} \times 100\%$$

Laut:

$$\frac{\text{Produksi Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Transportasi Laut}}{\text{Produksi Baseline Gas Rumah Kaca (GRK) Transportasi Laut}} \times 100\%$$

Udara:

$$\frac{\text{Jumlah Penurunan GRK}}{\text{Target Nasional Penurunan GRK Sub Sektor Transportasi Udara}} \times 100\%$$

KA:

$$\frac{\text{Peningkatan jumlah penurunan Gas Rumah Kaca}}{\text{Baseline penurunan Gas Rumah Kaca}} \times 100\%$$

Baseline tahun 2014: Jumlah penurunan Gas Rumah Kaca sebanyak 0,042 Juta Ton CO_2

Metode perhitungan yang dilakukan untuk **penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sub sektor Kereta Api** dengan perhitungan yakni sebagai berikut :

a. Rumus

$\Delta E = E_{KBM} - E_{KA}$

dimana, ΔE = Indikasi pengurangan emisi kendaraan bermotor oleh KA (kg/thn)

E_{KBM} = Jumlah emisi kendaraan bermotor yang direduksi dengan KA (kg/thn)

E_{KA} = Jumlah emisi yang dihasilkan oleh KA (kg/thn)

$K_{BBM} = \ell_{BBM} \times p \times q$

dimana, K_{BBM} = Jumlah konsumsi BBM (ltr/thn)

ℓ_{BBM} = Konsumsi bahan bakar spesifik (ltr/km/pnp)

p = Panjang rata-rata perjalanan (km)

q = Jumlah penumpang atau barang yang melewati rute tersebut (org/thn)

$E_{co2} = K_{BBM} \times e_{co2}$

dimana, E_{co2} = Jumlah emisi CO2 (kg/thn)

K_{BBM} = Jumlah konsumsi BBM (ltr/thn)

e_{co2} = Tingkat emisi bahan bakar (kg/ltr)

b. Koefisien

- Tingkat emisi bahan bakar (Sumber: Studi Kebutuhan Energi Sub Sektor Perkeretaapian, 2009)
  e_{co2} Solar = 2,6664 kg/lt
  e_{co2} Premium = 2,2606 kg/lt
  e_{co2} BBG = 1,4659 kg/lt
- Konsumsi bahan bakar spesifik angkutan penumpang (Sumber: Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS,2010)
  $\ell_{BBM\ KA}$ = 0,002 ltr/pnp/km
  $\ell_{BBM\ BUS}$ = 0,0125 ltr/pnp/km
  $\ell_{BBM\ Mobil}$ = 0,020 ltr/pnp/km
  $\ell_{BBM\ Spd\ Mtr}$ = 0,025 ltr/pnp/km
- Konsumsi bahan bakar spesifik angkutan barang (Sumber: Studi Pengembangan Transportasi KA yang efisien dan ramah lingkungan,2010)
  $\ell_{BBM\ KA}$ = 0,00032 ltr/ton/km
  $\ell_{BBM\ TRUCK}$ = 0,018 ltr/ton/km

c. Asumsi
   1) Jumlah penumpang atau barang yang melewati rute (q) dihitung dengan mengalikan prediksi jumlah penumpang tahunan dengan *load factor* sebesar 0,7. *Load factor* sebesar 0,7 diperoleh dari Studi Perhitungan Load Factor Kereta Api Ekonomi Nasional (2009) yang menggambarkan tingkat okupansi penumpang sebesar 70%;
   2) Panjang rata-rata perjalanan (p) diperoleh dengan mengalikan panjang lintasan dengan 0,5. Nilai 0,5 diambil dengan mengasumsikan hanya 50% dari jumlah penumpang yang menjalani lintasan program/proyek tersebut;
   3) Proporsi pengguna kendaaraan bermotor yang menggunakan KA (emisi yang direduksi dengan KA) adalah bus 0,2; mobil 0,2; sepeda motor 0,4.

Metode tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup.

PPTB:
Secara umum metodologi perhitungan penurunan emisi GRK sektor transportasi merupakan selisih dari jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas transportasi eksisting dikurangi jumlah emisi yang dihasilkan dari aktifitas mitigasi.

$$Emisi\ GRK = Konsumsi\ Energi\ x\ Faktor\ Emisi$$

$$Penurunan\ Emisi\ (\Delta\ emisi)\ = emisi\ baseline - \ emisi\ aksi\ mitigasi$$

$$Prosentase\ Penurunan\ emisi\ (\%) = \frac{\Delta\ emisi\ tahun\ x}{target\ \Delta\ emisi\ tahun\ x}\ x\ 100\%$$

Keterangan:
1. Perhitungan konsumsi energi tergantung pada aksi mitigasi yang dilakukan.
2. Emisi Baseline
3. Peningkatan emisi baseline bertujuan untuk menghitung tingkat emisi GRK sebelum adanya kegiatan emisi (*Business as Usuall* BAU) dan proyeksinya di masa depan. Secara teknis, perhitungan ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah emisi yang dihasilkan dari satu kegiatan berdasarkan pada :
   a. Data historis (hasil inventarisasi emisi GRK). Data historis menggunakan data sekurang-kurangnya data 5 (lima) tahun terakhir.
   b. Data/informasi masa depan tanpa adanya intervensi kebijakan/teknologi mitigasi perubahan iklim.

SATUAN

Darat **:** Persentase (%)
Laut **:** Persentase (%)
Udara **:** Persentase (%)
KA **:** Persentase (%)
PPTB **:**Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB DATA
Darat: Ditjen Perhubungan Darat **Laut:** 1. PPTB 2. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 3. Direktorat Kenavigasian **Udara:** Ditjen Perhubungan Udara **KA:** Setditjen Perkeretaapian, Direktorat Lalu LIntas dan Angkutan KA & Direktorat Prasarana **PPTB:** Koordinator : Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Unit Kerja Terkait : 1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 2. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 3. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan 4. Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	IK 6	Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi

DEFINISI

Darat:
Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) pelayanan transportasi penyeberangan merupakan keadaan dimana waktu keberangkatan kapal penyeberangan sesuai dengan jadwal yang telah diterbitkan terhadap jumlah *trip* dalam 1 tahun

Laut:
Pencapaian Kinerja Pelayanan Transportasi Laut dengan rata-rata capaian atas Waiting Time (WT) + ApproachTime (AT) + Effective Time (ET:BT) sesuai dengan standar kinerja pelabuhan

Udara:
Persentase suatu keadaan dimana waktu keberangkatan sesuai dengan jadwal penerbangan yang telah diterbitkan pada tahun tertentu

KA:
Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) sub sektor perkeretaapian merupakan perbandingan antara realisasi ketepatan waktu perjalanan kereta api dengan target ketepatan waktu perjalanan kereta api pada tahun berjalan

SUMBER DATA

Darat:
Laporan Kinerja Pelayanan Angkutan Penyeberangan →Direktorat Angkutan dan Multimoda

Laut:
Laporan pencapaian kinerja pelabuhan dari OP/KSOP/UPP – Direktorat Kepelabuhanan

Udara:
Direktorat Angkutan Udara

KA:
Direktorat Lalu LIntas dan Angkutan KA & PT. KAI

CARA MENGHITUNG

Darat:

$$\frac{\text{Jumlah kejadian waktu } \textit{on time} \text{ keberangkatan kapal penyeberangan dalam satu tahun}}{\text{Jumlah realisasi trip dalam satu tahun}} \text{ x } 100\%$$

Laut:

$$\text{Pencapaian } \textit{WT} \text{ Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian WT pada terminal pelabuhan}}{\text{Standar WT terminal pelabuhan}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Pencapaian } AT \text{ Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian AT pada terminal pelabuhan}}{\text{Standar AT terminal pelabuhan}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Pencapaian (ET:BT)} = \frac{\text{Capaian (ET:BT) pada terminal pelabuhan}}{\text{Standar (ET: BT) pada terminal pelabuhan}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{OTP Transortasi Laut} = \frac{\text{Pencapaian WT} + \text{Pencapaian AT} + \text{Pencapaian (ET:BT)}}{\text{Standar (ET: EB) pada terminal pelabuhan}} \text{ x } 100\%$$

Udara:

$$\frac{\text{Jumlah kejadian waktu on time keberangkatan dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah izin rute keberangkatan dalam 1 tahun}} \text{ x } 100\%$$

KA:

$$\frac{\text{Realisasi OTP tahun berjalan}}{\text{Target OTP tahun berjalan}} \text{ x } 100\%$$

Rumus Gabungan:

$$\text{Persentase capaian On Time Performance} = \frac{\text{OTP}_{\text{darat}} + \text{OTP}_{\text{laut}} + \text{OTP}_{\text{udara}} + \text{OTP}_{\text{KA}}}{4}$$

SATUAN

Darat : Persentase (%)
Laut : Persentase (%)
Udara : Persentase (%)
KA : Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB DATA

Darat: Ditjen Perhubungan Darat

Laut:
1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2. Direktorat Kepelabuhanan

Udara:
Ditjen Perhubungan Udara

KA:
1. Direktorat Lalu LIntas dan Angkutan KA,
2. Direktorat Prasarana Perkeretaapian & Setditjen Perkeretaapian

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	IK 7	Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek

DEFINISI
Kecepatan Rata-rata Angkutan Umum pada jam puncak dari terminalkeberangkatan ke terminal akhir
SUMBER DATA
Data Sekunder Operator Sampling GPS Tracking BRT Jalur Khusus dan *Bus Reguler mixed traffic* (JR *Connexion*; Bus PATAS, Bus Sedang, Angkot)
CARA MENGHITUNG
$\text{Kecepatan rata-rata} = \frac{\text{Jumlah kecepatan rata-rata pada setiap rute}}{\text{jumlah rute}}$
SATUAN
Km/Jam
PENANGGUNG JAWAB DATA
BPTJ

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	IK 8	Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan

DEFINISI

Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi merupakan gambaran Persentase jumlah Unit Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah menerapkan standar pelayanan terhadap seluruh jenis layanan yang diberikan kepada pengguna jasa yang mengacu Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

SUMBER DATA

1. Monev PPTB
2. Indeks SKM UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan
3.

CARA MENGHITUNG

Tingkat Penerapan =

$$\frac{\sum \text{UPT yang menerapkan standar pelayanan}}{\text{N total UPT Kemenhub yang memberikan pelayanan kepada masyarakat}} \; x \; 100\%$$

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB DATA

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	IK 9	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi

DEFINISI

Darat:
Persentase tingkat penambahan jumlah sarana transportasi darat (bus dan kapal penyeberangan) diperbandingkan dengan rencana total pembangunan sarana transportasi darat (bus dan kapal penyeberangan) sesuai dengan Renstra

Laut:
Peningkatan pembangunan Kapal Negara Angkutan Laut Perintis diperbandingkan dengan Total trayek yang harus melayani daerah-daerah terpencil/ belum berkembang, daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, serta daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh penyelenggara angkutan laut nasional

Udara:
Persentase jumlah pesawat yang memiliki sertifikat kelaikudaraan pada tahun tertentu dibagi dengan estimasi total pertumbuhan pesawat periode Renstra

KA:
Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi perkeretaapian merupakan perbandingan kapasitas angkut sarana kereta api tahun berjalan dibanding dengan baseline kapasitas angkut sarana kereta api tahun 2014.Dalam hal ini yang menjadi objek perhitungan **Kapasitas Sarana Perkeretaapian** adalah kereta api yang diberikan subsidi oleh Pemerintah melalui PSO dan Kereta Api untuk angkutan Perintis.

SUMBER DATA

Darat:
1. Rencana Strategis (Renstra) → Ditjen Perhubungan Darat
2. Direktorat Sarana Perhubungan Darat
3. Direktorat Angkutan dan Multimoda

Laut:
1. Data pembangunan Kapal Negara Angkutan Laut Perintis/Subsidi diperoleh dari Direktorat LALA
2. Trayek perintis diperoleh dari Direktorat LALA

Udara:
Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

KA:
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA & PT. KAI

CARA MENGHITUNG

Darat:

$$\frac{Jumlah\ Pengadaan\ Sarana\ Transportasi\ Darat}{Target\ Pengadaan\ Sarana\ Transportasi\ Darat}\ x\ 100\%$$

$$\text{peningkatan sarana bus} = \frac{\sum \text{ pengadaan bus}}{\sum \text{target pengadaan bus}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{peningkatan sarana kapal} = \frac{\sum \text{pengadaan kapal penyeberangan}}{\sum \text{target pengadaan kapal penyeberangan}} \text{ x } 100\%$$

Laut:

$$\frac{\text{Jumlah muatan angkutan laut penumpang + barang}}{\text{Target muatanangkutan laut penumpang + barang}} \times 100\%$$

Udara:

$$\frac{\text{Jumlah Pesawat yang memilki sertifikat kelaikudaraan pada tahun tertentu}}{\text{Estimasi total pertumbuhan pesawat}} \times 100\%$$

KA:

$$\frac{\text{Peningkatan jumlah ketersediaan tempat duduk KA PSO \& perintis tahun berjalan}}{\text{Baseline ketersediaan tempat duduk KA (PSO \& perintis)}} \times 100\%$$

Rumus Gabungan :

$$\frac{\%\ \text{Darat} + \%\ \text{KA} + \%\ \text{Laut} + \%\ \text{Udara}}{4}$$

Baseline Tahun 2014 : jumlah tempat duduk sebanyak 294.717.586 TD (KA PSO: 294.596.007 TD dan KA perintis : 121.579 TD)

SATUAN

Darat : Persentase (%)
Laut : Persentase (%)
Udara : Persentase (%)
KA : Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB DATA

Darat : Ditjen Perhubungan Darat

Laut:
1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2. Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut

Udara: Ditjen Perhubungan Udara

KA:
1. Direktorat Lalu LIntas dan Angkutan KA,
2. Direktorat Prasarana Perkeretaapian & Setditjen Perkeretaapian

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	IK10	Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi

DEFINISI

Darat:
Persentase tingkat penambahan jumlah prasarana transportasi darat (terminal dan pelabuhan) diperbandingkan dengan rencana Nasional total pembangunan prasarana transportasi darat (terminal dan pelabuhan)

Laut:
Peningkatan pelabuhan Non-Komersial yang Selesai Dibangun/ Dikembangkan diperbandingkan dengan total target pelabuhan non komersil yang harus dibangun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Renstra.

Udara:
Persentase jumlah bandara UPBU dan Satpel BU dengan klasifikasi bandara sesuai TKN pada tahun tertentu dibagi target jumlah bandara UPBU dan satpel BU dengan klasifikasi bandara sesuai TKN pada tahun 2019

KA:
Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi perkeretaapian diperoleh dari panjang jalur kereta api yang terbangun pada tahun berjalan dibagi dengan baseline 2014

SUMBER DATA

Darat:
a. Rencana Strategis (Renstra) →Ditjen Perhubungan Darat
b. Direktorat Prasarana Perhubungan Darat

Laut:
- Data dapat diperoleh dari Direktorat Kepelabuhanan
- Rencana jumlah pelabuhan non-komersial secara nasional ditetapkan dalam RIPN (KP 901 tahun 2016)

Udara: Direktorat Bandar Udara

KA:
Direktorat Prasarana Perkeretaapian & Seluruh Balai Teknik Perkeretaapian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

CARA MENGHITUNG

Darat:

$$\text{IK9}_{\text{terminal}} = \frac{\sum \text{pembangunan terminal tipe A}}{\sum \text{target pembangunan terminal tipe A}} \times 100\%$$

$$\text{IK9}_{\text{pelabuhan}} = \frac{\sum \text{pembangunan pelabuhan penyeberangan}}{\sum \text{target pembangunan pelabuhan penyeberangan}} \times 100\%$$

Laut:

$$\frac{\sum \text{pelabuhan non komersial yang selesai dibangun}}{\sum \text{total target pelabuhan non komersial}} \times 100\%$$

Udara:

$$\frac{\sum \begin{matrix}\text{bandara UPBU \& Satpel BU dengan klasifikasi} \\ \text{bandara sesuai TKN pada tahun tertentu}\end{matrix}}{\sum \begin{matrix}\text{target jumlah Bandara UPBU \&Satpel BU dengan klasifikasi} \\ \text{bandara sesuai TKN pada tahun tertentu}\end{matrix}} \times 100\%$$

KA:

$$\frac{\text{peningkatan panjang jalur KA yang terbangun pada tahun berjalan}}{\text{baseline panjang jalur KA yang beroperasi}} \times 100\%$$

Baseline tahun 2014 : panjang jalur KA yang beroperasi sepanjang 5.196 Km

Nilai Gabungan :

$$\frac{\sum \text{Persentase peningkatan kapasitas prasarana tansportasi (darat+laut+udara+KA)}}{4}$$

SATUAN

Darat : Persentase (%)
Laut : Persentase (%)
Udara : Persentase (%)
KA : Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB DATA

Darat: Ditjen Perhubungan Darat

Laut:
1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2. Direktorat Kepelabuhanan

Udara: Ditjen Perhubungan Udara

KA: Direktorat Prasarana Perkeretaapian & Setditjen Perkeretaapian

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	IK11	*Modal Share* (Pangsa Pasar) angkutan umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek

DEFINISI
Persentasetotal transaksi perjalanan angkutan umum harian (BRT dan KRL) dalam satu tahun dibandingkan terhadap total perjalanan harian dalam satu tahun
SUMBER DATA
KRL, BRT, OD Survey
CARA MENGHITUNG
$\text{Modalshare} = \frac{\text{total transaksi perjalanan angkutan umum harian}}{\text{total perjalanan harian}} \; x \; 100\%$
SATUAN
%
PENANGGUNG JAWAB DATA
BPTJ

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IK 12	Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil

DEFINISI

Darat:
Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil adalah perbandingan antara Jumlah daerah yang dilalui trayek perintis di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil dibagi dengan jumlah daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil

Laut:
Rasio Peningkatan Layanan Transportasi Laut pada Daerah Rawan Bencana, perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar oleh Trayek Angkutan Laut Perintis dan Tol Laut

Udara:
Rasio jumlah rute yang melayani Bandar udara di daerah terisolir, rawan bencana, dan perbatasan dengan jumlah Bandar udara di daerah terisolir, rawan bencana, dan perbatasan

SUMBER DATA

Darat:
1. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara →Badan Nasional Pengelola Perbatasan
2. Direktorat Prasarana Perhubungan Darat
3. Direktorat Angkutan dan Multimoda

Laut:
1. Realisasi trayek perintis dan tol laut diperoleh dari Dit LALA
2. Perpres 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal
3. Keppres 6/2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar
4. Data wilayah rawan bencana diperoleh dari BNPB

Udara:
1. Direktorat Angkutan Udara
2. BNPP

CARA MENGHITUNG

Darat:

$$\frac{\sum \text{daerah yang dilalui trayek dan lintas perintis pada daerah rawan bencana, perbatasan , terluar dan terpencil}}{\sum \text{daerah rawan bencana, perbatasan , terluar dan terpencil}}$$

Laut:

$$\frac{\text{Jumlah trayek angkutan laut perintis dan tol laut pada daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil}}{\text{Total daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil}}$$

Udara:

$$\frac{\text{Jumlah Rute yang Melayani Bandar Udara di daerah terisolir, rawan bencana, dan perbatasan}}{\text{Jumlah Bandar Udara di daerah terisolir, rawan bencana, dan perbatasan}}$$

Nilai Gabungan:

$$\frac{\sum \text{rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil (darat+laut+udara)}}{3}$$

SATUAN

Darat : rasio
Laut : rasio
Udara : rasio

PENANGGUNG JAWAB DATA

Darat : Ditjen Perhubungan Darat

Laut:

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2. Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut

Udara: Ditjen Perhubungan Udara

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi	IK 13	Porsentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

DEFINISI

Deregulasi peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan simplifikasi atau penyederhanaan peraturan, penghilangan tumpang tindih peraturan, dan penyelerasan antar peraturan satu dengan peraturan yang lain. Proses deregulasi dilakukan dengan memperbaiki beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar mendapatkan layanan yang lebih baik antara lain dengan memberikan kemudahan dalam perizinan, memudahkan persyaratan seminimal mungkin tetapi tetap efektif, atau memberikan jangka waktu berlaku perizinan yang lebih panjang.

Peraturan yang menjadi subjek deregulasi difokuskan pada peraturan-peraturan yang terkait dengan bidang-bidang :

1. Investasi
2. Perizinan, dan
3. Keselamatan dan keamanan

SUMBER DATA

1. Ditjen Perhubungan Darat
2. Ditjen Perhubungan Laut
3. Ditjen Perhubungan Udara
4. Ditjen Perkeretaapian

CARA MENGHITUNG

Berdasarkan inventarisir peraturan yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa peraturan-peraturan yang termasuk dalam ketiga klasifikasi di atas berjumlah 75 Peraturan, yang terdiri dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan.

Sejalan dengan penyusunan revisi Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, maka 75 peraturan tersebut ditargetkan untuk dapat dideregulasi dalam kurun waktu 2015-2019, dengan demikian diperoleh formula perhitungan sebagai berikut:

75 peraturan : 5 tahun = 15 peraturan pertahun = 20%

Maka,
Formulasi Target IKU Biro Hukum = 20 % x 75 Peraturan = 15 peraturan / tahun

SATUAN

Persen (%)

PENANGGUNG JAWAB DATA

Biro Hukum

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	IK 14	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi

DEFINISI
Persentase jumlah lulusan Diklat Pembentukan tahun berjalan yang telah mendapat pekerjaan pada tahun berikutnya dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dari keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan yang lulus pada tahun berjalan.
SUMBER DATA
UPT fungsi pendidikan di lingkungan BPSDMP
CARA MENGHITUNG
$\frac{\text{Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun n yang telah mendapat pekerjaan pada tahun n+1} \leq \text{1 tahun}}{\text{Jumlah keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan pada tahun n}} \; x \; 100\%$ n=tahun berjalan
SATUAN
% (persen)
PENANGGUNG JAWAB DATA
Sekretariat BPSDMP

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS8	Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan	IK 15	Persentase Pemanfaatan Penelitian yang dijadikan Bahan Rekomendasi Kebijakan

DEFINISI

Penelitian yang dimanfaatkan adalah hasil-hasil penelitian yang telah disampaikan kepada seluruh *stakeholder* di bidang transportasi seperti pemerintah daerah dan sub sektor di lingkungan Kementerian Perhubungan; dengan kriteria sebagai berikut:

1. Penelitian merupakan permintaan dari stakeholder dan tindaklanjut dari kebijakan Kemenhub;
2. Penelitian dijadikan bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan, dokumen strategis dan atau perundang-undangan;

Penelitian dimuat dalam publikasi ilmiah yang terakreditasi baik nasional maupun internasional.

SUMBER DATA

1. Sekretariat Badan Litbang Perhubungan;
2. Puslitbang Transportasi Antarmoda;
3. Puslitbang Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
4. Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
5. Puslitbang Transportasi Udara.

CARA MENGHITUNG

$$\frac{\text{Jumlah penelitian yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah penelitian yang dikerjakan dalam satu tahun}} \; x \; 100\%$$

SATUAN

Persen (%)

PENANGGUNG JAWAB DATA

Sekretariat Badan Litbang Perhubungan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS9	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan	IK 16	Tingkat keberhasilan pengawasan Perhubungan

DEFINISI

Internal Audit Capability Model (IACM) atau juga yang disebut dengan model kapabilitas audit intern adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur efektivitas peran audit intern disetiap instansi pemerintah. IACM dikembangkan sejak tahun 2006 oleh Lembaga Riset Asosiasi Audit Intern di dunia (IIA) yaitu *The Institute of Internal Auditor Research Foundation* (IARF) yang diselesaikan menjadi satu model pada tahun 2009.

IACM memiliki 5 level tingkatan, untuk level ke-4 dengan inisial *managed* menggambarkan bahwa kondisi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sudah mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Sesuai arahan Presiden dalam rapat koordinasi nasional APIP pada tanggal 13 Mei 2015 bahwa 85% APIP di Kementerian/Lembaga harus sudah berada pada level 3 atau dengan inisial *integrated* yang sebelumnya pada tahun tersebut hanya 1% APIP yang berada pada level 3, serta peningkatan kapabilitas APIP level 3 dijadikan indicator kinerja dalam RPJMN 2015-2019 bidang Aparatur Negara dengan sasaran Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel.

SUMBER DATA

1. Arahan Presiden tanggal 13 Mei 2015 dalam Rakornas APIP (85% APIP di level 3)
2. Indikator Kinerja RPJMN 2015-2019 bidang Aparatur Negara terhadap Sasaran Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, salah satunya didukung dengan tingkat kapabilitas APIP (Level 3 tahun 2019)
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor 6 tahun 2016 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor 16 tahun 2016 tentang Pedoman Khusus Peningkatan Kapabilitas APIP

CARA MENGHITUNG

Mekanisme penilaian capaian level dalam IACM dilakukan melalui penilaian mandiri di masing-masing APIP, kemudian hasil penilaian tersebut disampaikan kepada Tim Reviu IACM BPKP melalui Deputi Pengawasan Instansi Perekonomian, selanjutnya untuk dilakukan validasi penilaian dan data dukung. Pedoman penilaian menggunakan matriks IACM yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor 16 tahun 2016 tentang Pedoman Khusus Peningkatan Kapabilitas APIP.

Model penghitungan IACM terdiri dari 6 elemen dengan 41 *Key Process Area* (KPA), dari total KPA tersebut memiliki sebaran sebanyak 240 pernyataan yang dimiliki secara parsial di masing-masing level sebagai berikut:

JENIS ELEMEN	PERNYATAAN								JUMLAH TOTAL
	LEVEL 2		LEVEL 3		LEVEL 4		LEVEL 5		
	JUMLAH	NOMOR	JUMLAH	NOMOR	JUMLAH	NOMOR	JUMLAH	NOMOR	
Peran Layanan APIP	9	1-9	10	10-19	5	20-24	6	25-30	30
Pengelolaan SDM	12	1-12	20	13-32	14	33-46	9	47-55	55
Praktek Profesional	13	1-13	17	14-30	4	31-34	9	35-43	43
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	10	1-10	19	11-29	9	30-38	5	39-43	43
Budaya dan Hubungan Organisasi	6	1-6	14	7-20	7	21-27	8	28-35	35
Struktur Tata Kelola	8	1-8	13	9-21	8	22-29	5	30-34	34
	58		93		47		42		240

Cara menghitung =

$$\frac{\text{Total pernyataan level}}{\text{Jumlah Total}} \text{ x } 100$$

SATUAN

% (Persen)

PENANGGUNG JAWAB DATA

Subbag Data dan Evaluasi Bagian Perencanaan Inspektorat Jenderal

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS10	Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional	IK 17	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat

DEFINISI

Perbandingan antara jumlah pemangku jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat.

SUMBER DATA

Darat : ABK Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) dan jumlah pemangku jabatan Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah bersertifikat

Laut : ABK Pengawas Keselamatan Pelayaran (PKP) dan jumlah pemangku jabatan pengawas keselamatan pelayaran (PKP) yang telah bersertifikat.

Udara : ABK Teknisi Penerbangan (Tekpen) dan jumlah pemangku jabatan Teknisi Penerbangan (Tekpen) yang telah bersertifikat.

CARA MENGHITUNG

Biro Kepegawaian dan Organisasi

$$\frac{\Sigma \text{ Pejabat PKB, PKP, dan Tekpen tersertifikat}}{\Sigma \text{ Kebutuhan pejabat PKB, PKP, dan Tekpen}} \text{ x } 100\%$$

SATUAN

%

PENANGGUNG JAWAB DATA

Biro Kepegawaian dan Organisasi

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS11	Terwujudnya good governance & clean government di Kementerian Perhubungan	IK 18	Persentase Penuntasan Reformasi Birokrasi

DEFINISI

Reformasi Birokrasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 38 Tahun 2011 adalah upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik;

Perubahan yang akan dilaksanakan meliputi :
1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Penataan Tatalaksana;
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
6. Penguatan Pengawasan;
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
9. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

SUMBER DATA

Seluruh Eselon I dan II di Lingkungan Kemenhub

CARA MENGHITUNG

Penilaian dilakukan oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) dengan komponen sbb:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Komponen Pengungkit	60%	a. Manajemen Perubahan (5%) b. Penataan perundang-undangan (5%) c. Penataan dan penguatan organisasi (6%) d. Penataan ketatalaksanaan (5%) e. Penataan sistem manajemen SDM (15%) f. Penguatan akuntabilitas (6%) g. Penguatan pengawasan (12%) h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)
2	Komponen Hasil	40%	a. Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%) b. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (10%) c. Kualitas pelayanan publik (10%)

SATUAN

Nilai RB (Kategori)

No	Kategori	Nilai/Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Istimewa
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat baik
4	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	kurang perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7	D	>90-30	Sangat kurang perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

PENANGGUNG JAWAB DATA

Biro Kepegawaian dan Organisasi

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS11	Terwujudnya good governance & clean government di Kementerian Perhubungan	IK 19	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan

DEFINISI
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional berdasarkan standard pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
SUMBER DATA
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta rinciannya.
CARA MENGHITUNG
Dalam pemberian opini, BPK RI memiliki kriteria penilaian yang mencakup: a. Kesesuaian Penyajian Laoran Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Kecukupan atas pengungkapan (*Full Disclosure*); c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
SATUAN
Opini (pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan)
PENANGGUNG JAWAB DATA
Biro Keuangan dan Perlengkapan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS11	Terwujudnya *good governance&cleangovernment* di Kementerian Perhubungan	IK 20	Nilai AKIP

DEFINISI

Hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)

SUMBER DATA

KemenPAN dan RB

CARA MENGHITUNG

Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB setiap satu tahun sekali atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja, dengan bobot 30%
2. Pengukuran Kinerja, dengan bobot 25%
3. Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15%
4. Evaluasi Kinerja, dengan bobot 10%
5. Capaian Kinerja, dengan bobot 20%

No.	Predikat	Nilai Angka	Interpretasi
1.	**AA**	>90 – 100	**Sangat Memuaskan**
2.	**A**	>80 – 90	**Memuaskan,** Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	**BB**	>70 – 80	**Sangat Baik**, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	**B**	>60 – 70	**Baik**, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
4.	**CC**	>50 – 60	**Cukup (memadai**), Akuntabilitias kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
5.	**C**	>30 – 50	**Kurang**, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memilliki sistem utnuk manajemen kinerja tapi perlu banyak

			perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
6.	**D**	0 – 30	**Sangat Kurang**, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

SATUAN

Nilai

PENANGGUNG JAWAB DATA

Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS11	Terwujudnya *good governance & clean government* di Kementerian Perhubungan	IK 21	Keterbukaan Informasi Publik

DEFINISI
Informasi Publik menurut UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
SUMBER DATA
Unit Kerja terkait di Lingkungan Kemenhub
CARA MENGHITUNG
Penilaian dan pemeringkatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan metode penilaian sbb: 1. Verifikasi SAQ (*Self Assessment Quesioner),* dengan bobot 30% Indikatornya adalah: a. Mengumumkan informasi publik b. Menyediakan informasi publik c. Pelayanan informasi publik d. Pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik 2. Verifikasi Lanjutan Acak (VLA), dengan bobot 30% 3. Visitasi (Kunjungan Lapangan), dengan bobot 40%
SATUAN
Peringkat (1-10)
PENANGGUNG JAWAB DATA
Biro Komunikasi dan Informasi Publik

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS11	Terwujudnya *Good Governance & Clean Government*di Kementerian Perhubungan	IK 22	Persentase Kehandalan Sistem Informasi

DEFINISI

Tingkat Ketersediaan (*Availability*) Sistem Informasi yang meliputi Jaringan, Server, dan Aplikasi Pelayanan Publik yang dikelola di Data Center Kementerian Perhubungan

SUMBER DATA

Melalui laporan dari *Network Operation Center* (NOC) Kementerian Perhubungan

CARA MENGHITUNG

$$\text{Kehandalan Jaringan (I)} = \frac{\text{Jumlah jam dalam setahun-Jumlah jam } \textit{downtime}\text{Jaringan}}{\text{Jumlah jam dalam setahun}}$$

$$\text{Kehandalan Server (II)} = \frac{\text{Jumlah jam dalam Setahun - Jumlah jam } \textit{downtime}\text{Server}}{\text{Jumlah jam dalam setahun}}$$

$$\text{Kehandalan Aplikasi (III)} = \frac{\text{Jumlah jam dalam setahun-Jumlah jam } \textit{downtime}\text{ Aplikasi}}{\text{Jumlah jam dalam setahun}}$$

$$\textbf{Persentase kehandalan sistem informasi} = \frac{\text{I+II+III}}{3} \text{ x } 100\%$$

SATUAN

Persen (%)

PENANGGUNG JAWAB DATA

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS11	Terwujudnya *Good Governance & Clean Government* di Kementerian Perhubungan	IK 23	Tingkat Maturasi SPIP

DEFINISI

Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi *control design* yang bersifat *hard control* dan *soft control*

SUMBER DATA

BPKP

CARA MENGHITUNG

Penilaian *Maturity Level* SPIP difokuskan pada 25 subUnsur SPIP.
Masing-masing subunsur mempunyai 5 indikator, sehingga terdapat 125 buah parameter *Maturity Level* SPIP yang disusun tergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum).

LEVEL	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR
0	Belum ada	Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)
4	Terkelola dan terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5≤ skor ≤5)

Tingkat	Karakteristik SPIP
Level 0 Belum Ada	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern.
Level 1 Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat *ad-hoc* dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak teridentifikasi.
Level 2 Berkembang	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Level 3 Terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
Level 4 Terkelola dan Terukur	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Telah ada evaluasi formal dan terdokumentasi.
Level 5 Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berke-lanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta didukung oleh pemantauan otomatis dengan menggunakan aplikasi TI.

SATUAN

Level

PENANGGUNG JAWAB DATA

Biro Perencanaan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS11	Terwujudnya good governance & clean government di Kementerian Perhubungan	IK 24	Persentase Penyerapan Anggaran

DEFINISI
Hasil penyerapan realisasi anggaran yang dibobot secara Persentase antara Pagu Anggaran dan Hasil Realisasi Anggaran
SUMBER DATA
- E-monitoring dan reporting - SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
CARA MENGHITUNG
$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$
SATUAN
Persentase (%)
PENANGGUNG JAWAB DATA
Biro Keuangan dan Perlengkapan



LAMPIRAN 10

Tabel Pengukuran Kinerja Kemenhub Tahun 2018

Lampiran 10

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2018 Kementerian Perhubungan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran (Rp)		
									Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SS1	**Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan**	**IK1**	**Rasio Konektivitas antar wilayah**	**Rasio**	**0,725**	**0,692**	**95,556**				
			Transportasi Darat		0,675	0,659	97,630	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Darat	-	-	-
			Transportasi Laut		1,000	1,000	100,000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Laut	2.439.719.456.000	2.285.391.067.722	93,67
			Transportasi Udara		0,720	0,620	86,111	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Udara	-	-	-
			Transportasi Perkeretaapian		0,310	0,290	93,548	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Perkeretaapian	-	-	-
			Transportasi Jabodetabek		0,630	0,542	86,032	Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	-	-	-
SS2	**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi**	**IK2**	**Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional**	**Rasio**	**1,537**	**1,365**	**111,150**		-	-	-
			Transportasi Laut		1,410	1,066	124,397	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Laut	2.037.955.000	2.001.427.200	98,21
			Transportasi Udara		2,940	2,790	105,102	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Udara	-	-	-
			Transportasi Perkeretaapian		0,260	0,240	107,692	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Perkeretaapian	17.916.633.000	14.946.441.803	83,42
		IK3	**Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi**	**Rasio**	**2,39**	**2,30**	**103,77**		-	-	-
			Transportasi Laut		0,50	-	200,00	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Laut	-	-	-
			Transportasi Udara		0,16	-	200,00	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Udara	-	-	-
			Transportasi Perkeretaapian		6,50	6,89	94,00	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Perkeretaapian	-	-	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran (Rp)		
									Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SS3	**Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi**	**IK4**	**Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan**	**%**	**80,00**	**80,00**	**100,00**		-	-	-
			Transportasi Darat		100,00	100,00	100,00	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Darat	-	-	-
			Transportasi Perkeretaapian		60,00	60,00	100,00	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Perkeretaapian	-	-	-
		IK5	**Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi**	**%**	**60,00**	**58,74**	**97,91**	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	194.040.000	178.158.200	91,82
		IK6	**Prosentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi**	**%**	**76,49**	**83,59**	**109,29**		-	-	-
			Transportasi Darat		83,24	89,28	107,26	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Darat	-	-	-
			Transportasi Laut		68,70	89,00	129,55	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Laut	-	-	-
			Transportasi Udara		87,00	79,91	91,85	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Udara	-	-	-
			Transportasi Perkeretaapian		67,00	76,18	113,70	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Perkeretaapian	-	-	-
		IK7	**Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek**	**Km/Jam**	**16,00**	**17,32**	**108,25**	Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	-	-	-
		IK8	**Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan**	**%**	**60,00**	**64,23**	**107,05**	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	122.519.000	122.251.700	99,78

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran (Rp)		
									Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SS4	**Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi**	**IK9**	**Persentase Peningkatan kapasitas sarana transportasi**	**%**	**24,86**	**31,85**	**128,09**		-	-	-
			Transportasi Darat		17,85	17,87	100,11	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Darat	-	-	-
			Transportasi Laut		18,76	18,76	100,00	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Laut	343.843.495.000	290.890.277.317	84,60
			Transportasi Udara		45,27	60,07	132,69	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Udara	-	-	-
			Transportasi Perkeretaapian		17,57	30,69	174,67	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Perkeretaapian	2.568.149.166.000	2.321.550.371.727	90,40
		IK10	**Persentase Peningkatan kapasitas prasarana transportasi**	**%**	**55,24**	**59,55**	**107,80**		-	-	-
			Transportasi Darat		36,85	38,06	103,28	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Darat	-	-	-
			Transportasi Laut		90,00	89,00	98,89	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Laut	1.262.522.911.000	727.968.352.000	57,66
			Transportasi Udara		80,00	97,28	121,60	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Udara	-	-	-
			Transportasi Perkeretaapian		14,10	13,85	98,23	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Perkeretaapian	-	-	-
		IK11	**Modal Share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek**	**%**	**29,00**	**29,90**	**103,10**	Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	-	-	-
SS5	**Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil**	**IK12**	**Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil**	**Rasio**	**1,52**	**1,52**	**100,00**		-	-	-
			Transportasi Darat		0,49	0,49	100,00	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Darat	-	-	-
			Transportasi Laut		0,68	0,68	100,00	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Laut	1.142.759.785.641	801.502.112.211	70,14
			Transportasi Udara		3,38	3,38	100,00	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Udara	-	-	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran (Rp)		
									Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SS6	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi**	**IK13**	**Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan**	**%**	**80,00**	**80,00**	**100,00**	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	-	-	-
SS7	**Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi**	**IK14**	**Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi**	**%**	**82,50**	**92,88**	**112,58**	Pengembangan SDM Perhubungan	-	-	-
SS8	**Meningkatnya Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan**	**IK15**	**Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan**	**%**	**80,00**	**81,17**	**101,46**	Penelitian dan Pengembangan	-	-	-
SS9	**Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di**	**IK16**	**Tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan**	**%**	**95,00 (IACM Level 3)**	**93,54**	**98,46**	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	4.288.828.000	3.872.897.183	90,30
SS10	**Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional**	**IK17**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat**	**%**	**80,00**	**71,18**	**88,98**	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	-	-	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran (Rp)		
									Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SS11	**Terwujudnya good governance & clean government di Kemenhub**	**IK18**	**Persentase Indeks Reformasi Birokrasi**	**%**	**85,00**	**84,79**	**99,75**	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	-	-	-
		IK19	**Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan**	**Opini BPK**	**WTP**	**WTP**	**100,00**	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	-	-	-
		IK20	**Nilai AKIP Kementerian Perhubungan**	**Nilai**	**71,00**	**-**	**-**	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.850.000.000	1.838.204.000	99,36
		IK21	**Keterbukaan Informasi Publik**	**Peringkat**	**3,00**	**2,00**	**133,33**	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	-	-	-
		IK22	**Persentase Kehandalan Sistem Informasi**	**%**	**97,00**	**98,49**	**101,54**	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	-	-	-
		IK23	**Tingkat Maturasi SPIP**	**Level**	**2,00**	**3,19**	**159,50**	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	350.000.000	346.884.700	99,11
		IK24	**Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan**	**%**	**90,00**	**84,52**	**93,91**	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Catatan:

Alokasi anggaran untuk tiap IKU tidak dapat dicantumkan seluruhnya, diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan 1 (satu) mata anggaran dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) IKU;

Contoh : Pembangunan jalur kereta api, dapat digunakan untuk IKU:
a. IKU 1, yaitu : Rasio Konektivitas Antar Wilayah;
b. IKU 4, yaitu: Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
c. IKU 5, yaitu: Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional ;

2. IKU merupakan fungsi Kementerian Perhubungan sebagai regulator.



LAMPIRAN 11

Tabel Perbandingan Realisasi Terhadap Target Kinerja Kemenhub Tahun 2018

Lampiran 11

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Kementerian Perhubungan
Terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Kemenhub Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Revisi II PK 2018				Realisasi Tahun 2018				Capaian Tahun 2018			
					Triwulan-an				Triwulan-an				% Capaian Triwulan			
					Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
SS1	**Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan**	**IK1**	**Rasio Konektivitas antar wilayah**	**Rasio**	**0,684**	**0,684**	**0,684**	**0,725**	**0,653**	**0,655**	**0,657**	**0,692**	**95,497**	**95,804**	**96,023**	**95,556**
			Transportasi Darat		0,675	0,675	0,675	0,675	0,639	0,646	0,646	0,659	94,667	95,704	95,704	97,630
			Transportasi Laut		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100,000	100,000	100,000	100,000
			Transportasi Udara		0,720	0,720	0,720	0,720	0,620	0,620	0,620	0,620	86,111	86,111	86,111	86,111
			Transportasi Perkeretaapian		0,250	0,250	0,250	0,310	0,250	0,250	0,260	0,290	100,000	100,000	104,000	93,548
			Transportasi Jabodetabek		-	-	-	0,630	-	-	-	0,542	-	-	-	86,032
SS2	**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi**	**IK2**	**Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional**	**Rasio**	**1,543**	**1,543**	**1,543**	**1,537**	**0,403**	**2,006**	**1,967**	**1,365**	**173,904**	**69,950**	**72,521**	**111,150**
			Transportasi Laut		1,429	1,429	1,429	1,410	1,018	1,250	1,191	1,066	128,761	112,526	116,655	124,397
			Transportasi Udara		2,940	2,940	2,940	2,940	-	4,580	4,510	2,790	200,000	44,218	46,599	105,102
			Transportasi Perkeretaapian		0,260	0,260	0,260	0,260	0,190	0,190	0,200	0,240	126,923	126,923	123,077	107,692
		IK3	**Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi**	**Rasio**	**2,39**	**2,39**	**2,39**	**2,39**	**2,11**	**2,80**	**2,49**	**2,30**	**111,45**	**82,68**	**95,81**	**103,77**
			Transportasi Laut		0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00
			Transportasi Udara		0,16	0,16	0,16	0,16	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00
			Transportasi Perkeretaapian		6,50	6,50	6,50	6,50	6,34	8,40	7,46	6,89	102,46	70,77	85,23	94,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Revisi II PK 2018				Realisasi Tahun 2018				Capaian Tahun 2018			
					Triwulan-an				Triwulan-an				% Capaian Triwulan			
					Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
SS3	**Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi**	**IK4**	**Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan**	**%**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**72,50**	**76,25**	**80,00**	**80,00**	**90,63**	**95,31**	**100,00**	**100,00**
			Transportasi Darat		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Transportasi Perkeretaapian		60,00	60,00	60,00	60,00	45,00	52,50	60,00	60,00	75,00	87,50	100,00	100,00
		IK5	**Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional**	**%**	**28,66**	**28,66**	**28,66**	**60,00**	**28,66**	**28,66**	**28,66**	**58,74**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**97,91**
		IK6	**Prosentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi**	**%**	**75,92**	**78,10**	**78,92**	**76,49**	**82,25**	**82,04**	**82,67**	**83,59**	**108,34**	**105,05**	**104,75**	**109,29**
			Transportasi Darat		83,24	83,24	83,24	83,24	83,24	83,24	83,24	89,28	100,00	100,00	100,00	107,26
			Transportasi Laut		80,00	80,00	80,00	68,70	87,00	87,00	91,00	89,00	108,75	108,75	113,75	129,55
			Transportasi Udara		87,00	87,00	87,00	87,00	79,92	79,82	79,12	79,91	91,86	91,75	90,94	91,85
			Transportasi Perkeretaapian		53,45	62,15	65,45	67,00	78,85	78,11	77,31	76,18	147,52	125,68	118,12	113,70
		IK7	**Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek**	**Km/Jam**	**-**	**-**	**-**	**16,00**	**-**	**-**	**-**	**17,32**	**-**	**-**	**-**	**108,25**
		IK8	**Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan**	**%**	**15,00**	**30,00**	**45,00**	**60,00**	**10,00**	**40,00**	**64,23**	**64,23**	**66,67**	**133,33**	**142,73**	**107,05**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Revisi II PK 2018				Realisasi Tahun 2018				Capaian Tahun 2018			
					Triwulan-an				Triwulan-an				% Capaian Triwulan			
					Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
SS4	**Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi**	**IK9**	**Persentase Peningkatan kapasitas sarana transportasi**	**%**	**21,53**	**22,63**	**23,78**	**24,86**	**8,20**	**13,94**	**23,47**	**31,85**	**38,08**	**61,57**	**98,68**	**128,09**
			Transportasi Darat		17,85	17,85	17,85	17,85	9,09	9,09	17,85	17,87	50,92	50,92	100,00	100,11
			Transportasi Laut		18,76	18,76	18,76	18,76	4,53	9,19	13,67	18,76	24,15	48,99	72,87	100,00
			Transportasi Udara		45,27	45,27	45,27	45,27	11,69	22,41	39,60	60,07	25,82	49,50	87,48	132,69
			Transportasi Perkeretaapian		4,22	8,65	13,25	17,57	7,48	15,05	22,75	30,69	177,25	173,99	171,70	174,67
		IK10	**Persentase Peningkatan kapasitas prasarana transportasi**	**%**	**29,21**	**29,21**	**29,21**	**55,24**	**10,99**	**10,99**	**26,90**	**59,55**	**37,60**	**37,60**	**92,08**	**107,80**
			Transportasi Darat		36,85	36,85	36,85	36,85	36,85	36,85	36,85	38,06	100,00	100,00	100,00	103,28
			Transportasi Laut		-	-	-	90,00	-	-	9,00	89,00	-	-	-	98,89
			Transportasi Udara		80,00	80,00	80,00	80,00	-	-	53,76	97,28	-	-	67,20	121,60
			Transportasi Perkeretaapian		-	-	-	14,10	7,09	7,09	7,99	13,85	-	-	-	98,23
		IK11	**Modal Share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek**	**%**	**-**	**-**	**-**	**29,00**	**-**	**-**	**-**	**29,90**	**-**	**-**	**-**	**103,10**
SS5	**Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil**	**IK12**	**Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil**	**Rasio**	**1,52**	**1,52**	**1,52**	**1,52**	**1,48**	**1,48**	**1,48**	**1,52**	**97,80**	**97,80**	**97,80**	**100,00**
			Transportasi Darat		0,49	0,49	0,49	0,49	0,39	0,39	0,39	0,49	79,59	79,59	79,59	100,00
			Transportasi Laut		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	100,00	100,00	100,00	100,00
			Transportasi Udara		3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Revisi II PK 2018				Realisasi Tahun 2018				Capaian Tahun 2018			
					Triwulan-an				Triwulan-an				% Capaian Triwulan			
					Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi	IK13	Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	77,50	80,00	80,00	80,00	77,50	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	IK14	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi	%	-	82,50	82,50	82,50	-	88,26	88,26	92,88	-	106,98	106,98	112,58
SS8	Meningkatnya Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	IK15	Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan	%	10,00	25,00	50,00	80,00	7,55	29,11	43,74	81,17	75,50	116,44	87,48	101,46
SS9	Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub	IK16	Tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan	%	95,00	95,00	95,00	95,00	-	-	93,54	93,54	-	-	98,46	98,46
SS10	Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional	IK17	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat	%	20,00	40,00	60,00	80,00	78,08	78,08	53,87	71,18	390,40	195,20	89,78	88,98

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Revisi II PK 2018				Realisasi Tahun 2018				Capaian Tahun 2018			
					Triwulan-an				Triwulan-an				% Capaian Triwulan			
					Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
SS11	Terwujudnya good governance & clean government di Kemenhub	IK18	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi	%	-	-	-	85,00	-	-	-	84,79	-	-	-	99,75
		IK19	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	100,00
		IK20	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	-	-	-	71,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		IK21	Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat	-	-	-	3,00	-	-	-	2,00	-	-	-	133,33
		IK22	Persentase Kehandalan Sistem Informasi	%	97,00	97,00	97,00	97,00	99,95	98,96	99,25	98,49	103,04	102,02	102,32	101,54
		IK23	Tingkat Maturasi SPIP	Level	-	-	-	2,00	-	-	-	3,19	-	-	-	159,50
		IK24	Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan	%	8,39	24,75	55,83	90,00	6,88	20,70	45,50	84,52	82,00	83,64	81,50	93,91



LAMPIRAN 12

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Kemenhub Tahun 2015-2018

Lampiran 12

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Kemenhub Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Kemenhub Tahun 2015-2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2015			Capaian Tahun 2016			Capaian Tahun 2017			Capaian Tahun 2018		
					Target Revisi PK Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi thp Target Revisi PK Tahun 2015	Target Revisi PK Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	% Realisasi thp Target Revisi PK Tahun 2016	Target Revisi PK Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	% Realisasi thp target Revisi PK Tahun 2017	Target Revisi II PK Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	% Realisasi thp target Revisi II PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
SS1	**Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan**	**IK1**	**Rasio Konektivitas antar wilayah**	**Rasio**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,706**	**0,678**	**96,031**	**0,725**	**0,69**	**95,56**
			Transportasi Darat								0,650	0,640	98,462	**0,675**	**0,659**	**97,630**
			Transportasi Laut								1,000	1,000	100,000	**1,000**	**1,000**	**100,000**
			Transportasi Udara								0,700	0,620	88,571	**0,720**	**0,620**	**86,111**
			Transportasi Perkeretaapian								0,280	0,250	89,286	**0,310**	**0,290**	**93,548**
			Transportasi Jabodetabek								0,570	0,480	84,211	**0,630**	**0,542**	**86,032**
SS2	**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi**	**IK2**	**Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional**	**Rasio**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,871**	**0,65**	**165,00**	**1,537**	**1,37**	**111,15**
			Transportasi Laut		0,972	1,382	57,870	0,875	0,814	106,971	1,633	0,484	170,343	**1,410**	**1,066**	**124,397**
			Transportasi Udara		4,410	16,700	-	3,920	1,480	162,245	3,430	1,220	164,431	**2,940**	**2,790**	**105,102**
			Transportasi Perkeretaapian		0,550	1,150	-	0,550	0,240	156,364	0,550	0,260	152,727	**0,260**	**0,240**	**107,692**
		IK3	**Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi**	**Rasio**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,44**	**2,31**	**148,05**	**2,39**	**2,30**	**103,77**
			Transportasi Laut								2,45	0,30	187,76	**0,50**	**-**	**200,00**
			Transportasi Udara								0,17	0,03	182,35	**0,16**	**-**	**200,00**
			Transportasi Perkeretaapian								10,70	6,59	138,41	**6,50**	**6,89**	**94,00**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2015			Capaian Tahun 2016			Capaian Tahun 2017			Capaian Tahun 2018		
					Target Revisi PK Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi thp Target Revisi PK Tahun 2015	Target Revisi PK Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	% Realisasi thp Target Revisi PK Tahun 2016	Target Revisi PK Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	% Realisasi thp target Revisi PK Tahun 2017	Target Revisi II PK Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	% Realisasi thp target Revisi II PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
SS3	**Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi**	**IK4**	**Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan**	**%**	-	-	-	-	-	-	**36,93**	**36,93**	**100,00**	**80,00**	**80,00**	**100,00**
			Transportasi Darat								53,85	53,85	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Transportasi Perkeretaapian								20,00	20,00	100,00	**60,00**	**60,00**	**100,00**
		IK5	**Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional**	**%**	-	-	-	-	-	-	**40,00**	**40,00**	**100,00**	**60,00**	**58,74**	**97,91**
		IK6	**Prosentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi**	**%**	-	-	-	-	-	-	**78,15**	**79,20**	**101,34**	**76,49**	**83,59**	**109,29**
			Transportasi Darat								82,61	82,61	100,00	**83,24**	**89,28**	**107,26**
			Transportasi Laut								80,00	88,00	110,00	**68,70**	**89,00**	**129,55**
			Transportasi Udara								85,00	80,14	94,28	**87,00**	**79,91**	**91,85**
			Transportasi Perkeretaapian								65,00	66,05	101,62	**67,00**	**76,18**	**113,70**
		IK7	**Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek**	**Km/Jam**	-	-	-	-	-	-	**15,00**	**15,78**	**105,21**	**16,00**	**17,32**	**108,25**
		IK8	**Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan**	**%**	-	-	-	-	-	-	**40,00**	**14,25**	**35,63**	**60,00**	**64,23**	**107,05**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2015			Capaian Tahun 2016			Capaian Tahun 2017			Capaian Tahun 2018		
					Target Revisi PK Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi thp Target Revisi PK Tahun 2015	Target Revisi PK Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	% Realisasi thp Target Revisi PK Tahun 2016	Target Revisi PK Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	% Realisasi thp target Revisi PK Tahun 2017	Target Revisi II PK Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	% Realisasi thp target Revisi II PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
SS4	**Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi**	**IK9**	**Persentase Peningkatan kapasitas sarana transportasi**	**%**	-	-	-	-	-	-	**20,23**	**21,77**	**107,60**	**24,86**	**31,85**	**128,09**
			Transportasi Darat								2,08	2,08	100,00	**17,85**	**17,87**	**100,11**
			Transportasi Laut								20,00	16,99	84,95	**18,76**	**18,76**	**100,00**
			Transportasi Udara								43,31	49,95	115,33	**45,27**	**60,07**	**132,69**
			Transportasi Perkeretaapian								15,53	18,05	116,23	**17,57**	**30,69**	**174,67**
		IK10	**Persentase Peningkatan kapasitas prasarana transportasi**	**%**	-	-	-	-	-	-	**48,20**	**53,57**	**111,15**	**55,24**	**59,55**	**107,80**
			Transportasi Darat								35,32	35,02	99,15	**36,85**	**38,06**	**103,28**
			Transportasi Laut								80,00	99,00	123,75	**90,00**	**89,00**	**98,89**
			Transportasi Udara								70,00	72,73	103,90	**80,00**	**97,28**	**121,60**
			Transportasi Perkeretaapian								7,47	7,53	100,80	**14,10**	**13,85**	**98,23**
		IK11	**Modal Share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek**	**%**	-	-	-	-	-	-	**26,00**	**26,00**	**100,00**	**29,00**	**29,90**	**103,10**
SS5	**Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil**	**IK12**	**Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil**	**Rasio**	-	-	-	-	-	-	**16,88**	**23,94**	**141,79**	**1,52**	**1,52**	**100,00**
			Transportasi Darat								0,47	0,47	100,00	**0,49**	**0,49**	**100,00**
			Transportasi Laut								46,83	68,00	145,21	**0,68**	**0,68**	**100,00**
			Transportasi Udara								3,35	3,35	99,88	**3,38**	**3,38**	**100,00**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2015			Capaian Tahun 2016			Capaian Tahun 2017			Capaian Tahun 2018		
					Target Revisi PK Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi thp Target Revisi PK Tahun 2015	Target Revisi PK Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	% Realisasi thp Target Revisi PK Tahun 2016	Target Revisi PK Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	% Realisasi thp target Revisi PK Tahun 2017	Target Revisi II PK Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	% Realisasi thp target Revisi II PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi	IK13	Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	-	-	-	-	-	-	60,00	75,00	125,00	80,00	80,00	100,00
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	IK14	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi	%	-	-	-	-	-	-	80,00	79,86	99,83	82,50	92,88	112,58
SS8	Meningkatnya Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	IK15	Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan	%	70,00	70,95	101,36	75,00	77,00	102,67	75,00	79,30	105,73	80,00	81,17	101,46
SS9	Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub	IK16	Tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan	%	-	-	-	-	-	-	90,00 (IACM Level 3)	90,67	100,74	95,00 (IACM Level 3)	93,54 -	98,46 -
SS10	Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional	IK17	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat	%	-	-	-	-	-	-	90,00	78,00	86,67	80,00	71,18	88,98

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2015			Capaian Tahun 2016			Capaian Tahun 2017			Capaian Tahun 2018		
					Target Revisi PK Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi thp Target Revisi PK Tahun 2015	Target Revisi PK Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	% Realisasi thp Target Revisi PK Tahun 2016	Target Revisi PK Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	% Realisasi thp target Revisi PK Tahun 2017	Target Revisi II PK Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	% Realisasi thp target Revisi II PK Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
SS11	Terwujudnya good governance & clean government di Kemenhub	IK18	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi	%	71,80	70,34	97,97	74,00	92,26	124,68	85,00	75,34	88,64	85,00	84,79	99,75
		IK19	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	Opini BPK	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00
		IK20	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	75,00	68,51	91,35	71,00	68,63	96,66	70,00	70,44	100,63	71,00	-	-
		IK21	Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00	100,00	3,00	2,00	133,33
		IK22	Persentase Kehandalan Sistem Informasi	%	-	-	-	-	-	-	96,00	99,67	103,82	97,00	98,49	101,54
		IK23	Tingkat Maturasi SPIP	Level	-	-	-	-	-	-	2,00	2,98	149,00	2,00	3,19	159,50
		IK24	Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan	%	-	-	-	-	-	-	90,00	86,39	95,99	90,00	84,52	93,91



LAMPIRAN 13

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2018 Dalam Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019

Lampiran 13

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Kemenhub Tahun 2018
Terhadap Target Tahun 2018 dalam Reviu Renstra Kemenhub 2015-2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019				Realisasi Tahun 2018				% Realisasi thp target Reviu Renstra Tahun 2018			
					Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)				(5)				(5)
SS1	**Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan**	**IK1**	**Rasio Konektivitas antar wilayah**	**Rasio**	**0,501**	**0,572**	**0,635**	**0,725**	**0,653**	**0,655**	**0,657**	**0,692**	**119,886**	**106,002**	**96,348**	**95,556**
			Transportasi Darat		0,500	0,540	0,600	0,675	0,639	0,646	0,646	0,659	127,800	119,630	107,667	97,630
			Transportasi Laut		0,700	0,800	0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	142,857	125,000	111,111	100,000
			Transportasi Udara		0,500	0,630	0,700	0,720	0,620	0,620	0,620	0,620	124,000	98,413	88,571	86,111
			Transportasi Perkeretaapian		0,270	0,290	0,300	0,310	0,250	0,250	0,260	0,290	92,593	86,207	86,667	93,548
			Transportasi Jabodetabek		-	-	-	0,630	0,000	0,000	0,000	0,542	0,000	0,000	0,000	86,032
SS2	**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi**	**IK2**	**Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional**	**Rasio**	**1,543**	**1,543**	**1,543**	**1,543**	**0,403**	**2,006**	**1,967**	**1,365**	**151,880**	**94,546**	**95,434**	**111,514**
			Transportasi Laut		1,429	1,429	1,429	1,429	1,018	1,250	1,191	1,066	128,761	112,526	116,655	125,402
			Transportasi Udara		2,940	2,940	2,940	2,940	0,000	4,580	4,510	2,790	200,000	44,218	46,599	105,102
			Transportasi Perkeretaapian		0,260	0,260	0,260	0,260	0,190	0,190	0,200	0,240	126,923	126,923	123,077	107,692
		IK3	**Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi**	**Rasio**	**2,903**	**2,903**	**2,903**	**2,90**	**2,113**	**2,800**	**2,487**	**2,30**	**167,487**	**156,923**	**161,744**	**120,90**
			Transportasi Laut		2,040	2,040	2,040	2,04	0,000	0,000	0,000	0,00	200,000	200,000	200,000	200,00
			Transportasi Udara		0,170	0,170	0,170	0,17	0,000	0,000	0,000	0,00	200,000	200,000	200,000	200,00
			Transportasi Perkeretaapian		6,500	6,500	6,500	6,50	6,340	8,400	7,460	6,89	102,462	70,769	85,231	94,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019				Realisasi Tahun 2018				% Realisasi thp target Reviu Renstra Tahun 2018			
					Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)				(5)				(5)
SS3	**Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi**	**IK4**	**Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum**	**%**	**71,345**	**71,345**	**71,345**	**71,35**	**72,500**	**76,250**	**80,000**	**80,00**	**97,967**	**104,217**	**110,467**	**112,13**
			Transportasi Darat		82,690	82,690	82,690	82,69	100,000	100,000	100,000	100,00	120,934	120,934	120,934	120,93
			Transportasi Perkeretaapian		60,000	60,000	60,000	60,00	45,000	52,500	60,000	60,00	75,000	87,500	100,000	100,00
		IK5	**Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional**	**%**	**28,660**	**28,660**	**28,660**	**60,00**	**28,660**	**28,660**	**28,660**	**58,74**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**97,91**
		IK6	**Prosentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi**	**%**	**75,923**	**78,098**	**78,923**	**79,31**	**82,253**	**82,043**	**82,668**	**83,59**	**108,337**	**105,051**	**104,745**	**105,40**
			Transportasi Darat		83,240	83,240	83,240	83,24	83,240	83,240	83,240	89,28	100,000	100,000	100,000	107,26
			Transportasi Laut		80,000	80,000	80,000	80,00	87,000	87,000	91,000	89,00	108,750	108,750	113,750	111,25
			Transportasi Udara		87,000	87,000	87,000	87,00	79,920	79,820	79,120	79,91	91,862	91,747	90,943	91,85
			Transportasi Perkeretaapian		53,450	62,150	65,450	67,00	78,850	78,110	77,310	76,18	147,521	125,680	118,121	113,70
		IK7	**Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek**	**Km/Jam**	-	-	-	**16,00**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**17,32**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**108,25**
		IK8	**Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan**	**%**	**15,000**	**30,000**	**45,000**	**60,00**	**10,000**	**40,000**	**64,230**	**64,23**	**66,667**	**133,333**	**142,733**	**107,05**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019				Realisasi Tahun 2018				% Realisasi thp target Reviu Renstra Tahun 2018			
					Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)				(5)				(5)
SS4	**Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi**	**IK9**	**Persentase Peningkatan kapasitas sarana transportasi**	**%**	**8,809**	**17,619**	**26,428**	**35,24**	**8,198**	**13,935**	**23,468**	**31,85**	**93,054**	**79,092**	**88,797**	**90,38**
			Transportasi Darat		4,470	8,940	13,410	17,88	9,090	9,090	17,850	17,87	203,356	101,678	133,110	99,94
			Transportasi Laut		5,500	11,000	16,500	22,00	4,530	9,190	13,670	18,76	82,364	83,545	82,848	85,27
			Transportasi Udara		11,318	22,635	33,953	45,27	11,690	22,410	39,600	60,07	103,291	99,006	116,634	132,69
			Transportasi Perkeretaapian		13,950	27,900	41,850	55,80	7,480	15,050	22,750	30,69	53,620	53,943	54,361	55,00
		IK10	**Persentase Peningkatan kapasitas prasarana transportasi**	**%**	**13,847**	**27,694**	**41,541**	**55,39**	**10,985**	**10,985**	**26,900**	**59,55**	**79,332**	**39,666**	**64,756**	**107,51**
			Transportasi Darat		9,385	18,770	28,155	37,54	36,850	36,850	36,850	38,06	392,648	196,324	130,883	101,39
			Transportasi Laut		22,500	45,000	67,500	90,00	0,000	0,000	9,000	89,00	0,000	0,000	13,333	98,89
			Transportasi Udara		20,000	40,000	60,000	80,00	0,000	0,000	53,760	97,28	0,000	0,000	89,600	121,60
			Transportasi Perkeretaapian		3,503	7,005	10,508	14,01	7,090	7,090	7,990	13,85	202,427	101,213	76,041	98,86
		IK11	**Modal Share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek**	**%**	-	-	-	**29,00**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**29,90**	**x`**	**0,000**	**0,000**	**103,10**
SS5	**Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil**	**IK12**	**Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil**	**Rasio**	**4,225**	**8,450**	**12,675**	**16,90**	**1,483**	**1,483**	**1,483**	**1,52**	**35,108**	**17,554**	**11,703**	**8,97**
			Transportasi Darat		0,123	0,245	0,368	0,49	0,390	0,390	0,390	0,49	318,367	159,184	106,122	100,00
			Transportasi Laut		11,708	23,415	35,123	46,83	0,680	0,680	0,680	0,68	5,808	2,904	1,936	1,45
			Transportasi Udara		0,845	1,690	2,535	3,38	3,380	3,380	3,380	3,38	400,000	200,000	133,333	100,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019				Realisasi Tahun 2018				% Realisasi thp target Reviu Renstra Tahun 2018			
					Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)				(5)				(5)
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi	IK13	Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	20,000	40,000	60,000	80,00	77,500	80,000	80,000	80,00	387,500	200,000	133,333	100,00
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	IK14	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi	%	-	82,500	82,500	82,50	0,000	88,260	88,260	92,88	0,000	106,982	106,982	112,58
SS8	Meningkatnya Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	IK15	Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan	%	20,000	40,000	60,000	80,00	7,550	29,110	43,740	81,17	37,750	72,775	72,900	101,46
SS9	Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub	IK16	Tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan	%	95,000 -	95,000 -	95,000 -	95,00 (IACM Level 3)	0,000	0,000	93,540	93,54	0,000	0,000	98,463	98,46
SS10	Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional	IK17	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat	%	1,250	2,500	3,750	5,00	78,080	78,080	53,870	71,18	6246,400	3123,200	1436,533	1423,60

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2018 Dalam Reviu Renstra 2015-2019				Realisasi Tahun 2018				% Realisasi thp target Reviu Renstra Tahun 2018			
					Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)				(5)				(5)
SS11	Terwujudnya good governance & clean government di Kemenhub	IK18	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi	%	-	-	-	87,00	0,000	0,000	0,000	84,79	0,000	0,000	0,000	97,46
		IK19	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	0,000	WTP	WTP	WTP	0,000	100,000	100,000	100,00
		IK20	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	-	-	-	72,00	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
		IK21	Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat	-	-	-	3,00	0,000	0,000	0,000	2,00	0,000	0,000	0,000	133,33
		IK22	Persentase Kehandalan Sistem Informasi	%	97,000	97,000	97,000	97,00	99,950	98,960	99,250	98,49	103,041	102,021	102,320	101,54
		IK23	Tingkat Maturasi SPIP	Level	-	-	-	2,00	0,000	0,000	0,000	3,19	0,000	0,000	0,000	159,50
		IK24	Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan	%	22,500	45,000	67,500	90,00	6,880	20,700	45,500	84,52	30,578	46,000	67,407	93,91



LAMPIRAN 14

Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2018

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.6529/AJ.204/DRJD/2017

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN PERINTIS
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin tersedianya angkutan umum pada wilayah tertentu berupa wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan Umum;

b. bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2412/AJ.206/DRJD/2008 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Di Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN PERINTIS TAHUN 2018.**

PERTAMA : Menetapkan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2018 di 32 (tiga puluh dua) provinsi di Indonesia dengan jumlah trayek sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) trayek, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pada Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** dapat diberikan subsidi pengoperasian Angkutan Jalan Perintis berdasarkan perhitungan subsidi pengoperasian Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2412/AJ.206/DRJD/2008 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Di Jalan.

KETIGA : Dalam hal Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis sudah berkembang menjadi Jaringan Trayek Angkutan Jalan yang dapat dikomersialkan, maka Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Direktorat Angkutan dan Multimoda serta Balai Pengelola Transportasi Darat membentuk tim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kelayakan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis.

KELIMA : Direktur Angkutan dan Multimoda serta para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat melakukan pengawasan pelaksanaan terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggaL 15 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, SH,. M.Si.
NRP. 6205 0784

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
6. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai Trayek Perintis yang ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NASUTION BIN AS, SH, MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680223 199803 1 002

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.6529/AJ.204/DRJD/2017
Tanggal : 15 Desember 2017

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN PERINTIS
TAHUN 2018

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (Km)
1	2	3		4
1	ACEH	1	Kota Kuala Simpang - Tenggulun	42
		2	Meulaboh - Alue Peunyaring	35
		3	Banda Aceh - Sinabang	425
		4	Terminal Keudah - Peukan Biluy	35
		5	Kutacane - Lawe Desky -Leuser	50
		6	Kota Kuala Simpang - Kampung Selamat	39
		7	Meulaboh - Mugo Rayeuk	45
		8	Meulaboh - Pelabuhan Meulaboh	18
2	SUMATERA UTARA	9	Pematang Raya - Nagari Dolok	43
		10	Pematang Raya - Raya Bosi	55
		11	Pematang Raya - Bah Bolon	32
		12	Simanindo - Tomok	125
		13	Besitang - Tani Jaya	30
		14	Besitang - Pangkalan Siata	40
		15	Sihosar (Merek) - Kabanjahe	25
3	SUMATERA BARAT	16	Pulau Punjung - Sei Rumbai - Sitiung III	41
		17	Pulau Pujung - Sikabau - Simp.3 Koto Baru - Ampalu	40
		18	Koto Baru - Ampang Kuranji - Abai Siat - Sittiung IV - Sei Rumbai	31
		19	Terminal Simpang IV - Bateh Samuik	39
		20	Terminal Simpang IV - Mudiak Simpang	28
		21	Terminal Simpang IV - Mandi Angin	35
		22	Terminal Simpang IV - Batas Sumbar Sumut	96
4	RIAU	23	Bangkinang - XIII Koto Kampar (Candi Muara Takus)	55
		24	Siak Sri Indra Pura - Kandis	173
5	KEPULAUAN RIAU	25	Jodoh - Sijantung (Kota Batam)	65
		26	Tanjungpinang - Tanjung Berakit	58
		27	Tanjungpinang - Tanjung Uban	81
		28	Ranai - Teluk Buton	57,7
		29	Ranai - Selat lampa	70,9
		30	Daik Lingga - Sungai Pinang	44,6
		31	Daek Lingga - Pancur (Kab. Lingga)	49,8
		32	Dabo - Tinjul (Kab. Lingga)	40
6	JAMBI	33	Sarolangun - Bukit Suban	65
		34	Sarolangun - Sepintun	58
		35	Sarolangun - Petiduran Baru	74
		36	Terminal Muara Bulian - Jangga Baru	43
		37	Terminal Bangko - Desa Kibul	70
		38	Terminal Bungo - Desa Bangun Seraten	90
		39	Kuala Tungkal - Lubuk Kambing	191
7	SUMATERA SELATAN	40	Pendopo - Perambatan	69
		41	Pendopo - Modong	58,8
		42	Pendopo - Air Hitam	67
		43	Pendopo - Kota Baru	49,4
		44	Pendopo - Tempirai	87
8	BENGKULU	45	Banjarsari - Kayapuh (Pulau Enggano)	45
		46	Bengkulu - Simpang Tiga Luas - Muara Sahung	230
		47	Bengkulu - Napal Putih	138

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (Km)
1	2	3		4
9	BANGKA BELITUNG	48	Pangkal Pinang - Beriga	150
		49	Pangkal Pinang - RSUD Provinsi Bangka Belitung	24.6
		50	Pangkal Pinang - Sebagin	73.2
		51	Pangkal Pinang - Sempan	36.2
		52	Pangkal Pinang - Terminal Muntok (Via Kundi)	162.3
		53	Tanjung Pandan - Kelapa Kampit (Via Sijuk)	70
		54	Tanjung Nyato - Selat Nasik	25
10	LAMPUNG	55	Rajabasa - Margodadi - Margo Mulyo	31
		56	Term.Rajabasa - Beranti - Gedong Tataan	41
		57	Liwa - Krui - Bengkunat Blimbing	115
		58	Unit II - Menggala - Panaragan - Daya Murni	69
		59	Unit II - SP. Pematang - Brabasan - KTM SP. VIII	82
		60	Daya Murni - SP. Propau	35
		61	Rajabasa - Jabung	85
		62	Bandar Jaya - Sulusuban - Padang Ratu - Kalirejo	61
11	BANTEN	63	Cibaliung - Serang	170
		64	Ketapang - Rangkasbitung	130
		65	Cigemblong - Serang	112
		66	Serang - Sumur	143
		67	Serang - Sawarna	158
12	JAWA BARAT a. BANDUNG	68	Surade - Jampang Kulon - Kali Bunder - Sagaranten	65
		69	Pangandaran - Cipatujah - Pameungpeuk - Sindangbarang	248
		70	Sindang Barang - Tegal Buleud	90
		71	Tegal Buleud - Sagaranten	72
		72	Sagaranten - Kiara Dua Jampang Kulon	41
	b. BOGOR	73	Terminal Jasinga - Terminal Parung Panjang	33
		74	Leuwiliyang - Banyu Resmi	18.2
		75	Leuwiliyang - Pongkor	30
		76	Terminal Cikidang - Terminal Leuwiliang	66
13	JAWA TENGAH	77	Kawunganten - Gandrungmangu - Citembong	33
		78	Sidareja - Cinangsi	20
14	JAWA TIMUR	79	Terminal Selo Aji (Ponorogo) - Terminal Sarangan (Magetan)	58
		80	Jajag - Sarongan	46
		81	Terminal Ambulu - Andong Rejo - Terminal Ajung - Terminal Tawang Alun	71
		82	Ponorogo - Babadan - Sampung	43
		83	Ponorogo - Ngebel	30
		84	Sumoroto - Bungkal	31
		85	Ponorogo - Jeruk (Pacitan)	53
		86	Ponorogo - Tulungagung	74
		87	Terminal Tawang Alun - Papuma	37
15	BALI	88	Bangli - Tejakula	59
		89	Bangli - Dermaga Kadisan - Songan	36.7
16	NUSA TENGGARA BARAT	90	Mataram - Orongtelu	200
		91	Mataram - Moyo Hilir	240
		92	Mataram - Sumbawa Besar - Ropang	267
		93	Mataram - Sumbawa - Matta	360
		94	Mataram - Praya - Taliwang - Talonang	210
		95	Terminal Sumer Payung - Batulante	27
		96	Mandalika - Aikmel - Pesugulan	80
		97	Mataram - Santong (Gunung Sari)	68
		98	Mataram - Tawun - Sekotong - Bangko-Bangko	78

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (Km)
1	2	3		4
17	NUSA TENGGARA TIMUR			
	a. ENDE	99	Ende - Riung	125
		100	Ende - Nggela	95
		101	Ende - Wologai - Watunggere Marilonga	66
		102	Ende - Wologai - Boa Feo	48
		103	Terminal Nggorang - Werang	42
		104	Pamakayo - Nusadani - Kalike - Podor	23
		105	Waiwerang - Lamahala - Tobilota	28
		106	Ende - Marungela	185
	b. KUPANG	107	Kupang - Naimata	20
		108	Kupang - Oemofa	75
		109	Kupang - Lelogama	178
		110	Kupang - Naikleu	176
		111	Kupang - Kuanfatu	138
		112	Kupang - Kolbano	146
		113	Kupang - Buraen	80
		114	Kupang - Baun - Batuna	30
		115	Kupang - Tasikona	40
		116	Kupang - Ayutupas - Besikama	232
	c. WAINGAPU	117	Waingapu - Waikelo	185
		118	Waingapu - Mauramba	72
		119	Waingapu - Kataka	64
		120	Waingapu - Tanarighu - Malata	188
		121	Waingapu - Tanarara - Kenanggar	119
		122	Waingapu - Kodi	210
		123	Waingapu - Nggongi	149
	d. KEFAMENANU	124	Kefamenanu - Noelelo	110
		125	Kefamenanu - Wini - Ponu	104
		126	Kefamenanu - Noelmuti - Naob	36
		127	Kefamenanu - Moresu	50
		128	Kefamenanu - Inbate	54
		129	Kefamenanu - Oekolo	103
		130	Kefamenanu - Sipi - Bokis	54
		131	Kefamenanu - Oepoli	170
18	KALIMANTAN BARAT	132	Bengkayang - Jagoibabang	106
		133	Putussibau - Puringkencana	248
		134	Sintang - Simpang Seputau	109
		135	Ketapang - Tumbang Titi - Manis Mata	223
19	KALIMANTAN TENGAH	136	Terminal Natai Suka - Pelabuhan Roro - Pelabuhan Pelni	25.7
		137	Muara Teweh - Batu Raya	93.5
		138	Muara Teweh - Benangin	88
		139	Muara Teweh - Simpang Km. 30 - Lampeong	110
		140	Palangkaraya - Bahaur	166
		141	Kasongan - Baun Bango	66
		142	Kapuas - Tamban Catur - Kuala Kapuas	45
		143	Kapuas - Dadahup - Palingkau	51
		144	Palangkaraya - Tumbang Telaken	150
		145	Terminal Natai Suka - Kotawaringin Lama	55
		146	Buntok - Palu Rejo	77
		147	Sampit - Samuda	40
		148	Sampit - Kota Besi	20
20	KALIMANTAN SELATAN	149	Tanjung - Muara Uya	60
		150	Tanjung - Banua Lawas	50
		151	Tanjung - Tanta - Murung Pudak	40
		152	Gambut - Kurau - Tabaneo - Takisung	71
		153	Kandangan - Loksado	70
		154	Kalumpang - Negara	80
		155	Bamban - Sungai Raya	80

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (Km)
1	2	3		4
21	KALIMANTAN TIMUR	156	Samarinda - Bongan	250
		157	Samarinda - Muara Muntai	153
		158	Samarinda - Muara Aloh	200
		159	Sangatta - Pengadan	179
		160	Samarinda - Bantian Besar	354
		161	Sangatta - Maloy	122
22	KALIMANTAN UTARA	162	Tanjung Selor - Malinau	197
		163	Tanjung Selor - Berau	101
		164	Malinau - Mensalong - Salang	121
23	SULAWESI UTARA	165	Manado - Ratatotok - Molobog	165
		166	Manado - Talawaan Bantik - Munte - Marinsow - Bitung	155
		167	Manado - Tondano - Kema - Bitung	150
		168	Manado - Labuanuki	185
		169	Manado - Pangkusa - Bintauna	250
		170	Melonguane - Beo - Esang	95
		171	Bitung - Jikoblanga	207
		172	Lolak - Lobong - Passi - Modayag - Atoga - Ratahan	170
		173	Manado - Dumoga - Tabilaa - Torosik - Dumangin	400
		174	Bitung - Eris - Kakas - Ratahan	84
		175	Pananaru - Peta - Tahuna - Lapango - Pananaru	141
		176	Melonguane - Pirangen - Gemeh	95
24	SULAWESI TENGAH	177	Poso - Malino	100
		178	Toili - Baturube	120
		179	Lawangke - Laronai	220
		180	Biromaru - Poso	164
		181	Terminal Tipo (Palu) - Gimpu	106
		182	Ampana - Bongka	53
25	SULAWESI TENGGARA	183	Kendari - Lamonae	176
		184	Kendari - Mawasangka	215
		185	Kendari - Tondasi	135
		186	Kendari - Pinanggo	140
		187	Bau-Bau - Mawasangka	62
		188	Bau-Bau - Kamaru	95
		189	Munse - Langara - Sawaea	66
		190	Kendari - Amolengo - Bau Bau	270
26	GORONTALO	191	Gorontalo - Papualangi	205
		192	Gorontalo - Malango	251
		193	Gorontalo - Mohiyolo	105
		194	Gorontalo - Bubaa	93
		195	Gorontalo - Buol	317
		196	Gorontalo - Pinolosian	197
27	SULAWESI BARAT	197	Mamuju - Sarudu/Sp5	250
		198	Mamuju - Kakulasan	132
		199	Mamuju - Kalumpang	175
		200	Mamuju - Aralle - Tabulahan - Mambi	220
		201	Mamuju - Baras	230
		202	Mamuju - Labuang Rano	48
		203	Mamuju - Polopangale - Babana	132.5
		204	Mamuju - Tapandulu	33.8
28	SULAWESI SELATAN	205	Terminal Benteng - Pelabuhan Pattumbukang	46
		206	Takalar Galesong - Barombong - Pelabuhan Soekarno-Hatta - Pasar Butung	43
		207	Makassar - Desa Salodong	14
		208	Pelabuhan Pamatata - Terminal Benteng	44
		209	Makassar - Kabupaten Sinjai (Via Camba)	155
		210	Makassar - Kabupaten Sinjai (Via Malino)	187
		211	Bantaeng - Loka - Malakaji	30

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (Km)
1	2	3		4
29	MALUKU	212	Ambon - Werinama	350
		213	Ambon - Masiwang - Totok Telu	712
		214	Ambon - Alune	215
		215	Ambon - Warsiwa (Maluku Tengah)	290
		216	Ambon - Laimu	330
		217	Ambon - Ketapang	125
		218	Ambon - Saka - Pasanea	235
		219	Ambon - Namto	387
		220	Namlea - Namrole	136
		221	Namlea - Ilath	117
		222	Namlea - Biloro	133
		223	Langgur - Sathen - Danar - Madwaer - Tetoad	80
		224	Saumlaki - Batu Putih	51
		225	Saumlaki - Latdalam	38
		226	Saumlaki - Larat	145
30	MALUKU UTARA	227	Sidangoli - Kao - Toliwang	125
		228	Tobelo - Jailolo - Trans Goal	265
		229	Tobelo - Galela - Saluta	150
		230	Tobelo - Loleba	248
		231	Bastiong - Jati - Sulamandaha - Ngade - Bastiong	42,4
		232	Rum - Soasiu - Dowora - Rum	44,6
		233	Sofifi - Jalan KM 40 - Kantor Gubernur - Sofifi	10,3
		234	Sofifi - Sindangoli - Jailolo	85,7
		235	Daruba - Wayabula - Sopi - Berebere -Daruba	176
		236	Weda - Patani	147
		237	Weda - Saketa	121,6
		238	Pasar Fogi - Pelabuhan Ferry Sanana - Pasar Fogi	134
31	PAPUA			
	a. JAYAPURA	239	Jayapura - Depapre Tabala Nusu	70
		240	Jayapura - Skouw	53
		241	Jayapura - Taja	155
		242	Jayapura - Arso - Waris	122
		243	Jayapura - Demta	118
	b. NABIRE	244	Nabire - Legare SP IV	76
		245	Nabire - Kaladiri Dalam	32
		246	Nabire - Toppo	45
		247	Nabire - Wammi	70
		248	Nabire - Sima	85
		249	Nabire - Makimi	55
	c. BIAK	250	Biak - Wardo/Kanaan	48
		251	Biak - Korem - Rumbin	48
		252	Biak - Korido	133
		253	Biak - Makmakerbo	50
		254	Biak - Sauri	46
		255	Biak - Wauna	62
		256	Numfor Barat - Numfor Timur	55
		257	Biak - Sorendiweri	94
		258	Biak - Pamdi	134
	d. SERUI	259	Serui - Ariepi - Kamanap	37
		260	Serui - Wadapi	33
		261	Serui - Mariarotu	43
		262	Serui - Randawaya	55
		263	Serui - Kairawi	65
		264	Serui - Sardevi	60
	e. MERAUKE	265	Kuprik - Jagebob	160
		266	Merauke - Sota	108
		267	Merauke - Muting	250
		268	Kuprik - Pasar Kurik	110
		269	Terminal Merauke - Erambo, Toray	160

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (Km)
1	2	3		4
	f. TIMIKA	270	Timika - Mioko	55
		271	Timika - Tipuka	31
		272	Timika - Kalikamora	80
		273	Timika - Ikawa	35
		274	Timika - SP VI	35
	g. SARMI	275	Sarmi - Sewan - wafo	35
		276	Sarmi - Arbais	70
		277	Sarmi - Togonfo	80
32	PAPUA BARAT			
	a. SORONG	278	Sorong - Seget	100
		279	Sorong - Klasari	70
		280	Sorong - Modan 1&2	70
		281	Pelabuhan - Perumahan 300 - Waisai (Pantai WTC) - Sapokren	30
		282	Sorong - Batu Payung	104
		283	Sorong - Saoka	23
		284	Waisai - Warsambin	32
	b. SORONG SELATAN	285	Terminabuan - Seremuk	60
		286	Terminabuan - Moswaren	38
		287	Terminabuan- Konda	38
	c. MANOKWARI	288	Manokwari - Masni	148
		289	Manokwari - Momiwaren	175
		290	Manokwari - Arpu	250
		291	Manokwari - Isim	149
		292	Manokwari - Tahota	170
		293	Manokwari - Bintuni	235.5
		294	Manokwari - Saukorem	185.8
		295	Manokwari - Sidey	175
		296	Momiwaren - Ransiki	30

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,
ttd.
Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si
NRP. 6205 0784

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

NASUTION BIN AS, SH, MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680223 199803 1 002



LAMPIRAN 15

Trayek AKAP Tahun 2015-2018

Trayek Pelayanan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Tahun 2015 -2018

No.	Trayek
1	BANDA ACEH-BANDUNG
2	BANDA ACEH-BUKIT TINGGI
3	BANDA ACEH-JAKARTA (KALI)
4	BANDA ACEH-JAKARTA (RAMBUTAN)
5	BANDA ACEH-MEDAN
6	BANDA ACEH-PADANG
7	BANDA ACEH-PALEMBANG
8	BANDA ACEH-PEKANBARU
9	BANDA ACEH-PEMATANG SIANTAR
10	BANDA ACEH-SURABAYA
11	BANDA ACEH-YOGYAKARTA
12	BANDAR LAMPUNG-BANDUNG
13	BANDAR LAMPUNG-BEKASI
14	BANDAR LAMPUNG-BLITAR
15	BANDAR LAMPUNG-BOGOR
16	BANDAR LAMPUNG-JAKARTA (KALIDERES)
17	BANDAR LAMPUNG-JAKARTA (KP.RAMBUTAN)
18	BANDAR LAMPUNG-KEDIRI
19	BANDAR LAMPUNG-PONOROGO
20	BANDAR LAMPUNG-SOLO
21	BANDAR LAMPUNG-SURABAYA
22	BANDAR LAMPUNG-WONOGIRI
23	BANDARA SOEKARNO HATTA-KOTA BANDUNG
24	BANDARA SOEKARNO HATTA-SUKABUMI, KEC.
25	BANDUNG CICAHEUM-PACITAN
26	BANDUNG LEUWIPANJANG-DEPOK
27	BANDUNG-BLITAR
28	BANDUNG-BUMIAYU
29	BANDUNG-CEPU
30	BANDUNG-CILACAP
31	BANDUNG-JEPARA
32	BANDUNG-KUDUS
33	BANDUNG-MADIUN
34	BANDUNG-MALANG
35	BANDUNG-MATARAM
36	BANDUNG-PEKALONGAN
37	BANDUNG-PURWOKERTO
38	BANDUNG-SEMARANG
39	BANDUNG-SOLO
40	BANDUNG-SURABAYA
41	BANDUNG-TEGAL
42	BANDUNG-TEMANGGUNG
43	BANDUNG-WONOGIRI
44	BANDUNG-WONOSARI
45	BANDUNG-WONOSOBO
46	BANDUNG-YOGYAKARTA
47	BANJAR - KOTA-SERANG
48	BANJARMASIN-BALIKPAPAN
49	BANJARMASIN-SAMARINDA
50	BANJARPATOMAN-PURWOKERTO
51	BATU-BADUNG
52	BATURAJA-BD.LAMPUNG
53	BATURAJA-JAKARTA(KALIDERES)
54	BATURAJA-SOLO
55	BATUSANGKAR-DUMAI
56	BATUSANGKAR-PEKANBARU
57	BD.LAMPUNG-OSOWILANGUN

No.	Trayek
58	BD.LAMPUNG-WONOSARI
59	BD.LAMPUNG-YOGYAKARTA
60	BEKASI TIMUR-KLATEN
61	BEKASI-BOGOR
62	BEKASI-PURWOREJO
63	BEKASI-SUKABUMI
64	BEKASI-TEMANGGUNG
65	BELITANG-BD.LAMPUNG
66	BELITANG-JAKARTA
67	BENGKULU -MADIUN
68	BENGKULU-BANDAR LAMPUNG
69	BENGKULU-JAKARTA(KALIDERES)
70	BENGKULU-JAKARTA(KP.RAMBUTAN)
71	BENGKULU-LAHAT
72	BENGKULU-MADIUN
73	BENGKULU-PACITAN
74	BENGKULU-PAGARALAM
75	BENGKULU-PALEMBANG
76	BENGKULU-SURABAYA
77	BENGKULU-WONOSOBO
78	BEUREUNEUN-MEDAN
79	BIREUN-MEDAN
80	BK.TINGGI-DUMAI
81	BK.TINGGI-SUMENEP
82	BLANG PIDIE-KOTA MEDAN
83	BLITAR-BADUNG
84	BLITAR-PADANGBAI
85	BOBOTSARI-KOTA CIREBON
86	BOBOTSARI-KOTA TASIKMALAYA
87	BOBOTSARI-KOTA YOGYAKARTA
88	BOGOR TIMUR-MAGELANG SELATAN
89	BOGOR TIMUR-MUNTILAN
90	BOGOR-BANDUNG
91	BOGOR-BLITAR
92	BOGOR-CEPU
93	BOGOR-JEMBER
94	BOGOR-KARANGANYAR
95	BOGOR-KARAWANG
96	BOGOR-KLATEN
97	BOGOR-MADIUN
98	BOGOR-MALANG
99	BOGOR-PACITAN
100	BOGOR-PATI
101	BOGOR-PONOROGO
102	BOGOR-PROBOLINGGO
103	BOGOR-PURWANTORO
104	BOGOR-PURWOKERTO
105	BOGOR-PURWOREJO
106	BOGOR-SOLO
107	BOGOR-SRAGEN
108	BOGOR-SUMENEP
109	BOGOR-SURABAYA
110	BOGOR-WATES
111	BOGOR-WONOGIRI
112	BOGOR-WONOSARI
113	BOGOR-YOGYAKARTA
114	BOJONEGORO-BADUNG

No.	Trayek
115	BUKIT TINGGI-MUARA BUNGO
116	BUKIT TINGGI-PEKANBARU
117	BUKITTINGGI-BANDUNG
118	BUKITTINGGI-JAMBI
119	BUNTOK-BANJARMASIN
120	CEPU-JATIROGO
121	CEPU-NGAWI
122	CEPU-SURABAYA
123	CIBALIUNG-JAKARTA KALIDERES
124	CIKARANG-PEKALONGAN
125	CIKEUSIK-CIREBON
126	CILACAP-JEMBER
127	CILACAP-MALANG
128	CILACAP-SOLO
129	CILACAP-SURABAYA
130	CILACAP-WATES
131	CILACAP-YOGYAKARTA
132	CILEDUG-MAGETAN
133	CILEUNGSI-BOJONEGORO
134	CIREBON-MALANG
135	CIREBON-PROBOLINGGO
136	CIREBON-PURWOKERTO
137	CIREBON-SEMARANG
138	CIREBON-SURABAYA
139	CIREBON-TEGAL
140	CIREBON-YOGYAKARTA
141	COT GIREK-KUTACANE
142	COT GIREK-MEDAN
143	DEPOK-CILACAP
144	DEPOK-GARUT KOTA
145	DEPOK-KOTA TASIKMALAYA
146	DEPOK-KUNINGAN
147	DEPOK-PEKALONGAN
148	DEPOK-TEGAL
149	DUMAI-BANDAR LAMPUNG
150	DUMAI-PALEMBANG
151	DUMAI-SOLO
152	GOMBONG-SOLO
153	GUNUNG SUGIH-JAKARTA TIMUR
154	GUNUNG SUGIH-KOTA BEKASI
155	GUNUNG SUGIH-KOTA BOGOR
156	IDIE-MEDAN
157	JAKARTA (KALIDERES)-MADIUN
158	JAKARTA (KALIDERES)-PACITAN
159	JAKARTA (KALIDERES)-PEMALANG
160	JAKARTA (KALIDERES)-WONOGIRI
161	JAKARTA (KP.RAMBUTAN)-BANDUNG
162	JAKARTA (KP.RAMBUTAN)-CIAWIGEBANG
163	JAKARTA (KP.RAMBUTAN)-CIREBON
164	JAKARTA (KP.RAMBUTAN)-KUNINGAN
165	JAKARTA (KP.RAMBUTAN)-RAJAGALUH
166	JAKARTA (KP.RAMBUTAN)-TASIKMALAYA
167	JAKARTA (P.GEBANG)-MAGELANG SELATAN
168	JAKARTA (PULO)-BANDA ACEH
169	JAKARTA (PULO)-RUTENG
170	JAKARTA (RAMBUTAN)-BLITAR
171	JAKARTA (RAMBUTAN)-CILACAP
172	JAKARTA (RAMBUTAN)-JEPARA
173	JAKARTA (RAMBUTAN)-MADIUN

No.	Trayek
174	JAKARTA (RAMBUTAN)-PONOROGO
175	JAKARTA (RAMBUTAN)-SLAWI
176	JAKARTA (RAMBUTAN)-SOLO
177	JAKARTA (RAMBUTAN)-TEGAL
178	JAKARTA (RAMBUTAN)-WATES
179	JAKARTA (TERMINAL KALIDERES)-KEBUMEN, KEC.
180	JAKARTA (TJ.PRIOK)-GARUT
181	JAKARTA (TJ.PRIOK)-KALIANGET
182	JAKARTA BARAT-SUMENEP
183	JAKARTA TIMUR-BOBOTSARI
184	JAKARTA TIMUR-BOJONEGORO
185	JAKARTA TIMUR-CEPU
186	JAKARTA TIMUR-KEBUMEN
187	JAKARTA TIMUR-MALANG
188	JAKARTA UTARA-JEPARA
189	JAKARTA UTARA-KUNINGAN
190	JAKARTA -YOGYAKARTA
191	JAKARTA(KALI)-CEPU
192	JAKARTA(KALI)-SUKABUMI
193	JAKARTA(KALIDERES)-BANDUNG
194	JAKARTA(KALIDERES)-BANJARSARI
195	JAKARTA(KALIDERES)-BOJONEGORO
196	JAKARTA(KALIDERES)-KUNINGAN
197	JAKARTA(KALIDERES)-MAGELANG
198	JAKARTA(KALIDERES)-MAJALENGKA
199	JAKARTA(KALIDERES)-MALANG
200	JAKARTA(KALIDERES)-PURWODADI
201	JAKARTA(KALIDERES)-PURWOKERTO
202	JAKARTA(KALIDERES)-PURWOREJO
203	JAKARTA(KALIDERES)-TEGAL
204	JAKARTA(KALIDERES)-YOGYAKARTA
205	JAKARTA(KP.RAMBUTAN)-KARAWANG
206	JAKARTA(KP.RAMBUTAN)-PANGANDARAN
207	JAKARTA(KP.RAMBUTAN)-PURWOKERTO
208	JAKARTA(KP.RAMBUTAN)-PURWOREJO
209	JAKARTA(KP.RAMBUTAN)-SUMEDANG
210	JAKARTA(P. GEBANG)-BANYUWANGI
211	JAKARTA(P.GEBANG) -BANJARNEGARA
212	JAKARTA(P.GEBANG) -KARAWANG
213	JAKARTA(P.GEBANG)-BLORA
214	JAKARTA(P.GEBANG)-BOJONEGORO
215	JAKARTA(P.GEBANG)-CEPU
216	JAKARTA(P.GEBANG)-JEMBER
217	JAKARTA(P.GEBANG)-KOTA MAGELANG
218	JAKARTA(P.GEBANG)-MATARAM
219	JAKARTA(P.GEBANG)-PATI
220	JAKARTA(P.GEBANG)-PONOROGO
221	JAKARTA(P.GEBANG)-PURBALINGGA
222	JAKARTA(P.GEBANG)-PURWOREJO
223	JAKARTA(P.GEBANG)-WATES
224	JAKARTA(PRIOK)-BANDUNG
225	JAKARTA(PRIOK)-CIKAMPEK
226	JAKARTA(PRIOK)-SUKABUMI
227	JAKARTA(PULO)-BOGOR
228	JAKARTA(PULO)-SOLO
229	JAKARTA(PULO)-SUMBAWA BESAR
230	JAKARTA(RAMBUTAN)-MAGELANG
231	JAKARTA(RAMBUTAN)-WONOGIRI
232	JAKARTA(TJ.PRIOK)-PURWOKERTO

No.	Trayek
233	JAKARTA-BADUNG
234	JAKARTA-BANDUNG
235	JAKARTA-BANGKALAN
236	JAKARTA-BANJAR
237	JAKARTA-BANJARSARI
238	JAKARTA-BATURETNO
239	JAKARTA-BIMA
240	JAKARTA-BLITAR
241	JAKARTA-BOBOTSARI
242	JAKARTA-BUMIAYU
243	JAKARTA-CIAWIGEBANG
244	JAKARTA-CIDAHU
245	JAKARTA-CIKIJING
246	JAKARTA-CILACAP
247	JAKARTA-CILEDUG
248	JAKARTA-CIREBON
249	JAKARTA-GARUT
250	JAKARTA-JEPARA
251	JAKARTA-KALIANGET
252	JAKARTA-KARANGANYAR
253	JAKARTA-KARANGPUCUNG
254	JAKARTA-KEDIRI
255	JAKARTA-KLATEN
256	JAKARTA-KUDUS
257	JAKARTA-KUNINGAN
258	JAKARTA-LASEM
259	JAKARTA-LURAGUNG
260	JAKARTA-MADIUN
261	JAKARTA-MAJALENGKA
262	JAKARTA-MALANG
263	JAKARTA-NGAWI
264	JAKARTA-PACITAN
265	JAKARTA-PADANGBAI.
266	JAKARTA-PAMEKASAN
267	JAKARTA-PARAKAN
268	JAKARTA-PEKALONGAN
269	JAKARTA-PEMALANG
270	JAKARTA-PRACIMANTORO
271	JAKARTA-PURBALINGGA
272	JAKARTA-PURWANTORO
273	JAKARTA-PURWODADI
274	JAKARTA-PURWOKERTO
275	JAKARTA-RAJAGALUH
276	JAKARTA-RANGKASBITUNG
277	JAKARTA-REMBANG
278	JAKARTA-SAPE
279	JAKARTA-SEMARANG
280	JAKARTA-SINGARAJA
281	JAKARTA-SLAWI
282	JAKARTA-SRAGEN
283	JAKARTA-SUKABUMI
284	JAKARTA-SUMEDANG
285	JAKARTA-SUMENEP
286	JAKARTA-SURABAYA
287	JAKARTA-TASIKMALAYA
288	JAKARTA-TAYU
289	JAKARTA-TEGAL
290	JAKARTA-TIRTOMOYO
291	JAKARTA-WADO

No.	Trayek
292	JAKARTA-WONOGIRI
293	JAKARTA-WONOSARI
294	JAKARTA-WONOSOBO
295	JAMBI-BANDUNG
296	JAMBI-BENGKULU
297	JAMBI-BLITAR
298	JAMBI-JAKARTA (KP.RAMBUTAN)
299	JAMBI-JAKARTA(KALIDERES)
300	JAMBI-KEDIRI
301	JAMBI-MADIUN
302	JAMBI-MALANG
303	JAMBI-PALEMBANG
304	JAMBI-PONOROGO
305	JAMBI-PURWOREJO
306	JAMBI-SOLO
307	JAMBI-WONOSARI
308	JAMBI-YOGYAKARTA
309	JEMBER-BADUNG
310	JEPARA-BADUNG
311	KAB. BOGOR-PONOROGO
312	KAB. PESISIR SELATAN-BANDUNG LEUWIPANJANG
313	KAB. TANGERANG-MADIUN
314	KALIANGET-BADUNG
315	KAMPUNG RAMBUTAN-PATI
316	KEDIRI-BADUNG
317	KLATEN-SURABAYA
318	KOTA BANDA ACEH-BLANGKEJEREN
319	KOTA BANDUNG-BADUNG
320	KOTA BANDUNG-KOTA BATU
321	KOTA BATU-MATARAM
322	KOTA BEKASI-CILACAP
323	KOTA BEKASI-KAB. WONOSOBO
324	KOTA BEKASI-KOTA PEKALONGAN
325	KOTA BEKASI-PURWOKERTO
326	KOTA BENGKULU-BLITAR
327	KOTA BENGKULU-CIAMIS
328	KOTA BENGKULU-KOTA BEKASI
329	KOTA BOGOR-BADUNG
330	KOTA BOGOR-BOJONEGORO
331	KOTA BOGOR-JEPARA
332	KOTA BOGOR-KUNINGAN
333	KOTA BOGOR-SLAWI
334	KOTA BOGOR-TUBAN
335	KOTA CILEGON-KOTA BANDUNG
336	KOTA CILEGON-SINGAPARNA
337	KOTA CIREBON-DEMAK
338	KOTA CIREBON-PURWODADI
339	KOTA CIREBON-SUMENEP
340	KOTA DEPOK-PURWOKERTO
341	KOTA DUMAI-KOTA SURABAYA
342	KOTA DUMAI-PONOROGO
343	KOTA JANTHO-MEDAN
344	KOTA MAGELANG-PACITAN
345	KOTA MALANG-BADUNG
346	KOTA MALANG-BIMA
347	KOTA MEDAN-KOTA DUMAI
348	KOTA MEDAN-PASIR PANGARAIAN
349	KOTA METRO-KOTA BANDUNG
350	KOTA METRO-PONOROGO

No.	Trayek
351	KOTA PALEMBANG-BADUNG
352	KOTA PALEMBANG-PANGANDARAN
353	KOTA PALEMBANG-PATI
354	KOTA PALEMBANG-PURWODADI
355	KOTA PARIAMAN-KOTA BOGOR
356	KOTA PAYAKUMBUH-JAKARTA SELATAN
357	KOTA PAYAKUMBUH-KOTA DUMAI
358	KOTA PAYAKUMBUH-KOTA TASIKMALAYA
359	KOTA SEMARANG-BADUNG
360	KOTA TANGERANG SELATAN-BLITAR
361	KOTA TANGERANG SELATAN-GARUT
362	KOTA TANGERANG SELATAN-KOTA BANDUNG
363	KOTA TANGERANG SELATAN-KOTA MAGELANG
364	KOTA TANGERANG SELATAN-KOTA TASIKMALAYA
365	KOTA TANGERANG SELATAN-KOTA YOGYAKARTA
366	KOTA TANGERANG SELATAN-KUNINGAN
367	KOTA TANGERANG SELATAN-PURWODADI
368	KOTA TANGERANG SELATAN-PURWOREJO
369	KOTA TANGERANG SELATAN-REMBANG
370	KOTA TANGERANG SELATAN-WONOSOBO
371	KOTA TANGERANG-KLATEN
372	KOTA TANGERANG-KOTA MALANG
373	KOTA TASIKMALAYA-SERANG
374	KOTA YOGYAKARTA-BIMA
375	KOTA YOGYAKARTA-KARANGANYAR
376	KOTA YOGYAKARTA-MENGWI
377	KOTA YOGYAKARTA-SURABAYA OSOWILANGUN
378	KOTABUMI-JAKARTA (KALIDERES)
379	KRUENG GEUKUH-MEDAN
380	KUALA SIMPANG-MEDAN
381	KUALA SIMPANG-PANGKALAN BRANDAN
382	KUNINGAN-JEMBER
383	KUNINGAN-KOTA YOGYAKARTA
384	LABUAN-BANDUNG
385	LABUAN-CIREBON
386	LABUAN-GARUT
387	LABUAN-INDRAMAYU
388	LABUAN-JAKARTA (KP.RAMBUTAN)
389	LABUAN-JAKARTA (TJ.PRIOK)
390	LABUAN-JAKARTA(KALI)
391	LABUAN-KLATEN
392	LABUAN-KOTA BOGOR
393	LABUAN-KOTA PEKALONGAN
394	LABUAN-KUNINGAN
395	LABUAN-TEGAL
396	LABUAN-WONOSARI
397	LABUAN-YOGYAKARTA
398	LAHAT-BEKASI TIMUR
399	LAHAT-JAKARTA(KALIDERES)
400	LAHAT-KOTA BEKASI
401	LANGSA-MEDAN
402	LASEM-BOJONEGORO
403	LB.BASUNG-JAKARTA
404	LB.BASUNG-MEDAN
405	LB.MUNGKUR-MEDAN
406	LHOK SUKON-MEDAN
407	LHOKSEUMAWE-MEDAN
408	LHOKSEUMAWE-PEKANBARU
409	LINTAU-PEKANBARU
410	LINTAU-RENGAT
411	LUBUK BASUNG-BANDUNG
412	LUBUK BASUNG-PEKANBARU
413	LUBUK BASUNG-WONOGIRI
414	MA.DUA-BD.LAMPUNG
415	MAGELANG-SEMARANG
416	MAGELANG-SURABAYA
417	MAGELANG-YOGYAKARTA
418	MAGETAN-MATARAM
419	MAKALE-POSO
420	MAKASAR-KENDARI
421	MAKASAR-PALU
422	MAKASAR-POSO
423	MALANG-MATARAM
424	MALANG-METRO.
425	MALANG-PADANGBAI
426	MALANG-PAKANBARU
427	MALINGPING-CIREBON
428	MALINGPING-JAKARTA
429	MANADO-MAKASSAR
430	MEDAN - BENGKULU
431	MEDAN KOTA-PEKANBARU KOTA
432	MEDAN-BANDUNG
433	MEDAN-BANYUWANGI
434	MEDAN-BD.LAMPUNG
435	MEDAN-BLITAR
436	MEDAN-BOGOR
437	MEDAN-BUKIT TINGGI
438	MEDAN-JAKARTA
439	MEDAN-JAMBI
440	MEDAN-JEMBER
441	MEDAN-KEDIRI.
442	MEDAN-MALANG
443	MEDAN-PACITAN
444	MEDAN-PADANG
445	MEDAN-PADANG PANJANG
446	MEDAN-PATI
447	MEDAN-RENGAT
448	MEDAN-SOLO
449	MEDAN-SURABAYA
450	MERAK-BADUNG
451	MERAK-BANDUNG
452	MERAK-BANJAR
453	MERAK-BEKASI
454	MERAK-BLITAR
455	MERAK-BLORA
456	MERAK-BOGOR
457	MERAK-BOJONEGORO
458	MERAK-CEPU
459	MERAK-CIKARANG
460	MERAK-CIKIJING
461	MERAK-CILACAP
462	MERAK-CILEDUG
463	MERAK-CIREBON
464	MERAK-DEPOK
465	MERAK-GARUT
466	MERAK-JAKARTA(KALIDERES)
467	MERAK-JAKARTA(PRIOK)
468	MERAK-JAKARTA(RAMBUTAN)

No.	Trayek
469	MERAK-JEPARA
470	MERAK-KARANGANYAR
471	MERAK-KARAWANG
472	MERAK-KLATEN
473	MERAK-KOTA TASIKMALAYA
474	MERAK-KUNINGAN
475	MERAK-KUTOARJO.
476	MERAK-MADIUN
477	MERAK-MALANG
478	MERAK-PACITAN
479	MERAK-PATI
480	MERAK-PONOROGO
481	MERAK-PRACIMANTORO
482	MERAK-PURWANTORO
483	MERAK-PURWODADI
484	MERAK-PURWOKERTO
485	MERAK-PURWOREJO
486	MERAK-RAJAGALUH
487	MERAK-SEMIN
488	Merak-SOLO
489	MERAK-SRAGEN
490	MERAK-SUBANG
491	MERAK-SUKABUMI
492	MERAK-TEGAL
493	MERAK-TEMANGGUNG
494	MERAK-TUBAN
495	MERAK-TULUNGAGUNG
496	MERAK-WATES
497	MERAK-WONOGIRI
498	MERAK-WONOSARI
499	MERAK-WONOSOBO
500	MERAK-YOGYAKARTA
501	MEULABOH-MEDAN
502	MEUREUDU-MEDAN
503	MUARA DUA-KUDUS
504	MUARA DUA-PATI
505	MUARA ENIM-BLITAR
506	MUARA ENIM-SURABAYA PURABAYA
507	MUKO MUKO-PONOROGO
508	MUKOMUKO-WONOGIRI
509	PADANG ARO-KOTA DUMAI
510	PADANG ARO-KOTA PEKANBARU
511	PADANG PANJANG-PEKANBARU
512	PADANG-BANDUNG
513	PADANG-BENGKULU
514	PADANG-DUMAI
515	PADANG-JAKARTA
516	PADANG-JAKARTA(KP.RAMBUTAN)
517	PADANG-JAMBI
518	PADANG-MALANG
519	PADANG-PASIRPANGARAYAN
520	PADANG-PEKANBARU
521	PADANG-SUMENEP
522	PADANG-SUNGAIPENUH
523	PADANG-WONOGIRI
524	PADANG-YOGYAKARTA
525	PAGAR ALAM-BANJAR
526	PAGAR ALAM-BEKASI
527	PAGARALAM-BD.LAMPUNG

No.	Trayek
528	PAGARALAM-JAKARTA
529	PAGARALAM-PANJANG
530	PAINAN-JAKARTA
531	PAINAN-KOTA JAMBI
532	PAINAN-PEKANBARU
533	PALANGKARAYA-BUNTOK
534	PALEMBANG-BANDAR LAMPUNG
535	PALEMBANG-BANDUNG
536	PALEMBANG-BANYUWANGI
537	PALEMBANG-BEKASI
538	PALEMBANG-BENGKULU
539	PALEMBANG-BLITAR
540	PALEMBANG-BOGOR
541	PALEMBANG-JAKARTA(KALIDERES)
542	PALEMBANG-MALANG.
543	PALEMBANG-PAMEKASAN
544	PALEMBANG-PANJANG
545	PALEMBANG-PEKANBARU
546	PALEMBANG-PONOROGO
547	PALEMBANG-PURWANTORO
548	PALEMBANG-PURWOREJO
549	PALEMBANG-SOLO
550	PALEMBANG-WONOGIRI
551	PALEMBANG-WONOSARI
552	PALEMBANG-YOGYAKARTA
553	PAMEKASAN-BADUNG
554	PANGANDARAN-CILACAP
555	PANGANDARAN-KOTA YOGYAKARTA
556	PANGKALAN BRANDAN-PEKANBARU
557	PANTON LABU-MEDAN
558	PARIAMAN TENGAH-BLITAR
559	PARIAMAN-BD. LAMPUNG
560	PARIAMAN-BENGKULU
561	PARIAMAN-DUMAI
562	PARIAMAN-JAKARTA
563	PARIAMAN-PEKANBARU
564	PASAMAN-SRAGEN
565	PASIR PANGARAIAN-TULUNGAGUNG
566	PAYAKUMBUH BARAT-JAKARTA TIMUR
567	PAYAKUMBUH-JAMBI
568	PEKANBARU KOTA-KOTA MALANG
569	PEKANBARU-BANDUNG
570	PEKANBARU-BENGKULU
571	PEKANBARU-JAKARTA
572	PEKANBARU-JAMBI
573	PEKANBARU-PACITAN
574	PEKANBARU-PALEMBANG
575	PEKANBARU-PATI
576	PEKANBARU-PONOROGO
577	PEKANBARU-SOLO
578	PEKANBARU-SRAGEN
579	PEKANBARU-TULUNGAGUNG
580	PEKANBARU-WONOSARI
581	PEKANBARU-YOGYAKARTA
582	PENDOPO-BD.LAMPUNG
583	PONDOK CABE-KOTA KEDIRI
584	PONOROGO-BADUNG
585	PONOROGO-MATARAM
586	PROBOLINGGO-BADUNG

No.	Trayek
587	PURWODADI-BADUNG
588	PURWODADI-KARANG ASEM
589	PURWOKERTO-BADUNG
590	PURWOKERTO-JEMBER
591	PURWOKERTO-KARANGANYAR
592	PURWOKERTO-KOTA SURABAYA
593	PURWOKERTO-MALANG
594	PURWOKERTO-MATARAM
595	PURWOKERTO-NGIJON
596	PURWOKERTO-SOLO
597	PURWOKERTO-WATES
598	PURWOKERTO-YOGYAKARTA
599	PURWOREJO-BENGKULU
600	PURWOREJO-SURABAYA
601	RANGKAS BITUNG-MAGELANG UTARA
602	RANGKASBITUNG-CIKARANG
603	RANGKASBITUNG-JAKARTA
604	RANGKASBITUNG-JAKARTA(PRIOK)
605	RANTEPAO-KENDARI
606	RAO-KOTA JAMBI
607	RENGAT-SURABAYA PURABAYA
608	SAMALANGA-MEDAN
609	SAWAHLUNTO-DUMAI
610	SEMARANG MANGKANG-SURABAYA
611	SEMARANG-JEMBER
612	SEMARANG-MALANG
613	SEMARANG-MATARAM
614	SEMARANG-PADANGBAI
615	SEMARANG-WATES
616	SEMARANG-WONOSARI
617	SEMARANG-YOGYAKARTA
618	SERANG -BLORA
619	SERANG-JAKARTA
620	SERANG-KUNINGAN
621	SERANG-TASIKMALAYA
622	SIAK-KOTA BENGKULU
623	SIDIKALANG-Kota Pekanbaru
624	SIGLI-KUTACANE
625	SIGLI-MEDAN
626	SOLO-GOMBONG
627	SOLOK-PASIR PANGARAIAN
628	SOLO-NGIJON
629	SOLO-PACITAN
630	SOLO-PROBOLINGGO
631	SOLO-SURABAYA
632	SRAGEN-NGRAMBE
633	SUKABUMI-CIKARANG
634	SUKABUMI-PURWANTORO
635	SUKABUMI-WONOGIRI
636	SUKABUMI-WONOSARI
637	SUKABUMI-YOGYAKARTA
638	SUMENEP-BADUNG
639	SUMENEP-KARANG ASEM
640	SURABAYA PURABAYA-BADUNG
641	SURABAYA PURABAYA-BOBOTSARI
642	SURABAYA PURABAYA-PURWOKERTO
643	SURABAYA-BIMA
644	SURABAYA-BOJONEGORO
645	SURABAYA-MATARAM

No.	Trayek
646	SURABAYA-MERAK
647	SURABAYA-PADANGBAI
648	SURABAYA-SAPE
649	SURABAYA-SINGARAJA
650	TAKENGON-KUTACANE
651	TAKENGON-MEDAN
652	TANGERANG (PORIS PLWD)-GARUT
653	TANGERANG PORIS PLWD-BOJONEGORO
654	TANGERANG PORIS PLWD-CEPU
655	TANGERANG PORIS PLWD-KARANGANYAR
656	TANGERANG PORIS PLWD-KOTA MALANG
657	TANGERANG PORIS PLWD-MUNTILAN
658	TANGERANG PORIS PLWD-SUMENEP
659	TANGERANG PORIS PLWD-SURABAYA PURABAYA
660	TANGERANG(CIKOKOL)-KUNINGAN
661	TANGERANG-BANJARNEGARA
662	TANGERANG-BLORA
663	TANGERANG-BOBOTSARI
664	TANGERANG-BOGOR
665	TANGERANG-CILACAP
666	TANGERANG-GOMBONG
667	TANGERANG-JEPARA
668	TANGERANG-KOTA BANJAR
669	TANGERANG-PATI
670	TANGERANG-PEKALONGAN
671	TANGERANG-PONOROGO
672	TANGERANG-PURWODADI
673	TANGERANG-PURWOKERTO
674	TANGERANG-PURWOREJO
675	TANGERANG-SINGAPARNA
676	TANGERANG-TASIKMALAYA
677	TANGERANG-TEGAL
678	TANGERANG-WONOGIRI
679	TANGERANG-WONOSOBO
680	TANGERANG-YOGYAKARTA
681	TANGGERANG-BANJAR
682	TAPAKTUAN-MEDAN
683	TASIKMALAYA-KUDUS
684	TASIKMALAYA-SEMARANG
685	TASIKMALAYA-SOLO
686	TASIKMALAYA-SURABAYA
687	TASIKMALAYA-WONOGIRI
688	TASIKMALAYA-YOGYAKARTA
689	TEGAL-YOGYAKARTA
690	TEMANGGUNG-BADUNG
691	TEMANGGUNG-MALANG
692	TEMANGGUNG-MATARAM
693	TEMANGGUNG-SURABAYA
694	TEMBILAHAN-KOTA PALEMBANG
695	TERBANGGI BESAR-JAKARTA BARAT
696	TERBANGGI BESAR-JAKARTA TIMUR
697	TERBANGGI BESAR-JAKARTA UTARA
698	TERBANGGI BESAR-PONOROGO
699	TERBANGGI BESAR-SUBANG
700	TIRTAYASA-JAKARTA
701	TUBAN-MERAK
702	TULUNGAGUNG-BADUNG
703	TULUNGAGUNG-MATARAM
704	TULUNGAGUNG-PADANGBAI

No.	Trayek
705	TULUNGAGUNG-SUMBAWA BESAR
706	WONOGIRI-MATARAM
707	WONOGIRI-SURABAYA
708	YOGYAKARTA-BANYUWANGI
709	YOGYAKARTA-DELANGU
710	YOGYAKARTA-JEMBER
711	YOGYAKARTA-KALIANGET
712	YOGYAKARTA-KUDUS

No.	Trayek
713	YOGYAKARTA-PACITAN
714	YOGYAKARTA-PADANGBAI
715	YOGYAKARTA-PATI
716	YOGYAKARTA-PROBOLINGGO
717	YOGYAKARTA-PURWOKERTO
718	YOGYAKARTA-SOLO
719	YOGYAKARTA-SURABAYA
720	YOGYAKARTA-WONOGIRI

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2019



LAMPIRAN 16

Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun 2018

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3862179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: SK.650/AP.204 / DRJD /2018

TENTANG

PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN PERINTIS
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan jaringan angkutan penyeberangan melalui sabuk nasional untuk menunjang pengembangan ekonomi masyarakat serta penyediaan pelayanan angkutan penyeberangan di daerah tertinggal dan/atau wilayah terpencil, perlu diselenggarakan Angkutan Penyeberangan Perintis;

b. bahwa berdasarkan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017, telah diatur bahwa dalam rangka menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil serta menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, diselenggarakan kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis dengan penetapan lintas oleh Direktur Jenderal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010 - 2030;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 603);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.218/AP.204/DRJD/2018 tentang Komponen Penghasilan dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Perintis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2018.**

PERTAMA : Menetapkan lintas Penyeberangan Perintis tahun anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pelayanan Angkutan Penyeberangan pada Lintas Penyeberangan Perintis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mendapatkan subsidi dari Pemerintah berupa Subsidi Operasional Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Direktur Angkutan dan Multimoda serta para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat melakukan pengawasan pelaksanaan terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 FEBRUARI 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si.
NRP. 6205 0784

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
6. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai lintas Penyeberangan Perintis yang ditetapkan.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat
Nomor : SK.650/AP.204/DRJD/2017
Tanggal : 2 Februari 2018

LINTAS PENYEBERANGAN PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROVINSI	LINTAS	JARAK (mil)
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1 Singkil - Pulau Banyak	28
		2 Singkil - Gunung Sitoli	65
		3 Ulee Lheu - Lamteng	12
		4 Meulaboh - Sinabang	105
2	NAD - Sumatera Utara	5 Teluk Dalam - Pulau Tello	49
3	Sumatera Barat	6 Padang - Sikakap	104
		7 Padang - Siberut	82
		8 Siberut - Sikabaluan	45
		9 Padang - Sikabaluan	90
4	Kepulauan Riau	10 Tanjung Pinang - Tanjung Balai	107
		11 Dabo - Telaga Punggur	118
		12 Dabo - Tanjung Pinang	88
		13 Dabo - Penarik	9
		14 Kuala Tungkal - Dabo	72
		15 Mengkapan - Kampung Balak	17
		16 Kampung Balak - Pecah Buyung	30
		17 Pecah Buyung - Alai Insit	1,5
5	Bengkulu	18 Bengkulu - Enggano	106
6	Bangka Belitung	19 Sadai - Tanjung Ru	82
7	DKI Jakarta	20 Muara Angke - Pulau Untung Jawa	12
		21 Pulau Untung Jawa - Pulau Pramuka	16
		22 Pulau Pramuka - Pulau Kelapa	8
8	Jawa Tengah-Kalimantan Tengah	23 Kendal - Kumai	270
9	Jawa Timur	24 Kalianget - Jangkar	44
		25 Jangkar - Pulau Sapudi	85
		26 Pulau Sapudi - Kalianget	25
		27 Kalianget - Raas	20
		28 Raas - Jangkar	45
		29 Paciran - Bawean	74
		30 Bawean - Gersik	80
10	Kalimantan Barat	31 Rasau Jaya - Pinang Luar	0,6
		32 Parit Sarem - Sungai Nipah	0,6
		33 Sungai Mayam - Bintang Harapan Desa	0,6
		34 Ceremai - Sumpit	3
11	Kalimantan Utara	35 Tarakan - Nunukan	101
		36 Nunukan - Sebatik	3
		37 Nunukan - Seimenggaris	45
12	Kalimantan Selatan	38 Pulau Laut Timur - Sebuku	10
13	Kalimantan Utara - Sulawesi Tengah	39 Tarakan - Toli Toli	260
14	Kalimantan Selatan - Sulawesi Selatan	40 Garongkong - Batulicin	242
15	Nusa Tenggara Timur	41 Larantuka - Solor	16
		42 Solor - Lewoleba	22
		43 Adonara - Baranusa	60

NO	PROVINSI		LINTAS	JARAK (mil)
1	2		3	4
		44	Baranusa - Kalabahi	36
		45	Kalabahi - Bakalang	25
		46	Waingapu - Aimere	70
		47	Waingapu - Ende	100
		48	Waingapu - Sabu	120
		49	Kupang - Ende	150
		50	Pantai Baru - Ndau	40
		51	Kupang - Naikliu	52
		52	Adonara - Kewapante	116
		53	Kewapante - Palue	38
		54	Kewapante - Pemana	19
		55	Pemana - Pulau Besar	5
		56	Sabu - Ende	120
		57	Sabu - Rajua	20
16	NTT - Maluku	58	Kalabahi - Teluk Gurita	64
		59	Teluk Gurita - Pulau Wetar (Ilwaki)	126
		60	Pulau Wetar (Ilwaki) - Pulau Kisar	92
17	Sulawesi Selatan - NTT	61	Bira - Jampea	98
		62	Jampea - Marapokot	117
		63	Jampae - Labuhan Bajo	110
		64	Bira - Pattumbukan	55
		65	Patumbukan - Kayuadi	34
		66	Kayuadi - Jampea	27
		67	Jampea - Bonerate	52
		68	Bonerate - Kalaotoa	38
18	Sulwesi Tengah	69	Luwuk - Banggai	77
		70	Banggai - Boniton	10
		71	Kolonedale - Baturube	58
19	Gorontalo - Sulawesi Tengah	72	Gorontalo - Wakai	96
		73	Wakai - Ampana	53
		74	Wakai - Toboli	115
		75	Marisa - Dolong	45
		76	Dolong - Pasokan	8
		77	Pasokan - Ampana	60
20	Sulawesi Tenggara	78	Kendari - Langara	30
		79	Bau Bau - Pulau Siompu	14
		80	Bau Bau - Dongkala	38
		81	Dongkala - Mawasangka	14
		82	Kasipute - Dongkala	38
		83	Raha - Pure	11
		84	Kamaru - Wanci	34
		85	Bau Bau - Tolandona	8
21	Sulawesi Tengah - Maluku Utara	86	Banggai - Bobong	75
22	Sulawesi Utara	87	Bitung - Melonguane	212
		88	Melonguane - Amurang	263
		89	Musi - Mangaran	20
		90	Mangaran - Bitung	188
		91	Amurang - Pananaru	157
		92	Pananaru - Marore	92

NO	PROVINSI	LINTAS	JARAK (mil)
1	2	3	4
		93 Likupang - Pananaru	133
		94 Pananaru - Melonguane	114
		95 Minanga - Sawang	30
		96 Sawang - Pananaru	60
		97 Likupang - Biaro	43
		98 Biaro - Minanga	25
		99 Minanga - Makalehi	24
		100 Makalehi - Buhias	28
		101 Buhias - Sawang	6
		102 Bitung - Lembeh	1,1
		103 Likupang - Melonguane	209
		104 Melonguane - Marampit	67,5
		105 Marampit - Miangas	62,1
23	Maluku Utara	106 Doro (Kao) - Subaim	18
		107 Bastiong - Batang Dua	80
		108 Bastiong - Moti	26
		109 Moti - Makian	10
		110 Makian - Kayoa	27
		111 Kayoa - Babang	42
		112 Babang - Saketa	26
		113 Kupal - Kasiruta	52
		114 Kasiruta - Bosoa	9
		115 Kupal - Mandioli	9
		116 Kupal - Madapolo	50
		117 Doworo - Sofifi	8
		118 Babang - Obi	196
		119 Obi - Sanana	115
		120 Sanana - Mangole	5
		121 Mangole - Bobong	90
24	Maluku - Maluku Utara	122 Teluk Bara - Sanana	75
25	Maluku	123 Namlea - Teluk Bara	84
		124 Namlea - Kayeli	10
		125 Namlea-Manipa	23
		126 Manipa-Waisala	55
		127 Umeputih - Wailey	5
		128 Umeputih - Nalahia	19
		129 Nalahia - Amahai	23
		130 Waai - Kailolo	6
		131 Galala - Ambalau	70
		132 Ambalau - Wamsisi	15
		133 Wamsisi - Namrole	16
		134 Namrole - Leksula	15
		135 Leksula-Tifu	12
		136 Tifu-Nanali	62
		137 Ambon - Airnanang	170
		138 Airnanang - Geser	5
		139 Geser - Gorom	38
		140 Gorom - Kesui	43
		141 Kesui - Teor	19

NO	PROVINSI	LINTAS	JARAK (mil)
1	2	3	4
		142 Tual - Airnanang	187
		143 Tual - Tayando	38
		144 Tayando - Kur	43
		145 Tayando - Tam	18
		146 Tual - Kur	59
		147 Kur - Kesui	57
		148 Tual - Bandaeli	55
		149 Bandaeli - Hollat	6
		150 Tam - Fadol	21
		151 Kur - Kaimear	15
		152 Tual - Tam	50
		153 Tam - Mangur	16
		154 Tual - Weduar	30
		155 Tual - Dobo	109
		156 Dobo - Benjina	40
		157 Dobo - Tabarfane	42
		158 Tual - Larat	136
		159 Tual - Elat	23
		160 Saumlaki - Dobo	225
		161 Saumlaki - Adaut	16
		162 Adaut - Letuwurung	92
		163 Saumlaki - Seira	47
		164 Seira - Wunlah	41
		165 Wunlah - Larat	50
		166 Larat - Yaru	16
		167 Yaru - Momar	41
		168 Ambon - Demar	220
		169 Demar - Kisar	110
		170 Kisar - Leti	40
		171 Leti - Moa	12
		172 Moa - Lakor	27
		173 Lakor - Sermatang	49
		174 Sermatang - Tepa	45
		175 Tepa - Letwurung	26
		176 Letwurung - Dawelor	13
		177 Dawelor - Marsela	21
26	Maluku - Papua	178 Dobo - Pomako (Timika)	136
27	Maluku - Papua Barat	179 Tual - Kaimana	164
28	Papua Barat	180 Sorong - Arefi	58
		181 Arefi - Paam	42
		182 Sorong - Linmalas	80
		183 Linmalas - Waigama	30
		184 Sorong - Folley	75
		185 Sorong - Wejim	80
		186 Wejim - Kofiau	35
		187 Sorong-Dulbatan	75
		188 Sorong-Kalobo	20
		189 Sorong-Sarpele	85
		190 Sorong - Gag	85

NO	PROVINSI	LINTAS	JARAK (mil)
1	2	3	4
		191 Gag - Gebe	154
		192 Gebe - Patani	63
		193 Patani - Weda	65
		194 Sorong - Waigeo	43
		195 Sorong - Waigama	143
		196 Waigama - Wahai	81
		197 Wahai - Fak Fak	176
		198 Fak Fak - Sorong	197
		199 Sorong - Babo	243
		200 Babo - Bentuni	85
29	Papua - Papua Barat	201 Manokwari - Biak	146
		202 Manokwari - Numfor	50
30	Papua	203 Biak - Numfor	96
		204 Biak - Serui	120
		205 Serui - Waren	30
		206 Waren - Nabire	110
		207 Manokwari - Wasior	130
		208 Waisior - Windesi	40
		209 Wasior - Nabire	117
		210 Sarmi - Teba	63
		211 Teba - Bagusa	45
		212 Bagusa - Trimuris	25
		213 Trimuris - Kasonaweja	21
		214 Merauke - Kimam	194
		215 Kimam - Moor	180
		216 Moor - Bade	40
		217 Bade - Gatentiri	105
		218 Pomako - Agats	126
		219 Agats - Eci	187
		220 Agats - Sawaerma	66
		221 Agats - Atsy	86
		222 Atsy - Merauke	360

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. BUDI SETIYADI,SH., M.Si.
NRP. 62050784



LAMPIRAN 17

Lintas Penyeberangan Komersil Yang Beroperasi Tahun 2018

Lintas Penyeberangan Komersil 2018

NO.	PROVINSI	LINTASAN	JARAK (MIL)
1	N.A.D	1 Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)	17
		2 Labuhan Haji (NAD) - Sinabang (P. Semeulue,NAD)	80
2	SUMUT	3 Ajibata (Parapat, Sumut) - Tomok (D. Toba, Sumut)	1
		4 Onan Runggu (Kab. Samosir) - Balige (Kab. Toba Samosir)	10
		5 Tigaras (Kab. Simalungun) - Simanindo (Kab. Samosir)	6
		6 Nainggolan (Kab. Samosir) - Muara (Kab. Tapanuli Utara)	8
		7 Sibolga (Sumut) – Gng. Sitoli (P. Nias, Sumut)	86
		8 Sibolga - Teluk Dalam	100
3	RIAU	9 Sungai Selari (Riau) – Bengkalis (P. Bengkalis, Riau)	8
		10 Dumai - Tanjung Kapal (Rupat)	5
4	KEP. RIAU	11 T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri)	10
		12 Tj Balai Karimun - T. Punggur	68
5	SUMBAR	13 Padang - Tua Pejat	84
6	SUMSEL - KEP. BABEL	14 Tj. Api Api (Sumsel) – Tj. Kelian (P. Bangka, Babel)	30
7	JABAR - LAMPUNG	15 Merak (Jabar) – Bakauheni (Lampung)	15
8	JAWA TIMUR	16 Ujung (Surabaya, Jatim) – Kamal (P. Madura, Jatim)	2,5
		17 Paciran (Lamongan, Jatim) - Garongkong (Sulsel)	470
9	JAWA TIMUR - BALI	18 Ketapang (Jatim) – Gilimanuk (P. Bali, Bali)	6
10	BALI	19 Gunaksa (Klungkung) - Nusa Penida (Klungkung)	10
11	KALBAR	20 Rasau Jaya (Kalbar) – Teluk Batang (Kalbar)	80
		21 Bardan (Kalbar) - Siantan (Kalbar)	0,4
		22 Tebas Kuala - Tebas Seberang	1
		23 Tanjung Harapan - Teluk Kalong	0,6
12	KALSEL	24 Batu Licin (Kalsel) – Tj. Serdang (P. Laut, Kalsel)	6

NO.	PROVINSI	LINTASAN	JARAK (MIL)
13	KALTIM	25 Penajam (Kaltim) - Kariangau (Balik Papan, Kaltim)	6
		26 Tarakan - Ancam (kab. Nunukan)	38
14	KALTIM - SULBAR	27 Kariangau (Balikpapan, Kaltim) - Mamuju (Sulbar)	184
15	KALTIM-SULTENG	28 Kariangau (Balikpapan, Kaltim) - Taipa, (Palu, Sulteng)	204
16	SULUT - MALUT	29 Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut)	156
		30 Bitung (Sulut) - Tobelo (Halmahera Utara, Malut)	222
17	GORONTALO - SULTENG	31 Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng)	95
18	SULTENG	32 Luwuk (Kab. Banggai) - Salakan (Kab. Kepulauan Banggai)	48
19	SULAWESI SELATAN	33 Bira (Sulsel) – Pamatata (P. Selayar, Sulsel)	18
20	SULSEL - SULTRA	34 Bajoe (Sulsel) – Kolaka (Sultra)	85
		35 Siwa (Sulsel) - Lasusua (Sultra)	52
		36 Bira (Sulsel) – Tondasi (Sultra)	145
		37 Bira (Sulsel) – Sikeli (Sultra)	85
21	SULTRA	38 Torobulu (Sultra) – Tampo (P. Muna, Sultra)	19
		39 Wara (P. Muna, Sultra) – Bau –Bau (P. Buton, Sultra)	2,5
		40 Amolengu (Kab. Konawe Selatan, Sultra) - Labuhan (Kab. Buton Utara, Sultra)	5
22	BALI - NTB	41 Padang Bai (P. Bali, Bali) – Lembar (P. Lombok, NTB)	38
23	NTB	42 Kayangan (P. Lombok, NTB) – Pototano (P. Sumbawa, NTB)	12
24	NTB - NTT	43 Sape (P. Sumbawa, NTB) – Lab. Bajo (P. Flores, NTT)	75
		44 Sape (P. Sumbawa, NTB) – Waikelo (Kab. Sumba Barat Daya, NTT)	70
25	NTT	45 Kupang (P.Timor, NTT) – Rote (P. Rote, NTT)	40
		46 Kupang (P.Timor, NTT) – Seba (P. Sabu, NTT)	115
		47 Kupang (P.Timor, NTT) – Larantuka (P. Flores, NTT)	120
		48 Kupang (P.Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT)	137
		49 Kupang (P. Timor, NTT) - Aimere (P. Flores, NTT)	150
		50 Kupang (P. Timor, NTT) - Hansisi (P. Semau, NTT)	4

NO.	PROVINSI	LINTASAN	JARAK (MIL)
		51 Hansisi (P. Semau, NTT) - Pantai Baru(P. Rote, NTT)	40
		52 Kupang (P. Timor, NTT) - Lewoleba (P. Lembata, NTT)	128
		53 Lewoleba (P. Lembata, NTT) - Adonara (Kab. Flores Timur, NTT)	12
		54 Kupang (P. Timor, NTT) - Waingapu (P. Sumba, NTT)	232
26	MALUT	55 Bastiong (P. Ternate, Malut) - Sidangole (P. Halmahera, Malut)	12
		56 Bastiong (P. Ternate, Malut) - Rum (Tidore, Malut)	16
		57 Bastiong (P. Ternate) - Sofifi (P. Halmahera)	12
		58 Tobelo (Kab. Halmahera Utara, Malut) - Daruba (Kab. Pulau Morotai, Malut)	38
27	MALUKU	59 Pokka (P. Ambon, Maluku) – Galala (P. Ambon, Maluku)	0,5
		60 Hunimua (P. Ambon, Maluku) – Waipirit (P. Seram, Maluku)	13
		61 Galala (P. Ambon, Maluku) - Namlea (P. Buru, Maluku)	85

Sumber : Ditjen Perhubungan Darat, 2019



LAMPIRAN 18

Daftar Pelabuhan Dalam Kepmenhub Nomor KP.432/2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 901 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 745 Tahun 2016, telah ditetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

b. bahwa dalam rangka menampung perkembangan lingkungan strategis di bidang kepelabuhanan, perlu dilakukan penataan ulang lokasi dan hierarki pelabuhan serta rencana pengembangannya dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL.

PERTAMA : Menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

KETIGA : Rencana Induk Pelabuhan Nasional merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 745 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
13. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
14. Menteri Sekretariat Negara;
15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Kepala Staf Angkatan Laut;
17. Para Gubernur Provinsi;
18. Para Bupati/Walikota.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 901 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL



DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1-1

1.2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional 1-3

1.3. Peninjauan Kembali (reviu) atas Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 tahun 2013 1-4

1.4. Peninjauan Kembali (reviu) atas Cetak Biru Penyeberangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030 KM No. 6 Tahun 2010 1-5

BAB 2 KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL DAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DI BIDANG PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

2.1. Kebijakan Pelabuhan Nasional 2-1

2.2. Pelaksanaan atas rencana aksi di bidang pengaturan dan pelaksanaan kebijakan 2-9

BAB 3 PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KEPELABUHANAN DI INDONESIA

3.1. Latar Belakang 3-1

3.2. Perkembangan Kebutuhan Pergerakan 3-1

3.3. Implikasi Terhadap Rencana Pengembangan Pelabuhan 3-8

3.4. Transportasi Penyeberangan 3-12

BAB 4 LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN

4.1. Definisi/Pengertian 4-1

4.2. Kriteria Pelabuhan 4-2

4.3. Hasil Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan Nasional 4-7

LAMPIRAN

SUB LAMPIRAN A1 (Lokasi Pelabuhan Laut Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Laut);

SUB LAMPIRAN A2 (Lokasi Wilayah Kerja Pelabuhan);

SUB LAMPIRAN A3 (Rencana Lokasi Pelabuhan);

SUB LAMPIRAN A4 (Lokasi Terminal Umum);

SUB LAMPIRAN A5 (Pelabuhan Laut Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan);

SUB LAMPIRAN A6 (Pelabuhan Sungai dan Danau).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau yang membentang dari 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 95 ribu km. Dilihat dari keberadaannya di atas bumi, Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia dengan demikian memiliki posisi silang yang sangat strategis dan memiliki kekayaan alam yang melimpah yang meliputi sumber daya alam, serta jumlah penduduk yang cukup besar.

Oleh karena itu kegiatan transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan yang menghubungkan daerah pedalaman dan pulau-pulau di Indonesia serta menghubungkan Indonesia dengan luar negeri terutama dalam angkutan barang ekspor/impor, mempunyai peran yang sangat strategis dan penting sebagai pendukung kegiatan perekonomian, industri, pembangunan dan perdagangan. Saat ini transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan digunakan oleh sekitar 90% perdagangan domestik dan internasional.

Namun peran dimaksud tentunya **tidak akan terwujud tanpa kehadiran pelabuhan** yang berfungsi sebagai titik simpul antara moda air dengan moda darat. Pelabuhan dapat dikatakan pula sebagai salah satu mata rantai dalam rangka penyelenggaraan *total transport* (berpindahnya barang/penumpang dari tempat asalnya ke tujuan akhir dari barang/penumpang dimaksud yang memerlukan paling tidak 2 (dua) jenis moda transport yang berbeda. Bahkan dalam perkembangannya sekarang, pelabuhan dapat dipandang pula sebagai bagian dari kegiatan logistik. Selain itu keberadaan pelabuhan di sesuatu daerah akan menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi perdagangan di daerah yang bersangkutan.

Keberadaan suatu pelabuhan yang bersifat multi fungsi dan memberikan berbagai jenis jasa kepelabuhanan tidak terlepas dari kebutuhan akan adanya wilayah/lokasi tertentu (daratan dan perairan) yang memadai, tersedianya kelengkapan prasarana

dan sarana pelabuhan dan adanya kegiatan pengelolaan pelabuhan baik dari aspek penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan (pengusahaan) maupun dari aspek pengaturannya (pemerintahan). Kesemua itu harus dirancang dan ditata kelola sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan jasa kepelabuhanan baik untuk kapal, penumpang maupun barang, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, yang makin berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional.

Dalam hubungannya dengan fungsi dan peran pelabuhan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 nomor 16 mendefinisikan pelabuhan sebagai berikut: "*Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi*".

Selanjutnya fungsi dan peran pelabuhan juga dijelaskan dalam kutipan pernyataan dari *The Conference on Trade and Development* (UNCTAD), sebagai berikut: "*Seaports are interfaces between several mode of transport and they are centers for combined transport. Furthermore they are multifunctional markets and industrial areas where goods are not only in transit but they are also sorted, manufactured, and distributed. As a matter of fact, seaports are multi dimensional system which must be intergrated within logistic chains to fulfill properly their function. An efficient seaport requires besides infrastructure, superstructures and equipments, adequate connection to other transport modes, a motivated management and sufficiently qualified employees*".

Menyadari akan peranan pelabuhan yang multi fungsi sebagaimana diuraikan di atas, dan menyadari pula kenyataan bahwa di Indonesia terdapat ribuan pelabuhan (besar/kecil), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan kepada Menteri Perhubungan untuk menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang berlaku untuk jangka waktu 20 tahun (pasal 71 ayat 4)

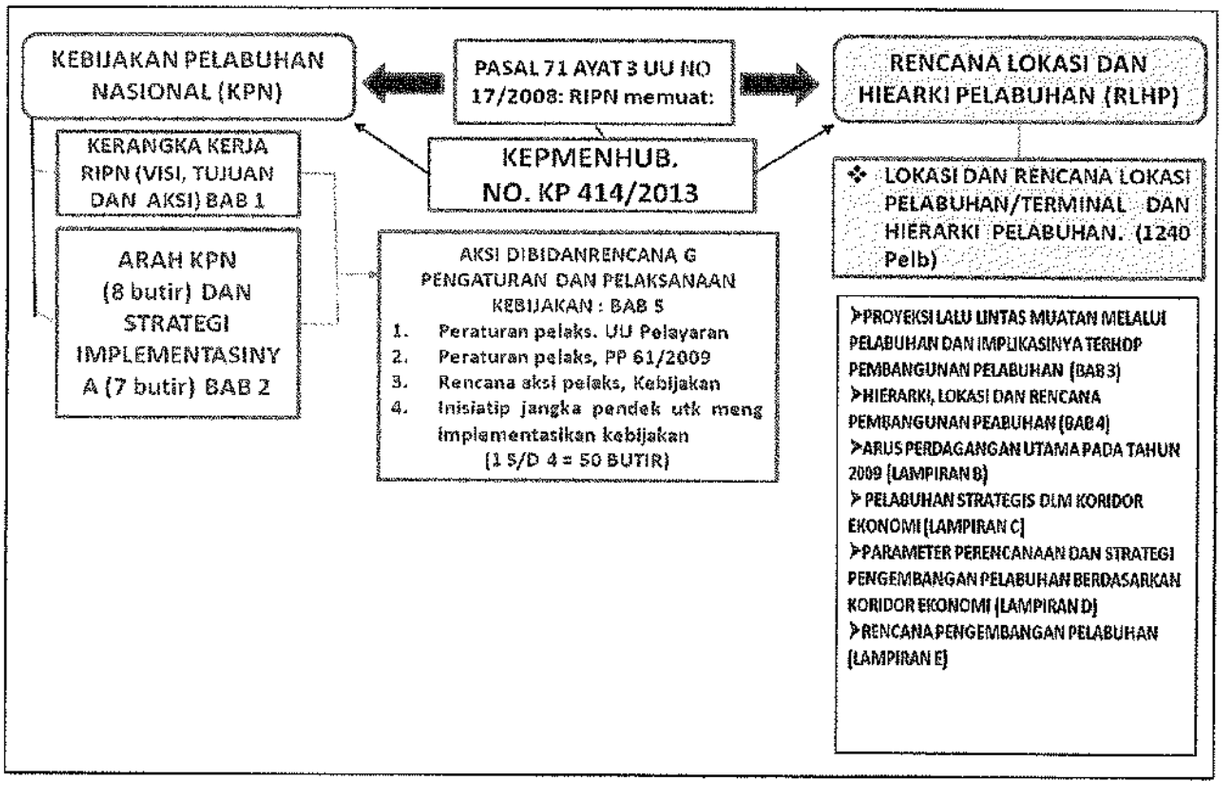
yang di dalamnya harus memuat: **a. Kebijakan Pelabuhan Nasional, dan b. Rencana Lokasi dan Hieraki Pelabuhan** (pasal 71 ayat 3).

Rencana Induk Pelabuhan Nasional dimaksud merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (pasal 71 ayat 1).

1.2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 71 ayat 4 dimaksud yang diulang/dipertegas pula dalam pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, **telah dilaksanakan** oleh Menteri Perhubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang pada intinya menguraikan hal hal sebagai berikut:

- Kebijakan pelabuhan nasional dan strategi implementasinya disertai uraian mengenai Rencana aksi dibidang pengaturan dan pelaksanaan kebijakan
- Proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan dan implikasinya terhadap pembangunanan kepelabuhanan di Indonesia
- Hierarki, lokasi dan rencana pembangunan pelabuhan disertai uraian mengenai Pelabuhan strategis dalam koridor ekonomi, Parameter Perencanaan dan Strategi Pengembangan Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Rencana Pengembangan Pelabuhan.



Gambar 1.1 Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagaimana dirumuskan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013

1.3. Peninjauan Kembali (*reviu*) atas Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 tahun 2013

Meskipun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 baru berusia 3 (tiga) tahun, namun dengan terjadinya lingkungan strategis yang berkembang/berubah khususnya perkembangan di daerah serta perubahan wilayah administratif dalam penyebutan lokasi pelabuhan, dipandang perlu dilakukan *reviu* atas Rencana Induk Pelabuhan yang sudah dirumuskan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013.

Pertimbangan untuk melakukan *reviu* meliputi antara lain :

- Pemekaran wilayah Propinsi maupun Kota/Kabupaten serta pengembangannya;
- Perlu memadukan simpul-simpul moda transportasi perairan (laut, sungai, danau dan penyeberangan);

- Ditetapkannya 9 (sembilan) Agenda Pembangunan Pemerintahan yang dikenal NAWACITA yang diantaranya akan diwujudkan dengan program Tol Laut;
- Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada awal Tahun 2016;
- 10 destinasi wisata prioritas nasional.

Hal-hal tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan peninjauan kembali atas beberapa substansi Keputusan Menteri Perhubungan tersebut sehingga dapat disinkronkan dengan perkembangan lingkungan strategis tersebut di atas.

Peninjauan kembali (*reviu*) dimaksud **utamanya difokuskan** pada **rencana, lokasi dan hierarki pelabuhan beserta rencana pengembangannya**, sedangkan mengenai **rumusan Kebijakan Pelabuhan Nasional**, secara umum masih relevan dengan kebijakan pemerintahan saat ini.

1.4 Peninjauan Kembali (*reviu*) atas Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030 KM No. 6 Tahun 2010

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2010 selama ini selalu menjadi acuan awal dalam perencanaan lintas penyeberangan, pembangunan pelabuhan dan penyediaan armada penyeberangan. Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota berkoordinasi agar program pengembangan terkait transportasi penyeberangan selalu selaras dengan visi dan misi Cetak Biru Transportasi Penyeberangan 2010-2030. Semangat pembangunan tersebut berjalan dengan sangat dinamis baik dari sisi spasial lokasi maupun percepatan pembangunan ataupun penyediaan layanan transportasi penyeberangan di daerah.

Perkembangan tata ruang, pemekaran otonomi daerah, pengembangan jaringan jalan dan jalan rel maupun perkembangan informasi kebijakan lain yang lebih rinci terkait kebutuhan pengembangan transportasi penyeberangan di daerah menjadikan optimisme atas strategi pengembangan saat ini. Optimisme tersebut mengakibatkan pelaksanaan atas strategi pengembangan tersebut menjadi lebih cepat dari yang dijadwalkan, perubahan lokasi pelabuhan maupun lintas penyeberangan,

BAB II

KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL DAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DI BIDANG PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

2.1. Kebijakan Pelabuhan Nasional

2.1.1. Kebijakan Pelabuhan Nasional dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013, kebijakan Kepelabuhanan Nasional khususnya pada pelabuhan-pelabuhan utama akan merefleksikan perkembangan sektor kepelabuhanan menjadi industri jasa kepelabuhanan kelas dunia yang kompetitif dengan sistim operasi pelabuhan sesuai standar internasional baik dalam bidang keselamatan pelayaran maupun perlindungan lingkungan maritim.

Kebijakan Pelabuhan Nasional diarahkan dalam upaya:

- **Mendorong investasi swasta**

  Partisipasi swasta/badan usaha merupakan salah satu sektor yang menunjang keberhasilan dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan karena kemampuan finansial sektor publik terbatas.

- **Mendorong Persaingan**

  Mewujudkan iklim persaingan yang sehat dalam usaha kepelabuhanan diharapkan dapat menghasilan jasa kepelabuhanan yang efektif dan efisien.

- **Pemberdayaan Peran Penyelenggara Pelabuhan**

  Upaya perwujudan peran Penyelenggara Pelabuhan sebaagai pemegang hak pengelolaan lahan daratan dan perairan dapat dilaksanakan secara bertahap.

- **Terwujudnya Integrasi Perencanaan**

  Perencanaan pelabuhan harus mampu mengantisipasi dinamika pertumbuhan kegiatan ekonomi, dan terintegrasi dalam sistem transportasi nasional, sistim

logistik nasional, rencana tata ruang wilayah serta keterlibatan masyarakat setempat.

- **Menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan fleksibel**

  Peraturan pelaksanaan yang menunjang implementasi yang lebih operasional perlu diterbitkan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, mengatur prosedur penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang lebih efisien dan mengatasi kemungkinan kegagalan pasar.

- **Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin**

  Sektor pelabuhan harus memiliki tingkat keselamatan kapal dan keamanan fasilitas yang baik serta mempunyai aset dan sumber daya manusia yang andal.

- **Meningkatkan perlindungan maritim**

  Pengembangan pelabuhan akan memperluas penggunaan wilayah perairan yang akan meningkatkan dampak terhadap lingkungan maritim. Penyelenggara pelabuhan harus lebih cermat dalam mitigasi lingkungan guna memperkecil kemungkinan dampak pencemaran lingkungan maritim.

- **Mengembangkan sumberdaya manusia**

  Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan tingkat efisiensi.

Upaya dimaksud pada hakikatnya merupakan penjabaran dari amanat yang tercantum dalam Konsiderans **("Menimbang")** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran **huruf d** yang menyebutkan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran (termasuk kepelabuhanan) yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, peran swasta, dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional.

Sejalan dengan itu, dari aspek kelembagaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memperkenalkan kebijakan baru dalam penyelenggaraan pelabuhan yaitu:

- Dipisahkannya fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaraan pelabuhan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan secara komersial (disingkat pelabuhan komersial) yang diwujudkan dengan pembentukan Otoritas Pelabuhan (OP) sebagai regulator dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebagai operator.
- Pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) sebagai penyelenggara pelabuhan di pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial (disingkat pelabuhan non komersial) yang memiliki fungsi rangkap yaitu sebagai regulator dan operator pelabuhan.
- Diciptakannya hubungan kontraktual antara Otoritas Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan dalam rangka penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam bentuk pemberian konsesi atau instrumen hukum dalam bentuk lainnya (selain pemberian konsesi).
- Pembentukan Syahbandar sebagai lembaga yang berdiri sendiri di pelabuhan komersial.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, pada Bab X, Ketentuan Lain-Lain, pasal 162 menjelaskan bahwasannya pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang diusahakan secara komersil untuk kegiatan pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Laut yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan (Otoritas Pelabuhan Penyeberangan, sesuai dengan PM No. 85 Tahun 2011).

Penyelenggaraan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersil dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemerintah, Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi atau Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.1.2. Implementasi Konsep Tol Laut

Perumusan Kebijakan Pelabuhan Nasional sebagaimana diuraikan diatas bertitik tolak dari Undang Undang Pelayaran, namun perlu diperhatikan pula lingkungan strategis yang terjadi saat ini yaitu dengan ditetapkannya 9 (sembilan) Agenda Pembangunan pemerintahan dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 yang dikenal dengan Nawacita yaitu:

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui : Indonesia Pintar, Indonesia sehat, Indonesia Sejahtera.
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Nawacita dimaksud khususnya butir 3 (tiga), yang menyebutkan "akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan" akan diwujudkan dengan program Tol Laut yang dapat diartikan sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan angkutan laut yang menghubungkan wilayah Indonesia yang sudah maju dan wilayah Indonesia yang belum maju atau tertinggal termasuk daerah perbatasan secara tetap dan teratur (berjadwal).

Disamping itu, dalam upaya untuk melaksanakan program Tol Laut, Dirjen Perhubungan Laut dalam Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 Tanggal 26 Oktober 2015 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut, yang telah diubah dengan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut AL.108/7/8/DJPL-15 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Jaringan Trayek Pelayaran Tol Laut Tahun Anggaran 2016 dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya telah menetapkan 6 (enam) jaringan Trayek Angkutan Barang Melalui Laut atas dasar Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) yaitu:

- Trayek 1 : Tg. Perak – Wanci – Namlea – Fak-fak – Kaimana – Timika – Kaimana – Fak-fak – Namlea – Wanci – Tg. Perak
- Trayek 2 : Tg Perak – Kalabahi – Moa – Saumlaki – Dobo – Merauke – Dobo – Saumlaki – Moa – Kalabahi – Tg. Perak
- Trayek 3 : Tg Perak – Larantuka – Lewoleba – Rote – Sabu – Waingapu – Sabu – Rote – Lewoleba – Larantuka – Tg. Perak
- Trayek 4 : Tg Priok – Makassar – Manokwari – Wasior – Nabire – Serui – Biak – Serui – Nabire – Wasior – Manokwari – Makassar – Tg. Priok
- Trayek 5 : Makassar – Tahuna – Lirung – Morotai – Tobelo – Ternate – Babang – Ternate – Tobelo – Morotai – Lirung – Tahuna – Makassar
- Trayek 6 : Tg. Priok – Tarempa – Natuna – Tarempa – Tg. Priok

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan transportasi laut dalam trayek-trayek dimaksud, maka pelabuhan-pelabuhan yang akan dikunjungi kapal yang bersangkutan harus dilengkapi sarana dan prasananya yang memadai serta ditingkatkan kinerja operasionalnya.

Di samping itu salah satu program untuk menunjang konsep "Tol Laut" adalah program pengembangan kepelabuhanan antara lain melalui perubahan kelembagaan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) yaitu : dengan merubah pola pengelolaan keuangan beberapa Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), sepanjang (khususnya) yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pelayanan umum penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan.

Selanjutnya tugas Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) yang bersifat menjalankan fungsi pemerintahan (Keselamatan Pelayaran) menjadi unit yang terpisah.

2.1.3. Kebijakan Sabuk Penyeberangan Nasional

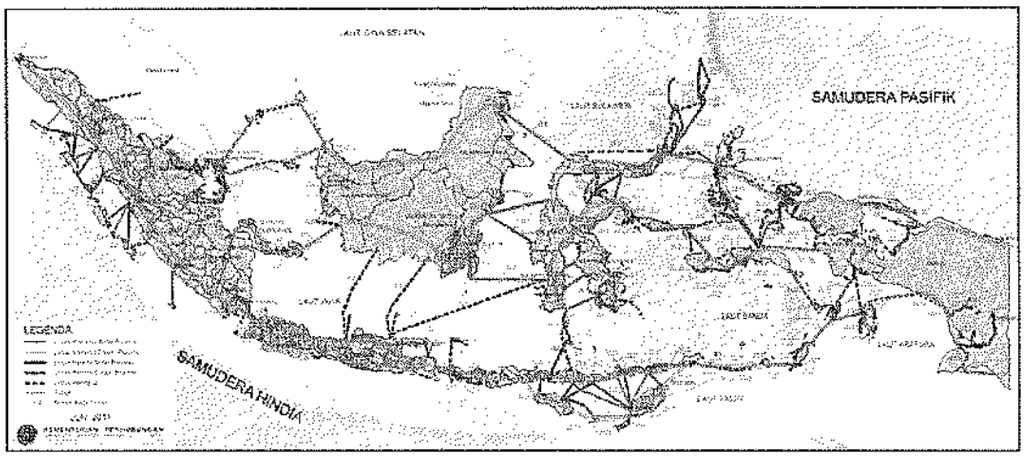
Salah satu kebijakan untuk menunjang konsep tol laut adalah pengembangan Sabuk Penyeberangan Nasional.

Kebijakan Sabuk Penyeberangan Nasional adalah konsepsi spasial terkait pengembangan jaringan transportasi penyeberangan nasional sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan nasional dan jaringan jalan rel yang terputus oleh perairan sehingga menjadi suatu kesatuan pengembangan transportasi darat nasional yang utuh dan tidak terpisahkan.

Sabuk Utara adalah koridor pengembangan jaringan penyeberangan nasional di bagian utara Indonesia. Sabuk Tengah adalah koridor pengembangan jaringan penyeberangan nasional di bagian tengah Indonesia. Sabuk Selatan adalah koridor pengembangan jaringan penyeberangan nasional di bagian selatan Indonesia dan penghubung Antar Sabuk adalah koridor dan lintas penyeberangan yang menghubungkan antar sabuk dari arah utara ke tengah ke selatan Indonesia.

Untuk mewujudkan kebijakan sabuk penyeberangan nasional harus didukung dengan penyelenggaraan pelabuhan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, pada Bab X, Ketentuan Lain-Lain, pasal 162 menjelaskan bahwasannya pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang diusahakan secara komersil untuk kegiatan pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Laut yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan (Otoritas Pelabuhan Penyeberangan, sesuai dengan PM No. 85 Tahun 2011).

Penyelenggaraan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersil dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemerintah, Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi atau Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten/Kota.



Gambar 2.1 Kebijakan Sabuk Penyeberangan Nasional

2.1.4. Kebijakan Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau

2.1.4.1. Peran jaringan pelayanan lalu-lintas angkutan sungai sebagai penghubung antar wilayah, mencakup:

- Penghubung wilayah antar negara;
- Penghubung wilayah antar provinsi;
- Penghubung wilayah antar kabupaten dalam provinsi;
- Penghubung wilayah dalam kabupaten.

2.1.4.2. Peran jaringan pelayanan lalu-lintas angkutan sungai sebagai penghubung antar simpul dalam jaringan prasarana transportasi secara terpadu, intra atau antar moda, mencakup:

- Penghubung Antarmoda Sungai-Laut;
- Penghubung Antarmoda Sungai-Udara;
- Penghubung Antarmoda Sungai-Kereta Api;
- Penghubung Antarmoda Sungai-Jalan Raya.

2.1.4.3. Peran jaringan pelayanan lalu-lintas angkutan sungai sebagai penghubung logistik, mencakup:

- Penghubung Logistik Batubara;
- Penghubung Logistik CPO;
- Penghubung Logistik Karet;
- Penghubung Logistik BBM dan Gas;

- Penghubung Logistik Hasil Hutan.
- Penghubung Logistik Tanaman Pangan dan Perikanan Darat

2.1.4.4. Peran jaringan pelayanan lalu-lintas angkutan sungai sebagai penyedia jasa perpindahan orang atau barang, mencakup:

- Penyedia Jasa Perpindahan Orang-Barang;
- Penyedia Jasa Perpindahan Barang.

2.1.5. Aksesibilitas 10 Destinasi Wisata Nasional

Pelabuhan-pelabuhan yang menunjang 10 destinasi wisata nasional sesuai surat Sekretaris Kabinet Nomor B.652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 06 November 2015 tentang Tutorial Presiden Republik Indonesia tentang Pariwisata, adalah sebagai berikut :

1. Destinasi wisata Danau Toba dapat dilayani oleh pelabuhan laut Belawan dan pelabuhan danau Tigaras, Simanindo, Muara, Sipinggan Nainggolan, Tomok, Ajibata, Onanrunggu dan Balige;
2. Destinasi wisata Tanjung Kelayang dapat dilayani oleh pelabuhan laut Tanjung Pandan, Tanjung Batu dan Tanjung Ruu;
3. Destinasi wisata Tanjung Lesung dapat dilayani oleh pelabuhan laut Banten, Labuhan, Panimbang, Anyer Lor dan Merak;
4. Destinasi wisata Kepulauan Seribu dapat dilayani oleh pelabuhan laut P. Pramuka, P. Bidadari, P. Kelapa, P. Lancang, P. Pari, P. Payung, P. Sebira, P. Tidung dan P. Untung Jawa;
5. Destinasi wisata Borobudur dapat dilayani oleh pelabuhan laut Tanjung Emas dan Tanjung Intan;
6. Destinasi wisata Bromo-Tengger-Semeru dapat dilayani oleh pelabuhan laut Tanjung Perak, Tanjung Tembaga, Tanjung Wangi dan Ketapang;
7. Destinasi wisata Mandalika dapat dilayani oleh pelabuhan laut Kayangan dan Lembar;
8. Destinasi wisata Labuhan Bajo dapat dilayani oleh pelabuhan laut Labuhan Bajo;

9. Destinasi wisata Wakatobi dapat dilayani oleh pelabuhan laut Baubau, Wanci, Kaledupa, Tomea dan Binongko;

10. Destinasi wisata Morotai dapat dilayani oleh pelabuhan laut Daruba dan Wayabula.

2.1.6. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) berlaku awal tahun 2016 yang merupakan integerasi ekonomi regional 10 negara Asia Tenggara.

Perdagangan bebas lintas batas akan mengalir cepat dan massal. Aliran bebas investasi, modal, dan tenaga kerja profesional akan mewarnai pergerakan ekonomi ASEAN. Potensi pasar ASEAN cukup besar yaitu 622 juta orang, dimana 250 juta orang diantaranya ada di Indonesia. Total nilai perdagangan Intra ASEAN sebesar 1,5 Trilyun $ US pertahun dan produk domestik bruto ASEAN sebesar 2,6 Trilyun $ US pertahun.

Sebagai antisipasi dari diberlakukannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan meningkatkan volume perdagangan regional ASEAN yang pada gilirannya akan meningkatnya kunjungan kapal dan angkutan barang melalui laut ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia perlu kesiapan pelabuhan dari aspek penyediaan fasilitas fisik pelabuhan serta kinerja operasionalnya perlu menjadi perhatian.

Untuk mendukung kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah direncanakan pengembangan lintas penyeberangan internasional Dumai – Malaka (Malaysia), Belawan – Penang (Malaysia) dan Bitung – General Santos (Filipina).

2.2. Pelaksanaan Atas Rencana Aksi Dibidang Pengaturan dan Pelaksanaan Kebijakan

Dalam rangka menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan fleksibel telah dirumuskan **rencana aksi dibidang pengaturan dan pelaksanaan kebijakan** yang meliputi :

- Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

- Rencana aksi lebih lanjut untuk menunjang pelaksanaan kebijakan;
- Inisiatif jangka pendek untuk mengimplementasikan kebijakan.

Dalam kurun waktu hampir 3 (tiga) tahun setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 telah banyak dikeluarkan regulasi dalam rangka pelaksanaan rencana aksi dimaksud antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 Tahun 2016 tentang Tarif dan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan & Reklamasi;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan & Reklamasi;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhanan.

BAB III

PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KEPELABUHANAN DI INDONESIA

3.1. Latar Belakang

Proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan di masa mendatang dibuat dengan memperbaharui (*updating*) prediksi kebutuhan pergerakan transportasi laut pada RIPN sebelumnya yang berbasis kepada pergerakan sampai dengan tahun 2009, dengan menyertakan data pergerakan dan bongkar muat di pelabuhan pada tahun 2013 dan 2014.

Pendekatan utama dalam prediksi kebutuhan pengembangan pelabuhan dalam reviu RIPN ini adalah dengan pendekatan tingkat pertumbuhan pergerakan di pelabuhan, yang dalam pola distribusinya memperhatikan kebijakan pemerintah dalam pengembangan Tol Laut, dan kebijakan pemerintah dalam konektivitas multimoda.

Dengan demikian, perkembangan lalu lintas di pelabuhan dan pola distribusinya didasarkan kepada pendekatan tingkat pertumbuhan kebutuhan pergerakan di pelabuhan dan juga memperhatikan pendekatan model jaringan multimoda untuk melihat peran pelabuhan dalam pengembangan Tol Laut dan *Short-Sea Shipping*.

Dengan tumbuh dan berkembangnya lalu lintas muatan di masa mendatang memberikan implikasi terhadap pembangunan kepelabuhan di Indonesia, tidak hanya dalam pengembangan kapasitasnya, melainkan pula peningkatan konektivitasnya dengan wilayah yang dilayaninya.

3.2. Perkembangan Kebutuhan Pergerakan

3.2.1. Tingkat Pertumbuhan Eksisting

Dalam RIPN terdahulu, tingkat pertumbuhan kebutuhan pergerakan yang digunakan untuk Skenario Dasar (*Base Case*) adalah 7.6% rata-rata untuk seluruh jenis komoditas. Sementara itu, data muatan pelayaran setelah tahun 2009

menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat pertumbuhan (perlambatan) dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 5,09%.

Sementara pola pergerakan nampak tidak jauh berbeda.

Tabel 3.1. Perkembangan Muatan di Pelabuhan Indonesia Tahun 2009-2013

No	Tahun	Muatan (Ton)	Perkembangan	
			Ton	%
1	2009	79,953,771		
2	2010	93,805,476	13,851,705	17.32
3	2011	97,636,973	3,831,497	4.08
4	2012	108,601,276	10,964,303	11.23
5	2013	111,870,322	3,269,046	3.01
Perkembangan Kumulatif			31,916,551	35.65
Perkembangan Rata-Rata per Tahun			4,559,507	**5.09**

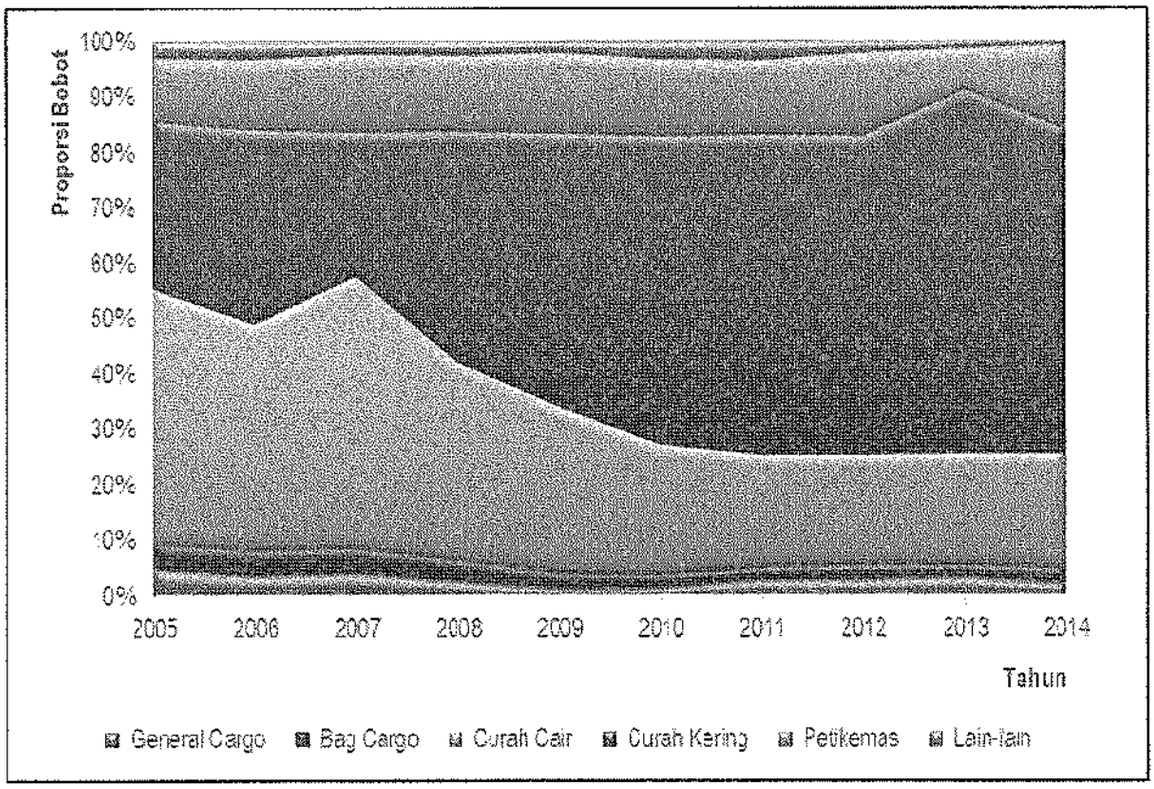
Bila dilihat untuk masing-masing komoditas (berdasarkan jenis kemasan), kecenderungan perkembangan volume bongkar muat adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Tingkat Perkembangan Muatan menurut jenis kemasan tahun 2004-2014

Komoditas Menurut Jenis Kemasan	Perkembangan (%/tahun)		
	2004-2009	2009-2014	Rata-rata
General Cargo	-17.5	23.4	3.0
Bag Cargo	-1.3	4.9	1.8
Curah Cair	-3.5	1.4	-1.1
Curah Kering	19.7	10.1	14.9
Petikemas	7.9	19.2	13.5
Lain-lain	-1.4	-1.9	-1.6

Tampak bahwa dalam 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan volume bongkar muat barang yang cukup signifikan, kecuali pada tahun 2014 dan setelahnya yang mengalami perlambatan. Tingginya pertumbuhan volume peti kemas didorong juga oleh kontainerisasi. Sementara komoditas curah cair cenderung mengalami penurunan sedangkan curah kering pertumbuhannya masih tinggi.

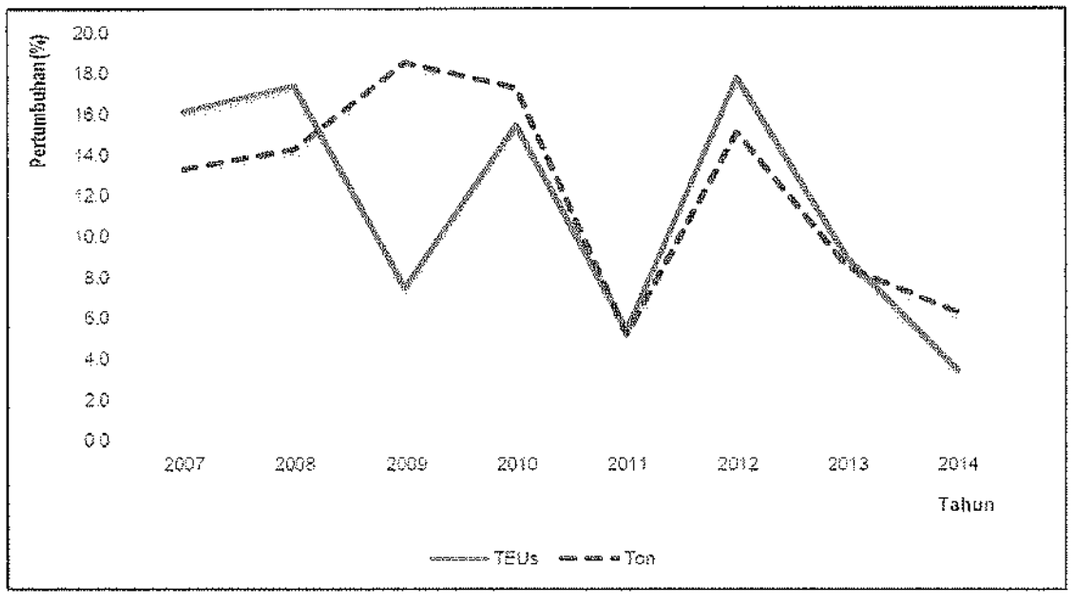
Ditinjau dari total bobot (ton), proporsi masing-masing jenis kemasan komoditas mengalami perubahan yang berbeda-beda seperti dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Proporsi Bobot Bongkar Muat Menurut Jenis Kemasan

Barang curah kering pada tahun 2014 meliputi 58,4% total bobot barang yang dibongkar-muat di pelabuhan, naik dari 30,3% pada tahun 2005. Sebaliknya curah cair yang pada tahun 2005 cukup mendominasi dengan 45,8% dari total bobot, turun menjadi 20,9% pada tahun 2014. Sementara itu, komoditas jenis kemasan lain tidak banyak berubah proporsi bobotnya dengan peti kemas yang cenderung mengalami sedikit kenaikan.

Khusus, untuk peti kemas, pertumbuhannya dalam 7 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan (lihat gambar di bawah), dengan perbedaan yang mencolok pada tahun-tahun tertentu antara bobot muatan (ton) dengan TEUs-nya. Perbedaan ini dimungkinkan karena adanya pergerakan peti kemas kosong. Namun secara rata-rata, bobot muatan per TEUs tidak banyak berubah, yaitu sekitar 11,5 – 12,8 ton/TEU.



Gambar 3.2. Fluktuasi Perkembangan Volume Bongkar Muat Peti kemas dalam TEUs dan Bobot Muatan (ton)

3.2.2. Peran Pelabuhan dalam Pengembangan Tol Laut dan *Short-Sea Shipping*

Dalam RIPN yang terdahulu, terdapat beberapa rencana pengembangan transportasi laut yang belum dielaborasi sejauh mana peran pelabuhan serta pengaruh dari implementasi rencana-rencana tersebut terhadap pelabuhan. Rencana pengembangan atau kebijakan yang kemudian dikaji dalam reviu RIPN ini diantaranya adalah:

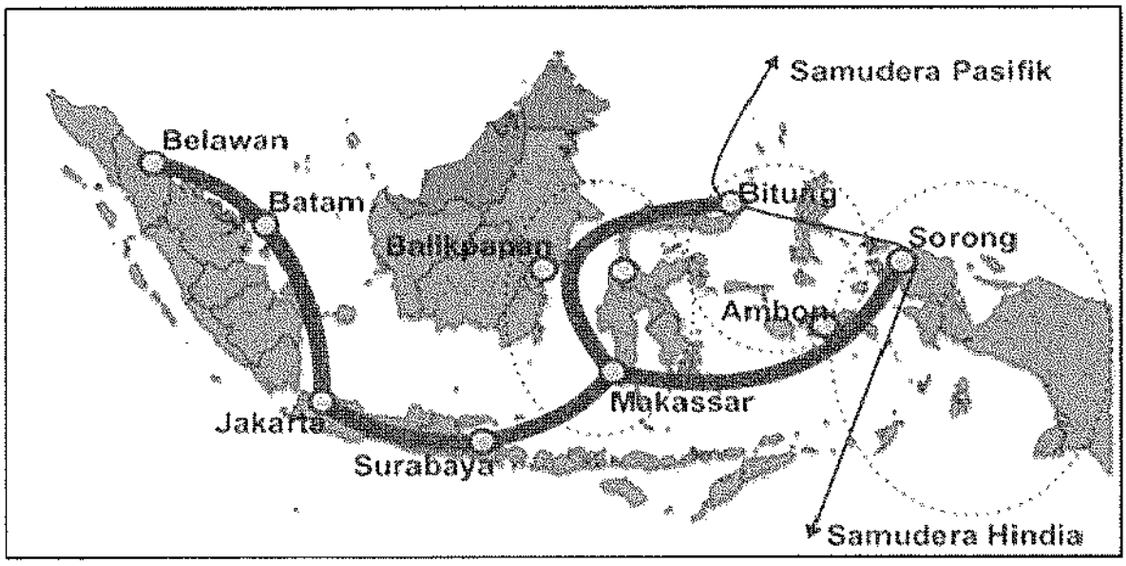
- Pengembangan Jaringan Tol Laut
- Pengembangan Jaringan *Short Sea Shipping* (SSS)

Kajian kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bantu pemodelan jaringan multimoda-multikomoditas[1], yang memperhitungkan jaringan pelayaran, jaringan jalan dan jaringan kereta api untuk komoditas barang berdasarkan jenis kemasan. Di mana pelabuhan (dan terminal atau stasiun) juga dimodelkan sebagai ruas dan titik dimana arus barang berpindah dari satu moda ke moda lainnya.

Terdapat beberapa definisi mengenai Tol Laut, salah satu yang cukup mengemuka adalah bahwa Tol Laut merupakan jaringan pelayaran peti kemas terjadwal (liner) yang menyinggahi beberapa pelabuhan utama di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Papua.

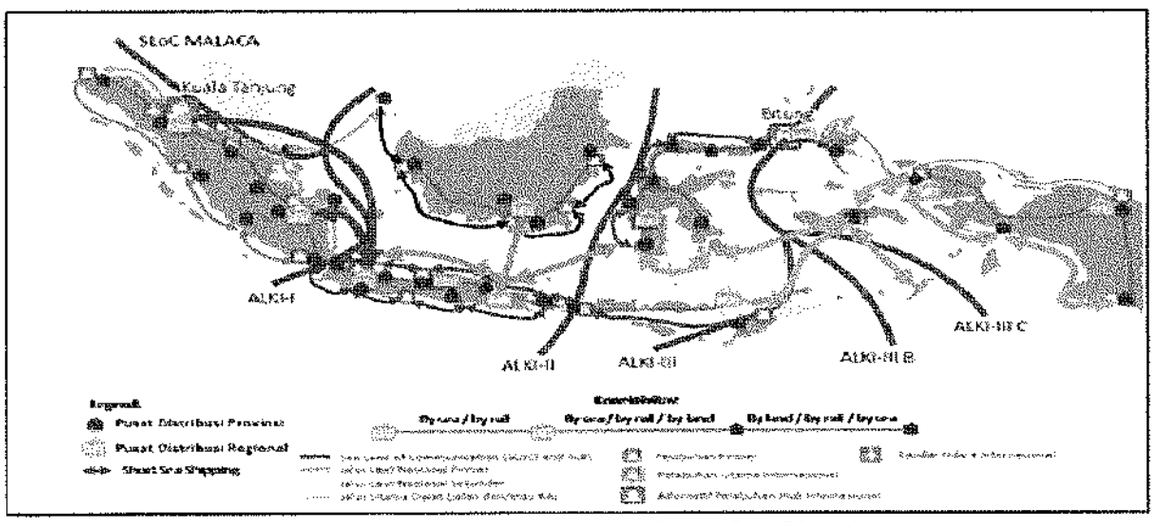
[1] Hasil pemodelan dan kajian kebijakan ini juga dibahas dalam tulisan berjudul Analisis Kebijakan Jaringan Angkutan Laut Indonesia dengan Pendekatan Model Jaringan Multimoda Multikomoditas, ITB dan IPC, 2015

Kapal yang digunakan adalah kapal peti kemas berukuran di atas 1000 TEUs. Tentu saja pengembangan jaringan pelayaran ini (rutenya lihat gambar) akan didukung dengan pengembangan terminal peti kemas yang dapat mengakomodasi kapal peti kemas dengan ukuran tersebut serta ketersediaan dermaga dan kinerja bongkar muat yang tinggi.



Gambar 3.3 Rute Tol Laut

Sementara itu, di dalam Dokumen Sistem Logistik Nasional, direkomendasikan untuk dikembangkan Jaringan Pelayaran *Short Sea Shipping* yang merupakan jaringan rute pelayaran yang bergerak di sepanjang garis pantai atau di antara pulau-pulau yang berdekatan, yang tujuan utamanya adalah mengurangi penggunaan truk di jalan. Rute yang direkomendasikan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.4 Jaringan pelayaran *Short Sea Shipping*

Pengembangan Jaringan Pelayaran Tol Laut dan *Short Sea Shipping* maupun kombinasinya diprediksi akan meningkatkan *share* moda laut. Namun, Jaringan Tol Laut ini seharusnya didukung oleh pengaturan rute pelayaran lain yang membentuk rute *feeder*. Dengan sistem rute seperti ini, diperkirakan akan memperbaiki biaya transportasi total (semua moda) sebesar 2,66% (atau sekitar 20% dari total biaya transportasi laut saja) dan mengurangi biaya transportasi moda jalan sebesar 8,64% dari kondisi eksiting. Sebaliknya tanpa pengaturan rute *feeder*, yang berarti harus bersaing dengan pelayaran yang mempunyai jadwal yang lebih fleksibel dan sering, Tol Laut dengan ukuran kapal 3000 TEUs diperkirakan akan memiliki muatan yang lebih rendah, sehingga efesiensi biaya transport tidak terwujud.

Skenario *Short Sea Shipping* mempunyai biaya transportasi total yang lebih mahal dan hanya memberikan sedikit kontribusi pada peningkatan sharing moda transportasi laut untuk pergerakan dalam pulau, akibat dari biaya yang dikeluarkan pemilik barang bila menggunakan rute *Short Sea Shipping* yang jauh lebih mahal di bandingkan dengan transportasi menggunakan moda truk.

Short Sea Shipping belum memberikan perbaikan yang signifikan, kecuali untuk rute antar pulau. Hal ini disebabkan tarif yang lebih murah dengan menggunakan truk untuk pelayanan *door-to-door* dari pada menggunakan moda laut. Peraturan dalam operasi truk, pendanaan dan subsidi untuk *Short Sea Shipping* serta penegakkan peraturan tersebut akan meningkatkan manfaat *Short Sea Shipping*.

3.2.3. Prediksi Pertumbuhan Kebutuhan Pergerakan

Dengan kondisi perkembangan kebutuhan pergerakan barang berdasarkan data tahun 2013 yang menunjukkan sedikit perlambatan, maka untuk prediksi kebutuhan pergerakan di masa yang akan datang dalam studi ini digunakan tingkat pertumbuhan berdasarkan skenario yang terkoreksi seperti tabel berikut:

Tabel 3.3 Tingkat Pertumbuhan Pergerakan Barang di Pelabuhan

Jenis	Skenario	Pertumbuhan/Tahun (%)		
		2015	2020	2030
Domestik	Rendah	3.2	2.7	2.3
	Dasar	**5.1**	**4.0**	**2.8**
	Tinggi	5.4	4.4	3.2
Internasional	Rendah	2.1	1.7	1.4
	Dasar	**7.5**	**2.1**	**1.8**
	Tinggi	11.1	3.0	2.7

Maka besarnya total kebutuhan pergerakan di pelabuhan menurut skenario dan jenis perdagangan serta tahun prediksi dapat ditentukan sebagai berikut:

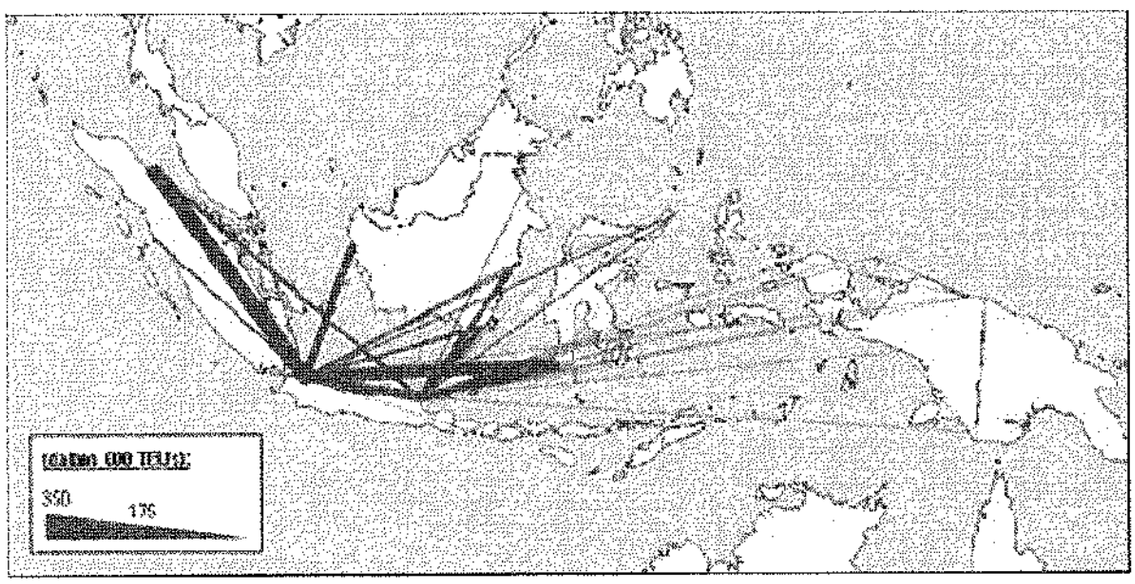
Tabel 3.4 Prediksi Kebutuhan Pergerakan Barang Total di Pelabuhan

Jenis	Skenario	Total Kebutuhan Pergerakan (juta ton/th)		
		2015	2020	2030
Domestik	Rendah	523.7	597.6	751.9
	Dasar	**584.1**	**711.1**	**941.1**
	Tinggi	594.1	736.1	1,012.5
Internasional	Rendah	615.7	670.0	769.7
	Dasar	**836.4**	**929.8**	**1,115.6**
	Tinggi	1,022.2	1,185.2	1,547.5
Total	Rendah	1,139.5	1,267.6	1,267.6
	Dasar	**1,420.5**	**1,640.9**	**2,056.7**
	Tinggi	1,616.3	1,921.3	2,560.1

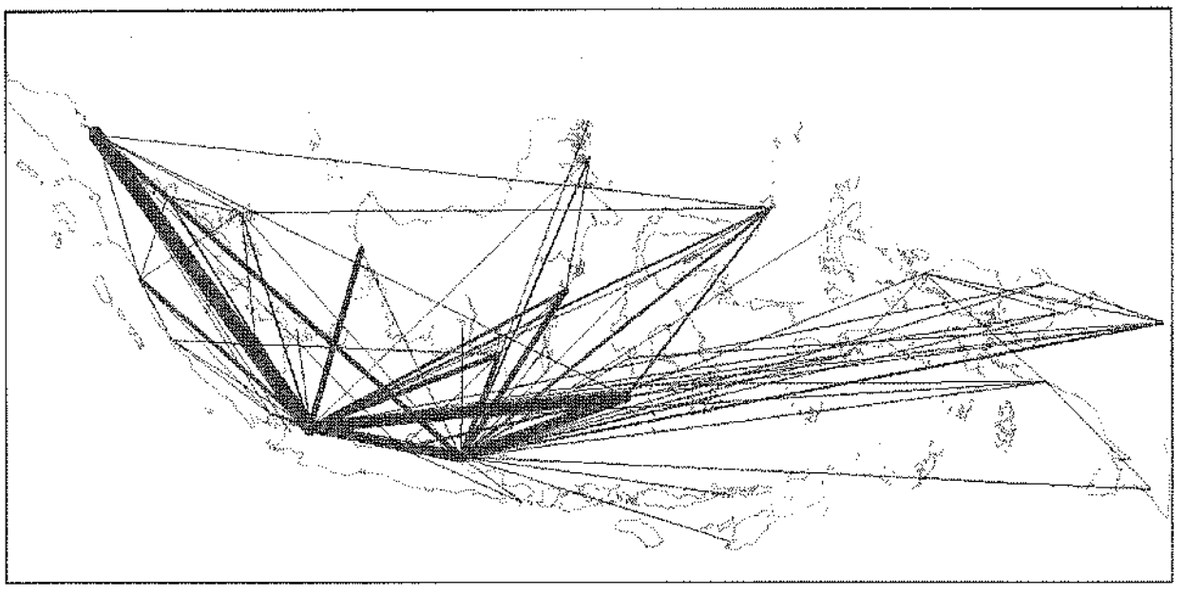
Selanjutnya hasil prediksi yang didetailkan menurut jenis komoditas akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan fasilitas pelabuhan. Hal ini, berarti secara umum, kebutuhan pengembangan fasilitas pelabuhan akan sedikit melambat namun lebih merata.

3.2.4. Pola Pergerakan Barang

Pola pergerakan peti kemas (domestik) tidak banyak mengalami perubahan antara tahun 2009 dan 2013, seperti yang dapat dibandingkan pada gambar-gambar dibawah ini:



Gambar 3.5 Pola Pergerakan Peti Kemas Domestik tahun 2009



Gambar 3.6 Pola Pergerakan Peti kemas Domestik tahun 2013

Hanya terdapat beberapa pergerakan (pasangan asal-tujuan pelabuhan) yang meningkat terutama di bagian timur Indonesia. Sementara itu, untuk komoditas curah kering (domestik) yang cukup mendominasi secara bobot, juga memiliki pola yang hampir mirip antara 2009 dan 2013.

3.3. Implikasi Terhadap Rencana Pengembangan Pelabuhan

3.3.1. Pengembangan Kapasitas Pelabuhan

Dengan perkembangan muatan yang diprediksi dilayani di masa mendatang, tentu mengharuskan pelabuhan Indonesia mengembangkan kapasitas pelayanannya, baik melalui perbaikan kelembagaan (institusional), peningkatan kinerja pelayanan dalam bentuk produktivitas bongkar muat, maupun pengembangan fisik pelabuhan. Tidak hanya pada pelabuhan yang sudah beroperasi, melainkan pula pelabuhan-pelabuhan baru yang menjadi kebijakan pemerintah.

Dalam RIPN yang terdahulu, terdapat beberapa rencana pengembangan transportasi laut yang belum dielaborasi sejauh mana peran pelabuhan serta pengaruh dari implementasi rencana-rencana tersebut terhadap pelabuhan. Rencana pengembangan atau kebijakan yang kemudian diadopsi dalam reviu RIPN ini adalah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Yaitu antara lain:

a. Pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara;

b. Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung Provinsi Sulawesi Utara;

c. Pelabuhan KEK Maloy Provinsi Kalimantan Timur;

d. Pembangunan Pelabuhan Jawa Barat (Utara) Provinsi Jawa Barat;

e. Pembangunan Pelabuhan Sorong Provinsi Papua Barat;

f. Pembangunan Pelabuhan Kalibaru Provinsi DKI Jakarta;

g. Makassar New Port Provinsi Sulawesi Selatan;

h. Pengembangan Pelabuhan Wayabula, Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara;

i. Pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu) Provinsi Sulawesi Tengah;

j. Pengembangan kapasitas Pelabuhan Parigi Provinsi Sulawesi Tengah;

k. Pengembangan Pelabuhan Kijing Provinsi Kalimantan Barat;

l. Pengembangan Pelabuhan Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Sebagai penjelas, berikut ini uraian singkat mengenai penetapan fungsi Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan hub internasional petikemas, terkait dengan rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung dan rencana pembangunan Pelabuhan Patimban di Pantai Utara Jawa Barat.

Wacana untuk mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub internasional petikemas di Indonesia dipandang tidak tepat. Permintaan lalu lintas ekspor/impor yang utama pada kondisi eksisting terjadi di antara pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) – Singapura. Penerapan kebijakan semua arus petikemas ekspor/impor melakukan konsolidasi/distribusi melalui Pelabuhan Kuala Tanjung akan menyebabkan biaya total transportasi meningkat 1,31%. Hal ini diakibatkan oleh arus lalu lintas truk yang lebih tinggi yang mengakses Pelabuhan Kuala Tanjung dari/ke Jawa dan Sumatera. Dengan demikian sudah tepat kebijakan pemerintah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Yaitu, yang antara lain

menetapkan fungsi Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara sebagai pelabuhan internasional, dan bukan sebagai pelabuhan hub internasional.

Adapun rencana pengembangan Pelabuhan Patimban termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang menyebutkan salah satu proyek infrastruktur strategis adalah Pelabuhan Jawa Barat (Utara) Propinsi Jawa Barat. Memang belum dinyatakan spesifik lokasinya, tetapi dalam berbagai kesempatan Kementerian Perhubungan mendeklarasikan salah satu lokasi, dan bukan satu-satunya alternatif, adalah berlokasi di Patimban Kabupaten Subang.

Dasar hukum rencana pembangunan Pelabuhan Patimban adalah Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional. Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan, pembinaan teknis dan pembinaan manajemen pengoperasional pelabuhan serta pembinaan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan lingkungan.

Pelabuhan Patimban dikembangkan sebagai komplementer Pelabuhan Tanjung Priok, yang dimasa mendatang industri yang berkembang di Jawa Bagian Barat tidak bisa lagi mengandalkan Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua pelabuhan dikembangkan, dengan industri di Jabodetabek yang dekat ke Pelabuhan Tanjung Priok, dan untuk industri di Cikarang, Karawang dan sekitarnya, yang akan lebih dekat ke pelabuhan baru Patimban. Pada intinya, pemerintah mendorong terbangunnya pelabuhan utama di pantai Jawa Barat yang mampu melayani industrialisasi yang besar di wilayah Jawa Barat.

Dengan uraian tersebut di atas, maka kebijakan pemerintah yang menetapkan fungsi Pelabuhan Tanjung Priok (bersama dengan Pelabuhan Patimbang secara komplementer) sebagai pelabuhan hub internasional petikemas adalah tepat. Karena skenario pengembangan pelabuhan hub internasional diperkirakan akan meningkatkan mode share angkutan laut sebesar 6,42% atau sekitar 0,30% dari kondisi eksisting. Terlebih pelabuhan tersebut memiliki posisi sentral dalam

pengembangan Tol Laut, terutama dalam menyediakan waktu serta biaya pelayanan yang rendah yang berkontribusi meningkatkan efisiensi biaya logistik nasional.

3.3.2. Pengembangan Konektivitas Antarmoda di Pelabuhan

Pada dasarnya pelabuhan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan moda lainnya. Tingkat keterhubungan atau lebih dikenal dengan konektivitas ini semestinya dapat dikuantifikasi.

Untuk konektivitas pelabuhan dan moda jalan dapat dinyatakan dalam indikator kualitas keterhubungan yang dapat dikorelasikan dengan besarnya kebutuhan pergerakan di Pelabuhan, sedemikian sehingga dapat diidentifikasi kebutuhan (kapasitas) jalan akses Pelabuhan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Kebutuhan konektivitas pelabuhan dan jaringan jalan (jalan akses pelabuhan)

Total Kebutuhan Pergerakan Barang (juta ton/tahun)	Kebutuhan Jalan Akses Minimum	Referensi (tahun 2012)
Kurang dari 5	2 lajur 2 arah	Bitung ~ 5 jt ton/th
5 – 10	4 lajur 2 arah	Makassar ~ 12 jt ton/th
10 – 40	Lajur Khusus Truk	Pontianak ~ 30 jt ton/th
Lebih dari 40	Jalur Khusus Truk atau Jalan Bebas Hambatan	Tj. Perak ~ 70 jt ton/th Tj. Priok ~ > 75 jt ton/th

Diharapkan, dengan penyediaan jalan akses seperti di tabel di atas, aksesibilitas pelabuhan dapat dipertahankan, atau tidak terjadi kemacetan yang terlalu parah. Itupun bila hambatan samping dan guna lahan di sekitar pelabuhan bisa tetap terkontrol dengan baik.

Sementara itu, akses jaringan kereta api ke/dari pelabuhan disarankan masuk sampai kepada lapangan penumpukan atau gudang, supaya kecepatan dan jadwal bongkar muat kapal dapat diimbangi oleh jadwal dan kapasitas angkut kereta api atau sebaliknya.

Merupakan perkembangan baru bahwa pemerintah merencanakan pembangunan *Inland Waterways*/CBL Cikarang-Bekasi-Laut Jawa, di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, yang menjadi salah satu moda konektivitas Pelabuhan Tanjung Priok/Kalibaru dengan wilayah belakang (*hinterland*) nya. Proyek tersebut

merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

3.4. Transportasi Penyeberangan

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran).

Keberadaan angkutan penyeberangan, mampu mengatasi keterbatasan angkutan jalan atau angkutan kereta api dalam menghubungkan dua lokasi yang terpisah oleh perairan atau dapat dikatakan sebagai penyambung sistem jaringan yang terputus oleh perairan. Pengembangan transportasi penyeberangan sebagai penghubung jaringan jalan atau jalan rel menjadi cukup mendesak mengingat laju perkembangan otonomi daerah yang ditandai dengan semangat pemekaran wilayah, yang disertai pesatnya pembangunan infrakstruktur wilayah terutama jalan raya. Beberapa daerah yang semula relatif terisolasi pun diharapkan dapat dikembangkan dengan penyelenggaraan moda penyeberangan.

Transportasi penyeberangan untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan, dimana berdasarkan Peraturan presiden RI nomor 56 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara Pasal 6 ayat 8 Stategi untuk pengembangan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan poros Indonesia bagian tenggara meliputi :

a. Mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antar pulau dan antar wilayah
b. Mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan dan Bandar udara.
c. Mendorong pengembangan pelabuhan disepanjang ALKI II, ALKI IIIA, ALKI IIID untuk mendukung pelayaran internasional.
d. Mengembangkan Bandar udara untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah dan antar Negara

Selain mendukung pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan, transportasi penyeberangan juga mendukung sistem logistik nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan pasal 5, disebutkan bahwa jalan memiliki fungsi:

a. sebagai bagian dari prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam ekonomi sosial budaya politik, pertahanan dan keamanan, dan lingkungan hidup serta wajib dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

c. sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya pengembangan jalan mengacu kepada rencana tata ruang untuk mendukung terwujudnya kerangka strategis penataan ruang nasional. Jaringan jalan yang ada tidak saja berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan, tapi juga berperan untuk menyeimbangkan pengembangan kawasan, mengamankan teritorial dan sebagai perekat keutuhan NKRI.

3.4.1 Tingkat Pertumbuhan Eksisting

Berdasarkan data produksi angkutan penumpang tahun 2011 sampai dengan 2015, pertumbuhan produksi angkutan penumpang pada lintas penyeberangan komersil di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata peningkatan 3,54% per tahun.

Tabel 3.6. Perkembangan Produksi Angkutan Penumpang di Indonesia Tahun 2011-2015

Tahun	Penumpang	Perkembangan	
	(orang)	orang	%
2011	53.112.421		
2012	58.132.058	5.019.637	8,635
2013	60.736.082	2.604.024	4,287
2014	65.772.211	5.036.129	7,657
2015	61.793.202	(3.979.009)	(6,439)
Perkembangan Komulatif		**8.680.781**	**14,14**
Perkembangan Rata-rata per tahun		**2.170.195**	**3,54**

Disamping angkutan penumpang, muatan dalam angkutan penyeberangan juga berupa kendaraan beserta barang yang ada didalamnya. Pada umunya muatan

angkutan untuk kendaraan akan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu angkutan kendaraan roda dua (R2) dan angkutan kendaraan roda empat (R4).

Tabel 3.7. Perkembangan Produksi Angkutan Kendaraan R2 di Indonesia Tahun 2011-2015

Tahun	Kendaraan R2	Perkembangan	
	(unit)	unit	%
2011	5.472.872		
2012	5.467.651	(5.221)	-0,095
2013	7.395.761	1.928.110	26,070
2014	8.037.416	641.655	7,983
2015	7.733.716	(303.700)	-3,927
Perkembangan Komulatif		**2.260.844**	**30,03**
Perkembangan Rata-rata per tahun		**565.211**	**7,51**

Berdasarkan data produksi angkutan kendaraan R2 tahun 2011 sampai dengan 2015 tersebut diatas, pertumbuhan produksi angkutan penumpang pada lintas penyeberangan komersil di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata peningkatan 7,51% per tahun.

Tabel 3.8. Perkembangan Produksi Angkutan Kendaraan R4 di Indonesia Tahun 2011-2015

Tahun	Kendaraan R4	Perkembangan	
	(unit)	unit	%
2011	7.183.681		
2012	7.212.450	28.769	0,399
2013	7.663.029	450.579	5,880
2014	8.498.154	835.125	9,827
2015	8.078.772	(419.382)	-5,191
Perkembangan Komulatif		**895.091**	**10,91**
Perkembangan Rata-rata per tahun		**223.773**	**2,73**

Dari data produksi angkutan kendaraan R4 dari tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan peningkatan rata-rata per tahun mencapai 2,73%.

3.4.2. Peran Angkutan Penyeberangan

Transportasi penyeberangan saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam sektor transportasi sejalan dengan program pemerintah melalui konsep NAWACITA, dimana transportasi penyeberangan dapat menghubungkan daerah yang terluar,

terpencil, terdepan serta sebagai *feeder* transportasi laut untuk mendukung konsep Tol Laut.

Transportasi penyeberangan secara tidak langsung berperan sebagai penghubung lintas pada jalur pelayaran laut maupun pelayaran perintis. Keberadaan transportasi penyeberangan juga dapat bersifat sebagai *shortcut* atau memperpendek jarak tempuh, sebagaimana definisi dari angkutan penyeberangan. Pada prinsipnya transportasi penyeberangan menyediakan layanan ulang alik yang memiliki jadwal tetap dan teratur yang menghubungkan dua titik, dimana barang yang diangkut harus dimasukkan dalam kendaraan atau bukan barang lepas. Ditinjau dari sisi pelayanan, dalam merencanakan layanan transportasi penyeberangan diawali dengan membuka lintasan, membangun pelabuhan serta armada (kapal Ro-Ro) hingga transportasi penyeberangan dapat beroperasi secara optimal baik secara komersil maupun perintis melalui subsidi angkutan. Hal ini sebagai bentuk upaya transportasi penyeberangan dalam membuka keterisolasian wilayah, dimana perlu didukung dengan pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang merupakan alat mobilitas penduduk di wilayah tersebut.

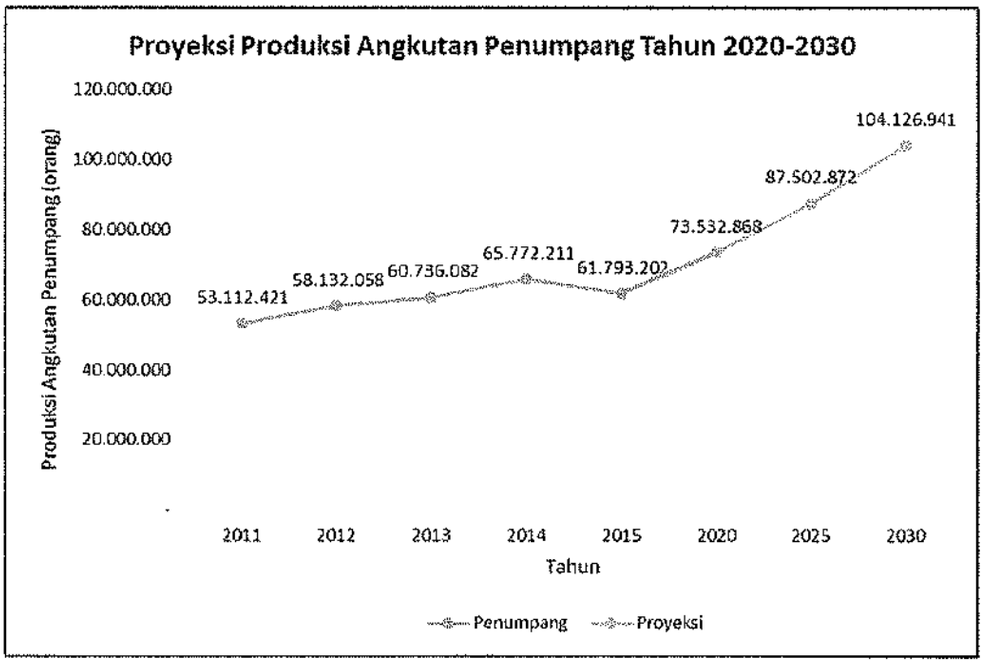
3.4.3. Prediksi Pertumbuhan Angkutan Penyeberangan

Dari data angkutan penyeberangan tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan adanya fluktuasi pertumbuhan pada setiap tahunnya, maka untuk memprediksi produksi angkutan penyeberangan baik penumpang, kendaraan roda dua (R2) maupun kendaraan roda empat (R4) di masa mendatang dianalisa dengan mengggunakan metode pertumbuhan linear.

Tabel 3.9. Proyeksi Produksi Angkutan Penumpang Tahun 2020 - 2030

Tahun	Penumpang	Proyeksi
2011	53.112.421	
2012	58.132.058	
2013	60.736.082	
2014	65.772.211	
2015	61.793.202	
2020		73.532.868
2025		87.502.872
2030		104.126.941

Dari hasil perhitungan proyeksi produksi angkutan penumpang pada tahun 2020 – 2030, menunjukkan bahwa pada tahun akhir pengembangan jangka panjang, produksi angkutan penumpang diproyeksi akan mencapai 104 juta penumpang dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,54% per tahun. Grafik pertumbuhan sebagaimana dalam Gambar 3.7.



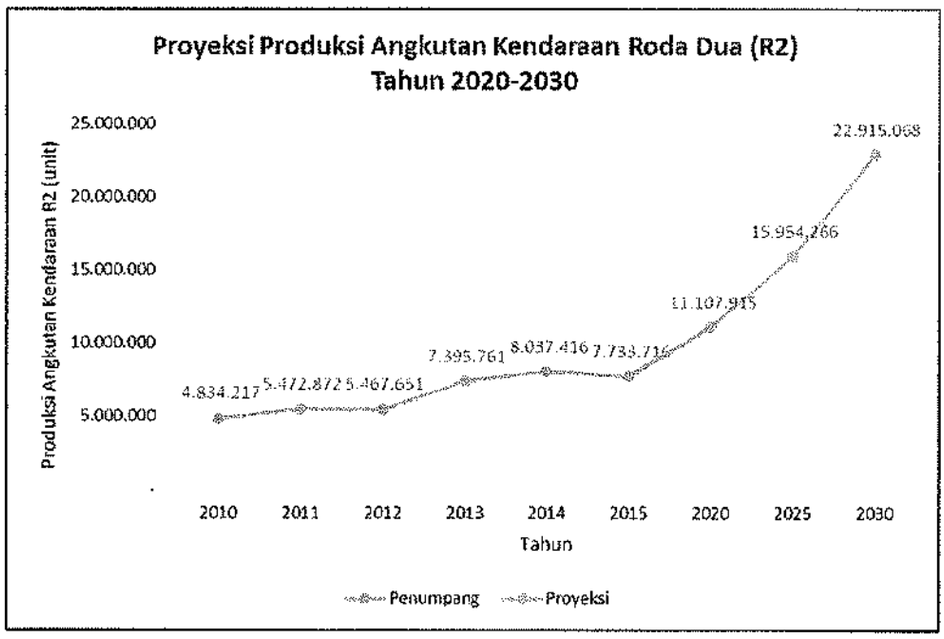
Gambar 3.7. Proyeksi Produksi Angkutan Penumpang Tahun 2020-2030

Berdasarkan data produksi kendaraan roda dua (R2), maka hasil perhitungan proyeksi produksi angkutan kendaraan R2 pada tahun 2020 – 2030 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10. Proyeksi Produksi Angkutan Kendaraan R2 Tahun 2020 – 2030

Tahun	Penumpang	Proyeksi
2010	4.834.217	
2011	5.472.872	
2012	5.467.651	
2013	7.395.761	
2014	8.037.416	
2015	7.733.716	
2020		11.107.915
2025		15.954.266
2030		22.915.068

Hasil perhitungan proyeksi produksi angkutan kendaraan R2 pada tahun 2020 - 2030 dengan laju pertumbuhan rata-rata 7,51%, mencapai 11 juta unit kendaraan R2 sedangkan pada tahun 2030 mencapai 22 juta penumpang. Jika digambarkan dalam grafik, maka proyeksi produksi angkutan kendaraan roda dua (R2) adalah sebagaimana dalam Gambar 3.8.



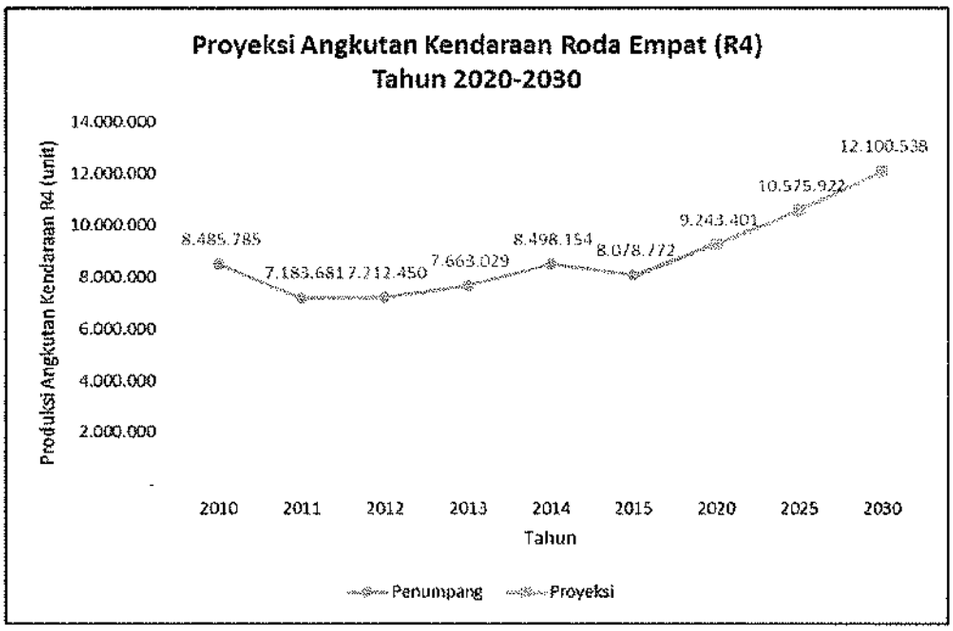
Gambar 3.8. Proyeksi Produksi Angkutan Kendaraan R2 Tahun 2020 – 2030

Dari data produksi kendaraan roda empat (R4), maka hasil perhitungan proyeksi produksi angkutan kendaraan R4 pada tahun 2020 – 2030 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10. Proyeksi Produksi Angkutan Kendaraan R4 Tahun 2020 – 2030

Tahun	Penumpang	Proyeksi
2010	8.485.785	
2011	7.183.681	
2012	7.212.450	
2013	7.663.029	
2014	8.498.154	
2015	8.078.772	
2020		9.243.401
2025		10.575.922
2030		12.100.538

Hasil perhitungan proyeksi produksi angkutan kendaraan roda empat (R4) pada tahun 2020 – 2030, sebagaimana digambarkan dalam Gambar 3.9.



Gambar 3.9. Proyeksi Produksi Angkutan Kendaraan R4 Tahun 2020 – 2030

Dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,73% per tahun, maka proyeksi angkutan kendaraan roda empat (R4) pada tahun 2020 mencapai 9 juta unit kendaraan R4 sedangkan pada tahun 2030 mencapai 12 juta unit kendaraan R4.

BAB IV

LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN

4.1. Definisi/Pengertian

4.1.1. Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

4.1.2. Pelabuhan Utama

Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

4.1.3. Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

4.1.4. Pelabuhan Pengumpan

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam

provinsi.

4.1.5. Wilayah Kerja Pelabuhan

Wilayah Kerja Pelabuhan adalah satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang membawahinya.

Wilayah kerja pelabuhan mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberian pelayanan lalu lintas dan angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran dan/ atau penyediaan pelayanan jasa kepelabuhanan di perairan pelabuhan untuk mempelancar angkutan laut.

4.1.6. Terminal

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

Terminal Umum adalah terminal yang terletak di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang telah atau/ akan diberikan hak untuk meyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya.

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

4.1.7. Rencana Lokasi Pelabuhan

Rencana Lokasi Pelabuhan adalah usulan lokasi pelabuhan yang masih memerlukan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Kriteria Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor PP. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, dalam Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Hierarki Peran dan Fungsi Pelabuhan sebagai berikut :

1. Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Laut :
   a. Pelabuhan Utama
   b. Pelabuhan Pengumpul
   c. Pelabuhan Pengumpan Regional
   d. Pelabuhan Pengumpan Lokal
2. Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Penyeberangan :
   a. Pelabuhan Kelas I
   b. Pelabuhan Kelas II
   c. Pelabuhan Kelas III
3. Pelabuhan Sungai dan Danau

4.2.1. Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Laut :

4.2.1.1. Pelabuhan Utama

Lokasi Pelabuhan Utama berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

1. Berada dekat dengan jalur pelayaran internasional kurang dari 500 mil dan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 mil;
2. Memiliki jarak dengan pelabuhan utama lainnya minimal 200 mil;
3. Kedalaman kolam pelabuhan minimal –9 m-LWS;
4. Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 10.000 DWT;
5. Panjang dermaga minimal 350 m';
6. Luas lahan pelabuhan minimal 50 Ha;

7. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang.

4.2.1.2. Pelabuhan Pengumpul

Lokasi pelabuhan pengumpul berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut :

1. Berada dekat dengan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 mil;
2. Memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya minimal 50 mil;
3. Kedalaman kolam pelabuhan mulai -7 sampai dengan -9 mLWS;
4. Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 3.000 DWT;
5. Panjang dermaga 120 - 350 m';
6. Luas lahan pelabuhan minimal 10 Ha;
7. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang.

4.2.1.3. Pelabuhan Pengumpan Regional

Lokasi pelabuhan pengumpan regional berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

1. Memiliki jarak dengan pelabuhan regional lainnya minimal 20-50 mil;
2. Kedalaman kolam pelabuhan mulai – 5 sampai dengan -7 mLWS;
3. Kapasitas dermaga maksimal 3.000 DWT;
4. Panjang dermaga 80 - 120 m';
5. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang.

4.2.1.4. Pelabuhan Pengumpan Lokal

Lokasi pelabuhan pengumpan lokal berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

1. Memiliki jarak dengan pelabuhan lokal lainnya minimal 5-20 mil;
2. Kedalaman kolam pelabuhan maksimal - 5 m-LWS;
3. Kapasitas dermaga maksimal 1.000 DWT;
4. Panjang dermaga maksimal 80 m';

4.2.2. Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Penyeberangan:

4.2.2.1. Pelabuhan Kelas I

Penetapan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan kelas I harus memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut :

1. Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
2. Menghubungkan Jalan Arteri Primer (JAP); Jalan tol, Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1), jalan strategis nasional dan antar negara;
3. Lokasi pelabuhan secara strategis berada pada sabuk penyeberangan nasional dan penghubung antar sabuk;
4. Pelabuhan yang diusahakan secara komersil.

4.2.2.2. Pelabuhan Kelas II

Penetapan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan kelas II harus memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut :

1. Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
2. Menghubungkan JAP, jalan tol, JKP-1 dan jalan strategis nasional;
3. Lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyeberangan nasional;
4. Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

4.2.2.3. Pelabuhan Kelas III

Penetapan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan kelas III harus memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut :

1. Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
2. Berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jalan JKP-2, JKP-3, JKP-4 dan jalan yang tidak termasuk pada kriteria pelabuhan untuk angkutan penyeberangan kelas 1 maupun kelas 2.

3. Lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyeberangan nasional;

4. Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

4.2.3. Pelabuhan Sungai dan Danau:

4.2.3.1. Hierarki Pelayanan

Dalam Tatanan Kepelabuhan Nasional pelabuhan sungai, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15, PP 61/2009, secara hierarki pelayanannya terdiri atas:

1. pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau; dan/ atau
2. pelabuhan sungai dan danau yang melayani angkutan penyeberangan, hierarki pelayanannya adalah sebagai berikut:
   - antar provinsi dan/atau antar negara;
   - antar kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi; dan/ atau
   - dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

4.2.3.1. Tatanan Trayek

Trayek lalu-lintas angkutan sungai terdiri dari trayek tetap teratur, dan tidak tetap dan tidak teratur. **Hierarki trayek tetap dan teratur lalu-lintas angkutan sungai** ditentukan berdasarkan fungsi simpul transportasi sungai yang terhubung dan cakupan wilayah pelayanan, terdiri dari:

1. **Trayek utama** sebagaimana huruf a menghubungkan antar pelabuhan sungai yang berfungsi sebagai pusat penyebaran. Trayek Utama dapat berupa:
   a. Trayek lalu-lintas angkutan sungai antar propinsi; atau
   b. Trayek lalu-lintas angkutan sungai antar kabupaten dalam propinsi.
2. **Trayek cabang** sebagaimana dimaksud pada huruf b menghubungkan antar pelabuhan sungai yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antar pelabuhan sungai yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran. Trayek Cabang dapat berupa:
   a. Trayek lalu-lintas angkutan sungai antar kabupaten dalam propinsi; atau
   b. Trayek lalu-lintas angkutan sungai dalam kabupaten.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

REKAPITULASI JUMLAH PELABUHAN LAUT YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI ANGKUTAN LAUT	2011	2015	2020	2030
PELABUHAN UTAMA (PU)	26	28	29	30
PELABUHAN PENGUMPUL (PP)	167	181	186	185
PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL (PR)	115	105	103	103
PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL (PL)	32	26	22	22
TOTAL PELABUHAN	**340**	**340**	**340**	**340**

REKAPITULASI WILAYAH KERJA, RENCANA LOKASI DAN TERMINAL UMUM	2011	2015	2020	2030
WILAYAH KERJA PELABUHAN	389	389	389	389
RENCANA LOKASI PELABUHAN	1246	1246	1246	1246
TERMINAL (BAGIAN DARI PELABUHAN)	36	36	36	36

Keterangan :

1) **Wilayah Kerja Pelabuhan** adalah satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kantor penyelenggara pelabuhan yang membawahinya.
2) **Terminal Umum** adalah terminal yang terletak di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang dikelola oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah atau/dapat diberikan hak untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya.
3) **Rencana Lokasi Pelabuhan** adalah usulan lokasi pelabuhan yang masih memerlukan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*)Terdapat Kantor UPT Ditjen Hubla sesuai :

1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

*) Kantor Pelabuhan

SUB LAMPIRAN A1
LOKASI PELABUHAN LAUT YANG DIGUNAKAN UNTUK ANGKUTAN LAUT

KETERANGAN : * Kantor Pelabuhan

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
I. Provinsi Aceh								
1	Aceh Barat	1	Meulaboh	PP	PP	PP	PP	*
2	Aceh Barat Daya	2	Susoh	PR	PR	PR	PR	*
3	Aceh Besar	3	Malahayati	PP	PP	PP	PP	*
4	Aceh Jaya	4	Calang	PP	PP	PP	PP	*
5	Aceh Selatan	5	Tapaktuan	PR	PP	PP	PP	*
6	Aceh Singkil	6	Singkil	PP	PP	PP	PP	*
7	Aceh Timur	7	Idi	PL	PL	PL	PL	*
8	Aceh Utara	8	Lhokseumawe/Kreung Geukeh	PP	PP	PP	PP	*
9	Langsa	9	Kuala Langsa	PP	PP	PP	PP	*
10	Sabang	10	Sabang	PU	PU	PU	PU	*
11	Simeulue	11	Sinabang	PP	PP	PP	PP	*
II. Provinsi Sumatera Utara								
12	Asahan	1	Tg. Balai Asahan/Bagan Asahan	PP	PP	PP	PP	*
13	Batubara	2	Kuala Tanjung	PP	PU	PU	PU	*
14	Batubara	3	Pangkalan Dodek	PR	PR	PR	PR	*
15	Batubara	4	Tanjung Tiram	PR	PR	PR	PR	*
16	Gunung Sitoli	5	Gunung Sitoli	PR	PR	PR	PR	*
17	Labuhan Batu	6	Sei Barombong	PR	PR	PR	PR	*
18	Labuhan Batu	7	Tanjung Sarang Elang	PR	PR	PR	PR	*
19	Labuhan Batu Utara	8	Teluk Leidong	PP	PP	PP	PP	*
20	Langkat	9	Pangkalan Susu	PP	PP	PP	PP	*
21	Langkat	10	Pangkalan Brandan	PP	PP	PP	PP	
22	Langkat	11	Pulau Kampai	PL	PL	PL	PL	*
23	Langkat	12	Tanjung Pura	PR	PR	PR	PR	*
24	Mandailing Natal	13	Natal / Sikara-kara	PR	PR	PR	PR	*
25	Medan	14	Belawan	PU	PU	PU	PU	*
26	Nias Barat	15	Sirombu	PR	PR	PR	PR	*
27	Nias Selatan	16	Pulau Tello	PP	PP	PP	PP	*
28	Nias Selatan	17	Teluk Dalam	PR	PR	PR	PR	*
29	Nias Utara	18	Lahewa	PR	PR	PR	PR	*
30	Serdang Bedagai	19	Tanjung Beringin	PR	PR	PR	PR	*
31	Serdang Bedagai	20	Pantai Cermin	PR	PR	PR	PR	*
32	Sibolga	21	Sibolga	PP	PP	PP	PP	*
33	Tapanuli Tengah	22	Barus	PL	PL	PL	PL	*
III. Provinsi Sumatera Barat								
34	Kep. Mentawai	1	Siberut / Simalepet	PR	PR	PR	PR	*
35	Kep. Mentawai	2	Sikakap	PP	PP	PP	PP	*

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
36	Kep. Mentawai	3	Sioban	PR	PR	PR	PR	*
37	Padang	4	Teluk Bayur	PU	PU	PU	PU	*
38	Pasaman Barat	5	Teluk Tapang	PR	PP	PP	PP	
39	Pesisir Selatan	6	Carocok Painan	PR	PP	PP	PP	
IV. Provinsi Kepulauan Riau								
40	Batam	1	Batam/Batu Ampar	PU	PU	PU	PU	*
41	Batam	2	Pulau Sambu	PP	PP	PP	PP	*
42	Batam	3	Teluk Senimba	PR	PR	PP	PP	
43	Bintan	4	Lobam	PP	PP	PP	PP	
44	Bintan	5	Sei Kolak Kijang	PP	PP	PP	PP	*
45	Bintan	6	Tanjung Berakit	PP	PP	PP	PP	
46	Bintan	7	Tanjung Uban / Bulang Linggi	PR	PR	PR	PR	*
47	Karimun	8	Malarko	PP	PP	PP	PP	
48	Karimun	9	Tanjung Balai Karimun	PP	PP	PP	PP	*
49	Karimun	10	Tanjung Batu Kundur	PP	PP	PP	PP	*
50	Kep. Anambas	11	Tarempa	PP	PP	PP	PP	*
51	Lingga	12	Dabo Singkep	PR	PR	PR	PR	*
52	Lingga	13	Pekajang	PR	PP	PP	PP	
53	Lingga	14	Senayang	PL	PL	PL	PL	*
54	Natuna	15	Selat Lampa	PP	PP	PP	PP	
55	Tanjung Pinang	16	Tanjung Pinang	PP	PP	PP	PP	*
V. Provinsi Riau								
56	Bengkalis	1	Batu Panjang	PL	PL	PL	PL	*
57	Bengkalis	2	Bengkalis	PP	PP	PP	PP	*
58	Bengkalis	3	Sungai Pakning	PP	PP	PP	PP	*
59	Bengkalis	4	Tanjung Medang	PP	PP	PP	PP	*
60	Dumai	5	Dumai	PU	PU	PU	PU	*
61	Indragiri Hilir	6	Kuala Enok	PP	PP	PP	PP	*
62	Indragiri Hilir	7	Sungai Guntung	PP	PP	PP	PP	*
63	Indragiri Hilir	8	Tembilahan	PP	PP	PP	PP	*
64	Indragiri Hulu	9	Rengat/Kuala Cinaku	PP	PP	PP	PP	*
65	Kepulauan Meranti	10	Selat Panjang	PP	PP	PP	PP	*
66	Kepulauan Meranti	11	Meranti/Dorak	PR	PR	PR	PR	
67	Pekanbaru	12	Pekanbaru	PP	PP	PP	PP	*
68	Rokan Hilir	13	Kuala Gaung	PR	PR	PR	PR	*
69	Rokan Hilir	14	Bagan Siapi-api	PR	PR	PR	PR	*
70	Rokan Hilir	15	Panipahan	PR	PR	PR	PR	*
71	Rokan Hilir	16	Sinaboi	PL	PL	PL	PL	*
72	Siak	17	Perawang	PP	PP	PP	PP	
73	Siak	18	Tanjung Buton	PP	PP	PP	PP	

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
VI. Provinsi Bengkulu								
74	Bengkulu Utara	1	Malakoni/P. Enggano	PR	PR	PR	PR	*
75	Kaur	2	Bintuhan/Linau	PR	PP	PP	PP	*
76	Bengkulu	3	Pulau Baai	PP	PU	PU	PU	*
VII. Provinsi Jambi								
77	Muaro Jambi	1	Talang Duku	PP	PP	PP	PP	*
78	Tg. Jabung Barat	2	Kuala Tungkal	PP	PP	PP	PP	*
79	Tg. Jabung Timur	3	Kuala Mendahara	PR	PR	PR	PR	*
80	Tg. Jabung Timur	4	Muara Sabak	PP	PP	PP	PP	*
81	Tg. Jabung Timur	5	Nipah Panjang	PR	PR	PR	PR	*
82	Tg. Jabung Timur	6	Ujung Jabung	PP	PP	PP	PP	
VIII. Provinsi Sumatera Selatan								
83	Banyuasin	1	Tanjung Api-Api	PP	PP	PP	PP	
84	Ogan Komering Ilir	2	Sungai Lumpur	PP	PP	PP	PP	*
85	Palembang	3	Boom Baru/Palembang	PU	PU	PU	PU	*
86	Palembang	4	Kertapati	PP	PP	PP	PP	
IX. Provinsi Bangka Belitung								
87	Bangka	1	Belinyu	PP	PP	PP	PP	
88	Bangka Barat	2	Muntok	PP	PP	PP	PP	*
89	Bangka Selatan	3	Toboali	PR	PR	PR	PR	*
90	Bangka Selatan	4	Sadai	PP	PP	PP	PP	
91	Belitung	5	Tanjung Pandan	PP	PP	PP	PP	*
92	Belitung Timur	6	Manggar	PL	PL	PL	PL	*
93	Pangkalpinang	7	Pangkal Balam	PP	PP	PP	PP	*
X. Provinsi Lampung								
94	Bandar Lampung	1	Panjang	PU	PU	PU	PU	*
95	Bandar Lampung	2	Teluk Betung	PR	PP	PP	PP	*
96	Lampung Selatan	3	Sebalang	PR	PP	PP	PP	
97	Lampung Timur	4	Labuhan Maringgai	PR	PR	PR	PR	*
98	Mesuji	5	Mesuji	PR	PR	PR	PR	*
99	Tanggamus	6	Kota Agung/Batu Balai	PP	PP	PP	PP	*
100	Tulang Bawang	7	Menggala	PL	PR	PR	PR	*
XI. Provinsi Banten								
101	Cilegon	1	Banten	PU	PU	PU	PU	*
102	Pandeglang	2	Labuhan	PR	PR	PR	PR	*
103	Serang	3	Anyer Lor	PR	PR	PR	PR	*
104	Serang	4	Bojonegara	PP	PP	PP	PP	*
105	Serang	5	Karangantu	PR	PR	PR	PR	*

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
XII. Provinsi Jawa Barat								
106	Cirebon	1	Cirebon	PP	PP	PP	PP	*
107	Indramayu	2	Indramayu/Losarang	PL	PL	PR	PR	*
108	Pangandaran	3	Pangandaran/Bojongsalawe	PL	PL	PL	PL	*
109	Subang	4	Pamanukan-Blanakan	PL	PL	PL	PL	*
110	Subang	5	Patimban	PU	PU	PU	PU	
111	Sukabumi	6	Palabuhan Ratu	PR	PR	PR	PR	*
XIII. Provinsi DKI Jakarta								
112	Jakarta Utara	1	Kalibaru	PR	PR	PR	PR	*
113	Jakarta Utara	2	Marunda	PP	PP	PP	PP	*
114	Jakarta Utara	3	Muara Angke	PR	PR	PR	PR	*
115	Jakarta Utara	4	Muara Baru	PP	PP	PP	PP	*
116	Jakarta Utara	5	Sunda Kelapa	PP	PP	PP	PP	*
117	Jakarta Utara	6	Tg. Priok	PU	PU	PU	PU	*
118	Kep. Seribu	7	Kep. Seribu (P. Pramuka)	PL	PL	PL	PL	*
XIV. Provinsi Jawa Tengah								
119	Batang	1	Batang	PR	PR	PP	PP	*
120	Brebes	2	Brebes	PR	PR	PR	PR	*
121	Cilacap	3	Tanjung Intan	PP	PP	PP	PP	*
122	Jepara	4	Jepara	PR	PR	PR	PR	*
123	Jepara	5	Karimun Jawa	PR	PR	PR	PR	*
124	Pati	6	Juwana	PR	PR	PR	PR	*
125	Pekalongan	7	Pekalongan	PR	PR	PR	PR	*
126	Rembang	8	Rembang/Tasik Agung	PR	PR	PR	PR	*
127	Rembang	9	Rembang/Sluke	PR	PR	PP	PP	
128	Semarang	10	Tanjung Emas	PU	PU	PU	PU	*
129	Tegal	11	Tegal	PP	PP	PP	PP	*
XV. Provinsi Jawa Timur								
130	Bangkalan	1	Telaga Biru	PR	PR	PR	PR	*
131	Banyu Wangi	2	Tanjung Wangi	PP	PP	PP	PP	*
132	Gresik	3	Bawean	PR	PR	PR	PR	*
133	Gresik	4	Gresik	PP	PP	PP	PP	*
134	Lamongan	5	Brondong	PR	PR	PR	PR	*
135	Lamongan	6	Tanjung Pakis	PR	PP	PP	PU	
136	Pamekasan	7	Branta	PR	PR	PR	PR	*
137	Pasuruan	8	Pasuruan	PR	PR	PR	PR	*
138	Probolinggo	9	Probolinggo	PR	PR	PP	PP	*
139	Sampang	10	Ketapang	PR	PR	PR	PR	*
140	Situbondo	11	Kalbut	PR	PR	PR	PR	*
141	Situbondo	12	Panarukan	PR	PR	PR	PR	*
142	Sumenep	13	Kalianget	PR	PR	PR	PR	*
143	Sumenep	14	Masalembo	PR	PR	PR	PR	*

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
144	Sumenep	15	Sapudi	PR	PR	PR	PR	*
145	Sumenep	16	Sapeken	PR	PR	PR	PR	*
146	Surabaya	17	Tanjung Perak	PU	PU	PU	PU	*
XVI. Provinsi Bali								
147	Buleleng	1	Buleleng (Sangsit)	PR	PR	PR	PR	*
148	Buleleng	2	Celukan Bawang	PP	PP	PP	PP	*
149	Denpasar	3	Benoa	PU	PU	PU	PU	*
150	Jembrana	4	Gilimanuk	PR	PR	PR	PR	*
151	Karangasem	5	Labuan Amuk/Tanahampo	PP	PP	PP	PP	
152	Karangasem	6	Padang Bai	PL	PL	PL	PL	*
153	Klungkung	7	Nusa Penida (Toyapakeh)	PR	PR	PR	PR	*
XVII. Provinsi Nusa Tenggara Barat								
154	Bima	1	Bima	PP	PP	PP	PP	*
155	Bima	2	Sape	PR	PR	PR	PR	*
156	Dompu	3	Calabai	PL	PL	PR	PR	*
157	Lombok Barat	4	Lembar	PP	PP	PP	PP	*
158	Lombok Timur	5	Labuhan Lombok	PP	PP	PP	PP	*
159	Lombok Utara	6	Pemenang	PR	PR	PR	PR	*
160	Sumbawa	7	Badas	PP	PP	PP	PP	*
161	Sumbawa Barat	8	Benete	PP	PP	PP	PP	*
XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Timur								
162	Alor	1	Baranusa	PR	PR	PR	PR	*
163	Alor	2	Kalabahi	PR	PR	PR	PR	*
164	Belu	3	Atapupu	PP	PP	PP	PP	*
165	Ende	4	Ende	PP	PP	PP	PP	*
166	Flores Timur	5	Larantuka	PP	PP	PP	PP	*
167	Kupang	6	Tenau/ Kupang	PU	PU	PU	PU	*
168	Lembata	7	Balauring	PP	PP	PP	PP	
169	Lembata	8	Lewoleba	PP	PP	PP	PP	
170	Manggarai	9	Reo	PP	PP	PP	PP	*
171	Manggarai Barat	10	Labuan Bajo	PP	PP	PP	PP	*
172	Nagekeo	11	Marapokot	PR	PR	PR	PR	*
173	Rote Ndao	12	Baa	PL	PL	PL	PL	*
174	Rote Ndao	13	Ndao	PP	PP	PP	PP	
175	Sabu Raijua	14	Seba	PP	PP	PP	PP	*
176	Sikka	15	Maumere / Lorens Say	PR	PP	PP	PP	*
177	Sumba Barat Daya	16	Waikelo	PR	PR	PR	PR	*
178	Sumba Timur	17	Waingapu	PP	PP	PP	PP	*
179	Timor Tengah Utara	18	Wini	PP	PP	PP	PP	
XIX. Provinsi Kalimantan Barat								
180	Kayong Utara	1	Teluk Melano/Teluk Batang	PP	PP	PP	PP	*

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
181	Ketapang	2	Kendawangan	PP	PP	PP	PP	*
182	Ketapang	3	Ketapang	PP	PP	PP	PP	*
183	Kubu Raya	4	Teluk Air / Padang Tikar	PR	PR	PR	PR	*
184	Pontianak	5	Pontianak	PU	PU	PU	PU	*
185	Sambas	6	Sintete	PP	PP	PP	PP	*
186	Sambas	7	Paloh/Sakura	PP	PP	PP	PP	*
XX. Provinsi Kalimantan Tengah								
187	Barito Selatan	1	Rangga Ilung	PL	PL	PR	PR	*
188	Kapuas	2	Batanjung	PR	PR	PR	PR	
189	Katingan	3	Pegatan Mendawai	PR	PR	PR	PR	*
190	Kotawaringin Barat	4	Kumai	PP	PP	PP	PP	*
191	Kotawaringin Barat	5	Pangkalan Bun	PR	PR	PR	PR	*
192	Kotawaringin Timur	6	Sampit	PP	PP	PP	PP	*
193	Kotawaringin Timur	7	Samuda	PL	PL	PL	PL	*
194	Pulang Pisau	8	Pulang Pisau	PP	PP	PP	PP	*
195	Seruyan	9	Kuala Pembuang	PR	PR	PR	PR	*
196	Seruyan	10	Teluk Sigintung/Seruyan	PP	PP	PP	PP	
197	Sukamara	11	Sukamara	PP	PP	PP	PP	*
XXI. Provinsi Kalimantan Utara								
198	Bulungan	1	Bunyu	PP	PP	PP	PP	*
199	Bulungan	2	Tanjung Selor Kayu / Kayan I	PR	PR	PR	PR	*
200	Nunukan	3	Sungai Nyamuk/Sebatik	PP	PP	PP	PP	*
201	Nunukan	4	Nunukan/Tunon Taka	PP	PP	PP	PP	*
202	Tarakan	5	Tarakan/Malundung	PU	PU	PU	PU	*
XXII. Provinsi Kalimantan Selatan								
203	Banjarmasin	1	Banjarmasin	PU	PU	PU	PU	*
204	Kotabaru	2	Kota Baru	PP	PP	PP	PP	*
205	Kotabaru	3	Mekar Putih	PP	PP	PP	PP	
206	Kotaberu	4	Sebuku	PL	PL	PL	PL	*
207	Kotabaru	5	Stagen	PP	PP	PP	PP	
208	Kotabaru	6	Tanjung Batu	PR	PR	PR	PR	*
209	Tanah Bumbu	7	Satui/Sei Danau	PL	PL	PL	PL	*
210	Tanah Bumbu	8	Simp. Empat Batu Licin	PP	PP	PP	PP	
211	Tanah Laut	9	Kintap	PP	PP	PP	PP	*
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur								
212	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU	*
213	Berau	2	Tanjung Redeb	PP	PP	PP	PP	*
214	Bontang	3	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP	*
215	Bontang	4	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP	*
216	Kutai Kertanegara	5	Kuala Semboja/Sebulu	PP	PP	PP	PP	*
217	Kutai Kertanegara	6	Tanjung Santan	PR	PR	PR	PR	*

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
218	Kutai Timur	7	Maloy	PP	PP	PP	PP	
219	Kutai Timur	8	Sangatta	PP	PP	PP	PP	*
220	Kutai Timur	9	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR	*
221	Paser	10	Tanah Paser/Pondong	PP	PP	PP	PP	*
222	Penajam Pasir Utara	11	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP	*
223	Samarinda	12	Samarinda	PP	PP	PP	PP	*
XXIV. Provinsi Sulawesi Utara								
224	B. Mangondow	1	Labuhan Uki	PP	PP	PP	PP	*
225	B. Mangondow Timur	2	Kotabunan	PL	PL	PL	PL	*
226	Bitung	3	Bitung	PU	PU	PU	PU	*
227	Kep. Sangihe	4	Petta	PP	PP	PP	PP	
228	Kep. Sangihe	5	Tahuna	PP	PP	PP	PP	*
229	Kep. Sitaro	6	Ulu Siau	PL	PL	PL	PL	*
230	Kep. Talaud	7	Karatung	PP	PP	PP	PP	
231	Kep. Talaud	8	Lirung	PR	PR	PR	PR	*
232	Kep. Talaud	9	Miangas	PP	PP	PP	PP	
233	Manado	10	Manado	PP	PP	PP	PP	*
234	Minahasa Selatan	11	Amurang	PL	PR	PR	PR	*
235	Minahasa Utara	12	Likupang	PL	PL	PL	PL	*
XXV. Provinsi Gorontalo								
236	Boalemo	1	Tilamuta	PR	PR	PR	PR	*
237	Gorontalo	2	Gorontalo	PP	PP	PP	PP	*
238	Gorontalo Utara	3	Anggrek	PP	PP	PP	PP	*
239	Gorontalo Utara	4	Kwandang	PR	PR	PR	PR	*
240	Pohuwato	5	Bumbulan	PR	PR	PR	PR	
XXVI. Provinsi Sulawesi Barat								
241	Majene	1	Majene	PR	PP	PP	PP	*
242	Mamuju	2	Belang-Belang	PP	PP	PP	PP	*
243	Mamuju	3	Mamuju	PP	PP	PP	PP	*
244	Polewali Mandar	4	Tanjung Silopo/Polewali	PR	PP	PP	PP	*
XXVII. Provinsi Sulawesi Tengah								
245	Banggai	1	Bunta	PR	PR	PR	PR	*
246	Banggai	2	Pagimana	PP	PP	PP	PP	*
247	Banggai	3	Luwuk	PP	PP	PP	PP	*
248	Banggai	4	Tangkiang	PP	PP	PP	PP	
249	Banggai Kepulauan	5	Banggai	PP	PP	PP	PP	*
250	Buol	6	Leok	PR	PR	PR	PR	*
251	Donggala	7	Donggala	PP	PP	PP	PP	*
252	Donggala	8	Ogoamas	PR	PR	PR	PR	*
253	Donggala	9	Wani	PP	PP	PP	PP	*
254	Morowali	10	Kolonodale	PP	PP	PP	PP	*

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
255	Palu	11	Pantoloan	PU	PU	PU	PU	*
256	Parigi Moutong	12	Parigi	PR	PR	PR	PR	*
257	Poso	13	Poso	PP	PP	PP	PP	*
258	Tojo Una-Una	14	Ampana	PL	PL	PL	PL	*
259	Tojo Una-Una	15	Mantangisi	PL	PL	PR	PR	
260	Toli-Toli	16	Toli-toli	PP	PP	PP	PP	*
XXVIII. Provinsi Sulawesi Tenggara								
261	Bau-Bau	1	Bau-Bau/Murhum	PP	PP	PP	PP	*
262	Kendari	2	Kendari/Bungkutoko	PP	PP	PP	PP	*
263	Kolaka	3	Kolaka	PP	PP	PP	PP	*
264	Kolaka	4	Pomalaa	PR	PR	PP	PP	*
265	Konawe Kepulauan	5	Langara	PL	PL	PL	PL	*
266	Muna	6	Raha	PP	PP	PP	PP	*
267	Wakatobi	7	Wanci	PP	PP	PP	PP	
XXIX. Provinsi Sulawesi Selatan								
268	Bantaeng	1	Bantaeng/ Bonthain	PP	PP	PP	PP	
269	Barru	2	Garongkong	PP	PP	PP	PP	*
270	Bone	3	Bajoe	PP	PP	PP	PP	*
271	Bone	4	Pattirobajo	PR	PR	PR	PR	*
272	Bulukumba	5	Bulukumba/Lappe'e	PP	PP	PP	PP	*
273	Bulukumba	6	Maccini Baji	PP	PP	PP	PP	
274	Jeneponto	7	Jeneponto/Bunging	PR	PR	PR	PR	*
275	Luwu Timur	8	Malili (Sungai)	PP	PP	PP	PP	*
276	Makasar	9	Makasar/Makasar New Port	PU	PU	PU	PU	*
277	Makasar	10	Paotere	PR	PR	PR	PR	
278	Palopo	11	Palopo/Tg. Ringgit	PP	PP	PP	PP	*
279	Pangkajene Kepulauan	12	Biringkasi	PR	PR	PR	PR	*
280	Pare-pare	13	Capa Ujung / Pare-pare	PP	PP	PP	PP	*
281	Pare-pare	14	Pare-Pare/Nusantara	PP	PP	PP	PP	
282	Pinrang	15	Marabombang	PL	PR	PR	PR	
283	Selayar	16	P. Jampea (Banteng)	PR	PR	PR	PR	*
284	Selayar	17	Selayar/Benteng/Rauf Rahman	PP	PP	PP	PP	*
285	Selayar	18	Galesong/Takalar	PP	PP	PP	PP	
286	Sinjai	19	Sinjai/Larea-rea	PP	PP	PP	PP	*
287	Wajo	20	Siwa/Bangsalae	PR	PR	PP	PP	*
XXX. Provinsi Maluku Utara								
288	Halmahera Barat	1	Jailolo	PR	PR	PR	PR	*
289	Halmahera Selatan	2	Babang	PP	PP	PP	PP	*
290	Halmahera Selatan	3	Laiwui	PR	PP	PP	PP	*
291	Halmahera Selatan	4	Mafa	PR	PP	PP	PP	
292	Halmahera Tengah	5	Weda	PR	PR	PR	PR	*
293	Halmahera Timur	6	Buli	PR	PR	PR	PR	*

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
294	Halmahera Utara	7	Tobelo	PP	PP	PP	PP	*
295	Kepulauan Sula	8	Falabisahaya	PR	PP	PP	PP	
296	Kepulauan Sula	9	Sanana	PR	PR	PR	PR	*
297	Morotai	10	Daruba	PR	PR	PR	PR	*
298	Pulau Morotai	11	Wayabula	PP	PP	PP	PP	
299	Ternate	12	Ternate/A.Yani	PU	PU	PU	PU	*
300	Tidore Kepulauan	13	Mangole	PR	PP	PP	PP	
301	Tidore Kepulauan	14	Soasio/Goto	PR	PR	PR	PR	*
302	Tidore Kepulauan	15	Sofifi	PP	PP	PP	PP	
XXXI. Provinsi Maluku								
303	Ambon	1	Ambon	PU	PU	PU	PU	*
304	Buru	2	Namlea	PP	PP	PP	PP	*
305	Buru Selatan	3	Leksula	PR	PR	PR	PR	*
306	Kepulauan Aru	4	Dobo	PP	PP	PP	PP	*
307	Maluku Barat Daya	5	Wonreli	PR	PR	PR	PR	*
308	Maluku Tengah	6	Amahai	PP	PP	PP	PP	*
309	Maluku Tengah	7	Tulehu	PP	PP	PP	PP	*
310	Maluku Tengah	8	Banda Naira	PR	PR	PR	PR	*
311	Maluku Tengah	9	Wahai	PR	PR	PR	PR	*
312	Maluku Tenggara Barat	10	Saumlaki	PP	PP	PP	PP	*
313	Seram Bagian Barat	11	Walsarisa	PL	PL	PL	PL	*
314	Seram Bagian Timur	12	Buta	PP	PP	PP	PP	
315	Seram Bagian Timur	13	Geser	PL	PL	PL	PL	*
316	Tual	14	Tual	PP	PP	PP	PP	*
XXXII. Provinsi Papua Barat								
317	Fak-fak	1	Fak-fak	PP	PP	PP	PP	*
318	Fak-fak	2	Kokas	PL	PR	PR	PR	*
319	Kab. Sorong	3	Arar	PP	PP	PP	PP	
320	Kaimana	4	Kaimana	PP	PP	PP	PP	*
321	Manokwari	5	Manokwari	PP	PP	PP	PP	*
322	Manokwari Selatan	6	Oransbari	PL	PR	PR	PR	*
323	Raja Ampat	7	Saonek	PL	PR	PR	PR	*
324	Sorong	8	Sorong	PU	PU	PU	PU	*
325	Sorong Selatan	9	Teminabuan	PP	PP	PP	PP	*
326	Teluk Bintuni	10	Bintuni	PP	PP	PP	PP	*
327	Teluk Wondama	11	Wasior	PP	PP	PP	PP	*
XXXIII. Provinsi Papua								
328	Asmat	1	Agats	PP	PP	PP	PP	*
329	Biak Numfor	2	Biak	PP	PP	PP	PP	*
330	Jayapura	3	Depapre	PP	PP	PU	PU	
331	Jayapura	4	Jayapura	PU	PU	PU	PU	*
332	Mappi	5	Bade	PP	PP	PP	PP	*

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
333	Merauke	6	Merauke	PU	PU	PU	PU	*
334	Mimika	7	Amamapare	PP	PP	PP	PP	*
335	Mimika	8	Pomako	PP	PP	PP	PP	*
336	Nabire	9	Nabire	PP	PP	PP	PP	*
337	Sarmi	10	Sarmi	PP	PP	PP	PP	*
338	Supiori	11	Korido	PR	PR	PR	PR	*
339	Waropen	12	Waren	PR	PP	PP	PP	*
340	Yapen	13	Serui	PP	PP	PP	PP	*

SUB LAMPIRAN A2
LOKASI WILAYAH KERJA PELABUHAN

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
I. Provinsi Aceh								
1	Aceh Selatan	1	Sibadeh	PL	PL	PL	PL	
2	Aceh Singkil	2	P. Banyak	PL	PL	PL	PL	
3	Aceh Singkil	3	P. Sarok	PL	PL	PL	PL	
4	Pidie	4	Sigli	PL	PL	PL	PL	
5	Simeulue	5	Sibigo	PL	PL	PL	PL	
II. Provinsi Sumatera Utara								
6	Labuhan Batu	1	Labuhan Bilik	PL	PL	PL	PL	
7	Mandailing Natal	2	Partimbungan Ketek	PL	PL	PL	PL	
8	Nias Barat	3	Hinako	PL	PL	PL	PL	
9	Nias Selatan	4	Sigolo-golo	PL	PL	PL	PL	
10	Tapanuli Tengah	5	Oswald Siahaan/Labuhan Angin	PR	PR	PR	PR	
III. Provinsi Sumatera Barat								
11	Kep. Mentawai	1	Bakai	PL	PL	PL	PL	
12	Kep. Mentawai	2	Pasapuat	PL	PL	PL	PL	
13	Kep. Mentawai	3	Sikabaluan / Pokai	PL	PL	PL	PL	
14	Kep. Mentawai	4	Tua Pejat	PR	PR	PR	PR	
15	Padang	5	Muara Padang	PL	PL	PL	PL	
16	Padang	6	Tiku	PL	PL	PL	PL	
17	Pasaman Barat	7	Air Bangis	PL	PL	PL	PL	
IV. Provinsi Kepulauan Riau								
18	Bintan	1	Tambelan	PL	PL	PL	PL	
19	Karimun	2	Tanjung Tiram	PR	PR	PR	PR	
20	Kep. Anambas	3	Letung	PL	PL	PL	PL	
21	Lingga	4	Kuala Raya	PL	PL	PL	PL	
22	Lingga	5	Penuba	PL	PL	PL	PL	
23	Lingga	6	Sei Buluh	PL	PL	PL	PL	
24	Natuna	7	Midai	PL	PL	PL	PL	
25	Natuna	8	Pulau Seluan	PL	PL	PL	PL	
26	Natuna	9	Ranai	PR	PR	PR	PR	
27	Natuna	10	Sedanau	PL	PL	PL	PL	
28	Natuna	11	Serasan	PR	PR	PR	PR	
29	Natuna	12	Subi	PR	PR	PR	PR	
30	Tanjung Pinang	13	Dompak	PR	PR	PR	PR	
31	Tanjung Pinang	14	Tanjung Mocoh	PR	PR	PR	PR	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
V. Provinsi Riau								
32	Bengkalis	1	Bandul	PL	PL	PL	PL	
33	Indragiri Hilir	2	Kuala Mandah	PL	PL	PL	PL	
34	Indragiri Hilir	3	Pulau Kijang	PL	PL	PL	PL	
35	Kep.Meranti	4	Tanjung Samak	PL	PL	PL	PL	
36	Rokan Hilir	5	Batu Enam	PL	PL	PL	PL	
37	Siak	6	Siak Sri Indrapura	PL	PL	PL	PL	
VI. Provinsi Bengkulu								
38	Muko - Muko	1	Muko-Muko	PL	PR	PR	PR	
VII. Provinsi Jambi								
39	Tg. Jabung Timur	1	Simbur Naik	PL	PL	PL	PL	
40	Tg. Jabung Timur	2	Sungai Jambat	PL	PL	PL	PL	
41	Tg. Jabung Timur	3	Sungai Lokan	PL	PL	PL	PL	
VIII. Provinsi Sumatera Selatan								
IX. Provinsi Bangka Belitung								
42	Belitung	1	Tanjung Batu	PL	PL	PL	PL	
X. Provinsi Lampung								
43	Lampung Selatan	1	Lagundi	PL	PL	PL	PL	
44	Lampung Selatan	2	Katianda	PL	PL	PL	PL	
45	Lampung Selatan	3	P. Sebesi	PL	PL	PL	PL	
46	Lampung Tengah	4	Way Seputih	PL	PL	PL	PL	
47	Lampung Timur	5	Kuala Penat	PL	PL	PL	PL	
48	Lampung Timur	6	Way Sekampung	PL	PL	PL	PL	
49	Pesisir Barat	7	Krui	PL	PL	PL	PL	
50	Tanggamus	8	P. Tabuan	PL	PL	PL	PL	
51	Tulang Bawang	9	Teladas	PL	PL	PL	PL	
52	Tulang Bawang	10	Sungai Burung	PL	PL	PL	PL	
XI. Provinsi Banten								
53	Tangerang	1	Cituis	PL	PL	PL	PL	
54	Tangerang	2	Kresek/Kronjo	PL	PL	PL	PL	
XII. Provinsi Jawa Barat								
55	Bekasi	1	Muara Gembong	PL	PL	PL	PL	
56	Cirebon	2	Muara Gebang	PL	PL	PL	PL	
XIII. Provinsi DKI Jakarta								
XIV. Provinsi Jawa Tengah								
57	Jepara	1	Legok Bajak	PL	PL	PL	PL	
58	Kendal	2	Kendal	PR	PR	PR	PR	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA			Hierarki Pelabuhan				KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	2011	2015	2020	2030	
59	Pekalongan	3	Wiradesa	PL	PL	PL	PL	
60	Pemalang	4	Pemalang	PL	PL	PL	PL	
XV. Provinsi Jawa Timur								
61	Banyu Wangi	1	Banyu Wangi/ Boom	PL	PL	PL	PL	
62	Pacitan	2	Pacitan	PL	PL	PL	PL	
63	Pamekasan	3	Pasean	PL	PL	PL	PL	
64	Probolinggo	4	Giliketapang	PL	PL	PL	PL	
65	Sampang	5	Glimandangin	PL	PL	PL	PL	
66	Sampang	6	Sampang	PR	PR	PR	PR	
67	Sumenep	7	Gayam	PL	PL	PL	PL	
68	Sumenep	8	Kangean	PR	PR	PR	PR	
69	Sumenep	9	Keramaian	PL	PL	PL	PL	
70	Sumenep	10	P. Raas	PL	PL	PL	PL	
XVI. Provinsi Bali								
71	Buleleng	1	Labuhan Lalang	PL	PL	PL	PL	
72	Buleleng	2	Lovina	PL	PL	PL	PL	
73	Klungkung	3	Nusa Lembongan	PL	PL	PL	PL	
XVII. Provinsi Nusa Tenggara Barat								
74	Bima	1	Sape	PR	PR	PR	PR	
75	Bima	2	Waworada	PR	PR	PR	PR	
76	Dompu	3	Kempo	PL	PL	PL	PL	
77	Lombok Barat	4	Ampenan	PL	PL	PL	PL	
78	Lombok Timur	5	Labuhan Haji	PL	PL	PL	PL	
79	Lombok Utara	6	Carik	PR	PR	PR	PR	
80	Sumbawa	7	Alas	PL	PL	PL	PL	
XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Timur								
81	Alor	1	Dulionong	PL	PL	PL	PL	
82	Alor	2	Kabir	PL	PL	PL	PL	
83	Alor	3	Maritaing	PL	PL	PL	PL	
84	Alor	4	Moru	PL	PL	PL	PL	
85	Ende	5	Ippi	PL	PL	PL	PL	
86	Ende	6	Maurole	PL	PL	PL	PL	
87	Flores Timur	7	Lamakera	PL	PL	PL	PL	
88	Flores Timur	8	Lato	PL	PL	PL	PL	
89	Flores Timur	9	Menanga	PL	PL	PL	PL	
90	Flores Timur	10	Pamakayo	PL	PL	PL	PL	
91	Flores Timur	11	Tabilota	PL	PL	PL	PL	
92	Flores Timur	12	Terong	PL	PL	PL	PL	
93	Flores Timur	13	Waiwadan	PL	PL	PL	PL	
94	Flores Timur	14	Waiwerang	PL	PL	PL	PL	
95	Flores Timur	15	Waiwuring	PL	PL	PL	PL	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
96	Kupang	16	Naikliu	PL	PL	PL	PL	
97	Kupang	17	Nunbaun Sabu (Namosain)	PL	PL	PL	PL	
98	Lembata	18	Lembata	PL	PL	PL	PL	
99	Lembata	19	Wulandoni	PL	PL	PL	PL	
100	Manggarai	20	Iteng	PL	PL	PL	PL	
101	Manggarai	21	P. Mules	PL	PL	PL	PL	
102	Manggarai	22	Robek	PL	PL	PL	PL	
103	Manggarai Barat	23	Bari	PL	PL	PL	PL	
104	Manggarai Barat	24	Komodo	PL	PL	PL	PL	
105	Manggarai Timur	25	MBorong	PL	PL	PL	PL	
106	Manggarai Timur	26	Pota	PL	PL	PL	PL	
107	Manggarai Barat	27	Rinca	PL	PL	PL	PL	
108	Manggarai Timur	28	Waiwole	PL	PL	PL	PL	
109	Ngada	29	Aimere	PL	PL	PL	PL	
110	Ngada	30	Maumbawa	PL	PL	PL	PL	
111	Rote Ndao	31	Batutua	PL	PL	PL	PL	
112	Rote Ndao	32	Papela	PL	PL	PL	PL	
113	Sabu Raijua	33	Biu	PL	PL	PL	PL	
114	Sabu Raijua	34	Raijua	PL	PL	PL	PL	
115	Sabu Raijua	35	Sabu Timur	PL	PL	PL	PL	
116	Sikka	36	Hepang	PL	PL	PL	PL	
117	Sikka	37	Palue	PL	PL	PL	PL	
118	Sikka	38	Wuring	PL	PL	PL	PL	
119	Sumba Barat	39	Binanatu	PL	PL	PL	PL	
120	Sumba Barat	40	Rua	PL	PL	PL	PL	
121	Sumba Tengah	41	Mamboro	PL	PL	PL	PL	
122	Sumba Timur	42	Baing	PL	PL	PL	PL	
123	Sumba Timur	43	Pulau Salura	PL	PL	PL	PL	
124	Timor Tengah Selatan	44	Boking	PL	PL	PL	PL	
125	Timor Tengah Selatan	45	Kolbano	PR	PR	PR	PR	
XIX. Provinsi Kalimantan Barat								
126	Kayong Utara	1	Air Hitam	PL	PL	PL	PL	
127	Kayong Utara	2	Tanjung Satai	PL	PL	PL	PL	
128	Mempawah	3	Mempawah	PR	PR	PR	PR	
129	Sambas	4	Jeruju	PL	PL	PL	PL	
130	Sambas	5	Karimata	PL	PL	PL	PL	
131	Sambas	6	Pemangkat	PL	PL	PL	PL	
132	Sambas	7	Singkawang	PR	PR	PR	PR	
133	Singkawang	8	Sukadana	PL	PL	PL	PL	
XX. Provinsi Kalimantan Tengah								
134	Barito Selatan	1	Kelanis	PL	PL	PL	PL	
135	Kapuas	2	Bahaur	PL	PL	PL	PL	
136	Kotawaringin Timur	3	Bagendang	PL	PL	PL	PL	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
137	Palangkaraya	4	Kereng Bengkirai	PL	PL	PL	PL	
138	Sukamara	5	Kuala Jelay	PL	PL	PL	PL	
XXI. Provinsi Kalimantan Utara								
139	Nunukan	1	Simenggaris	PL	PL	PL	PL	
140	Tana Tidung	2	Sesayap	PL	PL	PL	PL	
XXII. Provinsi Kalimantan Selatan								
141	Kotabaru	1	Marabatuan	PL	PL	PL	PL	
142	Kotabaru	2	Matasiri	PL	PL	PL	PL	
143	Kotabaru	3	Serongga/Tanjung Batu	PR	PR	PR	PR	
144	Tanah Laut	4	Pelaihari/Swarangan	PL	PL	PL	PL	
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur								
145	Berau	1	Mataritip	PL	PL	PL	PL	
146	Berau	2	Tanjung Batu	PL	PL	PL	PL	
147	Paser	3	Teluk Adang	PL	PL	PL	PL	
XXIV. Provinsi Sulawesi Utara								
148	B. Mangondow Selatan	1	Torosik	PR	PR	PR	PR	
149	B. Mangondow Utara	2	Tg. Sidupa	PL	PL	PL	PL	
150	Kep. Sangihe	3	Bukide	PL	PL	PL	PL	
151	Kep. Sangihe	4	Kahakitang	PL	PL	PL	PL	
152	Kep. Sangihe	5	Kalama	PL	PL	PL	PL	
153	Kep. Sangihe	6	Kawaluso	PL	PL	PL	PL	
154	Kep. Sangihe	7	Kawio	PR	PR	PR	PR	
155	Kep. Sangihe	8	Lipang	PL	PL	PL	PL	
156	Kep. Sangihe	9	Makalehi	PR	PR	PR	PR	
157	Kep. Sangihe	10	Marore	PR	PR	PR	PR	
158	Kep. Sangihe	11	Matutuang	PL	PL	PL	PL	
159	Kep. Sangihe	12	Ngalipaeng	PL	PL	PL	PL	
160	Kep. Sangihe	13	Para	PL	PL	PL	PL	
161	Kep. Sangihe	14	Tamako	PL	PL	PL	PL	
162	Kep. Sitaro	15	Biaro	PL	PL	PL	PL	
163	Kep. Sitaro	16	Buhias	PL	PL	PL	PL	
164	Kep. Sitaro	17	Pehe	PL	PR	PR	PR	
165	Kep. Sitaro	18	Sawang	PL	PL	PL	PL	
166	Kep. Sitaro	19	Tagulandang	PR	PR	PR	PR	
167	Kep. Talaud	20	Beo	PL	PL	PL	PL	
168	Kep. Talaud	21	Dapalan	PL	PL	PL	PL	
169	Kep. Talaud	22	Essang	PL	PL	PL	PL	
170	Kep. Talaud	23	Kakorotan	PR	PR	PR	PR	
171	Kep. Talaud	24	Mangarang	PL	PL	PL	PL	
172	Kep. Talaud	25	Marampit	PL	PR	PR	PR	
173	Kep. Talaud	26	Melangoane	PL	PR	PR	PR	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
174	Kep. Talaud	27	Rainis	PL	PL	PL	PL	
175	Minahasa Tenggara	28	Belang	PR	PR	PR	PR	
176	Minahasa Utara	29	Kema	PL	PL	PL	PL	
177	Minahasa Utara	30	Munte/Likupang Barat	PR	PR	PR	PR	
XXV. Provinsi Gorontalo								
XXVI. Provinsi Sulawesi Barat								
178	Mamuju	1	Ambo	PL	PL	PL	PL	
179	Mamuju	2	Budong-Budong	PL	PL	PL	PL	
180	Mamuju	3	Popongan	PL	PL	PL	PL	
181	Mamuju	4	Salisingan	PR	PR	PR	PR	
182	Mamuju	5	Tujuh-tujuh	PL	PL	PL	PL	
183	Mamuju Utara	6	Pasang Kayu	PR	PR	PR	PR	
184	Polewali Mandar	7	Campalagian	PL	PL	PL	PL	
185	Polewali Mandar	8	Tinambung	PL	PL	PL	PL	
XXVII. Provinsi Sulawesi Tengah								
186	Banggai Kepulauan	1	Salakan	PR	PR	PR	PR	
187	Morowali	2	Bungku	PR	PR	PR	PR	
188	Morowali	3	Wosu	PL	PL	PL	PL	
189	Morowali Utara	4	Baturube	PL	PL	PL	PL	
190	Morowali Utara	5	Manui	PR	PR	PR	PR	
191	Parigi Moutong	6	Moutong	PR	PR	PR	PR	
192	Parigi Moutong	7	Tinombo	PL	PL	PL	PL	
193	Poso	8	Tojo	PL	PL	PL	PL	
194	Tojo Una-Una	9	Dolong	PL	PL	PL	PL	
195	Tojo Una-Una	10	Malenge	PL	PL	PL	PL	
196	Tojo Una-Una	11	Pasokan	PL	PL	PL	PL	
197	Tojo Una-Una	12	Popolii	PL	PL	PL	PL	
198	Tojo Una-Una	13	Una-Una	PL	PL	PL	PL	
199	Tojo Una-Una	14	Wakai	PR	PR	PR	PR	
200	Toli-Toli	15	Malala	PL	PL	PL	PL	
XXVIII. Provinsi Sulawesi Tenggara								
201	Bau-Bau	1	Binongko	PL	PL	PL	PL	
202	Bau-Bau	2	Tomia	PL	PL	PL	PL	
203	Bombana	3	Boepinang	PL	PL	PL	PL	
204	Bombana	4	Kasipute	PL	PL	PL	PL	
205	Bombana	5	Sikeli	PL	PR	PR	PR	
206	Buton	6	Banabungi Pasarwajo	PR	PR	PR	PR	
207	Buton	7	Lasalimu	PL	PL	PL	PL	
208	Buton	8	Lawele	PL	PL	PL	PL	
209	Buton Selatan	9	Batu Atas	PL	PL	PL	PL	
210	Buton Selatan	10	Kadatua	PL	PL	PL	PL	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
211	Buton Selatan	11	Siompu	PL	PL	PL	PL	
212	Buton Tengah	12	Liana Banggai	PL	PL	PL	PL	
213	Buton Tengah	13	Talaga Raya	PL	PL	PL	PL	
214	Buton Tengah	14	Wamengkoli	PL	PL	PL	PL	
215	Buton Utara	15	Buranga	PL	PL	PL	PL	
216	Buton Utara	16	Ereke	PR	PR	PR	PR	
217	Buton Utara	17	Labuhan Belanda	PL	PL	PL	PL	
218	Kolaka	18	Dawi-dawi	PL	PL	PL	PL	
219	Kolaka	19	Tanggetada/Toari	PL	PL	PL	PL	
220	Kolaka	20	Rante Angin	PL	PL	PL	PL	
221	Kolaka	21	Wolio	PL	PL	PL	PL	
222	Kolaka Utara	22	Lasusua	PL	PL	PL	PL	
223	Kolaka Utara	23	Watunohu	PL	PL	PL	PL	
224	Konawe Selatan	24	Lakara	PL	PL	PL	PL	
225	Konawe Selatan	25	Lapuko	PR	PR	PR	PR	
226	Konawe Utara	26	Lameluru	PL	PL	PL	PL	
227	Konawe Utara	27	Matarape	PL	PL	PL	PL	
228	Konawe Utara	28	Molawe	PL	PL	PL	PL	
229	Muna	29	Maligano	PL	PL	PL	PL	
230	Wakatobi	30	Kaledupa	PL	PL	PL	PL	
XXIX. Provinsi Sulawesi Selatan								
231	Barru	1	Barebbo/Kading	PL	PL	PL	PL	
232	Barru	2	Uloe	PL	PL	PL	PL	
233	Bone	3	P. Balang Lompo	PL	PL	PL	PL	
234	Bone	4	P. Kalukalukuang	PL	PL	PL	PL	
235	Bone	5	P. Matalaang	PL	PL	PL	PL	
236	Bone	6	P. Sabutung	PL	PL	PL	PL	
237	Luwu Timur	7	Awarange/ Barru	PR	PR	PR	PR	
238	Luwu Utara	8	P. Bonerate	PL	PL	PL	PL	
239	Pangkajene Kepulauan	9	Kalatoa	PL	PL	PL	PL	
240	Pangkajene Kepulauan	10	Kayuadi	PL	PL	PL	PL	
241	Pangkajene Kepulauan	11	P. Jinato	PL	PL	PL	PL	
242	Pangkajene Kepulauan	12	P. Sailus	PL	PL	PL	PL	
243	Pangkajene Kepulauan	13	P. Sapuka	PL	PL	PL	PL	
244	Selayar	14	Munte	PL	PL	PL	PL	
245	Selayar	15	P. Jampea (Ujung Toa)	PL	PL	PL	PL	
246	Selayar	16	Pamatata	PL	PL	PL	PL	
247	Selayar	17	Ulo-Ulo/Belopa	PL	PL	PL	PL	
248	Sinjai	18	Cappa Ujung Sinjai	PL	PL	PL	PL	
249	Sinjai	19	Tuju-Tuju	PL	PL	PL	PL	
250	Pangkajene Kepulauan	20	Balang Lompo	PL	PL	PL	PL	
XXX. Provinsi Maluku Utara								
251	Halmahera Barat	1	Bataka	PL	PL	PL	PL	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
252	Halmahera Barat	2	Kedi/Loloda	PL	PL	PL	PL	
253	Halmahera Barat	3	Matui	PR	PR	PR	PR	
254	Halmahera Selatan	4	Bisui	PL	PL	PL	PL	
255	Halmahera Selatan	5	Busua	PL	PL	PL	PL	
256	Halmahera Selatan	6	Guruapin	PL	PL	PL	PL	
257	Halmahera Selatan	7	Manu/Gamunu	PL	PL	PL	PL	
258	Halmahera Selatan	8	Pulau Kayoa	PL	PL	PL	PL	
259	Halmahera Selatan	9	Indari	PL	PL	PL	PL	
260	Halmahera Selatan	10	Koititi	PL	PL	PL	PL	
261	Halmahera Selatan	11	Labuha	PL	PL	PL	PL	
262	Halmahera Selatan	12	Loleo Jaya	PL	PL	PL	PL	
263	Halmahera Selatan	13	Madopolo/Jojame	PL	PL	PL	PL	
264	Halmahera Selatan	14	Makian	PL	PL	PL	PL	
265	Halmahera Selatan	15	Palamea	PL	PL	PL	PL	
266	Halmahera Selatan	16	Pasipalele	PL	PL	PL	PL	
267	Halmahera Selatan	17	Pelita	PL	PL	PL	PL	
268	Halmahera Selatan	18	Pigaraja	PL	PL	PL	PL	
269	Halmahera Selatan	19	Saketa	PL	PL	PL	PL	
270	Halmahera Selatan	20	Wayaloar	PR	PR	PR	PR	
271	Halmahera Selatan	21	Wayauwa	PL	PL	PL	PL	
272	Halmahera Selatan	22	Wosi	PL	PL	PL	PL	
273	Halmahera Selatan	23	Yaba	PL	PL	PL	PL	
274	Halmahera Tengah	24	Banemo	PL	PL	PL	PL	
275	Halmahera Tengah	25	Paniti	PL	PL	PL	PL	
276	Halmahera Tengah	26	P. Gebe	PL	PL	PL	PL	
277	Halmahera Tengah	27	Patani	PL	PL	PL	PL	
278	Halmahera Tengah	28	Sagea	PL	PL	PL	PL	
279	Halmahera Tengah	29	Sepo	PL	PL	PL	PL	
280	Halmahera Tengah	30	Tapaleo/Gemia	PL	PL	PL	PL	
281	Halmahera Timur	31	Bicoli	PR	PR	PR	PR	
282	Halmahera Timur	32	Dorosagu	PL	PL	PL	PL	
283	Halmahera Timur	33	Manitingting	PR	PR	PR	PR	
284	Halmahera Timur	34	Subaim/Wasile	PL	PL	PL	PL	
285	Halmahera Utara	35	Dama	PL	PL	PL	PL	
286	Halmahera Utara	36	Dedeta	PL	PL	PL	PL	
287	Halmahera Utara	37	Dorume	PL	PL	PL	PL	
288	Halmahera Utara	38	Galela	PL	PR	PR	PR	
289	Halmahera Utara	39	Kao	PL	PL	PL	PL	
290	Kepulauan Sula	40	Dofa	PL	PL	PL	PL	
291	Kepulauan Sula	41	Maitina / Mangole	PL	PL	PL	PL	
292	Kepulauan Sula	42	Malbufa	PL	PL	PL	PL	
293	Pulau Morotai	43	Bere - Bere	PL	PL	PL	PL	
294	Pulau Morotai	44	Posi-Posi	PL	PL	PL	PL	
295	Pulau Morotai	45	Sopi	PL	PL	PL	PL	
296	Pulau Taliabu	46	Bobong	PL	PL	PL	PL	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
297	Pulau Taliabu	47	Loseng	PL	PL	PL	PL	
298	Pulau Taliabu	48	Tikong	PR	PR	PR	PR	
299	Ternate	49	Armada Semut Mangga Dua	PL	PL	PL	PL	
300	Ternate	50	Moti	PL	PL	PL	PL	
301	Ternate	51	Tifure	PL	PL	PL	PL	
302	Tidore Kepulauan	52	Gita/Payahe	PL	PL	PL	PL	
303	Tidore Kepulauan	53	Maidi/Lifofa	PL	PL	PL	PL	
304	Tidore Kepulauan	54	Rum	PL	PL	PL	PL	
XXXI. Provinsi Maluku								
305	Ambon	1	Batu Merah	PL	PL	PL	PL	
306	Ambon	2	Gudang Arang	PL	PL	PL	PL	
307	Buru	3	Air Buaya	PL	PL	PL	PL	
308	Buru Selatan	4	Fogi	PL	PL	PL	PL	
309	Buru Selatan	5	Namrole	PR	PR	PR	PR	
310	Buru Selatan	6	Tifu	PL	PL	PL	PL	
311	Kepulauan Aru	7	Batu Goyang/Kalar-Kalar	PL	PL	PL	PL	
312	Kepulauan Aru	8	Benjina	PL	PL	PL	PL	
313	Kepulauan Aru	9	Kobroor	PL	PL	PL	PL	
314	Kepulauan Aru	10	Marlasi	PL	PL	PL	PL	
315	Maluku Barat Daya	11	Dawelor	PL	PL	PL	PL	
316	Maluku Barat Daya	12	Damar	PL	PL	PL	PL	
317	Maluku Barat Daya	13	Eray	PL	PL	PL	PL	
318	Maluku Barat Daya	14	Hila/Romang	PL	PL	PL	PL	
319	Maluku Barat Daya	15	Ilwaki	PR	PR	PR	PR	
320	Maluku Barat Daya	16	Kaiwatu/Moa	PL	PL	PL	PL	
321	Maluku Barat Daya	17	Kroing	PL	PL	PL	PL	
322	Maluku Barat Daya	18	Lakor	PL	PL	PL	PL	
323	Maluku Barat Daya	19	Lerokis	PL	PL	PL	PL	
324	Maluku Barat Daya	20	Lirang	PL	PL	PL	PL	
325	Maluku Barat Daya	21	Lurang	PL	PL	PL	PL	
326	Maluku Barat Daya	22	Mahaleta	PL	PL	PL	PL	
327	Maluku Barat Daya	23	Marsela	PL	PL	PL	PL	
328	Maluku Barat Daya	24	Serwaru	PL	PL	PL	PL	
329	Maluku Barat Daya	25	Tepa	PR	PR	PR	PR	
330	Maluku Barat Daya	26	Upisera	PL	PL	PL	PL	
331	Maluku Barat Daya	27	Wulur	PL	PL	PL	PL	
332	Maluku Barat Daya	28	Wunlah	PL	PL	PL	PL	
333	Maluku Tengah	29	Banda Besar	PL	PL	PL	PL	
334	Maluku Tengah	30	Hitu	PL	PL	PL	PL	
335	Maluku Tengah	31	Kobisonta	PL	PL	PL	PL	
336	Maluku Tengah	32	Saparua/Haria	PL	PL	PL	PL	
337	Maluku Tengah	33	Tehoru	PL	PL	PL	PL	
338	Maluku Tengah	34	Tuhaha	PL	PL	PL	PL	
339	Maluku Tengah	35	Wolu	PL	PL	PL	PL	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
340	Maluku Tengah	36	Bula	PL	PL	PL	PL	
341	Maluku Tenggara	37	Elat	PL	PR	PR	PR	
342	Maluku Tenggara Barat	38	Adaulf	PL	PL	PL	PL	
343	Maluku Tenggara Barat	39	Larat	PL	PL	PL	PL	
344	Maluku Tenggara Barat	40	Seira	PL	PL	PL	PL	
345	Maluku Tenggara Barat	41	Tutu Kembong	PL	PL	PL	PL	
346	Seram Bagian Barat	42	Buano	PL	PL	PL	PL	
347	Seram Bagian Barat	43	Hatu Piru	PL	PL	PL	PL	
348	Seram Bagian Barat	44	Kairatu	PL	PL	PL	PL	
349	Seram Bagian Barat	45	Manipa	PL	PL	PL	PL	
350	Seram Bagian Barat	46	Taniwel	PL	PL	PL	PL	
351	Seram Bagian Timur	47	Bemo	PL	PL	PL	PL	
352	Seram Bagian Timur	48	Gorom/Ondor	PL	PL	PL	PL	
353	Seram Bagian Timur	49	Kataloka/Ondor	PL	PL	PL	PL	
354	Seram Bagian Timur	50	Kesui	PL	PL	PL	PL	
355	Seram Bagian Timur	51	Pulau Tior	PL	PL	PL	PL	
356	Tual	52	Kur	PL	PL	PL	PL	
357	Tual	53	Toyando	PL	PL	PL	PL	
XXXII. Provinsi Papua Barat								
358	Kab. Sorong	1	Seget	PL	PL	PL	PL	
359	Manokwari	2	Mansinam	PL	PL	PL	PL	
360	Manokwari	3	Saukorem	PL	PL	PL	PL	
361	Manokwari Selatan	4	Ransiki	PL	PL	PL	PL	
362	Raja Ampat	5	Fani	PL	PL	PL	PL	
363	Raja Ampat	6	Fatanlap	PL	PL	PL	PL	
364	Raja Ampat	7	Kabare	PL	PL	PL	PL	
365	Raja Ampat	8	Kalobo	PL	PL	PL	PL	
366	Raja Ampat	9	Pam	PL	PL	PL	PL	
367	Raja Am pat	10	Waigama	PR	PR	PR	PR	
368	Raja Ampat	11	Waisai	PL	PL	PL	PL	
369	Sorong Selatan	12	Inawatan	PL	PL	PL	PL	
370	Sorong Selatan	13	Segun	PL	PL	PL	PL	
371	Tambrauw	14	Mega	PL	PL	PL	PL	
372	Tambrauw	15	Sausapor	PL	PL	PL	PL	
373	Teluk Bintuni	16	Babo	PL	PL	PL	PL	
374	Teluk Wondama	17	Windesi	PL	PL	PL	PL	
XXXIII. Provinsi Papua								
375	Asmat	1	Atsy	PL	PL	PL	PL	
376	Asmat	2	Bayun	PL	PL	PL	PL	
377	Asmat	3	Mumugu	PL	PL	PL	PL	
378	Biak Numfor	4	Numford	PL	PL	PL	PL	
379	Biak Numfor	5	Pulau Owi	PL	PL	PL	PL	
380	Boven Digul	6	Asiki	PL	PL	PL	PL	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
381	Mappi	7	Eci	PL	PL	PL	PL	
382	Mappi	8	Mur/Moor	PL	PL	PL	PL	
383	Merauke	9	Kimaam	PL	PL	PL	PL	
384	Sarmi	10	Teba	PL	PL	PL	PL	
385	Supiori	11	Janggerbun	PL	PL	PL	PL	
386	Yapen	12	Ansus	PL	PL	PL	PL	
387	Yapen	13	Dawai	PL	PL	PL	PL	
388	Yapen	14	Kaipuri	PL	PL	PL	PL	
389	Yapen	15	Poom	PL	PL	PL	PL	

SUB LAMPIRAN A3
RENCANA LOKASI PELABUHAN

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
I. Provinsi Aceh								
1	Aceh Barat	1	Johan Pahlawan	PL	PL	PL	PL	
2	Aceh Barat	2	Kuala Bubon	PL	PL	PL	PL	
3	Aceh Barat	3	Meureubo	PL	PL	PL	PL	
4	Aceh Barat Daya	4	Teluk Surin	PL	PR	PR	PR	
5	Aceh Besar	5	Lamteng	PL	PL	PL	PL	
6	Aceh Besar	6	Meulingge	PL	PL	PL	PL	
7	Aceh Jaya	7	Lhok Kruet	PL	PL	PL	PL	
8	Aceh Selatan	8	Labuhan Haji	PL	PL	PL	PL	
9	Aceh Selatan	9	Meukek	PL	PL	PL	PL	
10	Aceh Singkil	10	Gosong telaga	PL	PL	PL	PL	
11	Aceh Tamiang	11	Seruway	PL	PL	PL	PL	
12	Aceh Timur	12	Kuala Beukah	PL	PL	PL	PL	
13	Aceh Utara	13	Lhok Nga	PL	PL	PL	PL	
14	Aceh Utara	14	Pulau Aceh	PL	PL	PL	PL	
15	Bireun	15	Kuala Raja	PL	PL	PL	PL	
16	Langsa	16	Pusong	PL	PL	PL	PL	
17	Nagan Raya	17	Kuala Pesisir	PL	PL	PL	PL	
18	Pidie	18	Laweung	PL	PL	PL	PL	
19	Sabang	19	Balohan	PL	PL	PL	PL	
20	Simeulue	20	Kolok	PL	PL	PL	PL	
21	Simeulue	21	Ujung Sarang	PL	PL	PL	PL	
II. Provinsi Sumatera Utara								
22	Asahan	1	Sei Nangka	PL	PL	PL	PL	
23	Asahan	2	Sei Sembilang	PL	PL	PL	PL	
24	Asahan	3	Silau Baru	PL	PL	PL	PL	
25	Batubara	4	Kampung Lalang	PL	PL	PL	PL	
26	Batubara	5	Perupuk/Medang Deras	PL	PL	PL	PL	
27	Deli Serdang	6	Pantai Labu	PL	PL	PL	PL	
28	Deli Serdang	7	Percut	PL	PL	PL	PL	
29	Deli Serdang	8	Rantau Panjang	PL	PL	PL	PL	
30	Labuhan Batu	9	Ajamu	PL	PL	PL	PL	
31	Labuhan Batu	10	Gajah Mati	PL	PL	PL	PL	
32	Labuhan Batu	11	Pantai Pukat	PL	PL	PL	PL	
33	Labuhan Batu	12	Sei Kubung	PL	PL	PL	PL	
34	Labuhan Batu Utara	13	Simandulang	PL	PL	PL	PL	
35	Langkat	14	Kuala Sarapuh	PL	PL	PL	PL	
36	Langkat	15	Tapak Kuda	PL	PL	PL	PL	
37	Mandailing Natal	16	Batahan	PL	PL	PL	PL	
38	Mandailing Natal	17	Singkuang	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
39	Mandailing Natal	18	Tabuyung	PL	PL	PL	PL	
40	Nias Selatan	19	Labuhan Hiu	PL	PL	PL	PL	
41	Nias Selatan	20	Lagundri	PL	PL	PL	PL	
42	Nias Selatan	21	Lahusa	PL	PL	PL	PL	
43	Nias Selatan	22	Moale	PL	PL	PL	PL	
44	Nias Selatan	23	Pulau Simuk	PL	PL	PL	PL	
45	Nias Selatan	24	Pulau Tanah masa	PL	PL	PL	PL	
46	Nias Selatan	25	Pulau Bais	PL	PL	PL	PL	
47	Nias Selatan	26	Pulau Tanah Bala	PL	PL	PL	PL	
48	Nias Selatan	27	Saero	PL	PL	PL	PL	
49	Nias Selatan	28	Solonako	PL	PL	PL	PL	
50	Nias Utara	29	Afulu	PL	PL	PL	PL	
51	Nias Utara	30	Lehelewau	PL	PL	PL	PL	
52	Nias Utara	31	Tuhemberua	PL	PL	PL	PL	
53	Serdang Bedagai	32	Sialang Buah	PL	PL	PL	PL	
54	Tanjung Balai	33	Teluk Nibung	PL	PL	PL	PL	
55	Tapanuli Tengah	34	Manduamas	PL	PL	PL	PL	
56	Tapanuli Tengah	35	Muara Tapus	PL	PL	PL	PL	
57	Tapanuli Tengah	36	Sorkam	PL	PL	PL	PL	
III. Provinsi Sumatera Barat								
58	Kep. Mentawai	1	Air Haji	PL	PL	PL	PL	
59	Kep. Mentawai	2	Labuhan Bajau	PR	PR	PR	PR	
60	Kep. Mentawai	3	Mabukkuk	PL	PL	PL	PL	
61	Kep. Mentawai	4	Pagai Selatan	PL	PL	PL	PL	
62	Kep. Mentawai	5	Sagitci	PL	PL	PL	PL	
63	Kep. Mentawai	6	Selat Bunga	PL	PL	PL	PL	
64	Kep. Mentawai	7	Simabuk	PL	PL	PL	PL	
65	Kep. Mentawai	8	Sinakak	PL	PL	PL	PL	
66	Kep. Mentawai	9	Subelen	PL	PL	PL	PL	
67	Kep. Mentawai	10	Tanopo	PL	PL	PL	PL	
68	Kep. Mentawai	11	Teluk Katurai	PL	PL	PL	PL	
69	Kota Pariaman	12	Muara	PL	PL	PL	PL	
70	Padang	13	Carocok Terusan	PL	PL	PL	PL	
71	Padang Pariaman	14	Pariaman	PL	PL	PL	PL	
72	Padang Pariaman	15	Tiram	PR	PR	PR	PR	
73	Pasaman Barat	16	Sasak	PL	PL	PL	PL	
74	Pesisir Selatan	17	Muara Air Haji	PL	PL	PL	PL	
75	Pesisir Selatan	18	Surantih	PL	PL	PL	PL	
IV. Provinsi Kepulauan Riau								
76	Batam	1	Air Raja	PL	PL	PL	PL	
77	Batam	2	Batu Besar	PL	PL	PL	PL	
78	Batam	3	Belakang Padang	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
79	Batam	4	Bulang Lintang	PL	PL	PL	PL	
80	Batam	5	Cengkui	PL	PL	PL	PL	
81	Batam	6	Jaloh	PL	PL	PL	PL	
82	Batam	7	Kampung Baru	PL	PL	PL	PL	
83	Batam	8	Kepala Jerih	PL	PL	PL	PL	
84	Batam	9	Lengkang	PL	PL	PL	PL	
85	Batam	10	Ngenang	PL	PL	PL	PL	
86	Batam	11	Pantai Gelam	PL	PL	PL	PL	
87	Batam	12	Pecong	PL	PL	PL	PL	
88	Batam	13	Pemping	PL	PL	PL	PL	
89	Batam	14	Pulau Abang	PL	PL	PL	PL	
90	Batam	15	Pulau Buluh	PL	PL	PL	PL	
91	Batam	16	Pulau Karas	PL	PL	PL	PL	
92	Batam	17	Pulau Labun	PL	PL	PL	PL	
93	Batam	18	Pulau Mecan	PL	PL	PL	PL	
94	Batam	19	Pulau Mubut	PL	PL	PL	PL	
95	Batam	20	Pulau Petong	PL	PL	PL	PL	
96	Batam	21	Pulau Sarang	PL	PL	PL	PL	
97	Batam	22	Pulau Bulan	PL	PL	PL	PL	
98	Batam	23	Pulau Jangkat	PL	PL	PL	PL	
99	Batam	24	Pulau Nipah	PL	PL	PL	PL	
100	Batam	25	Sagulung	PL	PL	PL	PL	
101	Batam	26	Selat Nenek	PL	PL	PL	PL	
102	Batam	27	Sembulang	PL	PL	PL	PL	
103	Batam	28	Setokok	PL	PL	PL	PL	
104	Batam	29	Sijantung	PL	PL	PL	PL	
105	Batam	30	Subang Mas	PL	PL	PL	PL	
106	Batam	31	Tanjung Riau	PL	PL	PL	PL	
107	Batam	32	Tanjung Uma	PL	PL	PL	PL	
108	Batam	33	Teluk Bakau	PL	PL	PL	PL	
109	Batam	34	Temoyong	PL	PL	PL	PL	
110	Batam	35	Terong	PL	PL	PL	PL	
111	Bintan	36	Barek Motor	PL	PL	PL	PL	
112	Bintan	37	Batu Besar	PL	PL	PL	PL	
113	Bintan	38	Batulicin	PL	PL	PL	PL	
114	Bintan	39	Busung	PL	PL	PL	PL	
115	Bintan	40	Galang Batang	PL	PL	PL	PL	
116	Bintan	41	Gentong Pasir Batu	PL	PL	PL	PL	
117	Bintan	42	Keke Baru	PL	PL	PL	PL	
118	Bintan	43	Malang Rapat	PL	PL	PL	PL	
119	Bintan	44	Jembatan Kawal	PL	PL	PL	PL	
120	Bintan	45	Lagoi	PL	PL	PL	PL	
121	Bintan	46	P. Numbing	PL	PL	PL	PL	
122	Bintan	47	P. Pangkil	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
123	Bintan	48	P. Buton	PL	PL	PL	PL	
124	Bintan	49	P. Gobing	PL	PL	PL	PL	
125	Bintan	50	P. Hantu	PL	PL	PL	PL	
126	Bintan	51	P. Kelong	PL	PL	PL	PL	
127	Bintan	52	P. Koyan	PL	PL	PL	PL	
128	Bintan	53	P. Mantang	PL	PL	PL	PL	
129	Bintan	54	P. Mapur	PL	PL	PL	PL	
130	Bintan	55	P. Poto	PL	PL	PL	PL	
131	Bintan	56	P. Pulau	PL	PL	PL	PL	
132	Bintan	57	P. Sirai	PL	PL	PL	PL	
133	Bintan	58	P. Telang	PL	PL	PL	PL	
134	Bintan	59	Pelantar Korindo	PL	PL	PL	PL	
135	Bintan	60	Semen Tokojo	PL	PL	PL	PL	
136	Bintan	61	Sungai Enam	PL	PL	PL	PL	
137	Bintan	62	Sungai Kecil	PL	PL	PL	PL	
138	Bintan	63	Teluk Bintan	PL	PL	PL	PL	
139	Bintan	64	Trikora	PL	PL	PL	PL	
140	Karimun	65	Akat	PL	PL	PL	PL	
141	Karimun	66	Batu Gajah (Desa Tulang)	PL	PL	PL	PL	
142	Karimun	67	Batu Lipai	PL	PL	PL	PL	
143	Karimun	68	Buah Rawa	PL	PL	PL	PL	
144	Karimun	69	Buru Kota	PL	PL	PL	PL	
145	Karimun	70	Degong/Serengeh	PL	PL	PL	PL	
146	Karimun	71	Durai Kota	PL	PL	PL	PL	
147	Karimun	72	Dusun Nyiur I	PL	PL	PL	PL	
148	Karimun	73	Gabion	PL	PL	PL	PL	
149	Karimun	74	Gemuruh	PL	PL	PL	PL	
150	Karimun	75	Hang Lukut/Gelugur	PL	PL	PL	PL	
151	Karimun	76	Jang Luar	PL	PL	PL	PL	
152	Karimun	77	Kampung Baru/ Selat Mie	PL	PL	PL	PL	
153	Karimun	78	Kampung Benteng	PL	PL	PL	PL	
154	Karimun	79	Kampung Kang	PL	PL	PL	PL	
155	Karimun	80	Kampung Tanjung/ Selat Mie	PL	PL	PL	PL	
156	Karimun	81	Kampung Tengah	PL	PL	PL	PL	
157	Karimun	82	Keban	PL	PL	PL	PL	
158	Karimun	83	Kericik	PL	PL	PL	PL	
159	Karimun	84	Lebuh 1	PL	PL	PL	PL	
160	Karimun	85	Leho	PL	PL	PL	PL	
161	Karimun	86	Mempoyong	PL	PL	PL	PL	
162	Karimun	87	Moro Dalam	PL	PL	PL	PL	
163	Karimun	88	Moro Luar	PL	PL	PL	PL	
164	Karimun	89	Moro	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
165	Karimun	90	Pasir Panjang	PL	PL	PL	PL	
166	Karimun	91	Sekumbang	PL	PL	PL	PL	
167	Karimun	92	Tanjung Berlian	PL	PL	PL	PL	
168	Karimun	93	Ngal	PL	PL	PL	PL	
169	Karimun	94	P. Bahan Dalam	PL	PL	PL	PL	
170	Karimun	95	Pamak Laut	PL	PL	PL	PL	
171	Karimun	96	Pangke	PL	PL	PL	PL	
172	Karimun	97	Pantai Berangan	PL	PL	PL	PL	
173	Karimun	98	Parit 1	PL	PL	PL	PL	
174	Karimun	99	Parit Rempak	PL	PL	PL	PL	
175	Karimun	100	Pasai	PL	PL	PL	PL	
176	Karimun	101	Pasir Todak	PL	PL	PL	PL	
177	Karimun	102	Pauh/Simba	PL	PL	PL	PL	
178	Karimun	103	Pel. Penumpang Pelni	PL	PL	PL	PL	
179	Karimun	104	Pel. Perikanan Parit Rempak	PL	PL	PL	PL	
180	Karimun	105	Pengaram	PL	PL	PL	PL	
181	Karimun	106	Perasi	PL	PL	PL	PL	
182	Karimun	107	Pongkar I	PL	PL	PL	PL	
183	Karimun	108	Pulau Jaga	PL	PL	PL	PL	
184	Karimun	109	Pulau Kas	PL	PL	PL	PL	
185	Karimun	110	Pulau Patah/ Desa Selat Mie	PL	PL	PL	PL	
186	Karimun	111	Sandam/Semedang	PL	PL	PL	PL	
187	Karimun	112	Sanglar	PL	PL	PL	PL	
188	Karimun	113	Sawang / Muka Limus	PL	PL	PL	PL	
189	Karimun	114	Sebele	PL	PL	PL	PL	
190	Karimun	115	Sei Buluh/Jalan Encik Daud	PL	PL	PL	PL	
191	Karimun	116	Sei Pasir	PL	PL	PL	PL	
192	Karimun	117	Sei Sikop	PL	PL	PL	PL	
193	Karimun	118	Sei Ungar	PL	PL	PL	PL	
194	Karimun	119	Selat Binga	PL	PL	PL	PL	
195	Karimun	120	Selat Kisar	PL	PL	PL	PL	
196	Karimun	121	Semikol	PL	PL	PL	PL	
197	Karimun	122	Separi/ Desa Selat Mie	PL	PL	PL	PL	
198	Karimun	123	Setoteng	PL	PL	PL	PL	
199	Karimun	124	Sri Manda/ Seroja	PL	PL	PL	PL	
200	Karimun	125	Sri Tanjung Gelang / KPK	PL	PL	PL	PL	
201	Karimun	126	Tanjung Batu Kecil/Dekat PT	PL	PL	PL	PL	
202	Karimun	127	Tanjung Hutan	PL	PL	PL	PL	
203	Karimun	128	Tanjung Kilang	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
204	Karimun	129	Tanjung Magom/Selat Belia	PL	PL	PL	PL	
205	Karimun	130	Tanjung Pelanduk	PL	PL	PL	PL	
206	Karimun	131	Tanjung Perai	PL	PL	PL	PL	
207	Karimun	132	Tebing	PL	PL	PL	PL	
208	Karimun	133	Tg. Batu- Alai	PL	PL	PL	PL	
209	Karimun	134	Tulang	PL	PL	PL	PL	
210	Kep. Anambas	135	Kuala Maras	PR	PR	PR	PR	
211	Kep. Anambas	136	Matak	PL	PL	PL	PL	
212	Lingga	137	Benan	PL	PL	PL	PL	
213	Lingga	138	Berhala	PR	PR	PR	PR	
214	Lingga	139	Cempa	PL	PL	PL	PL	
215	Lingga	140	Daik Lingga	PL	PL	PL	PL	
216	Lingga	141	Pancur	PL	PL	PL	PL	
217	Lingga	142	Jagoh	PL	PL	PL	PL	
218	Lingga	143	Marok Tua	PL	PL	PL	PL	
219	Lingga	144	Medang	PL	PL	PL	PL	
220	Lingga	145	P. Mas	PL	PL	PL	PL	
221	Lingga	146	Rejai	PL	PL	PL	PL	
222	Lingga	147	Sei Tenam	PL	PL	PL	PL	
223	Lingga	148	Tajur Biru	PL	PL	PL	PL	
224	Lingga	149	Tanjung Buton	PL	PL	PL	PL	
225	Lingga	150	Tanjung Kelit	PL	PL	PL	PL	
226	Natuna	151	Binjai	PL	PL	PL	PL	
227	Natuna	152	Ketarik	PR	PR	PR	PR	
228	Natuna	153	Maro Sulit	PL	PL	PL	PL	
229	Natuna	154	Penagi	PL	PL	PL	PL	
230	Natuna	155	Pulau Laut	PR	PR	PR	PR	
231	Natuna	156	Pulau Tiga	PR	PR	PR	PR	
232	Natuna	157	Sabang Mawang	PL	PL	PL	PL	
233	Natuna	158	Sededap	PL	PL	PL	PL	
234	Natuna	159	Semedang	PL	PL	PL	PL	
235	Natuna	160	Tanjung Kumbik	PL	PL	PL	PL	
236	Natuna	161	Teluk Buton	PR	PR	PR	PR	
237	Tanjung Pinang	162	Daeng Celak	PL	PL	PL	PL	
238	Tanjung Pinang	163	Daeng Marewa	PL	PL	PL	PL	
239	Tanjung Pinang	164	Dompak Sebrang	PL	PL	PL	PL	
240	Tanjung Pinang	165	Kampung Bugis	PL	PL	PL	PL	
241	Tanjung Pinang	166	Kampung Lama Dompak	PL	PL	PL	PL	
242	Tanjung Pinang	167	Kelam Pagi	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
243	Tanjung Pinang	168	Madong	PL	PL	PL	PL	
244	Tanjung Pinang	169	P. Penyengat	PL	PL	PL	PL	
245	Tanjung Pinang	170	Pelantar Asam	PL	PL	PL	PL	
246	Tanjung Pinang	171	Pelantar I	PL	PL	PL	PL	
247	Tanjung Pinang	172	Pelantar II	PL	PL	PL	PL	
248	Tanjung Pinang	173	Sei Jang	PL	PL	PL	PL	
249	Tanjung Pinang	174	Sei Ladi	PL	PL	PL	PL	
250	Tanjung Pinang	175	Sekatap Darat	PL	PL	PL	PL	
251	Tanjung Pinang	176	Senggarang	PL	PL	PL	PL	
252	Tanjung Pinang	177	Tanjung Ayun	PL	PL	PL	PL	
253	Tanjung Pinang	178	Tanjung Duku	PL	PL	PL	PL	
254	Tanjung Pinang	179	Tanjung Geliga	PL	PL	PL	PL	
255	Tanjung Pinang	180	Tanjung Lanjut	PL	PL	PL	PL	
256	Tanjung Pinang	181	Tanjung Sebauk	PL	PL	PL	PL	
257	Tanjung Pinang	182	Tanjung Siambang	PL	PL	PL	PL	
258	Tanjung Pinang	183	Tanjung Unggat	PL	PL	PL	PL	
259	Tanjung Pinang	184	Wisata Penyengat	PL	PL	PL	PL	
V. Provinsi Riau								
260	Bengkalis	1	Buruk Bakul	PL	PL	PL	PL	
261	Bengkalis	2	Melibur	PL	PL	PL	PL	
262	Bengkalis	3	Selat Baru	PL	PL	PL	PL	
263	Bengkalis	4	Teluk Rhu	PL	PL	PL	PL	
264	Bengkalis	5	Bantan Tengah	PL	PL	PL	PL	
265	Bengkalis	6	Belitung	PL	PL	PL	PL	
266	Bengkalis	7	Bukit Batu	PL	PL	PL	PL	
267	Bengkalis	8	Darul Aman	PL	PL	PL	PL	
268	Bengkalis	9	Gunap	PL	PL	PL	PL	
269	Bengkalis	10	Lubuk Muda	PL	PL	PL	PL	
270	Bengkalis	11	Selat Morong	PL	PL	PL	PL	
271	Bengkalis	12	Tanjung Kapal	PL	PL	PL	PL	
272	Bengkalis	13	Teluk Pambang	PL	PL	PL	PL	
273	Bengkalis	14	Titi Akar	PL	PL	PL	PL	
274	Dumai	15	Lubuk Gaung	PL	PL	PL	PL	
275	Dumai	16	Pelintung	PL	PL	PL	PL	
276	Indragiri Hilir	17	Muara Bangkong	PL	PL	PL	PL	
277	Indragiri Hilir	18	Perigi Raja	PL	PL	PL	PL	
278	Indragiri Hilir	19	Sapat	PL	PL	PL	PL	
279	Kep.Meranti	20	Tanjung Kedadu	PL	PL	PL	PL	
280	Pekanbaru	21	Tenayan	PL	PL	PL	PL	
281	Pelalawan	22	Sokoi	PL	PL	PL	PL	
282	Pelalawan	91	Penyalai	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
283	Rokan Hilir	23	Bulu Hala	PL	PL	PL	PL	
284	Rokan Hilir	24	Kubu	PL	PL	PL	PL	
285	Rokan Hilir	25	Pulau Halang	PL	PL	PL	PL	
286	Rokan Hilir	26	Pulau Jemur	PL	PL	PL	PL	
287	Siak	27	Buatan	PL	PL	PL	PL	
288	Siak	28	Kurau/Selat Lalang	PL	PL	PL	PL	
289	Siak	29	Sei Apit	PL	PL	PL	PL	
290	Siak	30	Sungai Siak	PL	PL	PL	PL	
VI. Provinsi Bengkulu								
291	Bengkulu	1	Ketahum	PL	PL	PL	PL	
292	Bengkulu	2	Pulau Tikus	PL	PL	PL	PL	
VII. Provinsi Jambi								
293	Tg. Jabung Barat	1	Betara	PL	PL	PL	PL	
294	Tg. Jabung Barat	2	Muara Delli	PL	PL	PL	PL	
295	Tg. Jabung Timur	3	Air Hitam Laut	PL	PL	PL	PL	
296	Tg. Jabung Timur	4	Kuala Jambi	PL	PL	PL	PL	
297	Tg. Jabung Timur	5	Lambur Luar	PL	PL	PL	PL	
298	Tg. Jabung Timur	6	Pamusiran	PL	PL	PL	PL	
299	Tg. Jabung Timur	7	Pangkal Duri	PL	PL	PL	PL	
VIII. Provinsi Sumatera Selatan								
300	Banyuasin	1	Gasing	PL	PL	PL	PL	
301	Banyuasin	2	Penuguan	PL	PL	PL	PL	
302	Banyuasin	3	Sungai Sembilang	PL	PL	PL	PL	
303	Banyuasin	4	Sungsang	PL	PL	PL	PL	
304	Banyuasin	5	Tanjung Lago	PL	PL	PL	PL	
305	Banyuasin	6	Karang Agung	PL	PL	PL	PL	
306	Banyuasin	7	Musi Rawas	PL	PL	PL	PL	
307	Musi Banyu Asin	8	Bayung Leucir	PL	PL	PL	PL	
308	Musi Banyu Asin	9	Sungai Lilin	PL	PL	PL	PL	
309	OKI	10	Mesuji	PL	PL	PL	PL	
310	OKI	11	Sugihan	PL	PL	PL	PL	
311	Palembang	12	Gandus	PL	PL	PL	PL	
312	Palembang	13	Jakabaring	PL	PL	PL	PL	
313	Palembang	14	Prambatan	PL	PL	PL	PL	
314	Palembang	15	Sungai Lais	PL	PL	PL	PL	
IX. Provinsi Bangka Belitung								
315	Bangka	1	Jelitik	PL	PL	PL	PL	
316	Bangka	2	Pulau Mengkubung	PL	PL	PL	PL	
317	Bangka	3	Pulau Ninjuk	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
318	Bangka	4	Sungai Liat	PL	PL	PL	PL	
319	Bangka Barat	5	Tanjung Kalian	PL	PL	PL	PL	
320	Bangka Barat	6	Tanjung Ular	PL	PL	PL	PL	
321	Bangka Selatan	7	Bangka Kota	PL	PL	PL	PL	
322	Bangka Selatan	8	Pulau Besar	PL	PL	PL	PL	
323	Bangka Selatan	9	Pulau Burung	PL	PL	PL	PL	
324	Bangka Selatan	10	Pulau Celagen	PL	PL	PL	PL	
325	Bangka Selatan	11	Pulau Kelapan	PL	PL	PL	PL	
326	Bangka Selatan	12	Pulau Panjang	PL	PL	PL	PL	
327	Bangka Selatan	13	Pulau Pongok (Pulau Liat)	PL	PL	PL	PL	
328	Bangka Selatan	14	Pulau Tukak	PL	PL	PL	PL	
329	Bangka Selatan	15	Tanjung Gading (Penutuk)	PL	PL	PL	PL	
330	Bangka Tengah	16	Pelabuhan Kurau	PL	PL	PL	PL	
331	Bangka Tengah	17	Pulau Ketawai	PL	PL	PL	PL	
332	Bangka Tengah	18	Pulau Nangka	PL	PL	PL	PL	
333	Bangka Tengah	19	Sungai Selan	PR	PR	PR	PR	
334	Bangka Tengah	20	Tanjung Berikat	PL	PL	PL	PL	
335	Bangka Tengah	21	Tanjung Labu	PL	PL	PL	PL	
336	Bangka Tengah	22	Tanjung Sangkar	PL	PL	PL	PL	
337	Bangka Tengah	23	Tanjung Tedung	PL	PL	PL	PL	
338	Belitung	24	Pulau Sumedang	PL	PL	PL	PL	
339	Belitung	25	Pulau Lengkuas	PL	PL	PL	PL	
340	Belitung	26	Pulau Mendanau	PL	PL	PL	PL	
341	Belitung	27	Pulau Siliu	PL	PL	PL	PL	
342	Belitung	28	Tanjung Roe	PL	PL	PL	PL	
343	Belitung	29	Tanjung Kelayang	PL	PL	PL	PL	
344	Belitung	30	Tanjung Nyato Petaling	PL	PL	PL	PL	
345	Belitung	31	Teluk Gembira	PL	PL	PL	PL	
346	Belitung Timur	32	Dendang	PL	PL	PL	PL	
347	Belitung Timur	33	Pulau Batu	PL	PL	PL	PL	
348	Belitung Timur	34	Pulau Buku Limau	PL	PL	PL	PL	
349	Belitung Timur	35	Pulau Ketapang	PL	PL	PL	PL	
350	Belitung Timur	36	Pulau Long	PL	PL	PL	PL	
351	Belitung Timur	37	Pulau Sekunyit	PL	PL	PL	PL	
352	Belitung Timur	38	Teluk Asam	PL	PL	PL	PL	
353	Pangkalpinang	39	Pulau Semujur	PL	PL	PL	PL	
X. Provinsi Lampung								
354	Lampung Selatan	1	Canti	PL	PL	PL	PL	
355	Lampung Selatan	2	Ranggai	PL	PL	PL	PL	
356	Mesuji	3	KTM SP 8	PL	PL	PL	PL	
357	Mesuji	4	Sungai Sidang	PL	PL	PL	PL	
358	Mesuji	5	Wiralaga	PL	PL	PL	PL	
359	Pesisir Barat	6	Bengkunat	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
360	Tanggamus	7	Kelumbayan	PL	PL	PL	PL	
361	Tanggamus	8	Kiluan	PL	PL	PL	PL	
362	Tulang Bawang	9	Dente Teladas	PL	PL	PL	PL	
XI. Provinsi Banten								
363	Lebak	1	Bayah	PL	PL	PL	PL	
364	Lebak	2	M. Binuangeun	PL	PL	PL	PL	
365	Pandeglang	3	Panimbang	PL	PL	PL	PL	
366	Serang	4	Grenyang-Puloampel	PL	PL	PL	PL	
367	Serang	5	Pasauran	PL	PL	PL	PL	
368	Serang	6	Pulopanjang-Puloampel	PL	PL	PL	PL	
369	Serang	7	Tanjung Leneng	PL	PL	PL	PL	
370	Serang	8	Terate	PL	PL	PL	PL	
371	Serang	9	Pulotunda-Tirtayasa	PL	PL	PL	PL	
372	Serang	10	Lontar-Pontang	PL	PL	PL	PL	
373	Tangerang	11	Muara Dadap	PL	PL	PL	PL	
XII. Provinsi Jawa Barat								
374	Bekasi	1	Tarumajaya	PR	PR	PR	PR	
375	Cianjur	2	Sindang Barang	PL	PL	PL	PL	
376	Cirebon	3	Astanajapura	PL	PL	PL	PL	
377	Cirebon	4	Bondet	PL	PL	PL	PL	
378	Cirebon	5	Gebang Mekar	PL	PL	PL	PL	
379	Cirebon	6	Kejawanan	PL	PL	PL	PL	
380	Garut	7	Pakenjeng	PL	PL	PL	PL	
381	Garut	8	Caringin	PL	PL	PL	PL	
382	Indramayu	9	Balongan	PL	PL	PL	PL	
383	Indramayu	10	Eretan	PL	PL	PL	PL	
384	Indramayu	11	Juntinyuat	PL	PL	PL	PL	
385	Indramayu	12	Karangsong	PL	PL	PL	PL	
386	Indramayu	13	Patrol	PL	PL	PL	PL	
387	Indramayu	14	Sukra	PL	PL	PL	PL	
388	Pangandaran	15	Batu Karas	PL	PL	PL	PL	
389	Pangandaran	16	Majingklak	PL	PL	PL	PL	
390	Pangandaran	17	Pameungpeuk	PL	PL	PL	PL	
391	Pangandaran	18	Parigi	PL	PL	PL	PL	
392	Karawang	19	Muara Bendera	PL	PL	PL	PL	
393	Karawang	20	Sungai Buntu	PL	PL	PL	PL	
394	Subang	21	Ciasem	PL	PL	PL	PL	
395	Subang	22	Mayangan	PL	PL	PL	PL	
396	Subang	23	Muara Tawar	PL	PL	PL	PL	
397	Sukabumi	24	Cisolok	PL	PL	PL	PL	
398	Sukabumi	25	Ciwaru	PL	PL	PL	PL	
399	Sukabumi	26	Ujung Genteng	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
400	Tasikmalaya	27	Cipatujah	PL	PL	PL	PL	
XIII. Provinsi DKI Jakarta								
401	Jakarta Utara	1	Pangkalan Pasir Kalibaru	PL	PL	PL	PL	
402	Jakarta Utara	2	Cakung Drain Cilincing	PL	PL	PL	PL	
403	Jakarta Utara	3	Marina Ancol	PL	PL	PL	PL	
404	Jakarta Utara	4	Muara Kamal	PL	PL	PL	PL	
405	Jakarta Utara	5	Pantai Mutiara	PL	PL	PL	PL	
406	Kep. Seribu	6	P. Bidadari	PL	PL	PL	PL	
407	Kep. Seribu	7	P. Harapan	PL	PL	PL	PL	
408	Kep. Seribu	8	P. Panggang	PL	PL	PL	PL	
409	Kep. Seribu	9	P. Pari	PL	PL	PL	PL	
410	Kep. Seribu	10	P. Payung	PL	PL	PL	PL	
411	Kep. Seribu	11	P. Sebira	PL	PL	PL	PL	
412	Kep. Seribu	12	P. Kelapa	PL	PL	PL	PL	
413	Kep. Seribu	13	P. Lancang	PL	PL	PL	PL	
414	Kep. Seribu	14	P. Tidung	PL	PL	PL	PL	
415	Kep. Seribu	15	P. Untung jawa	PL	PL	PL	PL	
XIV. Provinsi Jawa Tengah								
416	Batang	1	Celong	PL	PL	PL	PL	
417	Batang	2	Roban	PL	PL	PL	PL	
418	Batang	3	Seklayu	PL	PL	PL	PL	
419	Brebes	4	Losari	PL	PL	PL	PL	
420	Cilacap	5	Bunton	PL	PL	PL	PL	
421	Cilacap	6	Tegalkamulyan	PL	PL	PL	PL	
422	Demak	7	Morodemak	PL	PL	PL	PL	
423	Jepara	8	Bangsri	PL	PL	PL	PL	
424	Jepara	9	Desa Kemujan	PL	PL	PL	PL	
425	Jepara	10	Kelet	PL	PL	PL	PL	
426	Jepara	11	Kartini	PL	PL	PL	PL	
427	Tegal	12	Jongor Tegalsari	PL	PL	PL	PL	
428	Tegal	13	Larangan	PL	PL	PL	PL	
XV. Provinsi Jawa Timur								
429	Bangkalan	1	kamal	PL	PL	PL	PL	
430	Bangkalan	2	Nepa	PL	PL	PL	PL	
431	Bangkalan	3	Poleng	PL	PL	PL	PL	
432	Bangkalan	4	Sepulu	PL	PL	PL	PL	
433	Bangkalan	5	Ujung Piring	PL	PL	PL	PL	
434	Banyu Wangi	6	Blimbing Sari	PL	PL	PL	PL	
435	Banyu Wangi	7	Granjangan	PL	PL	PL	PL	
436	Banyu Wangi	8	Muncar	PL	PL	PL	PL	
437	Banyu Wangi	9	Pancer	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
438	Gresik	10	Camar	PL	PL	PL	PL	
439	Gresik	11	Tambak	PL	PL	PL	PL	
440	Lamongan	12	Paciran	PR	PR	PR	PR	
441	Jember	13	Jember	PL	PL	PL	PL	
442	Malang	14	Sendang Biru	PL	PL	PL	PL	
443	Pasuruan	15	Grati	PL	PL	PL	PL	
444	Pasuruan	16	Lekok	PL	PL	PL	PL	
445	Probolinggo	17	Kalibuntu	PL	PL	PL	PL	
446	Probolinggo	18	Paiton	PL	PL	PL	PL	
447	Sampang	19	Taddan	PL	PR	PR	PR	
448	Sampang	20	Tanlok	PL	PL	PL	PL	
449	Situbondo	21	Besuki	PL	PL	PL	PL	
450	Situbondo	22	Jangkar	PL	PL	PL	PL	
451	Situbondo	23	Meimbo	PL	PL	PL	PL	
452	Situbondo	24	Pasir Putih	PL	PL	PL	PL	
453	Sumenep	25	Ambunten	PL	PL	PL	PL	
454	Sumenep	26	Bintaro	PL	PL	PL	PL	
455	Sumenep	27	Dungkek	PL	PL	PL	PL	
456	Sumenep	28	Gili Genting	PL	PL	PL	PL	
457	Sumenep	29	Giliraja	PL	PL	PL	PL	
458	Sumenep	30	Giliyang	PL	PL	PL	PL	
459	Sumenep	31	Longos	PL	PL	PL	PL	
460	Sumenep	32	Masakambing	PL	PL	PL	PL	
461	Sumenep	33	Nung Gunung	PL	PL	PL	PL	
462	Sumenep	34	Pagar Batu	PL	PL	PL	PL	
463	Sumenep	35	Pagerungan	PL	PL	PL	PL	
464	Sumenep	36	Pasongsongan	PL	PL	PL	PL	
465	Sumenep	37	Pragaan	PL	PL	PL	PL	
466	Sumenep	38	Sepanjang	PL	PL	PL	PL	
467	Sumenep	39	Tanjung Saronggi	PL	PL	PL	PL	
468	Sumenep	40	Sakala	PL	PL	PL	PL	
469	Trenggalek	41	Prigi	PL	PL	PR	PR	
470	Tuban	42	Jenu	PL	PL	PL	PL	
471	Tuban	43	Karang Agung	PL	PL	PL	PL	
472	Tuban	44	Tanjung Awar-awar	PL	PL	PL	PL	
473	Tuban	45	Tuban	PL	PL	PL	PL	
XVI. Provinsi Bali								
474	Buleleng	1	Banyu Wedang	PL	PL	PL	PL	
475	Buleleng	2	Brombong	PL	PL	PL	PL	
476	Buleleng	3	Penuktukan	PL	PL	PL	PL	
477	Buleleng	4	Pegametan	PL	PL	PL	PL	
478	Buleleng	5	Pemaron	PL	PL	PL	PL	
479	Denpasar	6	Kedonganan	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
480	Denpasar	7	Sanur	PL	PL	PL	PL	
481	Denpasar	8	Serangan	PL	PL	PL	PL	
482	Denpasar	9	Tanjung Benoa	PL	PL	PL	PL	
483	Gunaksa	10	Gunaksa	PL	PL	PL	PL	
484	Jembrana	11	Pengambengan	PL	PL	PL	PL	
485	Karangasem	12	Kubu	PL	PL	PL	PL	
486	Karangasem	13	Labuhan Amed	PL	PL	PL	PL	
487	Karangasem	14	Manggis	PL	PL	PL	PL	
488	Klungkung	15	Bias Munjul/Ceningan	PL	PL	PL	PL	
489	Klungkung	16	Buyuk	PL	PL	PL	PL	
490	Klungkung	17	Kusamba	PL	PL	PL	PL	
491	Klungkung	18	Mentigi	PL	PL	PL	PL	
XVII. Provinsi Nusa Tenggara Barat								
492	Dompu	1	Kilo	PL	PL	PL	PL	
493	Dompu	2	Satonda	PL	PL	PL	PL	
494	Dompu	3	Teluk Cempi	PL	PL	PL	PL	
495	Lombok Barat	4	Jeranjang	PL	PL	PL	PL	
496	Lombok Barat	5	Labuhan Poh-Sekotong	PL	PL	PL	PL	
497	Lombok Barat	6	Senggigi	PL	PL	PL	PL	
498	Lombok Barat	7	Teluk Awang	PL	PL	PL	PL	
499	Lombok Barat	8	Teluk Sepi	PL	PL	PL	PL	
500	Lombok Barat	9	Tawun	PL	PL	PL	PL	
501	Lombok Timur	10	Tanjung Luar	PL	PL	PL	PL	
502	Lombok Timur	11	Telong Elong	PL	PL	PL	PL	
503	Lombok Utara	12	Khayangan	PL	PL	PL	PL	
504	Sumbawa	13	Aklk Bari	PL	PL	PL	PL	
505	Sumbawa	14	Kartasari	PL	PL	PL	PL	
506	Sumbawa	15	Labangka	PL	PL	PL	PL	
507	Sumbawa	16	Pelabuhan Jambu	PL	PL	PL	PL	
508	Sumbawa	17	Pulau Moyo	PL	PL	PL	PL	
509	Sumbawa	18	Teluk Santong	PL	PL	PL	PL	
510	Sumbawa Barat	19	Labuhan Lalar	PL	PL	PL	PL	
511	Sumbawa Barat	20	Poto Tano	PL	PL	PL	PL	
XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Timur								
512	Alor	1	Alor Kecil	PL	PL	PL	PL	
513	Alor	2	Bakalang	PL	PL	PL	PL	
514	Alor	3	Beang	PL	PL	PL	PL	
515	Alor	4	Kolana	PL	PL	PL	PL	
516	Alor	5	Manatang	PL	PL	PL	PL	
517	Alor	6	Paitoko	PL	PL	PL	PL	
518	Alor	7	Pulau Marica	PL	PL	PL	PL	
519	Alor	8	Wanakaka	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
520	Belu	9	Maubesi Hasan	PL	PL	PL	PL	
521	Ende	10	Pulau Ende	PL	PL	PL	PL	
522	Ende	11	Ropa	PL	PL	PL	PL	
523	Flores Timur	12	Kewapante	PL	PL	PL	PL	
524	Flores Timur	13	Pulau Solor	PL	PL	PL	PL	
525	Flores Timur	14	Sagu	PL	PL	PL	PL	
526	Flores Timur	15	Waidoko	PL	PL	PL	PL	
527	Flores Timur	16	Waiklibang	PL	PL	PL	PL	
528	Kupang	17	Batubao	PL	PL	PL	PL	
529	Kupang	18	Oepoli	PL	PL	PL	PL	
530	Kupang	19	Semau	PL	PL	PL	PL	
531	Kupang	20	Sulamu	PL	PL	PL	PL	
532	Manggarai Barat	21	Kampung Ujung	PL	PL	PL	PL	
533	Manggarai Barat	22	Kukusan	PL	PL	PL	PL	
534	Manggarai Barat	23	Nangalili	PL	PL	PL	PL	
535	Manggarai Timur	24	Nanga Baras	PL	PL	PL	PL	
536	Ngada	25	Riung	PL	PL	PL	PL	
537	Ngada	26	Waebela	PL	PL	PL	PL	
538	Rote Ndao	27	Nuse	PL	PL	PL	PL	
539	Rote Ndao	28	Oelaba	PL	PL	PL	PL	
540	Rote Ndao	29	Pantai Baru	PL	PL	PL	PL	
541	Rote Ndao	30	Pulau Ndana	PL	PL	PL	PL	
542	Sikka	31	Paga	PL	PL	PL	PL	
543	Sikka	32	Pulau Besar	PL	PL	PL	PL	
544	Sikka	33	Pemana	PL	PL	PL	PL	
545	Sikka	34	Sukun	PL	PL	PL	PL	
546	Sumba Barat Daya	35	Pero	PL	PL	PL	PL	
547	Sumba Timur	36	Katundu	PL	PL	PL	PL	
548	Sumba Timur	37	Nggonggi	PL	PL	PL	PL	
549	Timor Tengah Utara	38	Teluk Gurita	PL	PL	PL	PL	
XIX. Provinsi Kalimantan Barat								
550	Bengkayang	1	Tanjung Gondol	PL	PL	PL	PL	
551	Kayong Utara	2	Kerja Pasaguan	PL	PL	PL	PL	
552	Kayong Utara	3	Kerja Satong	PL	PL	PL	PL	
553	Kayong Utara	4	Pasar Sentap	PL	PL	PL	PL	
554	Kayong Utara	5	Pulau Pelapis	PL	PL	PL	PL	
555	Kayong Utara	6	Sungai Tengar	PL	PL	PL	PL	
556	Ketapang	7	Kubu	PL	PL	PL	PL	
557	Mempawah	8	Sambas	PL	PL	PL	PL	
558	Mempawah	9	Sungai Duri	PL	PL	PL	PL	
559	Mempawah	10	Sungai Kakap	PL	PL	PL	PL	
560	Mempawah	11	Teluk Pakedai	PL	PL	PL	PL	
561	Sambas	12	Jawai	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
562	Sambas	13	Serasan	PL	PL	PL	PL	
563	Sambas	14	Temajuk	PL	PL	PL	PL	
XX. Provinsi Kalimantan Tengah								
564	Kapuas	1	Kuala Kapuas	PL	PL	PL	PL	
565	Kapuas	2	Tanjung Tawas	PL	PL	PL	PL	
566	Katingan	3	Pulau Damar	PL	PL	PL	PL	
567	Kotawaringin Barat	4	Sebual	PL	PL	PL	PL	
568	Kotawaringin Timur	5	Kuala Kuayan	PL	PL	PL	PL	
569	Kotawaringin Timur	6	Parenggean	PL	PL	PL	PL	
570	Palangkaraya	7	Bukit Pinang	PL	PL	PL	PL	
571	Palangkaraya	8	Teluk Sebangau	PL	PL	PL	PL	
572	Pulang Pisau	9	Tanjung Perawan	PL	PL	PL	PL	
573	Sukamara	10	Balai Riang	PL	PL	PL	PL	
574	Sukamara	11	Jambi	PL	PL	PL	PL	
575	Sukamara	12	Pulau Nibung	PL	PL	PL	PL	
XXI. Provinsi Kalimantan Utara								
576	Bulungan	1	Batu Pahat	PL	PL	PL	PL	
577	Bulungan	2	Sei Linuah Kayan	PL	PL	PL	PL	
578	Bulungan	3	Sei Sembakung	PL	PL	PL	PL	
579	Bulungan	4	Sekatak	PL	PL	PL	PL	
580	Bulungan	5	Pindada Tana Kuning	PL	PL	PL	PL	
581	Malinau	6	Kelapis/Malinau	PL	PL	PL	PL	
582	Nunukan	7	Balansiku	PL	PL	PL	PL	
583	Nunukan	8	Sebakis	PL	PL	PL	PL	
584	Nunukan	9	Sebuku	PL	PL	PL	PL	
585	Nunukan	10	Sebatik	PL	PL	PL	PL	
586	Tarakan	11	Bangkudulis	PL	PL	PL	PL	
587	Tarakan	12	Bebatu	PL	PL	PL	PL	
XXII. Provinsi Kalimantan Selatan								
588	Kotabaru	1	Gunung Batu Besar	PL	PL	PL	PL	
589	Kotabaru	2	Maradapan	PL	PL	PL	PL	
590	Tanah Bumbu	3	Angsana	PL	PL	PL	PL	
591	Tanah Bumbu	4	Pagatan	PL	PL	PL	PL	
592	Tanah Bumbu	5	Sabamban	PL	PL	PL	PL	
593	Tanah Bumbu	6	Sei Cuka	PL	PL	PL	PL	
594	Tanah Bumbu	7	Setarap	PL	PL	PL	PL	
595	Tanah Bumbu	8	Sungai Loban	PL	PL	PL	PL	
596	Tanah Bumbu	9	Tanah Bumbu	PL	PL	PL	PL	
597	Tanah Laut	10	Jorong	PL	PL	PL	PL	
598	Tanah Laut	11	Tanjung Dewa	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur								
599	Balikpapan	1	Kampung baru	PL	PL	PL	PL	
600	Berau	2	Talisayan	PL	PL	PL	PL	
601	Kutai Kertanegara	3	Dondang	PL	PL	PL	PL	
602	Kutai Kertanegara	4	Marangkayu	PL	PL	PL	PL	
603	Kutai Kertanegara	5	Muara Jawa	PL	PL	PL	PL	
604	Kutai Kertanegara	6	Senipah	PL	PL	PL	PL	
605	Paser	7	Teluk Apar	PL	PL	PL	PL	
606	Penajam Pasir Utara	8	Mentawir	PL	PL	PL	PL	
607	Samarinda	9	Mahakam Hulu	PL	PL	PL	PL	
608	Samarinda	10	Muara Berau	PL	PL	PL	PL	
609	Samarinda	11	Sanga-Sanga	PL	PL	PL	PL	
XXIV. Provinsi Sulawesi Utara								
610	B. Mangondow	1	Inobonto	PL	PL	PL	PL	
611	B. Mangondow Selatan	2	Molibagu	PL	PL	PL	PL	
612	B. Mangondow Timur	3	Tutuyan - Jikoblanga	PL	PL	PL	PL	
613	B. Mangondow Utara	4	Boroko	PL	PL	PL	PL	
614	B. Mangondow Utara	5	Tuntun	PL	PL	PL	PL	
615	Bitung	6	Air Tembaga	PL	PL	PL	PL	
616	Kep. Sangihe	7	Babelang	PL	PL	PL	PL	
617	Kep. Sangihe	8	Bentung	PL	PL	PL	PL	
618	Kep. Sangihe	9	Manalu	PL	PL	PL	PL	
619	Kep. Sangihe	10	P. Beng Darat	PL	PL	PL	PL	
620	Kep. Sangihe	11	P. Beng Laut	PL	PL	PL	PL	
621	Kep. Sangihe	12	P. Mahangetang	PL	PL	PL	PL	
622	Kep. Sangihe	13	P. Tinakareng	PL	PL	PL	PL	
623	Kep. Sangihe	14	Pananaru	PL	PL	PL	PL	
624	Kep. Sitaro	15	Pahepa	PL	PL	PL	PL	
625	Kep. Sitaro	16	P. Ruang	PL	PL	PL	PL	
626	Kep. Sitaro	17	Salangka	PL	PL	PL	PL	
627	Manado	18	Bunaken	PL	PL	PL	PL	
628	Manado	19	P. Manado Tua	PL	PL	PL	PL	
629	Manado	20	Siladen	PL	PL	PL	PL	
630	Minahasa	21	Kora-Kora	PL	PL	PL	PL	
631	Minahasa Tenggara	22	Tumbak	PL	PL	PL	PL	
632	Minahasa Utara	23	Bangka	PL	PL	PL	PL	
633	Minahasa Utara	24	Gangga	PL	PL	PL	PL	
634	Minahasa Utara	25	Montehage	PL	PL	PL	PL	
635	Minahasa Utara	26	Nain	PL	PL	PL	PL	
636	Minahasa Utara	27	Talise	PL	PL	PL	PL	
637	Kep. Tataud	28	Damao	PL	PL	PL	PL	
638	Kep. Talaud	29	Gemeh	PL	PL	PL	PL	
639	Kep. Talaud	30	Intata	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
640	Manado	31	Tumumpa	PL	PL	PL	PL	
641	Minahasa	32	Bentenan	PL	PL	PL	PL	
642	Minahasa	33	Ratatotok	PL	PL	PL	PL	
643	Minahasa	34	Tanawangko	PL	PL	PL	PL	
644	Minahasa Utara	35	Wori	PL	PL	PL	PL	
XXV. Provinsi Gorontalo								
645	Boalemo	1	Wongorasi	PL	PL	PL	PL	
646	Gorontalo	2	Molotabu	PL	PL	PL	PL	
647	Gorontalo Utara	3	Biao	PL	PL	PL	PL	
648	Gorontalo Utara	4	Bolontio	PL	PL	PL	PL	
649	Gorontalo Utara	5	Buroko	PL	PL	PL	PL	
650	Gorontalo Utara	6	Gentuma	PL	PL	PL	PL	
651	Gorontalo Utara	7	Monano	PL	PL	PL	PL	
652	Gorontalo Utara	8	Sumalata	PL	PL	PL	PL	
653	Gorontalo Utara	9	Tolinggula	PL	PL	PL	PL	
654	Pohuwato	10	Lemito	PL	PL	PL	PL	
655	Pohuwato	11	Marisa	PL	PL	PL	PL	
656	Pohuwato	12	Popayato	PL	PL	PL	PL	
XXVI. Provinsi Sulawesi Barat								
657	Majene	1	Malunda	PL	PL	PL	PL	
658	Majene	2	Palipi	PR	PR	PR	PR	
659	Majene	3	Pamboang	PL	PL	PL	PL	
660	Majene	4	Sendana	PL	PL	PL	PL	
661	Mamuju	5	Kalukku	PL	PL	PL	PL	
662	Mamuju	6	Sampaga	PL	PL	PL	PL	
663	Mamuju	7	Tappalang	PL	PL	PL	PL	
664	Mamuju Utara	8	Bambaloka	PL	PL	PL	PL	
665	Polewali Mandar	9	Kayuangin	PL	PL	PL	PL	
666	Polewali Mandar	10	Langnga	PL	PL	PL	PL	
XXVII. Provinsi Sulawesi Tengah								
667	Banggai	1	Basabungan	PL	PL	PL	PL	
668	Banggai	2	Bualemo	PL	PL	PL	PL	
669	Banggai	3	Lalong	PL	PL	PL	PL	
670	Banggai	4	Poat	PL	PL	PL	PL	
671	Banggai	5	Balantak	PL	PL	PL	PL	
672	Banggai	6	Dondola	PL	PL	PL	PL	
673	Banggai	7	Kambani	PL	PL	PL	PL	
674	Banggai	8	Leme-Leme	PL	PL	PL	PL	
675	Banggai	9	Pangkalasiang	PL	PL	PL	PL	
676	Banggai	10	Pulau Peling	PL	PL	PL	PL	
677	Banggai	11	Pulau Waleabahi	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
678	Banggai	12	Rata	PL	PL	PL	PL	
679	Banggai	13	Toima	PL	PL	PL	PL	
680	Banggai Kepulauan	14	Boloan	PL	PL	PL	PL	
681	Banggai Kepulauan	15	Lalengan	PL	PL	PL	PL	
682	Banggai Kepulauan	16	Lumbilumbia	PL	PL	PL	PL	
683	Banggai Kepulauan	17	Alasan	PL	PL	PL	PL	
684	Banggai Kepulauan	18	Bakalan	PL	PL	PL	PL	
685	Banggai Kepulauan	19	Batangono	PL	PL	PL	PL	
686	Banggai Kepulauan	20	Boyomoute	PL	PL	PL	PL	
687	Banggai Kepulauan	21	Bulagi	PL	PL	PL	PL	
688	Banggai Kepulauan	22	Bulungkobit	PL	PL	PL	PL	
689	Banggai Kepulauan	23	Kalumbatan	PL	PL	PL	PL	
690	Banggai Kepulauan	24	Kalupapi	PL	PL	PL	PL	
691	Banggai Kepulauan	25	Kindandai	PL	PL	PL	PL	
692	Banggai Kepulauan	26	Komba-Komba	PL	PL	PL	PL	
693	Banggai Kepulauan	27	Lalong	PL	PL	PL	PL	
694	Banggai Kepulauan	28	Liang	PL	PL	PL	PL	
695	Banggai Kepulauan	29	Lipulalongo	PL	PL	PL	PL	
696	Banggai Kepulauan	30	Lolantang	PL	PL	PL	PL	
697	Banggai Kepulauan	31	Lupamenteng	PL	PL	PL	PL	
698	Banggai Kepulauan	32	Mata Maling	PL	PL	PL	PL	
699	Banggai Kepulauan	33	Mbeleang	PL	PL	PL	PL	
700	Banggai Kepulauan	34	Oluno	PL	PL	PL	PL	
701	Banggai Kepulauan	35	Padingtian	PL	PL	PL	PL	
702	Banggai Kepulauan	36	Paisulamo	PL	PL	PL	PL	
703	Banggai Kepulauan	37	Palapat	PL	PL	PL	PL	
704	Banggai Kepulauan	38	Ponding - Ponding	PL	PL	PL	PL	
705	Banggai Kepulauan	39	Sabang/P. Peleng	PL	PL	PL	PL	
706	Banggai Kepulauan	40	Salakan (I,II)	PL	PL	PL	PL	
707	Banggai Kepulauan	41	Sasabobok	PL	PL	PL	PL	
708	Banggai Kepulauan	42	Tabulan	PL	PL	PL	PL	
709	Banggai Kepulauan	43	Tadono	PL	PL	PL	PL	
710	Banggai Kepulauan	44	Talas	PL	PL	PL	PL	
711	Banggai Kepulauan	45	Tataba	PL	PL	PL	PL	
712	Banggai Kepulauan	46	Tebing	PL	PL	PL	PL	
713	Banggai Kepulauan	47	Tinangkung	PL	PL	PL	PL	
714	Banggai Kepulauan	48	Togong Sagu	PL	PL	PL	PL	
715	Banggai Kepulauan	49	Tolulos	PL	PL	PL	PL	
716	Banggai Laut	50	Dodung	PL	PL	PL	PL	
717	Banggai Laut	51	Gonggong	PL	PL	PL	PL	
718	Banggai Laut	52	Kapela	PL	PL	PL	PL	
719	Banggai Laut	53	Kasuari	PL	PL	PL	PL	
720	Banggai Laut	54	Kaukes	PL	PL	PL	PL	
721	Banggai Laut	55	Kokondang	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
722	Banggai Laut	56	Lampio	PL	PL	PL	PL	
723	Banggai Laut	57	Lokotoy	PL	PL	PL	PL	
724	Banggai Laut	58	Matanga	PL	PL	PL	PL	
725	Banggai Laut	59	Ndindibung	PL	PL	PL	PL	
726	Banggai Laut	60	Paisubebe	PL	PL	PL	PL	
727	Banggai Laut	61	Panapat	PL	PL	PL	PL	
728	Banggai Laut	62	Panapat/ Konalu	PL	PL	PL	PL	
729	Banggai Laut	63	Panapat/Dendek	PL	PL	PL	PL	
730	Banggai Laut	64	Panapat/Mandel	PL	PL	PL	PL	
731	Banggai Laut	65	Popisi	PL	PL	PL	PL	
732	Banggai Laut	66	Tinakin Laut	PL	PL	PL	PL	
733	Banggai Laut	67	Bungin	PL	PL	PL	PL	
734	Banggai Laut	68	Gasuang	PL	PL	PL	PL	
735	Banggai Laut	69	Lantibung	PL	PL	PL	PL	
736	Banggai Laut	70	Mansalean	PL	PL	PL	PL	
737	Banggai Laut	71	Mbuang-Mbuang	PL	PL	PL	PL	
738	Banggai Laut	72	Sonit (I, II)	PL	PL	PL	PL	
739	Banggai Laut	73	Timpaus	PL	PL	PL	PL	
740	Banggai Laut	74	Toropot	PL	PL	PL	PL	
741	Buol	75	Kumaligon	PL	PL	PL	PL	
742	Buol	76	Lokodidi	PL	PL	PL	PL	
743	Buol	77	Paleleh	PR	PR	PR	PR	
744	Donggala	78	Labean	PL	PL	PL	PL	
745	Donggala	79	Sabang	PL	PL	PL	PL	
746	Donggala	80	Rerang	PL	PL	PL	PL	
747	Morowali	81	Kaleroang	PL	PL	PL	PL	
748	Morowali	82	Sambalagi	PL	PL	PL	PL	
749	Morowali Utara	83	Kolo	PL	PL	PL	PL	
750	Parigi Moutong	84	Parigi II (Toboli)	PL	PL	PL	PL	
751	Tojo Una-Una	85	Kabalutan	PL	PL	PL	PL	
752	Tojo Una-Una	86	Katia	PL	PL	PL	PL	
753	Tojo Una-Una	87	Katupat	PL	PL	PL	PL	
754	Tojo Una-Una	88	Kuling Kinan	PL	PL	PL	PL	
755	Tojo Una-Una	89	Labuan	PL	PL	PL	PL	
756	Tojo Una-Una	90	Lebiti	PL	PL	PL	PL	
757	Tojo Una-Una	91	Podi	PL	PL	PL	PL	
758	Toli-Toli	92	Lau Lalang	PL	PL	PL	PL	
759	Toli-Toli	93	Lingian	PL	PL	PL	PL	
760	Toli-Toli	94	L. Salendo	PL	PL	PL	PL	
761	Toli-Toli	95	Ogotua	PL	PL	PL	PL	
762	Toli-Toli	96	Simatang	PL	PL	PL	PL	
763	Toli-Toli	97	Tambu	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
XXVIII. Provinsi Sulawesi Tenggara								
764	Bau-Bau	1	Lakologou	PL	PL	PL	PL	
765	Bau-Bau	2	Lembatan Batu	PL	PL	PL	PL	
766	Bau-Bau	3	Sulaa	PL	PL	PL	PL	
767	Bau-Bau	4	Tarafu	PL	PL	PL	PL	
768	Bombana	5	Bambea	PL	PL	PL	PL	
769	Bombana	6	Batuawu	PL	PL	PL	PL	
770	Bombana	7	Dongkala	PL	PL	PL	PL	
771	Bombana	8	Larete	PL	PL	PL	PL	
772	Bombana	9	Malandahi	PL	PL	PL	PL	
773	Bombana	10	Paria	PL	PL	PL	PL	
774	Bombana	11	Pulau Sagori	PL	PL	PL	PL	
775	Buton	12	Dongkala Pasar Wajo	PL	PL	PL	PL	
776	Buton Selatan	13	Batauga	PL	PL	PL	PL	
777	Buton Selatan	14	Sampolawa	PL	PL	PL	PL	
778	Buton Tengah	15	Lombe	PL	PL	PL	PL	
779	Buton Tengah	16	Mawasangka Induk	PL	PL	PL	PL	
780	Buton Tengah	17	Talaga Besar	PL	PL	PL	PL	
781	Buton Utara	18	Waodeburi/Letamo	PL	PL	PL	PL	
782	Kendari	19	Soropia	PL	PL	PL	PL	
783	Kolaka	20	Malombo	PL	PL	PL	PL	
784	Kolaka Utara	21	Olo-oloho	PL	PL	PL	PL	
785	Konawe Kepulauan	22	Munse	PL	PL	PL	PL	
786	Konawe Selatan	23	Lainea	PL	PL	PL	PL	
787	Konawe Selatan	24	Torobulu	PL	PL	PL	PL	
788	Muna	25	Tampo	PL	PL	PL	PL	
789	Muna	26	Tondasi	PL	PL	PL	PL	
790	Muna Barat	27	Oempu	PL	PL	PL	PL	
791	Muna Barat	28	Pajala	PL	PL	PL	PL	
792	Muna Barat	29	Tanjung Batu	PL	PL	PL	PL	
793	Wakatobi	30	Papalia	PL	PL	PL	PL	
794	Wakatobi	31	Pulau Kapota	PL	PL	PL	PL	
795	Wakatobi	32	Pulau Runduma	PL	PL	PL	PL	
796	Wakatobi	33	Waha/Usuku	PL	PL	PL	PL	
XXIX. Provinsi Sulawesi Selatan								
797	Barru	1	Lamuru Kung	PL	PL	PL	PL	
798	Barru	2	Waetuo	PL	PL	PL	PL	
799	Bone	3	Cenrana	PL	PL	PL	PL	
800	Bone	4	Lapangkong/ Salameko	PL	PL	PL	PL	
801	Bone	5	P. Salemo	PL	PL	PL	PL	
802	Bulukumba	6	Butung/Kasuso	PL	PL	PL	PL	
803	Bulukumba	7	Bira/Tanah Beru	PL	PL	PL	PL	
804	Jeneponto	8	Tarowang	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
805	Luwu	9	Bawa Salo	PL	PL	PL	PL	
806	Luwu	10	Bone Pute	PL	PL	PL	PL	
807	Luwu	11	Kajang	PL	PL	PL	PL	
808	Luwu	12	Pancana / Pute Angin	PL	PL	PL	PL	
809	Luwu Timur	13	Wotu	PL	PL	PL	PL	
810	Luwu Utara	14	Labuange	PL	PL	PL	PL	
811	Makasar	15	Kayu Bangkoa	PL	PL	PL	PL	
812	Makasar	16	Pulau Barrang Caddi	PL	PL	PL	PL	
813	Makasar	17	Pulau Barrang Lompo	PL	PL	PL	PL	
814	Makasar	18	Pulau Bonetambung	PL	PL	PL	PL	
815	Makasar	19	Pulau Kodingareng	PL	PL	PL	PL	
816	Makasar	20	Pulau Lae-Lae	PL	PL	PL	PL	
817	Makasar	21	Pulau Langkai	PL	PL	PL	PL	
818	Makasar	22	Pulau Samalona	PL	PL	PL	PL	
819	Pangkajene Kepulauan	23	P. Badi	PL	PL	PL	PL	
820	Pangkajene Kepulauan	24	P. Balo-Baloang Lompo	PL	PL	PL	PL	
821	Pangkajene Kepulauan	25	P. Dewakang Lompo	PL	PL	PL	PL	
822	Pangkajene Kepulauan	26	P. Doang-Doangan Lompo	PL	PL	PL	PL	
823	Pangkajene Kepulauan	27	P. Gondong Bali	PL	PL	PL	PL	
824	Pangkajene Kepulauan	28	P. Kapoposang Bali	PL	PL	PL	PL	
825	Pangkajene Kepulauan	29	P. Karangrang	PL	PL	PL	PL	
826	Pangkajene Kepulauan	30	P. Kulambing	PL	PL	PL	PL	
827	Pangkajene Kepulauan	31	P. Langkoitang	PL	PL	PL	PL	
828	Pangkajene Kepulauan	32	P. Pammantauang	PL	PL	PL	PL	
829	Pangkajene Kepulauan	33	P. Samatellu	PL	PL	PL	PL	
830	Pangkajene Kepulauan	34	P. Karumpa	PL	PL	PL	PL	
831	Pangkajene Kepulauan	35	P. Madu	PL	PL	PL	PL	
832	Pangkajene Kepulauan	36	P. Rajuni	PL	PL	PL	PL	
833	Pinrang	37	Langga	PL	PL	PL	PL	
834	Pinrang	38	Ujung Lero	PL	PL	PL	PL	
835	Selayar	39	Appatana	PL	PL	PL	PL	
836	Selayar	40	Bangkala	PL	PL	PL	PL	
837	Selayar	41	Cappasalo /Malangke	PL	PL	PL	PL	
838	Selayar	42	Lampia	PL	PL	PL	PL	
839	Selayar	43	Larompong	PL	PL	PL	PL	
840	Selayar	44	P. Batang Mata	PL	PL	PL	PL	
841	Selayar	45	P. Bembe / Tanamalala	PL	PL	PL	PL	
842	Selayar	46	P. Biropa	PL	PL	PL	PL	
843	Selayar	47	P. Bone Lohe	PL	PL	PL	PL	
844	Selayar	48	P. Kalao	PL	PL	PL	PL	
845	Selayar	49	P. Komba-Komba	PL	PL	PL	PL	
846	Selayar	50	P. Lambego	PL	PL	PL	PL	
847	Selayar	51	P. Padang	PL	PL	PL	PL	
848	Selayar	52	P. Tarupa	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
849	Selayar	53	P. Tambolongan	PL	PL	PL	PL	
850	Selayar	54	P. Tanakeke / Satanga	PL	PL	PL	PL	
851	Selayar	55	Pasitallu	PL	PL	PL	PL	
852	Sinjai	56	P. Burung Lohe	PL	PL	PL	PL	
853	Sinjai	57	Pattubukan	PL	PL	PL	PL	
854	Takalar	58	P. Kambuno	PL	PL	PL	PL	
855	Takalar	59	Salomekko	PL	PL	PL	PL	
856	Wajo	60	Doping	PL	PL	PL	PL	
857	Wajo	61	Jalang/Cendrane	PL	PL	PL	PL	
858	Wajo	62	Danggae	PL	PL	PL	PL	
XXX. Provinsi Maluku Utara								
859	Halmahera Barat	1	Boso/Akelamo Kao	PL	PL	PL	PL	
860	Halmahera Barat	2	Bobane Igo	PL	PL	PL	PL	
861	Halmahera Barat	3	Goal/Talaga	PL	PL	PL	PL	
862	Halmahera Barat	4	Ibu	PL	PL	PL	PL	
863	Halmahera Barat	5	Sahu	PL	PL	PL	PL	
864	Halmahera Barat	6	Sidangoli	PL	PL	PL	PL	
865	Halmahera Barat	7	Susupu	PL	PL	PL	PL	
866	Halmahera Selatan	8	Belang-Belang	PL	PL	PL	PL	
867	Halmahera Selatan	9	Bibinoi	PL	PL	PL	PL	
868	Halmahera Selatan	10	Bajo	PL	PL	PL	PL	
869	Halmahera Selatan	11	Dowora	PL	PL	PL	PL	
870	Halmahera Selatan	12	Dolik	PL	PL	PL	PL	
871	Halmahera Selatan	13	Fulai	PL	PL	PL	PL	
872	Halmahera Selatan	14	Gane Dalam	PL	PL	PL	PL	
873	Halmahera Selatan	15	Gane Luar	PL	PL	PL	PL	
874	Halmahera Selatan	16	Garung	PL	PL	PL	PL	
875	Halmahera Selatan	17	Geti Lama	PL	PL	PL	PL	
876	Halmahera Selatan	18	Indong	PL	PL	PL	PL	
877	Halmahera Selatan	19	Kawasi	PL	PL	PL	PL	
878	Halmahera Selatan	20	Kelo	PL	PL	PL	PL	
879	Halmahera Selatan	21	Kukupang	PL	PL	PL	PL	
880	Halmahera Selatan	22	Kupal	PL	PL	PL	PL	
881	Halmahera Selatan	23	Laluin	PL	PL	PL	PL	
882	Halmahera Selatan	24	Laromabati	PL	PL	PL	PL	
883	Halmahera Selatan	25	Lata-lata	PL	PL	PL	PL	
884	Halmahera Selatan	26	Lelei	PL	PL	PL	PL	
885	Halmahera Selatan	27	Loleo Obi	PL	PL	PL	PL	
886	Halmahera Selatan	28	Moari	PL	PL	PL	PL	
887	Halmahera Selatan	29	Nang Kokotu	PL	PL	PL	PL	
888	Halmahera Selatan	30	Nusa Ra	PL	PL	PL	PL	
889	Halmahera Selatan	31	Obilatu	PL	PL	PL	PL	
890	Halmahera Selatan	32	Posi-Posi Gane	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
891	Halmahera Selatan	33	Pulau Tapa	PL	PL	PL	PL	
892	Halmahera Selatan	34	Pulau Widi	PL	PL	PL	PL	
893	Halmahera Selatan	35	Samo	PL	PL	PL	PL	
894	Halmahera Selatan	36	Sawanakar	PL	PL	PL	PL	
895	Halmahera Selatan	37	Sum	PL	PL	PL	PL	
896	Halmahera Selatan	38	Tagono	PL	PL	PL	PL	
897	Halmahera Selatan	39	Taneti	PL	PL	PL	PL	
898	Halmahera Selatan	40	Tatewang	PL	PL	PL	PL	
899	Halmahera Selatan	41	Tawa	PL	PL	PL	PL	
900	Halmahera Selatan	42	Tobalai/Woi	PL	PL	PL	PL	
901	Halmahera Tengah	43	Foya	PL	PL	PL	PL	
902	Halmahera Tengah	44	Mesa	PL	PL	PL	PL	
903	Halmahera Tengah	45	Jikohai	PL	PL	PL	PL	
904	Halmahera Tengah	46	Lelilef	PL	PL	PL	PL	
905	Halmahera Tengah	47	Loleo	PL	PL	PL	PL	
906	Halmahera Tengah	48	P. Sayafi	PL	PL	PL	PL	
907	Halmahera Tengah	49	Sakam/Pat	PL	PL	PL	PL	
908	Halmahera Tengah	50	Umiyal	PL	PL	PL	PL	
909	Halmahera Tengah	51	Waleh	PL	PL	PL	PL	
910	Halmahera Tengah	52	Yoi	PL	PL	PL	PL	
911	Halmahera Timur	53	Akelamo	PL	PL	PL	PL	
912	Halmahera Timur	54	Bilolo	PL	PL	PL	PL	
913	Halmahera Timur	55	Ekor	PL	PL	PL	PL	
914	Halmahera Timur	56	Lolasita	PL	PL	PL	PL	
915	Halmahera Timur	57	Lolobata	PL	PL	PL	PL	
916	Halmahera Timur	58	Maba Pura	PL	PL	PL	PL	
917	Halmahera Timur	59	Patilean/Miyaf	PL	PL	PL	PL	
918	Halmahera Timur	60	Wayamli	PL	PL	PL	PL	
919	Halmahera Timur	61	Woci	PL	PL	PL	PL	
920	Halmahera Utara	62	Asmiro	PL	PL	PL	PL	
921	Halmahera Utara	63	Bataka	PL	PL	PL	PL	
922	Halmahera Utara	64	Cera	PL	PL	PL	PL	
923	Halmahera Utara	65	Daru	PL	PL	PL	PL	
924	Halmahera Utara	66	Gisi	PL	PL	PL	PL	
925	Halmahera Utara	67	Gonga	PL	PL	PL	PL	
926	Halmahera Utara	68	Gurua	PL	PL	PL	PL	
927	Halmahera Utara	69	Kakara	PL	PL	PL	PL	
928	Halmahera Utara	70	Kupa-Kupa	PL	PL	PL	PL	
929	Halmahera Utara	71	Ngajam	PL	PL	PL	PL	
930	Halmahera Utara	72	Pacao	PL	PL	PL	PL	
931	Halmahera Utara	73	Salimuli	PL	PL	PL	PL	
932	Halmahera Utara	74	Sopu	PL	PL	PL	PL	
933	Halmahera Utara	75	Susupu	PL	PL	PL	PL	
934	Halmahera Utara	76	Tanjung Pilawang	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
935	Halmahera Utara	77	Tetewang Kao	PL	PL	PL	PL	
936	Halmahera Utara	78	Tupu-tupu	PL	PL	PL	PL	
937	Halmahera Utara	79	Tutumaleo	PL	PL	PL	PL	
938	Kepulauan Sula	80	Auponhia	PL	PL	PL	PL	
939	Kepulauan Sula	81	Baleha	PL	PL	PL	PL	
940	Kepulauan Sula	82	Bapeno	PL	PL	PL	PL	
941	Kepulauan Sula	83	Baruakol	PL	PL	PL	PL	
942	Kepulauan Sula	84	Fuata	PL	PL	PL	PL	
943	Kepulauan Sula	85	Kabau	PL	PL	PL	PL	
944	Kepulauan Sula	86	Manaf	PL	PL	PL	PL	
945	Kepulauan Sula	87	Pas Ipa	PL	PL	PL	PL	
946	Kepulauan Sula	88	Poheha	PL	PL	PL	PL	
947	Kepulauan Sula	89	Waitina	PL	PL	PL	PL	
948	Kepulauan Sula	90	Wailoba	PL	PL	PL	PL	
949	Kepulauan Sula	91	Waisakai	PL	PL	PL	PL	
950	Pulau Morotai	92	Aru	PL	PL	PL	PL	
951	Pulau Morotai	93	Sangowo	PL	PL	PL	PL	
952	Pulau Morotai	94	Tiley	PL	PL	PL	PL	
953	Pulau Taliabu	95	Bapenu	PL	PL	PL	PL	
954	Pulau Taliabu	96	Gela	PL	PL	PL	PL	
955	Pulau Taliabu	97	Jorjoga	PL	PL	PL	PL	
956	Pulau Taliabu	98	Lede	PL	PL	PL	PL	
957	Pulau Taliabu	99	Nggele	PL	PL	PL	PL	
958	Pulau Taliabu	100	Pancorang	PL	PL	PL	PL	
959	Pulau Taliabu	101	Parigi	PL	PL	PL	PL	
960	Pulau Taliabu	102	Penu	PL	PL	PL	PL	
961	Pulau Taliabu	103	Samuya	PL	PL	PL	PL	
962	Ternate	104	Dufa-Dufa	PL	PL	PL	PL	
963	Ternate	105	Hiri	PL	PL	PL	PL	
964	Ternate	106	Jambula	PL	PL	PL	PL	
965	Ternate	107	Mayau	PL	PL	PL	PL	
966	Ternate	108	Sulamadaha	PL	PL	PL	PL	
967	Tidore Kepulauan	109	Akelamo	PL	PL	PL	PL	
968	Tidore Kepulauan	110	Batulak	PL	PL	PL	PL	
969	Tidore Kepulauan	111	Galala	PL	PL	PL	PL	
970	Tidore Kepulauan	112	Galala Oba	PL	PL	PL	PL	
971	Tidore Kepulauan	113	Guruaping Oba	PL	PL	PL	PL	
972	Tidore Kepulauan	114	Kaiyasa	PL	PL	PL	PL	
973	Tidore Kepulauan	115	Loko Oba	PL	PL	PL	PL	
974	Tidore Kepulauan	116	Lola Oba	PL	PL	PL	PL	
975	Tidore Kepulauan	117	Loleo	PL	PL	PL	PL	
976	Tidore Kepulauan	118	Maftutu	PL	PL	PL	PL	
977	Tidore Kepulauan	119	Maitara	PL	PL	PL	PL	
978	Tidore Kepulauan	120	Mare	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
979	Tidore Kepulauan	121	Sofang	PL	PL	PL	PL	
980	Tidore Kepulauan	122	Somahode	PL	PL	PL	PL	
981	Tidore Kepulauan	123	Wama	PL	PL	PL	PL	
XXXI. Provinsi Maluku								
982	Buru	1	Bilorro	PL	PL	PL	PL	
983	Buru	2	Ilath	PL	PL	PL	PL	
984	Buru	3	Teluk Bara	PL	PL	PL	PL	
985	Buru	4	Teluk Namlea	PL	PL	PL	PL	
986	Buru	5	Waplau	PL	PL	PL	PL	
987	Buru Selatan	6	Ambalu	PL	PL	PL	PL	
988	Buru Selatan	7	Ulima	PL	PL	PL	PL	
989	Buru Selatan	8	Waikeka	PL	PL	PL	PL	
990	Buru Selatan	9	Waimalu	PL	PL	PL	PL	
991	Buru Selatan	10	Waimulang	PL	PL	PL	PL	
992	Buru Selatan	11	Wamsisi	PL	PL	PL	PL	
993	Kepulauan Aru	12	Arus Selatan	PL	PL	PL	PL	
994	Kepulauan Aru	13	Jerol	PL	PL	PL	PL	
995	Kepulauan Aru	14	Kojabi	PL	PL	PL	PL	
996	Kepulauan Aru	15	Longgar	PL	PL	PL	PL	
997	Kepulauan Aru	16	Meror	PL	PL	PL	PL	
998	Kepulauan Aru	17	Mesiang	PL	PL	PL	PL	
999	Kepulauan Aru	18	Taberfane	PL	PL	PL	PL	
1000	Kepulauan Aru	19	Warabal	PL	PL	PL	PL	
1001	Kepulauan Aru	20	Warialau	PL	PL	PL	PL	
1002	Maluku Barat Daya	21	Arwala / Sutilarang	PL	PL	PL	PL	
1003	Maluku Barat Daya	22	Kisar	PL	PL	PL	PL	
1004	Maluku Barat Daya	23	Lelang / P. Sermata	PL	PL	PL	PL	
1005	Maluku Barat Daya	24	Letl	PL	PL	PL	PL	
1006	Maluku Barat Daya	25	Lewa/Dai	PL	PL	PL	PL	
1007	Maluku Barat Daya	26	Luang	PL	PL	PL	PL	
1008	Maluku Barat Daya	27	Ruma Kuda	PL	PL	PL	PL	
1009	Maluku Barat Daya	28	Wetang	PL	PL	PL	PL	
1010	Maluku Tengah	29	Aboru	PL	PL	PL	PL	
1011	Maluku Tengah	30	Besi	PL	PL	PL	PL	
1012	Maluku Tengah	31	Kobisadar	PL	PL	PL	PL	
1013	Maluku Tengah	32	Kumber	PL	PL	PL	PL	
1014	Maluku Tengah	33	Laimu	PL	PL	PL	PL	
1015	Maluku Tengah	34	Makariki	PL	PL	PL	PL	
1016	Maluku Tengah	35	Nasalaut	PL	PL	PL	PL	
1017	Maluku Tengah	36	Nila	PL	PL	PL	PL	
1018	Maluku Tengah	37	Paa	PL	PL	PL	PL	
1019	Maluku Tengah	38	Pasanie	PL	PL	PL	PL	
1020	Maluku Tengah	39	Serua	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
1021	Maluku Tengah	40	Tahoku	PL	PL	PL	PL	
1022	Maluku Tengah	41	Teon	PL	PL	PL	PL	
1023	Maluku Tenggara	42	Banda Eli	PL	PL	PL	PL	
1024	Maluku Tenggara	43	Hollat	PL	PL	PL	PL	
1025	Maluku Tenggara	44	Langgiar	PL	PL	PL	PL	
1026	Maluku Tenggara	45	Mun	PL	PL	PL	PL	
1027	Maluku Tenggara	46	Ohoiraut	PL	PL	PL	PL	
1028	Maluku Tenggara	47	Sathean	PL	PL	PL	PL	
1029	Maluku Tenggara	48	Uf Mar/Danar	PL	PL	PL	PL	
1030	Maluku Tenggara	49	Ur Pulau	PL	PL	PL	PL	
1031	Maluku Tenggara	50	Weduar	PL	PL	PL	PL	
1032	Maluku Tenggara Barat	51	Adodo Fordata	PL	PL	PL	PL	
1033	Maluku Tenggara Barat	52	Lingat	PL	PL	PL	PL	
1034	Maluku Tenggara Barat	53	Molu	PL	PL	PL	PL	
1035	Maluku Tenggara Barat	54	Nurkat	PL	PL	PL	PL	
1036	Maluku Tenggara Barat	55	Rumean	PL	PL	PL	PL	
1037	Maluku Tenggara Barat	56	Rumyaan	PL	PL	PL	PL	
1038	Maluku Tenggara Barat	57	Soyanin	PL	PL	PL	PL	
1039	Seram Bagian Barat	58	Ely Besar	PL	PL	PL	PL	
1040	Seram Bagian Barat	59	Hatunuru	PL	PL	PL	PL	
1041	Seram Bagian Barat	60	Kelang	PL	PL	PL	PL	
1042	Seram Bagian Barat	61	Lokki	PL	PL	PL	PL	
1043	Seram Bagian Barat	62	Luhu	PL	PL	PL	PL	
1044	Seram Bagian Barat	63	Pelita Jaya	PL	PL	PL	PL	
1045	Seram Bagian Barat	64	Wailey	PL	PL	PL	PL	
1046	Seram Bagian Barat	65	Waisala/Maslka Jaya	PL	PL	PL	PL	
1047	Seram Bagian Timur	66	Air Kasar/Kelimoi	PL	PL	PL	PL	
1048	Seram Bagian Timur	67	Kailakat / Kotasiri	PL	PL	PL	PL	
1049	Seram Bagian Timur	68	Kelmuri / Undur	PL	PL	PL	PL	
1050	Seram Bagian Timur	69	P. Manawoka/Amarsikaru	PL	PL	PL	PL	
1051	Tual	70	Pulai Ohoiel	PL	PL	PL	PL	
1052	Tual	71	Pulau Fadol	PL	PL	PL	PL	
1053	Tual	72	Pulau Hirit	PL	PL	PL	PL	
1054	Tual	73	Pulau Kaimer	PL	PL	PL	PL	
1055	Tual	74	Pulau Langgiar	PL	PL	PL	PL	
1056	Tual	75	Pulau Mangur	PL	PL	PL	PL	
1057	Tual	76	Pulau Tam	PL	PL	PL	PL	
1058	Tual	77	Pulau Uut	PL	PL	PL	PL	
1059	Tual	78	Pulau Yamru	PL	PL	PL	PL	
1060	Tual	79	Ufmar Timur	PL	PL	PL	PL	
XXXII. Provinsi Papua Barat								
1061	Fak-fak	1	Bomberai	PL	PL	PL	PL	
1062	Fak-fak	2	Goras (Bomberai)	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
1063	Fak-fak	3	Karas	PL	PL	PL	PL	
1064	Fak-fak	4	Sagan	PL	PL	PL	PL	
1065	Fak-fak	5	Selasi	PL	PL	PL	PL	
1066	Fak-fak	6	Teluk Patipi	PL	PL	PL	PL	
1067	Fak-fak	7	Weti/Weri	PL	PL	PL	PL	
1068	Kab. Sorong	8	Kasim	PL	PL	PL	PL	
1069	Kab. Sorong	9	Kiamano	PL	PL	PL	PL	
1070	Kab. Sorong	10	Seget Baru	PL	PL	PL	PL	
1071	Kab. Sorong	11	Sele	PL	PL	PL	PL	
1072	Kaimana	12	Adijaya	PL	PL	PL	PL	
1073	Kaimana	13	Afona	PL	PL	PL	PL	
1074	Kaimana	14	Etna	PL	PL	PL	PL	
1075	Kaimana	15	Lobo	PL	PL	PL	PL	
1076	Kaimana	16	Nofa	PL	PL	PL	PL	
1077	Kaimana	17	P. Adi	PL	PL	PL	PL	
1078	Kaimana	18	Senini	PL	PL	PL	PL	
1079	Kaimana	19	Susunu	PL	PL	PL	PL	
1080	Kaimana	20	Tanggaromi	PL	PL	PL	PL	
1081	Kaimana	21	Kanoka	PL	PL	PL	PL	
1082	Kaimana	22	Teluk Arguni	PL	PL	PL	PL	
1083	Kaimana	23	Waripi (Teluk Etna)	PL	PL	PL	PL	
1084	Manokwari	24	Hopmare	PL	PL	PL	PL	
1085	Manokwari	25	Imbuan	PL	PL	PL	PL	
1086	Manokwari	26	Kwoor	PL	PL	PL	PL	
1087	Manokwari	27	Maruni	PL	PL	PL	PL	
1088	Manokwari	28	Masni	PL	PL	PL	PL	
1089	Manokwari	29	Saubeba	PL	PL	PL	PL	
1090	Manokwari	30	Sowi Marmpa	PL	PL	PL	PL	
1091	Manokwari	31	Waibem	PL	PL	PL	PL	
1092	Manokwari	32	Wanden	PL	PL	PL	PL	
1093	Manokwari	33	Warmandi	PL	PL	PL	PL	
1094	Manokwari	34	Wau	PL	PL	PL	PL	
1095	Manokwari	35	Werur	PL	PL	PL	PL	
1096	Raja Am pat	36	Fafanlap	PL	PL	PL	PL	
1097	Raja Ampat	37	Gag	PL	PL	PL	PL	
1098	Raja Ampat	38	Harapan Jaya (Pulau Misol)	PL	PL	PL	PL	
1099	Raja Ampat	39	Kabilol	PL	PL	PL	PL	
1100	Raja Ampat	40	Kapadiri	PL	PL	PL	PL	
1101	Raja Ampat	41	Kofiau	PL	PL	PL	PL	
1102	Raja Ampat	42	Limalas	PL	PL	PL	PL	
1103	Raja Ampat	43	Manyalfun	PL	PL	PL	PL	
1104	Raja Ampat	44	Meosmengkara	PL	PL	PL	PL	
1105	Raja Ampat	45	Mneir	PL	PL	PL	PL	
1106	Raja Ampat	46	Mutus	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
1107	Raja Ampat	47	P. Ayu	PL	PL	PL	PL	
1108	Raja Ampat	48	Sailolof	PL	PL	PL	PL	
1109	Raja Ampat	49	Salawati	PL	PL	PL	PL	
1110	Raja Ampat	50	Selfele	PL	PL	PL	PL	
1111	Raja Ampat	51	Urbinasopen	PL	PL	PL	PL	
1112	Raja Ampat	52	Waifoi	PL	PL	PL	PL	
1113	Raja Ampat	53	Waigeo	PL	PL	PL	PL	
1114	Raja Ampat	54	Waisilip	PL	PL	PL	PL	
1115	Raja Ampat	55	Wersamben	PL	PL	PL	PL	
1116	Raja Ampat	56	Yebekaki	PL	PL	PL	PL	
1117	Raja Ampat	57	Yellu	PL	PL	PL	PL	
1118	Sorong	58	Muarana	PL	PL	PL	PL	
1119	Sorong	59	Saoka	PL	PL	PL	PL	
1120	Sorong	60	Tanjung Kasuari	PL	PL	PL	PL	
1121	Sorong Selatan	61	Mugim	PL	PL	PL	PL	
1122	Sorong Selatan	62	Kais	PL	PL	PL	PL	
1123	Sorong Selatan	63	Klamono	PL	PL	PL	PL	
1124	Sorong Selatan	64	Kokoda	PL	PL	PL	PL	
1125	Sorong Selatan	65	Konda	PL	PL	PL	PL	
1126	Sorong Selatan	66	Saga	PL	PL	PL	PL	
1127	Sorong Selatan	67	Saifi	PL	PL	PL	PL	
1128	Sorong Selatan	68	Saremuk	PL	PL	PL	PL	
1129	Sorong Selatan	69	Warongge	PL	PL	PL	PL	
1130	Tambrauw	70	Abun	PL	PL	PL	PL	
1131	Tambrauw	71	Makbon	PL	PL	PL	PL	
1132	Teluk Bintuni	72	Arandai	PL	PL	PL	PL	
1133	Teluk Wondama	73	Aisandami	PL	PL	PL	PL	
1134	Teluk Wondama	74	Asemdane	PL	PL	PL	PL	
1135	Teluk Wondama	75	Kuriwamesa	PL	PL	PL	PL	
1136	Teluk Wondama	76	Roswar	PL	PL	PL	PL	
1137	Teluk Wondama	77	P. Roon	PL	PL	PL	PL	
1138	Teluk Wondama	78	Sabubar	PL	PL	PL	PL	
1139	Teluk Wondama	79	Yamakan	PL	PL	PL	PL	
1140	Teluk Wondama	80	Yembekiri	PL	PL	PL	PL	
1141	Teluk Wondama	81	Yende	PL	PL	PL	PL	
1142	Teluk Wondama	82	Yoop	PL	PL	PL	PL	
XXXIII. Provinsi Papua								
1143	Asmat	1	Akat	PL	PL	PL	PL	
1144	Asmat	2	Binam	PL	PL	PL	PL	
1145	Asmat	3	Jinak	PL	PL	PL	PL	
1146	Asmat	4	Jipawer	PL	PL	PL	PL	
1147	Asmat	5	Kamur	PL	PL	PL	PL	
1148	Asmat	6	Sogoni	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
1149	Asmat	7	Pirimapun	PL	PL	PL	PL	
1150	Asmat	8	Sawaerma	PL	PL	PL	PL	
1151	Asmat	9	Suator	PL	PL	PL	PL	
1152	Asmat	10	Wowi	PL	PL	PL	PL	
1153	Asmat	11	Yamas	PL	PL	PL	PL	
1154	Asmat	12	Yaosakor	PL	PL	PL	PL	
1155	Biak Numfor	13	Bosnik	PL	PL	PL	PL	
1156	Biak Numfor	14	Kameri	PL	PL	PL	PL	
1157	Biak Numfor	15	Korem	PL	PL	PL	PL	
1158	Biak Numfor	16	Manggari	PL	PL	PL	PL	
1159	Biak Numfor	17	Masram	PL	PL	PL	PL	
1160	Biak Numfor	18	Mbromsi	PL	PL	PL	PL	
1161	Biak Numfor	19	P. Insombabi	PL	PL	PL	PL	
1162	Biak Numfor	20	Padaido	PL	PL	PL	PL	
1163	Biak Numfor	21	Samber	PL	PL	PL	PL	
1164	Biak Numfor	22	Saribi	PL	PL	PL	PL	
1165	Biak Numfor	23	Wundi	PL	PL	PL	PL	
1166	Boven Digul	24	Ampera	PL	PL	PL	PL	
1167	Boven Digul	25	Anggamburan	PL	PL	PL	PL	
1168	Boven Digul	26	Boma	PL	PL	PL	PL	
1169	Boven Digul	27	Getenteri	PL	PL	PL	PL	
1170	Boven Digul	28	Mindiptanah	PL	PL	PL	PL	
1171	Boven Digul	29	Tanah Merah	PL	PL	PL	PL	
1172	Boven Digul	30	Ikisi	PL	PL	PL	PL	
1173	Jayapura	31	Demta	PL	PL	PL	PL	
1174	Jayapura	32	Holtekam	PL	PL	PL	PL	
1175	Jayapura	33	Muara Tami	PL	PL	PL	PL	
1176	Mamberamo Raya	34	Bagusa	PL	PL	PL	PL	
1177	Mamberamo Raya	35	Bariwaro	PL	PL	PL	PL	
1178	Mappi	36	Kanami	PL	PL	PL	PL	
1179	Mappi	37	Kepi	PL	PL	PL	PL	
1180	Mappi	38	Tagemon	PL	PL	PL	PL	
1181	Merauke	39	Bupul	PL	PL	PL	PL	
1182	Merauke	40	Buraka	PL	PL	PL	PL	
1183	Merauke	41	Cabang Tiga	PL	PL	PL	PL	
1184	Merauke	42	Erambu	PL	PL	PL	PL	
1185	Merauke	43	Kaptel/Bian	PL	PL	PL	PL	
1186	Merauke	44	Kumbe	PL	PL	PL	PL	
1187	Merauke	45	Muting	PL	PL	PL	PL	
1188	Merauke	46	Okaba	PL	PL	PL	PL	
1189	Merauke	47	Semangga	PL	PL	PL	PL	
1190	Merauke	48	Tanah Miring	PL	PL	PL	PL	
1191	Merauke	49	Wanam	PL	PL	PL	PL	
1192	Mimika	50	Agimuga	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
1193	Mimika	51	Amar	PL	PL	PL	PL	
1194	Mimika	52	Atuka	PL	PL	PL	PL	
1195	Mimika	53	Ayuka	PL	PL	PL	PL	
1196	Mimika	54	Hiripau	PL	PL	PL	PL	
1197	Mimika	55	Huta	PL	PL	PL	PL	
1198	Mimika	56	Kapiraya	PL	PL	PL	PL	
1199	Mimika	57	Kokonao	PL	PL	PL	PL	
1200	Mimika	58	Manasari	PL	PL	PL	PL	
1201	Mimika	59	Mitro Baru	PL	PL	PL	PL	
1202	Mimika	60	Mupuruka	PL	PL	PL	PL	
1203	Mimika	61	Otakwa	PL	PL	PL	PL	
1204	Mimika	62	Paraoka	PL	PL	PL	PL	
1205	Mimika	63	Petawai Buru	PL	PL	PL	PL	
1206	Mimika	64	Pomako Dua	PL	PL	PL	PL	
1207	Mimika	65	Urumuga	PL	PL	PL	PL	
1208	Mimika	66	Uta	PL	PL	PL	PL	
1209	Nabire	67	Kuatisora	PL	PL	PL	PL	
1210	Nabire	68	Napan	PL	PL	PL	PL	
1211	Nabire	69	P. Mambor	PL	PL	PL	PL	
1212	Nabire	70	P. Moor	PL	PL	PL	PL	
1213	Sarmi	71	Anus	PL	PL	PL	PL	
1214	Sarmi	72	Armo	PL	PL	PL	PL	
1215	Sarmi	73	Armopa	PL	PL	PL	PL	
1216	Sarmi	74	Betaf	PL	PL	PL	PL	
1217	Sarmi	75	D. Rombebai	PL	PL	PL	PL	
1218	Sarmi	76	Liki	PL	PL	PL	PL	
1219	Sarmi	77	Kasonaweja	PL	PL	PL	PL	
1220	Sarmi	78	Kebiti	PL	PL	PL	PL	
1221	Sarmi	79	Matabor	PL	PL	PL	PL	
1222	Sarmi	80	Takar	PL	PL	PL	PL	
1223	Sarmi	81	Puiway	PL	PL	PL	PL	
1224	Sarmi	82	Trimuris	PL	PL	PL	PL	
1225	Sarmi	83	Wakde	PL	PL	PL	PL	
1226	Sarmi	84	Yamna	PL	PL	PL	PL	
1227	Supiori	85	Miosbipondi	PL	PL	PL	PL	
1228	Supiori	86	P. Mapia	PL	PL	PL	PL	
1229	Supiori	87	Sowek	PL	PL	PL	PL	
1230	Supiori	88	Wardo	PL	PL	PL	PL	
1231	Waropen	89	Koweda	PL	PL	PL	PL	
1232	Waropen	90	P. Nauw	PL	PL	PL	PL	
1233	Waropen	91	Sungai Sanggei	PL	PL	PL	PL	
1234	Waropen	92	Sungai Waren	PL	PL	PL	PL	
1235	Waropen	93	Wapoga	PL	PL	PL	PL	
1236	Yahukimo	94	Dekai	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
1237	Yapen	95	Ambai	PL	PL	PL	PL	
1238	Yapen	96	Ampimoi	PL	PL	PL	PL	
1239	Yapen	97	Angkaisera	PL	PL	PL	PL	
1240	Yapen	98	Kabuena	PL	PL	PL	PL	
1241	Yapen	99	Kurudu	PL	PL	PL	PL	
1242	Yapen	100	Miosnum	PL	PL	PL	PL	
1243	Yapen	101	Randawaya	PL	PL	PL	PL	
1244	Yapen	102	Sumberbaba	PL	PL	PL	PL	
1245	Yapen	103	Wainapi	PL	PL	PL	PL	
1246	Yapen	104	Wooi	PL	PL	PL	PL	

LAMPIRAN A4
LOKASI TERMINAL UMUM (BAGIAN DARI PELABUHAN)

No.	PENETAPAN LOKASI TERMINAL UMUM		
	Kabupaten / Kota	No.	Terminal Umum
I. Provinsi Aceh			
-	-	-	-
II. Provinsi Sumatera Utara			
1	Batu bara	1	Terminal Multipurpose Kuala Tanjung
2	Medan	2	Terminal Petikemas Belawan Fase 1
3	Medan	3	Terminal Petikemas Belawan Fase 2
III. Provinsi Sumatera Barat			
-	-	-	-
IV. Provinsi Kepulauan Riau			
4	Batam	1	Kabil
5	Batam	2	Nongsa
6	Batam	3	Sekupang
7	Batam	4	Telaga Punggur
8	Batam	5	Batam Center
9	Batam	6	Harbour Bay
10	Tanjung Pinang	7	Balai Adat Indra Sakti
11	Tanjung Pinang	8	Batu Anam
12	Batam	9	STS Perairan Nipah-Pulau Sambu
13	Batam	10	STS Perairan Selat Durian-Pulau Sambu
14	Karimun	11	STS Tanjung Balai Karimun
V. Provinsi Riau			
-	-	-	-
VI. Provinsi Bengkulu			
-	-	-	-
VII. Provinsi Jambi			
15	Muaro Jambi	1	Terminal Petikemas Muaro Jambi
VIII. Provinsi Sumatera Selatan			
16	Banyuasin	1	Tanjung Carat
IX. Provinsi Bangka Belitung			
-	-	-	-
X. Provinsi Lampung			
-	-	-	-

No.	PENETAPAN LOKASI TERMINAL UMUM		
	Kabupaten / Kota	No.	Terminal Umum
XI. Provinsi Banten			
17	Cilegon	1	Terminal Multipurpose KBS Cigading
XII. Provinsi Jawa Barat			
-	-	-	-
XIII. Provinsi DKI Jakarta			
18	Jakarta Utara	1	Terminal Petikemas Kalibaru
19	Jakarta Utara	2	Terminal Umum KCN Marunda
20	Jakarta Utara	3	Terminal Tarumanegara
XIV. Provinsi Jawa Tengah			
-	-	-	-
XV. Provinsi Jawa Timur			
21	Gresik	1	Manyar
22	Gresik	2	Terminal Multipurpose Teluk Lamong
23	Bangkalan	3	Socah
24	Bangkalan	4	Tanjung Bulu Pandan
XVI. Provinsi Bali			
-	-	-	-
XVII. Provinsi Nusa Tenggara Barat			
25	Bima	1	Oituiwera
XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Timur			
26	Sumba Timur	1	Pelra Waingapu
XIX. Provinsi Kalimantan Barat			
27	Mempawah	1	Kijing Sei Kunyit
28	Mempawah	2	Terminal Pontianak Baru (Jungkat)
29	Pontianak	3	Terminal Jeruju (Indo Kontainer Sarana)
XX. Provinsi Kalimantan Tengah			
-	-	-	-
XXI. Provinsi Kalimantan Utara			
30	Nunukan	1	Liem Hie Jung
XXII. Provinsi Kalimantan Selatan			
31	Banjarmasin	-	STS Banjarmasin

No.	PENETAPAN LOKASI TERMINAL UMUM		
	Kabupaten / Kota	No.	Terminal Umum
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur			
32	Balikpapan	1	Kariangau
33	Samarinda	2	Palaran
34	Kutai Kertanegara	3	STS Muara Jawa
35	Samarinda	4	STS Muara Berau
XXIV. Provinsi Sulawesi Utara			
-	-	-	-
XXV. Provinsi Gorontalo			
-	-	-	-
XXVI. Provinsi Sulawesi Barat			
-	-	-	-
XXVII. Provinsi Sulawesi Tengah			
-	-	-	-
XXVIII. Provinsi Sulawesi Tenggara			
-	-	-	-
XXIX. Provinsi Sulawesi Selatan			
36	Makassar	1	Terminal Petikemas Makassar New Port
XXX. Provinsi Maluku Utara			
-	-	-	-
XXXI. Provinsi Maluku			
-	-	-	-
XXXII. Provinsi Papua Barat			
-	-	-	-
XXXIII. Provinsi Papua			
-	-	-	-

SUB LAMPIRAN A5
PELABUHAN LAUT YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI ANGKUTAN PENYEBERANGAN

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
1	**Aceh**			
1	Balohan	Kota Sabang	Operasi	KELAS I
2	Ulee Iheu	Kota Banda Aceh	Operasi	KELAS I
3	Lamteng	Kab. Kab. Aceh Besar	Operasi	KELAS I
4	Meulaboh	Kab. Aceh Barat	Operasi	KELAS I
5	Labuhan Haji	Kab. Aceh Selatan	Operasi	KELAS I
6	Sinabang	Kab. Simeuleu	Operasi	KELAS II
7	Singkil	Kab. Aceh Singkil	Operasi	KELAS I
8	Pulau Banyak	Kab. Aceh Singkil	Operasi	KELAS II
9	Sibigo	Kab. Simeulue	Rencana	KELAS III
2	**Sumatera Utara**			
1	Sibolga	Sibolga	Operasi	KELAS I
2	Gunungsitoli	Kab. Nias	Rencana	KELAS I
3	Teluk Dalam	Kab. Nias Selatan	Rencana	KELAS I
4	Pulau Telo	Kab. Nias Selatan	Rencana	KELAS III
5	Tanah Massa	Kab. Nias Selatan	Rencana	KELAS III
6	Tanah Balla	Kab. Nias Selatan	Rencana	KELAS III
7	Pulau Pini	Kab. Nias Selatan	Rencana	KELAS III
8	Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	Rencana	KELAS III
9	Pulau Berhala	Kab. Serdang Bedagai	Rencana	KELAS III
10	Natal	Kab. Mandalling Natal	Rencana	KELAS II
3	**Sumatera Barat**			
1	Teluk Bungus	Kota. Padang	Operasi	KELAS I
2	Siberut	Kab. Kepulauan Mentawai	Operasi	KELAS III
3	Tua Pejat	Kab. Kepulauan Mentawai	Operasi	KELAS III
4	Sikakap	Kab. Kepulauan Mentawai	Operasi	KELAS II
5	Pagai Selatan	Kab. Kepulauan Mentawai	Rencana	KELAS III
6	Sinakak/Carocok	Kab. Kepulauan Mentawai	Rencana	KELAS III
7	Sikabaluan	Kab. Kepulauan Mentawai	Rencana	KELAS III
8	Sagitci	Kab. Kepulauan Mentawai	Rencana	KELAS III
4	**Kepulauan Riau**			
1	Tanjung Balai Karimun	Kab.Karimun	Operasi	KELAS I
2	Telaga Punggur	Kota Batam	Operasi	KELAS I
3	Tanjung Uban	Kab. Bintan	Operasi	KELAS I
4	Dabo/Jagoh	Kab. Lingga	Operasi	KELAS II
5	Dompak/Tanjung Pinang	Kabupaten Bintan	Operasi	KELAS II
6	Selat Belia	Kabupatek Karimun	Operasi	KELAS II
7	Pulau Lingga/Penarik	Kepulauan Riau/Kab. Lingga	Operasi	KELAS II
8	Matak	Kab. Anambas	Rencana	KELAS I
9	Selat Lampah / Penagi	Kab. Natuna	Rencana	KELAS I
10	Tambelan	Kab. Natuna	Rencana	KELAS I

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
11	Serasan	Kab. Natuna	Rencana	KELAS III
12	Tarempa	Kab. Natuna	Rencana	KELAS I
13	Sebangka	Kab. Lingga	Rencana	KELAS III
14	Pulau Letung	Kab. Natuna	Rencana	KELAS I
15	Sedanau	Kab. Natuna	Rencana	KELAS II
5	Riau			
1	Air Putih/Bengkalis	Kab. Bengkalis	Operasi	KELAS II
2	Mengkapan	Kab. Siak	Operasi	KELAS I
3	Rupat	Kab. Bengkalis	Operasi	KELAS II
4	Sei Selari	Kab. Siak	Operasi	KELAS II
5	Kampung Balak	Kab. Bengkalis	Operasi	KELAS I
6	Dumai	Kota Dumai	Operasi	KELAS I
7	Pecah Buyung	Kab. Bengkalis	Rencana	KELAS II
8	Pulau Padang	Kab. Bengkalis	Rencana	KELAS II
9	Sei Guntung	Kab. Siak	Rencana	KELAS II
10	Alai Insit	Kab. Siak	Rencana	KELAS II
11	Kuala Enok	Kab. Indragiri Hilir	Rencana	KELAS II
12	P. Burung	Kab. Indragiri Hilir	Rencana	KELAS III
13	Meranti Bunting	Kab. Kepulauan Meranti	Rencana	KELAS III
14	Pulau Merbau	Kab. Kepulauan Meranti	Rencana	KELAS III
15	Dakal	Kab. Kepulauan Meranti	Rencana	KELAS III
16	Ketam Putih	Kab.Bengkalis	Rencana	KELAS III
17	Tanjung Medang	Kab.Bengkalis	Rencana	KELAS III
6	Sumatera Selatan			
1	Tanjung Api-Api	Kab. Banyuasin	Operasi	KELAS I
7	Jambi			
1	Kuala Tungkal	Kab. Tanjung Jabung Barat	Operasi	KELAS I
2	Tanah Tumbuh	Kab. Bungo	Rencana	KELAS III
8	Bengkulu			
1	Pulau Baai	Kota Bengkulu	Operasi	KELAS I
2	Kahyapu	Kab. Bengkulu Utara	Operasi	KELAS III
3	Mukomuko	Kab. Mukomuko	Rencana	KELAS I
4	Linau	Kab.Kaur	Rencana	KELAS III
5	Ketahun	Kab. Bengkulu Utara	Rencana	KELAS III
6	Bado	Kab. Bengkulu Tengah	Rencana	KELAS III
9	Lampung			
1	Bakauheni	Kab.Lampung Selatan	Operasi	KELAS I
2	Ketapang (Lampung)	Kab.Lampung Selatan	Rencana	KELAS I
3	Tabuan	Kab. Lampung Selatan	Rencana	KELAS III
4	Madang	Kab. Tanggamus	Rencana	KELAS III
5	Pulau Sebesi	Kab. Lampung Selatan	Rencana	KELAS III
6	Canti	Kab. Lampung Selatan	Rencana	KELAS III
7	Teluk Betung	Kota Bandar Lampung	Rencana	KELAS II

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
10	Bangka Belitung			
1	Muntok/Tanjung Kalian	Kab. Bangka Selatan	Operasi	KELAS I
2	Sadai	Kab. Bangka Selatan	Operasi	KELAS I
3	Tanjung RU	Kab. Belitung	Operasi	KELAS I
4	Manggar	Kab. Belitung Timur	Operasi	KELAS I
5	Pulau Lepar	Kab. Bangka Selatan	Rencana	KELAS III
6	Mendanau	Kab. Belitung	Rencana	KELAS II
7	Sungai Selan	Kab. Bangka Tengah	Rencana	KELAS III
8	Pulau Besar	Kab. Bangka Tengah	Rencana	KELAS III
9	Tanjung Pura	Kab. Bangka Selatan	Rencana	KELAS III
10	Gersik	Kab. Belitung	Rencana	KELAS III
11	Tanjung Nyato	Kab. Belitung	Rencana	KELAS III
12	Teluk Gembira	Kab. Belitung	Rencana	KELAS III
13	Seliu	Kab. Belitung	Rencana	KELAS III
14	Belinyu	Kab. Bangka	Rencana	KELAS III
15	Tanjung Pandan	Kab. Belitung	Rencana	KELAS II
11	DKI Jakarta			
1	Pulau Tidung	Kab. Kepulauan Seribu	Rencana	KELAS III
2	Pulau Kelapa	Kab. Kepulauan Seribu	Rencana	KELAS III
3	Pulau Pramuka	Kab. Kepulauan Seribu	Rencana	KELAS III
4	Pulau Untung Jawa	Kab. Kepulauan Seribu	Rencana	KELAS III
5	Muara Angke	Kota Jakarta Utara	Rencana	KELAS II
12	Jawa Barat			
1	Majingklak	Pangandaran	Operasi	KELAS II
13	Jawa Tengah			
1	Kendal	Kab. Kendal	Operasi	KELAS I
2	Jepara	Kab. Jepara	Operasi	KELAS I
3	Karimun Jawa	Kab. Jepara	Operasi	KELAS III
4	Parang	Kab. Jepara	Rencana	KELAS III
5	Genting	Kab. Jepara	Rencana	KELAS III
6	Nyamuk	Kab. Jepara	Rencana	KELAS III
14	Jawa Timur			
1	Paciran	Kab. Lamongan	Operasi	KELAS I
2	Bawean	Kab. Gresik	Operasi	KELAS II
3	Kamal	Kab. Bangkalan	Operasi	KELAS I
4	Ujung	Kota Surabaya	Operasi	KELAS I
5	Kalianget	Kab. Sumenep	Operasi	KELAS III
6	Jangkar	Kab. Situbondo	Operasi	KELAS III
7	Sapeken	Kab. Sumenep	Operasi	KELAS III
8	Pulau Raas	Kab. Sumenep	Operasi	KELAS III
9	Kangean	Kab. Sumenep	Operasi	KELAS III
10	Sapudi	Kab. Sumenep	Operasi	KELAS III
11	Ketapang	Kab. Banyuwangi	Operasi	KELAS I
12	Gili Ketapang	Kab. Probolinggo	Rencana	KELAS III

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
13	Probolinggo	Kab. Probolinggo	Rencana	KELAS II
14	Pulau Poteran	Kab. Sumenep	Rencana	KELAS III
15	Pulau Masalembo	Kab. Sumenep	Rencana	KELAS III
16	Pulau Sepanjang	Kab. Sumenep	Rencana	KELAS III
15	Banten			
1	Merak	Kab. Serang	Operasi	KELAS I
2	Margagiri (Banten)	Kab. Serang	Rencana	KELAS I
16	Bali			
1	Gilimanuk	Kab. Jembrana	Operasi	KELAS I
2	Padang Bai	Kab. Karangasem	Operasi	KELAS I
3	Nusa Penida	Kab. Klungkung	Operasi	KELAS III
4	Gunaksa	Kab. Klungkung	Rencana	KELAS I
5	Singaraja	Kab. Buleleng	Rencana	KELAS II
17	NTB			
1	Lembar	Kab. Lombok Barat	Operasi	KELAS I
2	Kayangan	Kab. Lombok Timur	Operasi	KELAS I
3	Pototano	Kab. Sumbawa Barat	Operasi	KELAS I
4	Sape	Kab. Sumbawa Barat	Operasi	KELAS I
5	Sekotong	Kab. Lombok Barat	Rencana	KELAS II
6	Telong Elong	Kab. Lombok Timur	Rencana	KELAS II
7	Benete	Kab. Sumbawa Barat	Rencana	KELAS II
8	Senggigi	Kab. Lombok Barat	Rencana	KELAS II
9	Tawun	Kab. Lombok Barat	Rencana	KELAS II
10	Teluk Santong	Kab. Sumbawa	Rencana	KELAS II
11	Bima	Kab. Bima	Rencana	KELAS II
12	Calabai	Kab. Dompu	Rencana	KELAS II
13	Labuan Kenanga	Kab. Bima	Rencana	KELAS II
14	Empang	Kab. Sumbawa	Rencana	KELAS II
15	Waworoda	Kab. Bima	Rencana	KELAS II
16	Cempi	Kab. Dompu	Rencana	KELAS II
17	Pulau Moyo	Kab. Bima	Rencana	KELAS III
18	Lua Air	Kab. Bima	Rencana	KELAS III
18	NTT			
1	Waikelo	Kab. Sumba Barat Daya	Operasi	KELAS II
2	Labuan Bajo	Kab. Manggarai Barat	Operasi	KELAS I
3	Aimere	Kab. Ngada	Operasi	KELAS I
4	Waingapu	Kab. Sumba Timur	Operasi	KELAS II
5	Marapokot	Kab. Nagekeo	Operasi	KELAS I
6	Seba	Kab. Sabu Raijua	Operasi	KELAS I
7	Bolok	Kab. Kupang	Operasi	KELAS I
8	Kalabahi	Kab. Alor	Operasi	KELAS I
9	Teluk Gurita	Kab. Belu	Operasi	KELAS I
10	Hansisi	Kab. Kupang	Operasi	KELAS III
11	Adonara	Kab. Flores Timur	Operasi	KELAS II

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
12	Pulau Solor	Kab. Flores Timur	Operasi	KELAS II
13	Pantai Baru/Rote	Kab. Rote Ndao	Operasi	KELAS III
14	Ndao	Kab. Rote Ndao	Operasi	KELAS II
15	Kewapante	Kab. Sikka	Operasi	KELAS II
16	Pamana	Kab. Sikka	Operasi	KELAS II
17	Nangakeo	Kab. Ende	Operasi	KELAS II
18	Baranusa	Kab. Alor	Operasi	KELAS I
19	Waiwerang	Kab. Flores Timur	Operasi	KELAS I
20	Larantuka	Kab. Flores Timur	Operasi	KELAS I
21	Lewoleba	Kab. Lembata	Operasi	KELAS II
22	Raijua	Kab. Rote Ndao	Rencana	KELAS II
23	Waibalun	Kab. Flores Timur	Rencana	KELAS III
24	P. Ende	Kab. Ende	Rencana	KELAS II
25	Wairiang	Kab. Lembata	Rencana	KELAS III
26	Mulez	Kab. Manggarai Timur	Rencana	KELAS III
27	Waiwole	Kab. Manggarai Timur	Rencana	KELAS III
28	Terang	Kab. Manggarai Barat	Rencana	KELAS III
29	Iongos	Kab. Manggarai Barat	Rencana	KELAS III
30	Kadajoi	Kab. Sikka	Rencana	KELAS III
31	Sukun	Kab. Sikka	Rencana	KELAS III
32	Maritaing	Kab. Alor	Rencana	KELAS I
33	Bakalang	Kab. Alor	Rencana	KELAS II
34	Wini	Kab. Timor Tengah Utara	Rencana	KELAS II
35	Naikliu	Kab. Kupang	Rencana	KELAS II
36	Alumang	Kab. Alor	Rencana	KELAS III
19	KALIMANTAN BARAT			
1	Telok Kalong	Kab. Sambas	Operasi	KELAS II
2	Tanjung Harapan	Kab. Sambas	Operasi	KELAS II
3	Rasau Jaya	Kab. Kubu Raya	Operasi	KELAS I
4	Pinang Luar	Kab. Kubu Raya	Operasi	KELAS II
5	Teluk Batang	Kab. Kayong Utara	Operasi	KELAS III
6	Parit Sarem	Kab. Kubu Raya	Operasi	KELAS III
7	Sungai Nipah	Kab. Kubu Raya	Operasi	KELAS III
8	Ketapang	Kab. Ketapang	Operasi	KELAS I
9	Sintete	Kab. Sambas	Rencana	KELAS I
10	Pulau Maya	Kab. Kayong Utara	Rencana	KELAS II
11	Karimata	Kayong Utara	Rencana	KELAS III
12	Sedau Singkawang	Kota Singkawang	Rencana	KELAS II
13	Sekadau	Kab. Sekadau	Rencana	KELAS III
20	Kalimantan Tengah			
1	Kumai	Kab. Kota Waringin Barat	Operasi	KELAS I
2	Bahaur	Kab. Kapuas	Rencana	KELAS I
3	Jelapat	Kab. Barito Kuala	Rencana	KELAS II

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
21	Kalimantan Selatan			
1	Batulicin	Kab. Tanah Bumbu	Operasi	KELAS I
2	Tanjung Serdang	Kab. Kota Baru	Operasi	KELAS II
3	Pulau Laut Timur	Kab. Kota Baru	Operasi	KELAS II
4	Sebuku	Kab. Kota Baru	Rencana	KELAS II
5	Pandalaman	Kab. Kota Baru	Rencana	KELAS II
22	Kalimantan Timur			
1	Kariangau	Kota Balikpapan	Operasi	KELAS I
2	Penajam	Kab. Penajam Paser Utara	Operasi	KELAS I
3	Desa Sakka	Kab. Kutai Timur	Rencana	KELAS III
4	Tenggarong	Kab. Kutai Barat	Rencana	KELAS II
5	S. Meriam	Kab. Kutai Barat	Rencana	KELAS III
6	Handil II	Kab. Kutai Barat	Rencana	KELAS III
7	Gunung Tabur	Kab. Berau	Rencana	KELAS III
23	Kalimantan Utara			
1	Juwata Laut / Tarakan	KotaTarakan	Operasi	KELAS I
2	Ancam	Kota Tarakan	Operasi	KELAS II
3	Sebatik	Kab. Nunukan	Operasi	KELAS II
4	Simanggaris	Kab. Nunukan	Operasi	KELAS II
5	Sei Jepun	Kab. Nunukan	Rencana	KELAS II
6	Liang Bunyu	KotaTarakan	Rencana	KELAS II
7	Pulau Bunyu	Kab. Bulungan	Rencana	KELAS II
24	Sulawesi Utara			
1	Amurang	Kab. Minahasa Selatan	Operasi	KELAS I
2	Melonguane	Kab. Kep. Talaud	Operasi	KELAS II
3	Pananaru	Kab. Kep. Sangihe	Operasi	KELAS II
4	Marore	Kab. Kep. Sangihe	Operasi	KELAS III
5	Likupang	Kab. Minahasa Utara	Operasi	KELAS II
6	Bitung	Kota Bitung	Operasi	KELAS I
7	Siau	Kab. Kep. Sitaro	Operasi	KELAS II
8	Lembeh	Kota Bitung	Operasi	KELAS III
9	Biaro	Kab. Kep. Sitaro	Operasi	KELAS II
10	Tagulandang	Kab. Kep. Sitaro	Operasi	KELAS III
11	Musi	Kab. Kep. Talaud	Operasi	KELAS III
12	Marampit	Kab. Kep. Talaud	Operasi	KELAS III
13	Kabaruan	Kab. Kep. Talaud	Operasi	KELAS II
14	Miangas	Kab. Kep. Talaud	Rencana	KELAS I
15	Kawaluso	Kab. Kep. Sangihe	Rencana	KELAS III
16	Bunaken	Kota Manado	Rencana	KELAS III
17	Siladen	Kota Manado	Rencana	KELAS III
18	Talise	Kab. Minahasa Utara	Rencana	KELAS III
19	Manado Tua	Kota Manado	Rencana	KELAS III
20	Mangarang	Kab. Kep. Talaud	Rencana	KELAS III
21	Molibagu	Kab. Bolaang Mongindow Selatan	Rencana	KELAS II
22	Makalehi	Kab. Kep. Sitaro	Rencana	KELAS III

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
23	Buhias	Kab. Kep. Sitaro	Rencana	KELAS III
24	Ruang	Kab. Kep. Sitaro	Rencana	KELAS III
25	Pahepa	Kab. Kep. Sitaro	Rencana	KELAS III
26	Kawio	Kab. Kep. Talaud	Rencana	KELAS III
27	Lipang	Kab. Kep. Sangihe	Rencana	KELAS III
28	Para	Kab. Kep. Sangihe	Rencana	KELAS III
29	Kahakitang	Kab. Kep. Sangihe	Rencana	KELAS III
30	Mahangetang	Kab. Kep. Sangihe	Rencana	KELAS III
31	Kalama	Kab. Kep. Sangihe	Rencana	KELAS III
32	Peta	Kab. Kep. Sangihe	Rencana	KELAS III
33	Gemeh	Kab. Kep. Talaud	Rencana	KELAS III
34	Karatung	Kab. Kep. Talaud	Rencana	KELAS III
35	Kakorotan	Kab. Kep. Talaud	Rencana	KELAS III
36	Bangkurung	Kab. Kep. Sangihe	Rencana	KELAS III
37	Pulau Salebabu	Kab. Kep. Talaud	Rencana	KELAS III
25	**Gorontalo**			
1	Gorontalo	Gorontalo	Operasi	KELAS I
2	Marisa	Pahuwato	Operasi	KELAS I
3	Balantak	Gorontalo	Rencana	KELAS III
26	**Sulawesi Tengah**			
1	Tolitoli	Kab Tolitoli	Operasi	KELAS I
2	Taipa	Kota Palu	Operasi	KELAS I
3	Toboli	Kab Parigi Moutong	Operasi	KELAS II
4	Ampana	Kab Tojo Unauna	Operasi	KELAS I
5	Wakai	Kab Tojo Unauna	Operasi	KELAS III
6	Kolonedale	Kab Morowali	Operasi	KELAS II
7	Baturube	Kab Morowali	Operasi	KELAS II
8	Pagimana	Kab. Banggai	Operasi	KELAS I
9	Luwuk	Kab Banggai	Operasi	KELAS I
10	Banggai	Kab. Banggai Kepulauan	Operasi	KELAS I
11	Salakan	Kab Banggai Kepulauan	Operasi	KELAS I
12	Pasokan	Kab Tojo Unauna	Rencana	KELAS III
13	Boniton	Kab Banggai Kepulauan	Rencana	KELAS III
14	Pulau Unauna	Kab. Tojo Unauna	Rencana	KELAS III
15	Kebone	Kab Tojo Unauna	Rencana	KELAS III
16	Pulau Bangkurung	Kab. Banggai Kepulauan	Rencana	KELAS III
17	Sabang	Kab. Donggala	Rencana	KELAS III
18	Kabonga	Kab. Donggala	Rencana	KELAS III
19	Poso	Kab. Poso	Rencana	KELAS II
20	Menui	Kab. Poso	Rencana	KELAS III
21	Dolong	Kab. Tojo Unauna	Rencana	KELAS III
22	Lafeu	Kab. Morowari	Rencana	KELAS II
23	Balantak	Kab. Banggai	Rencana	KELAS II
24	Tobing	Kab. Banggai Kepulauan	Rencana	KELAS II

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
27	Sulawesi Selatan			
1	Garongkong	Kab. Barru	Operasi	KELAS I
2	Siwa	Kab. Siwa	Operasi	KELAS I
3	Bajo'e	Kab. Bone	Operasi	KELAS I
4	Bira	Kab. Bulukumba	Operasi	KELAS I
5	Pattumbukan	Kab. Selayar	Operasi	KELAS II
6	Pamatata	Kab. Selayar	Operasi	KELAS II
7	Timampu	Kab. Sidrap	Operasi	KELAS III
8	Beau	Kab. Sidrap	Rencana	KELAS III
9	Kayuadi	Kab. Selayar	Rencana	KELAS III
10	Bonerate	Kab. Selayar	Rencana	KELAS III
11	Kalatoa	Kab. Selayar	Rencana	KELAS III
12	Munte	Kab. Luwu Utara	Rencana	KELAS III
13	Sinjai/Pasimaranu	Kota Sinjai	Rencana	KELAS III
14	Gangga	Kab. Gowa	Rencana	KELAS III
15	Takalar	Kab. Takalar	Rencana	KELAS III
16	Jampea	Kab. Selayar	Rencana	KELAS III
28	Sulawesi Barat			
1	Mamuju	Kab. Mamuju	Operasi	KELAS I
2	Pasangkayu	Kab. Mamuju Utara	Rencana	KELAS II
3	Balabalakang	Kab. Mamuju	Rencana	KELAS II
29	Sulawesi Tenggara			
1	Lasusua	Kab. Kolaka Utara	Operasi	KELAS I
2	Kolaka	Kab. Kolaka	Operasi	KELAS I
3	Lenggara	Kab. Kendari	Operasi	KELAS II
4	Kendari	Kota Kendari	Operasi	KELAS II
5	Torobulu	Kab. Konawe Selatan	Operasi	KELAS II
6	Wawonii	Kab. Konawe Kepulauan	Operasi	KELAS II
7	Tolandona	Kab. Buton	Operasi	KELAS II
8	Dongkala	Kab. Bombana	Operasi	KELAS II
9	Tondasi	Kab. Muna	Operasi	KELAS II
10	Baubau	Kota Baubau	Operasi	KELAS II
11	Tampo	Kab. Muna	Operasi	KELAS II
12	Waara	Kab. Buton Tengah	Operasi	KELAS II
13	Mawasangka	Kab. Buton Tengah	Operasi	KELAS II
14	Kamaru	Kab. Buton	Operasi	KELAS II
15	Amalengo	Kab. Konawe Selatan	Operasi	KELAS II
16	Labuan	Kab. Buton	Operasi	KELAS II
17	Wanci	Kab. Wakatobi	Rencana	KELAS II
18	Sikeli	Sulawesi Tenggara/Bombana	Rencana	KELAS II
19	Bambea/Bombana	Kab. Bombana	Rencana	KELAS II
20	Raha	Kab. Muna	Rencana	KELAS II
21	Pure	Kab. Muna	Rencana	KELAS II
22	Siompu	Kab. Buton Selatan	Rencana	KELAS II
23	Kasipute	Kab. Bombana	Rencana	KELAS II
24	Konawe Utara	Kab. Konawe Utara	Rencana	KELAS II

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
25	Kaledupa	Kab. Wakatobi	Rencana	KELAS II
26	Tomia/Tomea	Kab. Wakatobi	Rencana	KELAS II
27	Binongko	Kab. Wakatobi	Rencana	KELAS II
28	P. Siompu	Kab. Buton Selatan	Rencana	KELAS III
29	P. Batu Atas	Kab. Buton Tengah	Rencana	KELAS III
30	P. Kadatua	Kab. Buton Selatan	Rencana	KELAS III
31	P. Talaga	Kab. Buton Tengah	Rencana	KELAS III
32	P. Gala	Kab. Muna Barat	Rencana	KELAS III
33	P. Katela	Kab. Muna Barat	Rencana	KELAS III
34	Laonti	Kab. Konawe Selatan	Rencana	KELAS II
35	Liana Banggai	Buton Barat	Rencana	KELAS II
30	Maluku			
1	Namlea	Kab. Buru	Operasi	KELAS I
2	Ambalau	Kab. Buru Selatan	Operasi	KELAS II
3	Teluk Bara	Kab. Buru	Operasi	KELAS I
4	Galala	Kota Ambon	Operasi	KELAS II
5	Poka	Kota Ambon	Operasi	KELAS II
6	Geser	Kab. Seram Bagian Timur	Operasi	KELAS I
7	Waipirit	Kab. Seram Bangian Barat	Operasi	KELAS I
8	Waisala	Kab. Seram Bagian Barat	Operasi	KELAS II
9	Wahai	Kab. Maluku Tengah	Operasi	KELAS I
10	Hunimua	Kab. Maluku Tengah	Operasi	KELAS I
11	Waeriang	Kab. Maluku Tengah	Operasi	KELAS II
12	Saparua	Kab. Maluku Tengah	Operasi	KELAS II
13	Jazirah Salahutu	Kab. Maluku Tengah	Operasi	KELAS II
14	Letwurung	Kab. Maluku Barat Daya	Operasi	KELAS I
15	Lakor	Kab. Maluku Barat Daya	Operasi	KELAS I
16	Kisar	Kab. Maluku Barat Daya	Operasi	KELAS I
17	Ilwaki	Kab. Maluku Barat Daya	Operasi	KELAS I
18	Haruku	Kab. Maluku Tengah	Operasi	KELAS I
19	Tepa	Kab. Maluku Barat Daya	Operasi	KELAS I
20	Nusa Laut	Kab. Maluku Tengah	Operasi	KELAS II
21	Larat	Kab. Maluku Tenggara Barat	Operasi	KELAS I
22	Saumlaki	Kab. Maluku Tenggara Barat	Operasi	KELAS I
23	Pulau Tayandu	Kota Tual	Operasi	KELAS I
24	Tual	Kota Tual	Operasi	KELAS I
25	Dobo	Kab. Aru	Operasi	KELAS I
26	Benjina	Kab. Aru	Operasi	KELAS I
27	Lamerang	Kab. Aru	Operasi	KELAS III
28	Aimanang	Kab. Seram Bagian Timur	Operasi	KELAS I
29	Amahai	Kab. Seram Bagian Timur	Operasi	KELAS II
30	Gorom	Kab. Seram Bagian Timur	Operasi	KELAS I
31	Tior	Kab. Seram Bagian Timur	Rencana	KELAS II
32	Kesui	Kab. Seram Bagian Timur	Rencana	KELAS III
33	Wailey	Kab. Seram Bagian Barat	Rencana	KELAS II
34	Waai	Kab. Maluku Tengah	Rencana	KELAS II
35	Umeputi	Kab. Maluku Tengah	Rencana	KELAS II

No	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
36	Nalahia	Kab. Maluku Tengah	Rencana	KELAS III
37	Tulehu	Kota Ambon	Rencana	KELAS II
38	Ilath	Kab. Buru	Rencana	KELAS III
39	Ambalau	Kab. Buru Selatan	Rencana	KELAS III
40	Namrole	Kab. Buru Selatan	Rencana	KELAS III
41	Inamarina	Kab. Maluku Tengah	Rencana	KELAS III
42	Tehoru	Kab. Maluku Tengah	Rencana	KELAS II
43	Banda	Kab. Maluku Tengah	Rencana	KELAS II
44	Leihitu	Kab. Maluku Tengah	Rencana	KELAS II
45	Faan	Kab. Maluku Tenggara	Rencana	KELAS II
46	Pulau Sermata	Kab. Maluku Barat Daya	Rencana	KELAS I
47	Serwaru	Kab. Maluku Barat Daya	Rencana	KELAS I
48	Leti	Kab. Maluku Barat Daya	Rencana	KELAS I
49	Moa	Kab. Maluku Barat Daya	Rencana	KELAS I
50	Damer	Kab. Maluku Barat Daya	Rencana	KELAS III
51	Pulau Lirang	Maluku Barat Daya	Rencana	KELAS III
52	Elat	Kab. Maluku Tenggara Barat	Rencana	KELAS II
53	Sera	Kab. Maluku Tenggara Barat	Rencana	KELAS II
54	Yaru	Kab. Maluku Tenggara Barat	Rencana	KELAS III
55	Wunlah	Kab. Maluku Tenggara Barat	Rencana	KELAS III
56	Seira	Kab. Maluku Tenggara Barat	Rencana	KELAS III
57	Adaut	Kab. Maluku Tenggara Barat	Rencana	KELAS II
58	Ohoiraut	Kab. Maluku Tenggara	Rencana	KELAS III
59	Pulau Kur	Kota Tual	Rencana	KELAS I
60	Kur	Kota Tual	Rencana	KELAS III
61	Teor	Kota Tual	Rencana	KELAS III
62	Batu Goyang	Kab. Aru	Rencana	KELAS III
63	Meror	Kab. Aru	Rencana	KELAS III
64	Tabarfane	Kab. Kep. Aru	Rencana	KELAS III
65	Wokam	Kab. Kep Aru	Rencana	KELAS III
66	Luhu	Kab. Seram Barat	Rencana	KELAS III
31	Maluku Utara			
1	Tobelo	Kab. Halmahera Utara	Operasi	KELAS II
2	Doro Kao	Kab. Halmahera Utara	Operasi	KELAS II
3	Daruba	Kab. Pulau Morotai	Operasi	KELAS II
4	Bastiong	Kota Ternate	Operasi	KELAS I
5	Kayoa	Kab. Halmahera Selatan	Operasi	KELAS II
6	Makian	Kab. Halmahera Selatan	Operasi	KELAS II
7	Saketa	Kab. Halmahera Selatan	Operasi	KELAS II
8	Babang	Kab. Halmahera Selatan	Operasi	KELAS I
9	Patani	Kab. Halmahera Tengah	Operasi	KELAS I
10	Gebe	Kab. Halmahera Tengah	Operasi	KELAS I
11	Sidangole	Kab. Halmahera Tengah	Operasi	KELAS II
12	Rum	Kab. Tidore Kepulauan	Operasi	KELAS II
13	Sofifi	Kab. Tidore Kepulauan	Operasi	KELAS I
14	Subaim	Kab. Halmahera Timur	Operasi	KELAS II
15	Mangole	Kab. Tidore Kepulauan	Operasi	KELAS I

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
16	Sanana	Kab.Kepulauan Sula	Operasi	KELAS I
17	Obi	Kab. Kepulauan Obi	Operasi	KELAS II
18	Batang Dua	Kab. Sula	Operasi	KELAS II
19	Bobong	Kab. Sula	Operasi	KELAS II
20	Moti	Kota Ternate	Rencana	KELAS II
21	Pulau Kasiruta	Kab. Halmahera Tengah	Rencana	KELAS III
22	Pulau Mandioli	Kab. Halmahera Tengah	Rencana	KELAS III
23	Weda	Kab. Halmahera Tengah	Rencana	KELAS III
24	Morotai	Kab. Pulau Morotai	Rencana	KELAS II
32	Papua			
1	Mokmer	Kab. Biak Numfor	Operasi	KELAS I
2	Kabuena	Kab. Kep. Yapen	Operasi	KELAS I
3	Samabusa/Nabire	Kab. Nabire	Operasi	KELAS I
4	Pomako	Kab. Mimika	Operasi	KELAS I
5	Kelapalima Merauke	Kota Merauke	Operasi	KELAS I
6	Waren	Kab. Waropen	Rencana	KELAS I
7	Saubeba	Kab. Kep. Yapen	Rencana	KELAS II
8	Agats	Kab. Asmat	Rencana	KELAS I
9	Sawai	Kab. Sarmi	Rencana	KELAS I
10	Mamberamo	Kab. Mamberamo Raya	Rencana	KELAS II
11	Bade	Kab. Mappi	Rencana	KELAS I
12	Kepi	Kab. Mappi	Rencana	KELAS I
13	Kaonda	Kab. Kep. Yapen	Rencana	KELAS II
14	Numfor	Kab. Biak Numfor	Rencana	KELAS II
15	Kimaam	Kab. Merauke	Rencana	KELAS I
33	Papua Barat			
1	Waigeo (Raja Ampat)	Kab. Raja Ampat	Operasi	KELAS I
2	Klademak	Kota Sorong	Operasi	KELAS II
3	Arar (sorong)	Kab. Sorong	Operasi	KELAS I
4	Manokwari	Kab. Manokwari	Operasi	KELAS I
5	Fak-Fak	Kab. Fak-fak	Operasi	KELAS I
6	Foley	Kab. Raja Ampat	Rencana	KELAS II
7	Wasior	Kab. Teluk Wondana	Rencana	KELAS II
8	Salawati	Kab. Raja Ampat	Rencana	KELAS III
9	Batanta	Kab. Raja Ampat	Rencana	KELAS II
10	Kaimana	Kab. Kaimana	Rencana	KELAS I
11	Inanwatan	Kab. Sorong selatan	Rencana	KELAS II
12	Aranday	Kab. Teluk Bintuni	Rencana	KELAS II
13	Kokas	Kab. Fak-fak	Rencana	KELAS II

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
24	Lengguru	rencana	Pengumpan
25	Minamo	rencana	Pengumpan
26	Dermaga Danau Anggi Gidi	rencana	Pengumpan
27	Dermaga Danau Anggi Gida	rencana	Pengumpan
28	Dermaga Danau Uter	rencana	Pengumpan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
52	Banamepe	operasi	Pengumpan
53	Bayun	operasi	Pengumpan
54	Kamur	operasi	Pengumpan
55	Boven Digul	rencana	Pengumpul
56	Dermaga Danau Sentani	operasi	Pengumpan
57	Dermaga Danau Rombebai	operasi	Pengumpan
58	Dermaga Danau Biru	rencana	Pengumpan
59	Dermaga Danau Paniai	operasi	Pengumpan
60	Dermaga Danau Ti Bi	rencana	Pengumpan
61	Dermaga Danau Tonjida	rencana	Pengumpan
62	Dermaga Danau Yamur	rencana	Pengumpan
63	Dermaga Danau Yamasi	rencana	Pengumpan
27	Papua Barat		
1	Sorong	operasi	Pengumpul
2	Segun	rencana	Pengumpan
3	Maldan	rencana	Pengumpan
4	Fak-fak	operasi	Pengumpan
5	Inanwatan	operasi	Pengumpan
6	Yahadian	rencana	Pengumpan
7	Puragi	rencana	Pengumpan
8	Matemani Kais	rencana	Pengumpan
9	Sungai Kasuweri	rencana	Pengumpan
10	Kalitami	rencana	Pengumpan
11	Wunini	rencana	Pengumpan
12	Aranday	rencana	Pengumpan
13	Tembuni	rencana	Pengumpan
14	Tafereh	rencana	Pengumpan
15	Bintuni	rencana	Pengumpan
16	Babo	operasi	Pengumpan
17	Aroba	rencana	Pengumpan
18	Kambrau	rencana	Pengumpan
19	Arguni Bawah	rencana	Pengumpan
20	Kaimana	rencana	Pengumpan
21	Sokuwa	rencana	Pengumpan
22	Tobu-tobu	rencana	Pengumpan
23	Kaimana	rencana	Pengumpan

SUB LAMPIRAN A6
PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
1	Aceh		
1	Dermaga Danau Laut Tawar	rencana	Pengumpan
2	Dermaga Danau Laut Realoih	rencana	Pengumpan
3	Dermaga Danau Aneuk Laot	rencana	Pengumpan
2	Sumatera Utara		
1	Dermaga Haranggaol	operasi	Pengumpan
2	Dermaga Tiga Ras	operasi	Pengumpan
3	Dermaga Tiga Raja	operasi	Pengumpan
4	Dermaga Aji Bata	operasi	Pengumpan
5	Dermaga Ferry Aji Bata	operasi	Pengumpan
6	Dermaga Balige	operasi	Pengumpan
7	Dermaga KM Putih Muara I	operasi	Pengumpan
8	Dermaga Swasta P. Sibandang	operasi	Pengumpan
9	Dermaga P. Sibandang	operasi	Pengumpan
10	Dermaga Muara	operasi	Pengumpan
11	Dermaga Simangu Lape	operasi	Pengumpan
12	Dermaga Onan Labu	operasi	Pengumpan
13	Dermaga Marbun Taruan	operasi	Pengumpan
14	Dermaga Tipang	operasi	Pengumpan
15	Dermaga Onan Baru	operasi	Pengumpan
16	Dermaga Mogang	operasi	Pengumpan
17	Dermaga Nainggolan	operasi	Pengumpan
18	Dermaga Sipinggan	operasi	Pengumpan
19	Dermaga Sitinjak	operasi	Pengumpan
20	Dermaga Onan Runggu	operasi	Pengumpan
21	Dermaga Sitamiang	operasi	Pengumpan
22	Dermaga Wisata Onan Runggu	operasi	Pengumpan
23	Dermaga Lagundi	operasi	Pengumpan
24	Dermaga Pardamuan Lottung	operasi	Pengumpan
25	Dermaga Lapo Parindo	operasi	Pengumpan
26	Dermaga Wisata Tomok	operasi	Pengumpan
27	Dermaga Sumber Sari	operasi	Pengumpan
28	Dermaga Ferry Tomok	operasi	Pengumpan
29	Dermaga Wisata Tuktuk	operasi	Pengumpan
30	Dermaga Simanindo	operasi	Pengumpan
31	Dermaga Parbaba	operasi	Pengumpan
32	Dermaga Aek Rangat	operasi	Pengumpan
33	Dermaga Silalahi	operasi	Pengumpan
34	Dermaga Tangging	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
35	Dermaga Siallogan	operasi	Pengumpan
36	Dermaga Pantai Indah Situngkir	operasi	Pengumpan
3	Sumatera Barat		
1	Dermaga Danau Maninjau	operasi	Pengumpan
2	Dermaga Danau Diatas	operasi	Pengumpan
3	Dermaga Danau Singkarak	operasi	Pengumpan
4	Dermaga Danau Kerinci	operasi	Pengumpan
5	Dermaga Danau Dibawah	operasi	Pengumpan
4	Riau		
1	Dumai	operasi	Pengumpan
2	Kepenuhan	rencana	Pengumpan
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	operasi	Pengumpan
4	Bonai Darussalam	rencana	Pengumpan
5	Kunto Darussalam	rencana	Pengumpan
6	Rokan IV Koto	operasi	Pengumpan
7	Parawang	rencana	Pengumpan
8	Pekalar	rencana	Pengumpan
9	Siak Kecil	rencana	Pengumpan
10	Sungai Mandau	operasi	Pengumpan
11	Mandau	operasi	Pengumpan
12	Pekanbaru	operasi	Pengumpul
13	Teluk Dalam	operasi	Pengumpan
14	Pangkalan Kerinci	operasi	Pengumpan
15	Langgam	operasi	Pengumpan
16	Kampar Kiri Hulu	operasi	Pengumpan
17	Teratahbulah	rencana	Pengumpan
18	Bangkinang	rencana	Pengumpan
19	Tembilahan	operasi	Pengumpul
20	Kuala Gaung	operasi	Pengumpan
21	Lahang Tengah	rencana	Pengumpan
22	Simpang Gaung	rencana	Pengumpan
23	Pulau Pisang	rencana	Pengumpan
24	Sungai Guntung	operasi	Pengumpan
25	Rantau Panjang	rencana	Pengumpan
26	Rotan Semulu	rencana	Pengumpan
27	Teluk Sebah	rencana	Pengumpan
28	Teluk Kinai	rencana	Pengumpan
29	Teluk Kiambang	operasi	Pengumpan
30	Rengat	operasi	Pengumpan
31	Teluk Kuantan	rencana	Pengumpan
32	Cerenti	rencana	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
33	Peranap	rencana	Pengumpan
34	Muara Petai	rencana	Pengumpan
35	Tanjung Pasir	operasi	Pengumpan
36	Kuala Enok	operasi	Pengumpan
37	Sungai Udang	rencana	Pengumpan
38	Pulau Kijang	operasi	Pengumpan
39	Keritang	operasi	Pengumpan
40	Kuala Cenaku	operasi	Pengumpan
41	Pangkalansai	rencana	Pengumpan
42	Batang Cenaku	rencana	Pengumpan
43	Teluk Lancang	operasi	Pengumpan
44	Buatan	operasi	Pengumpan
45	Rimbapandan	rencana	Pengumpan
46	Siak Sri Indrapura	rencana	Pengumpan
47	Sabak Auh	rencana	Pengumpan
48	Sungai Apit	operasi	Pengumpan
49	Merbau	operasi	Pengumpan
50	Tebing Tinggi	operasi	Pengumpan
5	Sumatera Selatan		
1	16 Ilir	operasi	Pengumpul
2	Sei Lais	operasi	Pengumpan
3	Api-Api	operasi	Pengumpan
4	Upang	operasi	Pengumpan
5	Makarti Jaya	operasi	Pengumpan
6	Muara Telang	rencana	Pengumpan
7	Upang bagian hilir	operasi	Pengumpan
8	Merah Mata	operasi	Pengumpan
9	Mukti Jaya	rencana	Pengumpan
10	Gasing	rencana	Pengumpan
11	Tanjung Lago	rencana	Pengumpul
12	Sebalik	rencana	Pengumpan
13	Sri Menanti	operasi	Pengumpan
14	Karangbaru	operasi	Pengumpan
15	Simpang PU	operasi	Pengumpan
16	Sungsang I	operasi	Pengumpan
17	Bayung Lencir	operasi	Pengumpan
18	Karang Agung	operasi	Pengumpan
19	Sungai Lilin	operasi	Pengumpan
20	Kuala Puntian	operasi	Pengumpan
21	Penuguan	operasi	Pengumpan
22	Teluk Betung	operasi	Pengumpan
23	Suka Damai	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
24	Salek Mukti	operasi	Pengumpan
25	Muara Padang	operasi	Pengumpan
26	Cinta Manis	operasi	Pengumpan
27	Desa Kanal Sugihan	operasi	Pengumpan
28	Muara Sugihan	operasi	Pengumpan
29	Desa di sungai Batang	operasi	Pengumpan
30	Rambutan	operasi	Pengumpan
31	Tulung Selapan	operasi	Pengumpan
32	Desa Sungai Pasir	rencana	Pengumpan
33	Desa Jeruju	operasi	Pengumpan
34	Sungai Lumpur	rencana	Pengumpan
35	Lebung Itam	rencana	Pengumpan
36	Desa Pidada	operasi	Pengumpan
37	Cengal	operasi	Pengumpan
38	Pagar Dewa (Sumsel)	operasi	Pengumpan
39	Sungai Menang	rencana	Pengumpan
40	Pedamaran Timur	operasi	Pengumpan
41	Lempuing Jaya	operasi	Pengumpan
42	Mesuji Raya	operasi	Pengumpan
43	Wiralaga	operasi	Pengumpan
44	Sungai Sidang	rencana	Pengumpan
45	desa kawasan pesisir	operasi	Pengumpan
46	Jaka Baring	operasi	Pengumpan
47	Kayu Agung	operasi	Pengumpan
48	Madang Suku II	rencana	Pengumpan
49	Jejawi	rencana	Pengumpan
50	Sirah Pulau Padang	rencana	Pengumpan
51	Pampangan	operasi	Pengumpan
52	Pangkalan Lapam	rencana	Pengumpan
53	Cempaka	rencana	Pengumpan
54	Semendawai Barat	rencana	Pengumpan
55	Buay Pemuka Peliung	rencana	Pengumpan
56	Martapura	operasi	Pengumpan
57	Muaradua	operasi	Pengumpan
58	Indralaya Utara	operasi	Pengumpan
59	Beringin	rencana	Pengumpan
60	Indralaya	rencana	Pengumpan
61	Peninjauan	rencana	Pengumpan
62	Pemulutan Barat	operasi	Pengumpan
63	Pemulutan	rencana	Pengumpan
64	Tanjung Batu	rencana	Pengumpan
65	Pemulutan Selatan	operasi	Pengumpan
66	Tanjung Raja	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
67	Kandis	rencana	Pengumpan
68	Rantau Alai	rencana	Pengumpan
69	Lubuk Keliat	rencana	Pengumpan
70	Muara Kuang	operasi	Pengumpan
71	Penghumbuk	operasi	Pengumpan
72	Penukal Utara	rencana	Pengumpan
73	Muara Belida	rencana	Pengumpan
74	Sungai Rotan	operasi	Pengumpan
75	Tebat Agung	rencana	Pengumpan
76	Muara Enim	operasi	Pengumpan
77	Merapi Barat	rencana	Pengumpan
78	Tangga Buntung	operasi	Pengumpan
79	Pangkalan Bulian	operasi	Pengumpan
80	Tanah Abang	operasi	Pengumpan
81	Teluk Bintal	rencana	Pengumpan
82	Sukasuban	operasi	Pengumpan
83	Teluk Kijing	rencana	Pengumpan
84	Sekayu	rencana	Pengumpul
85	Babat	operasi	Pengumpan
86	Muara Rupit	operasi	Pengumpan
87	Muara Rawas (Sangadesa)	rencana	Pengumpan
88	Bingin Teluk	operasi	Pengumpan
89	Rawas Ulu	operasi	Pengumpan
90	Karang Jaya	operasi	Pengumpan
91	Muara Kelingi	operasi	Pengumpan
92	Bulan Tengah Suku Ulu	operasi	Pengumpan
93	Muara Beliti	operasi	Pengumpan
94	Muara Lakitan	operasi	Pengumpan
95	Jarai	rencana	Pengumpan
96	Banding Agung	rencana	Pengumpan
97	Kota Batu	operasi	Pengumpan
98	Pariwisata Air Panas	operasi	Pengumpan
99	Dermaga Danau Teloko	rencana	Pengumpan
100	Dermaga Danau Ranau Sumsel	rencana	Pengumpan
101	Dermaga Danau Matana	rencana	Pengumpan
102	Dermaga Danau Jembawan	rencana	Pengumpan
103	Dermaga Danau Air Hitam	rencana	Pengumpan
6	Jambi		
1	Muara Tembesi	rencana	Pengumpan
2	Muara Tebo	rencana	Pengumpan
3	Muara Sabak	operasi	Pengumpan
4	Nipah Panjang	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
6	Jambi	operasi	Pengumpan
7	Muara Bulian	operasi	Pengumpul
8	Pauh	operasi	Pengumpan
9	Sarolangun	operasi	Pengumpan
10	Kuala Tungkal	operasi	Pengumpan
11	Mendahara	rencana	Pengumpan
12	Dermaga Danau Dacampat	rencana	Pengumpan
13	Dermaga Danau Sipin	rencana	Pengumpan
7	Bengkulu		
1	Dermaga Danau Tes	rencana	Pengumpan
2	Dermaga Danau Emas	rencana	Pengumpan
3	Dermaga Danau Dendam Tak Sudah	rencana	Pengumpan
8	Lampung		
1	Wiralaga	operasi	pengumpul
2	Mesuji Timur	operasi	pengumpan
3	Sungai Sidang	operasi	pengumpan
4	Pagar Dewa	operasi	pengumpan
5	Menggala	rencana	pengumpul
6	Gedung Aji	rencana	pengumpan
7	Rawajitu	rencana	pengumpan
8	Bahuga	rencana	pengumpan
9	Tulang Bawang	rencana	pengumpul
10	Kuala	rencana	pengumpan
11	Dermaga Lombok	operasi	pengumpan
12	Sekau	operasi	pengumpan
13	Dermaga Danau Ranau Lampung	operasi	pengumpan
14	Dermaga Danau Jepara	rencana	pengumpan
15	Dermaga Waduk Way Ralem	rencana	pengumpan
16	Heniarong	rencana	pengumpan
17	Sukabanjar	rencana	pengumpan
18	Kota Agung	rencana	pengumpan
9	DKI Jakarta		
1	Penjaringan	rencana	pengumpan
2	Tambora	rencana	pengumpan
3	Palmerah	rencana	pengumpan
4	Tanah Abang	rencana	pengumpan
5	Cilincing	rencana	pengumpan
6	Cakung	rencana	pengumpul
7	Cengkareng	rencana	pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
10	Jawa Barat		
1	Cilamaya Kulon	rencana	pengumpan
2	Patok Beusi	rencana	pengumpan
3	Sagalaherang	rencana	pengumpan
4	Muaragembong	operasi	pengumpul
5	Muara Bendera	operasi	pengumpan
6	Citarum Hilir	rencana	pengumpan
7	Jatiluhur	operasi	pengumpul
8	Tegalbuleud	operasi	pengumpan
9	Sindangkerta	rencana	pengumpan
10	Cibeber	rencana	pengumpan
11	Bojongpicung	rencana	pengumpan
12	Sukaluyu	rencana	pengumpan
13	Ciranjang	rencana	pengumpan
14	Saguling	operasi	pengumpan
15	Cihampelas	operasi	pengumpul
16	Batujajar	rencana	pengumpan
17	Ibun	operasi	pengumpan
18	Sindang	rencana	pengumpan
19	Lohbener	rencana	pengumpan
20	Jatibarang	rencana	pengumpan
21	Widasari	rencana	pengumpan
22	Kertasemaya	rencana	pengumpan
23	Bangodua	rencana	pengumpan
24	Losari	rencana	pengumpan
25	Ciledug	rencana	pengumpan
26	Waled	rencana	pengumpan
27	Cidahu	rencana	pengumpan
28	Astanajapura	rencana	pengumpan
29	Lemahabang	rencana	pengumpan
30	Gunung Sembung	rencana	pengumpan
31	Tomo	rencana	pengumpan
32	Panyingkiran	rencana	pengumpan
33	Jatigede	rencana	pengumpan
34	Losarang	rencana	Kawio
35	Cikedung	rencana	pengumpan
36	Kalipucang	operasi	pengumpul
37	Padaherang	rencana	pengumpan
38	Lakbok	operasi	pengumpan
39	Langensari	operasi	pengumpan
40	Purwaharja	rencana	pengumpan
41	Pataruman	operasi	pengumpan
42	Cijulang	rencana	pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
43	Parigi	rencana	pengumpan
44	Cisewu	rencana	pengumpan
45	Cidaun	rencana	pengumpan
46	Talegong	rencana	pengumpan
47	Naringgul	rencana	pengumpan
48	Warungkiara	rencana	pengumpan
49	Cikembar	rencana	pengumpan
50	Nyalindung	rencana	pengumpan
51	Gegerbitung	rencana	pengumpan
52	Sindangbarang	rencana	pengumpan
53	Cibinong	rencana	pengumpan
11	Jawa Tengah		
1	Lohmanis	operasi	pengumpul
2	Wijayapura	operasi	pengumpan
3	Sodong	operasi	pengumpan
4	Prenca	operasi	pengumpan
5	Alas Malang	operasi	pengumpan
6	Jojok	operasi	pengumpan
7	Pekuyan	operasi	pengumpan
8	Cigintung	rencana	pengumpan
9	Motehan	operasi	pengumpan
10	Klaces	operasi	pengumpan
11	Donan	operasi	pengumpan
12	Wadaslintang	operasi	pengumpul
13	Wuryantoro	rencana	pengumpan
14	Wonogiri	rencana	pengumpan
15	Baturetno	rencana	pengumpan
16	Eromoko	rencana	pengumpan
17	Giriwoyo	rencana	pengumpan
18	Selogiri	rencana	pengumpan
19	Karangdowo	rencana	pengumpan
20	Tangen	operasi	pengumpan
21	Miri	operasi	pengumpan
22	Sumberlawang	operasi	pengumpan
23	Garung	operasi	pengumpan
24	Kejajaringan	rencana	pengumpan
25	Mojotengah	rencana	pengumpan
26	Seleko	rencana	pengumpan
12	D.I Yogyakarta		
1	Dermaga Waduk Sermo	rencana	pengumpan
2	Kokap	rencana	pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
13	Jawa Timur		
1	Krain	rencana	pengumpan
2	Porong	rencana	pengumpan
3	Bangsal	rencana	pengumpan
4	Mojosari	rencana	pengumpan
5	Pungging	rencana	pengumpan
6	Ngoro	rencana	pengumpan
7	Ngraho	rencana	pengumpan
8	Bojonegoro	rencana	pengumpul
9	Kepanjen	operasi	pengumpan
10	Pakisaji	operasi	pengumpan
11	Bululawang	operasi	pengumpan
12	Kanigoro	operasi	pengumpan
13	Binangun	operasi	pengumpan
14	Gedeg	operasi	pengumpan
15	Jetis	operasi	pengumpul
16	Sumberpucung	rencana	pengumpan
17	Karangkates	rencana	pengumpan
14	Banten		
1	Panimbang	rencana	pengumpan
2	Bojongmanik	rencana	pengumpan
3	Pontang	rencana	pengumpan
4	Tirtayasa	rencana	pengumpan
5	Carenang	rencana	pengumpan
6	Kragian	rencana	pengumpan
7	Cikande	rencana	pengumpan
8	Kasemen	rencana	pengumpan
9	Cihara	rencana	pengumpan
10	Pakuhaji	rencana	pengumpan
11	Sepetan	rencana	pengumpan
15	Bali		
1	Dermaga Danau Bratan	operasi	pengumpan
2	Dermaga Danau Tamblingan	operasi	pengumpan
3	Dermaga Danau Buyan	operasi	pengumpan
4	Dermaga Wisata Danau Bedugul	operasi	pengumpan
5	Dermaga Danau Desa Kedisan	operasi	pengumpan
6	Dermaga Danau Trunyan	operasi	pengumpan
7	Dermaga Danau Kuburan Trunyan	operasi	pengumpan
8	Dermaga Danau Toyabungkah	operasi	pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
16	KALIMANTAN BARAT		
1	Putussibau	operasi	Pengumpul
2	Tayan Hilir	rencana	Pengumpan
3	Sanggau	operasi	Pengumpul
4	Entikong	operasi	Pengumpan
5	Belitang	rencana	Pengumpan
6	Belitang Hulu	rencana	Pengumpan
7	Ketungau Hilir	rencana	Pengumpan
8	Ketungau Tengah	rencana	Pengumpan
9	Ketungau Hulu	rencana	Pengumpan
10	Silat Hilir	operasi	Pengumpan
11	Silat Hulu	operasi	Pengumpan
12	Selimbau	operasi	Pengumpan
13	Batang Lupar	operasi	Pengumpan
14	Sintang	operasi	Pengumpul
15	Nanga Pinoh	operasi	Pengumpan
16	Putussibau Utara	rencana	Pengumpan
17	Sekadau	operasi	Pengumpan
18	Nanga Mahap	rencana	Pengumpan
19	Dedai	operasi	Pengumpan
20	Ambalau	operasi	Pengumpan
21	Bunut Hilir	operasi	Pengumpan
22	Embaluh Hilir	rencana	Pengumpan
23	Kuala Kerlau	rencana	Pengumpan
24	Ngabang	operasi	Pengumpan
25	Air Besar	rencana	Pengumpan
26	Rasau Jaya	operasi	Pengumpan
27	Pontianak	operasi	Pengumpul
28	Batu Ampar	operasi	Pengumpan
29	Kubu	operasi	Pengumpan
30	Sungai Kakap	operasi	Pengumpan
31	Terentang	operasi	Pengumpan
32	Pemangkat	rencana	Pengumpan
33	Tanjung Harapan	rencana	Pengumpul
34	Sekura	operasi	Pengumpan
35	Galing	operasi	Pengumpan
36	Teluk Batang	operasi	Pengumpan
37	Toba	rencana	Pengumpan
38	Simpang Hilir	operasi	Pengumpan
39	Sandai	operasi	Pengumpan
40	Nanga Tayap	operasi	Pengumpan
41	Sungai Laur	rencana	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
42	Matan Hilir Selatan	rencana	Pengumpan
43	Delta Pawan	operasi	Pengumpul
44	Sukamara	operasi	Pengumpan
45	Manis Mata	rencana	Pengumpan
46	Air Hitam Besar	operasi	Pengumpan
47	Dermaga Danau Sentarum	rencana	Pengumpan
48	Dermaga Danau Bekuan	rencana	Pengumpan
49	Dermaga Danau Belida	rencana	Pengumpan
50	Dermaga Danau Genali	rencana	Pengumpan
51	Dermaga Danau Tang	rencana	Pengumpan
52	Tebas Kuala	Operasi	Pengumpan
53	Perigi Piai	Operasi	Pengumpan
54	Sumpit	Operasi	Pengumpan
55	Ciremai	Operasi	Pengumpan
56	Tayan	Operasi	Pengumpan
57	Teraju	Operasi	Pengumpan
58	Sei Asam	Operasi	Pengumpan
59	Sekadau	Operasi	Pengumpan
60	Bardan	Operasi	Pengumpan
61	Siantan	Operasi	Pengumpan
62	Parit Sarem	Operasi	Pengumpan
63	Sungai Nipah	Operasi	Pengumpan
64	Telok Batang	Operasi	Pengumpan
65	Madya	Rencana	Pengumpan
66	Mayam	Rencana	Pengumpan
67	Buayan BHD	Rencana	Pengumpan
68	Sunyat	Rencana	Pengumpan
69	Kenanai	Rencana	Pengumpan
70	Sejangkung	Rencana	Pengumpan
71	Nunuk	Rencana	Pengumpan
72	Prapakan Jawai	Rencana	Pengumpan
73	Rengas	Rencana	Pengumpan
74	Jungkat	Rencana	Pengumpan
75	Wajok	Rencana	Pengumpan
76	Sungai Ayak	Rencana	Pengumpan
77	Teluk Malike	Rencana	Pengumpan
78	Kubu	Rencana	Pengumpan
79	Jangkang Dua	Rencana	Pengumpan
80	Tl. Kelang Kubu	Rencana	Pengumpan
81	Padang Tikar	Rencana	Pengumpan
82	Kendawangan Kota	Rencana	Pengumpan
83	Kendawangan Kanan	Rencana	Pengumpan
84	Parit Raja	Rencana	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
85	Semitau	Rencana	Pengumpan
86	Semitau Seberang	Rencana	Pengumpan
87	Perigi Kiri (Nanga Silat) Kab. Kapuas	Rencana	Pengumpan
88	Perigi Kanan (Nanga Silat)	Rencana	Pengumpan
89	Kemboja	Rencana	Pengumpan
17	Kalimantan Tengah		
1	Buntok	operasi	Pengumpul
2	Sumber Barito	rencana	Pengumpan
3	Muara Teweh	operasi	pengumpul
4	Jenamas	operasi	Pengumpan
5	Kurau Kuala	operasi	Pengumpan
6	Danau Panggang	operasi	Pengumpan
7	Dusun Utara	operasi	Pengumpan
8	Pematang Karau	operasi	Pengumpan
9	Montalat	operasi	Pengumpan
10	Gunung Purei	operasi	Pengumpan
11	Lahei	operasi	Pengumpan
12	Permata Intan	rencana	Pengumpan
13	Puruk Cahu	operasi	Pengumpul
14	Kapuas Kuala	operasi	Pengumpan
15	Timpah	operasi	Pengumpan
16	Kapuas Hulu	operasi	Pengumpan
17	Mentangai	operasi	Pengumpan
18	Banamatingang	operasi	Pengumpan
19	Pahandut	operasi	Pengumpan
20	Mihing Raya	operasi	Pengumpan
21	Damang Batu	rencana	Pengumpan
22	Bapuju	rencana	Pengumpan
23	Kanamit	rencana	Pengumpan
24	Manuhing	rencana	Pengumpan
25	Sebangau Kuala	operasi	Pengumpan
26	Tumbangnus	rencana	Pengumpan
27	Katingan Hulu / Tumbangsanaman	rencana	Pengumpan
28	Katingan Hilir	operasi	Pengumpan
29	Palangkaraya	operasi	Pengumpul
30	Sampit	operasi	Pengumpan
31	Pegatan Hilir	operasi	Pengumpan
32	Tumbang Samba	operasi	Pengumpan
33	Kandang	rencana	Pengumpan
34	Pulau Hanaut	operasi	Pengumpan
35	Mentaya Hulu	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
36	Antang Kalang	rencana	Pengumpan
37	Kuala Pembuang	operasi	Pengumpan
38	Tanjung Kanau	rencana	Pengumpan
39	Tumbang Manjul	operasi	Pengumpan
40	Seruyan Tengah	operasi	Pengumpan
41	Pangkalan Lada	rencana	Pengumpan
42	Pandau	rencana	Pengumpan
43	Lamandau	operasi	Pengumpan
44	Delang	rencana	Pengumpan
45	Kotawaringin Lama	operasi	Pengumpan
46	Pangkalanbun	operasi	Pengumpul
47	Kumai	operasi	Pengumpan
48	Kuala Jelai	operasi	Pengumpan
49	Balai Riam	operasi	Pengumpan
50	Dermaga Danau Mare	operasi	Pengumpul
51	Dermaga Danau Tete	rencana	Pengumpan
52	Dermaga Danau Terusan	rencana	Pengumpan
53	Dermaga Danau Sembuluh	rencana	Pengumpan
54	Dermaga Danau Raya	rencana	Pengumpan
55	Dermaga Danau Mepara	rencana	Pengumpan
56	Dermaga Danau Matur	rencana	Pengumpan
57	Dermaga Danau Limut	rencana	Pengumpan
58	Dermaga Danau Kenampul	rencana	Pengumpan
59	Dermaga Danau Gatel	rencana	Pengumpan
60	Dermaga Danau Ganting	rencana	Pengumpan
61	Dermaga Danau Cembulu	rencana	Pengumpan
62	Dermaga Danau Bambenan	rencana	Pengumpan
18	Kalimantan Selatan		
1	Belawang	operasi	Pengumpan
2	Bakumpai	operasi	Pengumpan
3	Margasari	operasi	Pengumpan
4	Labuan Amas Utara	rencana	Pengumpan
5	Negara	operasi	Pengumpan
6	Babirik	operasi	Pengumpan
7	Amuntai	operasi	Pengumpul
8	Marabahan	operasi	Pengumpul
9	Kuripan	operasi	Pengumpan
10	Tabukan	operasi	Pengumpan
11	Paminggir	rencana	Pengumpan
12	Tabunganen	operasi	Pengumpan
13	Aluh-aluh	operasi	Pengumpan
14	Tamban	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
15	Mekarsari	operasi	Pengumpan
16	Kurau	operasi	Pengumpan
17	Tabanio/Takisung	operasi	Pengumpan
18	Pasar Baru	operasi	Pengumpan
19	Sei Tabuk	rencana	Pengumpan
20	Martapura Barat	operasi	Pengumpan
21	Martapura	operasi	Pengumpan
22	Mataraman	rencana	Pengumpan
23	Pengaron	operasi	Pengumpan
24	Danau Aranio	rencana	Pengumpan
25	nau lain	rencana	Pengumpan
26	Pasar Baru	operasi	Pengumpan
27	Alalak	operasi	Pengumpan
28	Mandastana	operasi	Pengumpan
29	Jejangkit	operasi	Pengumpan
30	Simpang Empat	rencana	Pengumpan
31	Satui	rencana	Pengumpan
32	Kintap	operasi	Pengumpan
33	Batu Licin	operasi	Pengumpan
34	Kusan Hulu	rencana	Pengumpan
35	Kota Baru	operasi	Pengumpan
36	Pamukan Selatan	operasi	Pengumpan
37	Pamukan Utara	operasi	Pengumpan
38	Sampanahan	operasi	Pengumpan
39	Sungai Durian	operasi	Pengumpan
40	Kelumpang Barat	rencana	Pengumpan
41	Dermaga Danau Bangkau	rencana	Pengumpan
42	Dermaga Danau Bitin	rencana	Pengumpan
43	Banjar Raya	Operasi	Pengumpan
44	Saka Kajang	Rencana	Pengumpan
45	Mantuil	Rencana	Pengumpan
46	Tamban	Rencana	Pengumpan
47	Sei Gampa	Rencana	Pengumpan
19	Kalimantan Timur		
1	Long Kali	operasi	Pengumpan
2	Tanah Grogot	rencana	Pengumpan
3	Sebulu	operasi	Pengumpan
4	Kota Bangun	operasi	Pengumpan
5	Muara Pahu	operasi	Pengumpan
6	Melak	operasi	Pengumpan
7	Long Iram	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
8	Long Hubung	rencana	Pengumpan
9	Long Bagun	operasi	Pengumpan
10	Long Pahangai	rencana	Pengumpan
11	Long Apari	operasi	Pengumpan
12	Tenggarong	operasi	Pengumpan
13	Loa Kulu	operasi	Pengumpan
14	Penyinggahan	operasi	Pengumpan
15	Muara Muntai	operasi	Pengumpan
16	Bongan	rencana	Pengumpan
17	Siluq Ngurai	rencana	Pengumpan
18	Muara Lawa	rencana	Pengumpan
19	Damai	operasi	Pengumpan
20	Kayan Selatan	operasi	Pengumpan
21	Kenohan	operasi	Pengumpan
22	Kembang Janggut	rencana	Pengumpan
23	Tabang	operasi	Pengumpan
24	Samarinda	operasi	Pengumpul
25	Muara Wis	operasi	Pengumpan
26	Muara Kaman	operasi	Pengumpan
27	Muara Bengkal	rencana	Pengumpan
28	Long Mesanggat	rencana	Pengumpan
29	Muara Wahau	operasi	Pengumpan
30	Muara Ancalong	operasi	Pengumpan
31	Busang	rencana	Pengumpan
32	Karangan	operasi	Pengumpan
33	Sangkulirang	operasi	Pengumpan
34	Kaliorang	operasi	Pengumpan
35	Tanjung Redeb	operasi	Pengumpan
36	Teluk Bayur	operasi	Pengumpan
37	Segah	rencana	Pengumpan
38	Sambaliung	operasi	Pengumpan
39	Kelay	rencana	Pengumpan
40	Sekatak	operasi	Pengumpan
41	Tanjung Selor	operasi	Pengumpan
42	Tanjung Palas Barat	rencana	Pengumpan
43	Peso Hilir	operasi	Pengumpan
44	Peso	operasi	Pengumpan
45	Dermaga Danau Semayang	rencana	Pengumpan
46	Dermaga Danau Jempang	rencana	Pengumpan
20	Kalimantan Utara		
1	Tarakan	operasi	Pengumpul
2	Sesayap Hilir	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
3	Sesayap	operasi	Pengumpan
4	Malinau Kota	operasi	Pengumpan
5	Mentarang	operasi	Pengumpan
6	Malinau Barat	operasi	Pengumpan
7	Malinau Selatan	rencana	Pengumpan
8	Tana Lia	operasi	Pengumpan
9	Sembakung	operasi	Pengumpan
10	Lumbis	rencana	Pengumpan
11	Dermaga Danau Malintang	rencana	Pengumpan
21	Sulawesi Utara		
1	Dermaga Danau Tondano	operasi	Pengumpan
2	Dermaga Danau Moat	rencana	Pengumpan
3	Dermaga Danau Linouw	operasi	Pengumpan
4	Dermaga Danau Tondok	rencana	Pengumpan
5	Dermaga Danau Malakehi	rencana	Pengumpan
22	Gorontalo		
1	Dermaga Danau Limboto	rencana	Pengumpan
23	Sulawesi Tengah		
1	Dermaga Danau Poso	operasi	Pengumpan
2	Dermaga Danau Lindu	rencana	Pengumpan
24	Sulawesi Selatan		
1	Dermaga Danau Towuti	rencana	Pengumpan
2	Dermaga Danau Tempe	rencana	Pengumpan
3	Dermaga Danau Matano	operasi	Pengumpan
4	Dermaga Danau Sindereng	rencana	Pengumpan
5	Dermaga Danau Mahalona	rencana	Pengumpan
25	Sulawesi Tenggara		
1	Dermaga Danau Napabele	rencana	Pengumpan
26	Papua		
1	Tor Atas	rencana	Pengumpan
2	Sarmi	operasi	Pengumpan
3	Apawer Hulu	rencana	Pengumpan
4	Dabra	operasi	Pengumpan
5	Burmeso	operasi	Pengumpan
6	Kasonaweja	operasi	Pengumpan
7	Bagusa	operasi	Pengumpan
8	Kaiy	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
9	Pagai	operasi	Pengumpan
10	Batom Hauser	operasi	Pengumpan
11	Demba	operasi	Pengumpan
12	Risei Sayeti	rencana	Pengumpan
13	Wapoga	rencana	Pengumpan
14	Waren	operasi	Pengumpan
15	Pomako	operasi	Pengumpan
16	Uta	rencana	Pengumpan
17	Kamora	rencana	Pengumpan
18	Fanamo	rencana	Pengumpan
19	Jita	rencana	Pengumpan
20	Sawaerma	rencana	Pengumpan
21	Agats	operasi	Pengumpan
22	Akat	rencana	Pengumpan
23	Atsy	operasi	Pengumpan
24	Fayit	rencana	Pengumpan
25	Komor	operasi	Pengumpan
26	Buagani	operasi	Pengumpan
27	Yuguru	rencana	Pengumpan
28	Ndunga	rencana	Pengumpan
29	Binam	rencana	Pengumpan
30	Dekai	rencana	Pengumpan
31	Manggelum	operasi	Pengumpan
32	Tanah Merah	operasi	Pengumpan
33	Mindiptana	rencana	Pengumpan
34	Gatentiri	operasi	Pengumpan
35	Harapan	rencana	Pengumpan
36	Jinak	operasi	Pengumpan
37	Keppi	rencana	Pengumpan
38	Kelapa Lima	operasi	Pengumpan
39	Kimaam	operasi	Pengumpan
40	Dodalim	rencana	Pengumpan
41	Animha	rencana	Pengumpan
42	Bade	operasi	Pengumpul
43	Tomor	rencana	Pengumpan
44	Waganu	rencana	Pengumpan
45	Cabang Tiga	rencana	Pengumpan
46	Amasue	rencana	Pengumpan
47	Minyamur	rencana	Pengumpan
48	Haju Lsiyuliana	rencana	Pengumpan
49	Moor	operasi	Pengumpan
50	Eci/Asgon	operasi	Pengumpan
51	Senggo	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
52	Banamepe	operasi	Pengumpan
53	Bayun	operasi	Pengumpan
54	Kamur	operasi	Pengumpan
55	Boven Digul	rencana	Pengumpul
56	Dermaga Danau Sentani	operasi	Pengumpan
57	Dermaga Danau Rombebai	operasi	Pengumpan
58	Dermaga Danau Biru	rencana	Pengumpan
59	Dermaga Danau Paniai	operasi	Pengumpan
60	Dermaga Danau Ti Bi	rencana	Pengumpan
61	Dermaga Danau Tonjida	rencana	Pengumpan
62	Dermaga Danau Yamur	rencana	Pengumpan
63	Dermaga Danau Yamasi	rencana	Pengumpan
27	Papua Barat		
1	Sorong	operasi	Pengumpul
2	Segun	rencana	Pengumpan
3	Maldan	rencana	Pengumpan
4	Fak-fak	operasi	Pengumpan
5	Inanwatan	operasi	Pengumpan
6	Yahadian	rencana	Pengumpan
7	Puragi	rencana	Pengumpan
8	Matemani Kais	rencana	Pengumpan
9	Sungai Kasuweri	rencana	Pengumpan
10	Kalitami	rencana	Pengumpan
11	Wunini	rencana	Pengumpan
12	Aranday	rencana	Pengumpan
13	Tembuni	rencana	Pengumpan
14	Tafereh	rencana	Pengumpan
15	Bintuni	rencana	Pengumpan
16	Babo	operasi	Pengumpan
17	Aroba	rencana	Pengumpan
18	Kambrau	rencana	Pengumpan
19	Arguni Bawah	rencana	Pengumpan
20	Kaimana	rencana	Pengumpan
21	Sokuwa	rencana	Pengumpan
22	Tobu-tobu	rencana	Pengumpan
23	Kaimana	rencana	Pengumpan

No	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pengembangan	Fungsi
24	Lengguru	rencana	Pengumpan
25	Minamo	rencana	Pengumpan
26	Dermaga Danau Anggi Gidi	rencana	Pengumpan
27	Dermaga Danau Anggi Gida	rencana	Pengumpan
28	Dermaga Danau Uter	rencana	Pengumpan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

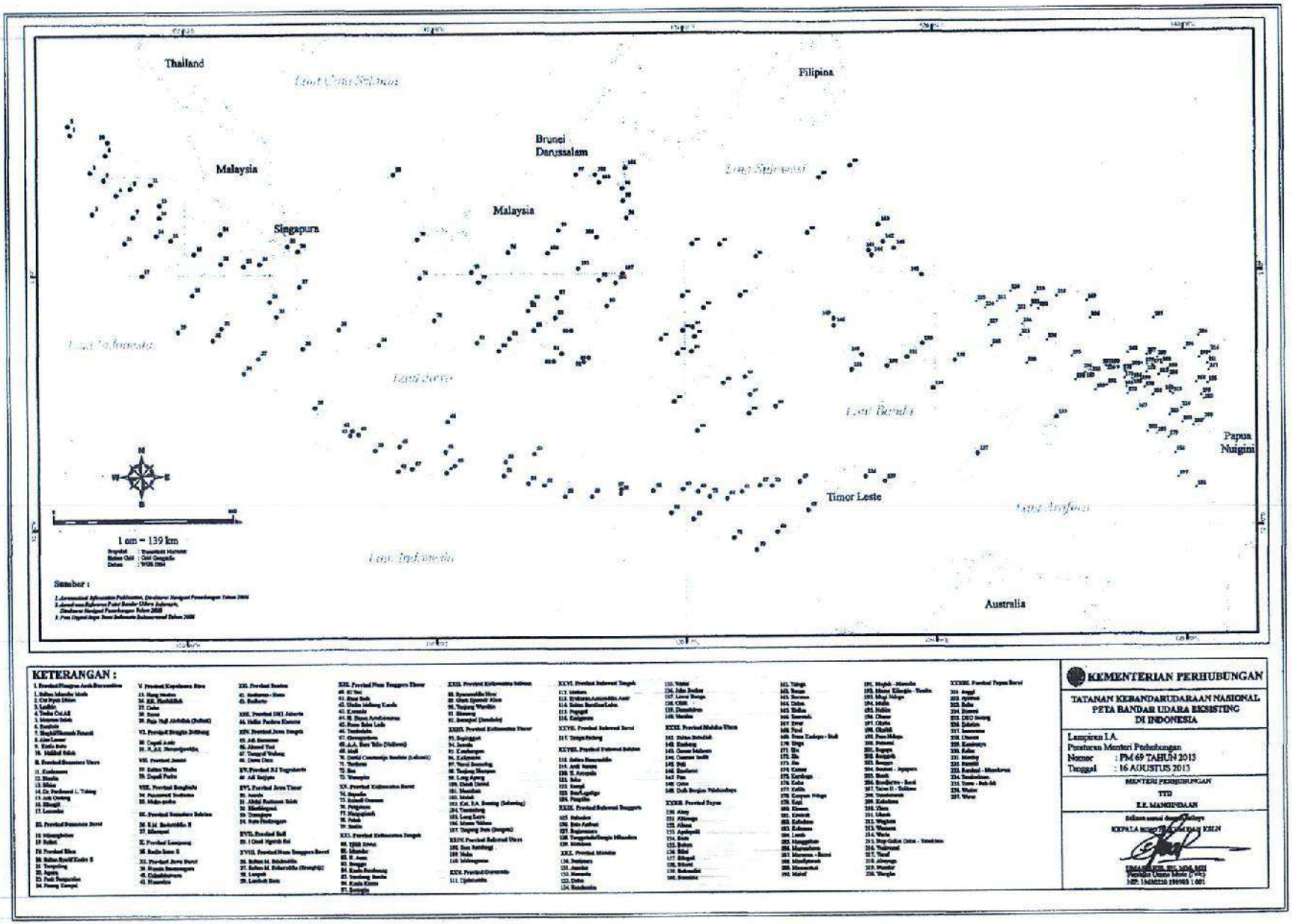
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001



LAMPIRAN 19

Lampiran Permenhub Nomor PM. 69/2013



KETERANGAN :

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL
PETA BANDAR UDARA EKSISTING
DI INDONESIA

Lampiran I.A.
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 69 TAHUN 2013
Tanggal : 16 AGUSTUS 2013

MENTERI PERHUBUNGAN

TTD

E.E. MANGINDAAN

Lampiran I.B
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 69 Tahun 2013
Tanggal : 16 Agustus 2013

TABEL PERAN, FUNGSI, PENGGUNAAN, HIERARKI DAN KLASIFIKASI BANDAR UDARA EKSISTING

NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	PERAN								FUNGSI		Penggunaan	Hierarki	Klasifikasi
			Simpul	Gerbang Ekonomi	Alih Moda Transportasi	Peindag/ Pariwisata	Daerah Terisolir	Rawan Bencana	Daerah Perbatasan	Wawasan Nusantara	Pemerintah	Pengusahaan	Bandar Udara	Bandar Udara	Bandara
I	PROPINSI NANGGROE ACEH. D														
1	Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Int'l	PT	4E
2	Cut Nyak Dhien	Nagan Raya	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	3C
3	Lasikin	Sinabang	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
4	Teuku Cut Ali	Tapak Tuan	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	2C
5	Maimun Saleh	Sabang	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		Int'l	P	3C
6	Rembele	Takengon	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	2C
7	Singkil (Hamzah Fansuri)	Singkil	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	2B
8	Alas Lauser	Kutacane	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3B
9	Kuala Batu	Blang Pidie	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
10	Malikul Saleh	Lhok Seumawe	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
II	PROPINSI SUMATERA UTARA														
1	Kualanamu	Deli Serdang	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PP	4E
2	Binaka	Gn. Sitoli	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Int'l	P	3C
3	Sibisa	Parapat	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	1B
4	Dr. Ferdinand L. Tobing	Sibolga	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	4C
5	Aek Godang	Padang Sidempuan	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
6	Silangit	Siborong-borong	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Dom	P	4C
7	Lasondre	Pulau-pulau Batu	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	3C
III	PROPINSI SUMATERA BARAT														
1	Minangkabau	Padang	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Int'l	PS	4D
2	Rokot	Sipora	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		Dom	P	2B
IV	PROPINSI RIAU														
1	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PS	4C
2	Tempuling	Indragiri Hilir	✓	✓	✓				✓	✓	✓		Dom	P	3B
3	Japura	Rengat	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
4	Pasir Pangaraian	Pasir Pangaraian	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3B
5	Pinang Kampai	Dumai	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		Dom	P	3C
V	PROPINSI KEPULAUAN RIAU														
1	Hang Nadim	Batam	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		Int'l	PS	4E
2	RH. Fisabilillah	Tanjung Pinang	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	P	4C
3	Dabo	Singkep	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2C
4	Ranai	Natuna	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		Dom	P	4C
5	Sei Bati (Raja Haji Abdullah)	Tanjung Balai Karimun	✓	✓	✓				✓	✓	✓		Dom	P	2B
VI	PROPINSI BANGKA BELITUNG														
1	Depati Amir	Pangkal Pinang	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Dom	PS	4C
2	H. AS. Hanandjoeddin	Tanjung Pandan	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	PT	4C
VII	PROPINSI JAMBI														
1	Sultan Thaha	Jambi	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Dom	PS	4C
2	Depati Parbo	Kerinci	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C

NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	PERAN								FUNGSI		Penggunaan	Hierarki	Klasifikasi
			Simpul	Gerbang Ekonomi	Alih Moda Transportasi	Pelndag/ Pariwisata	Daerah Terisolir	Rawan Bencana	Daerah Perbatasan	Wawasan Nusantara	Pemerintah	Pengusahaan	Bandar Udara	Bandar Udara	Bandara
VIII	PROPINSI BENGKULU														
1	Fatmawati - Soekarno	Bengkulu	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	PT	4C
2	Muko-Muko	Muko-Muko	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	3C
IX	PROPINSI SUMATERA SELATAN														
1	S.M. Badaruddin II	Palembang	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PS	4D
2	Silampari	Lubuk Linggau	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
X	PROPINSI LAMPUNG														
1	Radin Inten II	Tanjung Karang	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	PS	4D
XI	PROPINSI JAWA BARAT														
1	Husein Sastranegara	Bandung	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PT	4C
2	Cakrabhuwana	Cirebon	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
3	Nusawiru	Ciamis	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	3C
XII	PROPINSI BANTEN														
1	Soekarno - Hatta	Jakarta	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PP	4E
2	Budiarto	Curug	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	3D
XIII	PROPINSI DKI JAKARTA														
1	Halim Perdanakusuma	Jakarta	✓	✓	✓					✓	✓	✓	Int'l	P	4E
XIV	PROPINSI JAWA TENGAH														
1	Adi Sumarmo	Solo	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PS	4D
2	Ahmad Yani	Semarang	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PS	4D
3	Tunggul Wulung	Cilacap	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
4	Dewa Daru	Karimunjawa	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	2C
XV	PROPINSI DI. YOGYAKARTA														
1	Adi Sutjipto	Yogyakarta	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PS	4D
XVI	PROPINSI JAWA TIMUR														
1	Juanda	Surabaya	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PP	4E
2	Abdul Rachman Saleh	Malang	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	4C
3	Blimbingsari	Banyuwangi	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
4	Trunojoyo	Sumenep	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	2B
5	Noto Hadinegoro	Jember	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	3C
XVII	PROPINSI BALI														
1	I Gusti Ngurah Rai	Denpasar	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Int'l	PP	4E
XVIII	PROPINSI NTB														
1	Sultan M. Salahuddin	Bima	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
2	Brangbiji (Sultan Muh. Kaharuddin)	Sumbawa Besar	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
3	Lunyuk	Sumbawa	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	2B
4	Lombok Baru	Lombok Tengah	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Int'l	PS	4D
XIX	PROPINSI NTT														
1	Eltari	Kupang	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Int'l	PS	4D
2	Frans Sada	Maumere	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	4C
3	Umbu Mehang Kunda	Waingapu	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
4	Komodo	Labuhan Bajo	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C

NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	PERAN								FUNGSI		Penggunaan	Hierarki	Klasifikasi
			Simpul	Gerbang Ekonomi	Alih Moda Transportasi	Peindag/ Pariwisata	Daerah Terisolir	Rawan Bencana	Daerah Perbatasan	Wawasan Nusantara	Pemerintah	Pengusahaan	Bandar Udara	Bandar Udara	Bandara
5	H. Hasan Aroeboesman	Ende	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
6	Frans Sales Leda	Ruteng	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
7	Tambolaka	Waikabubak	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	4C
8	Gewayantana	Larantuka	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	2C
9	Haliwen (A.A. Bere Tallo)	Atambua	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		Dom	P	3B
10	Mali	Alor	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		Dom	P	3C
11	Lekunik (David Constantijn Saudale)	Rote	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		Dom	P	2C
12	Tardamu	Sabu	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		Dom	P	2B
13	Soa	Bajawa	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3B
14	Wunopito	Lewoleba	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	2C
XX	PROPINSI KALIMANTAN BARAT														
1	Supadio	Pontianak	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PS	4C
2	Rahadi Oesman	Ketapang	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		Dom	P	3C
3	Pangsuma	Putussibau	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Dom	P	3C
4	Nangapinoh	Nangapinoh	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
5	Paloh	Sambas	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		Dom	p	1B
6	Susilo	Sintang	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	p	3C
XXI	PROPINSI KALIMANTAN TENGAH														
1	Tjilik Riwut	Palangkaraya	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	PT	4D
2	Iskandar	Pangkalan Bun	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	PT	4C
3	H. Asan	Sampit	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	4C
4	Sanggu	Buntok	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
5	Kuala Pembuang	Kota Waringin Timur	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3C
6	Tumbang Samba	Tumbang Samba	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
7	Kuala Kurun	Kuala Kurun	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	2B
8	Beringin	Muara Teweh	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
XXII	PROPINSI KALIMANTAN SELATAN														
1	Syamsuddin Noor	Banjarmasin	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Dom	PS	4D
2	Gusti Syamsir Alam	Kotabaru	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3C
3	Tanjung Warukin	Tanjung Warukin	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
4	Binuang	Binuang	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
5	Bersujud	Batu Licin	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
XXIII	PROPINSI KALIMANTAN TIMUR														
1	Sepinggan	Balikpapan	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PP	4D
2	Juwata	Tarakan	✓	✓	✓					✓	✓		Int'l	PT	4D
3	Kotabangun	Kotabangun	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
4	Kalimarau	Tj. Redep	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	4D
5	Yuvai Semaring	Longbawan	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2B
6	Tanjung Harapan	Tj. Selor	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3C
7	Long Apung	Long Apung	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2B
8	Datah Dawai	Datah Dawai	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		Dom	P	1B
9	Nunukan	Nunukan	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Dom	P	2B
10	Melak	Sendawar	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		Dom	P	2B
11	Kol. RA. Bessing (Seluwing)	Malinau	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Dom	P	2B
12	Long Layu	Long Layu	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
13	Muara Wahau	Muara Wahau	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
14	Tanjung Bara (Sangata)	Kutai Timur	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
15	Temindung	Samarinda	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	2B
XXIV	PROPINSI SULAWESI UTARA														
1	Sam Ratulangi	Manado	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PS	4D
2	Naha	Tahuna	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		Dom	P	3C
3	Melonguane	Sangihe Talaud	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		Dom	P	3C

NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	PERAN								FUNGSI		Penggunaan	Hierarki	Klasifikasi
			Simpul	Gerbang Ekonomi	Alih Moda Transportasi	Peindag/ Pariwisata	Daerah Terisolir	Rawan Bencana	Daerah Perbatasan	Wawasan Nusantara	Pemerintah	Pengusahaan	Bandar Udara	Bandar Udara	Bandara
XXV	PROPINSI GORONTALO														
1	Djalaluddin	Gorontalo	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	4D
XXVI	PROPINSI SULAWESI TENGAH														
1	Mutiara	Palu	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	PT	4D
2	Syukuran Aminuddin Amir	Luwuk	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	4C
3	Sultan Bantilan (Lalos)	Toli-toli	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	3C
4	Pogogul	Buol	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	3B
5	Kasiguncu	Poso	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
XXVII	PROPINSI SULAWESI BARAT														
1	Tampa Padang	Mamuju	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	4C
XXVIII	PROPINSI SULAWESI SELATAN														
1	Sultan Hasanuddin	Makassar	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Int'l	PP	4D
2	Andi Jemma	Masamba	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
3	H. Aroepala	P. Selayar	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3B
4	Seko	Seko	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
5	Rampi	Rampi	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
6	Bua (Lagaligo)	Luwu	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
7	Pongtiku	Tana Toraja	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	2C
XXIX	PROPINSI SULAWESI TENGGARA														
1	Haluoleo	Kendari	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	PT	4D
2	Beto Ambari	Bau-bau	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3C
3	Sugimanuru	Muna	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
4	Tanggetada (Sangia Nibandera)	Kolaka	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2C
5	Matahora	Wakatobi	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3C
XXX	PROPINSI MALUKU														
1	Pattimura	Ambon	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Int'l	PT	4D
2	Amahai	Pulau Seram	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	1B
3	Namrole	Pulau Buru	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	2B
4	Dobo	Pulau Aru	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		Dom	P	2B
5	Bandaneira	Pulau Banda	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	2C
6	Wahai	Pulau Seram	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	2B
7	John Becker	Pulau Kisar	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		Dom	P	2B
8	Liwur Bunga	Pulau Ierat	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2B
9	Olilit	Saumlaki	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		Dom	P	2C
10	Dumatubun	Tual	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	3C
11	Namlea	Pulau Buru	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	1B
XXXI	PROPINSI MALUKU UTARA														
1	Sultan Babullah	Ternate	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	PT	4C
2	Kuabang	Kao	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
3	Gamar Malamo	Galela	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
4	Oesman Sadik	Labuha	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	3C
5	Buli	Maba	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3C
6	Emalamo	Sanana	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	2B
7	Pitu	Morotai	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	4C
8	Gebe	Kab. Halmahera Tengah	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2C
9	Dofa Benjina Falabisahaya	Mangole, Kab. Kep. Sula	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	3D

NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	PERAN								FUNGSI		Penggunaan	Hierarki	Klasifikasi
			Simpul	Gerbang	Alih Moda	Pelabuhan	Daerah	Rawan	Daerah	Wawasan	Kewenangan	Penggunaan	Bandar Udara	Bandar Udara	Bandara
				Kompetisi	Terintegrasi	Pelayanan	Terbuka	Bencana	Perbatasan	Nusantara					
XXXX	PROPINSI PAPUA														
1	Frans Kaisiepo	Biak	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Int	P	
2	Sentani	Jayapura	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Int	P	
3	Rendani	Manokwari	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	
4	Utarom	Kab. Keerom	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	
5	Oksibil	Kab. Pegunungan Bintang	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	
6	Yuruf	Kab. Keerom	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	
7	Mulol	Kab. Asmat	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	
8	Kamur	Kab. Merauke	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	
9	Kwam	Kab. Yalimo	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
10	Ilaga	Kab. Boven Digoel	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
11	Bokondini	Kab. Keerom	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
12	Senggeh	Kab. Boven Digoel	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
13	Mongganai	Kab. Jayapura	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
14	Wamena	Kab. Membramo Raya	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
15	Kelila	Kab. Pegunungan Bintang	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
16	Kiwirok	Kab. Intan Jaya	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
17	Silorai	Kab. Intan Jaya	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
18	Illaí	Kab. Pegunungan Bintang	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
19	Kebo	Kab. Pegunungan Bintang	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
20	Aiknanga	Kab. Mimika	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
21	Enarotali	Kab. Paniai	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
22	Manokwari	Kab. Sarmi	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
23	Tanah Merah	Kab. Boven Digoel	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
24	Mulia	Kab. Puncak Jaya	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
25	Okaba	Kab. Pegunungan Bintang	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
26	Wamena	Nabire	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
27	Mindiptanah	Kab. Boven Digoel	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
28	Kepi	Kab. Mappi	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
29	Kokonau	Kab. Mimika	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
30	Gotowasbal	Kab. Jayawijaya	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
31	Obukha	Kab. Bintuka	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
32	Numfor	Kab. Teluk Nusnior	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
33	Ilaga	Kab. Puncak	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
34	Ilu	Kab. Puncak Jaya	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
35	Tiom	Kab. Lanni Jaya	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
36	Ewer	Kab. Asmat	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
37	Batom	Kab. Pegunungan Bintang	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
38	Bade	Kab. Mappi	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
39	Lereh	Kab. Keerom	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
40	Karubaga	Kab. Tolikara	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
41	Obano	Kab. Pantai	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
42	Senggo	Kab. Mappi	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
43	Moses Kilangin	Timika	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
44	Talve 2	Kab. Tolikara	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
45	Yahuldimo	Kab. Yahuldimo	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
46	Sedjanto Tj/Rja Bor/Kemarup Baru	Sarui Kab. Kep. Yapen	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		Dom	P	
47	Dekai Abaima	Kab. Nabire	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
48	Wagete	Kab. Dekai	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
49	Sinak	Kab. Puncak Jaya	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
50	Aboyaga	Kab. Nabire	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
51	Aboy	Kab. Pegunungan Bintang	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
52	Yaniruma	Kab. Boven Digoel	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
53	Nop Goliat Dekai	Kab. Yahuldimo	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
54	Suppa	Kab. Intan Jaya	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
55	Kobakma	Kab. Membramo Tengah	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
56	Apalapsili	Kab. Yalimo	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
57	Kenyam	Kab. Nduga	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
58	Mapodrma	Kab. Nduga	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	
59	Mbol	Kab. Nduga	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	

NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	PERAN								FUNGSI		Penggunaan	Hierarki	Klasifikasi
			Simpul	Gerbang Ekonomi	Alih Moda Transportasi	Peindag/ Pariwisata	Daerah Terisolir	Rawan Bencana	Daerah Perbatasan	Wawasan Nusantara	Pemerintah	Pengusahaan	Bandar Udara	Bandar Udara	Bandara
60	Paro	Kab. Nduga	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
61	Fawi	Kab. Puncak Jaya	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
62	Borome	Borome	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
63	Beoga	Kab. Intan Jaya	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
64	Jila	Kab. Mimika	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
65	Jita	Kab. Mimika	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
66	Potowai	Kab. Mimika	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
67	Bilogai	Kab. Intan Jaya	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
68	Tsinga	Kab. Mimika	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
69	Alama	Kab. Pegunungan Bintang	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
70	Wangbe	Kab. Puncak	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
71	Waris/Towehitam	Kab. Keerom	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
XXXIII	PROPINSI PAPUA BARAT														
1	Rendani	Manokwari	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		Dom	P	4C
2	Domine Eduard Osok	Sorong	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	PT	4C
3	Torea	Fak-fak	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3C
4	Bintuni	Kab. Teluk Bintuni	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	1B
5	Babo	Kab. Teluk Bintuni	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	3C
6	Utarom	Kab. Kaimana	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	3C
7	Wasior	Kab. Teluk Wondama	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1C
8	Inanwatan	Kab. Sorong Selatan	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
9	Teminabuan	Kab. Sorong Selatan	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
10	Ayawasi	Kab. Sorong Selatan	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
11	Ijahabra	Kab. Manokwari	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1C
12	Merdey	Kab. Manokwari	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
13	Anggi	Kab. Manokwari	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
14	Kambuaya	Kab. Manokwari	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
15	Werur	Kab. Manokwari	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1C
16	Kebar	Kab. Manokwari	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		Dom	P	2B
17	Ransiki	Kab. Manokwari	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2C

KETERANGAN :
Int'l = Internasional
Dom = Domestik
PP = Pengumpul Skala Primer
PS = Pengumpul Skala Sekunder
PT = Pengumpul Skala Tersier
P = Pengumpan

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001



LAMPIRAN 20

Daftar Perkotaan pengembangan Bus BRT
Tahun 2018

DAFTAR PERKOTAAN PENGEMBANGAN BUS BRT 2005-2018

PROVINSI		KOTA/KAB		2005-2014		2015		2016		2017		2018		2019		2005-2019	
				BUS BESAR	BUS SEDANG	BUS BESAR	BUS SEDANG	BUS BESAR	BUS SEDANG	BUS BESAR	BUS SEDANG	BUS BESAR	BUS SEDANG	BUS BESAR	BUS SEDANG	BUS BESAR	BUS SEDANG
1	Aceh	1	Kota Banda Aceh	-	-	25	-	-	5	-	-	-	10			25	15
2	Sumatera Utara	2	Kawasan MEBIDANGRO	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
3	Sumatera Barat	3	Kota Padang	-	20	10	-	-	10	-	-	-	10	-	-	10	40
4	Riau	4	Kota Pekanbaru	20	-	50	-	-	25	-	-	-	-	-	-	70	25
5	Kep. Riau	5	Kota Batam	-	16	15	-	-	5	-	-	-	10	-	-	15	31
		6	Kota Tanjung Pinang						5								
6	Jambi	7	Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	5	-	-	-	20	-	-	-	25
7	Sumatera Selatan	8	Provinsi Sumsel	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
		9	Kota Palembang	5	10	50	-	-	39	-	-	-	5	-	-	55	54
		10	Kab. Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5
8	Bangka Belitung	11	Kota Pangkal Pinang	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
		12	Kota Tanjung Pandan	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
9	Bengkulu	13	Provinsi Bengkulu	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	10
10	Lampung	14	Kota Bandar Lampung	-	-	20	-	-	20	-	-	-	10	-	-	20	30
11	Banten	15	Kota Tangerang	10	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	10	20
12	DKI Jakarta	16	Kawasan JABODETABEK	103	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703	-
13	Jawa Barat	17	Kawasan BANDUNG RAYA	55	10	165	-	-	20	-	-	-	20	-	-	220	50
		18	Kota Bogor	-	30	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	40
		19	Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20
		20	Kab. Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5
		21	Perum DAMRI	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
14	Jawa Tengah	22	Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10
		23	Kota Semarang	25	-	25	-	-	25	-	-	-	20	-	-	50	45
		24	Kota Surakarta	-	25	20	-	-	33	-	-	-	-	-	-	20	58
15	DI Yogyakarta	25	Kota Yogyakarta	-	20	5	25	-	40	-	-	-	-	-	-	5	85
16	Jawa Timur	26	Kota Surabaya	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
17	Bali	27	Kawasan SARBAGITA	45	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	45	20
		28	Kab. Gianyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5

PROVINSI		KOTA/KAB		2005-2014		2015		2016		2017		2018		2019		2005-2019	
				BUS BESAR	BUS SEDANG	BUS BESAR	BUS SEDANG	BUS BESAR	BUS SEDANG	BUS BESAR	BUS SEDANG	BUS BESAR	BUS SEDANG	BUS BESAR	BUS SEDANG	BUS BESAR	BUS SEDANG
18	Nusa Tenggara Barat	29	Kota Mataram	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
19	Nusa Tenggara Timur	30	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5
20	Kalimantan Barat	31	Kota Pontianak	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
		32	Kab. Tarakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5
21	Kalimantan Tengah	33	Kota Palangkaraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5
22	Kalimantan Utara	34	Provinsi Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5
		35	Kota Tarakan	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10
23	Sulawesi Utara	36	Kota Manado	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
		37	Kab. Kotamobagu	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
24	Gorontalo	38	Prov. Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5
		39	Kota Gorontalo	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
		40	Kab. Gorontalo	-	15	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	20
25	Sulawesi Tengah	41	Kota Palu	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10
26	Sulawesi Barat	42	Kab. Mamuju	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
27	Sulawesi Selatan	43	Kawasan MAMINASATA	30	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	30	15
28	Sulawesi Tenggara	44	Kota Kendari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5
		45	Kota Bau-Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5
29	Maluku	46	Provinsi Maluku	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
		47	Kota Ambon	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
30	Maluku Utara	48	Kota Sofifi	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10
31	Papua	49	Kota Jayapura	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
32	Papua Barat	50	Kab. Sorong	-	-	10	-	-	5	-	-	-	-	-	-	10	5
		51	Kab. Manokwari	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
TOTAL				**358**	**201**	**1.025**	**25**	**-**	**333**	**-**	**-**	**-**	**230**	**-**	**-**	**1.383**	**784**



LAMPIRAN 21

Daftar Standar Pelayanan Tahun 2014-2018

Daftar Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2014-2018

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
A. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT									
1	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV	A	Pekanbaru						
2	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI	A	Bandar Lampung						
3	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII	A	Palembang						
4	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII	A	Serang						
5	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X	A	Yogyakarta						
	1) Terminal Tipe A Ir. Soekarno Klaten		Yogyakarta						SK.016/AJ 005/BPTD-X/2018 Tanggal 24 April 2014
6	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI	A	Surabaya						
7	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII	A	Denpasar						
8	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV	A	Banjarmasin						
9	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI	A	Palangkaraya						
10	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII	A	Balikpapan						
11	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII	A	Kendari						
12	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Makassar	A	Makassar						
13	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX	A	Palu						
14	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I	B	Banda Aceh						

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
15	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II	B	Medan						
16	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III	B	Padang						
17	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V	B	Jambi						
18	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX	B	Bandung						
19	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV	B	Pontianak						
20	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI	B	Gorontalo						
21	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV	B	Sorong						
22	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII	C	Kupang						
23	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII	C	Manado						
24	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII	C	Ambon						
25	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV	C	Ternate						
26	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor		Bekasi						
	B. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT								
	I. Kantor Balai								
1	BKKP							√	UM.003/4/4/KKP.2018
2	BTKP								BELUM ADA SP
	II. DISTRIK NAVIGASI								
1.	Kantor Distrik Navigasi Kelas I Ambon							√	OT.001/1/1/DNG-ABN-18
2.	Kantor Distrik Navigasi Kelas I Belawan							√	UM.003/5/10/DNG.BLW-2018
3.	Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai							√	KP.104/8/8A/DNG.DMI-18

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
4.	Kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar							√	UM.002/229/57/DNG.MKS-18
5.	Kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung							√	UM.002/21/16/DNG.BTG-18
6.	Kantor Distrik Navigasi Kelas I Palembang							√	UM.008/1/3/DNG.PLG-2018
7.	Kantor Distrik Navigasi Kelas I Samarinda							√	UM008/1/2/DNG.Smr-18
8.	Kantor Distrik Navigasi Kelas I Sorong							√	UM.002/2/20/DNG.SRG-18
9.	Kantor Distrik Navigasi Kelas I Surabaya							√	UM.008/02/15/DNV.SBY/2018
10.	Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang							√	KP/104/14/18/DNG.TPI-18
11.	Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok							√	KP.104/2/3/DNG.TPK-18
12.	Kantor Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin							√	UM.002/1/1/DNG.BJM-18
13.	Kantor Distrik Navigasi Kelas II Benoa							√	UM.002/1/7/DNG.Bna-18
14.	Kantor Distrik Navigasi Kelas II Jayapura							√	UM.002/11/12/DNG.Jra-18
15.	Kantor Distrik Navigasi Kelas II Kupang							√	KP.104/13/19/DNG.KPG-18
16.	Kantor Distrik Navigasi Kelas II Sabang							√	UM.001/5/6/DNG.SAB-2018
17.	Kantor Distrik Navigasi Kelas II Semarang							√	KP.104/17/12/DNG.SMG-18
18.	Kantor Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur							√	KP.104/7/17/DNG.TBS-18
19.	Kantor Distrik Navigasi Kelas III Cilacap						√		UM.002/19/14/DNG.CLP-17
20.	Kantor Distrik Navigasi Kelas III Kendari							√	NV.001/03/17/DNG.KDI-18
21.	Kantor Distrik Navigasi Kelas III Merauke							√	UM.002/2/15/DNG.MRK-18
22.	Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak								Sudah ada SP, Data Legalitas belum masuk PPTB
23.	Kantor Distrik Navigasi Kelas III Sibolga							√	KP.104/4/12/DNG.Sbg-18
24.	Kantor Distrik Navigasi Kelas III Tarakan							√	UM.002/ 1 /1 /DNG.Trk-2O18
25.	Kantor Distrik Navigasi Kelas III Tual							√	UM.002/01/01/DNG.TL-2018

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	III. KANTOR SYAHBANDAR DAN OTORITAS PELABUHAN								
1.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong							√	KP.104/6/12/KSOP.SRG-18
2.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon							√	UM.008/2/7/KSOP.AMBON-2018
3.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan							√	UM.002/ / /KSOP.BPN-2018
4.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin							√	UM.002/01/02/KSOP.BJM-18
5.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten								**BELUM ADA SP**
6.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung							√	UM.002/01/09/KSOP.BTG-18
7.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai							√	UM.002/6/1/KSOP.Dmi-2018
8.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang							√	UM.002/1/8/KSOP-Pjg-18
9.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas							√	KP.105/01/09/KSOP.Tg.Emas-18
10.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa							√	UM.002/1/1/KSOP.BNA-2018
11.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Biak							√	KP.104/4/5/KSOP.BIAK-18
12.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap							√	UM.003/17/20/KSOP.CLP-2018
13.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon							√	UM.002/3/19/KSOP.Cbn-18
14.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik							√	KP.109/03/02/Ksop.Gsk-2018
15.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura							√	UM.002/4/8/KSOP.JRA-18
16.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas							√	UM.002/21/257/KSOP.Kdi-18

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Pelabuhan Kelas II Kendari								
17.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang							√	OT.101/1/1/KSOP.KJG-2018
18.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang							√	KP.104/06/11/KSOP.PLG-18
19.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak							√	UM.002/1/1/KSOP-PTK 2018
20.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda							√	OT.101/1/1/KSOP.SMD-2018
21.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun							√	OT.101/1/1/KSOP.TBK-2018
22.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang							√	UM.002/3/3/KSOP-Tpi-18
23.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur							√	UM.002/4/12/KSOP.TBS-2018
24.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate							√	UM.002/6/2/KSOP.TTE-2018
25.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kuala Enok							√	UM.003/ / /KSOP.KE-2018
26.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang							√	OT.101/1/1/KSOP.Kpg-18
27.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar							√	UM.002/02/16/KSOP.Lbr-2018
28.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe							√	UM.002/2/7/KSOP-Lsm-18
29.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado							√	UM.002/01/01/KSOP.Mdo-18
30.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pantoloan							√	UM.002/04/57/KSOP.P.Loan-18
31.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pare-Pare							√	UM.002/80/02/KSOP.Pre-2018

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
32.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pekanbaru							√	HK.009/01/01/KSOP.PKU-2018
33.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai							√	UM.002/1/12/KSOP.BKl-18
34.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Sambu							√	UM.001/3/7/KSOP.Pls-2018
35.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit							√	UM.002/15/17/KSOP.SPY-18
36.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa							√	UM.008/1/4/KSOP-SKA/2018
37.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sungai Pakning							√	UM.002/ / /KSOP.SPK-2018
38.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Dukuh							√	UM.002/01/02/KSOP.TLD.JBI-2018
39.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi							√	UM.002/08/18/KSOP.TG.WI-2018
40.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan							√	KP.104/5/14/KSOP.Trk-18
41.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima							√	UM.002/2/29/KSOP.BMA-18
42.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Gorontalo							√	UM.002/48/08/KSOP.GTLO
43.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Baru							√	UM.002/1/18/KSOP.Ktb-18
44.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Cinaku								**BELUM ADA SP**
45.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai							√	UM.002/79/12/KSOP.Kmi-18
46.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Malahayati							√	UM.002/2/5/KSOP.MHT-18
47.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Manokwari							√	KP.109/1/11/KSOP.MKW-18

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
48.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke							√	UM.002/1/2/KSOP.MRK/2018
49.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Nunukan								Sudah ada SP, Data Legalitas belum masuk PPTB
50.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padang Bai							√	UM.002/12/02/KSOP.Pbi-2018
51.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam							√	UM.002/1/2/KSOP PKBLM2018
52.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu							√	UM.008/1/9/KSOP.PS-18
53.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo							√	KP.104/19/7/KSOP.PBL-2018
54.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal							√	UM.003/17/11/KSOP.Tgl-18
55.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan							√	UM.003/ / /KSOP.TBH-2018
56.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Toli-Toli								**BELUM ADA SP**
57.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Badas							√	UM.002/1/1/KSOP.BDS-2018
58.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bagansiapiapi							√	UM.002/1/08/KSOP.BAA.2018
59.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bakauheuni								**BELUM ADA SP**
60.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bandanaire							√	HH.480/1/1/KSOP.BND-18
61.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bengkalis							√	UM.002/1/20/KSOP.BKS/2018
62.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Celukan Bawang							√	UM.002/3/17/KSOP.CBW-2018
63.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Ende							√	UM.002/1/4/KSOP.END-2018

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
64.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Fak-Fak							√	UM.002/6/19/KSOP.FF-2018
65.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Gunung Sitoli							√	UM.001/2/10/KSOP.GST-2018
66.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Kalabahi							√	UM.002/1/3/KSOP.KBI-2018
67.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Kalianget							√	UM.002/44/5/KSOP.KLG-18
68.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Kalibaru							√	UM.008/1/1/KSOP-KLB/2018
69.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Kepulauan Seribu							√	UM.002/1/3/KSOP.KS-18
70.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Ketapang							√	UM.002 /4/9/ KSOP.KTG-2018
71.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Kuala Langsa							√	UM.002/1/4/KSOP.Klgs-18
72.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Kuala Pembuang							√	HM.003/19/03/KSOP.KP-2018
73.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Kuala Tanjung							√	OT.101/1/2/KSOP.KTG-2018
74.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Kuala Tungkal							√	UM.002/1/12/KSOP.-KTL/2018
75.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Laurentius Say							√	UM.002/2/19/KSOP.MRE-2018
76.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda							√	UM.008/1/9/KSOP.Mrd-18
77.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Meulaboh							√	UM.002/1/1/KSOP.MBO/18
78.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Muara Angke							√	UM/002/5/02/KSOP.MA-2018
79.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Muara Baru							√	OT.101/01/01/KSOP.MBU-2018

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
80.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Muara Sabak							√	UM.002/2/6/KSOP-MSK/2018
81.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Muntok							√	UM.002/1/07/KSOP.MTK.2018
82.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Panarukan							√	UM.002/02/II/KSOP.PNK-2018
83.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Pangkalan Bun							√	UM.002/16/17/KSOP.PBUN-2018
84.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Pasuruan							√	OT.101/01/03/KSOP.PAS-18
85.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Pegatan Mendawai							√	UM.002/9/1/KSOP.PGT.M/2018
86.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Pulau Pisau							√	UM.002/6/1/KSOP.PP-18
87.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Sabang							√	UM.102/1/1/KSOP.SAB-2018
88.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Samuda							√	UM.002/3/17/KSOP.SMD-18
89.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Selat Panjang							√	UM.002/02/15/KSOP.SLP-2018
90.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Sibolga							√	UM.002/3/14/KSOP.Sbg-2018
91.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Sintete							√	OT.101/1/2/KSOP.STT-18
92.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Sukamara							√	UM.002/22/16/KSOP.SKMR-2018
93.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Tanjung Balai Asahan							√	UM.008/1/1/KSOP/TBA-2018
94.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Tanjung Pandan							√	OT.107/1/1/KSOP.Tpdn-18
95.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas							√	UM.002/1/1/KSOP.AIR-18

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Pelabuhan Kelas V Teluk Air								
96.	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Waingapu							√	OT.101/01/01/KSOP.WPU-2018
	IV. KANTOR SYAHBANDAR UTAMA								
1.	Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan								**Belum Ada SP**
2.	Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar							√	UM.002/1394/12/Syb.Mks-18
3.	Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak						√		HK.207/03/01/SYB/TPR-17
4.	Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok							√	UM.008/12/18/OP.TPK-18
	V. KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA								
1.	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan							√	UM.008/2/5/OP-BLW-2018
2.	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar								Sudah ada SP tetapi Legalitas belum masuk ke PPTB
3.	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak							√	HK.208/03/09/OP.TPR-18
4.	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok							√	UM.008/12/18/OP.TPK-18
	VI. KANTOR PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI								
1.	Kantor Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok							√	KP/105/1/17/PLP.TPK-18
2.	Kantor Pangkalan PLP Kelas II Bitung							√	KP.105/ 1 / 01 /PLP.BTG-18
3.	Kantor Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak							√	UM.001/1/1/PLP.TPr-18
4.	Kantor Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban							√	UM.001/3/9/PLP.TUB-2018
5.	Kantor Pangkalan PLP Kelas II Tual							√	UM.002/2/13/PKL.PLP.TL-18
	VII. KANTOR PELABUHAN								
1.	Kantor Pelabuhan Batam							√	UM.002/1/17/KPL.BTM-18

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	VIII. KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN								
1.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Bau-Bau							√	UM.003/52/16/Upp.Bau-18
2.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Lhok Tuan							√	UM.002/01/01/UPP-LT/2018
3.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Manggar							√	UM.002/1/19/UPP.Mgr-2018
4.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut							√	UM.002/1/2/UPP.TGL.18
5.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban							√	UM.002/2/16/UPP.TUB-2018
6.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Amamapare							√	UM.002/8/2/UPP.AMP-18
7.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Babang							√	OT.10/1/1/UPP.BBG-2018
8.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Dabo Singkep							√	UM.002/3/13/UPP.Dbs-18
9.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Dobo							√	UM.003/1/7/Upp.Dbo-18
10.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Namlea							√	UM.002/34/26/UPP.Nla-18
11.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nipah Panjang							√	UM.002/1/09/KUPP.Npg/2018
12.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Palopo							√	UM.002/8/13/UPP.Plp-18
13.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan							√	OT.01/1/1/UPP.PKL-2018
14.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomala							√	UM.002/1/11/UPP.Pml-2018
15.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Poso							√	UM.002/5/3/UPP.PSO-2018
16.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan							√	OT.101/1/1/UPP.SNA-2018

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Kelas II Sanana								
17.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Sangatta							√	UM.002/4/144/UPP.SGA.18
18.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki							√	UM.008/3/7/2018
19.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tahuna							√	HK.107/1/15/UPP.THN-18
20.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tana Paser							√	UM.002/2/3/UPP.TPR-18
21.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Batu Kundur							√	UM.002/2/5/UPP.Tjt-18
22.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Santan							√	UM.002/12/V/UPP.Tsn-18
23.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tobelo								**BELUM ADA SP**
24.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tual							√	UM.002/17/3/K.UPP.TL.18
25.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tulehu							√	UM.002/01/03/UPP.Tlh-18
26.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waikelo							√	OT.101/1/03/UPP/Wlo-18
27.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wasior							√	UM.003/1/V/UPP.Wsr-2018
28.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Agats							√	UM.002/09/15/UPP.Agt/2018
29.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Amahai							√	UM.003/42/13/UPP.AMH-18
30.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana							√	UM.002/97/11/UPP-Amp-2018
31.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Amurang							√	OT.101/ / /UPP-Amg-2018
32.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan							√	UM.003/06/05.a/UPP.AGR-18

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Kelas III Anggrek								
33.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Anyer Lor							√	OT.101/01/01/UPP.Anl-18
34.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Atapupu							√	UM.002/02/20/UPP.Atp-18
35.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ba'a Rote							√	UM.002/4/6/UPP-Ba'a-18
36.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bade								**Belum Ada SP**
37.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bajoe							√	UM.002/15/03/UPP.BJE-18
38.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Banggai							√	UM.008/1/1/UPP-Bgi-18
39.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Baranusa							√	PR.202/01.1.UPP.Bra-2018
40.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Barus								**Belum Ada SP**
41.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang							√	UM.002/01/3/UPP.Btg-18
42.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batu Panjang							√	UM.102/1/2.UPP.Btp-18
43.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bawean							√	UM.002/2/16/UPP.Bwn-18
44.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Belang-Belang							√	UM.002/60/VI/UPP.BLGS-2018
45.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Benete							√	UM.002/3/4/UPP.BNT-18
46.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni							√	UM.002/01/09/UPP.BTN-18
47.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Biringkasi							√	UM.002/11/16/UPP.Bks-18
48.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan								**Belum Ada SP**

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Kelas III Bojonegara								
49.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Branta							√	UM.002/2/19/UPP.BTA-18
50.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Brebes							√	UM.003/8/19/UPP.BRS-18
51.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Brondong							√	UM.002/09/05/UPP.BRG-18
52.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Buleleng							√	UM.002/1/1/UPP.Bll-2018
53.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Buli							√	UM.008/1/01/UPP.BL-2018
54.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bulukumba							√	UM.002/10/56/UPP.BLK-2018
55.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bunta							√	UM.008/01/05/UPP-BTA/2018
56.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calabai							√	UM.002/29/VI/UPP.CLB-18
57.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calang							√	OT.101/1/1/UPP.CLG-2018
58.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Daruba							√	OT.101/1/1/UPP.DRB/2018
59.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Donggala							√	UM.002/04/07/UPP.DGLA-18
60.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Garongkong							√	UM.002/65/7/UPP.Grk-2018
61.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Geser							√	UM.002/12/1/UPP.GSR-18
62.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Gilimanuk							√	UM.002/5/96/UPP-GMK/2018
63.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Idi							√	KP.306/1/1/UPP.Idi.18
64.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan							√	OT.101/1/1/UPP-IM-2018

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Kelas III Indramayu								
65.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jailolo							√	UM.008/1/1/UPP.JLL-2018
66.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jampea							√	UM.002/04/248/UPP.Ja-18
67.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto							√	UM.002/99/18/UPP.Jpt-2018
68.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jepara							√	UM.002/7/20/UPP.Jpr-2018
69.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana							√	UM.003/9/14/UPP.JWN-2018
70.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kaimana							√	UM.001/I/I/UPP.KMN-2018
71.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kalbut							√	UM.002/03/20/UPP.Kbt-18
72.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karangantu							√	KP.104/3/5/UPP.KRU-2018
73.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karimun Jawa							√	UM.003/2/17/UPP.KRJW-2018
74.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kendawangan							√	UM.002/1/1/UPP.KDN-2018
75.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ketapang							√	UM.003/01/17/UPP.Ktp-18
76.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap							√	UM.001/127/12/UPP.Ktp-2018
77.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kokas							√	UM.002/1/05/UPP.KOKAS-18
78.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka							√	UM. 002/ 24 / 16 /UPP.Klk-2018
79.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonodale							√	UM.008/93/06/UPP.KDL-2018
80.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan							√	UM.002/3/4/UPP.KRD-18

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Kelas III Korido								
81.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kota Agung							√	UM.002/1/1/Kta-18
82.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kotabunan							√	UM.002/05/09.UPP.Ktbn-18
83.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung							√	HK.008/1/01/KUPP.KG-2018
84.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Mendahara							√	UM.002/1/15/UPP.MDR-2018
85.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Semboja							√	OT.101/1/1/UPP-KSBJ/2018
86.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kwandang								Sudah ada SP tetapi nomor belum masuk ke PPTB
87.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan							√	OT.101/1/3/UPP.LBN-18
88.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Bajo							√	UT.101/01/01/UPP/LBK-2018
89.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok								Sudah ada SP tetapi legalitas belum masuk ke PPTB
90.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Maringgai							√	UM.002/1/1/UPP.LBMi-18
91.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Uki							√	UM.002/001/14/UPP.LU-18
92.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lahewa							√	OT.101/1/1/UPP.LHW-2018
93.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Laiwui							√	UM.008/1/1/UPP.LWI/2018
94.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara							√	KP.105/143/15/UPP.LGR-18
95.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Larantuka							√	UM.002/3/9/UPP.Ltk-2018
96.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan							√	UM.002/1/3/UPP.LDG-2018

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Kelas III Leidong								
97.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leksula							√	UM.002/1/1/UPP.Lks-18
98.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leok							√	UM.002/1/11/UPP.Leok-18
99.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang							√	UM.003/01/13/UPP-Lkg-2018
100.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Linau Bintuhan							√	UM.302/01/02/UPP.Lnu-18
101.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lirung							√	UM.001/02/10/UPP-LRG-2018
102.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Luwuk							√	UM.008/4/19/UPP-Lwk-2018
103.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Majene								**BELUM ADA SP**
104.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malakoni / Enggano							√	UM.002/1/4/KUPP.Mlk-18
105.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malili							√	UM.001/8/16/UPP.MLL-2018
106.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Mamuju							√	OT.101/01/01/UPP.MU-18
107.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Marapokot							√	UM. 002 / 1 / 47 /UPP.Mpk-2018
108.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Masalembo							√	UM.003/03/02/UPP.Mslb-18
109.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Menggala							√	UM.002/1/6/UPP.Mgl-18
110.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Mesuji							√	UM.002/1/3/UPP.Msi-18
111.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Muara Siberut							√	UM.002/4/25/KUPP-SBR-2018
112.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan							√	AL.SO / 1/ 1/Upp.Nbr-20 18

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Kelas III Nabire								
113.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nusa Penida							√	UM.002/1/16/UPP.NPa-2018
114.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ogoamas							√	UM.003/04/57/UPP.OGS-18
115.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Oransbari							√	UM.002/1/6/UPP.ORB-18
116.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pagimana							√	HM.003/01/01/UPP.TGN-18
117.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Paloh								Sudah ada SP tetapi Legalitas belum masuk ke PPTB
118.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pamanukan							√	OT.101/1/1/UPP.Pml-18
119.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pangandaran							√	OT.101/1/01/UPP-Pnd.18
120.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pangkalan Dodek							√	UM.108/1/7/UPP.PD-18
121.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Panipahan							√	UM.002/1/3/UPP.PNP-18
122.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pantai Cermin							√	OT.101/1/1/UPP.OC/2018
123.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Parigi							√	UM.002/36/04/UPP.PRG-18
124.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pattirobajo							√	UM.002/05/05/UPP.Ptb-2018
125.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Ratu							√	UM.002/1/1/UPP-Plr-2018
126.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pemenang							√	UM.002/8/02/KUPP.PMG-18
127.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Polewali							√	UM.001/3/08/UPP.PLW-2018
128.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan							√	UM.002/01/01/UPP.PMK-18

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Kelas III Pomako								
129.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu							√	OT. 101 / 1 / 1 /UPP.BNY /2018
130.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Kampai							√	OT.101/01/01/KUPP-KAMPAI/2018
131.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Tello							√	OT. 101 / 1 / 1 /UPP.Pto-18
132.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Raha							√	UM.002/08/12/UPP.RH-2018
133.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rangga Ilung							√	UM.003/02/IV/UPP.RI-18
134.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang							√	UM.002/2/3/UPP.Rbg-2018
135.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Reo							√	UM.002/1/5/UPP.REO-18
136.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sangkulirang							√	OT.101/1/1/UPP.Skg-18
137.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Saonek							√	UM.002/1/1/KUPP.SNK.2018
138.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sape							√	UM.002/05/V/KUPP-SP-2018
139.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sapeken							√	UM.002/3/1/UPP.Spk-18
140.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sapudi							√	UM.002/3/8/UPP.Spd-18
141.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sarmi							√	UM.002/1/6/UPP.SMI-18
142.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui							√	UM.002/2/15/UPP.Satui-2018
143.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba							√	PR.202/01/1/UPP.Seba-2018
144.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan							√	UM.002/09/06/UPP.SBK-2018

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Kelas III Sebuku								
145.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sei Berombang							√	UM.002/1/1/UPP.SBG-2018
146.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar							√	UM.001/16/222/UPP.Sly-2018
147.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Senayang							√	UM.003/1/18/UPP.Sny-2018
148.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Serui								**Belum Ada SP**
149.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sikakap							√	UM.002/01/01/UPP-SKP/2018
150.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sikara-Kara Natal							√	UM.003/1/7/Upp-Skr-2018
151.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinabang							√	OT.107/1/1/UPP-Snb.18
152.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinaboi								Sudah ada SP Tetapi legalitas belum masuk ke PPTB
153.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Singkil							√	UM.108/1/1/UPP.SKL-2018
154.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai							√	UM.002/04/10/UPP.SJ-18
155.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sirombu							√	OT.101/1/1/UPP.SRB-2018
156.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siuban							√	UM.003/1/01/UPP-SBN-2018
157.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa							√	UM.002/10/12/UPP.SW-18
158.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Soasio							√	UM.002/1/1/UPP.SS-2018
159.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung							√	UM.002/ 2 / 6 /UPP.SGT-18
160.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan							√	OT.007/1/1/UPP.SLR-18

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Kelas III Sungai Lumpur								
161.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk							√	OT. 101/ 1 / 1 /UPP.SN-18
162.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Susoh							√	OT.105/1/1UPP.Sso-18
163.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Batu								**Belum Ada SP**
164.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Beringin							√	UM.002/1/1/UPP.TBN-18
165.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Medang							√	OT.101/1/1/UPP.TGM-2018
166.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Pura							√	OT.101/1/1/UPP.TP-2018
167.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Redeb							√	UM.001/01/01/UPP.Trb-18
168.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Sarang Elang							√	UM.001/1/1/UPP-TSE-18
169.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Selor							√	OT.101/1/1/UPP-TSR/2018
170.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Tiram							√	OT.101/1/2/UPP.TT-18
171.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tapak Tuan							√	UM.108/1/1/UPP.TTN-2018
172.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tarempa							√	UM.002/3/01/UPP.TPA-18
173.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Telaga Biru							√	UM.010/1/V/UPP.TLB-2019
174.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Betung							√	UM.002/1/1/UPP.Tbg-18
175.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Dalam							√	UM.008/58/1/UPP-TDM/2018
176.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan							√	UM. 002/ 4 / 2 /UPP.TMO-2018

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Kelas III Teluk Melano								
177.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Taminabuan							√	UM.001/1/2/UPP.TMB-18
178.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tilamuta							√	UM.003/ 12 / 6 /UPP-TLM-2018
179.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Toboali							√	UM.OO2/I/001/UPP TBL-2018
180.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ulu Siau							√	UM. 008/ 03 /16 /UPP-ULS-18
181.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wahai							√	UM.002/1/1/UPP.WHI-18
182.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waisarisa							√	UM.003/2/15/UPP-WS-18
183.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wani							√	UM.101/56/02/UPP.WN.18
184.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waren								**Belum Ada SP**
185.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda							√	UM.008/1/01/UPP.WD-2018
186.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wonreli							√	UM.003/2/01/KUPP.WRL-18
	C. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA								
	I. KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA								
1	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Utama	Soekarno Hatta, Banten						
2	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	I	Polonia, Medan						
3	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III	I	Juanda, Surabaya						
4	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV	I	Ngurah Rai, Denpasar						
5	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah	I	Hasanuddin,						

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	V		Makassar						
6	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI	II	Minangkabau, Padang						
7	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	II	Sepinggan, Balikpapan						
8	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII	II	Sam Ratulangi, Manado						
9	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX	II	Rendani, Manokwari						
10	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	II	Mopah, Merauke						
	II. KANTOR BALAI								
1	Kantor Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan				√				PM 109 Tahun 2015
2	Kantor Balai Teknik Penerbangan					√			PM 48 Tahun 2016
3	Kantor Balai Kesehatan Penerbangan				√				PM 145 Tahun 2015
	III. KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA								
1	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata	I Utama	Tarakan			√			PM 96 Tahun 2016
2	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani	I Utama	Jayapura			√			PM 97 Tahun 2016
3	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno	I	Bengkulu			√			PM 80 Tahun 2016
4	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara H.As. Hanandjoedin	I	Tanjung Pandan			√			PM 105 Tahun 2016
5	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II	I	Lampung Selatan			√			PM 78 Tahun 2016
6	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut	I	Palangkaraya			√			PM 98 Tahun 2016
7	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaludin	I	Gorontalo			√			PM 102 Tahun 2016
8	Kantor Unit Penyelenggara Bandar	I	Palu			√			PM 79 Tahun 2016

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Udara Mutiara Sis Al Jufri								
9	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	I	Kendari			√			PM 103 Tahun 2016
10	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	I	Merauke			√			PM 107 Tahun 2016
11	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	I	Jayawijaya			√			PM 125 Tahun 2016
12	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok	I	Sorong			√			PM 106 Tahun 2016
13	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak Dien Nagan Raya	II	Nagan Raya						
14	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	II	Gunung Sitoli						
15	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Mahmud Salahudin	II	Bima						
16	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Fransiskus Xaveria Seda	II	Maumere						
17	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	II	Waingapu						
18	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	II	Labuhan Bajo						
19	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman	II	Ende						
20	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tambolaka	II	Waikabubak						
21	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	II	Atambua						
22	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman	II	Ketapang						
23	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma	II	Putusibau						
24	Kantor Unit Penyelenggara Bandar	II	Pangkalan Bun						

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Udara Iskandar								
25	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara H. Asan	II	Sampit						
26	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	II	Kotabaru						
27	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Temindung	II	Samarinda						
28	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	II	Tanjung Redep			√			PM 127 Tahun 2016
29	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir	II	Luwuk						
30	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Baabullah	II	Ternate			√			PM 126 Tahun 2016
31	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Douw Aturure	II	Nabire						
32	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	II	Manokwari			√			PM 104 Tahun 2016
33	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh	III	Sabang						
34	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	III	Sinabang						
35	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teuku Cut Ali	III	Tapak Tuan						
36	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rambele	III	Takengon						
37	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	III	Pulau-pulau Batu						
38	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara FL Tobing	III	Sibolga						
39	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	III	Padang Sidempuan						
40	Kantor Unit Penyelenggara Bandar	III	Sipora						

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Udara Rokot								
41	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	III	Singkep						
42	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji Abdullah	III	Karimun						
43	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	III	Rengat						
44	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian	III	Pasir Pangaraian						
45	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati Parbo	III	Kerinci						
46	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara Bungo	III	Rimbo Bujang						
47	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko-muko	III	Muko-muko						
48	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Cakrabhuana	III	Cirebon						
49	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung	III	Cilacap						
50	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewa Daru	III	Karimun Jawa						
51	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Blimbingsari	III	Banyuwangi						
52	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	III	Sumenep						
53	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin	III	Sumbawa						
54	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega	III	Ruteng						
55	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	III	Atambua						
56	Kantor Unit Penyelenggara Bandar	III	Alor						

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Udara Mali								
57	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	III	Larantuka						
58	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara David Constantijn Saudale	III	Rote Ndao						
59	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	III	Sabu						
60	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Soa	III	Bajawa						
61	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Wonopito	III	Lewoleba						
62	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Susilo	III	Sintang						
63	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Nangapinoh	III	Nangapinoh						
64	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	III	Buntok						
65	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	III	Muara Teweh						
66	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumbang Samba	III	Tumbang Samba						
67	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Pembuang	III	Kotawaringin Timur						
68	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Kurun	III	Kuala Kurun						
69	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	III	Sendawar						
70	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai	III	Datah Dawai						
71	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Seluwing	III	Malinau						
72	Kantor Unit Penyelenggara Bandar	III	Nunukan						

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Udara Nunukan								
73	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai Semaring	III	Long Bawan						
74	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan	III	Tanjung Selor						
75	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Long Apung	III	Long Apung						
76	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	III	Natuna						
77	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Melongguane	III	Sangihe Talaud						
78	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Pogogul	III	Buol						
79	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Bantilan	III	Tolo toli						
80	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang	III	Pandeglang, Banten						
81	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	III	Makale						
82	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara H. Aroepala	III	Pulau Selayar						
83	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi Jemma	III	Masamba						
84	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Bone	III	Bone						
85	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	III	Seko						
86	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	III	Rampi						
87	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Bua	III	Luwu						
88	Kantor Unit Penyelenggara Bandar	III	Kendari						

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Udara halu Oleo								
89	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	III	Wakatobi						
90	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Ni Bandera	III	Kolaka						
91	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Beto Ambari	III	Bau-bau						
92	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sugimanuru	III	Muna						
93	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	III	Sanana						
94	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	III	Maba						
95	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	III	Kao						
96	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Gamar Malamo	III	Galela						
97	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman Sadik	III	Labuha						
98	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	III	Morotai						
99	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ibra	III	Langgur						
100	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara John Becker	III	Pulau Kisar						
101	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	III	Pulau Larat						
102	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	III	Pulau Aru						
103	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri	III	Maluku Tenggara Barat						
104	Kantor Unit Penyelenggara Bandar	III	Pulau Banda						

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Udara Bandaneira								
105	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	III	Pulau Buru						
106	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	III	Pulau Buru						
107	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	III	Pulau Seram						
108	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	III	Pulau Seram						
109	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	III	Memberamo Raya						
1110	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	III	Asmat						
111	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	III	Merauke						
112	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	III	Boven Digoel						
113	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	III	Keerom						
114	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	III	Yalimo						
115	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	III	Intan Jaya						
116	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	III	Paniai						
117	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	III	Deiyai						
118	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	III	Sarmi						
119	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	III	Boven Digoel						
120	Kantor Unit Penyelenggara Bandar	III	Puncak Jaya						

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Udara Mulia								
121	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sudjarwo Tjondronegoro	III	Serui						
122	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	III	Pegunungan Bintang						
123	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kiwirok	III	Pegunungan Bintang						
124	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	III	Nabire						
125	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	III	Boven Digoel						
126	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	III	Mappi						
127	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kokonao	III	Mimika						
128	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	III	Mimika						
129	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes kilangin	III	Mimika Jayawijaya						
130	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Bokondini	III	Jayawijaya						
131	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	III	Merauke						
132	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfoor	III	Biak Numfoor						
133	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Illaga	III	Puncak						
134	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	III	Puncak Jaya						
135	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	III	Lanny Jaya						
136	Kantor Unit Penyelenggara Bandar	III	Asmat						

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Udara Ewer								
137	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Batom	III	Pegunungan Bintang						
138	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	III	Mappi						
139	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	III	Tolikara						
140	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Nop Goliat Dekai	III	Yahukimo						
141	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	III	Waisai						
142	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Torea	III	Fak fak						
143	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	III	Teluk Bintuni						
144	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	III	Kaimana						
145	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey	III	Manokwari						
146	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior	III	Teluk Womdana						
147	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan	III	Sorong Selatan						
148	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan	III	Sorong Selatan						
149	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	III	Teluk Bintuni						
150	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kambuaya	III	Manokwari						
151	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kebar	III	Manokwari						
152	Kantor Unit Penyelenggara Bandar	III	Sorong Selatan						

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Udara Ayawesi								
	D. DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN								
1	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Jakarta							
2	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Jakarta							
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Jakarta							
4	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Jakarta							
	E. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN								
1	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan		Bogor						***Belum ada***
2	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi		Bandung						***Belum ada***
3	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat		DKI Jakarta						***Belum ada***
4	Sekolah Tinggi Transportasi Darat		Bekasi		√				PM 150 Tahun 2015
5	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan		Tegal						***Keputusan Kepala Balai***
6	Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun		Madiun		√				PM 148 Tahun 2015
7	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Bali		Bali		√				PM 101 Tahun 2015
8	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang		Palembang		√				PM 162 Tahun 2015
9	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut		DKI Jakarta						***Belum ada***
10	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran		DKI Jakarta						***Peraturan Kepala Balai***
11	Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran		DKI Jakarta						***Peraturan Kepala Balai***
12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut		DKI Jakarta		√				PM 149 Tahun 2015
13	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar		Makassar						PM 1 Tahun 2018

NO	UNIT KERJA	KELAS	LOKASI	DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SP)					LEGALITAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
				2014	2015	2016	2017	2018	
14	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang		Semarang				√		PM 23 Tahun 2017
15	Politeknik Pelayaran Surabaya		Surabaya						***Peraturan Kepala Balai***
16	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran		Tangerang		√				PM 99 Tahun 2015
17	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar		Aceh Besar		√				PM 110 Tahun 2015
18	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong		Sorong		√				PM 114 Tahun 2015
19	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong		Barombong		√				PM 54 Tahun 2015
20	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Padang Pariaman		Padang Pariaman						***Peraturan Kepala Balai***
21	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Minahasa Selatan		Minahasa Selatan						***Peraturan Kepala Balai***
22	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara		Tangerang						***Belum ada***
23	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia		Tangerang		√				PM 151 Tahun 2015
24	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan		Medan		√				PM 113 Tahun 2015
25	Politeknik Penerbangan Surabaya		Surabaya						***Peraturan Kepala Balai***
26	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar		Makassar		√				PM 102 Tahun 2015
27	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura		Jayapura		√				PM 108 Tahun 2015
28	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug		Tangerang		√				PM 112 Tahun 2015
29	Balai Pendidikan Pelatihan Penerbangan Banyuwangi		Banyuwangi			√			PM 70 Tahun 2016
30	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang		Palembang			√			PM 34 Tahun 2016



LAMPIRAN 22

Kepmenhub Nomor KP. 1814/2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 1814 TAHUN 2018
TENTANG
ALOKASI BANTUAN DAN STATUS ASET
BUS UKURAN SEDANG *BUS RAPID TRANSIT* TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan;

b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan yang mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat, perlu dukungan Pemerintah dengan memberikan bantuan *Bus Rapid Transit;*

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Alokasi Bantuan dan Status Aset Bus Ukuran Sedang *Bus Rapid Transit* Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALOKASI BANTUAN DAN STATUS ASET BUS UKURAN SEDANG *BUS RAPID TRANSIT* (BRT) TAHUN ANGGARAN 2018.

PERTAMA : Menetapkan Alokasi Bantuan dan Status Aset Bus Ukuran Sedang *Bus Rapid Transit* Tahun Anggaran 2018 sebanyak 240 (Dua Ratus Empat Puluh) unit kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan sebagai Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penerima Bus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. mengoperasikan bus bantuan sebagai Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan pada wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional;

b. mengoperasikan bus sebagai angkutan massal berbasis jalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;

c. menanggung biaya pengurusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berupa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan;

d. melakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

e. melakukan pemeliharaan dan perawatan bus dengan baik dan benar;

f. menyampaikan laporan kinerja operasional bus secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 2 (dua) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Angkutan dan Multimoda; dan

g. mengajukan permohonan penetapan status aset atas bus yang telah diterima, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional yang dilaksanakan dengan menyampaikan persyaratan yang diperlukan untuk proses hibah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dalam mengoperasikan bus dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

KEEMPAT : Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sesuai dengan kewenangannya, berperan sebagai berikut :

a. menetapkan kawasan perkotaan sebagai kawasan pelayanan angkutan perkotaan dan menetapkan jaringan trayek sesuai dengan rencana induk atau dokumen perencanaan angkutan perkotaan;

b. melaksanakan proses perizinan angkutan umum;

c. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan rencana pengoperasian angkutan massal berbasis jalan kepada seluruh pemangku kepentingan;

d. menetapkan pengaturan sistem pengoperasian yang efektif dan efisien;

e. menyediakan halted an fasilitas pendukung angkutan massal lainnya; dan

f. dapat memberikan subsidi angkutan umum.

KELIMA : Status asset bus bantuan yang diberikan oleh kementerian Perhubungan berupa hibah dan selanjutnya merupakan asset Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2018

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur, Walikota, atau Bupati terkait;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 1814 TAHUN 2018
TENTANG ALOKASI BANTUAN DAN STATUS ASET BUS UKURAN SEDANG *BUS RAPID TRANSIT* TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PENERIMA BUS	LOKASI KOTA/KAWASAN PERKOTAAN/PROVINSI	JUMLAH BUS
1.	Provinsi Aceh	Wilayah Perkotaan Banda Aceh Raya	10
2.	Kota Padang	Wilayah Kota Padang dan Sekitarnya	10
3.	Kota Pekanbaru	Wilayah Perkotaan Pekanbaru dan Sekitarnya	10
4.	Kota Batam	Wilayah Kota Batam dan Sekitarnya	10
5.	Provinsi Bengkulu	Wilayah Perkotaan Bengkulu Raya	5
6.	Provinsi Jambi	Wilayah Perkotaan Jambi Raya	5
7.	Kota Palembang	Wilayah Kota Palembang dan Sekitarnya	15
8.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Sekitarnya	5
9.	Kabupaten Muara Enim	Wilayah Kabupaten Muara Enim dan Sekitarnya	5
10.	Kota Bandar Lampung	Wilayah Kota Bandar Lampung dan Sekitarnya	10
11.	Kota Tangerang Selatan	Wilayah Kota Tangerang Selatan dan Sekitarnya	20
12.	Kota Bandung	Wilayah Kota Bandung dan Sekitarnya	15
13.	Kota Bekasi	Wilayah Kota Bekasi dan Sekitarnya	20
14.	Kota Sukabumi	Wilayah Kota Sukabumi dan Sekitarnya	5
15.	Kota Cirebon	Wilayah Kota Cirebon dan Sekitarnya	10
16.	Provinsi Jawa Tengah	Wilayah Perkotaan Semarang Raya	10

17.	Kota Semarang	Wilayah Kota Semarang dan Sekitarnya	10
18.	Kabupaten Gianyar	Wilayah Kabupaten Gianyar dan Sekitarnya	5
19.	Kota Kupang	Wilayah Kota Kupang dan Sekitarnya	5
20.	Provinsi Kalimantan Selatan	Wilayah Perkotaan Banjarmasin Raya	5
21.	Kota Palangkaraya	Wilayah Kota Palangkaraya dan Sekitarnya	5
22.	Provinsi Kalimantan Barat	Wilayah Perkotaan Pontianak Raya	5
23.	Provinsi Kalimantan Utara	Wilayah Perkotaan Tanjung Selor Raya dan Sekitarnya	5
24.	Provinsi Sulawesi Selatan	Wilayah Perkotaan Makassar Raya dan Sekitarnya	15
25.	Kota Baubau	Wilayah Kota Baubau dan Sekitarnya	5
26.	Provinsi Gorontalo	Wilayah Perkotaan Gorontalo Raya	10
27.	Kabupaten Gorontalo	Wilayah Kabupaten Gorontalo dan Sekitarnya	5
JUMLAH BUS			240

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001



LAMPIRAN 23

Kepmenhub Nomor KP. 1815/2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR NOMOR 1815 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI BANTUAN DAN STATUS ASET
BUS SEKOLAH UKURAN SEDANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 139 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum;

b. bahwa dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan angkutan perkotaan yang mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat secara handal dan berkelanjutan, Pemerintah perlu mendukung dengan memberikan bantuan Bus Angkutan Perkotaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Alokasi Bantuan Bus Angkutan Umum Perkotaan Tahun Anggaran 2018.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALOKASI BANTUAN DAN STATUS ASET BUS SEKOLAH UKURAN SEDANG TAHUN ANGGARAN 2018.

PERTAMA : Menetapkan Alokasi Bantuan dan Status Aset Bus Sekolah Ukuran Sedang Tahun Anggaran 2018 sebanyak 180 (Seratus Delapan Puluh) unit kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Lembaga Pendidikan untuk dioperasikan sebagai Angkutan Sekolah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penerima Bus yang dioperasikan sebagai Angkutan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Melakukan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor (BBNKB, BPKB, STNK) dan melakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku, atas biaya sendiri;

b. mengoperasikan bantuan bus sebagai Angkutan Sekolah pada wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten/Lembaga Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional, sesuai dengan ketentuan;

c. mengoperasikan bus sebagai Angkutan Sekolah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;

d. dalam hal pengoperasian bus, Penerima Bus dapat bekerjasama dengan pihak ketiga;

e. melakukan pemeliharaan dan perawatan bus dengan baik dan benar;

f. memberikan laporan kinerja operasional bus secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 2 (dua) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Angkutan dan Multimoda; dan

g. mengajukan permohonan penetapan status asset atas bus yang telah diteruima dengan menyampaikan persyaratan yang diperlukan untuk proses hibah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional.

KETIGA : Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten/Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dalam mengoperasikan bus dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

KEEMPAT : Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten/Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sesuai dengan kewenangannya, berperan sebagai berikut:

a. menetapkan jaringan trayek sesuai dengan rencana induk atau dokumen perencanaan angkutan sekolah;

b. melaksanakan proses perizinan angkutan umum;

c. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan rencana

pengoperasian angkutan sekolah kepada seluruh pemangku kepentingan;

d. menetapkan pengaturan sistem pengoperasian yang efektif dan efisien;

e. menyediakan halte dan fasilitas pendukung angkutan massal lainnya;

dapat memberikan subsidi angkutan sekolah jika diperlukan.

KELIMA : Status asset bus bantuan yang diberikan oleh kementerian perhubungan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan lembaga pendidikan berupa hibah yang selanjutnya merupakan asset pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Lembaga Pendidikan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :19 Oktober 2018

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan RI;
2. Gubernur, Walikota, atau Bupati dan Lembaga Pendidikan terkait;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1815 TAHUN 2018
TENTANG ALOKASI BANTUAN DAN STATUS ASET BUS SEKOLAH UKURAN SEDANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PENERIMA BUS BANTUAN	PROVINSI	JUMLAH BUS
1	Kabupaten Aceh Tenggara	Aceh	1
2	Kabupaten Gayo Lues	Aceh	1
3	Kabupaten Aceh Singkil	Aceh	1
4	Kabupaten Bener Meriah	Aceh	1
5	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sumatera Utara	1
6	Kabupaten Nias Selatan	Sumatera Utara	2
7	Kabupaten Padang Lawas Utara	Sumatera Utara	1
8	Yayasan Teladan Bahagia	Sumatera Utara	1
9	Yayasan Baru Doloksanggul	Sumatera Utara	1
10	Universitas Simalungun	Sumatera Utara	1
11	Kabupaten Dharmasraya	Sumatera Barat	1
12	Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat	1
13	Kabupaten Sijunjung	Sumatera Barat	1
14	Kabupaten Solok	Sumatera Barat	1
15	Kota Solok	Sumatera Barat	1
16	Kabupaten Pesisir Selatan	Sumatera Barat	1
17	Kabupaten Agam	Sumatera Barat	1
18	Yayasan Prayoga Padang	Sumatera Barat	1
19	Yayasan Tri Ratna Padang	Sumatera Barat	1
20	Universitas Andalas Padang	Sumatera Barat	1
21	Pesantren Modern Terpadu Prof. DR. Hamka	Sumatera Barat	1
22	Universitas Bung Hatta	Sumatera Barat	1
23	Institut Seni Indonesia Padangpanjang	Sumatera Barat	1
24	Kabupaten Kampar	Riau	1
25	Kabupaten Siak	Riau	1
26	Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Belitung	1

27	Kabupaten Belitung Timur	Bangka Belitung	1
28	Kabupaten Bangka	Bangka Belitung	1
29	Kabupaten Tebo	Jambi	1
30	Kabupaten Lebong	Bengkulu	1
31	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	1
32	Kabupaten Banyuasin	Sumatera Selatan	1
33	Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan	1
34	Kabupaten Empat Lawang	Sumatera Selatan	1
35	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan	1
36	Universitas Sriwijaya	Sumatera Selatan	2
37	Kabupaten Lampung Selatan	Lampung	1
38	Kabupaten Mesuji	Lampung	1
39	Kabupaten Pringsewu	Lampung	1
40	Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	1
41	Kabupaten Garut	Jawa Barat	2
42	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	1
43	Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat	1
44	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	1
45	Kota Banjar	Jawa Barat	1
46	Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat	1
47	Kabupaten Kuningan	Jawa Barat	1
48	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	1
49	Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon	Jawa Barat	1
50	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Jawa Barat	1
51	Universitas Wiralodra Indramayu	Jawa Barat	1
52	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Cianjur	Jawa Barat	1
53	Yayasan Az-Zarkasyiah Leles Cianjur	Jawa Barat	1
54	Pondok Pesantren Al-Ittihad Cianjur	Jawa Barat	1
55	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	1
56	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	1
57	Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah	1
58	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	2
59	Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah	1
60	Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah	1
61	Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah	1

62	Kabupaten Kendal	Jawa Tengah	1
63	Kabupaten Demak	Jawa Tengah	1
64	Pondok Pesantren API Tegalrejo	Jawa Tengah	1
65	Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Cilacap	Jawa Tengah	1
66	Pondok Pesantren Nida Al-Quran, Temanggung	Jawa Tengah	1
67	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama, Temanggung	Jawa Tengah	1
68	Universitas Tidar, Magelang	Jawa Tengah	1
69	Pondok Pesantren Darussalam Gunungpring	Jawa Tengah	1
70	Pondok Pesantren Sirojurrokhim	Jawa Tengah	1
71	Pondok Pesantren Nurul Huda Andong	Jawa Tengah	1
72	Pondok Pesantren Nuril Anwar	Jawa Tengah	1
73	Kota Mojokerto	Jawa Timur	1
74	Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur	2
75	Kabupaten Madiun	Jawa Timur	1
76	Kabupaten Pacitan	Jawa Timur	1
77	Kota Malang	Jawa Timur	1
78	Kota Blitar	Jawa Timur	1
79	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur	1
80	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Jawa Timur	1
81	Universitas Tulungagung	Jawa Timur	1
82	Yayasan Pendidikan Nasional Raudhatul Muta'alimin Al-Hasaniyah	Jawa Timur	1
83	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Jawa Timur	1
84	SMA Negeri 1 Kota Mojokerto	Jawa Timur	1
85	SMA Negeri Mojoagung	Jawa Timur	1
86	SMA PGRI 1 Jombang	Jawa Timur	1
87	Universitas Darul' Ulum	Jawa Timur	1
88	Universitas Hasyim Asy'ari	Jawa Timur	1
89	Pondok Pesantren Al-Uluwiyah, Mojokerto	Jawa Timur	1
90	STKIP PGRI Jombang	Jawa Timur	1
91	SMK Al-Kaffah Kepanjen, Malang	Jawa Timur	1
92	Yayasan Roudhotul Ulum Mojowarno, Jombang	Jawa Timur	1

93	STIKIP Mohammadiyah Madiun	Jawa Timur	1
94	SMA Negeri 1 Ngoro	Jawa Timur	1
95	SMA Negeri 1 Pacet	Jawa Timur	1
96	Yayasan Al-Khoiriyah Baron, Nganjuk	Jawa Timur	1
97	Universitas Muhammadiyah Malang	Jawa Timur	1
98	Kabupaten Jembrana	Bali	1
99	STKIP Taman Siswa Bima	Nusa Tenggara Barat	1
100	Yayasan Munirul Arifin NW Praya	Nusa Tenggara Barat	1
101	Yayasan Darul Abror NW Gunung Rajak	Nusa Tenggara Barat	1
102	Yayasan Lendang Kekah NW Mantang	Nusa Tenggara Barat	1
103	Yayasan Syeikh Zainuddin NW Anjani	Nusa Tenggara Barat	1
104	Universitas Nahdlatul Wathan Mataram	Nusa Tenggara Barat	1
105	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	1
106	Kabupaten Ende	Nusa Tenggara Timur	1
107	Kabupaten Nagekeo	Nusa Tenggara Timur	1
108	Kabupaten Alor	Nusa Tenggara Timur	1
109	Kabupaten Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	1
110	Kabupaten Belu	Nusa Tenggara Timur	1
111	Universitas Tribuana Kalabahi	Nusa Tenggara Timur	1
112	Universitas Kristen Arta Wacana	Nusa Tenggara Timur	1
113	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	1
114	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	1
115	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin	Kalimantan Selatan	1
116	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	1
117	Kabupaten Katingan	Kalimantan Tengah	1
118	Kabupaten Gunung Mas	Kalimantan Tengah	1
119	Kabupaten Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	1
120	Kabupaten Murung Raya	Kalimantan Tengah	1
121	Kabupaten Sukamara	Kalimantan Tengah	1
122	Kabupaten Kapuas	Kalimantan Tengah	1
123	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	1
124	Kabupaten Sekadau	Kaliamantan Barat	1
125	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	1
126	Kota Bontang	Kalimantan Timur	1

127	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1
128	Kabupaten Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	1
129	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Sulawesi Selatan	1
130	Kabupaten Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan	1
131	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan	1
132	Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan	1
133	Kabupaten Jeneponto	Sulawesi Selatan	2
134	Kota Palopo	Sulawesi Selatan	1
135	Kabupaten Barru	Sulawesi Selatan	1
136	Pondok Pesantren Modern Babussa'adah Kab. Luwu	Sulawesi Selatan	1
137	Universitas Hasanuddin	Sulawesi Selatan	1
138	Universitas Muhammadiyah Parepare	Sulawesi Selatan	1
139	Kabupaten Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	1
140	Kabupaten Muna	Sulawesi Tenggara	1
141	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muna	Sulawesi Tenggara	1
142	Universitas Tomakaka	Sulawesi Barat	1
143	Kabupaten Banggai Laut	Sulawesi Tengah	1
144	Kabupaten Banggai Kepulaun	Sulawesi Tengah	1
145	Kabupaten Sigi	Sulawesi Tengah	1
146	Kabupaten Poso	Sulawesi Tengah	1
147	Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara	1
148	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara	2
149	Kabupaten Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	1
150	Kabupaten Sangihe	Sulawesi Utara	1
151	Universitas Muhammadiyah Manado	Sulawesi Utara	1
152	Kota Gorontalo	Gorontalo	1
153	Kabupaten Gorontalo	Gorontalo	1
154	Kabupaten Boalemo	Gorontalo	1
155	Kabupaten Pohuwato	Gorontalo	1
156	Kabupaten Gorontalo Utara	Gorontalo	1
157	Kabupaten Bone Bolango	Gorontalo	1
158	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai	Gorontalo	1
159	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Mandiri	Gorontalo	1
160	Politeknik Gorontalo	Gorontalo	1

161	Kabupaten Maluku Barat Daya	Maluku	1
162	Universitas Pattimura	Maluku	1
163	Kota Ternate	Maluku Utara	1
164	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	1
165	Kabupaten Kepulauan Morotai	Maluku Utara	1
166	Universitas Muhammadiyah Maluku Utara	Maluku Utara	1
167	Universitas Cendrawasih	Papua	1
168	Kabupaten Pegunungan Arfak	Papua Barat	1
169	Kabupaten Maybrat	Papua Barat	1
170	Kabupaten Manokwari Selatan	Papua Barat	1
171	Kabupaten Teluk Wondama	Papua Barat	1
172	Kabupaten Manokwari	Papua Barat	1
173	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong	Papua Barat	1
JUMLAH BUS			180

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001



LAMPIRAN 24

Layanan Transportasi Darat
Pada Wilayah Rawan Bencana Tahun 2018

Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil
(Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertingggal Tahun 2015-2019)

No	Provinsi/Kabupaten	Lintas Penyeberangan Tahun 2018
1	**Provinsi Aceh**	
	1 Kab. Aceh Barat (Pulau Simeleu Cut, Pulau Raya)	
	2 Kab. Aceh Utara (Pulau Salaut Besar)	
	3 Kab. Aceh Besar (Pulau Rusa, Pulau Bateeleblah, Pulau Weh)	Lintas Balohan - Ulee Lheu , lintas Ulee Lheu - Lamteng
	4 Kab. Sabang (Pulau Rondo)	
	5 Kab. Aceh Singkil.	Lintas Singkil-P. Banyak, Singkil Guning Sitoli
2	**Provinsi Sumatera Utara**	
	1 Kab. Nias (Pulau Simuk, Pulau Wunga)	
	2 Kab. Deli Serdang (Pulau Berhala)	
	3 Kab. Nias Selatan	Lintas T. Dalam-P. Telo
	4 Kab. Nias Utara	
	5 Kab. Nias Barat.	
3	**Provinsi Sumatera Barat**	
	1 Kab. Kepl Mentawai (Pulau Sibaru-baru, Pulau Pagai Utara, Pulau Niau)	Lintas Padang - Sikakap, Padang - Siberut, Siberut - Sikabaluan dan Padang - Sikabaluan)
	2 Kab. Solok Selatan	Trayek Leter W - Padang Aro - Sungai Kunyit - Sungai Rumbai , Padang Aro - Abai
	3 Kab. Pasaman Barat.	Trayek Terminal Simpang - Ampek - Jembatan Panjang - Mudiak Simpang
4	**Provinsi Kepulauan Riau**	
	1 Kota Batam (Pulau Berakit, Pulau Nipa, Pulau Pelampung, Pulau Batu Berantai, Pulau Putri)	
	2 Kab. Bintan (Pulau Sentut, Pulau Malang-berdaun, Pulau Batu Mandi)	
	3 Kab. Kepulauan Anambas (Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Belayar)	
	4 Kab. Natuna (Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Boro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala)	
	5 Kab. Karimun (Pulau Tokong-hiu kecil, Pulau Karimun anak)	
	6 Kota Tanjung Pinang (Pulau Bintan)	

No	Provinsi/Kabupaten	Lintas Penyeberangan Tahun 2018
5	**Provinsi Riau**	
	1 Kab. Kepulauan Meranti (Pulau Rupat, Pulau Rangsang)	
	2 Kab. Bengkalis (Pulau Bengkalis)	
6	**Provinsi Sumatera Selatan**	
	1 Kab. Musi Rawas	
	2 Kab. Musi Rawas Utara.	
7	**Provinsi Bengkulu**	
	1 Kab. Bengkulu Utara (Pulau Mega)	Lintas Bengkulu - Enggano
	2 Kab. Seluma	Trayek Bengkulu - Mana - Kedurang
8	**Provinsi Lampung**	
	1 Kab. Lampung Barat (Pulau Betuah)	
	2 Kab. Pesisir Barat.	
9	**Provinsi Banten**	
	1 Kab. Pandeglang (Pulau Deli, Karangpabayang, Pulau Guhakolak)	Trayek Cibaliung - Serang
	2 Kab. Lebak.	Trayek Ketapang - Rangkasbitung
10	**Provinsi Jawa Barat**	
	1 Kab. Tasikmalaya (Pulau Batukolotok, Pulau Nusamanuk)	
11	**Provinsi Jawa Tengah**	
	1 Kab. Cilacap (Pulau Nusakambangan)	
12	**Provinsi Jawa Timur**	
	1 Kab. Jember (Pulau Nusa-barong)	
	2 Kab. Trenggalek (Pulau Ngekel, Pulau Panikan)	
	4 Kab. Bondowoso	
	5 Kab. Situbondo	Lintas Jangkar - Kalianget, Kalianget - P. Sapudi, P. Sapudi - Jangkar, Kalianget - Raas dan Raas - Jangkar
	6 Kab. Bangkalan	
	7 Kab. Sampang.	
13	**Provinsi Bali**	
	1 Kab. Klungkung (Pulau Nusa Penida)	lintas Padangbai - Nusa penida

No	Provinsi/Kabupaten	Lintas Penyeberangan Tahun 2018
14	**Provinsi Kalimantan Barat**	
	1 Kab. Sambas	Lintas Ceremai - Sumpit
	2 Kab. Bengkayang	Trayek Bengkayang - Jagoi Babang
	3 Kab. Landak	
	4 Kab. Ketapang	Trayek Ketapang - Tumbang titi- Manis mata
	5 Kab. Sintang	Trayek Sintang - Merakai
	6 Kab. Kapuas Hulu	Trayek Putus Sibau - Puring Kencana
	7 Kab. Melawi	
	8 Kab. Kayong Utara.	
15	**Provinsi Kalimantan Tengah**	
	1 Kab. Seruyan.	Trayek Sampit - Asambaru - Hanau, Pangkalan bun - Hanau
16	**Provinsi Kalimantan Selatan**	
	1 Kab. Hulu Sungai Utara.	
17	**Provinsi Kalimantan Timur**	
	1 Kab. Nunukan	Lintas Tarakan - Nunukan - Sebatik , Nunukan - Simenggaris
	2 Kab. Mahakam Ulu.	
18	**Provinsi Kalimantan Utara**	
	1 Kab. Nunukan (Pulau Sebatik, Karang Unarang)	lintas nunukan - sebatik, Trayek Malinau - Mansalong - Sarang
	2 Kab. Berau (Pulau Maratua, Pulau Sambit)	
19	**Provinsi Sulawesi Utara**	
	1 Kab. Gorontalo Utara (Pulau Bongkil)	
	2 Kab. Minahasa Utara (Pulau Mante-hage)	
	3 Kab. Kepl Siau Tegulandang (Pulau Makalehi)	
	4 Kab. Kepl Sangihe (Pulau Kawa-luso, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Batuba-waikang)	
	5 Kab. Kepl Talaud (Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Intata, Pulau Kakorotan, Pulau Kakarutan)	lintas Melonguane - Marampit - Miangas

No	Provinsi/Kabupaten	Lintas Penyeberangan Tahun 2018
20	**Provinsi Sulawesi Tengah**	
	1 Kab Toli -toli (Pulau Lingayan, Pulau Solando, Pulau Dolangan)	Lintas Tarakan - Toli-toli
	2 Kab. Banggai Kepulauan	Lintas Luwuk - Banggai - Bobong, Banggai - Boniton
	3 Kab. Donggala	
	4 Kab. Buol	Trayek Buol - palele - Umo
	5 Kab. Parigi Moutong	
	6 Kab. Tojo Una-Una	Lintas Gorontalo - Wakai - Ampana, Wakai - Toboali, Marissa - Dolong , Ampana - Pasokan - Dolong
	7 Kab. Sigi	
	8 Kab. Banggai Laut	
	9 Kab. Morowali Utara.	Lintas Kolonodale - Baturube, Trayek Toili - Batu rube
21	**Provinsi Sulawesi Selatan**	
	1 Kab. Janeponto.	
22	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	
	1. Kab. Konawe	Trayek Kendari - Lamonae
	2. Kab. Bombana	Lintas Bau-bau - Dongkala - Mawasangka dan Dongkala - Kasipute, Taryek Teomokole - Dongkala
	3. Kab. Konawe Kepulauan.	Lintas Kendari - Langara
23	**Provinsi Gorontalo**	
	1. Kab. Boalemo	Trayek Gorontalo - Parungi - Lakea - Mohiyolo
	2. Kab. Pohuwato	satu kapal dari Ampana - lintas Marissa - Dolong , Ampana - Pasokan - Dolong, Trayek Gorontalo - marissa - Malango
	3. Kab. Gorontalo Utara.	Trayek Gorontalo - Tolinggula ulu - Papua langi
24	**Provinsi Sulawesi Barat**	
	1. Kab. Polewali Mandar	
	2. Kab. Mamuju Tengah.	Trayek Mamuju - Tobadak

No	Provinsi/Kabupaten	Lintas Penyeberangan Tahun 2018
25	**Provinsi NTT**	
	1 Kab. Alor (Pulau Alor)	Lintas Kalabahi - Teluk Gurita, Teluk Gurita - P. Wetar (Ilwaki), P. Wetar (Ilwaki) - P. Kisar (Wonreli)
	2 Kab. Kupang (Pulau Batek, Pulau Ndana, Pulau Dana)	Trayek Kupang - Oesapa - kampus, Kupang - Nekleu
	3 Kab. Rote Ndao (Pulau Rote)	Lintas Pantai Baru - Ndao
	5 Kab. Sabu Raijua (Pulau Sabu)	Lintas Ende - Sabu - Raijua, Trayek Seba - Leae
	6 Kab. Sumba Timur (Pulau Manggudu)	Lintas Waingapu - Sabu, Waingapu - Ende dan Waingapu - Aimere, Trayek Waingapu - Waikelo, Waingapu - Mauramba
	7 Kab. Sumba Barat	
	8 Kab. Timor Tengah Selatan	Trayek Kupang - Kuanfatu
	9 Kab. Timor Tengah Utara	Trayek Kefa Mainanu - Noe Lelo, Kefa Meinanu - Winiponu
	10 Kab. Belu	
	11 Kab. Lembata	
	12 Kab. Ende	Lintas Kupang - Ende, Trayek Ende - Maulore, Trayek Ende - Riung , Trayek Ende Nggela
	13 Kab. Manggarai	
	14 Kab,. Manggarai Barat	Trayek Terminal Nggorang - Pacar - Terang - Werang
	15 Kab. Sumba Tengah	Trayek Waingapu - Lenang
	16 Kab. Sumba Barat Daya	
	17 Kab. Nagekeo	Trayek Ende - Riung
	18 Kab. Manggarai Timur	
	19 Kab. Malaka.	
26	**Provinsi NTB**	
	1 Kab. Lombok Barat (Gili Sepatang)	Trayek Mataram - Orengtelu
	2 Kab. Lombok Tengah	Trayek Mataram - Teluk Awang
	3 Kab. Lombok Timur	Trayek Mataram - Orengtelu
	4 Kab. Sumbawa	Trayek Mataram -Sumbawa Besar - Ropang
	5 Kab. Dompu	
	6 Kab. Bima	
	7 Kab. Sumbawa Barat	Trayek Mataram - Orengtelu
	8 Kab. Lombok Utara.	

No	Provinsi/Kabupaten	Lintas Penyeberangan Tahun 2018
27	**Provinsi Maluku**	
	1 Kab. Maluku Tenggara (Pulau Ararkula, Pulau Karerei, Pulau Penambulai, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu,Pulau Batu Goyang, Nuhu Yut)	
	2 Kab. Maluku Tenggara Barat (Pulau Larat, Pulau Asutubun, Pulau Selaru, Pulau Batar Kusu, Pulau Marsela, Pulau Metima-rang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, Pulau	Lintas Saumlaki - Adaut, Adaut - Letuwurung, Saumlaki - Seira, Seira Wunlah - Larat -Yaru - Momar, Saumlaki - Dobo - Timika
	3 Kab. Maluku Tengah	Lintas Waai - Kailolo, Umiputih - Wailey, Waai - Umi putih - Nalahia - Amahai, TrayekAmbon - warsiwa
	4 Kab. Buru	Lintas Namlea - Kayeli, Namlea - Manipa - Waisala, Namlea -Teluk Bara - Sanana, Trayek Namlea - namrole
	5 Kab. Kepulauan Aru	Lintas Tual - Dobo - Benjina, Dobo - Tobarfane, Tual - Weduar, Tual - Elat
	6 Kab. Seram Bagian Barat	
	7 Kab. Seram Bagian Timur	Lintas Ambon- Bula -Airnanang-Geser-Gorom-Kesui, Tual - Airnanang
	8 Kab. Maluku Barat Daya	Lintas Ambon - Damer, Damer - Kisar, Kisar - Leti, Leti - Moa, Moa - Lakor, Lakor - Sermatang, Sermatang - Tepa, Tepa - Letwurung,
	9 Kab. Buru Selatan.	Lintas Galala - Ambalau, Ambalauw - Wamsisi, Wamsisi - Namrole, Namrole - Leksula, Leksula-Tifu dan Tifu-Nanali
28	**Provinsi Maluku Utara**	
	1 Kab. Halmahera Barat (Pulau Yiew Besar)	Lintas Sofifi - Doworo, Trayek Sidang holi - kao - Toliwang
	2 Kab. Kepulauan Sula	Lintas Babang - Obi, Obi - Sanana, Sanana - Mangole dan Mangole - Bobong
	3 Kab. Halmahera Selatan	Lintas Bastiong - Batang Dua, Bastiong - Makian, Makian - Kayoa, Kayoa - Babang, Babang - Saketa, Kupal - Mandioli, Kupal - Kasiruta,
	4 Kab. Halmahera Timur	Linta Doro (Kao) - Subaim, Trayek Tobelo - Loleba
	5 Kab. Pulau Morotai	Daruba - Wayabula - Sopi - Berebere - Daruba
	6 Kab. Pulau Taliabu.	

No	Provinsi/Kabupaten	Lintas Penyeberangan Tahun 2018
29	**Provinsi Papua**	
	1 Kab. Biak Numfor (Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Befondi)	Lintas Biak - Manokwari dan Manokwari - Numfor, Trayek Biak - Korido
	2 Kab. Sarmi (Pulau Liki)	Sarmi - Sewan - Wafo, Sarmi - Arbais, Sarmi - Togonfo
	3 Kab. Marauke (Pulau Kolepom, Pulau habe, Pulau Komolom)	Trayek Merauke - Sota
	4 Kab. Irian jaya Timur (Pulau Laag)	
	5 Kab. Mimika (Pulau Piriri)	
	6 Kab. Jayawijaya	
	7 Kab. Nabire	Lintas Biak - Serui, Serui - Waren dan Waren - Nabire, Trayek Nabire - Topo
	8 Kab. Kepulauan Yapen	satu kapal dengan lintas Biak - Serui, Serui - Waren dan Waren - Nabire, Trayek Serui - wadapi
	9 Kab. Paniai	
	10 Kab. Puncak Jaya	
	11 Kab. Boven Digoel	
	12 Kab. Mappi	Lintas Merauke - Kimam, Kimam - Moor, Moor - Bade dan Bade - Getentiri
	13 Kab. Asmat	Lintas Merauke - Atsy, Atsy - Agats dan Agats - Sawaerma
	14 Kab. Yahukimo	
	15 Kab. Pegunungan Bintang	
	16 Kab. Tolikara	
	17 Kab. Keerom	
	18 Kab. Waropen	satu kapal dengan lintas Sarmin - Teba, Teba - Bagusa, Bagusa - Trimuris dan Trimuris - Kasonaweja
	19 Kab. Supiori	Lintas Sarmin - Teba, Teba - Bagusa, Bagusa - Trimuris dan Trimuris - Kasonaweja
	20 Kab. Memberamo Raya	
	21 Kab. Nduga	
	22 Kab. Lanny Jaya	
	23 Kab. Memberamo Tengah	
	24 Kab. Yalimo	
	25 Kab. Puncak	

No	Provinsi/Kabupaten	Lintas Penyeberangan Tahun 2018
	26 Kab. Dogiyai	
	27 Kab. Intan Jaya	
	28 Kab. Deiyai.	
30	**Provinsi Papua Barat**	
	1 Kab. Sorong (Pulau Moff, Pulau Fani, Pulau Miossu)	Trayek Sorong - Seget
	2 Kab. Teluk Wondama	Lintas Manokwari - Wasior, Wasior - Nabire dan Wasior - Windesi
	3 Kab. Teluk Bintuni	
	4 Kab. Sorong Selatan	Trayek Terminal Buan - Seremuk
	5 Kab. Sorong	
	6 Kab. Raja Ampat	Lintas Sorong - Serpele, Sorong - Kalobo, Sorong - Dulbatan, Sorong - Arefi, Arefi - Pam, Sorong - Linmalas, Linmalas - Waigama, Sorong -
	7 Kab. Tambrauw	
	8 Kab. Maybrat.	



LAMPIRAN 25

Daftar Bandar Udara Terisolir Tahun 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM 69 TAHUN 2013

TENTANG

TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu diatur mengenai tata cara dan prosedur penetapan tatanan kebandarudaraan dengan Peraturan Menteri;

b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional masih terdapat kekurangan dan belum mengatur ketentuan terkait rencana induk nasional bandar udara, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

2. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

4. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar Udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

5. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

6. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.

7. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.

8. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

9. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

10. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.

Pasal 2

(1) Tatanan kebandarudaraan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan bandar udara yang andal, terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan Nusantara.

(2) Penyelenggaraan bandar udara yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang disusun dalam jaringan dan simpul yang terstruktur, dinamis dalam memenuhi tuntutan kebutuhan angkutan udara.

(3) Penyelenggaraan bandar udara yang terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang saling menunjang dan mengisi peluang dalam satu kesatuan tatanan kebandarudaraan nasional.

(4) Penyelenggaraan bandar udara yang efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang sesuai dengan tingkat kebutuhan, tidak saling tumpang tindih dan tidak terjadi duplikasi dalam melayani kebutuhan angkutan udara.

(5) Penyelenggaraan bandar udara yang berdaya saing global sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang tidak rentan terhadap pengaruh global serta mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan kebutuhan angkutan udara.

(6) Penyelenggaraan bandar udara untuk menunjang pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara sebagai pintu gerbang perekonomian, dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan pengembangan Indonesia wilayah barat dan Indonesia wilayah timur.

(7) Penyelenggaraan bandar udara untuk menunjang pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara sebagai pembuka daerah terisolir, tertinggal dan mengembangkan potensi industri daerah.

(8) Penyelenggaraan bandar udara yang berwawasan Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang memandang kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, dalam rangka mempersatukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Tatanan kebandarudaraan nasional memuat :

a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara; serta
b. rencana induk nasional bandar udara.

Pasal 4

Peran bandar udara sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a, sebagai :

a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
d. pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
e. pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana; serta
f. prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 5

(1) Bandar udara sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu bandar udara dijadikan sebagai titik pertemuan beberapa jaringan dan rute angkutan udara.

(2) Bandar udara sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan jaringan dan rute angkutan udara.

Pasal 6

(1) Bandar udara sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu lokasi dan wilayah di sekitar bandar udara dijadikan sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian dalam upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

(2) Bandar udara sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1) Bandar udara sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu sebagai tempat perpindahan moda transportasi udara ke moda transportasi lain atau sebaliknya dalam bentuk interkoneksi antar moda pada simpul transportasi guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan.

(2) Bandar udara sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Sistem Transportasi Nasional.

Pasal 8

(1) Bandar udara sebagai pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu keberadaan bandar udara dapat memudahkan transportasi ke dan dari wilayah di sekitarnya dalam rangka pendorong dan penunjang kegiatan industri, perdagangan dan/atau pariwisata dalam menggerakkan dinamika pembangunan nasional, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

(2) Bandar udara sebagai pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Rencana Pengembangan Ekonomi Nasional.

Pasal 9

(1) Bandar udara sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu keberadaan bandar udara diharapkan dapat membuka daerah terisolir karena kondisi geografis dan/atau karena sulitnya moda transportasi lain,

penghubung daerah perbatasan dalam rangka mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kemudahan dalam penanganan bencana alam pada wilayah-wilayah tertentu dan sekitarnya.

(2) Bandar udara sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, ketentuan di bidang pertahanan negara, ketentuan Badan Nasional Penanganan Perbatasan (BNPP) dan ketentuan Badan Nasional Pengelola Bencana (BNPB).

Pasal 10

(1) Bandar udara sebagai prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu titik-titik lokasi bandar udara di wilayah nusantara saling terhubungkan dalam suatu jaringan dan rute penerbangan sehingga dapat mempersatukan wilayah untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Bandar udara sebagai prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan di bidang pertahanan negara.

Pasal 11

Fungsi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan:

a. pemerintahan dan/atau
b. pengusahaan.

Pasal 12

(1) Bandar udara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan tempat unit kerja/instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Unit kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu unit kerja pemerintah yang membidangi urusan:

a. pembinaan kegiatan penerbangan;
b. kepabeanan;
c. keimigrasian; dan
d. kekarantinaan.

(3) Pembinaan kegiatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Otoritas Bandar Udara.

(4) Fungsi unit kerja pemerintah yang membidangi urusan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan pada bandar udara internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Bandar udara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan tempat usaha bagi :

a. Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara;
b. Badan Usaha Angkutan Udara; dan
c. Badan Hukum Indonesia atau perorangan melalui kerjasama dengan Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara.

(2) Kegiatan pengusahaan di bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
b. pelayanan jasa terkait bandar udara.

Pasal 14

(1) Penggunaan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari bandar udara internasional dan bandar udara domestik.

(2) Bandar Udara Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.

(3) Bandar Udara Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.

Pasal 15

Penetapan bandar udara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dengan mempertimbangkan:

a. rencana induk nasional bandar udara;
b. pertahanan dan keamanan negara;
c. pertumbuhan dan perkembangan pariwisata;
d. kepentingan dan kemampuan angkutan udara nasional; dan
e. pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan luar negeri.

Pasal 16

(1) Penetapan bandar udara Internasional ditetapkan oleh Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keimigrasian, bidang kepabeanan, dan bidang kekarantinaan dalam rangka penempatan unit kerja dan personel.

(2) Untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat nasional dan internasional, bandar udara domestik dapat digunakan untuk melayani penerbangan dari dan ke luar negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut dan tata cara penetapan bandar udara internasional dan bandar udara domestik dapat digunakan untuk melayani penerbangan dari dan ke luar negeri diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 17

(1) Hierarki bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri:

a. bandar udara pengumpul (*hub*); dan
b. bandar udara pengumpan (*spoke*).

(2) Bandar udara pengumpul (*hub*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi yang dibedakan menjadi :

a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun;
b. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun; dan
c. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

(3) Bandar udara pengumpan (*spoke*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan:

a. bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal;
b. bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul; dan
c. bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.

Pasal 18

(1) Hierarki bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan berdasarkan penilaian atas kriteria sebagai berikut:

a. bandar udara terletak di kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi;
b. tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udara; dan
c. berfungsi untuk menyebarkan penumpang dan kargo ke bandar udara lain.

(2) Bandar udara terletak di kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditunjukkan dengan variabel sebagai berikut:

a. status kota di mana bandar udara tersebut berada sesuai dengan status yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional; dan
b. penggunaan bandar udara.

(3) Tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjukkan dengan variabel:

a. jumlah penumpang datang berangkat dan transit;
b. jumlah kargo; dan
c. jumlah frekuensi penerbangan.

(4) Fungsi untuk menyebarkan penumpang dan kargo ke bandar udara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjukkan dengan variabel :

a. jumlah rute penerbangan dalam negeri;
b. jumlah rute penerbangan luar negeri; dan
c. jumlah rute penerbangan dalam negeri yang menjadi cakupannya.

Pasal 19

(1) Klasifikasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas beberapa kelas bandar udara yang ditetapkan berdasarkan kapasitas pelayanan dan kegiatan operasional bandar udara.

(2) Kapasitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara terbesar dan jumlah penumpang/barang, meliputi:

1) kode angka (*code number*), yaitu perhitungan panjang landas pacu berdasarkan referensi pesawat *aeroplane reference field length* (ARFL); dan
2) Kode huruf (*code letter*), yaitu perhitungan sesuai lebar sayap dan lebar/jarak roda terluar pesawat.

Pasal 20

Peran, fungsi, penggunaan, hierarki dan klasifikasi bandar udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 21

(1) Rencana induk nasional bandar udara merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, penyusunan rencana induk, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan bandar udara.

(2) Rencana induk nasional bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:

a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
c. potensi sumber daya alam;
d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional;
e. sistem transportasi nasional;
f. keterpaduan intermoda dan multimoda; dan
g. peran bandar udara.

Pasal 22

Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yaitu strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang untuk kepentingan nasional, keterkaitan antar pulau dan antar propinsi, keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota.

Pasal 23

Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, yaitu potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah yang diketahui atau diukur antara lain dengan survei berdasarkan asal dan tujuan penumpang (*origin and destination survey*) dengan memperhatikan keseimbangan antara perkembangan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan pasar atau perkembangan pasar yang mempengaruhi perkembangan ekonomi, serta konsekuensi pembiayaan yang ditimbulkan.

Pasal 24

Potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, yaitu potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara efisien dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 25

Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, merupakan perkembangan lingkungan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Pasal 26

Sistem transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, merupakan tataran transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyebrangan, transportasi laut, transportasi udara, yang membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

Pasal 27

Keterpaduan intermoda dan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, yaitu keterpaduan intermoda dan multimoda yang saling menunjang.

Pasal 28

(1) Rencana induk nasional bandar udara merupakan sistem perencanaan kebandarudaraan nasional yang menggambarkan:

    a. interdependensi;
    b. interrelasi; dan
    c. sinergi antar unsur; yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, potensi ekonomi dan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

(2) Interdependensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggambarkan bahwa antar bandar udara saling tergantung dan saling mendukung yang cakupan pelayanannya bukan berdasarkan wilayah administrasi/kepemerintahan.

(3) Interrelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggambarkan bahwa antar bandar udara membentuk jaringan dari rute penerbangan yang saling berhubungan.

(4) Sinergi antar unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sinergi antara sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, potensi ekonomi dan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan nasional, serta saling mengisi dan berkontribusi dalam bentuk:

a. sumber daya alam potensial yang dikelola secara maksimal dan dapat dimanfaatkan secara efisien;
b. sumber daya manusia yang dapat diberdayakan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan dan kemampuan;
c. pemanfaatan potensi dan pengendalian hambatan geografis; dan
d. pemanfaatan potensi ekonomi dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas usaha pencapaiannya dan pertahanan keamanan nasional.

Pasal 29

Rencana induk nasional bandar udara, memuat:

a. Kebijakan nasional bandar udara; dan
b. Rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara.

Pasal 30

Untuk mewujudkan kebijakan nasional bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, digunakan strategi pembangunan, pengoperasian, pendayagunaan, dan pengembangan bandar udara, dalam bentuk:

a. meningkatkan peran bandar udara dan menyiapkan kapasitas bandar udara sesuai hierarki bandar udara dengan memperhatikan tahapan pengembangan dan pemantapan hierarki bandar udara sebagai bandar udara pengumpul (*hub*) dengan skala pelayanan primer, sekunder, atau tersier dan bandar udara pengumpan (*spoke*) yang merupakan bandar udara tujuan atau penunjang serta merupakan penunjang pelayanan kegiatan lokal;
b. pada bandar udara pengumpan dengan peran sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, serta prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara, dengan memperhatikan kesinambungan dan keteraturan (*connectivity and regularity*) angkutan udara;
c. bandar udara internasional di daerah destinasi pariwisata dibangun dan dikembangkan sebagai hub dan pintu gerbang pariwisata nasional, serta bandar udara domestik di sekitarnya berperan sebagai pendorong dan penunjang kegiatan pariwisata;

d. bandar udara yang terletak di wilayah koridor ekonomi dikembangkan guna meningkatkan konektivitas ke pusat-pusat kegiatan ekonomi;
e. mengendalikan jumlah bandar udara yang terbuka untuk penerbangan ke/dari luar negeri, dengan mempertimbangkan pertahanan/keamanan negara, pertumbuhan/perkembangan pariwisata, kepentingan/ kemampuan angkutan udara nasional serta pengembangan ekonomi nasional/perdagangan luar negeri;
f. meningkatkan standar operasi prosedur bandar udara untuk memenuhi ketentuan keselamatan operasi bandar udara, standar teknis dan operasional sesuai klasifikasi bandar udara; dan
g. pada bandar udara pengumpul primer dengan cakupan wilayah tertentu yang telah mencapai kapasitas maksimal dan tidak terdapat kemungkinan untuk dikembangkan lagi, dilakukan kajian dengan mengembangkan konsep sistim bandar udara jamak (*multiple airport system*).

Pasal 31

Rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara untuk mewujudkan kebijakan nasional bandar udara, terdiri atas:

a. bandar udara pada ibukota provinsi dibangun atau dikembangkan dengan klasifikasi landas pacu 4D;
b. bandar udara di daerah perbatasan negara dan daerah lokasi bencana dan daerah rawan bencana dibangun atau dikembangkan dengan klasifikasi landas pacu 3C untuk dapat melayani pesawat Hercules C-130 dan pesawat berpenumpang 50 orang; dan
c. bandar udara di daerah terisolasi dan di daerah provinsi kepulauan dibangun atau dikembangkan dengan klasifikasi landas pacu 2C untuk dapat melayani penerbangan perintis dengan pesawat berpenumpang 25 orang.

Pasal 32

(1) Pengembangan Bandar Udara dilaksanakan sesuai dengan rencana induk Bandar Udara yang telah ditetapkan dalam penetapan lokasi Bandar Udara.

(2) Pengembangan bandar udara dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria indikasi awal didasarkan atas tingkat utilisasi operasional.

(3) Tingkat utilisasi operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. fasilitas sisi udara; dan
b. fasilitas sisi darat.

Pasal 33

Kebijakan nasional bandar udara dalam pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pendayagunaan bandar udara serta rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara, serta formula perhitungan tingkat utilisasi operasional bandar udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Penetapan lokasi bandar udara diluar rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, harus memenuhi persyaratan kelayakan akan diatur oleh Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 35

(1) Tatanan Kebandarudaraan Nasional ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan peninjauan ulang apabila terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis atau setiap 5 (lima) tahun.

(2) Perubahan kondisi lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional yang mengakibatkan perubahan batas wilayah provinsi.

Pasal 36

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, maka:

a. Bandar udara internasional yang masuk dalam perjanjian *ASEAN open sky* yaitu Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Bandar Udara Internasional Juanda, Bandar Udara Internasional Kualanamu, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin tetap berlaku; dan
b. Ketentuan terkait penetapan lokasi bandar udara dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2013

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

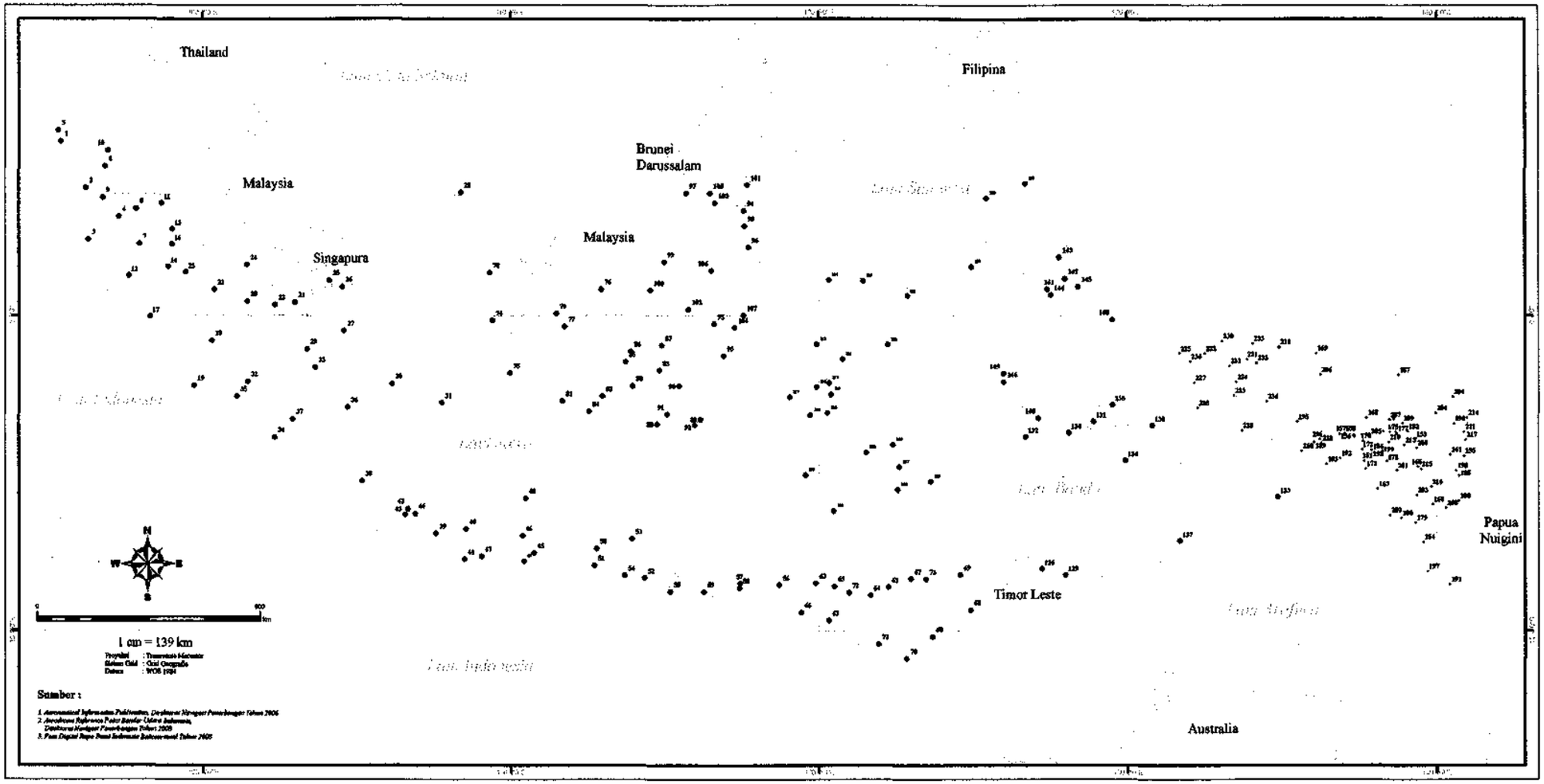
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1046

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001



KETERANGAN :

I. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
1. Sabang Iskandar Muda
2. Cut Nyak Dhien
3. Lasikin
4. Teuku Cut Ali
5. Meulaboh Suleh
6. Rambeka
7. Singkil/Hamzah Fansuri
8. Abu Lamno
9. Kuala Batee
10. Nikkilai Sakti

II. Provinsi Sumatera Utara
11. Kualanamu
12. Binaka
13. Silinda
14. Dr. Ferdinand L. Tobing
15. Aek Godang
16. Sibuagi
17. Lasondre

III. Provinsi Sumatera Barat
18. Minangkabau
19. Rokot

IV. Provinsi Riau
20. Sultan Syarif Kasim II
21. Tanjung
22. Japura
23. Pasir Pengaraian
24. Pinang Kampai

V. Provinsi Kepulauan Riau
25. Hang Nadim
26. RH. Fisabilillah
27. Dabo
28. Ranai
29. Raja Haji Abdullah (Selayar)

VI. Provinsi Bangka Belitung
30. Depati Amir
31. H. AS. Hanandjoeddin

VII. Provinsi Jambi
32. Sultan Thaha
33. Depati Parbo

VIII. Provinsi Bengkulu
34. Fatmawati Soekarno
35. Mukomuko

IX. Provinsi Sumatera Selatan
36. S.M. Badaruddin II
37. Silampari

X. Provinsi Lampung
38. Radin Inten II

XI. Provinsi Jawa Barat
39. Husein Sastranegara
40. Cakrabhuwana
41. Nusawiru

XII. Provinsi Banten
42. Soekarno - Hatta
43. Budiarto

XIII. Provinsi DKI Jakarta
44. Halim Perdana Kusuma

XIV. Provinsi Jawa Tengah
45. Adi Sucipto
46. Ahmad Yani
47. Tunggul Wulung
48. Dewa Dora

XV. Provinsi D.I Yogyakarta
49. Adi Sutjipto

XVI. Provinsi Jawa Timur
50. Iswahyudi
51. Abdul Rachman Saleh
52. Blimbingsari
53. Trunojoyo
54. Noto Hadinegoro

XVII. Provinsi Bali
55. I Gusti Ngurah Rai

XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Barat
56. Sultan M. Salahuddin
57. Sultan M. Kaharuddin (Sumbawa)
58. Lasyidi
59. Lombok Barat

XIX. Provinsi Nusa Tenggara Timur
60. El Tari
61. Hasan Aroeboesman
62. Umbu Mehang Kunda
63. Komodo
64. H. Hasan Aroeboesman
65. Frans Seda Larantuka
66. Tardamalia
67. Oesman
68. A.A. Bere Tallo (Mali/wan)
69. Ishak
70. David Constantijn Saudale (Lekunik)
71. Tardamu
72. Ben
73. Waingapu

XX. Provinsi Kalimantan Barat
74. Supadio
75. Rahadi Oesman
76. Pangsuma
77. Nanga Pinoh
78. Pakdi
79. Sanka

XXI. Provinsi Kalimantan Tengah
80. Tjilik Riwut
81. Muara Teweh
82. H. Asan
83. Sanggu
84. Kuala Pembuang
85. Tumbang Samba
86. Kuala Kurun
87. Buntoin

XXII. Provinsi Kalimantan Selatan
88. Syamsuddin Noor
89. Gust. Syamsir Alam
90. Tanjung Warukin
91. Sibaung
92. Serongga (Sumbawa)

XXIII. Provinsi Kalimantan Timur
93. Sepinggan
94. Samarinda
95. Kalimarau
96. Kalimarau
97. Yuvai Semaring
98. Tanjung Harapan
99. Long Apung
100. Datuk Dewa
101. Muaratan
102. Melak
103. Kol. RA. Bessing (Sebuku)
104. Tanjung
105. Long Lees
106. Muara Wahau
107. Tanjung Batu (Bangalo)

XXIV. Provinsi Sulawesi Utara
108. Sam Ratulangi
109. Naha
110. Melonguane

XXV. Provinsi Gorontalo
111. Djalaluddin

XXVI. Provinsi Sulawesi Tengah
112. Mutiara
113. Sultan Aziz Moddin Amir
114. Sultan Bantilan Lalos
115. Poganga
116. Kasiguncu

XXVII. Provinsi Sulawesi Barat
117. Tampa Padang

XXVIII. Provinsi Sulawesi Selatan
118. Sultan Hasanuddin
119. Andi Jemma
120. H. Aroepala
121. Soho
122. Rampi
123. Pao/Lagaligo
124. Pongtiku

XXIX. Provinsi Sulawesi Tenggara
125. Haluoleo
126. Sugi Ambari
127. Rajaberaniaru
128. Tanggetada/Sangia Nibandera
129. Matahora

XXX. Provinsi Maluku
130. Pattimura
131. Amahai
132. Namrole
133. Dobo
134. Bandaneira
135. Wahai
136. Saleh Besikat
137. Liwan Banga
138. Olilit
139. Damaiabun
140. Nusliwa

XXXI. Provinsi Maluku Utara
141. Sultan Babullah
142. Kiaobang
143. Oesman Sadaoe
144. Dumatumbabi
145. Buli
146. Bisalamo
147. Bia
148. Gebe
149. Doh Bonjou Pulaiwaiyo

XXXII. Provinsi Papua
150. Aboy
151. Akimuga
152. Ateota
153. Agotaysiri
154. Bade
155. Bokem
156. Bilogai
157. Bilogai
158. Bilorai
159. Bokondini
160. Boomina
161. Timuka
162. Bonga
163. Boronu
164. Dekai
165. Elelim
166. Enarotali
167. Ewer
168. Fanil
169. Frans Kaisiepo - Biak
170. Illaga
171. Ilu
172. Jila
173. Jiu
174. Kamur
175. Karubaga
176. Kebo
177. Kobda
178. Kenyam Nduga
179. Kepi
180. Kimam
181. Kiwirok
182. Kobakma
183. Kolowom
184. Lereh
185. Mangambaan
186. Mapenduma
187. Mapuma - Sumo
188. Mindiptanah
189. Moramoramo
190. Mofoi
191. Mopah - Merauke
192. Mumi Kilmaja - Timika
193. Mugi Muliaga
194. Mulia
195. Nabire
196. Obano
197. Okaba
198. Okbibi
199. Ransiki
200. Potimsi
201. Segaray
202. Senggoh
203. Setaipo
204. Sentani - Jayapura
205. Sewak
206. Sinakma - Sumi
207. Teeri II - Tolikara
208. Tanahmerah
209. Tebadena
210. Ubrub
211. Ulinda
212. Waghete
213. Wamena
214. Waris
215. Nop Goliat Dekai - Yahukimo
216. Yenimumal
217. Yuruf
218. Aboyaga
219. Nunduy
220. Wangbe

XXXIII. Provinsi Papua Barat
221. Anggi
222. Ayamaru
223. Bobo
224. Bintuni
225. DBO Jaronga
226. Inhakim
227. Inanwatan
228. Unaroma
229. Kambuaya
230. Kebar
231. Moskoy
232. Ransiki
233. Rendani - Manokwari
234. Teminabuan
235. Torea - Bal. Ik
236. Wasior
237. Wamar

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL
PETA BANDAR UDARA EKSISTING
DI INDONESIA

Lampiran I.A.
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 69 TAHUN 2013
Tanggal : 16 AGUSTUS 2013

MENTERI PERHUBUNGAN
TTD
E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

IMAM ABDIL SIS, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran I.B
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 69 Tahun 2013
Tanggal : 16 Agustus 2013

TABEL PERAN, FUNGSI, PENGGUNAAN, HIERARKI DAN KLASIFIKASI BANDAR UDARA EKSISTING

NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	PERAN								FUNGSI		Penggunaan	Hierarki	Klasifikasi
			Simpul	Gerbang Ekonomi	Alih Moda Transportasi	Peindag/ Pariwisata	Daerah Terisolir	Rawan Bencana	Daerah Perbatasan	Wawasan Nusantara	Pemerintah	Pengusahaan	Bandar Udara	Bandar Udara	Bandara
I	PROPINSI NANGGROE ACEH. D														
1	Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Int'l	PT	4E
2	Cut Nyak Dhien	Nagan Raya	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	3C
3	Lasikin	Sinabang	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
4	Teuku Cut Ali	Tapak Tuan	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	2C
5	Maimun Saleh	Sabang	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		Int'l	P	3C
6	Rembele	Takengon	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	2C
7	Singkil (Hamzah Fansuri)	Singkil	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	2B
8	Alas Lauser	Kutacane	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3B
9	Kuala Batu	Blang Pidie	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
10	Malikul Saleh	Lhok Seumawe	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
II	PROPINSI SUMATERA UTARA														
1	Kualanamu	Deli Serdang	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PP	4E
2	Binaka	Gn. Sitoli	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Int'l	P	3C
3	Sibisa	Parapat	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	1B
4	Dr. Ferdinand L. Tobing	Sibolga	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	4C
5	Aek Godang	Padang Sidempuan	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
6	Silangit	Siborong-borong	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Dom	P	4C
7	Lasondre	Pulau-pulau Batu	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	3C
III	PROPINSI SUMATERA BARAT														
1	Minangkabau	Padang	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Int'l	PS	4D
2	Rokot	Sipora	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		Dom	P	2B
IV	PROPINSI RIAU														
1	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PS	4C
2	Tempuling	Indragiri Hilir	✓	✓	✓				✓	✓	✓		Dom	P	3B
3	Japura	Rengat	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
4	Pasir Pangaraian	Pasir Pangaraian	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3B
5	Pinang Kampai	Dumai	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		Dom	P	3C
V	PROPINSI KEPULAUAN RIAU														
1	Hang Nadim	Batam	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		Int'l	PS	4E
2	RH. Fisabilillah	Tanjung Pinang	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	P	4C
3	Dabo	Singkep	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2C
4	Ranai	Natuna	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		Dom	P	4C
5	Sei Bati (Raja Haji Abdullah)	Tanjung Balai Karimun	✓	✓	✓				✓	✓	✓		Dom	P	2B
VI	PROPINSI BANGKA BELITUNG														
1	Depati Amir	Pangkal Pinang	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Dom	PS	4C
2	H. AS. Hanandjoeddin	Tanjung Pandan	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	PT	4C
VII	PROPINSI JAMBI														
1	Sultan Thaha	Jambi	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Dom	PS	4C
2	Depati Parbo	Kerinci	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C

NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	PERAN								FUNGSI		Penggunaan	Hierarki	Klasifikasi
			Simpul	Gerbang Ekonomi	Alih Moda Transportasi	Peindag/ Pariwisata	Daerah Terisolir	Rawan Bencana	Daerah Perbatasan	Wawasan Nusantara	Pemerintah	Pengusahaan	Bandar Udara	Bandar Udara	Bandara
VIII	PROPINSI BENGKULU														
1	Fatmawati - Soekarno	Bengkulu	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	PT	4C
2	Muko-Muko	Muko-Muko	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	3C
IX	PROPINSI SUMATERA SELATAN														
1	S.M. Badaruddin II	Palembang	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PS	4D
2	Silampari	Lubuk Linggau	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
X	PROPINSI LAMPUNG														
1	Radin Inten II	Tanjung Karang	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	PS	4D
XI	PROPINSI JAWA BARAT														
1	Husein Sastranegara	Bandung	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PT	4C
2	Cakrabhuwana	Cirebon	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
3	Nusawiru	Ciamis	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	3C
XII	PROPINSI BANTEN														
1	Soekarno - Hatta	Jakarta	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PP	4E
2	Budiarto	Curug	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	3D
XIII	PROPINSI DKI JAKARTA														
1	Halim Perdanakusuma	Jakarta	✓	✓	✓					✓	✓	✓	Int'l	P	4E
XIV	PROPINSI JAWA TENGAH														
1	Adi Sumarmo	Solo	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PS	4D
2	Ahmad Yani	Semarang	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PS	4D
3	Tunggul Wulung	Cilacap	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
4	Dewa Daru	Karimunjawa	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	2C
XV	PROPINSI DI. YOGYAKARTA														
1	Adi Sutjipto	Yogyakarta	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PS	4D
XVI	PROPINSI JAWA TIMUR														
1	Juanda	Surabaya	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PP	4E
2	Abdul Rachman Saleh	Malang	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	4C
3	Blimbingsari	Banyuwangi	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
4	Trunojoyo	Sumenep	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	2B
5	Noto Hadinegoro	Jember	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	3C
XVII	PROPINSI BALI														
1	I Gusti Ngurah Rai	Denpasar	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Int'l	PP	4E
XVIII	PROPINSI NTB														
1	Sultan M. Salahuddin	Bima	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
2	Brangbiji (Sultan Muh. Kaharuddin)	Sumbawa Besar	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
3	Lunyuk	Sumbawa	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	2B
4	Lombok Baru	Lombok Tengah	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Int'l	PS	4D
XIX	PROPINSI NTT														
1	Eltari	Kupang	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Int'l	PS	4D
2	Frans Seda	Maumere	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	4C
3	Umbu Mehang Kunda	Waingapu	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
4	Komodo	Labuhan Bajo	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C

NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	PERAN								FUNGSI		Penggunaan	Hierarki	Klasifikasi
			Simpul	Gerbang Ekonomi	Alih Moda Transportasi	Pelndag/ Pariwisata	Daerah Terisolir	Rawan Bencana	Daerah Perbatasan	Wawasan Nusantara	Pemerintah	Pengusahaan	Bandar Udara	Bandar Udara	Bandara
5	H. Hasan Aroeboesman	Ende	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
6	Frans Sales Leda	Ruteng	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
7	Tambolaka	Waikabubak	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	4C
8	Gewayantana	Larantuka	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	2C
9	Haliwen (A.A. Bere Tallo)	Atambua	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		Dom	P	3B
10	Mali	Alor	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		Dom	P	3C
11	Lekunik (David Constantijn Saudale)	Rote	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		Dom	P	2C
12	Tardamu	Sabu	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		Dom	P	2B
13	Soa	Bajawa	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3B
14	Wunopito	Lewoleba	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	2C
XX	PROPINSI KALIMANTAN BARAT														
1	Supadio	Pontianak	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PS	4C
2	Rahadi Oesman	Ketapang	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		Dom	P	3C
3	Pangsuma	Putussibau	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Dom	P	3C
4	Nangapinoh	Nangapinoh	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
5	Paloh	Sambas	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		Dom	P	1B
6	Susilo	Sintang	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	3C
XXI	PROPINSI KALIMANTAN TENGAH														
1	Tjilik Riwut	Palangkaraya	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	PT	4D
2	Iskandar	Pangkalan Bun	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	PT	4C
3	H. Asan	Sampit	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	4C
4	Sanggu	Buntok	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
5	Kuala Pembuang	Kota Waringin Timur	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3C
6	Tumbang Samba	Tumbang Samba	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
7	Kuala Kurun	Kuala Kurun	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	2B
8	Beringin	Muara Teweh	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
XXII	PROPINSI KALIMANTAN SELATAN														
1	Syamsuddin Noor	Banjarmasin	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Dom	PS	4D
2	Gusti Syamsir Alam	Kotabaru	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3C
3	Tanjung Warukin	Tanjung Warukin	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
4	Binuang	Binuang	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
5	Bersujud	Batu Licin	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
XXIII	PROPINSI KALIMANTAN TIMUR														
1	Sepinggan	Balikpapan	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PP	4D
2	Juwata	Tarakan	✓	✓	✓					✓	✓		Int'l	PT	4D
3	Kotabangun	Kotabangun	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
4	Kalimarau	Tj. Redep	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	4D
5	Yuvai Semaring	Longbawan	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2B
6	Tanjung Harapan	Tj. Selor	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3C
7	Long Apung	Long Apung	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2B
8	Datah Dawai	Datah Dawai	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		Dom	P	1B
9	Nunukan	Nunukan	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Dom	P	2B
10	Melak	Sendawar	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		Dom	P	2B
11	Kol. RA. Bessing (Seluwing)	Malinau	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Dom	P	2B
12	Long Layu	Long Layu	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
13	Muara Wahau	Muara Wahau	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
14	Tanjung Bara (Sangata)	Kutai Timur	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
15	Temindung	Samarinda	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	2B
XXIV	PROPINSI SULAWESI UTARA														
1	Sam Ratulangi	Manado	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	Int'l	PS	4D
2	Naha	Tahuna	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		Dom	P	3C
3	Melonguane	Sangihe Talaud	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		Dom	P	3C

NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	PERAN								FUNGSI		Penggunaan	Hierarki	Klasifikasi
			Simpul	Gerbang Ekonomi	Alih Moda Transportasi	Peindag/ Pariwisata	Daerah Terisolir	Rawan Bencana	Daerah Perbatasan	Wawasan Nusantara	Pemerintah	Pengusahaan	Bandar Udara	Bandar Udara	Bandara
XXV	PROPINSI GORONTALO														
1	Djalaluddin	Gorontalo	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	4D
XXVI	PROPINSI SULAWESI TENGAH														
1	Mutiara	Palu	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	PT	4D
2	Syukuran Aminuddin Amir	Luwuk	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	4C
3	Sultan Bantilan (Lalos)	Toli-toli	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	3C
4	Pogogul	Buol	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	3B
5	Kasiguncu	Poso	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3C
XXVII	PROPINSI SULAWESI BARAT														
1	Tampa Padang	Mamuju	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	4C
XXVIII	PROPINSI SULAWESI SELATAN														
1	Sultan Hasanuddin	Makassar	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Int'l	PP	4D
2	Andi Jemma	Masamba	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
3	H. Aroepala	P. Selayar	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	3B
4	Seko	Seko	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
5	Rampi	Rampi	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
6	Bua (Lagaligo)	Luwu	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
7	Pongtiku	Tana Toraja	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	2C
XXIX	PROPINSI SULAWESI TENGGARA														
1	Haluoleo	Kendari	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	PT	4D
2	Beto Ambari	Bau-bau	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3C
3	Sugimanuru	Muna	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
4	Tanggetada (Sangia Nibandera)	Kolaka	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2C
5	Matahora	Wakatobi	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3C
XXX	PROPINSI MALUKU														
1	Pattimura	Ambon	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Int'l	PT	4D
2	Amahai	Pulau Seram	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	1B
3	Namrole	Pulau Buru	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	2B
4	Dobo	Pulau Aru	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		Dom	P	2B
5	Bandaneira	Pulau Banda	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	P	2C
6	Wahai	Pulau Seram	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	2B
7	John Becker	Pulau Kisar	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		Dom	P	2B
8	Liwur Bunga	Pulau larat	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2B
9	Olilit	Saumlaki	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		Dom	P	2C
10	Dumatubun	Tual	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	3C
11	Namlea	Pulau Buru	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	1B
XXXI	PROPINSI MALUKU UTARA														
1	Sultan Babullah	Ternate	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		Dom	PT	4C
2	Kuabang	Kao	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
3	Gamar Malamo	Galela	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	3C
4	Oesman Sadik	Labuha	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	3C
5	Buli	Maba	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3C
6	Emalamo	Sanana	✓	✓	✓			✓		✓	✓		Dom	P	2B
7	Pitu	Morotai	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	4C
8	Gebe	Kab. Halmahera Tengah	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2C
9	Dofa Benjina Falabisahaya	Mangole, Kab. Kep. Sula	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	3D

NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	PERAN								FUNGSI		Penggunaan	Hierarki	Klasifikasi
			Simpul	Gerbang Ekonomi	Alih Moda Transportasi	Peindag/ Pariwisata	Daerah Terisolir	Rawan Bencana	Daerah Perbatasan	Wawasan Nusantara	Pemerintah	Pengusahaan	Bandar Udara	Bandar Udara	Bandara
XXXII	PROPINSI PAPUA														
1	Frans Kaisiepo	Biak	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	Int'l	P	4D
2	Sentani	Jayapura	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		Int'l	PS	4D
3	Mopah	Merauke	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Int'l	P	4D
4	Ubrub	Kab. Keerom	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1C
5	Dabra	Kab. Mamberamo Raya	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
6	Yuruf	Kab. Keerom	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
7	Molof	Kab. Keerom	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1C
8	Kamur	Kab. Asmat	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	1B
9	Kimam	Kab. Merauke	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		Dom	P	1B
10	Eletim	Kab. Yalimo	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2C
11	Bomakia	Kab. Boven Digoel	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2C
12	Senggeh	Kab. Keerom	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
13	Manggelum	Kab. Boven Digoel	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		Dom	P	1C
14	Wamena	Kab. Jayawijaya	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		Dom	P	4C
15	Kelila	Kab. Mamberamo Raya	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1C
16	Kiwirok	Kab. Pegunungan Bintang	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	1C
17	Biloral	Kab. Intan Jaya	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	1C
18	Bilai	Kab. Intan Jaya	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
19	Kebo	Kab. Paniai	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2C
20	Akimuga	Kab. Mimika	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	1B
21	Enarotali	Kab. Paniai	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Dom	P	2B
22	Mararena	Kab. Sarmi	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		Dom	P	1B
23	Tanah Merah	Kab. Boven Digoel	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		Dom	P	2C
24	Mulia	Kab. Puncak Jaya	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2C
25	Oksibil	Kab. Pegunungan Bintang	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		Dom	P	3C
26	Moanamani	Nabire	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2B
27	Mindip Tanah	Kab. Boven Digoel	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	1B
28	Kepi	Kab. Mappi	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		Dom	P	1B
29	Kokonau	Kab. Mimika	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	1B
30	Bokondini	Kab. Jayawijaya	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1C
31	Okaba	Kab. Merauke	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		Dom	P	1C
32	Numfor	Kab. Biak Numfor	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3B
33	Illaga	Kab. Puncak	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
34	Illu	Kab. Puncak Jaya	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2C
35	Tiom	Kab. Lanni Jaya	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
36	Ewer	Kab. Asmat	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		Dom	P	1B
37	Batom	Kab. Pegunungan Bintang	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2B
38	Bade	Kab. Mappi	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	1B
39	Lereh	Kab. Keerom	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1C
40	Karubaga	Kab. Tolikara	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		Dom	P	1B
41	Obano	Kab. Paniai	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	1B
42	Senggo	Kab. Mappi	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	1B
43	Mozes Kilangin	Timika	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		Dom	PT	4D
44	Taive II	Kab. Tolikara	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
45	Yahukimo	Kab. Yahukimo	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	3C
46	Sudjarwo Tj./Ros Bori/Kamanap Baru	Serui Kab. Kep. Yapen	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	1C
47	Douw Aturure	Kab. Nabire	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		Dom	P	3C
48	Waghete	Kab. Deiyai	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2B
49	Sinak	Kab. Puncak Jaya	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2B
50	Aboyaga	Kab. Nabire	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
51	Aboy	Kab. Pegunungan Bintang	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2B
52	Yaniruma	Kab. Boven Digoel	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	2B
53	Nop Goliat Dekai	Kab. Yahukimo	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	3C
54	Sugapa	Kab. Intan Jaya	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
55	Kobakma	Kab. Membramo Tengah	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
56	Apalapsili	Kab. Yalimo	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
57	Kenyam	Kab. Nduga	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
58	Mapnduma	Kab. Nduga	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1A
59	Mugi	Kab. Nduga	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B

NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	PERAN								FUNGSI		Penggunaan	Hierarki	Klasifikasi
			Simpul	Gerbang Ekonomi	Alih Moda Transportasi	Peindag/ Pariwisata	Daerah Terisolir	Rawan Bencana	Daerah Perbatasan	Wawasan Nusantara	Pemerintah	Pengusahaan	Bandar Udara	Bandar Udara	Bandara
60	Paro	Kab. Nduga	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
61	Fawi	Kab. Puncak Jaya	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
62	Borome	Borome	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
63	Beoga	Kab. Intan Jaya	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
64	Jila	Kab. Mimika	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
65	Jita	Kab. Mimika	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
66	Potowai	Kab. Mimika	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
67	Bilogai	Kab. Intan Jaya	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
68	Tsinga	Kab. Mimika	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
69	Alama	Kab. Pegunungan Bintang	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
70	Wangbe	Kab. Puncak	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
71	Waris/Towehitam	Kab. Keerom	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
XXXIII	PROPINSI PAPUA BARAT														
1	Rendani	Manokwari	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		Dom	P	4C
2	Domine Eduard Osok	Sorong	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	PT	4C
3	Torea	Fak-fak	✓	✓	✓	✓				✓	✓		Dom	P	3C
4	Bintuni	Kab. Teluk Bintuni	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	1B
5	Babo	Kab. Teluk Bintuni	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	3C
6	Utarom	Kab. Kaimana	✓	✓	✓		✓			✓	✓		Dom	P	3C
7	Wasior	Kab. Teluk Wondama	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1C
8	Inanwatan	Kab. Sorong Selatan	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
9	Teminabuan	Kab. Sorong Selatan	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
10	Ayawasi	Kab. Sorong Selatan	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2B
11	Ijahabra	Kab. Manokwari	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1C
12	Merdey	Kab. Manokwari	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
13	Anggi	Kab. Manokwari	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
14	Kambuaya	Kab. Manokwari	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1B
15	Werur	Kab. Manokwari	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	1C
16	Kebar	Kab. Manokwari	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		Dom	P	2B
17	Ransiki	Kab. Manokwari	✓	✓	✓					✓	✓		Dom	P	2C

KETERANGAN :
Int'l = Internasional
Dom = Domestik
PP = Pengumpul Skala Primer
PS = Pengumpul Skala Sekunder
PT = Pengumpul Skala Tersier
P = Pengumpan

MENTERI PERHUBUNGAN,

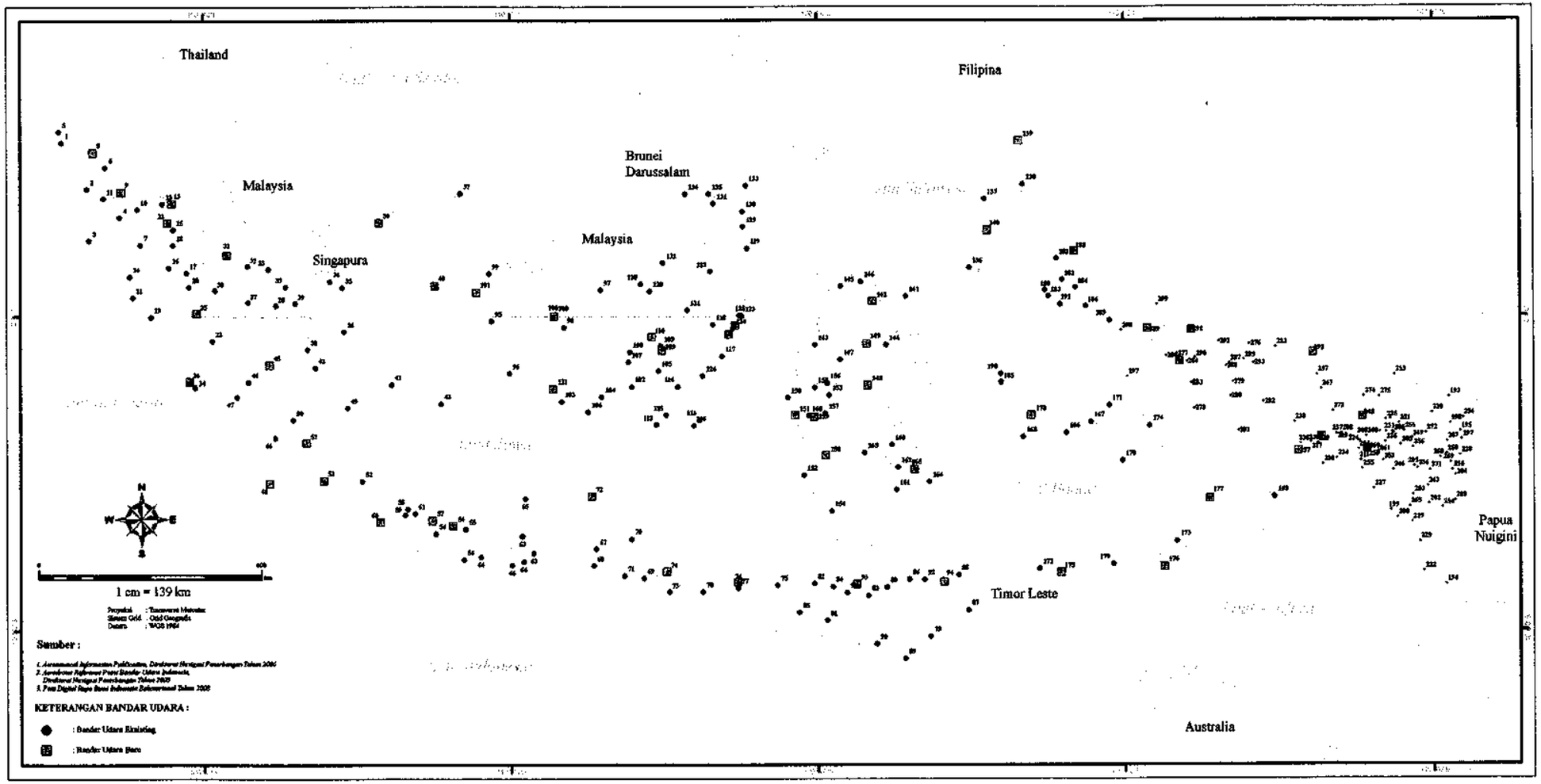
ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001



Sumber :

1. *Aeronautical Information Publication, Direktorat Navigasi Penerbangan Tahun 2006*
2. *Aeronautical Information Point Bandar Udara Indonesia, Direktorat Navigasi Penerbangan Tahun 2009*
3. *Peta Digital Rupa Bumi Indonesia Internasional Tahun 2008*

KETERANGAN BANDAR UDARA :

● : Bandar Udara Eksisting

▣ : Bandar Udara Baru

KETERANGAN :

I. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
1. Sultan Iskandar Muda
2. Cut Nyak Dhien
3. Lasfiet
4. Teuku Cut Ali
5. Maimun Saleh
6. Rembele
7. Simeulue/Maimun Pasmal
8. Blangkejeren
9. Blangkejeruk
10. Alas Leuser
11. Kuala Baru
12. Meulaboh Sabak

II. Provinsi Sumatera Utara
13. Pinangsori
14. Sibolga
15. Silolo
16. Dr. Ferdinand L. Tobing
17. Aek Godang
18. Silangit
19. Lasondre
20. Babi Malintang
21. Teluk Dalam
22. Sinaktinggan

III. Provinsi Sumatera Barat
23. Minangkabau
24. Rokot
25. Pariaman Dapat
26. Kep. Mentawai

IV. Provinsi Riau
27. Sultan Syarif Kasim II
28. Tanjungbalai
29. Japura
30. Pasir Pengaraian
31. Penang Kampar
32. Bagan Siapi Api
33. Kep. Meranti / Bengkalis

V. Provinsi Kepulauan Riau
34. Hang Nadim
35. RE. Martadinata

VI. Provinsi Jambi
36. Depati Amir
37. Sultan Thaha
38. Sipet Parbo
39. Muara Bungo

VII. Provinsi Bengkulu
40. Fatmawati Soekarno
41. Medarmaha
42. Enggano

IX. Provinsi Sumatera Selatan
43. Sultan Mahmud Badaruddin II
44. Silampari
45. Pagar Alam

X. Provinsi Lampung
46. Radin Inten II
47. Pekon Serai
48. Tanjung Kemuning
49. Tanjung Warukiri
50. Gatot Subroto
51. Kalianda
52. Lampung
53. Tanjung Lengkukus

XI. Provinsi Jawa Barat
54. Husein Sastranegara/Majalengka
55. Cakrabuana
56. Nusatama
57. Kamarang

XII. Provinsi Banten
58. Soekarno - Hatta
59. Budaniah
60. Tanjung Lesung

XIII. Provinsi DKI Jakarta
61. Halim Perdana Kusuma

XIV. Provinsi Jawa Tengah
62. Adi Soemarmo
63. Adisutjipto
64. Tunggul Wulung
65. Dewa Dewi

XV. Provinsi D.I Yogyakarta
66. Adi Sutjipto / Kulonprogo (Yogyakarta Baru)

XVI. Provinsi Jawa Timur
67. Juanda
68. Abdul Rachman Saleh
69. Blimbingsari
70. Trunojoyo
71. Noto Hadinegoro
72. Ir. P. Banyuwangi

XVII. Provinsi Bali
73. I Gusti Ngurah Rai
74. Bali Utara
75. M. Salahuddin
76. Bima (Sultan Muh. Kaharuddin)
77. Lanyalt
78. Lombok Baru

XIX. Provinsi Nusa Tenggara Timur
79. Eltari
80. Frans Seda
81. Unkur Mahang Kanah
82. Komodo
83. H. Hasan Aroeboesman
84. Frans Sales Lega
85. Tardamlam
86. Oesman Sadik
87. A.A. Bere Tallo (Nalwina)
88. Mali
89. David Constantijn Saudale (Lakeba)
90. Rembau
91. Nos
92. Waingapu
93. Abdy Sandanga II
94. Kalaz

XX. Provinsi Kalimantan Barat
95. Supadio
96. Sukadu Ketapang
97. Tanjungpura
98. Pangsuma
99. Tebah
100. Sintete/Tebelian
101. Sidaringwang

XXII. Provinsi Kalimantan Tengah
102. Tjilik Riwut
103. Muara Teweh
104. R. Arus
105. Sanggu
106. Kuala Pembuang
107. Tumbang Samba
108. Kuala Kurun
109. Buntok/Jelmu Trunk Baru
110. Tjilik Riwut Palangkaraya
111. Nanga Bulik

XXII. Provinsi Kalimantan Selatan
112. Syamsuddin Noor
113. Gusti Sjamsir Alam
114. Tanjung Warukin
115. Batulicin
116. Kotabaru (Stagen)

XXIII. Provinsi Kalimantan Timur
117. Sepinggan
118. Kalimarau
119. Kalimarau
120. Datah Dawai
121. Melak
122. Muara Wahau
123. Tanjung Bara (Sangatta)
124. Tanjung Santan / Sungai Siring
125. Bontang
126. Penar
127. Maratua
128. Long Apari

XXIV. Provinsi Kalimantan Utara
129. Tanjung Harapan
130. Juvai
131. Kol. RA. Bessing (Talenang)
132. Long Ajung
133. Nunukan
134. Long Semaring
135. Long Layu

XXV. Provinsi Sulawesi Utara
136. Lipu Kotabagi
137. Melo
138. Melonguane
139. Miangas
140. Siaro

XXVI. Provinsi Gorontalo
141. Djalaluddin
142. Pohuwato

XXVII. Provinsi Sulawesi Tengah
143. Masiaro
144. Syukuran Aminuddin Amir
145. Palma Bunta/Luwu
146. Poganul
147. Kolipinkot
148. Mamuntli
149. Teja Utan-Utan

XXVIII. Provinsi Sulawesi Barat
150. Tampa Padang
151. Samasunang

XXIX. Provinsi Sulawesi Selatan
152. Sultan Hasanuddin
153. Arah Jemma
154. H. Aroeppala
155. Selayo
156. Bantgi
157. Buri/Lagaligo
158. Bissu
159. Pongtiku/Tana Toraja Baru

XXX. Provinsi Sulawesi Tenggara
160. Haluoleo
161. Betu Anduwi
162. Sugimanuru
163. Tanggetada/Langgia Wundumi
164. Matahora
165. Bapa Utana

XXXI. Provinsi Maluku
166. Pattimura
167. Amahai
168. Namrole
169. Dobo
170. Banda Neira
171. Wahai
172. Adai Bedow
173. Leiser Bungal
174. Olilit Aboi/Saumlaki Baru (Saumlaki Jaya)
175. Damar/Baru/Tepil Baru
176. Manuk/Romang/Serwil
177. Bula
178. Mota
179. Tiga

XXXII. Provinsi Maluku Utara
180. Sultan Babullah
181. Dodinga
182. Gamar Malamo
183. Oesman Sadik
184. Buli
185. Bandanco
186. Tagulandang
187. Sahoang
188. Ibu
189. Gebe
190. Dodi Duabo Pulau Morotai
191. WRN Wedy

XXXIII. Provinsi Papua
192. Frans Kaisiepo
193. Sentani
194. Mopah
195. Ubrub
196. Deiya
197. Yapsi
198. Inkaf
199. Kimer
200. Kleuon
201. Bintuni
202. Rendani
203. Senggeh
204. Mongkondan
205. Wamena
206. Kaibi
207. Kiriwok
208. Bilorai
209. Ilaki
210. Kebo
211. Akimuga
212. Senopad
213. Ilarama
214. Tanah Merah
215. Mbtk
216. Obukal
217. Mosamsam
218. Mandy Tomh
219. Kaja
220. Kolesom
221. Bokondini
222. Obsiba
223. Nundur
224. Dapa
225. Ilu
226. Tiom
227. Enar
228. Batom
229. Bade
230. Lereh
231. Kenyam
232. Omaat
233. Senggo
234. Mbian Kibuguin
235. Yaro II
236. Wamblom
237. Sanbawen Dj./Kemanap Baru
238. Inland/Crow Airstrip (Kabar Baru)
239. Waghete/Kingkon Baru
240. Modi/Sunk Baru
241. Ayanggu
242. Alwy
243. Nabrama
244. Kwerney Baru
245. Dekai
246. Sugapa
247. Bokoria
248. Pyra
249. Agadugidi
250. Bewani
251. Kolabomi/Tiwa
252. Kenyam
253. Danga
254. Ilu
255. Ilu
256. Bokoria
257. Bilogai
258. Tiriku
259. Alama
260. Mapenduma
261. Puru
262. Mapi
263. Waghe
264. Tanahmiera
265. Abrap
266. Obsiwag
267. Tungkal
268. Biaro
269. Amahabal
270. Enarotali
271. Samabusi
272. Bilorai
273. Kiebi
274. Ambonawi Raya A
275. Ambonawi Raya B

XXXIV. Provinsi Papua Barat
276. Rendani
277. Domine Eduard Osok
278. Teminabuan
279. Bintuni
280. Babo
281. Unigun
282. Wasior
283. Inanwatan
284. Teminabuan
285. Kaimana
286. Sagwin
287. Jefman
288. Mumfery
289. Arguni
290. Klamuyu
291. Wasur
292. Kebar
293. Rumberpon
294. Kasiwa
295. Mobiliabatan
296. Fef
297. Idenal (Lembah)
298. Feni
299. Dembor
300. Kwoor
301. Sausapor
302. Yembekiri
303. Kwor
304. Ayawasi
305. Aifat
306. Teminabuan
307. Klamono
308. Sorong
309. Domberai
310. Jokotapo
311. Kais
312. Werur
313. Segun
314. Konda
315. Saonek
316. Waigeo
317. Kabare
318. Waisai
319. Ayau
320. Kalobo
321. Sailolof
322. Waisai
323. Waigama
324. Fafanlap
325. Weda
326. Gebe
327. Pulau Widi
328. Pulau Obi
329. Bobong
330. Mangole
331. Falabisahaya
332. Namlea
333. Buru
334. Geser
335. Saleman
336. Piru
337. Kairatu
338. Amahai
339. Masohi
340. Sanana
341. Bobong
342. Tobelo
343. Galela
344. Morotai
345. Ternate
346. Sofifi
347. Labuha
348. Bacan
349. Kao
350. Jailolo
351. Gamar Malamo
352. Oesman Sadik
353. Buli
354. Bandanco
355. Tagulandang
356. Sahoang
357. Ibu
358. Gebe
359. Dodi Duabo Pulau Morotai
360. WRN Wedy

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL

PETA BANDAR UDARA EKSISTING DAN BARU DI INDONESIA

Lampiran II.A.
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 69 TAHUN 2013
Tanggal : 16 AGUSTUS 2013

MENTERI PERHUBUNGAN

TTD

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

UMARDIER, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630228 198903 1 001

Lampiran II.B
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 69 Tahun 2013
Tanggal : 16 Agustus 2013

TABEL RENCANA INDUK NASIONAL BANDAR UDARA

NO	NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	Penggunaan Bandar Udara		Hierarki Bandar Udara		Klasifikasi Landas Pacu	
				2020	2030	2020	2030	2020	2030
	I	PROPINSI NANGGROE ACEH. D							
1	1	Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh	Int'l	Int'l	PS	PS	4E	4E
2	2	Cut Nyak Dhien	Nagan Raya	Dom	Dom	P	P	4D	4D
3	3	Lasikin	Sinabang	Dom	Dom	P	P	4C	4C
4	4	Teuku Cut Ali	Tapak Tuan	Dom	Dom	P	P	3C	3C
5	5	Maimun Saleh	Sabang	Int'l	Int'l	P	P	4C	4C
6	6	Rembele	Takengon	Dom	Dom	P	P	4D	4D
7	7	Singkil (Hamzah Fansuri)	Singkil	Dom	Dom	P	P	3C	3C
8	8	Alas Lauser	Kutacane	Dom	Dom	P	P	4C	4C
9	9	Kuala Batu	Blang Pidie	Dom	Dom	P	P	2C	3C
10	10	Malikul Saleh	Lhok Seumawe	Dom	Dom	P	P	2C	3C
11	11	Bireun	Bireun	Dom	Dom	P	P	3C	3C
12	12	Blangkejeren	Gayo	Dom	Dom	P	P	3C	3C
	II	PROPINSI SUMATERA UTARA							
13	1	Kualanamu	Deli Serdang	Int'l	Int'l	PP	PP	4F	4F
14	2	Binaka	Gn. Sitoli	Int'l	Int'l	P	PT	3C	3C
15	3	Sibisa	Parapat	Dom	Dom	P	P	3C	3C
16	4	Dr. Ferdinand L. Tobing	Sibolga	Dom	Dom	P	P	4C	4C
17	5	Aek Godang	Padang Sidempuan	Dom	Dom	P	P	4C	4C
18	6	Silangit	Siborong-borong	Dom	Dom	P	P	4C	4C
19	7	Lasondre	Pulau-pulau Batu	Dom	Dom	P	P	3C	3C
20	8	Bukit Malintang	Mandailing Natal	Dom	Dom	P	P	3C	4C
21	9	Teluk Dalam	Nias Selatan	Dom	Dom	P	P	3C	3C
22	10	Simalungun	Simalungun	Dom	Dom	P	P	1A	1A
	III	PROPINSI SUMATERA BARAT							
23	1	Minangkabau	Padang	Int'l	Int'l	PS	PP	4E	4E
24	2	Rokot	Sipora	Dom	Dom	P	P	3C	3C
25	3	Pasaman Barat	Pasaman Barat	Dom	Dom	P	P	2B	3C
26	4	Kep. Mentawai	Kep. Mentawai	Dom	Dom	P	P	2C	3C
	IV	PROPINSI RIAU							
27	1	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	Int'l	Int'l	PS	PP	4D	4D
28	2	Tempuling	Indragiri Hilir	Dom	Dom	P	P	3C	3C
29	3	Japura	Rengat	Dom	Dom	P	P	4D	4D
30	4	Pasir Pangaraian	Pasir Pangaraian	Dom	Dom	P	P	3C	3C
31	5	Pinang Kampai	Dumai	Dom	Dom	PT	PT	4C	4D
32	6	Bagan Siapi Api	Rokan Hilir	Dom	Dom	P	P	3C	4C
33	7	Kep. Meranti/Bengkalis	Kep. Meranti/Bengkalis	Dom	Dom	P	P	3C	3C
	V	PROPINSI KEPULAUAN RIAU							
34	1	Hang Nadim	Batam	Int'l	Int'l	PP	PP	4D	4E
35	2	RH. Fisabilillah	Tj. Pinang	Int'l	Int'l	PT	PT	4D	4D
36	3	Dabo	Singkep	Dom	Dom	P	P	3C	3C
37	4	Ranai	Natuna	Dom	Dom	PT	PT	4D	4D
38	5	Seibati (Raja Haji Abdullah)	Tj. Balai Karimun	Dom	Dom	P	P	2C	3C
39	6	Letung	Kep. Anambas	Dom	Dom	P	P	2B	3C
40	7	Tambelan	Kepulauan Bintan	Dom	Dom	P	P	2B	2C
	VI	PROPINSI BANGKA BELITUNG							
41	1	Depati Amir	Pangkal Pinang	Dom	Dom	PS	PS	4D	4D
42	2	H. AS. Hanandjoeddin	Tj. Pandan	Dom	Dom	PS	PS	4D	4D
	VII	PROPINSI JAMBI							
43	1	Sultan Thaha	Jambi	Dom	Dom	PT	PT	4D	4D
44	2	Depati Parbo	Kerinci	Dom	Dom	P	P	3C	3C
45	3	Muara Bungo	Rimbo Bujang	Dom	Dom	P	P	4C	4C
	VIII	PROPINSI BENGKULU							
46	1	Fatmawati - Soekarno	Bengkulu	Dom	Dom	PT	PS	4D	4D
47	2	Muko-Muko	Muko-Muko	Dom	Dom	P	P	3C	3C
48	3	Enggano	Enggano	Dom	Dom	P	P	3C	3C

NO	NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	Penggunaan Bandar Udara		Hierarki Bandar Udara		Klasifikasi Landas Pacu	
				2020	2030	2020	2030	2020	2030
	IX	PROPINSI SUMATERA SELATAN							
49	1	S.M. Badaruddin II	Palembang	Int'l	Int'l	PS	PP	4E	4E
50	2	Silampari	Lubuk Linggau	Dom	Dom	P	P	3C	3C
51	3	Pagar Alam	Pagar Alam	Dom	Dom	P	P	3C	3C
	X	PROPINSI LAMPUNG							
52	1	Radin Inten II	Tanjung Karang	Dom	Dom	PS	PS	4D	4D
53	2	Pekon Serai	Lampung	Dom	Dom	P	P	4C	4C
	XI	PROPINSI JAWA BARAT							
54	1	Husein Sastranegara/Majalengka	Bandung/Majalengka	Int'l	Int'l	PS	PS	4E	4E
55	2	Cakrabhuwana	Cirebon	Dom	Dom	PT	PT	3C	3C
56	3	Nusawiru	Ciamis	Dom	Dom	P	P	3C	3C
57	4	Karawang	Karawang	Int'l	Int'l	PP	PP	4F	4F
	XII	PROPINSI BANTEN							
58	1	Soekarno - Hatta	Jakarta	Int'l	Int'l	PP	PP	4F	4F
59	2	Budiarto	Curug	Dom	Dom	P	P	4D	4D
60	3	Tanjung Lesung	Pandeglang	Dom	Dom	P	P	3C	3C
	XIII	PROPINSI DKI JAKARTA							
61	1	Halim Perdanakusuma	Jakarta	Int'l	Int'l	P	P	4D	4D
	XIV	PROPINSI JAWA TENGAH							
62	1	Adi Sumarmo	Solo	Int'l	Int'l	PS	PS	4D	4D
63	2	Ahmad Yani	Semarang	Int'l	Int'l	PS	PP	4D	4D
64	3	Tunggul Wulung	Cilacap	Dom	Dom	P	P	3C	3C
65	4	Dewa Daru	Karimunjawa	Dom	Dom	P	P	2C	2C
	XV	PROPINSI DI. YOGYAKARTA							
66	1	Adi Sutjipto / Kulon Progo	Yogyakarta	Int'l	Int'l	PP	PP	4D	4D
	XVI	PROPINSI JAWA TIMUR							
67	1	Juanda	Surabaya	Int'l	Int'l	PP	PP	4E	4E
68	2	Abdul Rachman Saleh	Malang	Dom	Dom	PS	PS	4D	4D
69	3	Blimbingsari	Banyuwangi	Dom	Dom	P	P	3C	3C
70	4	Trunojoyo	Sumenep	Dom	Dom	P	P	3C	3C
71	5	Noto Hadinegoro	Jember	Dom	Dom	P	P	3C	3C
72	6	P. Bawean	Gresik	Dom	Dom	P	P	2C	2C
	XVII	PROPINSI BALI							
73	1	I Gusti Ngurah Rai	Denpasar	Int'l	Int'l	PP	PP	4E	4E
74	2	Bali Baru	Bali Utara	Int'l	Int'l	PP	PP	4E	4E
	XVIII	PROPINSI NTB							
75	1	Sultan M. Salahuddin	Bima	Dom	Dom	PT	PT	3C	3C
76	2	Brangbiji (Sultan Muh. Kaharuddin)	Sumbawa Besar	Dom	Dom	P	P	3C	3C
77	3	Lunyuk	Sumbawa	Dom	Dom	P	P	3C	3C
78	4	Lombok Baru	Lombok Tengah	Int'l	Int'l	PS	PS	4D	4D
	XIX	PROPINSI NTT							
79	1	Eltari	Kupang	Int'l	Int'l	PS	PS	4D	4D
80	2	Frans Seda	Maumere	Dom	Dom	PT	PT	4D	4D
81	3	Umbu Mehang Kunda	Waingapu	Dom	Dom	PT	PT	4D	4D
82	4	Komodo	Labuhan Bajo	Dom	Dom	P	PT	3C	3C
83	5	H. Hasan Aroeboesman	Ende	Dom	Dom	PT	PT	4C	4D
84	6	Frans Sales Leda	Ruteng	Dom	Dom	P	P	3C	3C
85	7	Tambolaka	Waikabubak	Dom	Dom	P	P	4C	4C
86	8	Gewayantana	Larantuka	Dom	Dom	P	P	3C	3C
87	9	Haliwen (A.A Bere Tallo)	Atambua	Dom	Dom	PT	PT	3C	3C
88	10	Mali	Alor	Dom	Dom	P	P	3C	3C
89	11	Lekunik (David Constantijn Saudale)	Rote	Dom	Dom	P	P	3C	3C
90	12	Tardamu	Sabu	Dom	Dom	P	P	3C	3C
91	13	Soa	Bajawa	Dom	Dom	P	P	4D	4D
92	14	Wunopito	Lewoleba	Dom	Dom	P	P	3C	3C
93	15	Mbay Surabaya II	Nagekeo	Dom	Dom	P	P	2C	3C
94	16	Kabir	Alor	Dom	Dom	P	P	2D	3C

NO	NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	Penggunaan Bandar Udara		Hierarki Bandar Udara		Klasifikasi Landas Pacu	
				2020	2030	2020	2030	2020	2030
	XX	PROPINSI KALIMANTAN BARAT							
95	1	Supadio	Pontianak	Int'l	Int'l	PS	PP	4D	4D
96	2	Rahadi Oesman	Ketapang	Dom	Dom	PT	PT	4D	4D
97	3	Pangsuma	Putussibau	Dom	Dom	PT	PT	4C	4C
98	4	Nangapinoh	Nangapinoh	Dom	Dom	P	P	2C	2C
99	5	Paloh	Sambas	Dom	Dom	P	P	2C	3C
100	6	Susilo/Tebelian	Sintang	Dom	Dom	PT	PT	4B	4D
101	7	Singkawang	Singkawang	Dom	Dom	P	P	4C	4D
	XXI	PROPINSI KALIMANTAN TENGAH							
102	1	Tjilik Riwut	Palangkaraya	Dom	Dom	PS	PS	4D	4D
103	2	Iskandar	Pangkalan Bun	Dom	Dom	PS	PS	4C	4C
104	3	H. Asan	Sampit	Dom	Dom	P	PT	4C	4C
105	4	Sanggu	Buntok	Dom	Dom	P	P	2C	2C
106	5	Kuala Pembuang	Kota Waringin Timur	Dom	Dom	P	P	3C	3C
107	6	Tumbang Samba	Tumbang Samba	Dom	Dom	P	P	2C	2C
108	7	Kuala Kurun	Kuala Kurun	Dom	Dom	P	P	2C	2C
109	8	Beringin/Muara Teweh Baru	Muara Teweh	Dom	Dom	P	P	4C	4C
110	9	Tira Tangka Balang	Murung Raya	Dom	Dom	P	P	2C	3C
111	10	Nanga Bulik	Lamandau	Dom	Dom	P	P	2C	3C
	XXII	PROPINSI KALIMANTAN SELATAN							
112	1	Syamsuddin Noor	Banjarmasin	Dom	Dom	PP	PP	4D	4D
113	2	Gusti Syamsir Alam	Kotabaru	Dom	Dom	PT	PT	3C	3C
114	3	Tanjung Warukin	Tanjung Warukin	Dom	Dom	P	P	3C	3C
115	4	Binuang	Binuang	Dom	Dom	P	P	2B	3C
116	5	Bersujud	Batu Licin	Dom	Dom	P	P	3C	4C
	XXIII	PROPINSI KALIMANTAN TIMUR							
117	1	Sepinggan	Balikpapan	Int'l	Int'l	PP	PP	4D	4D
118	2	Juwata	Tarakan	Int'l	Int'l	PS	PS	4D	4D
119	3	Kotabangun	Kotabangun	Dom	Dom	P	P	2B	2C
120	4	Kalimarau	Tj. Redep	Dom	Dom	PT	PS	4D	4D
121	5	Yuvai Semaring	Longbawan	Dom	Dom	P	P	3C	3C
122	6	Tanjung Harapan	Tj. Selor	Dom	Dom	P	P	3C	3C
123	7	Long Apung	Long Apung	Dom	Dom	P	P	3C	3C
124	8	Datah Dawai	Datah Dawai	Dom	Dom	P	P	3C	3C
125	9	Nunukan	Nunukan	Dom	Dom	PT	PT	2C	3C
126	10	Melak	Sendawar	Dom	Dom	P	P	2C	2C
127	11	Kol. RA. Bessing (Seluwing)	Malinau	Dom	Dom	P	P	2C	3C
128	12	Long Layu	Long Layu	Dom	Dom	P	P	2B	2C
129	13	Muara Wahau	Muara Wahau	Dom	Dom	P	P	2B	2C
130	14	Tanjung Bara (Sangata)	Kutai Timur	Dom	Dom	P	P	2B	2C
131	15	Temindung / Sungai Siring	Samarinda	Dom	Dom	PS	PS	4D	4D
132	16	Bontang	Bontang	Dom	Dom	PT	PT	3C	3C
133	17	Paser	Tanah Grogot	Dom	Dom	P	P	4C	4C
134	18	Maratua	Berau	Dom	Dom	P	P	2C	3C
135	19	Long Apari	Kutai Barat	Dom	Dom	P	P	2C	3C
	XXIV	PROPINSI SULAWESI UTARA							
136	1	Sam Ratulangi	Manado	Int'l	Int'l	PP	PP	4E	4E
137	2	Naha	Tahuna	Dom	Dom	P	P	3C	3C
138	3	Melonguane	Sangihe Talaud	Dom	Dom	PT	PT	3C	3C
139	4	Miangas	Talaud	Dom	Dom	P	P	3C	3C
140	5	Sitaro	Siau Tangguladang Biaro	Dom	Dom	P	P	2C	3C
	XXV	PROPINSI GORONTALO							
141	1	Djalaluddin	Gorontalo	Dom	Dom	PS	PS	4D	4D
142	2	Pohuwato	Pohuwato	Dom	Dom	P	P	3C	4C
	XXVI	PROPINSI SULAWESI TENGAH							
143	1	Mutiara	Palu	Dom	Dom	PS	PS	4D	4D
144	2	Syukuran Aminuddin Amir	Luwuk	Dom	Dom	PT	PT	4C	4C
145	3	Sultan Bantilan (Lalos)	Toli-toli	Dom	Dom	P	P	3C	3C
146	4	Pogogul	Buol	Dom	Dom	P	P	3C	3C
147	5	Kasiguncu	Poso	Dom	Dom	P	P	3C	3C
148	6	Morowali	Morowali	Dom	Dom	P	P	3C	3C
149	7	Tojo Una-Una	Tojo Una-Una	Dom	Dom	P	P	3C	4D

NO	NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	Penggunaan Bandar Udara		Hierarki Bandar Udara		Klasifikasi Landas Pacu	
				2020	2030	2020	2030	2020	2030
	XXVII	PROPINSI SULAWESI BARAT							
150	1	Tampa Padang	Mamuju	Dom	Dom	PT	PT	4D	4D
151	2	Sumarorong	Mamasa	Dom	Dom	P	P	3C	3C
	XXVIII	PROPINSI SULAWESI SELATAN							
152	1	Sultan Hasanuddin	Makassar	Int'l	Int'l	PP	PP	4F	4F
153	2	Andi Jemma	Masamba	Dom	Dom	P	P	2C	3C
154	3	H. Aroepala	P. Selayar	Dom	Dom	P	P	3C	3C
155	4	Seko	Seko	Dom	Dom	P	P	2B	2C
156	5	Rampi	Rampi	Dom	Dom	P	P	2B	2C
157	6	Bua (Lagaligo)	Luwu	Dom	Dom	P	P	3C	3C
158	7	Pongtiku / Tana Toraja Baru	Makale	Dom	Dom	P	P	4C	4C
159	8	Bone	Bone	Dom	Dom	P	P	2B	2C
	XXIX	PROPINSI SULAWESI TENGGARA							
160	1	Haluoleo	Kendari	Dom	Dom	PS	PS	4D	4D
161	2	Beto Ambari	Bau-bau	Dom	Dom	P	P	4C	4D
162	3	Sugimanuru	Muna	Dom	Dom	P	P	3C	3C
163	4	Tanggetada (Sangia Nibandera)	Kolaka	Dom	Dom	P	P	2C	2C
164	5	Matahora	Wakatobi	Dom	Dom	P	P	3C	3C
165	6	Buton Utara	Buton Utara	Dom	Dom	P	P	2C	3C
	XXX	PROPINSI MALUKU							
166	1	Pattimura	Ambon	Int'l	Int'l	PS	PS	4D	4D
167	2	Amahai	Pulau Seram	Dom	Dom	P	P	3C	3C
168	3	Namrole	Pulau Buru	Dom	Dom	P	P	3C	3C
169	4	Dobo	Pulau Aru	Dom	Dom	P	P	3C	3C
170	5	Bandaneira	Pulau Banda	Dom	Dom	P	P	3C	3C
171	6	Wahai	Pulau Seram	Dom	Dom	P	P	3C	3C
172	7	John Becker	Pulau Kisar	Dom	Dom	P	P	2C	3C
173	8	Liwur Bunga	Pulau larat	Dom	Dom	P	P	2B	2B
174	9	Olilit/Saumlaki Baru	Maluku Tenggara Barat	Dom	Dom	PT	PT	4D	4D
175	10	Dumatubun/Tual Baru	Maluku Tenggara	Dom	Dom	P	P	4C	4D
176	11	Namlea/Namniwel	Pulau Buru	Dom	Dom	P	P	3C	3C
177	12	Bula	Seram Bagian Timur	Dom	Dom	P	P	3C	3C
178	13	Moa	Maluku Tenggara	Dom	Dom	P	P	3C	3C
179	14	Tepa	Maluku Barat Daya	Dom	Dom	P	P	2C	3C
	XXXI	PROPINSI MALUKU UTARA							
180	1	Sultan Babullah	Ternate	Dom	Dom	PT	PS	4C	4C
181	2	Kuabang	Kao	Dom	Dom	P	P	3C	3C
182	3	Gamar Malamo	Galela	Dom	Dom	P	P	3C	3C
183	4	Oesman Sadik	Labuha	Dom	Dom	P	P	3C	3C
184	5	Buli	Maba	Dom	Dom	P	P	3C	3C
185	6	Emalamo	Sanana	Dom	Dom	P	P	3C	3C
186	7	Pitu	Morotai	Dom	Dom	P	P	4C	4C
187	8	Gebe	Kab. Halmahera Tengah	Dom	Dom	P	P	2C	2C
188	9	Dofa Benjina Falabisahaya	Mangole, Kab. Kep. Sula	Dom	Dom	P	P	3D	3D
189	10	Tepeleo	Halmahera Tengah	Dom	Dom	P	P	3C	3C
190	11	Bobong	Taliabu	Dom	Dom	P	P	3C	3C
191	12	WBN/Weda	Halmahera Tengah	Dom	Dom	P	P	2C	3C
	XXXII	PROPINSI PAPUA							
192	1	Frans Kaisiepo	Biak	Int'l	Int'l	PT	PT	4D	4D
193	2	Sentani	Jayapura	Int'l	Int'l	PS	PS	4D	4D
194	3	Mopah	Merauke	Int'l	Int'l	PS	PS	4D	4D
195	4	Ubrub	Kab. Keerom	Dom	Dom	P	P	2B	2C
196	5	Dabra	Kab. Mamberamo Raya	Dom	Dom	P	P	2B	2C
197	6	Yuruf	Kab. Keerom	Dom	Dom	P	P	2B	2C
198	7	Molof	Kab. Keerom	Dom	Dom	P	P	2B	2C
199	8	Kamur	Kab. Asmat	Dom	Dom	P	P	1B	2C
200	9	Kimam	Kab. Merauke	Dom	Dom	P	P	1B	2C
201	10	Elelim	Kab. Yalimo	Dom	Dom	P	P	2C	2C
202	11	Bomakia	Kab. Boven Digoel	Dom	Dom	P	P	2C	2C
203	12	Senggeh	Kab. Keerom	Dom	Dom	P	P	2B	2C
204	13	Manggelum	Kab. Boven Digoel	Dom	Dom	P	P	2C	3C
205	14	Wamena	Kab. Jayawijaya	Dom	Dom	PT	PT	4C	4C
206	15	Kelila	Kab. Mamberamo Raya	Dom	Dom	P	P	2B	2C
207	16	Kiwirok	Kab. Pegunungan Bintang	Dom	Dom	P	P	2B	2C
208	17	Bilorai	Kab. Intan Jaya	Dom	Dom	P	P	2B	2C
209	18	Bilai	Kab. Intan Jaya	Dom	Dom	P	P	2B	2C
210	19	Kebo	Kab. Paniai	Dom	Dom	P	P	2C	2C
211	20	Akimuga	Kab. Mimika	Dom	Dom	P	P	2B	2C
212	21	Enarotali	Kab. Paniai	Dom	Dom	P	P	2C	2C
213	22	Mararena	Kab. Sarmi	Dom	Dom	P	P	3C	3C
214	23	Tanah Merah	Kab. Boven Digoel	Dom	Dom	P	P	2C	3C

NO	NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	Penggunaan Bandar Udara		Hierarki Bandar Udara		Klasifikasi Landas Pacu	
				2020	2030	2020	2030	2020	2030
215	24	Mulia	Kab. Puncak Jaya	Dom	Dom	P	P	2C	3C
216	25	Oksibil	Kab. Pegunungan Bintang	Dom	Dom	P	P	3C	3C
217	26	Moanamani	Nabire	Dom	Dom	P	P	2C	2C
218	27	Mindip Tanah	Kab. Boven Digoel	Dom	Dom	P	P	2B	2C
219	28	Kepi	Kab. Mappi	Dom	Dom	P	P	2B	3C
220	29	Kokonau	Kab. Mimika	Dom	Dom	P	P	2B	2C
221	30	Bokondini	Kab. Jayawijaya	Dom	Dom	P	P	2B	2C
222	31	Okaba	Kab. Merauke	Dom	Dom	P	P	2B	3C
223	32	Numfor	Kab. Biak Numfor	Dom	Dom	P	P	3B	2C
224	33	Ilaga	Kab. Puncak	Dom	Dom	P	P	2B	2C
225	34	Illu	Kab. Puncak Jaya	Dom	Dom	P	P	2C	2C
226	35	Tiom	Kab. Lanni Jaya	Dom	Dom	P	P	2B	2C
227	36	Ewer	Kab. Asmat	Dom	Dom	P	P	2B	2C
228	37	Batom	Kab. Pegunungan Bintang	Dom	Dom	P	P	2B	2C
229	38	Bade	Kab. Mappi	Dom	Dom	P	P	2B	2C
230	39	Lereh	Kab. Keerom	Dom	Dom	P	P	2B	2C
231	40	Karubaga	Kab. Tolikara	Dom	Dom	P	P	3C	3C
232	41	Obano	Kab. Paniai	Dom	Dom	P	P	2B	2C
233	42	Senggo	Kab. Mappi	Dom	Dom	P	P	2B	2C
234	43	Mozes Kilangin	Timika	Dom	Dom	PT	PS	4D	4D
235	44	Taive II	Kab. Tolikara	Dom	Dom	P	P	2B	2C
236	45	Yahukimo	Kab. Yahukimo	Dom	Dom	P	P	4C	4C
237	46	Sudjarwo Tj./Ros Bori/Kamanap Baru	Serui Kab. Kep. Yapen	Dom	Dom	P	P	2B	2C
238	47	Douw Aturure	Kab. Nabire	Dom	Dom	PT	PT	2B	3C
239	48	Waghete/Waghete Baru	Kab. Deiyai	Dom	Dom	P	P	3C	3C
240	49	Sinak/Sinak Baru	Kab. Puncak Jaya	Dom	Dom	P	P	3C	3C
241	50	Aboyaga	Kab. Nabire	Dom	Dom	P	P	2B	2C
242	51	Aboy	Pegunungan Bintang	Dom	Dom	P	P	2B	2C
243	52	Yaniruma	Kab. Boven Digoel	Dom	Dom	P	P	2B	2C
244	53	Nop Goliat Dekai	Kab. Boven Digoel	Dom	Dom	P	P	2B	2C
245	54	Sugapa	Kab. Intan Jaya	Dom	Dom	P	P	2B	2C
246	55	Kobakma/Taria	Kab. Membramo Tengah	Dom	Dom	P	P	2B	2C
247	56	Apalapsili	Kab. Yalimo	Dom	Dom	P	P	2B	2C
248	57	Kenyam	Kab. Nduga	Dom	Dom	P	P	2B	2C
249	58	Mapnduma	Kab. Nduga	Dom	Dom	P	P	1B	2C
250	59	Mugi	Kab. Nduga	Dom	Dom	P	P	2B	2C
251	60	Paro	Kab. Nduga	Dom	Dom	P	P	2B	2C
252	61	Fawi	Kab. Puncak Jaya	Dom	Dom	P	P	2B	2C
253	62	Borome	Borome	Dom	Dom	P	P	2B	2C
254	63	Beoga	Kab. Intan Jaya	Dom	Dom	P	P	2B	2C
255	64	Jila	Kab. Mimika	Dom	Dom	P	P	2B	2C
256	65	Jita	Kab. Mimika	Dom	Dom	P	P	2B	2C
257	66	Potowai	Kab. Mimika	Dom	Dom	P	P	2B	2C
258	67	Bilogai	Kab. Intan Jaya	Dom	Dom	P	P	2B	2C
259	68	Tsinga	Kab. Mimika	Dom	Dom	P	P	2B	2C
260	69	Alama	Kab. Pegunungan Bintang	Dom	Dom	P	P	2B	2C
261	70	Wangbe	Kab. Puncak	Dom	Dom	P	P	2B	2C
262	71	Towehitam	Kab. Keerom	Dom	Dom	P	P	2B	2C
263	72	Koroway Batu	Kab. Yahukimo	Dom	Dom	P	P	2B	2C
264	73	Botawa	Kab. Waropen	Dom	Dom	P	P	2B	2C
265	74	Aboge	Kab. Mappi	Dom	Dom	P	P	2B	2C
266	75	Okteneng	Kab. Pegunungan Bintang	Dom	Dom	P	P	2B	2C
267	76	Teraplu	Kab. Pegunungan Bintang	Dom	Dom	P	P	2B	2C
268	77	Bime	Kab. Pegunungan Bintang	Dom	Dom	P	P	2B	2C
269	78	Ambisibil	Kab. Pegunungan Bintang	Dom	Dom	P	P	2B	2C
270	79	Sinalak	Kab. Mimika	Dom	Dom	P	P	2B	2C
271	80	Seradala	Kab. Yahukimo	Dom	Dom	P	P	2B	2C
272	81	Benawa	Kab. Yahukimo	Dom	Dom	P	P	2B	2C
273	82	Kirihi	Kab. Waropen	Dom	Dom	P	P	2B	2C
274	83	Mambramo Raya A	Kab. Mamberamo Raya	Dom	Dom	P	P	2B	2C
275	84	Mambramo Raya B	Kab. Mamberamo Raya	Dom	Dom	P	P	2B	2C
	XXXIII	PROPINSI PAPUA BARAT							
276	1	Rendani	Manokwari	Dom	Dom	PT	PT	4D	4D
277	2	Domine Eduard Osok	Sorong	Dom	Dom	PT	PS	4D	4D
278	3	Torea	Fak-fak	Dom	Dom	P	P	4C	4C
279	4	Bintuni	Kab. Teluk Bintuni	Dom	Dom	P	P	2B	2C
280	5	Babo	Kab. Teluk Bintuni	Dom	Dom	P	P	3C	3C
281	6	Utarom	Kab. Kaimana	Dom	Dom	P	P	3C	3C
282	7	Wasior	Kab. Teluk Wondama	Dom	Dom	P	P	2B	2C
283	8	Inanwatan	Kab. Sorong Selatan	Dom	Dom	P	P	2B	2C
284	9	Teminabuan	Kab. Sorong Selatan	Dom	Dom	P	P	2B	2C
285	10	Ayawasi	Kab. Sorong Selatan	Dom	Dom	P	P	2B	2C
286	11	Ijahabra	Kab. Manokwari	Dom	Dom	P	P	2B	2C

NO	NO	BANDAR UDARA	KOTA/LOKASI	Penggunaan Bandar Udara		Hierarki Bandar Udara		Klasifikasi Landas Pacu	
				2020	2030	2020	2030	2020	2030
287	12	Merdey	Kab. Manokwari	Dom	Dom	P	P	2B	2C
288	13	Anggi	Kab. Manokwari	Dom	Dom	P	P	2B	2C
289	14	Kambuaya	Kab. Manokwari	Dom	Dom	P	P	2B	2C
290	15	Werur	Kab. Manokwari	Dom	Dom	P	P	2B	2C
291	16	Kebar	Kab. Manokwari	Dom	Dom	P	P	3C	3C
292	17	Ransiki	Kab. Manokwari	Dom	Dom	P	P	2C	2C
293	18	Segun	Sorong	Dom	Dom	P	P	3C	4D
294	19	Meididga	Manokwari	Dom	Dom	P	P	2B	2C
295	20	Marinda	Waisai Kab. Raja Ampat	Dom	Dom	PT	PT	3C	3C
296	21	Kabare	Waigeo Utara Kab.Raja Ampat	Dom	Dom	P	P	2B	2C
297	22	Misool (Limalas)	Misool Timur Kab. Raja Ampat	Dom	Dom	P	P	2B	2C
298	23	Reni	P. Ayau Kab. Raja Ampat	Dom	Dom	P	P	2B	2C
299	24	Dorekar	P. Ayau Kab. Raja Ampat	Dom	Dom	P	P	2C	3C

KETERANGAN :

Int'l = Internasional
Dom = Domestik
PP = Pengumpul Skala Primer
PS = Pengumpul Skala Sekunder
PT = Pengumpul Skala Tersier
P = Pengumpan

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran II.C Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 69 Tahun 2013
Tanggal : 16 Agustus 2013

FORMULA PERHITUNGAN TINGKAT UTILISASI OPERASIONAL BANDAR UDARA

1. FASILITAS SISI DARAT

$$\frac{\text{(PENUMPANG WAKTU SIBUK X STANDARD LUAS TERMINAL)}}{\text{(LUAS EKSISTING TERMINAL)}} = IAP4_{\text{sisi darat}}$$

$IAP4_{\text{sisi darat}}$ Indikasi Awal Pembangunan, Pendayagunaan, Pengembangan dan Pengoperasian	○ IAP4 > 0.75 Kapasitas yang tersedia dapat dikembangkan ○ 0.75 ≥ IAP4 > 0.6 Kapasitas yang tersedia menjadi perhatian untuk dikembangkan ○ IAP4 ≤ 0.6 Kapasitas yang tersedia masih mencukupi, tidak perlu dikembangkan

Keterangan:

Luas Eksisting	Luas bangunan terminal yang digunakan bagi kegiatan operasional; tidak termasuk fasilitas komersial/konsesi
Standar Luas Terminal	Standar luas terminal 14 m2/PWS Domestik 17 m2/PWS Internasional

2. FASILITAS SISI UDARA

a. PERPANJANGAN LANDASAN
Berdasar pada:
1. Take Off Weight yang direncanakan
2. Critical Aircraft yang direncanakan
3. Minimal mempunyai rencana pergerakan pesawat ≥ 104 pergerakan critical aircraft/tahun (min sekali seminggu)
4. Rute penerbangan terjauh yang dilayani

b. PENAMBAHAN LANDAS PACU BARU

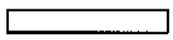
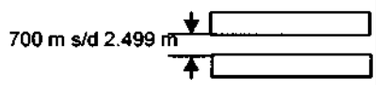
$$\frac{\text{(PERGERAKAN PSWT TAHUNAN EKSISTING)}}{\text{(KAPASITAS PERGERAKAN PSWT TAHUNAN)}} = IAP4_{\text{sisi udara}}$$

$IAP4_{sisi\ udara}$ Indikasi Awal Pembangunan, Pendayagunaan, Pengembangan dan Pengoperasian	o IAP4 > 0.9 Kapasitas yang tersedia dapat dikembangkan o 0.9 ≥ IAP4 > 0.75 Kapasitas yang tersedia menjadi perhatian untuk dikembangkan o IAP4 ≤ 0.75 o Kapasitas yang tersedia masih mencukupi, tidak perlu dikembangkan

Keterangan:

Pergerakan pesawat tahunan eksisting	
Kapasitas Pergerakan Pesawat tahunan landas pacu	Mix index dalam waktu seminggu/70

TABEL KAPASITAS LANDAS PACU TAHUNAN

Konfigurasi	Diagram Konfigurasi Landas Pacu	Mix Index Percent (C + 3D)*)	Hourly Capacity (Operations per Hour)		Annual Service Volume (Operations per Year)
			VFR	IFR	
A Single Runway		0-20	98	59	230.000
		21-50	74	57	195.000
		51-80	63	56	205.000
		81-120	55	53	210.000
		121-180	51	50	240.000
B Dual Lane Runways		0-20	197	59	355.000
		21-50	145	57	275.000
		51-80	121	56	260.000
		81-120	105	59	285.000
		121-180	94	60	340.000

Sumber: Airport Capacity and Delay, FAA Advisor Circular 150/5060-5, September 23, 1983

*) C : Pesawat besar, berat pesawat 6,750 ton s/d 150 ton
D : Pesawat sangat besar, berat pesawat lebih dari 150 ton

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001



KETERANGAN :

: Wilayah yang Masuk di Dalam Cakupan Pelayanan Bandar Udara Eksisting

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL

PETA CAKUPAN PELAYANAN BANDAR UDARA DI INDONESIA

Lampiran II.A.
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 69 TAHUN 2013
Tanggal : 16 AGUSTUS 2013

MENTERI PERHUBUNGAN

TTD

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran III.B Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 69 TAHUN 2013
Tanggal : 16 Agustus 2013

I. TABEL KRITERIA CAKUPAN PELAYANAN BANDAR UDARA

Wilayah	Kriteria	Indikator
Pulau Jawa dan Sumatera	cakupan pelayanan 100 km atau jarak dua bandar udara 200 km.	Jarak / waktu pencapaian moda transportasi darat atau moda transportasi lainnya yang dapat dilayani suatu bandar udara pada wilayah tertentu.
Pulau Kalimantan dan Sulawesi	cakupan pelayanan 60 km atau jarak dua bandar udara 120 km.	Jarak / waktu pencapaian moda transportasi darat atau moda transportasi lainnya yang dapat dilayani suatu bandar udara pada wilayah tertentu.
Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua	cakupan pelayanan 30 km atau jarak dua bandar udara 60 km.	Jarak / waktu pencapaian moda transportasi darat atau moda transportasi lainnya yang dapat dilayani suatu bandar udara pada wilayah tertentu.

II. TABEL KRITERIA PERAN BANDAR UDARA

Kebijakan	Kriteria	Indikator
Bandara Sebagai Pembuka Daerah Terisolir	1. Terletak di pedalaman perbukitan/pegunungan,kepulauan, pesisir, dan pulau terpencil;	– Jarak pencapaian untuk pulau terpencil ke daerah terdekat yang mempunyai moda transportasi lain yang lebih baik minimal 4 jam waktu tempuh. – Jarak pencapaian minimal 10 km atau dengan waktu tempuh minimal 3 jam berjalan kaki dari moda transportasi terdekat – Kondisi geografis terdapat sungai, gunung dan lembah
	2. Keterbatasan aksesibilitas moda transportasi lain;	– Terbatasnya prasarana infrastruktur transportasi darat dan laut/sungai seperti: jembatan, jalan dan dermaga. – Terbatasnya moda transportasi darat dan laut (belum terlayani sarana transportasi yang beroperasi secara tetap dan teratur)
	3. Rendahnya tingkat kehidupan masyarakat;	– Rendahnya tingkat perekonomian masyarakat – Kurangnya sumber daya manusia

		– Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. – Produktivitas masyarakat yang masih rendah (tingginya tingkat pengangguran) – Rendahnya kemampuan keuangan lokal (celah fiskal); – Adanya kemampuan masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi udara (ATP). – Adanya kemauan masyarakat menggunakan jasa transportasi udara.(WTP)
Bandara sebagai Pengembangan Daerah Perbatasan	1. Perbatasan wilayah Darat;	– Berada di daerah perbatasan antarnegara – Daerah perbatasan yang berpotensi konflik sosial; – Wilayah yang merupakan jalur rawan penyelundupan (barang, orang, hewan); – Ditetapkan oleh BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan)
	2. Merupakan pulau-pulau kecil terluar;	– Wilayah yang merupakan jalur rawan penyelundupan (barang, orang, hewan); – Ditetapkan oleh BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) – Wilayah rawan terhadap pencurian Sumber Daya Alam.
Bandara sebagai Penanganan Bencana	1. Berada pada daerah rawan bencana;	– Tercantum di peta potensi gempa, tsunami dan gunung berapi (Badan Informasi Geospasial dan/atau Badan Nasional Penanganan Bencana); – Mempunyai indeks resiko bencana sedang atau tinggi.
	2. Berada pada daerah yang pernah terjadi bencana terutama gempa, tsunami dan gunung berapi;	– Lebih dari 1 (satu) kali terjadi bencana yang sama di daerah yang sama dalam 1 tahun; – Mempunyai indeks resiko bencana tinggi.
	3. Bandara yang dijadikan *crisis center* dalam penanganan bencana.	- Berada pada jarak 500-600 km dari bandara di lokasi rawan bencana. - Aman/tidak terkena dampak dari bencana.
Bandar Udara Sebagai Pendorong	1. Daerah yang mempunyai potensi pariwisata:	- Ketersediaan infrastruktur pariwisata (hotel, restaurant dll); - Potensi jumlah kunjungan wisman dan wisnus (wisatawan mancanegara dan

Industri, Perekonomian dan Perdagangan.	2. Daerah yang mempunyai potensi pertambangan dan energy; 3. Potensi perdagangan; 4. Potensi ekonomi.	nusantara) yang cukup tinggi. - Ada aktivitas pertambangan; - Ada Ijin Usaha Pertambangan; - Ada komoditi Eksport import; - Adanya potensi pertumbuhan industri yang cukup tinggi. - Laju pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tinggi; - Laju pertumbuhan Pendapatan Perkapita Penduduk tinggi.

III. TABEL KRITERIA PENGGUNAAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL

NO	Kriteria	Sub Kriteria
1	Rencana induk nasional bandar udara	Arah kebijakan nasional bandar udara
2	Pertahanan dan keamanan Negara	Arah kebijakan pertahanan dan keamanan nasonal
3	Potensi, pertumbuhan dan perkembangan pariwisata	a. bandar udara terletak di daerah tujuan wisata; b. tersedianya infrastruktur pariwisata (hotel, restoran, tempat wisata).
4	Kepentingan dan kemampuan angkutan udara nasional serta potensi permintaan penumpang dan kargo	a. potensi angkutan udara dalam negeri dan luar negeri; b. potensi permintaan angkutan udara dalam negeri dan luar negeri.
5	Potensi dan pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan luar negeri	a. pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto provinsi; b. kontribusi sektor transportasi udara terhadap pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto provinsi.
6	Potensi kondisi geografis	a. lokasi bandar udara dengan bandar udara di negara lain yang terdekat; b. lokasi bandar udara dengan bandar udara internasional yang telah ada.
7	Aksesibilitas dengan bandar udara internasional disekitarnya	a. jumlah kapasitas dan frekuensi penerbangan ke/dari bandar udara internasional disekitarnya;

NO	Kriteria	Sub Kriteria
		b. moda darat dan/laut ke/dari bandar udara internasional disekitarnya
8	Keterkaitan intra dan antar moda	a. keterkaitan dengan moda udara untuk aksesibilitas ke/dari bandar udara ke/dari kota-kota lain; b. keterkaitan dengan moda darat untuk aksesibilitas ke/dari bandar udara ke/dari kota-kota lain; dan/atau c. Keterkaitan dengan moda laut/sungai untuk aksesibilitas ke/dari bandar udara ke/dari kota-kota lain
9	Kepentingan angkutan udara haji	a. potensi angkutan haji dalam cakupan bandar udara; b. cakupan/jarak bandar udara embarkasi/debarkasi haji terdekat.

IV. TABEL KRITERIA DAN CARA PENILAIAN HIERARKI BANDAR UDARA

NO	KRITERIA	SUB KRITERIA	SUB KRITERIA
1	Terletak di kota yang merupakan pusat zona ekonomi	a. Status kota dalam RTRWN	1). PKN 2). PKW 3). PKL
		b. Penggunaan Bandar Udara	1). Internasional 2). Domestik
2	Kepadatan Penumpang	a. Penumpang Datang dan Berangkat (per tahun)	1). ≥ 5.000.000 2). 1.000.000 – 4.999.999 3). 500.000 – 999.999 4). 100.000 – 499.999 5). < 100.000
		b. Penumpang Transit	1). ≥ 500.000 2). 250.000 – 499.999 3). 100.000 – 249.999 4). 50.000 – 99.999 5). < 50.000
		c. Frekuensi Penerbangan (per minggu)	1). ≥ 500 2). 200 – 499 3). 100 – 199 4). 50 – 99 5). < 50

3	Fungsi Penyebaran	a. Rute Penerbangan Dalam Negeri	1). ≥ 15 2). 5 – 14 3). < 5
		b. Rute Penerbangan Luar Negeri	1). ≥ 5 2). 1 – 4
		c. Rute Cakupan Dalam Negeri	1). > 5 2). 3 – 5 3). < 3

V. TABEL KRITERIA KLASIFIKASI BANDAR UDARA

Kode Nomor (*Code Number*)	Panjang RW Berdasar Referensi Pesawat (*Aeroplane Reference Field Length*)	Kode Huruf (*Code Letter*)	Bentang Sayap (*Wing Span*)	Jarak Roda Utama Terluar (*Outer Mean Gear*)
1	ARFL < 800 m	A	*wing span* < 15	*Outer Mean Gear* < 4.5 m
2	800 m ≤ ARFL < 1200 m	B	15 m ≤ *wing span* < 24 m	4.5 m ≤ *outer mean gear* < 6 m
3	1200 m ≤ ARFL < 1800 m	C	24 m ≤ *wing span* < 36 m	6 m ≤ *outer mean gear* < 9 m
4	1800 m ≤ ARFL	D	36 m ≤ *wing span* < 52 m	9 m ≤ *outer mean gear* < 14 m
		E	52 m ≤ *wing span* < 56 m	9 m ≤ *outer mean gear* < 14 m
		F	56 m ≤ *wing span* < 80 m	14 m ≤ *outer mean gear* < 16 m

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001



LAMPIRAN 26

Daftar Regulasi Tahun 2015-2018

Deregulasi Perturan Perundangan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2018

No.	Regulasi yang baru/ mengubah/menggabung/ mencabut	Revisi/ Pencabutan/ Penggabungan	Regulasi yang disimplifikasi	Keterangan
A. Tahun 2015				
1	Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015	Pencabutan	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009	Konsesi kepada BUP dapat dilakukan melalui mekanisme penugasan/penunjukan langsung dengan syarat tertentu. Hal ini mendorong minat investor untuk berinvestasi dlm pembangunan/pengembangan pelabuhan
2	PM 3 Tahun 2015 Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan Di Badan Koordinasi Penanaman Modal	Pencabutan	KM 83 Tahun 2009 Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang perhubungan dilimpahkan ke Badan Koordinasi Penananam Modal (Pelayanan terpadu satu pintu)
3	PM 5 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-2 atas KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	Revisi	KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	
4	PM 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara Online	Baru		Pelayanan izin usaha angkutan udara online: izin usaha angkutan udara niaga, izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, izin rute penerbangan, flight approval, izin usaha agen penjualan umum
5	PM 41 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-3 atas KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	Revisi	KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	
6	PM 53 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal	Revisi	PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal	
7	PM 68 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-4 atas KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	Revisi	KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	

No.	Regulasi yang baru/ mengubah/menggabung/ mencabut	Revisi/ Pencabutan/ Penggabungan	Regulasi yang disimplifikasi	Keterangan
8	PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan jasa Pengurusan Transportasi	Pencabutan	KM 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi	Penyederhanaan persyaratan kepemilikan modal usaha penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi
9	PM 78 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan jasa Pengurusan Transportasi	Revisi	PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan jasa Pengurusan Transportasi	
10	PM 93 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal	Revisi	PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal	
11	PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing	Baru		Kemudahan bagi wisatawan dengan menggunakan kapal pesiar berbendera asing
12	PM 136 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi	Revisi	PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi	Penyederhanaan jangka waktu pemberian izin pekerjaan Pengerukan dan izin pekerjaan reklamasi
13	PM 146 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-2 atas PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi	Revisi	PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi	
14	PM 147 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan Di Badan Koordinasi Penanaman Modal	Revisi	PM 3 Tahun 2015 Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan Di Badan Koordinasi Penanaman Modal	Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang perhubungan dilimpahkan ke Badan Koordinasi Penananam Modal (Pelayanan terpadu satu pintu)

No.	Regulasi yang baru/ mengubah/menggabung/ mencabut	Revisi/ Pencabutan/ Penggabungan	Regulasi yang disimplifikasi	Keterangan
15	PM 154 Tahun 2015 tentang Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara Online	Baru		Pelayanan surat persetujuan syahbandar online: surat persetujuan kapal masuk pelabuhan, persetujuan olah gerak kapal di pelabuhan, surat persetujuan berlayar
16	PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal Dan Barang Di Pelabuhan	Baru		Kemudahan dalam pelayanan kapal dan barang di pelabuhan
17	PM 159 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-5 atas KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	Revisi	KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	
18	PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing Di Perairan Indonesia	Baru		Pemberian kemudahan pelayanan kapal wisata (Yacht) asing di perairan Indonesia
19	PM 177 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-6 atas KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	Revisi	KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	
20	PM 187 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM 56 Tahun 2015 Tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara	Revisi	PM 56 Tahun 2015 Tentang Kegiatan Penguasahaan di Bandar Udara	
21	PM 192 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan	Revisi	PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal Dan Barang Di Pelabuhan	Kemudahan dalam pelayanan kapal dan barang di pelabuhan

No.	Regulasi yang baru/ mengubah/menggabung/ mencabut	Revisi/ Pencabutan/ Penggabungan	Regulasi yang disimplifikasi	Keterangan
B. Tahun 2016				
1	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Revisi	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Antara lain mengatur tentang penugasan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Waikota untuk menjamin terlaksananya pelayanan angkutan kereta api, berupa angkutan pelayanan kelas ekonomi dan/atau angkutan perintis.
2	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Revisi	Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Antara lain mengatur mengenai penugasan untuk membangun prasaran kereta api ringan yang dilaksanakan melalui pola design and built, dengan beberapa butir pengaturan sbb: - pihak yang ditunjuk dapat menjalin kerjasama dengan badan usaha lain; - dalam hal perjanjian dengan Kemenhub belum ditandatangani, pihak yang ditunjuk tetap dapat melaksanakan penugasan pembangunan tersebut berdasarkan persetujuan teknis dan pengawasan oleh Kemenhub
3	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Revisi	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Antara lain mengatur mengenai percepatan pembangunan untuk penyelenggaraan perkeretaapian umum: - Gubernur DKI dapat menugaskan BUMD untuk pembangunan prasarana perkeretaapian, dengan beberapa butir pengaturan sbb: - BUMD yang ditugaskan dapat bekerjasama dengan badan usaha lain; - Pendanaan pembangunan antara lain dapat berasal dari pinjaman Pemda DKI, yang pengembaliannya dalam bentuk penyerahan seluruh prasarana perkeretaapian yang telah dibangun, kepada Pemda DKI. Dalam rangka percepatan pemanfaatan hasil pembangunan prasarana perkeretaapian: - Gubernur DKI menugaskan BUMD sebagai penyelenggara; - BUMD yang ditugaskan, dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan sarana perkeretaapian;

No.	Regulasi yang baru/ mengubah/menggabung/ mencabut	Revisi/ Pencabutan/ Penggabungan	Regulasi yang disimplifikasi	Keterangan
4	PM 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 Tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga	Revisi	PM 160 Tahun 2015 Tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga	Batas usia pesawat udara diperpanjang untuk meningkatkan aspek produktifitas pesawat, namun tetap harus memenuhi standard kelaikan udara pesawat udara
5	PM 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke-3 atas PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi	Revisi	PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi	Penyederhanaan persyaratan permodalan usaha
6	PM 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PM 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan Di Badan Koordinasi Penanaman Modal	Revisi	PM 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan Di Badan Koordinasi Penanaman Modal	Penyederhanaan proses perizinan di Badan Koordinasi Penananam Modal (Pelayanan terpadu satu pintu)
7	PM 40 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-7 atas KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	Revisi	KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	Penyederhanaan persyaratan permodalan penyelenggaraan angkutan udara
8	PM 56 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-8 atas KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	Revisi	KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	Penyederhanaan persyaratan permodalan penyelenggaraan angkutan udara
9	PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut	Revisi	PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut	pengajuan permohonan SIUPAL semula kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut menjadi kepada Kepala BKPM
10	PM 99 Tahun 2016 tentang Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Publication) Indonesia dengan Menggunakan Sistem Berbasis Internet (Online System)	Baru		Penerapan perizinan berbasis aplikasi online untuk meningkatkan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat

No.	Regulasi yang baru/ mengubah/menggabung/ mencabut	Revisi/ Pencabutan/ Penggabungan	Regulasi yang disimplifikasi	Keterangan
11	PM 100 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri	Pencabutan	PM 200 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri	Proses perizinan sebelumnya 14 (empat belas) hari kerja menjadi 7 (tujuh) hari kerja
12	PM 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Revisi	PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	
13	PM 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan Barang (long stay) di Pelabuhan Utama Belawan, di Pelabuhan Utama Tanjung Priok, di Pelabuhan Utama Tanjung Perak dan Di Pelabuhan Utama Makassar	Pencabutan	PM 117 Tahun 2015 tentang Pemindahan Barang Di Tanjung Priok	Lokasi pelabuhan yang diatur mengenai pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan Semula: Lokasi hanya berlaku pada satu pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok Diubah menjadi: Lokasi berlaku di 4 (empat) pelabuhan utama meliputi Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Dan Pelabuhan Utama Makassar
14	PM 123 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia	Revisi	PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia	Pemberian kemudahan pelayanan kapal wisata (Yacht) asing di perairan Indonesia

No.	Regulasi yang baru/ mengubah/menggabung/ mencabut	Revisi/ Pencabutan/ Penggabungan	Regulasi yang disimplifikasi	Keterangan
15	PM 130 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke-4 atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi	Revisi	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi	Penyederhanaan persyaratan kepemilikan modal dasar, semula paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik
16	PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	Revisi	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Pelaut	Pendelegasian penerbitan Sertifikat Kepelautan, semula Sertifikat Kepelautan diterbitkan oleh Direkur Jenderal Perhubungan Laut Diubah menjadi Sertifikat kepelautan yang berupa sertifikat keahlian maupun sertifikat keterampilan penerbitan sertifikatnya dilakukan oleh lembaga diklat dibawah BPSDM
17	PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Pencabutan Pasal	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha Di Bidang Transportasi	Penyederhanaan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, untuk pelabuhan utama: semula modal disetor paling sedikit Rp.1.000.000.000.000 menjadi Rp. 500.000.000.000; untuk pelabuhan pengumpul: semula modal disetor paling sedikit Rp.200.000.000.000 menjadi modal dasar paling sedikit Rp100.000.000.000, untuk pelabuhan pengumpan: semula modal disetor paling sedikit Rp.25.000.000.000 menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
		Revisi	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha Badan Usaha Pelabuhan yang semula oleh Menteri Perhubungan menjadi diberikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Penyederhanaan tahapan dan jangka waktu proses penerbitan izin usaha Badan Usaha Pelabuhan:
18	PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal	Pencabutan	PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan	Penyederhanaan persyaratan peralatan usaha bongkar muat Penyederhanaan persyaratan kepemilikan modal usaha Pengaturan ruang lingkup usaha bongkar muat oleh perusahaan angkutan laut nasional yang hanya melakukan kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) setelah memperoleh konsesi Pelaksana kegiatan bongkar muat barang dilarang memungut tarif jasa bongkar muat yang tidak ada pelayanan

No.	Regulasi yang baru/ mengubah/menggabung/ mencabut	Revisi/ Pencabutan/ Penggabungan	Regulasi yang disimplifikasi	Keterangan
			Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal	
19	PM 155 Tahun 2016 tentang Batas Usia Pesawat Udara Yang Digunakan Untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga	Pencabutan	PM 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 Tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga	Batas usia pesawat udara diperpanjang untuk meningkatkan aspek produktifitas pesawat, namun tetap harus memenuhi standard kelaikan udara pesawat udara

No.	Regulasi yang baru/ mengubah/menggabung/ mencabut	Revisi/ Pencabutan/ Penggabungan	Regulasi yang disimplifikasi	Keterangan
C. Tahun 2017				
1	PM 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian	Pencabutan	PM 155 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian	Sertifikasi terhadap masinis/ Asisten Masinis di Sarana KA otomatis
2	PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api	Pencabutan	PM 21 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api	Penyederhanaan proses penerbitan sertifikat
3	PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian	Pencabutan	PM 92 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian	Penyederhanaan proses penerbitan sertifikat awak sarana perkeretaapian
4	PM 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian	Pencabutan	PM 93 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian	Penyederhanaan proses penerbitan awak sarana perkeretaapian
5	PM 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian	Pencabutan	PM 94 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian	Penyederhanaan proses penerbitan awak sarana perkeretaapian
6	PM 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Pencabutan	PM 95 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Penyederhanaan proses penerbitan awak sarana perkeretaapian
7	PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	Pencabutan	PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	Penyederhanaan persyaratan modal disetor, semula paling sedikit 25 M diubah menjadi: ketentuan modal ditentukan berdasarkan panjang dermaga (<70m atau lebih) dan volume bongkar muat (<100rb ton/thn atau lebih) yaitu 1 M atau 5 M Perpanjangan Penggunaan Tersus Untuk Melayani Kepentingan Umum; Semula paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang, diubah menjadi paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dari Direktur Jenderal.

No.	Regulasi yang baru/ mengubah/menggabung/ mencabut	Revisi/ Pencabutan/ Penggabungan	Regulasi yang disimplifikasi	Keterangan
8	PM 24 Tahun 2017 Tentang Pencabutan persyaratan kepemilikan modal badan usaha di bidang pengusahaan angkutan laut, keagenan kapal, pengusahaan bongkar muat, dan badan usaha pelabuhan	Pencabutan pasal	PM 45 Tahun 2015 Tentang Persayaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi	Pencabutan persyaratan kepemilikan modal Badan Usaha di Bidang Transportasi
		Pencabutan pasal	PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut	Pencabutan persyaratan kepemilikan modal pengusahaan angkutan laut
		Pencabutan pasal	PM 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal	Pencabutan persyaratan kepemilikan modal pengusahaan keagenan kapal
		Pencabutan pasal	PM 146 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Pencabutan persyaratan kepemilikan modal penyelenggaraan pelabuhan laut
		Pencabutan pasal	PM 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal	Pencabutan persyaratan kepemilikan modal Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
10	PM 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Ke-10 atas KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	Revisi	KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	Pemangkasan jangka waktu penerbitan perizinan
11	PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi	Pencabutan	- PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi - PM 78 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi - PM 146 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-2 atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi - PM 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke-3 atas Peraturan Menteri	Latar belakang penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Transportasi antara lain: simplifikasi terhadap peraturan yang mengatur pengusahaan jasa pengurusan transportasi; debirokratisasi terhadap pengurusan izin jasa pengurusan transportasi; untuk mendorong investasi di sektor transportasi kepada UMKM; peningkatan profesionalisme terhadap perusahaan jasa pengurusan transportasi.

No.	Regulasi yang baru/ mengubah/menggabung/ mencabut	Revisi/ Pencabutan/ Penggabungan	Regulasi yang disimplifikasi	Keterangan
			Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi - PM 130 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke-4 atas PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Transportasi	
12	PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara	Pencabutan	PM 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang diangkut dengan Pesawat Udara PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi yang mengatur mengenai kepemilikan modal Regulated Agent dan Known Consignor	Penghapusan persyaratan modal disetor Rp 25 M Penyederhanaan persyaratan fasilitas peralatan
13	PM 115 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2016 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri	Revisi	PM 100 Tahun 2016 Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri	mendorong perusahaan nasional untuk dapat menggunakan kapal berbendea Indonesia guna mendukung kegiatan penunjang Offshore migas nasional
14	PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis , Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan	Revisi	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 Jenis , Struktur, Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2014	Sebagai bentuk keinginan Pemerintah untuk menciptakan tarif jasa kepelabuhanan yang lebih kompetitif serta kemudahan dalam mekanisme penetapannya

No.	Regulasi yang baru/ mengubah/menggabung/ mencabut	Revisi/ Pencabutan/ Penggabungan	Regulasi yang disimplifikasi	Keterangan
15	PM 114 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka \Pelaksanaan Kewajiban Peayanan Publik (Public Service Obligation)	Revisi	PM 10 Tahun 2016 tentang Taif Angkutan Barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik service obligation	memberikan keringanan /potongan harga kepada pengguna jasa antara lain PNS, TNI, Pelajar, Mahasiswa, Veteran dan Lansia

No.	Regulasi yang baru/ mengubah/menggabung/ mencabut	Revisi/ Pencabutan/ Penggabungan	Regulasi yang disimplifikasi	Keterangan
D. Tahun 2018				
1	PM 22 Tahun 2018 tentang Komponen Penghasilan Dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Laut ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2018;	Baru		Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi komponen penghasilan dan biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan subsidi penyelenggaraan angkutan barang di laut melalui mekanime penugasan dan pemilihan penyedia jasa lainnya.
2	PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2018;	Baru		Layanan perizinan angkutan diselenggarakan melalui Sistem Informasi Perizinan Online Angkutan dan Multimoda, yang selanjutnya disebut SPIONAM yang meliputi : a. izin pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; b. persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan; c. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; d. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; e. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus; dan f. izin usaha angkutan multimoda.
3	PM 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 Tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2018; dan	Perubahan	PM 71 Tahun 2013 Tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2018	menyelaraskan ketentuan yang berkaitan dengan tata cara penyingkiran kerangka kapal dan / atau muatannya
4	PM 51 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2014 Tentang Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2018.	Pencabutan	PM 33 Tahun 2014 Tentang Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2018.	sesuai hasil evaluasi atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2014 tentang Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, terdapat ketidaksinkronisasian dalam hierarki jenis peraturan perundangan-undangan



LAMPIRAN 27

Judul Penelitian Tahun 2018

Penelitian Tahun 2018 Yang Dijadikan Rekomendasi

No.	Judul Penelitian	Dijadikan Rekomendasi Kebijakan
	Studi Kebijakan Perencanaan Transportasi	
1.	*Background* Studi (Naskah Akademis Renstra Balitbang Perhubungan Tahun 2020-2024)	√
2.	*Database* dan Sistem Informasi Transportasi	√
	Penelitian Bidang Transportasi Antarmoda	
1	Sistem Informasi Jaringan Pelayanan Transportasi Antarmoda Dalam Mendukung Sistem Informasi di Kawasan Destinasi Kawasan Destinasi Wisata Sabang	√
2	Pemetaan Data Sistem Informasi Pelayanan Transportasi Antarmoda Dalam Mendukung Kawasan Destinasi Wisata di Lampung	√
3	Potensi Penggunaan E-Market dalam Mendukung Distribusi Angkutan Barang	√
4	Pemetaan Regulasi Aplikasi Transportasi Multimoda Berbasis Online	√
5	Kajian Pemodelan kebutuhan Angkutan Barang di Pulau Jawa	√
6	Potensi Pengembangan Angkutan Multimoda di Kabupaten Jepara	√
7	Strategi Pengembangan Keterpaduan Transportasi Antarmoda di Bandar Udara Radin Inten II	√
10	Smart Logistik dengan *Mobile Application*	√
11	Keterpaduan Prasarana Transportasi Antarmoda Pada Kawasan Destinasi Wisata Labuhan Bajo	√
12	Integrasi Transportasi Antarmoda di Kota Pekanbaru	√
14	Sistem Informasi Jaringan Pelayanan Transportasi Antarmoda Dalam Mendukung Sistem Informasi di Kawasan Wisata Mandeh	√
15	Sistem Informasi Jaringan Pelayanan Transportasi Antarmoda Dalam Mendukung Sistim Informasi Kawasan Destinasi Wisata Labuan Bajo	√
17	Keterpaduan Prasarana Transportasi Antarmoda di Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang	√
18	Tipologi Transit Oriented Development pada LRT Palembang	√
19	Evaluasi Efektivitas Penerapan Sistem Multi Line Free Flow (MLFF) di Jalan Tol (Studi Kasus : Gerbang Tol Cikarang Utama)	√
20	Efektifitas Integrasi Sistem Pembayaran Elektronik Transportasi	√
21	Pemantapan Naskah akademis Sistranas (Lanjutan Penyusunan Naskah Akademis Sistranas)	√
22	Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah di Papua dalam rangka Mendukung Tol Laut	√
23	Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN) Orang	√
	Penelitian Bidang Transportasi Jalan Dan Perkeretaapian oleh Puslitbang	
1	Kajian Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara	√
2	Kajian Penataan Lalu Lintas di Parakan Kabupaten Temanggung	√
3	Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Padang Pariaman	√
4	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Lampung Selatan	√
5	Studi Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah	√
6	Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Jalur Wisata di Kabupaten Pasuruan - Jawa Timur	√
7	Pengkajian Kondisi Lalu Lintas Pada Beberapa Persimpangan di Kota Bandar Lampung	√
8	Kajian Aksesibilitas Angkutan Wisata di Kabupaten Kutai Kertanegara	√
9	Kajian Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi Maluku Utara	√
10	Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Perawang di Kabupaten Siak	√
11	Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Umum Dan Konektifitas Antarmoda di Kabupaten Merauke	√
12	Penataan Transportasi di Sekitar Stasiun Cilebut Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	√
22	Analisis Kesiapan Jalur Mudik Angkutan Lebaran 2018 Melalui Lintas Utara Jawa (Jakarta-Semarang)	√
23	Analisis Kesiapan Jalan Tol (Semarang-Surabaya) Dalam Mendukung Angkutan Lebaran 2018	√
25	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pada Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru	√
26	Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kota Balikpapan	√
27	Kajian Aksesibilitas Bagi Diffable Pada Angkutan Jalan di Kota Surakarta	√
28	Analisa Kinerja Persimpangan Tiga Tugu Sembilan di Kabupaten Kediri	√
29	Kajian Penyediaan Fasilitas Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Pada Angkutan Jalan dan Perkeretaapian di Yogyakarta	√
30	Penataan Parkir Di Badan Jalan (On Street Parking) Kota Payakumbuh	√
31	Kajian Aspek Keselamatan Pada Perlintasan Sebidang Di Bandar Lampung	√
32	Kajian Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Di Provinsi Bangka Belitung (Studi Kasus Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Bangka)	√
33	Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap di DKI Jakarta (Studi Kasus di 10 Ruas Jalan Utama DKI Jakarta dan Pintu Tol di Wilayah Jabodetabek)	√
34	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Green Zone di Kawasan Wisata Ubud Kabupaten Gianyar Bali	√
36	Kajian Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Ciawi - Puncak Bogor	√
37	Kajian Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Mempawah	√
38	Optimalisasi Kinerja ATCS Di Kota Balikpapan	√
39	Kajian Aksesibilitas Dan Pelayanan Angkutan Umum Menuju Lokasi Wisata Di Kabupaten Bangka Selatan	√
40	Kajian Penataan Parkir di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur	√
41	Kajian Penataan Parkir Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah	√
42	Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	√
43	Kajian Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan Balikpapan Kalimantan Timur	√
44	Kajian Penetapan Trayek Angkutan Umum Berbasis Jalan di Pulau Nunukan	√
45	Kajian Optimalisasi Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di Kabupaten Karawang	√
46	Peningkatan Aksesibilitas Menuju Bandara Internasional Minangkabau dengan Kereta Api Bandara	√
47	Analisis Kebutuhan Ruang Parkir di Pusat Kota Bandar Lampung (Studi Kasus : Ruas Jalan Kartini dan Raden Inten)	√
48	Kajian Kepuasan Pelayanan Angkutan Umum di Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus Angdes)	√
49	Studi Potensi Pemudik Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019	√
51	Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 1439 H/2018 Bagi Pengguna Kendaraan Pribadi/Sewa	√
52	Kajian Potensi Angkutan Lebaran Tahun 2018 Berbasiskan Online Survei	√
53	Analisa Distribusi Beban Pada Kendaraan Angkutan Barang Sesuai dengan Konfigurasi Axle	√
54	Background Study Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	√
55	Studi Perencanaan dan Penataan Angkutan Barang di Pedesaan	√
56	Studi Perencanaan Transport Oriented Development (TOD) Angkutan Perkeretaapian	√
57	Studi Review Perundangan Perkeretaapian	√
58	Perencanaan Dan Penataan Jalur Kereta Api Barang di Pulau Sumatera	√
59	Skema Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (LRT/MRT)	√

No.	Judul Penelitian	Dijadikan Rekomendasi Kebijakan
	Penelitian Bidang Transportasi Laut, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	
1	Pemanfaatan Big Data Transportasi Laut untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kapal Di Pelabuhan	√
2	Pemanfaatan Big Data Transportasi Laut untuk Mengukur Kinerja Bongkar-Muat Barang Di Pelabuhan	√
3	Kebutuhan DO Online untuk Integrasi Layanan di Pelabuhan	√
4	Pemanfaatan Big Data Transportasi Laut untuk Mengukur Kinerja Dwelling time Di Pelabuhan	√
5	Kajian Manfaat Rumah Kita Dalam Mendukung Program Tol Laut Untuk Menunjang Kelancaran Barang;	√
6	Kajian Desain Kapal yang Optimal Untuk Mendukung Angkutan Laut di Kabupaten Natuna	√
7	Kelayakan Pemanfaatan Dermaga Apung Di Kabupaten Boalemo. untuk Mendukung Pariwisata;	√
9	Evaluasi Penerapan Aturan Keselamatan Angkutan Sungai Di Pulau Kalimantan (Studi Kasus: Sungai Mahakam)	√
10	Evaluasi Penerapan Aturan Keselamatan Pemanduan Bagi Pandu Di Pelabuhan Tanjung Perak;	√
12	Kebutuhan Tersus Ternak Untuk Optimalisasi Tol Laut dalam Mendukung Ketahanan Distribusi Daging Nasional di Pelabuhan Lamongan	√
13	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengurusan Perizinan Tersus dan TUKS	√
15	TKDN Pembangunan Kapal di Indonesia	√
16	Stabilitas dan Garis Muat Kapal yang Beroperasi di Danau Toba	√
19	Penerapan Standar NCVS terhadap Pembangunan Kapal non Konvensi dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran	√
20	Pemenuhan Standar Kelaikan Peti Kemas Domestik Sebagai Alat Angkut Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Pelayaran (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)	√
21	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Kapal Wisata di Raja Ampat dalam mendukung keselamatan pelayaran	√
22	Kesesuaian antara ukuran kapal dengan Mesin Penggerak Utama Kapal Pelayaran Rakyat (Studi Kasus : Pautere dan Sunda Kelapa)	√
23	Optimalisasi Pemanfaatan Tiket Online di Pelabuhan Laut	√
24	Kecukupan dan Keandalan Rambu Navigasi di alur sungai Musi	√
26	Pemanfaatan Breakwater Terapung	√
27	Pengembangan Angkutan Penyeberangan dari Pantai Barat Sulawesi ke Kalimantan Timur (Studi kasus : Donggala - Balikpapan)	√
28	Evaluasi Usulan trayek Perintis di Kabupaten Tojo Una Una dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	√
29	Pemenuhan Keselamatan Kapal Rakyat dibawah GT 35 di Sungai Musi dalam rangka meningkatkan Keselamatan Pelayaran	√
31	Peran BP2TL dalam meningkatkan kualitas Sumber daya manusia transportasi laut	√
33	Kajian Pengukuran Parameter Dalam Penentuan Trayek Tol Laut	√
34	Peningkatan Penanganan Pengangkutan B3 dan Over Dimension Overload (ODOL)pada Kapal Ro Ro (Studi Kasus Penyeberangan Merak – Bakauheni)	√
35	Kajian Evaluasi Pelayanan Angkutan Laut Perintis	√
36	Studi Kebutuhan Subsidi Kapal Feeder pada Trayek Tol Laut di Pulau Natuna	√
37	Studi Pengembangan Trayek Tol Laut Tahun 2019	√
38	Studi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Penyeberangan dalam Mendukung Jaringan Tol Laut.	√
39	Studi Penerapan Motorized Barge Jakarta Surabaya Dalam Mengurangi Beban Lalu Lintas Jalan Di Pantai Utara Pulau Jawa	√
40	Skema Pendanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Penyeberangan	√
41	Studi Pemetaan/Sebaran Pelabuhan Laut dan Penyeberangan pada 7 Pulau Besar di Indonesia	√
42	Studi Tinjau Ulang Pengoperasian dan Jaringan Angkutan Laut Perintis dalam Rangka Menjaga Kontinuitas Kebutuhan Bahan Pokok dan Stabilitas Harga	√
43	Studi Penyusunan Grand Desain Transportasi Danau di Kawasan Wisata Danau Toba. Sumatera Utara Dalam Rangka Mendukung Pariwisata	√
	Penelitian Bidang Transportasi Udara	
1	Kajian Pengaturan Tempat Menginap Pesawat Udara di Bandar Udara (Home Based) untuk Pengaturan Rute Penerbangan.	√
2	Kajian Standardisasi Peralatan Navigasi untuk Operasional Bandar Udara Kelas 3 di Papua	√
3	Evaluasi Standardisasi Pelatihan dan Sertifikasi Avsec (Aviation Security)	√
4	Kajian Pengoperasian Bandar Udara Pondok Cabe sebagai Hub Pengoperasian Pesawat Turboprop untuk Penerbangan Jarak Pendek (Air Taxi)	√
5	Kajian Smart Airport untuk Peningkatan Passenger Experience di Bandara Kualanamu Medan	√
6	Kajian Pendanaan Infrastruktur Bandar Udara di Indonesia melalui Skema Pembiayaan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)	√
7	Kajian Bandar Udara Kertajati sebagai Secondary Airport dari Bandar Udara Soekarno Hatta	√
8	Kajian Pengoperasian Helicopter City Transport (Heli-City) sebagai Transportasi Udara Charter Ditinjau dari Aspek Keamanan dan Keselamatan	√
9	Kajian Pemanfaatan Ruang Bagasi Tercatat Penumpang Pesawat Udara yang tidak Terpakai	√
10	Kajian Regulasi Khusus untuk Pengoperasian Pesawat Udara di Papua dan Papua Barat	√
14	Kajian Peningkatan Kompetensi & Jumlah SDM Serta Peralatan PKP-PPK di Bandar Udara Abdurahman Saleh Malang	√
17	Kajian Pemenuhan Fasilitas Bandar Udara Untuk Meningkatkan Pelayanan dan Menunjang Pertumbuhan *Demand* di Bandar Udara Silangit	√
18	Kajian Pengembangan UPBU Trunojoyo Ditinjau dari Demand dan Peningkatan Frekuensi Penerbangan	√
19	Kajian Bandar Udara Haluoleo Kendari Untuk Mendukung Konektifitas Angkutan Logistik Kargo Udara di Sulawesi Tenggara	√
20	Penelitian Pengembangan *Prototype* Peralatan Untuk Mendeteksi *Windshear* (Angin Samping) di Bandar Udara	√
21	Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Udara Perintis Penumpang	√
22	Penelitian Pengembangan *Prototype* Peralatan Untuk Mengukur Ketinggian Genangan Air (*Standing Water*) di Landas Pacu	√
23	Penelitian Pengembangan Transhipment Kargo Udara di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar	√
24	Studi Pemilihan Tipe Pesawat Udara dan Pembuatan *Hub and Spoke* (Pengumpul dan Pengumpan) Bandar Udara Untuk Penurunan Disparitas Harga Logistik di Papua	√
25	Studi Peningkatan Lapangan Terbang (*Airstrip*) ke Status Standar Bandar Udara	√
26	Background *Study reviu* Terhadap Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan	√
27	Studi potensi Untuk Ditetapkannya Lokasi Bandar Udara Perairan dan untuk Pengoperaian Pesawat Udara Perairan (*Seaplane*) di Indonesia	√



LAMPIRAN 28

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2018

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Januari 2019

Nomor : 08 /KIP/I/2019
Lampiran : -
Hal : Jawaban atas Permintaan Data Nilai Keterbukaan Informasi Publik 2018

Kepada Yth.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Kementerian Perhubungan RI
di
Tempat.

Dengan hormat,

Berdasarkan permohonan informasi yang Saudara ajukan melalui Surat Nomor UM007/97/18PHB2018 tertanggal 21 Desember 2018 perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2018, berikut disampaikan nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Saudara:

Nilai Indikator 1 & 2 (30%)	Nilai Indikator 3 & 4 (40%)	Nilai Presentasi (30%)	Nilai Akhir	Kualifikasi
30,00 I. Pengembangan Website: 40,00 II. Pengumuman Informasi: 60,00	**31,50** III. Pelayanan Informasi: 43,75 IV. Penyediaan Informasi:35,00	**26,25**	**87,75**	**Menuju Informatif**

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Saudara, adalah sebagai berikut:

1. Disediakannya Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan (pengesahan) tahun 2018;
2. Disediakannya SOP mengenai Pengelolaan Permohonan Informasi yang telah disahkan;
3. Disediakannya SOP mengenai Pengelolaan Keberatan atas informasi yang telah disahkan;
4. Disediakannya SOP mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik yang telah disahkan;
5. Disediakannya SOP mengenai Penetapan dan Pemuktahiran DIP yang telah disahkan;
6. Disediakannya SOP mengenai Pengujian tentang Konsekuensi yang telah disahkan;
7. Disediakannya SOP mengenai pendokumentasian informasi publik yang telah disahkan;
8. Disediakannya SOP mengenai pendokumentasian informasi yang dikecualikan yang telah disahkan;

Proses penilaian pada tahap Presentasi melibatkan pakar yang kompeten di bidangnya. Hal ini dimaksudkan sebagai akuntabilitas sekaligus memastikan proses ini dilakukan secara terencana dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Pakar-pakar dimaksud yaitu:
1. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. (pakar hukum)

2. Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A. (peneliti utama LIPI)
3. Dr. Fal Harmonis (pakar komunikasi)
4. Bambang Harymurti (wartawan senior)
5. Paulus Widiyanto (mantan Pansus RUU KIP)
6. Danardono Siradjudin (CSO, pegiat Keterbukaan Informasi Publik)
7. Desiana Samosir (CSO, pegiat Keterbukaan Informasi Publik)

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI PUSAT
KETUA,

GEDE NARAYANA



LAMPIRAN 29

Rekapitulasi Persentase Kehandalan Sistem Informasi Kementerian Perhubungan Tahun 2018

REKAPITULASI PERSENTASE KEHANDALAN INFRASTRUKTUR (SERVER) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Host	Alias	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES
1	10.0.47.12	dkuppu-esx-10	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	99,93%	100,00%	99,93%	99,91%	100,00%	99,94%	62,58%	14,43%
2	10.0.47.13	dkuppu-esx-11	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	99,93%	100,00%	99,91%	99,02%	100,00%	99,98%	100,00%	44,48%
3	10.0.47.14	dkuppu-esx-12	100,00%	99,98%	100,00%	100,00%	99,93%	100,00%	99,94%	99,79%	100,00%	99,15%	100,00%	44,48%
4	10.0.48.36	New SOA Dev	100,00%	99,96%	99,99%	100,00%	99,96%	100,00%	99,93%	99,84%	100,00%	86,67%	44,74%	60,66%
5	10.0.48.37	pelaut.dephub.go.id	99,95%	99,99%	100,00%	100,00%	99,97%	99,99%	99,93%	99,84%	100,00%	99,84%	99,99%	61,05%
6	10.0.48.38	Avsec	99,91%	99,96%	100,00%	100,00%	99,96%	100,00%	99,91%	99,62%	99,99%	94,00%	98,81%	60,52%
7	10.0.48.39	Pas Bandara	100,00%	99,98%	100,00%	100,00%	99,97%	100,00%	99,93%	99,70%	99,96%	99,18%	0,11%	31,00%
8	10.0.48.40	Sipencatar Server DB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	100,00%	99,93%	99,87%	100,00%	92,92%	0,00%	14,43%
9	10.0.48.41	Sipencatar Server App	100,00%	99,97%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	99,91%	99,93%	100,00%	92,90%	0,00%	14,43%
10	10.0.48.206	Pelaut Baru	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	100,00%	99,95%	99,54%	99,99%	94,01%	99,70%	60,47%
11	10.47.210.10	AOL Dev	99,92%	99,89%	99,92%	100,00%	99,99%	100,00%	99,94%	99,97%	100,00%	99,65%	100,00%	100,00%
12	10.47.210.12	AOL DB DEV	99,91%	99,91%	99,93%	100,00%	100,00%	99,98%	99,94%	100,00%	99,99%	94,55%	99,98%	100,00%
13	10.47.210.13	EAI DashBoard	99,85%	99,88%	99,92%	100,00%	99,98%	99,98%	99,94%	99,95%	100,00%	99,71%	100,00%	100,00%
14	10.47.210.14	AOL DB Prod	99,89%	99,93%	99,93%	100,00%	99,98%	99,94%	99,94%	99,94%	100,00%	99,67%	99,98%	100,00%
15	10.47.210.16	PKB Online	99,92%	99,97%	99,93%	100,00%	99,98%	99,99%	99,95%	99,95%	100,00%	99,66%	100,00%	100,00%
16	10.47.210.17	HubNet-LB	99,76%	99,89%	99,93%	100,00%	99,98%	99,97%	99,92%	100,00%	100,00%	99,71%	100,00%	100,00%
17	10.47.210.18	HubNet 02	99,97%	99,92%	99,94%	100,00%	100,00%	99,99%	99,86%	100,00%	100,00%	99,37%	99,98%	100,00%
18	10.47.210.19	Hubpayment	99,87%	99,92%	98,07%	99,99%	99,98%	99,95%	99,95%	99,99%	100,00%	99,73%	99,98%	100,00%
19	10.47.210.23	DB Clone Simlala											100,00%	100,00%
20	10.47.210.30	AOL App Prod	99,88%	99,96%	99,93%	100,00%	100,00%	99,99%	99,95%	99,94%	100,00%	99,72%	99,99%	100,00%
21	10.47.210.31	AOL Dev DB	99,92%	99,91%	99,93%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	100,00%	100,00%	99,64%	100,00%	100,00%
22	10.47.210.32	10.47.210.32	99,94%	99,88%	99,88%	100,00%	100,00%	100,00%	99,91%	99,94%	100,00%	99,59%	100,00%	100,00%
23	10.47.210.100	Hubnet 01	99,94%	99,89%	99,92%	99,99%	100,00%	99,97%	99,94%	99,95%	100,00%	99,42%	100,00%	100,00%
24	192.168.5.48	Soa Dev	99,76%	99,34%	99,31%	99,22%	99,46%	99,61%	89,50%	99,91%	99,71%	99,99%	99,83%	100,00%
25	192.168.5.50	Domino 2	99,80%	99,26%	99,50%	99,56%	99,48%	99,72%	89,56%	99,85%	99,71%	100,00%	99,82%	100,00%
26	192.168.5.51	Domino 1 A	99,78%	99,35%	99,44%	99,36%	99,69%	99,78%	89,71%	99,84%	99,51%	99,99%	99,84%	100,00%
27	192.168.5.52	Domino 2 A	99,76%	99,27%	99,37%	99,57%	99,67%	99,61%	89,53%	99,89%	99,71%	100,00%	99,85%	100,00%
28	192.168.5.53	Domino 3	99,78%	99,22%	99,35%	99,43%	99,69%	99,77%	89,59%	99,91%	99,66%	99,99%	99,85%	99,95%
29	192.168.5.54	Domino 3 A	99,81%	99,36%	99,42%	99,46%	99,72%	99,78%	89,83%	99,92%	99,71%	99,99%	99,85%	100,00%
30	192.168.5.55	Traveler 4	99,70%	99,32%	99,32%	99,58%	99,59%	99,62%	89,54%	99,97%	99,47%	100,00%	99,84%	100,00%

31	192.168.5.56	Traveler 5	99,64%	99,32%	99,46%	99,54%	99,48%	99,66%	89,63%	99,94%	99,52%	100,00%	99,85%	100,00%
32	192.168.5.100	Domino 2	99,86%	99,32%	99,33%	99,41%	99,67%	99,73%	89,64%	99,92%	99,51%	99,99%	99,84%	100,00%
33	192.168.5.104	Eldap									99,96%	100,00%	99,83%	100,00%
34	192.168.5.111	Traveler 2	99,72%	99,24%	99,36%	99,49%	99,56%	42,14%	89,61%	99,69%	99,55%	99,99%	99,85%	99,98%
35	192.168.5.112	Inaportnet Barang App							99,93%	99,99%	99,71%	99,99%	99,84%	99,92%
36	192.168.5.113	Inaportnet Barang DB							99,95%	99,78%	99,71%	99,98%	99,83%	99,92%
37	192.168.5.126	Domino 1B									99,99%	99,99%	99,83%	100,00%
38	192.168.5.127	SMTP 1	99,80%	99,33%	99,54%	99,51%	99,63%	99,64%	89,58%	99,73%	99,71%	100,00%	99,84%	100,00%
39	192.168.5.137	SMTP 4	99,85%	99,35%	99,19%	99,54%	99,70%	99,68%	89,72%	98.89%	99,71%	99,98%	99,82%	100,00%
40	192.168.5.139	Traveler	99,76%	99,32%	99,43%	99,50%	99,59%	99,76%	89,62%	99,93%	99,58%	99,99%	99,84%	99,96%
41	192.168.68.14	LPSE DB	100,00%	99,13%	99,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	99,99%
42	192.168.68.16	Server LPSE APP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,93%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
43	192.168.71.16	Kapal Cloud										100,00%	100,00%	99,63%
44	192.168.71.17	LB Cloud											100,00%	99,63%
45	192.168.71.18	Check Mk Cloud											100,00%	99,63%
46	192.168.71.26	VTA Cloud										100,00%	100,00%	99,63%
47	192.168.72.2	Vsphere Host 2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,77%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
48	192.168.72.3	Vsphere Host 3	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
49	192.168.72.4	Vsphere Host 4	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
50	192.168.72.5	Vsphere Host 5	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
51	192.168.72.6	Vsphere Host 6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
52	192.168.72.7	Vsphere Host 7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
53	192.168.72.8	Vsphere Host 8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
54	192.168.72.9	Vsphere Host 9	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
55	192.168.72.10	Inaport App1	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	99,74%	98,53%	100,00%	99,91%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%
56	192.168.72.11	Inaport NFS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
57	192.168.72.12	LB 72.12	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
58	192.168.72.13	MySQL Management	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
59	192.168.72.14	Inaport App2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
60	192.168.72.15	MySQL DB 1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
61	192.168.72.16	MySQL DB 2	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
62	192.168.72.20	Simlala Service	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
63	192.168.72.42	BPM (dmgr. Managed PC.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
64	192.168.72.44	IIB Prod	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
65	192.168.72.45	IIB Prod	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
66	192.168.72.46	IIB Dev. WASND Node. BP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%
67	192.168.72.47	WASND (Dmgr. Managed	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
68	192.168.72.48	WAS ND Managed Node. I	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%

69	192.168.72.70	BackupFile-AOL_Prod	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
70	192.168.72.73	192.168.72.73	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
71	192.168.72.80	Simlala_Dev_Svr01	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	99,63%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
72	192.168.72.81	Simlala Dev 2					100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
73	192.168.72.82	Simlala V2e App 1	99,58%	100,00%	99,99%	100,00%	98,32%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
74	192.168.72.83	Simlala V2e App 2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,26%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
75	192.168.72.91	Inaport DB 4		100,00%	100,00%	100,00%	17,12%	100,00%	100,00%	99,96%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
76	192.168.72.92	Inaport DB 5		100,00%	100,00%	100,00%	17,12%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
77	192.168.72.93	Inaport DB 6						100,00%	100,00%	99,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
78	192.168.72.101	SOA DashBoard New	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%
79	192.168.72.111	Esxi X3850						100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
80	192.168.72.218	VmWare 218	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
81	192.168.72.219	VmWare 219	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
82	192.168.72.222	Inaport DB 1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,84%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
83	192.168.72.227	LB Inaport DB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%
84	192.168.72.228	Inaport App 3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
85	192.168.72.229	Inaport App 4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
86	192.168.72.231	Inaport DB 2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	99,99%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%
87	192.168.72.232	Inaport DB 3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	100,00%	99,93%	100,00%	100,00%	99,99%	99,99%
88	192.168.72.250	PNSBOX	100,00%	99,99%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%
89	192.168.72.254	DB Simlala 254					100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
90	192.168.74.4	DB Backup	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5,20%	100,00%
91	192.168.74.5	HP DL360 | R2-6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5,22%	100,00%
92	192.168.74.6	HP DL360 | R2-6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5,19%	99,98%
93	192.168.74.7	HP DL360 | R2-6	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5,19%	100,00%
94	192.168.74.8	HP DL360 Proxmox | R2-6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	79,69%	100,00%
95	192.168.74.9	HP DL360 | R2-6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5,25%	100,00%
96	192.168.74.10	Kapal Online	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99,91%
97	192.168.74.17	VTA Online	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99,91%
98	192.168.74.19	Monitoring Svr	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5,25%	100,00%
99	192.168.74.26	LB 74.26	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	79,53%	100,00%
100	192.168.74.27	Inaport Dev	100,00%	100,00%	100,00%	99,81%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	79,54%	100,00%
101	192.168.74.28	SSH Server	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	79,61%	100,00%
RATA-RATA KEHANDALAN TIAP BULAN			**99,94%**	**99,87%**	**99,87%**	**99,92%**	**98,05%**	**99,31%**	**98,55%**	**99,92%**	**99,94%**	**99,48%**	**89,42%**	**94,10%**
RATA-RATA KEHANDALAN SATU TAHUN			**98,20%**											

REKAPITULASI PERSENTASE KEHANDALAN APLIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Host	Alias	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES
1	10.0.48.37	pelaut.dephub.go.id *	99,95%	99,99%	100,00%	100,00%	99,97%	99,99%	99,93%	99,84%	100,00%	99,84%	99,99%	61,05%
2	10.0.48.38	Avsec *	99,91%	99,96%	100,00%	100,00%	99,96%	100,00%	99,91%	99,61%	99,99%	95,46%	98,81%	60,52%
3	10.0.48.39	Pas Bandara *	100,00%	99,98%	100,00%	100,00%	99,96%	100,00%	99,93%	99,69%	99,96%	99,22%	0,11%	31,00%
4	10.0.48.40	Sipencatar Server DB *	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	100,00%	99,93%	99,87%	100,00%	99,84%	0,00%	14,43%
5	10.0.48.41	Sipencatar Server App *	100,00%	99,97%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	99,91%	99,93%	100,00%	99,83%	0,00%	14,43%
6	10.0.48.206	Pelaut Baru *	99,59%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	100,00%	99,95%	99,52%	99,99%	94,94%	99,70%	60,47%
7	10.47.210.13	EAI DashBoard	99,85%	99,88%	99,92%	100,00%	99,98%	99,98%	99,94%	99,95%	100,00%	99,71%	100,00%	100,00%
8	10.47.210.16	PKB Online	99,92%	99,88%	99,93%	100,00%	99,98%	99,99%	99,95%	99,95%	100,00%	99,66%	99,98%	100,00%
9	10.47.210.19	Hubpayment	99,87%	99,92%	98,07%	99,99%	99,98%	99,95%	99,95%	99,99%	100,00%	99,73%	99,98%	100,00%
10	10.47.210.30	AOL App Prod	99,88%	99,97%	99,93%	100,00%	100,00%	99,99%	99,94%	99,94%	100,00%	99,73%	100,00%	100,00%
11	10.47.210.14	AOL DB Prod	99,89%	99,93%	99,93%	100,00%	99,98%	99,94%	99,94%	99,94%	100,00%	99,67%	99,98%	100,00%
12	10.47.210.18	HubNet 02	99,97%	99,92%	99,94%	100,00%	100,00%	99,99%	99,86%	100,00%	100,00%	99,37%	99,98%	100,00%
13	10.47.210.100	Hubnet 01	99,94%	99,89%	99,92%	99,99%	100,00%	99,97%	99,94%	99,95%	100,00%	99,42%	100,00%	100,00%
14	192.168.68.16	Server LPSE APP	100,00%	99,92%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15	192.168.68.14	LPSE DB	100,00%	99,13%	99,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	99,99%
16	192.168.72.10	Inaport App1	100,00%	99,96%	99,99%	100,00%	99,73%	98,53%	100,00%	99,90%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%
17	192.168.72.14	Inaport App2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18	192.168.72.228	Inaport App3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19	192.168.72.229	Inaport App4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20	192.168.72.222	Inaport DB 1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	99,84%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
21	192.168.72.231	Inaport DB 2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	99,99%	99,99%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%
22	192.168.72.232	Inaport DB 3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	99,96%	100,00%	99,93%	100,00%	100,00%	99,99%	99,99%
23	192.168.72.91	Inaport DB 4		100,00%	100,00%	100,00%	17,12%	100,00%	100,00%	99,96%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
24	192.168.72.92	Inaport DB 5		100,00%	100,00%	100,00%	17,12%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
25	192.168.72.93	Inaport DB 6						100,00%	100,00%	99,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
26	192.168.5.112	Inaportnet Barang App							99,93%	99,99%	99,71%	99,99%	99,84%	99,92%
27	192.168.5.113	Inaportnet Barang DB							99,95%	99,78%	99,71%	99,98%	99,83%	99,92%
28	192.168.72.20	Simlala Service	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
29	192.168.72.82	Simlala V2e App 1	99,58%	100,00%	99,99%	100,00%	98,27%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
30	192.168.72.83	Simlala V2e App 2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,20%	100,00%	100,00%	99,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
31	192.168.72.42	BPM (dmgr. Managed PC.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
32	192.168.72.44	IIB Prod	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
33	192.168.72.45	IIB Prod	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
34	192.168.72.46	IIB Dev. WASND Node. BP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%
35	192.168.72.47	WASND (Dmgr. Managed	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

36	192.168.72.48	WAS ND Managed Node. I	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
37	192.168.72.254	DB Simlala 254					0,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
38	192.168.72.101	SOA DashBoard New	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	99,99%	99,96%
39	192.168.74.10 / 192.168.71.16	Kapal Online / Kapal Clou	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,63%
40	192.168.74.17 / 192.168.71.26	VTA Online / VTA Cloud *	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,63%
RATA-RATA KEHANDALAN TIAP BULAN			**99,95%**	**99,95%**	**99,92%**	**100,00%**	**84,60%**	**99,95%**	**99,97%**	**99,92%**	**99,98%**	**99,66%**	**92,45%**	**91,02%**
RATA-RATA KEHANDALAN SATU TAHUN			**97,28%**											

* Ada proses migrasi server antar data center pada bulan desember / pada bulan november monitoring server pindah ke cloud tidak bisa konek ke segment dkppu

** Aplikasi produksi pindah dari mesin bpsdm ke cloud pada bulan november dan desember

REKAPITULASI PERSENTASE KEHANDALAN JARINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Host	Alias	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES
1	4700409-42765	BH Pusat Kemenhub	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Availability Time (detik)	2.678.400	2.419.200	2.678.400	2.592.000	2.678.400	2.592.000	2.678.400	2.678.400	2.592.000	2.678.400	2.592.000	2.678.400
2	4700409-0023119220	AON	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Availability Time (detik)	2.678.400	2.419.200	2.678.400	2.592.000	2.678.400	2.592.000	2.678.400	2.678.400	2.592.000	2.678.400	2.592.000	2.678.400
3	4700409-0027623952	COLO Stra DC PUSTIKOM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Availability Time (detik)	2.678.400	2.419.200	2.678.400	2.592.000	2.678.400	2.592.000	2.678.400	2.678.400	2.592.000	2.678.400	2.592.000	2.678.400
4	4700409-0029087583	DITKUPPU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Availability Time (detik)	2.678.400	2.419.200	2.678.400	2.592.000	2.678.400	2.592.000	2.678.400	2.678.400	2.592.000	2.678.400	2.592.000	2.678.400
RATA-RATA KEHANDALAN TIAP BULAN			**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
RATA-RATA KEHANDALAN SATU TAHUN			**100,00%**											

PERSENTASE KEHANDALAN SISTEM INFORMASI - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERSENTASE KEHANDALAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES
INFRASTRUKTUR (SERVER)	99,94%	99,87%	99,87%	99,92%	98,05%	99,31%	98,55%	99,92%	99,94%	99,48%	89,42%	94,10%
INFRASTRUKTUR (SERVER) TRIWULAN			99,90%			99,49%			99,49%			98,20%
APLIKASI	99,95%	99,95%	99,92%	100,00%	84,60%	99,95%	99,97%	99,92%	99,98%	99,66%	92,45%	91,02%
APLIKASI TRIWULAN			99,94%			97,40%			98,25%			97,28%
JARINGAN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
JARINGAN TRIWULAN			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
CAPAIAN TRIWULAN			**99,95%**			**98,96%**			**99,25%**			**98,49%**



LAMPIRAN 30

Hasil SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2018

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : UM 006/5/8 PHB 2019
Klasifikasi : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Penyampaian Hasil *Quality Assurance* Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2018 dan Persiapan Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019

Jakarta, 28 Januari 2019

Kepada :
Yth. **(Daftar Nama Terlampir)**

di

JAKARTA

1. Menindaklanjuti surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: SP-2/D1/03/02/2019 tanggal 3 Januari 2019 perihal Penyampaian Hasil *Quality Assurance* Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2018, disampaikan bahwa hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2018 berada pada **"Level 3"** atau **"terdefinisi"** dengan nilai sebesar **"3,192"** dan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Perhubungan (KP 881 Tahun 2018) yaitu **"2"** atau **"berkembang"**
2. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana untuk target tingkat maturitas sesuai Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 dan KP Nomor 881 Tahun 2018 tetntang Reviu Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 adalah **"Level 3"** dengan metode penilaian berdasarkan modus pada seluruh unit kerja Eselon II dan Eselon III, sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diharapkan Saudara untuk dapat mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 ke seluruh unit kerja Eselon II dan III di unit kerja masing-masing sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih

A.n SEKRETARIS JENDERAL
Kepala Biro Perencanaan

GEDE PASEK SUARDIKA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630717 198903 1 002

Tembusan :
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal.

Lampiran Surat Kepala Biro Perencanaan
Nomor : UM 006/5/8 PhB 2019
Tanggal : 28 Januari 2019

Kepada Yth. :

1. Inspektorat Jenderal;
2. Dirjen Perhubungan Darat;
3. Dirjen Perkeretaapian;
4. Dirjen Perhubungan Laut;
5. Dirjen Perhubungan Udara;
6. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
7. Kepala Badan Litbang Perhubungan, dan;
8. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Lampiran Surat Kepala Biro Perencanaan
Nomor : UM 006/5/8 PHB 2019
Tanggal : 28 Januari 2019

Kepada Yth. :

1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
2. Kepala Biro Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum;
4. Kepala Biro Umum;
5. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
6. Kepala Biro Layanan dan Pengelolaan BMN;
7. Kepala Pusat Fasilitasi Kemtraan dan Kelembagaan Internasional;
8. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
9. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan;
10. Ketua Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
11. Ketua Mahkamah Pelayaran;
12. Sesitjen Jenderal;
13. Sesditjen Perhubungan Darat;
14. Sesditjen Perkeretaapian;
15. Sesditjen Perhubungan Laut;
16. Sesditjen Perhubungan Udara;
17. Sesbadan Pengembangan SDM Perhubungan;
18. Sesbadan Litbang Perhubungan, dan;
19. Sesbadan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
Jl. Pramuka No 33 Jakarta-Timur 13120
Telepon 85910031 (Hunting) Ext 0626 Fax 85906456

Nomor : SP-2 /D1/03/02/2019 3 Januari 2019
Lampiran : Satu laporan
Perihal : Laporan Hasil *Quality Assurance* Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Perhubungan Tahun 2018.

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
di
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil *Quality Assurance* Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Nomor LAP-687/D103/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan pokok-pokok simpulan sebagai berikut:

1. Hasil penilaian terhadap penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2016 terhadap 9 (sembilan) Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada kategori " **level 3"** atau **"terdefinisi"** dengan nilai sebesar **"3,192"**.
2. Kementerian Perhubungan telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk sebagian besar kegiatan pokok pada 9 (sembilan) Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Kementerian Perhubungan telah mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur atas sebagian besar kegiatan pokok pada 9 (sembilan) Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan.
4. Kementerian Perhubungan belum melakukan evaluasi mandiri atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas sebagian besar kegiatan pokok pada 9 (sembilan) Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan secara berkala dan terdokumentasi.
5. Kementerian Perhubungan belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan pokok pada 9 (sembilan) Unit Kerja

Eselon I Kementerian Perhubungan yang didukung oleh pemantauan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi komputer.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyarankan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan agar:

1. Mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat pada seluruh kegiatan pokok atau integral dengan proses kegiatan lainnya.
2. Melakukan evaluasi mandiri secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian untuk seluruh kegiatan pokok pada 9 (sembilan) Eselon I Kementerian Perhubungan dan mendokumentasikannya.
3. Melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pokok pada 9 (sembilan) Eselon I yang didukung oleh pemantauan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi komputer.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,

DEPUTI KEPALA BPKP

Nurdin
NIP 19591212 198112 1 001

Tembusan:
Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan